PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 telah dilakukan penjaminan kualitas yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Berita Acara Penjaminan Kualitas tanggal 18 Januari 2021.

BERITA ACARA
KEGIATAN PENJAMINAN KUALITAS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2017-2022
Nomor : 761-1.712.2

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balaikota DKI Jakarta, telah dilakukan Penjaminan Kualitas secara mandiri yang dilakukan oleh Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1157 Tahun 2020 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 bersama dengan penyusun Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS, Gubernur dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup yaitu Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Penjaminan kualitas secara mandiri ini telah disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan rincian penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara kegiatan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Jakarta, 18 Januari 2021

Ketua Tim Pembuat KLHS Sekretaris Daerah,	Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Gubernur,
Marullah Matali	Anies Baswedan, Ph.D
NIP. 196511271996031003	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 – 2022

Jakarta, Januari 2021

PENYUSUN:

Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
sesuai SK . Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1157 Tahun 2020
tentang Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022

Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I	**Wakil Ketua II**
Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris I	**Sekretaris II**	**Sekretaris III**
Kabid. Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup	Kabid. Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Bappeda	Kasubbid. Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Bappeda

Anggota merupakan perwakilan lintas perangkat daerah tingkat provinsi yang meliputi:

- Bappeda
- DLH
- BPBD
- BPBUMD
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Dinas PKP
- Dinas SDA
- Dinas Bina Marga
- Dinas KPKP
- Dinas PPAPP
- Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- Dinas PRKP
- Dinas NakerTransGi
- Biro PLH
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda
- Sekretariat TPB (SDGs) Provinsi DKI Jakarta
- Unsur TGUPP

TENAGA AHLI PENDAMPING

- Sri Handayani
- Fahmi Nur Amalia
- Hijri Agista R.

Disclaimer:

Dokumen KLHS untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 disusun berdasarkan data dan informasi yang didapatkan pada saat kajian ini disusun dari bulan Agustus – November 2020. Upaya optimal telah dilakukan untuk memberikan informasi dan data terkini sebagaimana diidentifikasi bersama dengan OPD terkait. Perlu dipahami bahwa data dan informasi tersebut dapat mengalami perubahan di masa mendatang. Dokumen KLHS ini milik Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta, untuk reproduksi atau penggunaan, pemanfaatan oleh pihak lain dipersilahkan menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku wakil ketua tim pembuat KLHS.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 ini disusun untuk mendokumentasikan proses dan hasil dari awal hingga akhir.

Pada Bab 1 Pendahuluan menjelaskan latar belakang, maksud, dasar hukum, tujuan, sasaran serta uraian tentang tahapan penyelenggaraan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Bab 2 Perkembangan Fungsi Wilayah DKI Jakarta memuat tentang sejarah perkembangan tata ruang di wilayah DKI Jakarta dari masa ke masa.

Pada Bab 3 Kondisi Provinsi DKI Jakarta menjelaskan tentang kondisi geografis dan fisik wilayah mencakup wilayah administrasi dan fungsional. Topografi dan geologi, hidrologi, klimatologi, ecoregion serta penutup lahan. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kondisi fiskal dan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bab 4 Gambaran Kondisi Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta mencakup profil 6 (muatan) KLHS yaitu kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk air dan pangan, dampak risiko lingkungan hidup, kinerja layanan ekosistem/jasa lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, potensi keanekaragaman hayati serta kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim.

Bab 5 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjelaskan tentang kondisi umum capaian target TPB, analisis gap capaian target TPB serta capaian indikator TPD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bab 6 Rumusan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta, merupakan proses identifikasi dan perumusan isu prioritas berdasarkan gambaran kondisi lingkungan hidup pada Bab 4 serta analisis capaian TPB pada Bab 5 yang kemudian disepakati melalui berita acara konsultasi publik 1 pada 14 Agustus 2020. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Provinsi DKI Jakarta yang disepakati yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan yang Berkualitas, TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak dan TPB 8 Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Bab 7 Skenario Pencapaian TPB Prioritas merupakan rumusan skenario dalam mendukung upaya pencapaian target TPB dengan melihat keterkaitan antar TPB prioritas dengan TPB lainnya yang kemudian dirumuskan skenario daya dukung, skenario capaian TPB dan upaya tambahan serta skenario sumber daya pembiayaan. Hasil dari skenario pencapaian TPB dirumuskan lebih lanjut berupa rekomendasi KLHS pada Bab 8 Rekomendasi KLHS mencakup arahan kebijakan dan arahan program serta telaahannya pada muatan perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta yaitu pada Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi. Pada Bab 8 juga menjelaskan tentang integrasi rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan Penelaahan KLHS.

Bab 9 Penjaminan Kualitas menjelaskan tentang proses penilaian mandiri KLHS oleh penyusun KRP dan disetujui oleh Kepala Daerah. Penjaminan kualitas akhir dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 dan disepakati melalui Berita Acara Hasil Penjaminan Kualitas. Sementara Bab 10 Tindak Lanjut berisi tentang poin-poin catatan yang perlu dilakukan pada penyusunan KLHS di periode berikutnya maupun hal-hal lain yang terkait dalam penyusunan KLHS.

Dengan terselesaikannya proses dan hasil KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berharap prinsip Pembangunan Berkelanjutan dapat terwujud melalui berbagai perencanaan strategis.

Jakarta, 29 Maret 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Anies Baswedan, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR ISTILAH DAN AKRONIM ..... **xiv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1.1**
1.1 Latar Belakang 1.1
1.2 Dasar Hukum 1.2
1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS 1.4
1.4 Tahapan Penyelenggaraan KLHS 1.4
1.5 Ringkasan Perbedaan KLHS Perubahan RPJMD dengan KLHS RPJMD 2017-2022 ..... 1.9
1.6 Sistematika Dokumen KLHS 1.9
BAB 2 PERKEMBANGAN FUNGSI WILAYAH DKI JAKARTA **2.1**
BAB 3 KONDISI PROVINSI DKI JAKARTA **3.1**
3.1 Kondisi Geografis dan Fisik 3.1
3.1.1 Wilayah Administrasi dan Wilayah Fungsional 3.1
3.1.2 Topografi dan Geologi 3.3
3.1.3 Hidrologi 3.6
3.1.4 Klimatologi 3.8
3.1.5 Ekoregion 3.9
3.1.6 Penutup Lahan 3.12
3.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi 3.14
3.2.1 Kependudukan (Demografi) 3.14
3.2.2 Pertumbuhan PDRB 3.16
3.3 Kondisi Fiskal dan Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta 3.17
3.3.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan 3.17
3.3.2 Peran Para Pihak 3.18
BAB 4 GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA **4.1**
4.1 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup 4.1
4.1.1 Daya Dukung Air 4.1
4.1.2 Daya Dukung Pangan 4.4
4.2 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup 4.6
4.3 Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan 4.10
4.3.1 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air 4.12
4.3.2 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air 4.12

4.3.3 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara 4.13
4.3.4 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir 4.13
4.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 4.14
4.5 Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati 4.17
4.6 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim 4.19
BAB 5 ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA OPD DI PROVINSI DKI JAKARTA 5.1
5.1 Kondisi Umum Capaian Target TPB 5.1
5.1.1 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Pembangunan Sosial 5.3
5.1.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi 5.5
5.1.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup 5.7
5.1.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan 5.10
5.2 Analisis Gap Target Capaian TPB 5.11
5.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah 5.12
BAB 6 RUMUSAN ISU PRIORITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB) PROVINSI DKI JAKARTA 6.1
6.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas 6.1
6.1.1 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan 6.1
6.1.2 Prioritasi Isu TPB 6.10
6.2 Analisis Gap dan/atau Kesenjangan dari Kebijakan dan Strategi pada RPJMD 2017 - 2022 terhadap Pencapaian TPB 6.29
BAB 7 SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS DI PROVINSI DKI JAKARTA 7.1
7.1 Keterkaitan Antar TPB Prioritas dengan TPB lainnya 7.1
7.2 Skenario Daya Dukung 7.10
7.3 Skenario Capaian TPB dan Upaya Tambahan 7.16
7.3.1 Skenario TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 7.16
7.3.2 Skenario TPB 8 Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi 7.19
7.3.3 Skenario TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak 7.24
7.3.4 Skenario TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas 7.33
7.3.5 Skenario TPB 1: Tanpa Kemiskinan 7.36
7.3.6 Skenario TPB 2: Tanpa Kelaparan 7.39
7.4 Skenario Sumber Daya Pembiayaan 7.40
7.4.1 Potensi Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah 7.40
7.4.2 Potensi Sumber Pembiayaan lain Pemerintah Daerah 7.59
7.4.3 Potensi Dukungan Mitra Pembangunan 7.59
7.4.4 Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) 7.61
BAB 8 REKOMENDASI KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 8.1

8.1 Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 ..... 8.1
8.2 Arahan Kebijakan dan Arahan Program untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022 8.5
8.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta 8.27
8.4 Penelaahan KLHS dalam Dokumen Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 ..... 8.80
BAB 9 PENJAMINAN KUALITAS 9.1
BAB 10 TINDAK LANJUT 10.1
DAFTAR PUSTAKA xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1157 Tahun 2020 tentang Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022 ..... L.1
Lampiran 2. Kerangka Acuan Kerja Pembuatan dan Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017 - 2022 ..... L.8
Lampiran 3. Hasil Konsultasi Rancangan Awai Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 ..... L.12
Lampiran 4. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Pembangunan Berkelanjutan 14 Agustus 2020 ..... L.13
Lampiran 5. Hasil Polling Konsultasi Publik -1 ..... L.16
Lampiran 6. Relevansi TPB Dengan Indikator Sasaran RPJMD 2017-2022 ..... L.17
Lampiran 7. Berita Acara Konsultasi Publik 2. Perumusan Alternatif L.19
Lampiran 8. Berita Acara Integrasi Rekomendasi KLHS L.23
Lampiran 9. Berita Acara Penjaminan Kualitas L.24
Lampiran 10. Kompetensi Tenaga Ahli L.25
Lampiran 11. Berita Acara Pra Validasi (1 Maret 2021) L.28
Lampiran 12. Target dan Indikator TPB (Form D1) L.29
Lampiran 13. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah (Form D2) L.56
Lampiran 14. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non Pemerintah (Form D3) L.230
Lampiran 15. Catatan Perbaikan Laporan KLHS Perubahan RPJMD DKI hasil Pra Validasi L.285

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sinkronisasi Proses Penyusunan KLHS dan Penyusunan Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 ..... 1.5
Gambar 1.2 Tahapan Pembuatan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 ..... 1.5
Gambar 2.1 Struktur Kota Batavia 2.3
Gambar 2.2 Struktur Kota Batavia 2.4
Gambar 2.3 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia 2.5
Gambar 2.4 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi 2.6
Gambar 2.5 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur 2.8
Gambar 3.1 Batas Administrasi Provinsi DKI Jakarta 3.1
Gambar 3.2 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi 3.2
Gambar 3.3. Wilayah Fungsional berdasarkan DAS Provinsi DKI Jakarta 3.3
Gambar 3.4 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur 3.4
Gambar 3.5 Peta Karakteristik Keteknikan Tanah dan Batuan 3.5
Gambar 3.6 Peta Aliran Sungai, Kanal dan Flood Way 3.7
Gambar 3.7 Ekoregion Provinsi DKI Jakarta wilayah daratan 3.10
Gambar 3.8 Peta Ekoregion Laut DKI Jakarta 3.11
Gambar 3.9 Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014 ..... 3.13
Gambar 3.10 Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 ..... 3.14
Gambar 3.11 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ..... 3.15
Gambar 3.12 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta 3.16
Gambar 3.13 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta 3.17
Gambar 4.1 Wilayah DAS Provinsi DKI Jakarta 4.1
Gambar 4.2 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta 4.2
Gambar 4.3 Daya Dukung Pangan DKI Jakarta berdasarkan Kecukupan Nilai Kalori 4.6
Gambar 4.4 Sampah Terangkut ke TPST Bantar Gebang Tahun 2018-2020 ..... 4.7
Gambar 4.5 Sebaran Timbulan Sampah Domestik DKI Jakarta Tahun 2019 ..... 4.8
Gambar 4.6 Perkiraan Timbulan Sampah Domestik berdasarkan Populasi Penduduk Tahun 2019 ..... 4.8
Gambar 4.7 Limbah B3 Medis Tahun 2020 ..... 4.9
Gambar 4.8 Profil Kinerja Jasa Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam Lingkup Wilayah Fungsional DAS 4.11
Gambar 4.9 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2018 ..... 4.12
Gambar 4.10 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air DKI Jakarta Tahun 2018 ..... 4.12
Gambar 4.11 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta Tahun 2018 ..... 4.13
Gambar 4.12 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta Tahun 2018 ..... 4.14
Gambar 4.13 Pola Ruang Kota di Provinsi DKI Jakarta 4.15
Gambar 4.14 Ketidaksesuaian pemanfataan sumber daya alam dengan arahan pembangunan 4.16
Gambar 4.15 Peta Sebaran Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta 4.18
Gambar 4.16 Identifikasi Permasalahan Kehati di Provinsi DKI Jakarta 4.19
Gambar 4.17 Status dan Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta 4.20
Gambar 4.18 Proyeksi Emisi GRK Baseline dan Target Reduksi Emisi GRK di Tahun 2030 ..... 4.21
Gambar 4.19 Capaian Reduksi Emisi GRK dari Aksi-Aksi Mitigasi di Tahun 2016-2018 terhadap Target Reduksi Emisi GRK di Tahun 2030 ..... 4.22
Gambar 4.20 Proyeksi Potensi Sebaran Bahaya Rawan Banjir DKI Jakarta Tahun 2030 ..... 4.23
Gambar 5.1 Komposisi Target dan Indikator untuk 17 TPB di DKI Jakarta 5.1
Gambar 5.2 Capaian Umum TPB DKI Jakarta 5.2
Gambar 5.3 Capaian TPB Pilar Pembangunan Sosial 5.3
Gambar 5.4 Capaian Target Indikator TPB Pilar Ekonomi 5.5

Gambar 5.5 Capaian TPB Pilar Lingkungan Hidup 5.7
Gambar 5.6. Capaian umum TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola 5.10
Gambar 5.7 Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola 5.11
Gambar 5.8. Skema Analisis Gap Target 5.11
Gambar 5.9. Hasil Analisis Gap/Target 5.11
Gambar 5.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran OPD terhadap Capaian TPB 5.13
Gambar 6.1 Skema Identifikasi Isu Strategis Pembangungan Berkelanjutan 6.1
Gambar 6.2 Gambaran Capaian Target TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ..... 6.2
Gambar 6.3 Isu Prioritas TPB berdasarkan Uji Publik 1 ..... 6.11
Gambar 6.4 Alur Penentuan Isu PB Prioritas 6.11
Gambar 6.5 Isu-isu yang disoroti dalam TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera 6.12
Gambar 6.6 Sebaran Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Indonesia 6.12
Gambar 6.7 Sebaran Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 DKI Jakarta 6.13
Gambar 6.8 Kaitan Penerapan Kebijakan PSBB terhadap Kasus Baru COVID-19 & Perekonomian DKI Jakarta 6.13
Gambar 6.9 Prediksi Kurva Pandemi COVID-19 di Indonesia 6.14
Gambar 6.10 Kasus Kekerasan Anak di Indonesia selama Pandemi COVID-19 ..... 6.18
Gambar 6.11 Kasus Kunjungan ke Layanan Kesehatan karena Kesehatan Mental DKI Jakarta Tahun 2020 ..... 6.19
Gambar 6.12 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta per Quartal Tahun 2019-2020 ..... 6.19
Gambar 6.13 Isu-isu yang disoroti dalam TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak 6.21
Gambar 6.14 Persentase Rumah Tangga DKI Jakarta yang Memanfaatkan Sumber Air Minum 6.22
Gambar 6.15 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (%) 6.22
Gambar 6.16 Peta Penurunan Tanah Jakarta 1974-2010 ..... 6.23
Gambar 6.17 APK PAUD DKI Jakarta Periode 2019/2020 ..... 6.24
Gambar 6.18 Data Uji Kompetensi Guru Tahun 2019 ..... 6.25
Gambar 6.19 Persentase Penduduk Miskin tingkat Provinsi, Pulau dan Nasional Tahun 2012-2019 ..... 6.26
Gambar 6.20 Hubungan Keterkaitan TPB 8, TPB 1 dan TPB 2 ..... 6.27
Gambar 6.21 Tren Kasus Balita Kekurangan Gizi yang Mendapat Perawatan Tahun 2015-2019 ..... 6.28
Gambar 6.22 Status Gizi Balita berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB 6.28
Gambar 6.23. Matriks Resiko Ketercapaian Indikator Sasaran RPJMD 2017-2022 ..... 6.31
Gambar 6.24. Kerangka Pikir KLHS Perubahan RPJMD 6.35
Gambar 7.1. Skema Proses Perumusan Alternatif Skenario 7.1
Gambar 7.2. Lingkup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7.2
Gambar 7.3. Interlink TPB Prioritas dengan Target TPB lain 7.3
Gambar 7.4. Interlink TPB 3 dengan Target TPB lainnya 7.4
Gambar 7.5. Interlink TPB 8 dengan Target TPB lainnya 7.5
Gambar 7.6. Interlink TPB 6 dengan Target TPB lainnya 7.7
Gambar 7.7. Interlink TPB 4 dengan Target TPB lainnya 7.8
Gambar 7.8. Interlink TPB 1 dengan Target TPB lainnya 7.9
Gambar 7.9. Interlink TPB 2 dengan Target TPB lainnya 7.10
Gambar 7.10 Skenario Peningkatan Kuantitas Air DKI Jakarta Tahun 2022 ..... 7.11
Gambar 7.11 Penurunan Lahan Pertanian DKI Jakarta Tahun 2000-2018 ..... 7.12
Gambar 7.12. Proyeksi dan Target Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 7.18
Gambar 7.13. Proyeksi dan Target Persentase Layanan Kesehatan yang memiliki SDM Sesuai Standar 7.19
Gambar 7.14. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta 7.20
Gambar 7.15. Proyeksi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (Februari) 7.21

Gambar 7.16. Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Nasional dan DKI Jakarta 7.21
Gambar 7.17. Proyeksi dan Target Jumlah Wisatawan Asing dan Mancanegara 7.22
Gambar 7.18 Gambaran dan Skenario Peningkatan Indeks Kualitas Air DKI Jakarta 7.25
Gambar 7.19 Peta Sebaran Kondisi (Status Mutu Air) berdasarkan Hasil Pemantauan di 90 Titik Pantau Sungai 7.26
Gambar 7.20. Rencana Zona Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Pengolahan Sistem Terpusat 7.28
Gambar 7.21. Proyeksi dan Target Indikator Persentase Sekolah terakreditasi A 7.34
Gambar 7.22. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik 7.35
Gambar 7.23. Angka Kemiskinan DKI Jakarta 7.36
Gambar 7.24. Angka Kemiskinan Nasional dan DKI Jakarta 7.37
Gambar 7.25. Proyeksi dan Target Persentase Rumah Tangga Kumuh DKI Jakarta 7.38
Gambar 7.26. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah Minimum Nasional dan DKI Jakarta 7.39
Gambar 7.27. Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial 2018-2020 ..... 7.59
Gambar 7.28. Ilustrasi Singkat Kontribusi Mitra Pembangunan pada 6 (enam) TPB Prioritas 7.60
Gambar 7.29. Kerangka Kerja JDCN 7.62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 1.6
Tabel 1.2. Ringkasan Perbedaan KLHS RPJMD lama dan Perubahan 1.9
Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta 3.2
Tabel 3.2 Dimensi Aliran Sungai, Kanal, dan Flood Way 3.7
Tabel 3.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta 3.8
Tabel 3.4 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019 ..... 3.8
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 ..... 3.14
Tabel 3.6 Komposisi Penduduk DKI Jakarta menurut Jenis Kelamin 3.15
Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta 3.16
Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012–2019 (Juta Rupiah) 3.18
Tabel 3.9. Kontribusi Mitra Pembangunan 3.18
Tabel 4.1 Ketersediaan Air pada 5 Wilayah DAS 4.2
Tabel 4.2 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 ..... 4.3
Tabel 4.3 Daftar Kalori Bahan Pangan 4.4
Tabel 4.4 Ketersediaan Pangan DKI Jakarta berdasarkan Nilai Kalori 4.5
Tabel 4.5 Angka Kecukupan Energi 4.5
Tabel 4.6 Kebutuhan Pangan DKI Jakarta berdasarkan Nilai Kalori 4.6
Tabel 4.7 Sektor Unggulan di DKI Jakarta 4.16
Tabel 5.1 Kontribusi OPD pada Target TPB 5.14
Tabel 6.1 Identifikasi Awal Isu Strategis berdasarkan Capaian Target Indikator TPB yang Perlu Perhatian 6.2
Tabel 6.2 Pertimbangan dalam Prioritasi 17 TPB 6.6
Tabel 6.3 Keterkaitan TPB dengan Perencanaan Strategis dan Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup 6.7
Tabel 6.4 TPB Prioritas berdasarkan kesepakatan FGD Perumusan Isu Prioritas tertanggal 12 Agustus 2020 ..... 6.7
Tabel 6.5 Fasilitas Layanan Kesehatan di DKI Jakarta 6.15
Tabel 6.6 Fasilitas Layanan Kesehatan Jajaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ..... 6.16
Tabel 6.7 Sumber Daya Manusia Kesehatan di DKI Jakarta 6.16
Tabel 6.8 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020 ..... 6.17
Tabel 6.9. Relevansi Indikator Sasaran RPJMD dengan TPB 6.32
Tabel 6.10. Hasil Evaluasi Paruh Waktu terhadap TPB Prioritas 6.34
Tabel 7.1. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 3 ..... 7.3
Tabel 7.2. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 8 ..... 7.4
Tabel 7.3. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 6 ..... 7.6
Tabel 7.4. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 4 ..... 7.7
Tabel 7.5. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 1 ..... 7.9
Tabel 7.6. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 2 ..... 7.10
Tabel 7.7 Skenario Daya Dukung Lahan untuk Pangan Tahun 2022 ..... 7.13
Tabel 7.8. Proyeksi Makroekonomi Jakarta 2018-2022 ..... 7.20
Tabel 7.9 Bidang Urusan Pemerintahan dan Institusinya 7.40
Tabel 7.10 OPD Kunci pada TPB 3 beserta Alokasi Anggarannya 7.42
Tabel 7.11 OPD Kunci pada TPB 8 beserta Alokasi Anggarannya 7.47
Tabel 7.12 OPD Kunci pada TPB 6 beserta Alokasi Anggarannya 7.49
Tabel 7.13 OPD Kunci pada TPB 4 beserta Alokasi Anggarannya 7.51
Tabel 7.14 OPD Kunci pada TPB 1 beserta Alokasi Anggarannya 7.53
Tabel 7.15 OPD Kunci pada TPB 2 beserta Alokasi Anggarannya 7.57

Tabel 8.1. Matriks Perbandingan Kebijakan RPJMN, RPJMD dan Tinjauan KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022 ..... 8.2
Tabel 8.2. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 3 ..... 8.5
Tabel 8.3. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 8 ..... 8.6
Tabel 8.4. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 4 ..... 8.7
Tabel 8.5. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 6 ..... 8.8
Tabel 8.6. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 1 ..... 8.9
Tabel 8.7. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 2 ..... 8.10
Tabel 8.8. Target dan Indikator TPB (Form D1) 8.11
Tabel 8.9. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah (D2) untuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak 8.14
Tabel 8.10. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non-Pemerintah (D3) untuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak 8.25
Tabel 8.11. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 1 ..... 8.28
Tabel 8.12. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 2 ..... 8.33
Tabel 8.13. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 3 ..... 8.41
Tabel 8.14. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 4 ..... 8.43
Tabel 8.15. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 5 ..... 8.45
Tabel 8.16. Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 ..... 8.48
Tabel 8.17. Integrasi dan Arahan Program Prioritas 8.64
Tabel 8.18. Penelaahan Integrasi KLHS dalam Dokumen RPJMD (Ranwal hingga Ranhir) 8.81
Tabel 9.1. Penjaminan Kualitas KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 ..... 9.1

DAFTAR ISTILAH DAN AKRONIM

AKE	:	Angka Kebutuhan Energi
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	:	Alat Perlindungan Diri
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
B3	:	Bahan Berbahaya dan Beracun
Bappeda	:	Badan Perencanaan Daerah
BAU	:	*business as usual*
BI	:	Bank Indonesia
BPLHD	:	Badan Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CAT	:	Cadangan Air Tanah
COVID-19	:	Corona Virus Desease 2019
D3TLH	:	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
FGD	:	*Focus Group Discussion*
GRK	:	Gas Rumah Kaca
ITF	:	Intermediate Treatment Facility
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KRP	:	Kebijakan, Rencana dan/atau Program
LH	:	Lingkungan Hidup
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	:	Peraturan Dalam Negeri
PHBS	:	Pola Hidup Bersih dan Sehat
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
Ranperda	:	Rancangan Peraturan Daerah
Ranwal	:	Rancangan Awal
Ranhir	:	Rancangan Akhir
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TPST	:	Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UU	:	Undang-Undang

BAB 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis sebagai Ibukota Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi atas peran tersebut menempatkan DKI Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintahan, aktivitas perekonomian tingkat regional hingga internasional, dan kegiatan politik internasional. Banyaknya beban kegiatan tersebut menjadikan pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai permasalahan dan tantangan yang lebih kompleks. Meskipun tidak dapat dipungkiri, hal tersebut juga menjadi peluang dan potensi yang besar bagi perkembangan DKI Jakarta.

Saat ini, Jakarta telah menjadi salah satu episentrum penyebaran virus corona dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Corona virus ditemukan pada manusia di Wuhan Cina, pada Desember 2019, yang kemudian ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi global mengingat sebaran virus ini menjangkiti banyak negara. COVID-19 menjadi masalah di seluruh dunia karena dampak virus tidak dapat mereda dalam waktu singkat.

Pasal 342 ayat 1 huruf c dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Perubahan mendasar yang terjadi antara lain wabah pandemi COVID-19 dengan DKI Jakarta sebagai epi centrum, perlambatan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup dalam (triwulan II/2020 pertumbuhan ekonomi Jakarta (y on y) kontraksi minus 8,22%, terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir), terjadinya perubahan arah kebijakan nasional "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" merupakan tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19.

Untuk melakukan Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan Dirjen Bina Bangda. Hasil konsultasi dimuat pada Lampiran 3

Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi oleh Kota Jakarta membawa Kota Jakarta kepada KONSEP REGENERASI JAKARTA 2030 (*Urban City Resilience*), antara lain a). Dampak dari kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada kendaraan bermotor seperti perluasan masif jalan dan jalan tol yang berakibat pada polusi lingkungan, kemacetan lalu lintas, dan kurangnya kualitas transportasi publik; b) Kurangnya investasi pada perbaikan layanan dasar yang berakibat pada: terbatasnya akses air bersih, disintegrasi manajemen sampah dan limbah, kurangnya supply hunian terjangkau, banjir dan penurunan permukaan tanah. Terdapat 3 (tiga) isu infrastruktur strategis daerah yang utama yaitu Transportasi (peningkatan modal share penumpang transportasi umum); Pengendalian Banjir (Antisipasi banjir, genangan, dan Rob); Air Bersih, Sanitasi & Pengelolaan Sampah.

Diperlukan penerapan tatanan hidup normal baru untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang demikian, paling tidak sampai vaksin virus ditemukan dan dapat diaplikasikan pada masyarakat. Jakarta dengan segala peran strategisnya secara nyata terimbas dari situasi tersebut dan turut mempengaruhi kestabilan perekonomian nasional. Demi menekan penyebaran COVID-19 dalam skala lebih luas, Pemerintah dan Pemprov mengambil langkah pembatasan kegiatan di luar rumah yang dituangkan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya, banyak sektor terdampak terutama dari aktivitas perekonomian mengalami stagnasi bahkan kemunduran yang signifikan, yang mengarah pada terjadinya krisis ekonomi.

Untuk menyesuaikan perubahan mendasar yang terjadi akibar COVID-19 (yang antara lain ditunjukan dengan perubahan arah kebijakan nasional, terpuruknya kegiatan ekonomi[1]), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi perubahan kebijakan jangka menengah dalam rangka pemulihan dan pemantapan pembangunan pasca pandemi (*future normal*) melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

[1] https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/490/perekonomian-jakarta-terhempas-ke-titik-terendah.html

DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Hal ini dibenarkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 342.

Perubahan RPJMD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai tahun 2022. Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 yang dirancang untuk pemulihan dan pemantapan pembangunan pasca pandemi, tidak serta merta fokus pada satu pilar pembangunan ekonomi saja.

Telah diidentifikasi koridor-koridor yang dapat mendampingi pengambilan arahan kebijakan dari berbagai aspek melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 32/2009 yang mewajibkan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi:

1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Telah dijelaskan pula pada pasal 344 Permendagri No 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RPJPD dan RPJMD dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 **berlaku** *mutatis mutandis* terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Selain itu pada Pasal 47 ayat (3) Permendagri No 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJMD mencakup KLHS.

Adapun tata cara pelaksanaan KLHS telah diatur secara rinci dalam PP No. 46/2016, PermenLHK No. 69/2017 dan Permendagri No. 7/2018. Pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 diharapkan dapat memberikan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga perubahan rencana pembangunan tidak hanya terfokus pada pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat kondisi pandemi COVID-19.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang mengamanahkan pengintegrasian KLHS dalam penyusunan maupun evaluasi RPJMD telah diatur melalui hierarki peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461).

Namun demikian, pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD juga turut mempertimbangkan keterkaitan peraturan lainnya meliputi:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, No-Reg Perda Provinsi DKI Jakarta: 1/103/2018);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS

Maksud. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai upaya untuk memastikan pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perubahn RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017 -2022, utamanya untuk 2 tahun ke depan.

Tujuan. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan capain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Kondisi Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.
Pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program yang mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022.

Sasaran. Hasil KLHS menyasar pada rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi akibat pandemi COVID-19.

1.4 Tahapan Penyelenggaraan KLHS

KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dilaksanakan pada bulan Agustus – November 2020, beriringan dengan penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD. Pada saat KLHS ini disusun, sebagian besar rancangan awal perubahan RPJMD telah tersusun merespon perkembangan kondisi pandemi yang berdampak secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, proses integrasi hasil KLHS tetap dapat dilakukan pada tahap finalisasi Rancangan Perubahan RPJMD DKI Jakarta. Dalam kondisi mendesak tersebut, tahapan penyelenggaraan KLHS tetap dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku meskipun terdapat penyesuaian waktu dan pengayaan analisis.

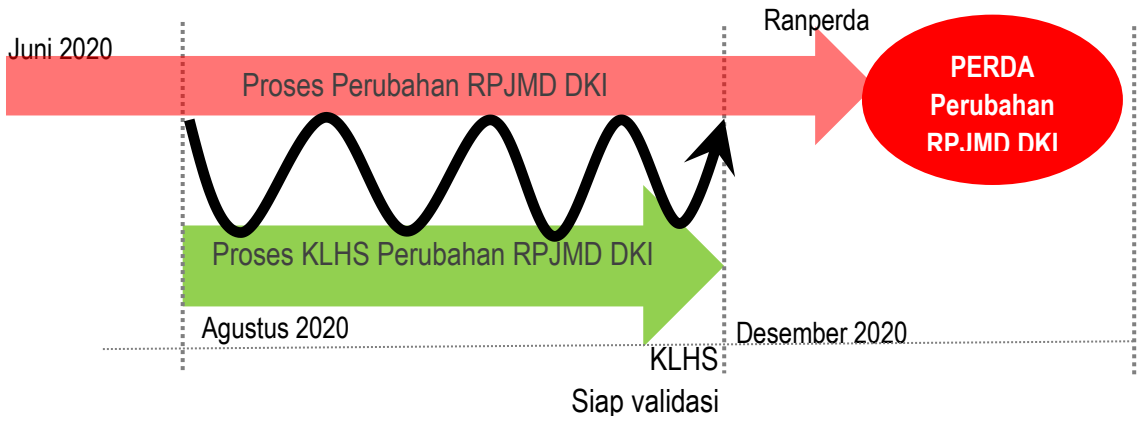

Gambar 1.1 Sinkronisasi Proses Penyusunan KLHS dan Penyusunan Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada Pasal 11 ayat 2 secara jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan analisis perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, keberadaan pedoman, acuan, standar, contoh praktik terbaik, informasi tersedia yang diakui secara ilmiah, keberadaan hasil penelitian yang akuntabel, dan/atau kesepakatan antar ahli. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan KLHS sangat terbuka pada perkembangan pendekatan dan metode yang akuntabel dan diakui secara ilmiah.

Sementara PermenLHK No. 69 Tahun 2017 pada Pasal 13 ayat 2 menegaskan bahwa penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS wajib mempertimbangkan jenis, tema, hirarki, dan skala informasi KRP serta prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Mengingat KRP yang dikaji adalah RPJMD yang pada dasarnya berada dalam ranah urusan Kementerian Dalam Negeri, maka keseluruhan tahapan penyelenggaraan KLHS RPJMD seyogyanya mengacu pada teknis pelaksanaan sesuai Permendagri No. 7 Tahun 2018. Secara umum, tahapan penyelenggaraan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta diilustrasikan pada bagan berikut ini.

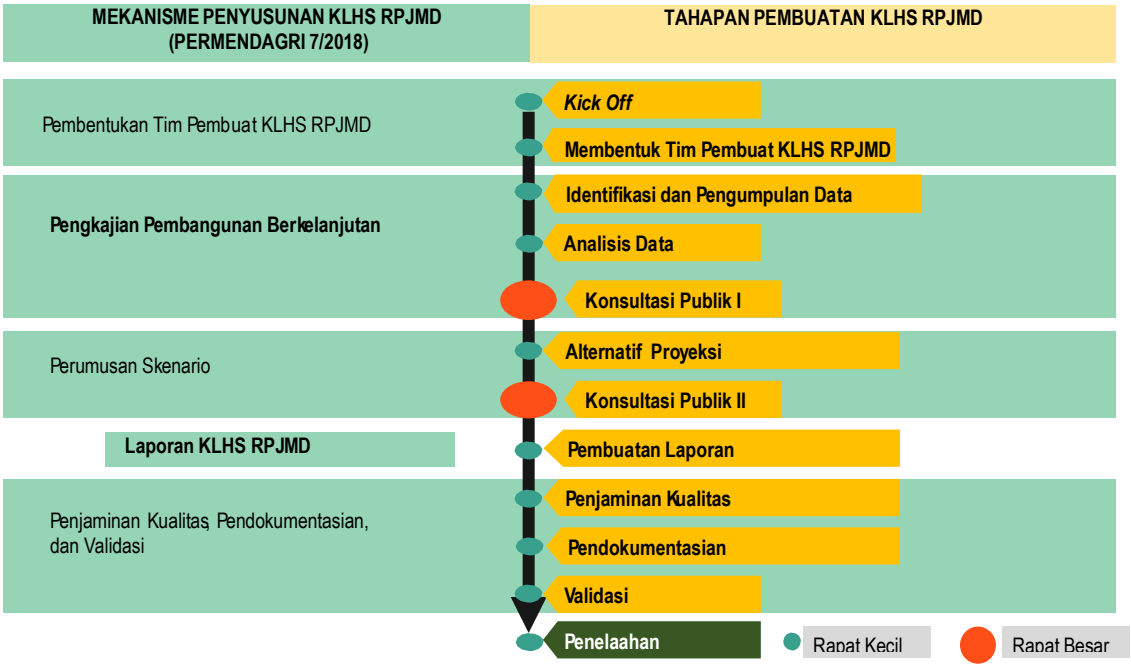

Gambar 1.2 Tahapan Pembuatan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

Sebagian besar tahapan penyelenggaraan KLHS di atas dilaksanakan dengan pertemuan virtual. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Interaksi dengan pemangku kepentingan diakomodir dengan memanfaatkan teknologi daring melalui survei dan jajak pendapat secara virtual, serta kolaborasi dokumen melalui platform daring. Meskipun hasil pengayaan yang didapatkan memang lebih terbatas dibandingkan dengan cara diskusi langsung, hal ini tidak menyurutkan antusiasme keterlibatan pemangku kepentingan di setiap tahapan penyelenggaraan KLHS.

1. **Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD**

   Kick Off Meeting. Pertemuan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020 merupakan awal dimulainya rangkaian kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan dilaksanakan secara internal terwakili dari instansi Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan dalam rangka identifikasi awal proses persiapan dan pihak-pihak terkait yang perlu dilibatkan sebagai tim pembuat KLHS RPJMD atau dalam pertemuan kecil dan besar.

   Membentuk Tim Pembuat KLHS RPJMD. Tim Pembuat KLHS terwakili dari 19 institusi daerah sebagaimana tercantum dalam SK No. 1157 Tahun 2020 (lihat pada Lampiran 1Lampiran 1). Tim tersebut bertugas mendampingi proses penyelenggaraan KLHS sebagai institusi kunci untuk terlibat secara intensif dalam setiap pertemuan persiapan, FGD tematik, dan konsultasi publik.

2. **Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan**

   Identifikasi Isu dan Pengumpulan Data. Identifikasi isu strategis dilaksanakan dalam beberapa pertemuan daring yang melibatkan Tim Pembuat KLHS. FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam rangka mengidentifikasi status penyusunan rancangan perubahan RPJMD dan evaluasi capaian TPB bersama tim sekretariat TPB. Hasil identifikasi awal ini kemudian diolah untuk didiskusikan kembali dalam lingkup keterlibatan OPD yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data sekaligus mendapatkan konfirmasi data resmi dari wali data yang berkaitan.

   Selanjutnya, Tim Pembuat KLHS beserta OPD kunci terkait pencapaian TPB melaksanakan FGD pada tanggal 12 Agustus 2020 untuk merumuskan Isu Prioritas berdasarkan hasil identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan antar Tim Pembuat KLHS atas isu-isu tersebut sebelum dikonsultasikan kepada publik. KLHS merupakan kajian yang bersifat deliberatif sehingga dalam prosesnya diperlukan keterlibatan banyak pihak. Hal ini dimaksudkan agar menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap arah pembangunan yang diharapkan.

   Analisis Data. Analisis data dilakukan berbasis pada data sekunder terkini yang bersumber dari instansi terkait. Selain pengumpulan data sekunder, metodologi studi literatur paling banyak digunakan dalam KLHS mengingat banyak referensi kajian dan penelitian terkait yang telah dilaksanakan oleh DKI Jakarta pada tahun sebelumnya. Analisis data mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pendekatan dalam Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Analisis	Pendekatan
Gambaran Kondisi 6 Muatan LH	• ***Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup*** Analisis mengenai daya dukung lingkungan hidup fokus pada dua pemanfaat lingkungan hidup yaitu penyedia air dan pangan, dengan pertimbangan bahwa dua unsur tersebut untuk terpenuhi dari sumber lokal sangat sulit. Analisis daya d pada dasarnya telah dilaksanakan oleh DLH pada tahun 2019 menggunakan pe spasial berbasis jasa lingkungan dan sistem grid, sehingga informasi yang disaj analisis tersebut masih relevan digunakan dalam KLHS Perubahan RPJMD DK Sementara, daya dukung pangan dianalisis secara tabulasi berdasarkan kebutu dan ketersediaan lahan pangan. • ***Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup***

	Gambaran dampak dan risiko lingkungan hidup dianalisis dari kecenderungan perubahan kualitas air dan pengelolaan sampah, dengan pertimbangan isu-isu terkait pandemi yang selalu membutuhkan ketersediaan air bersih yang memadai dan pengelolaan sampah infeksius. • ***Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan*** Gambaran mengenai jasa lingkungan hidup DKI Jakarta fokus terhadap analisis kemampuan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai penyedia air, pengatur air, pengatur kualitas udara, dan pengatur mitigasi bencana banjir. Keseluruhan analisis tersebut juga telah tercakup dalam Kajian D3TLH DKI Jakarta yang telah dilaksanakan DLH pada tahun 2019, sehingga informasi dalam kajian tersebut dijadikan referensi utama pembahasan kinerja jasa lingkungan hidup. • ***Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam*** Analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam konteks DKI Jakarta sangat erat kaitannya dengan pola pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dianalisis berdasarkan kesesuaian rencana dan realisasi pelaksanaannya. Analisis ini mengacu pada hasil akhir Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. • ***Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati*** DKI Jakarta melalui DLH telah melaksanakan inventarisasi keanekaragaman hayati pada tahun 2019 yang tercakup dalam Profil Keanekaragaman Hayati DKI Jakarta. Potensi kehati direpresentasikan dari sebaran flora dan fauna yang biasa ditemui di DKI Jakarta. Sementara, ketahanan kehati dapat dicerminkan dari banyaknya permasalahan yang mengganggu keberlanjutan ekosistem sehingga memicu penurunan kehati dalam jangka panjang. • ***Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim*** Gambaran mengenai kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim telah dianalisis secara mendetil dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim serta dikaitkan dengan Laporan Akhir Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. Laporan tersebut dijadikan referensi utama pembahasan mengenai sub-bab ini.
Analisis Capaian TPB pada OPD di Provinsi DKI Jakarta	• ***Analisis Gap Target Capaian TPB*** Gap target capaian TPB dianalisis berdasarkan data dan informasi tahun 2019 dari Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Sekretariat SDGs. Analisis gap tersebut dijadikan dasar untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan. • ***Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah*** Analisis ini dimaksudkan sebagai penandaan anggaran untuk setiap indikator TPB dan atau TPB secara umum supaya alokasi penganggaran eksisting dapat tergambar. Selain itu, analisis ini sekaligus untuk mengidentifikasi OPD yang menjadi kunci dalam pencapaian beberapa indikator TPB.

Analisis Keterkaitan TPB	Analisis keterkaitan TPB dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari isu-isu yang telah diidentifikasi. Hal ini menjadi penting dilakukan untuk melihat TPB secara holistik sehingga rumusan arahan kebijakan yang dihasilkan sekaligus dapat menyasar pencapaian TPB terkait.
Identifikasi Potensi Dukungan Mitra Pembangunan	Potensi dukungan mitra pembangunan diidentifikasi awal berdasarkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam beberapa program-program pencapaian TPB yang tercatat dalam Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Sekretariat SDGs. Identifikasi lanjutan dilakukan melalui diskusi tematik untuk memperkaya potensi-potensi dukungan mitra yang dapat dilibatkan dalam menangani isu-isu prioritas pembangunan.

Konsultasi Publik 1. Uji Publik pembahasan prioritasi isu TPB dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara (Lampiran 4). Pada proses uji publik ini, pemangku kepentingan tetap diberikan informasi secara utuh meliputi latar belakang perubahan RPJMD & pelaksanaan KLHS, gambaran capaian keseluruhan TPB, gambaran kondisi lingkungan hidup, gambaran kondisi yang dialami DKI Jakarta selama pandemi, dan proses identifikasi awal isu hingga fokus 10 TPB yang akan diangkat dalam perubahan RPJMD 2017-2022. Berdasarkan informasi tersebut, pemangku kepentingan dipersilakan memberikan masukan, klarifikasi data, dan menyepakati isu-isu TPB yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam 2 tahun penyelesaian RPJMD periode 2017-2022. Proses konsensus penentuan isu prioritas dilakukan melalui sistem polling daring sehingga didapatkan 6 isu prioritas yang mencakup TPB 1: Tanpa Kemiskinan, TPB 2: Tanpa Kelaparan, TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

3. **Perumusan Skenario dan Rekomendasi**

Perumusan Skenario. Proses perumusan skenario pencapaian TPB prioritas dilakukan melalui skema sebagaimana gambar di bawah ini. Skenario dianalisis berdasarkan *outcome* dari masing-masing TPB prioritas yang sudah mempertimbangkan keterkaitan dengan TPB lainnya sehingga menghasilkan arahan kebijakan yang sesuai. Outcome dan kebijakan dirumuskan berdasarkan analisis proyeksi yang dilakukan untuk masing-masing capaian indikator TPB dan proyeksi apabila terdapat upaya tambahan untuk mencapai target.

Skenario pencapaian membahas tentang bagaimana keterkaitan TPB Prioritas dengan TPB lainnya, skenario daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, skenario dengan upaya tambahan untuk masing-masing TPB Prioritas, dan skenario sumber pembiayaan. Perumusan skenario dilakukan terlebih dahulu secara internal oleh Tim Pembuat KLHS sebelum disampaikan di konsultasi public.

Konsultasi Publik 2. Konsultasi Publik 2 dilakukan untuk penyepakatan usulan Rekomendasi KLHS dari alternatif skenario yang dibuat oleh Tim Pembuat KLHS.

4. **Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi**

- Penjaminan kualitas dilakukan dengan penilaian mandiri oleh Pembuat KRP, yang disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta.
- Keseluruhan proses penyelenggaraan KLHS dirangkum dalam Laporan Dokumentasi KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang terpisah dari laporan KLHS ini.
- Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS. Validasi KLHS ini dilaksanakan secara sekaligus pada tahap akhir. Validasi KLHS dilakukan dengan mengirimkan permintaan surat permohononan validasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil Validasi dituangkan dalam berita acara validasi.

1.5 Ringkasan Perbedaan KLHS Perubahan RPJMD dengan KLHS RPJMD 2017-2022

Tabel 1.2. Ringkasan Perbedaan KLHS RPJMD lama dan Perubahan

KLHS RPJMD 2017-2022	KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022
• Mengacu Permendagi No.67/ 2012. • Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan berbasis pada proses pengayaan isu oleh stakeholder sebagaimana yang dirasakan langsung. • Pengkajian dilakukan dengan prinsip keterkaitan antar dokumen strategis, keseimbangan, keadilan, dan pengaruh. • Perumusan alternatif dan rekomendasi berbasis pada dampak program dengan arahan mitigasi/adaptasi dan langkah alternatif.	• Mengacu Permendagri No.7/2018. • Identifikasi isu strategis dilakukan bertahap dari proses analisis gap capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), analisis capaian TPB pada OPD, analisis keterkaitan TPB, dan uji publik perumusan isu prioritas. • Pengkajian dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar TPB. • Perumusan arahan rekomendasi didasarkan pada alternatif proyeksi upaya pencapaian target terhadap kondisi daya dukung lingkungan hidup dan gap capaian target TPB • Arahan program didasarkan pada Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020

1.6 Sistematika Dokumen KLHS

BAB 1 Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran KLHS, tahapan penyelenggaraan KLHS, ringkasan perbedaan KLHS RPJMD dengan KLHS Perubahan RPJMD. serta sistematika dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

BAB 2 Menguraikan histori perkembangan fungsi wilayah DKI Jakarta untuk memberikan gambaran histori arah kebijakan yang mendominasi di wilayah tersebut.

BAB 3 Menguraikan kondisi Provinsi DKI Jakarta secara umum, meliputi kondisi geografis, fisik, kondisi demografis, kondisi sosial, ekonomi, dan fiskal.

BAB 4 Menguraikan gambaran kondisi lingkungan hidup DKI Jakarta yang mencakup 6 muatan yaitu kapasitas daya dukung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan ekosistem/jasa lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati, serta kerentanan & kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

BAB 5 Menguraikan kondisi umum capaian target TPB, analisis gap target capaian TPB, dan capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah.

BAB 6 Menguraikan proses identifikasi dan perumusan isu prioritas dan analisis gap dan/atau kesenjangan dari kebijakan dan strategi pada RPJMD 2017 - 2022 terhadap pencapaian TPB.

BAB 7 Menguraikan skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas di Provinsi DKI Jakarta, mencakup pembahasan mengenai keterkaitan antar TPB prioritas dengan TPB lainnya, skenario daya dukung, dan skenario capaian TPB dan upaya tambahan yang perlu dilakukan untuk pencapaian selama 2 tahun.

BAB 8 Pembahasan mengenai rumusan rekomendasi KLHS untuk perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta

BAB 9 Menguraikan proses penjaminan kualitas dari KLHS Perubahan RPJMD.

BAB 10 Pembahasan mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk proses integrasi hasil KLHS dan validasi KLHS.

BAB 2

BAB 2 PERKEMBANGAN FUNGSI WILAYAH DKI JAKARTA

Sebelum menjadi ibukota Republik Indonesia, Jakarta telah melampaui masa yang sangat panjang sebagai suatu kota pelabuhan. Pada jaman kerajaaan Taruma Negara di Jawa Barat terdapat suatu kerajaan yang berpusat di Pajajaran dekat Bogor, di teluk Jakarta muara sungai Ciliwung terdapat suatu kota pelabuhan yang Sunda Kalapa. Masa ini berlangsung kira-kira dari abad ke 12 sampai abad ke 16. Kemudian kota pelabuhan ini direbut oleh kerajaan Demak dan dengan perantara Falatehan, diubah namanya menjadi Jayakarta. Masa ini berlangsung dari bagian pertama abad ke 16 sampai awal abad ke I7, kemudian ketika badan dagang Belanda yang bemama Vereenigde Oost Indische Compagnie mulai berdagang di Asia, maka kota pelabuhan ini mereka rebut dan menjadikannya pusat perdagangan VOC dengan nama Batavia. Masa ini berlangsung dari awal abad ke 17 sampai akhir abad ke 18.

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara Kerajaan Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan Fathan Mubina atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta“

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi Gemeente Batavia dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. Gemeente Batavia merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia Belanda. Luas wilayah Gemeente Batavia kurang lebih 125 km2, tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (Onderdistrik). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (Syuu). Dimana Keresidenan (Syuu) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (Ken) dan Kota (Shi).

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (Tokubetsu Shi) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerdirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 – 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang- undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, mempunyai riwayat yang amat panjang sebelum tahun 1950. Riwayatnya sebagai tempat hunian manusia secara garis besar dapatlah ditahapkan sebagai berikut:

- ✓ tahap pemukiman sederhana di zaman prasejarah;
- ✓ tahap pemukiman terkoordinasi di zaman masa kerajaan Tanimanagara;
- ✓ tahap pertumbuhan sebagai kota pusat perdagangan, yang dapat diperinci dalam tahap-tahap:
  - Sunda Kalapa di bawah kedaulatan Pajajaran;
  - Jayakarta yang jadi perebutan;
- ✓ tahap sebagai kota pusat kekuasaan, yang menuruti perkembangan sebagai:
  - Batavia, pusat kekuasaan kolonialis Belanda;
  - Jakarta, ibukota negara Indonesia yang merdeka, sejak tahun 1950

Hasan Djafar (1987) menyatakan sekurang-kurangnya ada enam buah situs kepurbakalaan prasejarah yang telah dapat dinyatakan sebagai bekas tempat hunian manusia pra-sejarah. Situs-situs itu adalah: Pejaten,' Kampungkramat, dan Condet-Balekambang yang ketiganya terletak di daerah aliran sungai Ciliwung; Bu/cit Sangkuriang dan Kelapadua yang kedua- nya terletak di sebelah selatan perbatas'an wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bogor; dan ·situs Buni yang terletak di sebe- lah timur perbatasan wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi, di daerah pantai utara dan terletak antara Kali Bekasi dan Kali Cilamaya. H.Th. Verstappen dalam telaah geomorfologisnya mengenai pembentukan garis pantai dan teluk Jakarta, telah memberikan taksiran bahwa dataran "kipas aluvial" yang meliputi wilayah Jabotabek (Jakarta-Bogor-

Tanggerang-Bekasi) terbentuk sekitar 5000 tahun yang lalu· Jenis jenis temuan di situs ini memberikan petunjuk mengenai tahap' perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Dari kebudayaan perundagian tahap kebudayaan bercocok tanam. Ini semua menunjukkan bahwa wilayah "Jakarta" telah dihuni sekurang- kurangnya sejak 'masa' bercocok tanam, yang diperkirakan berlangsung antara sekitar tahun 3000 dan 1000 Sebelum Masehi (Djafar 1987:14). Dataran aluvial Jabotabek itu telah dihuni manusia tak lama setelah terbentuknya, manusia menempati wilayah karena kesuburan dan kelimpahan aimya.

Munculnya kerajaan Tarumanagara pada paruh kedua abad kelima Masehidi di wilayah Jabotabek ditandai sejumlah inskripsi yang ditemukan di Ciaruteun, Kebon Kopi, Jambu, dan Tugu. Kerajaan ini cakupan wilayahnya bahkan lebih luas ·daripada wilayah Jabotabek sekarang, terbukti inskripsinya ditemukan juga di Cidanghiang (daerah Lebak, Banten). Inskripsi itu dapat dipastikan mewakili satu era yang sama. Memuat tentang: nagara Taruma, raja Pumavannan, dan pemujaan tapak kaki. Pengertian nagara, yaitu "kota", suatu tempat hunian yang berbatas jelas,, biasanya bergerbang dan berpagar, di mana kehidupan lebih canggih, dengan pengkhususan peranan yang lebih kentara, apabila dibandingkan dengan hunian "desa"; dapat diduga, bahwa konsep ini tidak hanya dikenal dan disebut, melainkan juga diwujudkan secara nyata di zaman Taruma. Terdapatnya wujud nagara (kota; 'dibedakan dengan nagara, yaitu “berkenaan dengan dimiliki oleh/ bersifat kota") pada masa Taruma itu menunjuk pada kenyataan yang dapat ditafsirkan·di samping nagara yang berkedudukan sebagai pusat (pemerintahan; kebudayaan) terdapat pula sejumlah daerah hunian 'bukan-nagara yang ·berkedudukan sebagai pinggiran. Inilah “desa-desa”, yang dilihat dari sudut perkembangan pemikiran memang bersifat "pinggiran", namun dilihat dari ·sudut perekonomian merupakan penyangga dari kebutuhan pusat.

Balai Kota Batavia (Commons Wikimedia)

Gambar 2.1 Struktur Kota Batavia
Sumber: https://jhna.org/articles/dutch-batavia-exposing-hierarchy-dutch-colonial-city/

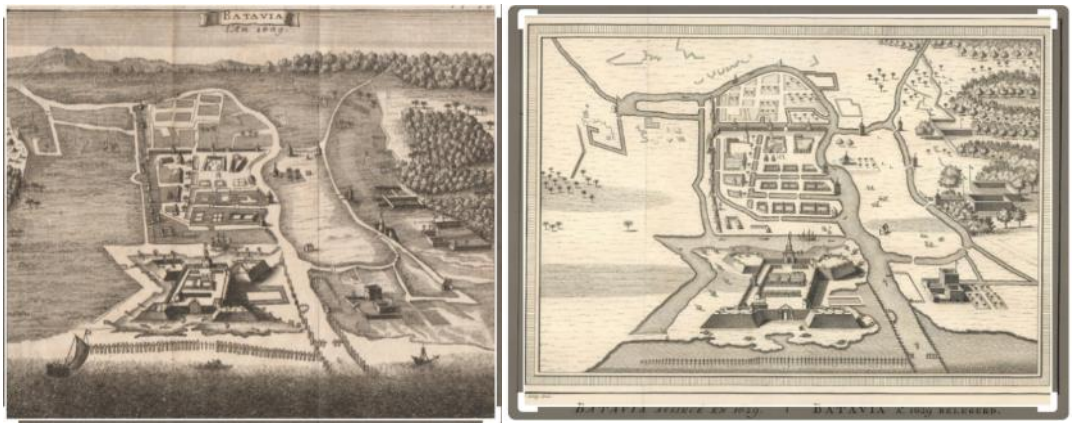

Gambar 2.2 Struktur Kota Batavia

Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota

Secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga harus memenuhi syarat-syarat minimum sebagai kota internasional sesegera mungkin,

Landasan yuridis berikutnya adalah UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia.

Kebijaksanaan pembangunan daerah sekeliling Jakarta sebagai kesatuan JABOTABEK, tertuang pada Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976, antara lain untuk mengembangkan pemukiman serta pengembangan kesempatan kerja yang lebih merata, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan penduduk di Jakarta.

Perencanaan ruang wilayah DKI Jakarta 2030 pada prinsipnya akan menggabungkan pendekatan sistem dinamis atau perencanaan komprehensif dengan pendekatan perencanaan strategis sekaligus. Pendekatan sistem dinamis terutama dilakukan untuk tahapan analisis, sehingga tidak ada aspek pertimbangan perencanaan yang tertinggal. Sementara itu, pendekatan strategis terutama dilakukan pada keluaran/output strategi, kebijakan, dan pengembangan indikasi program, sehingga lebih dapat dijaga fokus pembangunan dan penataan ruangnya ke depan. Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran atau yang sering dikenal dengan "*mixed approach*", atau yang dahulu sering disebut sebagai "*mixed scanning*". Selain itu, pendekatan penyeimbangan (optimasi, sinergi, dan minimasi konflik) juga dilakukan, khususnya penyeimbangan antara aspek fisik/lingkungan/daya dukung lingkungan dengan aspek ekonomi perkotaan, dan aspek sosial-budaya perkotaan, sehingga diperoleh model penataan ruang yang berkelanjutan.

Pendekatan sistem dinamis dilakukan dengan penyederhanaan sistem kota/perkotaan sebagai ekosistem manusia seperti yang dikembangkan Machlis, et al (2002) seperti terlihat pada gambar berikut.

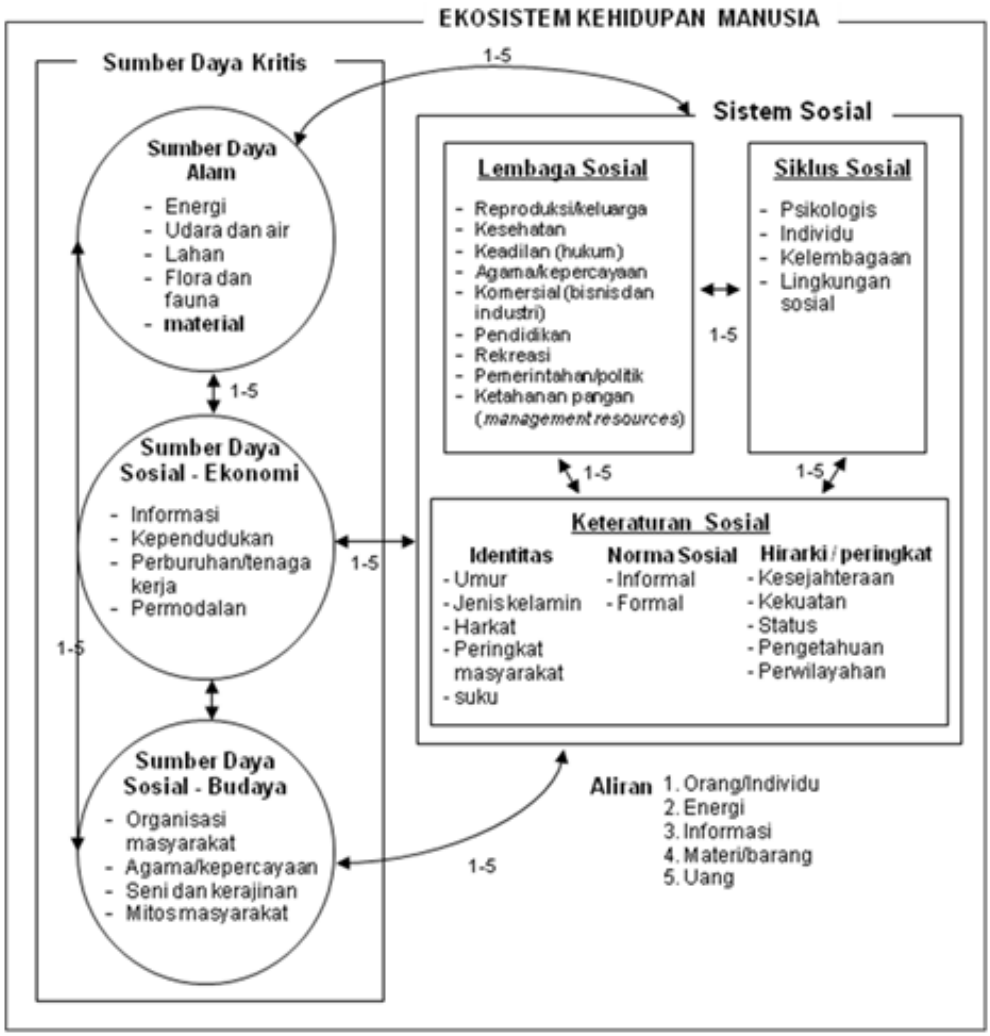

Gambar 2.3 Model Perkotaan Sebagai Ekosistem Manusia
Sumber: The Structure of Human Ecosystems, Machlis et al (2002)

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa DKI Jakarta sebagai suatu sistem sosial akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi tiga kelompok utama sumberdaya kritis yang dipunyainya, yaitu: sumber daya alam (termasuk ruang), sumber daya sosial-ekonomi, dan sumberdaya sosial-budaya. Masing-masing komponen dari ekosistem manusia tersebut satu dengan lainnya berhubungan melalui 5 (lima) macam jenis aliran: individu manusia, energi, informasi, barang/materi, dan uang. Oleh karena itu, menata ruang suatu kota/perkotaan seperti DKI Jakarta pada prinsipnya menata kelima jenis aliran tersebut secara seimbang, selaras, efektif dan efisien khususnya dalam pengaturan alokasi dan distribusi ruangnya secara makro.

Bagaimana sumber daya alam tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan berbagai aspek sistem sosial yang terwujud sebagai lingkungan spasial/ruang yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan utama untuk pengembangan sistem rekayasa investasi kota yang tepat dalam bentuk investasi publik (seperti ruang terbuka hijau, infrastruktur publik, sarana publik, dan lain-lain) maupun dalam bentuk investasi swasta (seperti industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain). Pengembangan Sistem Rekayasa Investasi tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan manajemen sektor publik yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan di masa mendatang sehingga diperoleh Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan dapat dilaksanakan dan dikendalikan dengan mudah nantinya.

Dalam konteks pembangunan dan penataan ruang di DKI Jakarta, maka pendekatan pembangunan konvensional seperti apa adanya sudah tidak dapat diterapkan lagi. Hal ini mengingat bahwa sumberdaya kritis alam sudah tidak tersedia lagi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang harus digunakan ke

depan adalah "manajemen pembangunan" (*Growth Management*). Dalam konteks pengelolaan pembangunan, maka basis perencanaan fungsionalnya harus lebih luas dari sekedar batas administrasi wilayah DKI Jakarta, sehingga untuk kasus DKI Jakarta ini basis perencanaan fungsionalnya adalah Metropolitan Jabodetabekpunjur, dan/atau sampai ke Megalopolitan Jakarta-Bandung.

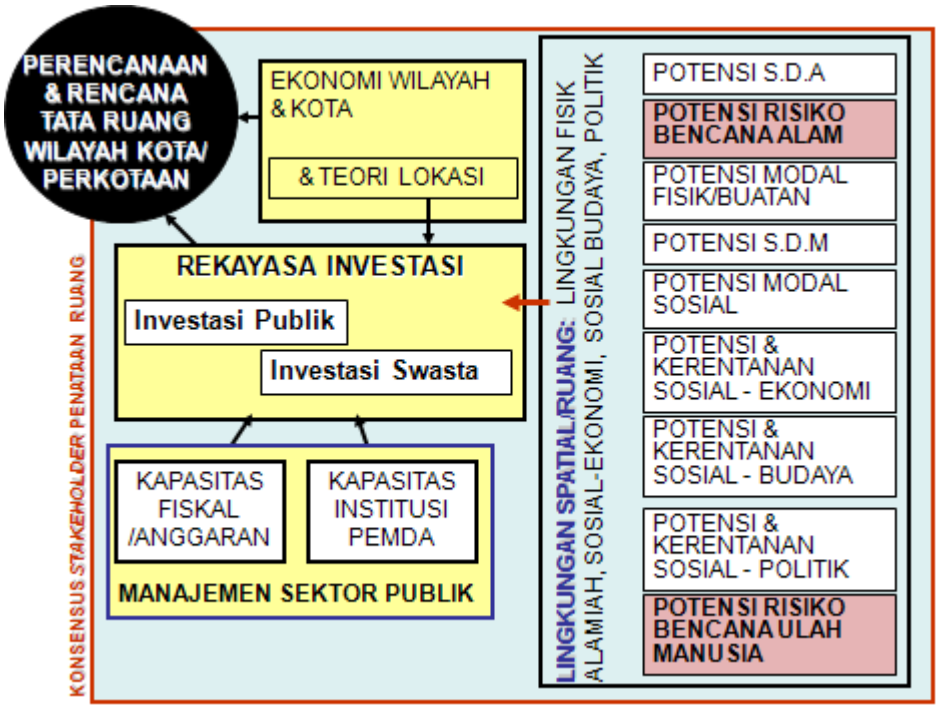

Gambar 2.4 Model Perencanaan Tata Ruang Kota Berbasis Perimbangan Rekayasa Investasi

Beberapa hal berikut ini adalah prinsip utama dalam manajemen pertumbuhan:

- Keinginan untuk secara rasional mengakomodasi dampak dari pertumbuhan
- Merupakan konsep komprehensif/menyeluruh, bukan hanya dampak fisik tetapi juga dampak ekonomi dan sosial
- Pemerintah mengambil peran utama dalam membentuk kerangka kerja yang terpadu
- Sektor dunia usaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok kepentingan tertentu juga mempunyai peran yang penting
- Merujuk kepada teknik pengaturan perundang-undangan
- Fokus pada 'pembatasan' pertumbuhan, mengarahkan/ menyalurkannya, atau mengelola dampaknya.

Kemudian dalam konteks manajemen pertumbuhan itu juga, peran penting seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan ruang di DKI Jakarta harus dapat ditingkatkan menjadi pihak-pihak yang berkontribusi positif dalam penataan ruang. Jadi, harus ada pergeseran dari konsep stakeholders (pemangku kepentingan) kepada shareholders (pemegang saham/kontribusi), semua pihak tidak bisa hanya menyatakan punya kepentingan yang harus diakomodasi secara ruang, tetapi juga berkontribusi aktif memenuhi kepentingan masing-masing tersebut secara bersama-sama secara optimal, sinergi, dan meminimalkan konflik. Sehingga bukan hanya 'hak'-nya yang dituntut, tetapi juga 'kewajiban' yang harus ditunaikan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal inilah yang akan menjadi dasar/acuan pada saat dilakukan perekayasaan investasi terhadap seluruh kebutuhan ruang untuk pembangunan, mana yang harus ditanggung oleh sektor publik (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Daerah lainnya melalui kerjasama), sektor dunia usaha (skala besar, skala menengah, skala kecil atau UMKM), ataupun oleh masyarakat (orang perorang, kelompok, badan usaha nir-laba).

Potensi Pengembangan Wilayah

Peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia memicu perkembangan kota yang sangat pesat di berbagai sektor. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 mengenai RTR Jabodetabekpunjur, Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Dalam hal ini Jakarta berperan sebagai kawasan perkotaan inti. Jakarta sudah berkembang menjadi kawasan yang matang yang mengemban peran sebagai pusat pemerintahan nasional, pusat perekonomian dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, serta pusat kegiatan bisnis dan perdagangan.

Rencana pemindahan ibu kota negara tidak membuat potensi Jakarta memudar. Pada pidato kenegaraan bulan Agustus 2019, Presiden Ir. H. Joko Widodo bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan bahwa Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan dikembangkan sebagai pusat aktivitas bisnis dan keuangan dengan skala regional dan global. Kepala Bappenas RI juga mengatakan bahwa kedepannya akan menempatkan Jakarta sebagai daerah pusat perekonomian yang dapat bersaing dengan kota-kota di ASEAN.

Menjadi IKN sekaligus kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan besarnya kontribusi Provinsi DKI Jakarta bagi perekonomian Indonesia sebesar 17.3%, dan di Pulau Jawa sebesar 28% di 2018 (BPS, 2019). Jakarta merupakan destinasi investasi utama Indonesia dengan menarik Rp. 95.6 T investasi (15.9% total nasional) dari dalam dan luar negeri hingga triwulan III tahun 2019 (BKPM, 2019). Di tahun 2018, sebesar US$ 4.85 miliar dari total US$ 29 miliar penanaman modal asing ke Indonesia, atau sekitar 16.6% dari nilai nasional mengalir ke Jakarta, menempatkan Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar kedua di Indonesia.

Selain aktivitas bisnis berskala nasional dan internasional, usaha mikro dan kecil juga memiliki peran yang besar yang mendominasi jumlah kegiatan ekonomi di Jakarta. UMKM membuka peluang penyerapan tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2016 tercatat sebesar 93,46%.

Aktivitas perekonomian yang tinggi tersebut didukung oleh usaha penyediaan sarana dan prasarana perkotaan serta jaringan utilitas dan konektivitas di dalam wilayah dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Selain berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga di dalam Jakarta, pengembangan tata ruang juga memiliki titik berat keterpaduan pembangunan dengan kawasan di sekitarnya. Mempertimbangkan pola pergerakan dan aktivitas perkotaan, pengembangan wilayah Jakarta kedepannya akan berorientasi pada penggunaan transportasi umum massal.

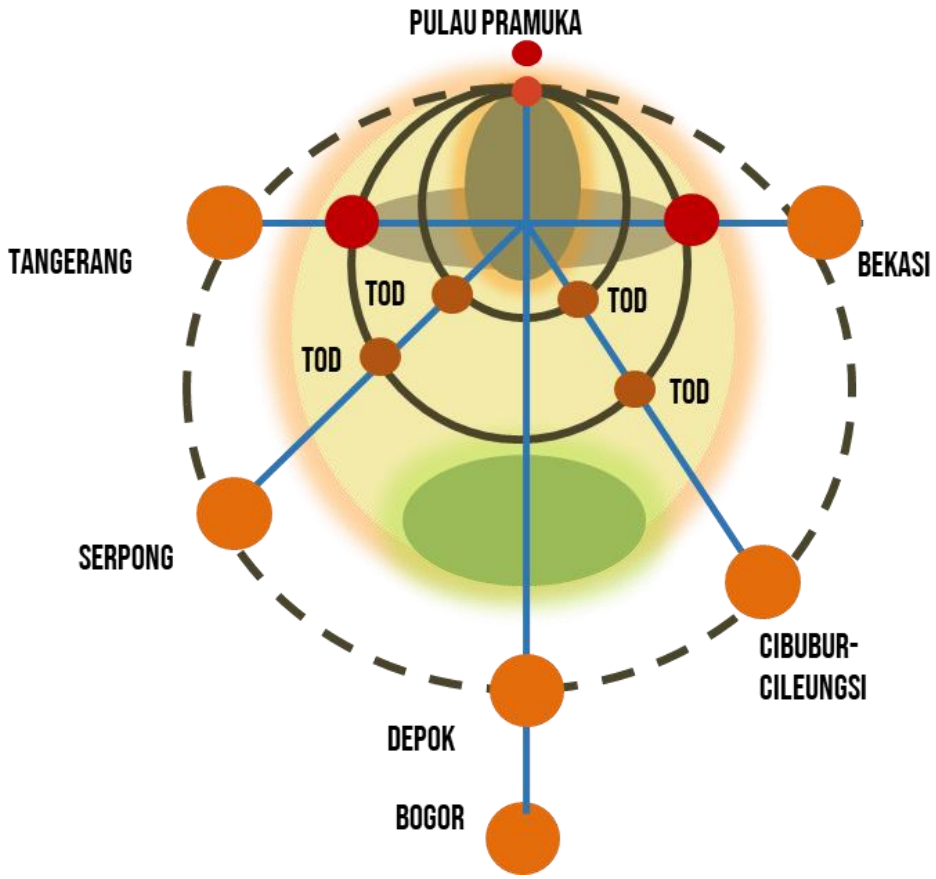

Gambar 2.5 Orientasi Transportasi Massal Jabodetabek-Punjur

Transportasi umum akan menjadi tulang punggung bagi ruang kota Jakarta. Pembangunan kota Jakarta 2030 akan berpihak pada kemudahan perpindahan setiap warganya. BRT Transjakarta serta KRL loopline dan Jabodetabek akan didukung oleh berbagai moda transportasi baru. Jaringan MRT membentang dari utara-selatan menghubungkan darerah pesisir Jakarta dengan perbatasan Tangerang Selatan, dan dan koridor barat-timur menghubungkan penduduk Jakarta menuju Tangerang sampai Bekasi. Jaringan LRT dibangun untuk membantu pergerakan di dalam pusat kota, maupun luar kota, seperti Cibubur dan Bekasi. Jalur pejalan kaki dan pesepeda disediakan di seluruh jaringan jalan dan di sekitar titik transit transportasi umum untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan. Struktur ruang kota juga dilengkapi dengan jaringan jalan arteri berbentuk radial yaitu inner ring road, Outer Ring Road, dan Outer Ring Road 2.

Aktivitas perkotaan dipadatkan di tengah pada bagian dalam loopline kereta api, dan dikembangkan melintang ke arah barat dan timur. Namun sentra-sentra baru juga dikembangkan untuk mempermudah setiap warga mencapai kebutuhan hariannya. Kawasan pusat kota direncanakan merupakan kawasan kompak dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi. Bergitupun dengan rumah-rumah warga yang direncanakan berada pada sekitar titik-titik transit di seluruh wilayah kota.

BAB 3

BAB 3 KONDISI PROVINSI DKI JAKARTA

3.1 Kondisi Geografis dan Fisik

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sluas 7.660 km^2, dengan luas daratan sebesar 662 km^2 (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km^2.

3.1.1 Wilayah Administrasi dan Wilayah Fungsional

Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob). Secara administrasi, batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat (dapat dilihat pada Gambar 3.1).

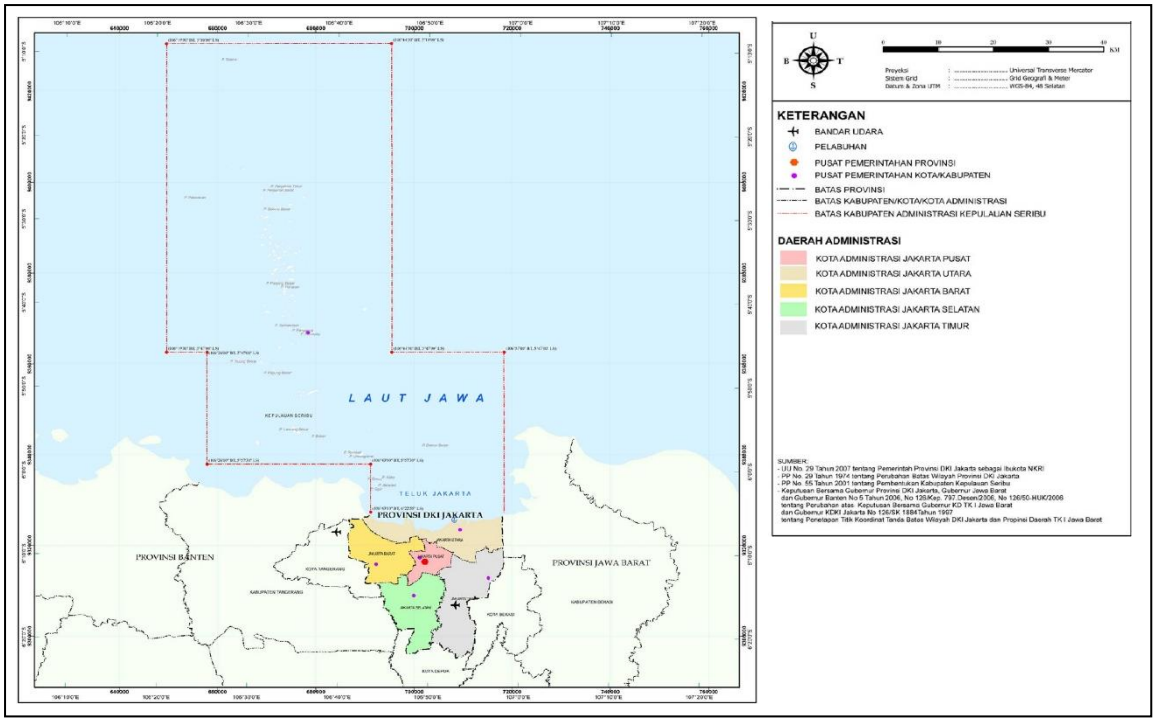

Gambar 3.1 Batas Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5019'12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 106022' 42" Bujur Timur - 106058' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ±7 meter di atas permukaan laut.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km^2)	Jumlah			
			Kecamatan	**Kelurahan**	**RW**	**RT**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jakarta Pusat	48,13	8	44	389	4.559
2.	Jakarta Utara	146,66	6	31	454	5.279
3.	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.499
4.	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.077
5.	Jakarta Timur	188,03	10	65	709	7.929
6.	Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah		**662,33**	**44**	**267**	**2.741**	**30.470**

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2020

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65% dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28%, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2 berikut:

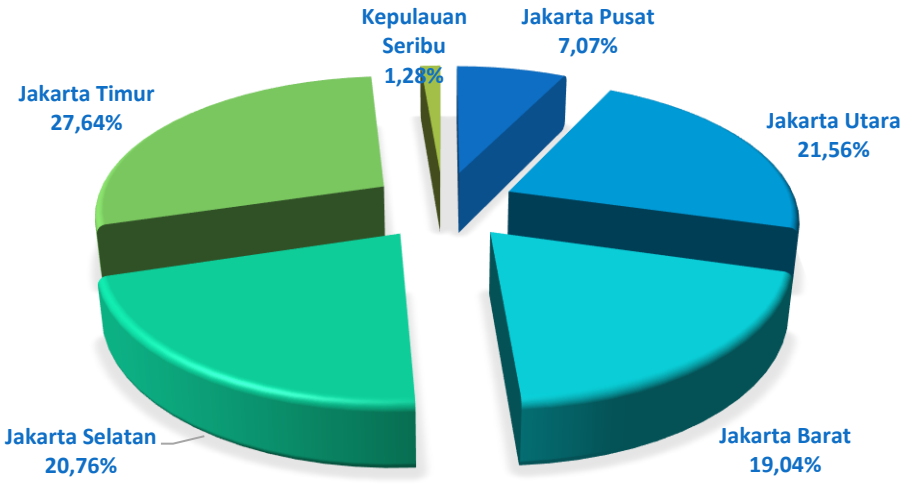

Gambar 3.2 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi
Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007

Lingkup dalam KLHS juga turut mempertimbangkan wilayah fungsionalnya terutama dalam mengkaji 6 muatan KLHS yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Wilayah fungsional ini didasari atas Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melewati dan mempengaruhi ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta. Wilayah DAS Provinsi DKI Jakarta meliputi DAS Citarum Hilir, DAS Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru dan DAS Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru dan DAS Kepulauan Seribu

Berdasarkan Wilayah DAS merupakan sub-bagian dari Wilayah Sungai yang ditetapkan secara nasional oleh Kementerian PU. Istilah Wilayah Sungai sendiri diartikan sebagai kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2. Sementara Wilayah DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PermenPUPR No. 4, 2015).. Kelima Wilayah DAS tersebut mencakup area lintas provinsi meliputi Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, secara visual ditampilkan pada gambar di bawah ini.

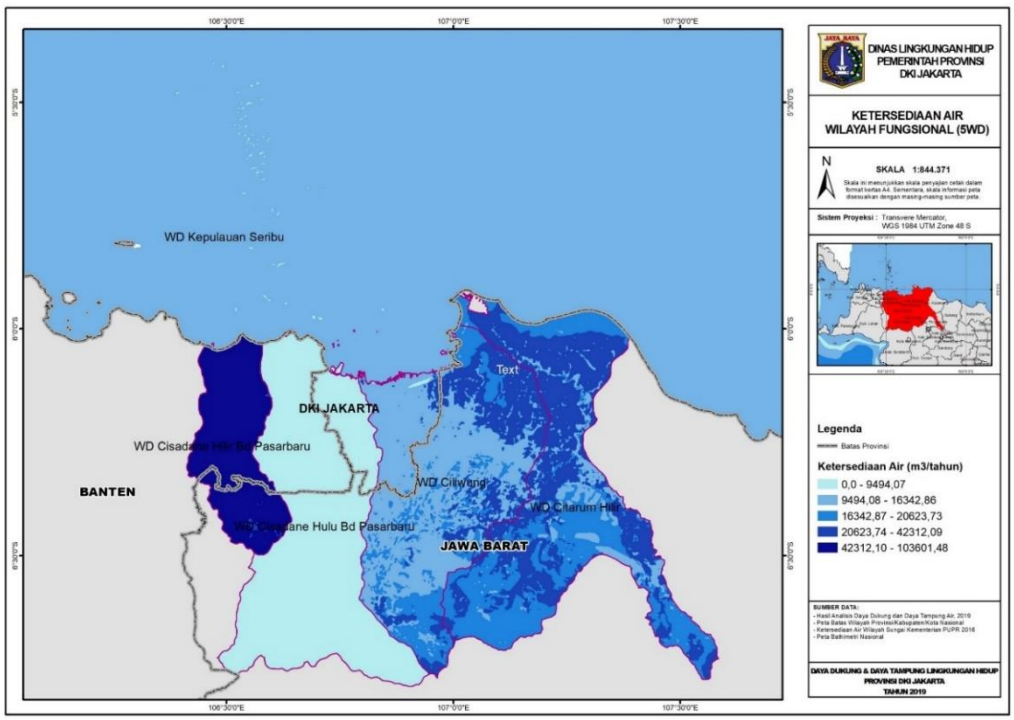

Gambar 3.3. Wilayah Fungsional berdasarkan DAS Provinsi DKI Jakarta
Sumber: Peta Wilayah DAS, PUPR (PermenPUPR No. 4, 2015)

3.1.2 Topografi dan Geologi

Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Sekitar 0-3% wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15% di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 15%.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini disebabkan karena beberapa lokasi kota Jakarta masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3% atau berada pada kemiringan lereng relatif landai. Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 13 sungai yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Secara geologis, geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur dapat dilihat pada peta berikut:

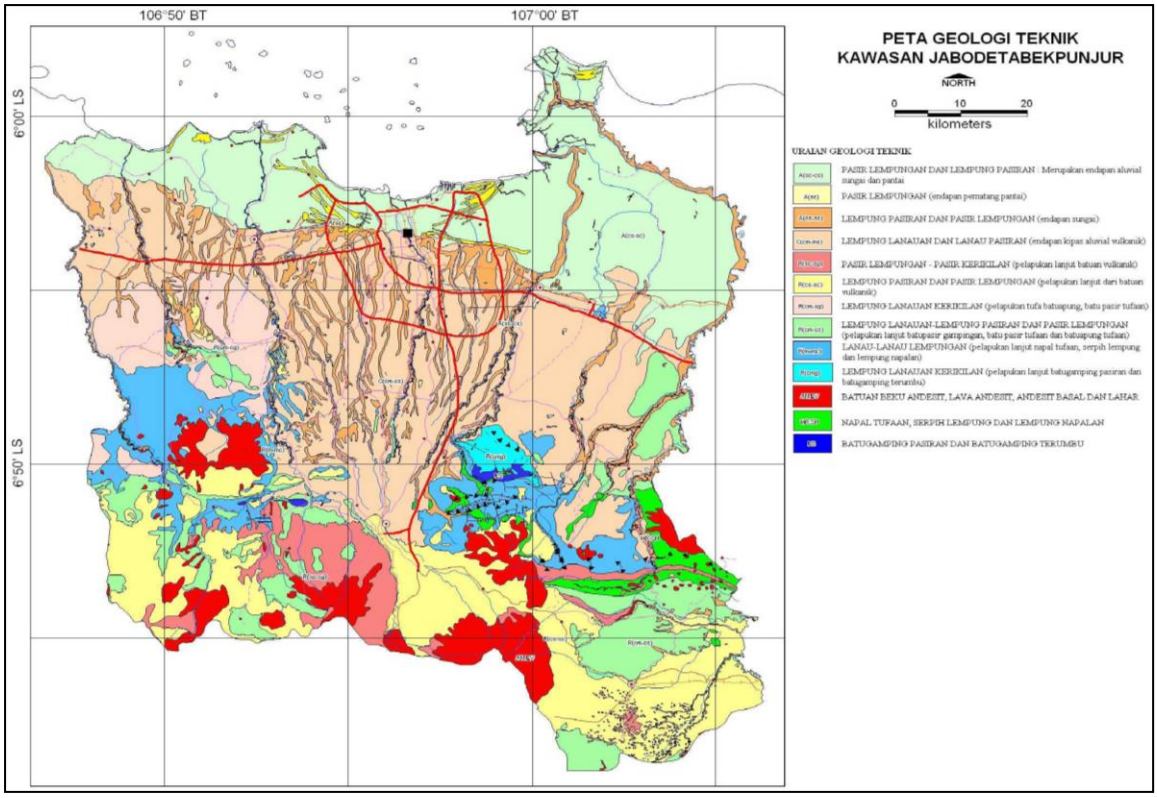

Gambar 3.4 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur

Struktur seluruh daerah di Jakarta terdiri dari endapan Pleistocene yang terdapat ±50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter, semakin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial. Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium.

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan di Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:

a. **Pasir lempungan dan lempung pasiran**, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya bekisar antara 3-12 meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirankan mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecokolatan, tegus, plastisitas sedang-tinggi. Pada beberapa tempat nilai penetormeter saku (qu) untuk lanau lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm^2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm^2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasiran antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m^2, lanau pasiran antara 15-25 kg/m^2 dan lempung pasiran antara 10-40 kg/m^2.

b. **Satuan Pasir Lempungan**, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plasitisitas sedang. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (qu) untuk pasir lempungan antara 0,75-2 kg/cm^2 dan lanau pasiran antara 1,5-3 kg/cm^2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3-meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara 10-25 kg/m^2 dan lanau pasiran antara 2-10 kg/m^2.

c. **Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan**, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun beselang-selang antara lempung pasrian dan pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plasitisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 meter.

d. **Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran**, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plasitisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plasitisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara 0,8-2,85 kg/cm^2 dan lanau lempungan antara 2,3-3,15 kg/cm^2, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara 2-50 kg/m^2 dan lanau lempungan antara 18-75 kg/m^2. Tufa dan konglomerat melapuk menengah – tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.

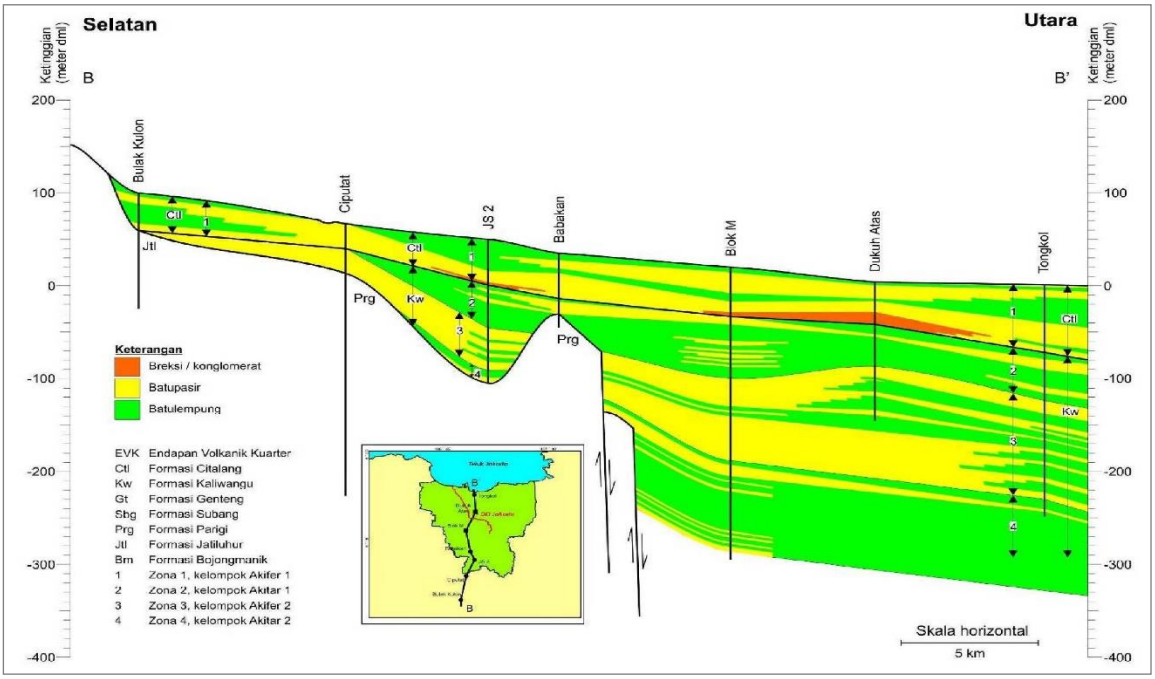

Gambar 3.5 Peta Karakteristik Keteknikan Tanah dan Batuan
Sumber : Ranwal RPJMD Perubahan 2017-2022

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik quarter yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.

Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Mengingat Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang besar untuk pembebasan lahan milik warga.

3.1.3 Hidrologi

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas kabupaten/kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 Km^2. Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m^3/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m^3/tahun.

Sistem akufiernya bersifat multi layers yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1-5 meter, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1-40 meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m^2/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oelh air tanah panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.

Pembagian system akuifer di CAT Jakarta adalah sebagai berikut:

- Sistem akufier tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer I.
- Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer II.

- Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 – 250 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer III.

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah delta city memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Adapun Peta aliran sungai, kanal dan *flood way* yang melalui Wilayah DKI Jakarta, dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut:

Gambar 3.6 Peta Aliran Sungai, Kanal dan Flood Way

Panjang dan luas dari masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Dimensi Aliran Sungai, Kanal, dan Flood Way

No.	Sungai/Kanal	Panjang (meter)	Lebar (meter)	Luas (meter^2)
1.	Cengkareng Drain	7.600	50	147.500
2.	Cakung Drain	11.200	60	672.000
3.	Banjir Kanal Barat	12.850	60	771.000
4.	Banjir Kanal Timur	23.000	60	1.380.000
5.	Kali Mookervart	7.300	32	233.600
6.	Kali Angke	12.810	42	538.020
7.	Kali Pesanggrahan	27.300	13	354.900
8.	Kali Grogol	23.600	7	165.200
9.	Kali Krukut	28.750	6	172.500
10.	Kali Ciliwung	46.200	25	1.155.000
11.	Kalibaru Timur	39.200	13	392.600
12.	Cipinang	27.350	17	464.950
13.	Sunter	37.250	29	1.080.250
14.	Buaran	7.900	20	158.000
15.	Jati Kramat	3.800	5	19.000

No.	Sungai/Kanal	Panjang (meter)	Lebar (meter)	Luas (meter^2)
16.	Cakung	20.700	20	414.000
17.	Kalibaru Barat	17.700	10	177.000

Selain sungai, Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 buah situ dan 15 tempat parkir air (*retention basin*). Fungsi utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah "*retention*" atau tempat menahan sementara luapan air sungai pada saat muka air sungai meningkat.

3.1.4 Klimatologi

Jakarta termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan di DKI Jakarta terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 24 hari terjadi pada bulan Februari tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Provinsi DKI Jakarta

No.	Bulan	2017		2018		2019	
		Curah Hujan (mm^2)	**Banyaknya Hari Hujan**	**Curah Hujan (mm^2)**	**Banyaknya Hari Hujan**	**Curah Hujan (mm^2)**	**Banyaknya Hari Hujan**
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Januari	214,10	19	215,1	23	383,9	25
2.	Februari	520,80	24	431,2	24	270,1	16
3.	Maret	138,70	15	188,6	22	327,3	23
4.	April	156,50	16	159,1	16	194,6	19
5.	Mei	135,00	10	16,7	5	47,8	6
6.	Juni	138,50	11	12,6	5	23,1	2
7.	Juli	119,90	7	14,5	1	0	0
8.	Agustus	0,80	1	33	1	0	0
9.	September	165,80	7	62	7	1	0
10.	Oktober	112,40	12	133,8	6	1	1
11.	November	195,30	17	140,9	11	50,1	8
12.	Desember	254,10	12	52,3	13	263,8	17

Cuaca di DKI Jakarta dipengaruhi angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam, dengan rata-rata temperatur terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi pada bulan Oktober dan November. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Data Cuaca Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019

No.	Bulan	2017			2018			2019		
		Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)			Suhu Udara (°C)		
		Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata	Max	Min	Rerata
1.	Januari	34,40	24,00	28,20	33,80	23,00	27,70	34,00	23,60	27,90
2.	Februari	32,40	23,40	27,20	32,40	23,40	27,20	34,00	24,00	28,20
3.	Maret	34,40	24,00	28,10	34,20	23,80	27,90	34,80	23,80	28,10
4.	April	34,20	24,80	28,50	34,40	24,00	28,70	35,20	24,80	28,80

5.	Mei	35,00	25,00	29,00	34,60	25,00	29,40	35,00	25,00	29,60
6.	Juni	35,20	24,00	28,70	35,00	24,00	28,90	34,40	24,40	29,20
7.	Juli	34,60	24,00	28,50	34,20	24,00	28,20	34,00	24,00	28,70
8.	Agustus	34,40	24,00	28,70	34,20	23,00	28,20	33,60	24,00	28,20
9.	September	35,00	24,00	28,80	35,40	24,20	28,60	35,00	24,00	28,80
10.	Oktober	34,20	23,00	28,90	35,20	24,00	29,30	35,00	24,60	29,40
11.	November	34,40	24,20	28,20	36,60	24,40	28,90	34,60	25,00	29,50
12.	Desember	34,80	24,00	28,20	35,40	24,40	28,70	33,80	24,80	28,40

3.1.5 Ekoregion

Ekoregion ditetapkan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 7 ayat 2, UU No. 32/2009). Dalam hal ini, ekoregion dipahami sebagai konsep unit karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan potensi lahan serta sebagai pembatas dalam pengelolaan lahan.

Ekoregion Darat. Pada tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta melalui melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah melakukan kajian penetapan ekoregion dalam Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap II. Ekoregion darat dideliniasi berdasarkan kesamaan dalam karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim serta batas administrasi (kecamatan). Seperti diketahui Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) ekoregion dalam konteks pengelolaan air permukaan. Informasi ke enam ekoregion tersebut ditampilkan dalam peta berikut.

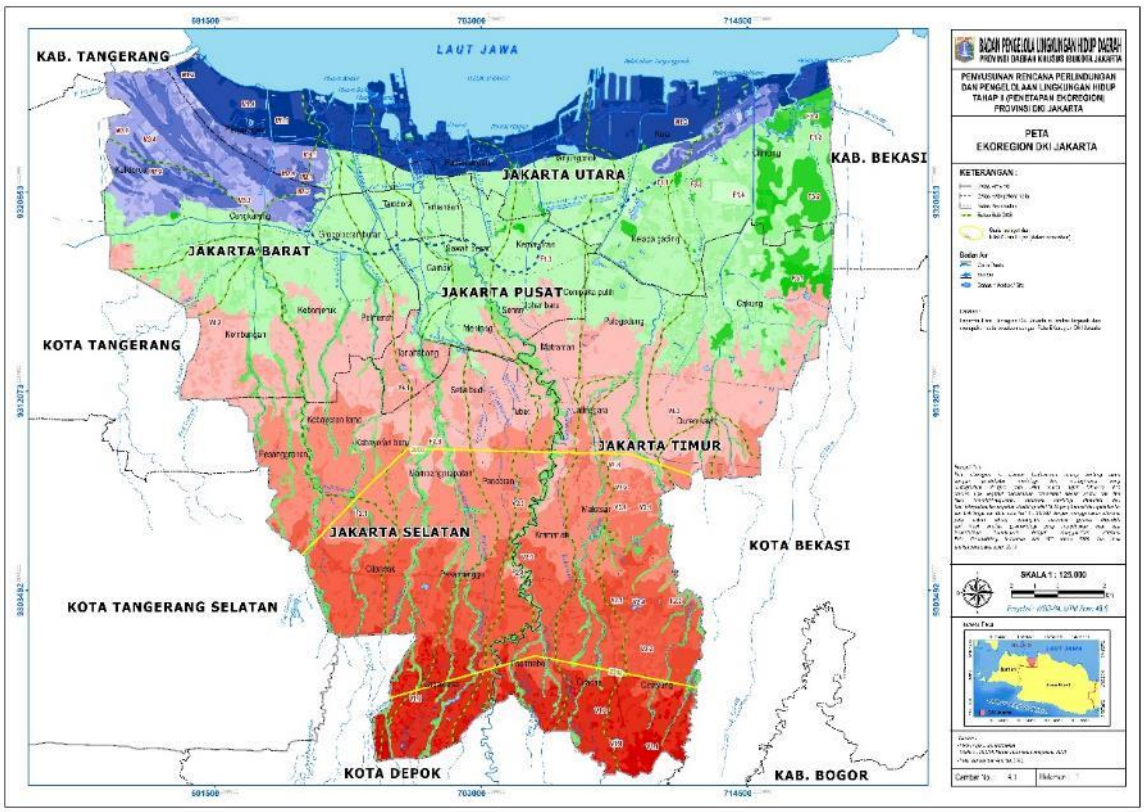

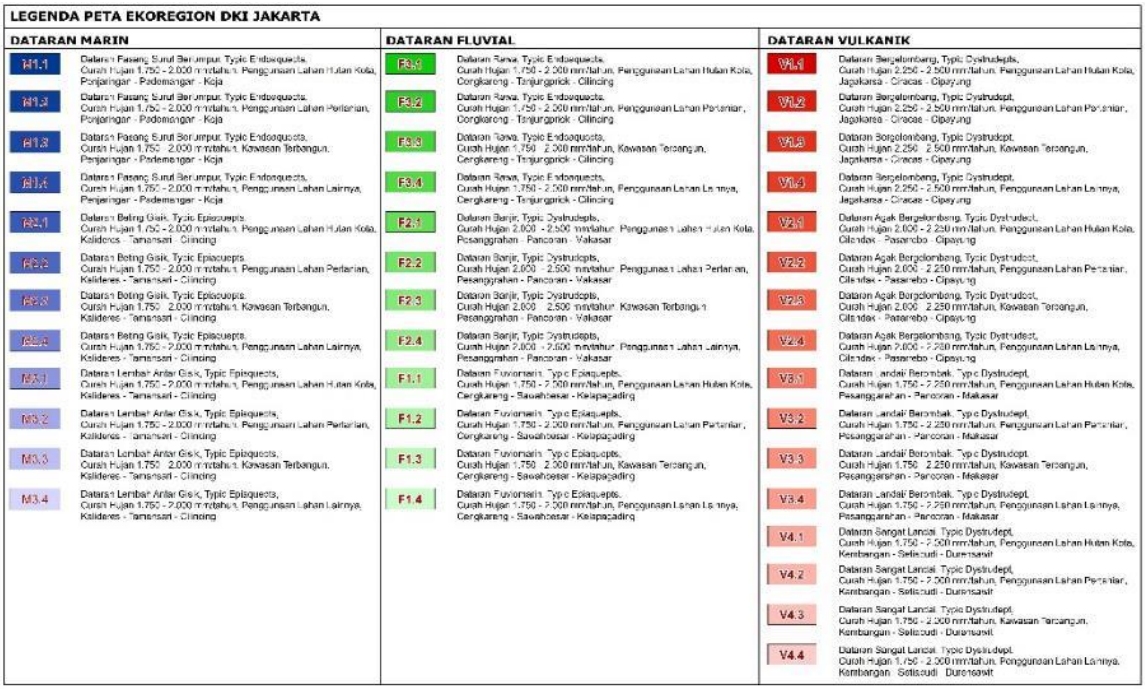

Gambar 3.7 Ekoregion Provinsi DKI Jakarta wilayah daratan
Sumber: (BPLHD, 2013)

Berdasarkan peta di atas, ekoregion DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi enam tipologi dataran sebagai berikut (BPLHD, 2013):

a. **Dataran Fluvio - marin:** dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan fluvial (aliran sungai). Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial.

b. **Dataran Banjir:** dataran yang terletak di sekitar alur sungai. Material penyusun pada dataran ini umumnya berupa kipas aluvium, dengan komposisi tuf halus berlapis, tuf pasiran berselingan dengan tuf konglomeratan yang terbentuk akibat aktivitas pengendapan fluvial (aliran sungai). Sesuai dengan namanya, dataran ini selalu tergenang banjir jika terjadi perluapan air sungai (debit meningkat) terutama di musim hujan.

c. **Dataran Rawa:** dataran yang terbentuk dari hasil proses deposisi (pengendapan) fluvial (seperti banjir) yang meninggalkan suatu dataran dengan cekungan-cekungan kecil yang tersebar secara acak. Kondisi hidrologi satuan ini dibangun oleh material aluvium yang mampu membentuk akuifer yang potensial dengan dukungan morfologi yang datar.

d. **Dataran Pasang Surut Berlumpur:** dataran yang terbentang sepanjang garis pantai, terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang) yang diikuti dengan aliran sungai yang bermuara ke laut.

e. **Dataran Beting Gisik:** dataran ini terbentuk oleh proses pengendapan marin (gelombang) yang berkerja sama dengan aliran sungai (fluvial) yang bermuara ke laut. Topografi dataran ini berupa punggungan (beting) dari materi timbunan pasir yang memanjang sejajar garis pantai.

f. **Dataran Vulkanik:** Ekoregion ini terbentuk sebagai hasil proses erupsi (letusan) gunung berapi yang penyebarannya dibantu oleh proses aliran sungai (fluvial), yang membentuk struktur berlapis horisontal dan tersortasi baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, dan semakin ke atas semakin halus).

Ekoregion Laut dan Kepulauan. Pada tahun 2014, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyusunan deliniasi Ekoregion Laut yang membahas mengenai morfologi dasar laut dan kekayaan ekosistem perairan kepulauan (BPLHD, 2014). Deliniasi ekoregion laut ditetapkan berdasarkan informasi batimetri, kualitas air dan keanekaragaman hayati. Hasil penyusunan deliniasi Ekoregion Laut mengidentifikasi terdapat lima tipologi ekoregion, seperti ditampilkan pada peta berikut ini:

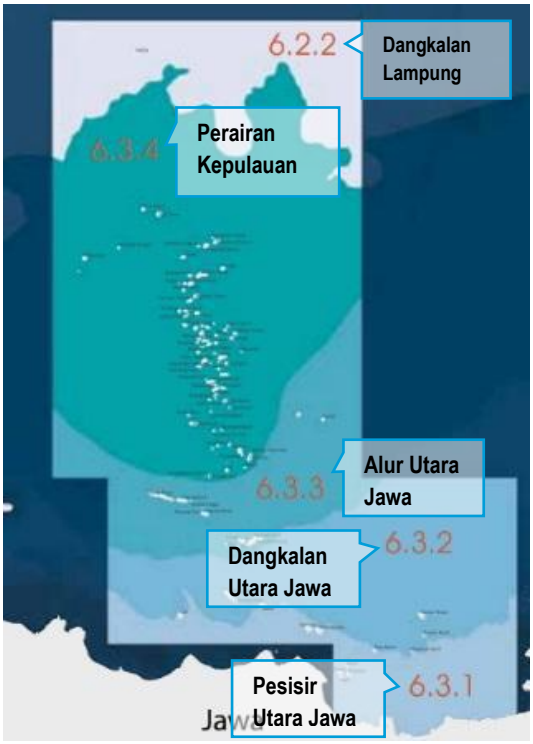

Gambar 3.8 Peta Ekoregion Laut DKI Jakarta
Sumber: (BPLHD, 2014)

a. **Pesisir Utara Jawa:** deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasarkan batimetri dan kualitas air. Ekoregion Pesisir Utara Jawa merupakan perairan Teluk Jakarta yang mencakup Pulau Rambut, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelor, Pulau Onrus, Pulau Kayangan dan Pulau Laki. Wilayah ini paling rentan terhadap cemaran air karena merupakan wilayah bermuaranya seluruh sungai dari daratan utama Jakarta. Paling banyak mengalami degradasi habitat, degradasi lingkungan, keberadaan pulau kecil lenyap karena tambang pasir, banjir rob, intrusi air laut akibat eksploitasi berlebihan pada sumber air tawar, dan pergeseran mata pencaharian ke arah pariwisata.

   Ekoregion ini memiliki kedalaman laut berkisar antara 0 – 18 m. Morfologinya terbagi menjadi tiga jenis pantai yaitu pantai landai (kelerengan 0º - 5º), pantai miring (kelerengan 5º - 15º), dan pantai terjal (kelerangan 15º - 90º). Ekosistem pantai landai ditumbuhi vegetasi mangrove biasa ditemukan di daerah Kamal dan Angke, dimana akar mangrove berfungsi untuk menjerat material sedimen dan membentuk rataan lumpur. Pantai miring yang biasa ditemukan di daerah Marunda hingga Segara Makmur tersusun dari material pasir dengan energi gelombang yang cukup besar. Pantai terjal merupakan bekas-bekas erosi yang tersusun dari material lempung, biasanya ditemukan di daerah Cilincing hingga Marunda.

b. **Dangkalan Utara Jawa:** deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasarkan batimetri. Ekoregion ini meliputi perairan Laut Jawa termasuk di dalamnya perairan sekitar Pulau Damar Besar, Pulau Damar Kecil, Pulau Bokor, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil.

Ekoregion Dangkalan Utara Jawa mempunyai sedimen dasar laut berupa lumpur (63,14%), pasir dan lanau (36,86%) dengan kedalaman laut berkisar antara 5 – 45 m. Beberapa pulau kecil di ekoregion ini telah dilaporkan telah lenyap atau mengalami perubahan geomorfologi yang parah. Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang Kecil memiliki permasalahan persampahan yang sangat mengganggu kegiatan setempat, karena tekanan sampah dalam jumlah besar dari wilayah daratan utama Jakarta terdampar di pulau-pulau ini.

c. **Alur Utara Jawa:** deliniator utamanya adalah parameter batimetri. Ekoregion ini merupakan perairan dalam antara 30-90 m yang meliputi Pulau Tidung, Pulau Payung dan gugus Pulau Pari. Dampak degradasi lingkungan pada ekoregion ini lebih rendah dibandingkan dua ekoregion sebelumnya karena tidak terpengaruh kegiatan dari daratan utama Jakarta. Seiring perkembangan penduduk wilayah ekoregion ini terdeteksi mengalami pencemaran air, permasalahan ketersediaan air tawar, perubahan komposisi dan tutupan karang keras.

d. **Perairan Kepulauan Seribu:** deliniator utamanya adalah batimetri dan keanekaragaman hayati. Ekoregion dengan kedalaman 0-40 m serta memiliki karakteristik dasar laut berupa lumpur (70,90%), pasir dan lanau (29,10%). Gugusan pulau terbanyak yang masuk dalam zona Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pertumbuhan pariwisata pada ekoregion ini cukup pesat sehingga berakibat pada eksploitasi sumberdaya hayati dan pencemaran lingkungan. Selain itu, aktivitas kapal tanker yang lalu lalang di sekitar wilayah ini berisiko menyebabkan cemaran laut berupa *tar ball* minyak mentah.

e. **Dangkalan Lampung:** deliniator utama ekoregion ini ditetapkan berdasar pada batimetri. Ekoregion dengan kedalaman laut 5-30 m dan memiliki karakteristik dasar laut berupa lumpur (55,24%), pasir dan lanau (44,76%). Ekoregion ini mencakup sebagian perairan Laut Jawa dan Pulau Sebira. Kondisi karang di pulau ini cukup baik dan masih minim masalah lingkungan.

3.1.6 Penutup Lahan

Pesatnya perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai dengan semakin luasnya lahan terbangun. Kecenderungan tersebut mengindikasikan ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, pola perubahan penggunaan lahan dililustrasikan sejak tahun 1972 hingga 2014.

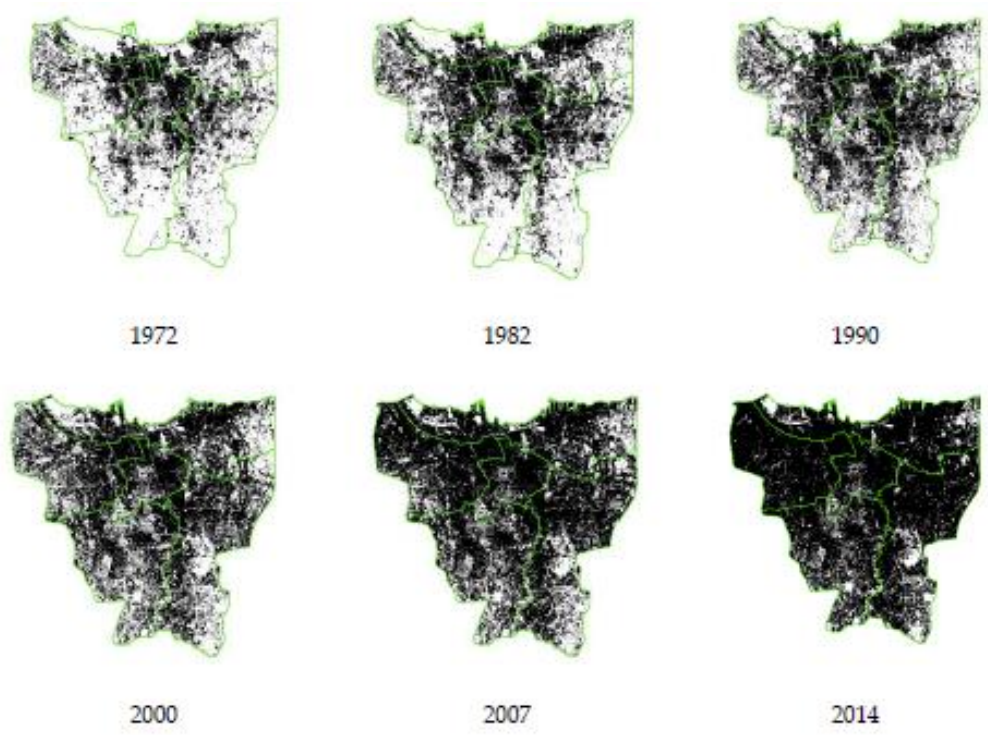

Gambar 3.9 Pola Perluasan Perkotaan Tahun 1972-2014
Sumber: (Garschagen, Matthias et.al, 2018)

Ilustrasi pada Gambar 3.9 di atas, menunjukkan perluasan perkotaan (ditandai dengan warna hitam) yang cenderung semakin massif dan padat, lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Sebagai Daerah Khusus Ibukota, Jakarta memposisikan wilayahnya sebagai provinsi pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya. Saat ini, populasi Jakarta telah berkembang menjadi lebih dari 10 juta, dari hanya sekitar 3 juta pada awal 1960-an. Seiring dengan pertumbuhan ini, DKI Jakarta telah mengalami ekspansi ruang yang luas (Garschagen, Matthias et.al, 2018).

Mencermati data spasial penggunaan lahan (penutupan lahan) pada tahun 2018, pemanfaatan lahan DKI Jakarta didominasi oleh tiga peruntukan lahan yaitu lahan hunian sebesar 50,04% (28.629 Ha), lahan usaha sebesar 28,24% (16.155 Ha), dan penggunaan lain sebesar 14,59% (8.345 Ha). Lahan hunian termasuk *guest house*, paviliun, rumah, panti dan asrama. Lahan usaha merupakan lahan yang diusahakan untuk menggerakkan perekonomian seperti industri, hotel, perkantoran, restoran, dan sebagainya. Sementara, yang dimaksud sebagai penggunaan lain adalah peruntukan bekas bangunan, danau, hijau lainnya, kebun, lahan kosong, rawa, situ/waduk, dan tegalan/ladang.[2]

Terlihat dari peta penutupan lahan tahun 2018 (Gambar 3.10Gambar 3.10) menunjukkan seluruh wilayah daratan Jakarta dipenuhi dengan warna merah muda yang merepresentasikan peruntukan permukiman semakin padat dan luas. Penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, memanfaatkan 565 km^2 dari 674 km^2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83% (Garschagen, Matthias et.al, 2018).

[2] Data spasial penutupan lahan tahun 2018 bersumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perlu menjadi catatan bahwa data spasial berupa *shapefile* menunjukkan perbedaan luas total Provinsi DKI Jakarta yaitu 57.214 Ha. Sementara, luas wilayah DKI Jakarta menurut Permendagri No. 137/2017 adalah 664,01 km^2 atau 66.401 Ha. Perbedaan luasan sangat mungkin terjadi karena proses skalasi pada peta dimana toleransi deviasi perbedaan mencapai 14%.

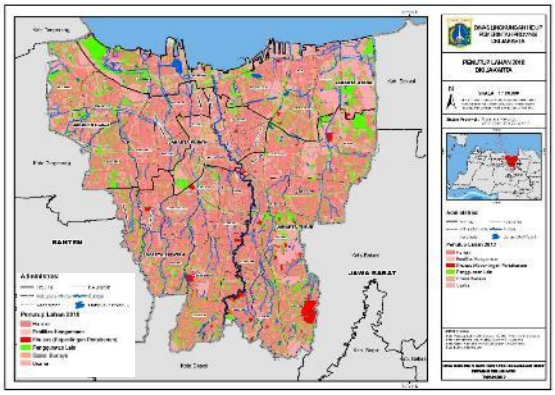

Sumber: Data spasial Penutup Lahan Pemprov DKI Jakarta, 2018 (skala 1:50.000)

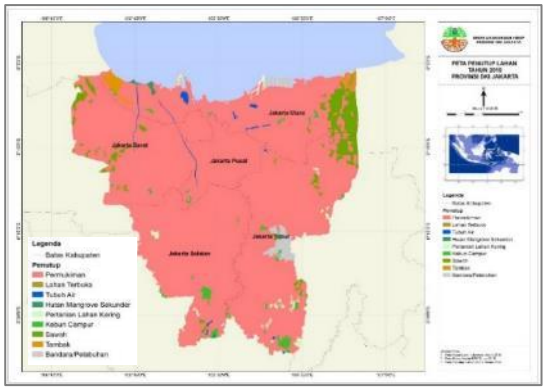

Sumber: Data spasial Penutup Lahan KLHK, 2018 (skala 1:250.000)

Gambar 3.10 Peta Penutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018

Karena pemanfaatan lahan yang sebagian besar digunakan untuk hunian, hampir dapat dipastikan bahwa DKI Jakarta tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi alam dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan air. Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas Lingkungan Hidup (hulu-hilir) dilakukan dengan upaya kebijakan kerjasama antar daerah dan upaya rekayasa teknologi.

3.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

3.2.1 Kependudukan (Demografi)

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.557.810 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 5.285.321 jiwa atau 50,06% dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.272.489 jiwa atau 49,94%. Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 memiliki *sex ratio* sebesar 100,24 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun					
		SP2010	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Laki-laki	4.870.938	5.115.357	5.159.683	5.202.815	5.244.690	5.285.321
2.	Perempuan	4.736.849	5.062.567	5.117.945	5.171.420	5.222.939	5.272.489
3.	Jumlah	9.607.787	10.177.924	10.277.628	10.374.235	10.467.629	10.557.810
4.	Pertumbuhan	1,42%	1,09%	1,07%	1,05%	1,07%	1,19%
5.	Densitas (ribu jiwa/km^2)	13,157	15,366	15,517	15,663	15,804	15,900
6.	*Sex Ratio*	102,83	101,04	100,8	100,61	100,42	100,24

Sumber: (BPS, 2020)

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 1,09%, tahun 2016 sebesar 1,07%, tahun 2017 sebesar 1,05%, tahun 2018 sebesar 1,07%, dan tahun 2019 sebesar 1,19%. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,90 ribu jiwa/km^2 di tahun 2019.

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar 3.11. Pada tahun 2019, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.459.400 jiwa atau sebesar 70,65% dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.614.791 jiwa atau 24,76%, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 483.619 atau 4,58%. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar 41,53% yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 41,53 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada Gambar 3.11 berikut:

Gambar 3.11 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019
Sumber: (BPS, 2020)

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, penduduk laki-laki cenderung berjumlah sama banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 3.182.004 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 29.008 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Komposisi Penduduk DKI Jakarta menurut Jenis Kelamin

No	Kota/Kab. Administrasi	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jakarta Pusat	462.170	465.939	928.109	99,19
2	Jakarta Utara	896.714	916.201	1.812.915	97.87
3	Jakarta Barat	1.305.220	1.284.713	2.589.933	101,60
4	Jakarta Selatan	1.131.588	1.113.111	2.264.699	99,87
5	Jakarta Timur	1.477.494	1.460.365	2.937.859	101,17

6	Kep. Seribu	12.135	12.160	24.295	99,79
	Jumlah	**5.285.321**	**5.272.489**	**10.557.810**	**100,24**

Sumber: (BPS, 2020)

3.2.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2012	1.222.527.924	1.369.432.639
2.	2013	1.296.694.573	1.546.876.491
3.	2014	1.373.389.129	1.762.316.399
4.	2015	1.454.563.847	1.989.088.747
5.	2016	1.539.916.881	2.159.073.617
6.	2017	1.635.359.147	2.365.353.854
7.	2018	1.736.291.045	2.599.326.206
8.	2019	1.838.500.708	2.840.827.863

Sumber: (BPS, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.369 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2.840 trilun pada tahun 2019 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2010 PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.838 triliun pada tahun 2019. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

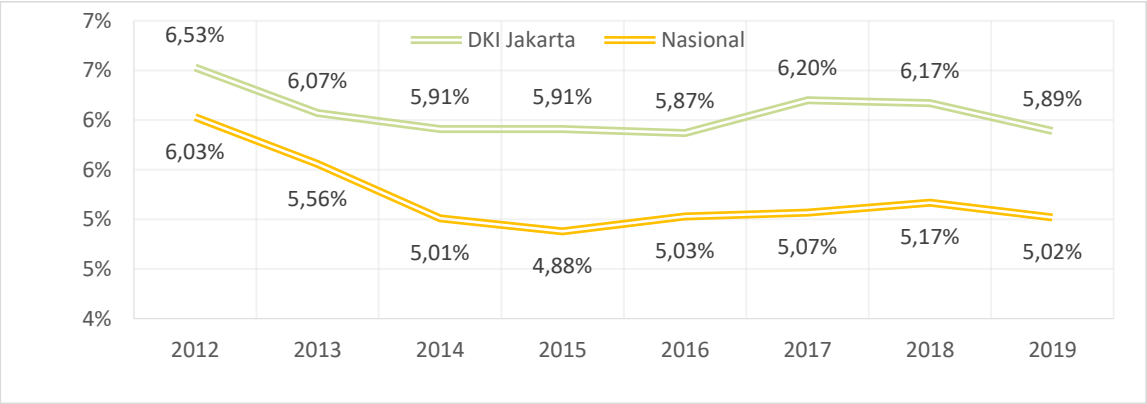

Gambar 3.12 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (BPS, 2020)

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor pedagang besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan 3 industri terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta

dengan nilai kontribusi berada pada kisaran 16% selama periode 2012-2019. Sektor ekonomi yang mengalami tren peningkatan kontribusi adalah sektor informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan asuransi, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dari enam sektor tersebut peningkatan tren paling siginfikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi.

Gambar di bawah ini juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dimana perekonomian Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; 3.17ndustry pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut.

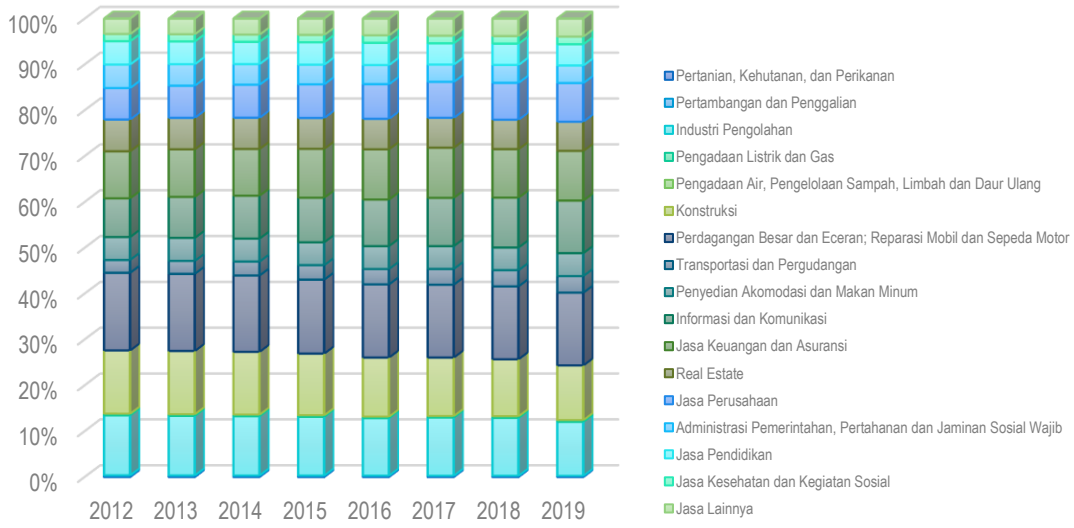

Gambar 3.13 Struktur Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (BPS, 2020)

3.3 Kondisi Fiskal dan Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta

3.3.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012–2019 (Juta Rupiah)

No.	Uraian	Tahun								Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	PENDAPATAN	35.379.180	39.517.544	43.824.300	44.209.238	53.784.706	64.823.887	61.235.825	62.300.680	8,84%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22.040.801	26.852.192	31.274.215	33.686.176	36.888.017	43.901.489	43.327.137	45.707.400	11,24%
1.1.1	Pajak Daerah	17.721.493	23.370.213	27.050.949	29.076.926	31.613.197	36.500.782	37.538.912	40.298.123	12,78%
1.1.2	Retribusi Daerah	1.820.435	333.787	515.162	459.459	675.475	624.137	578.556	587.384	-0,64%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	351.823	397.234	465.979	527.280	303.204	489.479	592.956	619.456	12,56%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	2.147.049	2.750.957	3.242.123	3.622.510	4.296.140	6.287.091	4.616.712	4.202.437	12,44%
1.2	Total Pendapatan Transfer	13.334.647	11.517.024	12.160.469	8.642.378	15.271.661	18.969.291	17.855.177	14.551.571	5,65%
1.2.1	Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer	11.554.964	9.387.539	9.677.533	5.887.267	15.271.661	18.969.291	17.855.177	14.494.393	14,87%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.984.787	8.863.205	9.279.068	5.751.741	12.304.612	16.605.609	15.026.198	11.585.305	9,12%
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil SDA	294.849	225.151	312.478	135.525	83.970	241.881	183.375	113.085	6,57%
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	275.327	299.182	85.985	0	0	0		0	-54,20%
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	0	0	0	2.883.078	2.121.802	2.645.604	2.796.003	1,32%
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.779.682	2.129.484	2.482.936	2.755.110	0	0	0	57.178	-13,20%
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0		-	0,00%
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	1.779.682	2.129.484	2.482.936	2.755.110	0	0		57.178	-13,20%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.731	1.148.327	389.614	1.880.682	1.625.027	1.953.107	53.511	2.041.708	4945,64%
1.3.1	Hibah	3.731	1.148.327	389.614	1.880.682	1.625.027	1.953.107	53.511	2.041.708	4945,64%
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0		0	0,00%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2019

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dari tahun 2012 hingga tahun 2019, PAD mengalami peningkatan. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2015, mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 namun meningkat kembali pada tahun 2018 hingga tahun 2019.

3.3.2 Peran Para Pihak

Pembangunan segala sektor di DKI Jakarta tidak terlepas dari peran para pihak. Identifikasi para pihak dilakukan dengan melihat kontribusinya pada pencapaian TPB, hal ini juga tercantum dalam laporan pencapaian TPB. Tabel di bawah ini menunjukan kontribusi mitra pembangunan ke dalam indikator TPB.

Tabel 3.9. Kontribusi Mitra Pembangunan

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
1. UN Habitat	TPB 16, indikator 16.1.2.(a), TPB 11, indikator 11.7.1(a)
2. AUSAID - MAMPU	TPB 16, indikator 16.2.1.(b) TPB 5, indikator 5.2.2.*
	TPB 16, indikator 16.3.1.(a), 16.10.1.(b) TPB 11, indikator 11.7.2.(a) TPB 10, indikator 10.3.1.(c)
3. MAMPU	TPB 10, indikator 10.4.1.(b)

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
	TPB 1
	TPB 8, indikator 8.3.1*, 8.3.1.(c)
4. USAID - MAJU	TPB 16, indikator 16.2.1.(b)
	TPB 16, indikator 16.10.1.(b)
	TPB 11, indikator 11.7.2.(a)
	TPB 10, indikator 10.3.1.(c)
	TPB 5, indikator 5.2.2.*
5. European Union	TPB 16, indikator 16.6.1.(d)
	TPB 11, indikator 11.3.2.(a)
6. IDLO	TPB 16, indikator 16.10.1.(b)
7. LBH Apik	TPB 16,
	TPB 10 indikator 10.3.1.(c)
	TPB 5, indikator 5.2.2.*
	TPB 16, indikator 16.10.1.(b)
	TPB 5, indikator 5.2.2.*
8. Yayasan Karina	TPB 12, indikator 12.5.1.(a),
	TPB 11, indikator 11.6.1.(a),
	TPB 8, indikator 8.3.1.(b)
	TPB 8, indikator 8.3.1.(b)
	TPB 2, indikator 2.1.1*
	TPB 1
	TPB 11, indikator 11.5.1.(b)
	TPB 6, indikator 6.1.1.(a), TPB 1 1.4.1 (d)
	TPB 6, indikator 6.2.1.(c)
	TPB 4, indikator 4.4.1*
9. InsWa	TPB 12, indikator 12.5.1.(a)
	TPB 11, indikator 11.6.1.(a)
10. UCLG	TPB 16
	TPB 11, indikator 11.5.1.(b)
11. RCUS Goethoeus Institute	TPB 11, indikator 11.1.1(a)
	TPB 11, indikator 11.3.2.(a)
	TPB 11, indikator 11.6.1.(a)
12. FES	TPB 11, indikator 11.1.1(a)
13. Yayasan Plan Intenational	TPB 16, indikator 16.10.1.(b)
	TPB 11, indikator 11.3.2.(a)
	TPB 5, indikator 5.2.1*
	TPB 8, indikator 8.6.1*
14. PPNI	TPB 11, indikator 11.5.1*, TPB 3, TPB 2, TPB 1
15. Platform Muria	TPB 11, TPB 6, TPB 2, TPB 1
	TPB 4, indikator 4.4.1*
16. Rumah Zakat	TPB 10, indikator 10.1.1*, 10.1.1.(a), 10.2.1*, TPB 1
	TPB 5, indikator 5.6.1.(a), TPB 3, 3.7.1.(a), TPB 1 indikator 1.4.1.(c)
	TPB 4, indikator 4.1.1.(d), TPB 1
	TPB 2, indikator 2.1.1.(a)
	TPB 1, indikator 1.4.1.(a)

Mitra	Kontribusi Capaian TPB
	TPB 1, indikator 1.4.1.(b)
17. Komunitas Raksasa	TPB 8, indikator 8.2.1*
18. Armor Indonesia	TPB 8, indikator 8.2.1*
19. Accenture	TPB 8, indikator 8.6.1*
20. PAM Jaya	TPB 6, indikator 6.1.1.(a)
	TPB 6, indikator 6.1.1.(b)
	TPB 6, indikator 6.1.1.(c), TPB 1, 1.4.1.(d)
21. GIZ	TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e)
22. Jakarta Berketahanan	TPB 6, indikator 6.2.1.(c), TPB 1 1.4.1 (e)
23. Youth Coalition for Girls	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
24. Google	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
25. ECPAT	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
26. ICT Watch	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
27. Sejiwa	TPB 5, indikator 5.2.1.(a)
28. Yayasan Tunas Muda Care	TPB 4, indikator 4.1.1*, TPB 1
29. YPAC	TPB 4, indikator 4.a.1* TPB 1
30. IGI	TPB 4, indikator 4.c.1*
31. PGRI	TPB 4, indikator 4.c.1*
32. IBI bersama masyarakat	TPB 3, indikator 3.1.1*, 3.2.2.(b) TPB 2, indikator 2.1.1.(a), 2.2.2* TPB 1
33. IPPI	TPB 3, indikator 3.3.1.(a)
34. Smoke Jakarta	TPB 3, indikator 3.3.1.(a), 3.a.1*
35. ITMI	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
36. ITMI	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
37. Yayasan Mitra Netra	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
38. YDMI & Mitra	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)
39. Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus	TPB 1, indikator 1.3.1.(c)

Sumber: (SDGs DKI Jakarta, 2020)

BAB 4

BAB 4 GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA

4.1 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

Perkembangan pemanfaatan lahan Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, bahkan terhitung pada tahun 2014 penggunaan lahan perkotaan telah meningkat sebesar 276% selama empat dekade terakhir, memanfaatkan 565 km^2 dari 674 km^2 ruang yang tersedia, yaitu lebih dari 83% (Garschagen, Matthias et.al, 2018). Hal ini secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi kemampuan lingkungan hidup dalam memberikan fungsi dan manfaat kepada manusia. Tentunya kondisi tersebut dapat berimbas pada penurunan daya dukung lingkungan hidup di suatu wilayah.

Oleh karena itu, memahami kondisi lingkungan hidup suatu wilayah menjadi sangat penting terutama dalam hal melakukan perencanaan pembangunan dan evaluasinya. Sejak awal, Jakarta dijadikan sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia agar dapat menjadi kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Implikasi dari keputusan ini mengarahkan Jakarta sebagai sentral kegiatan nasional sehingga memiliki daya tarik migrasi masuk yang besar.

Hal tersebut di atas tentu berakibat pada peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta yang seiring tahun dari 2010 sampai 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1,19%. Hasil proyeksi statistik menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 10.557.810 jiwa dengan tingkat kepadatan diperkirakan mencapai 15.900 jiwa/km^2 (BPS, 2020). Selain itu, mobilitas pendatang dari sekitar Bodetabek juga tidak dapat dikesampingkan jumlahnya. Berdasarkan data statistik komuter tahun 2019, terdapat 1.255.771 orang dari wilayah Bodetabek yang berkegiatan utama di DKI Jakarta (BPS, 2019).

Tekanan jumlah penduduk yang besar tentu akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim. Dalam hal ini, DKI Jakarta memiliki keterbatasan ruang dan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan. Bahkan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipandang secara politis dengan melibatkan banyak pihak dan daerah sekitarnya dalam rangka mewujudkan kesetimbangan daya dukung lingkungan hidup.

4.1.1 Daya Dukung Air

Dalam rangka mengkaji Rancangan Perubahan RPJMD, KLHS memanfaatkan hasil-hasil studi yang tersedia untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan cakupan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), DKI Jakarta memiliki keterikatan ekosistem dengan wilayah Bodetabek-Punjur. Dapat dilihat dari peta di samping, ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi 5 (lima) wilayah DAS (WD) yang mencakup lintas administrasi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

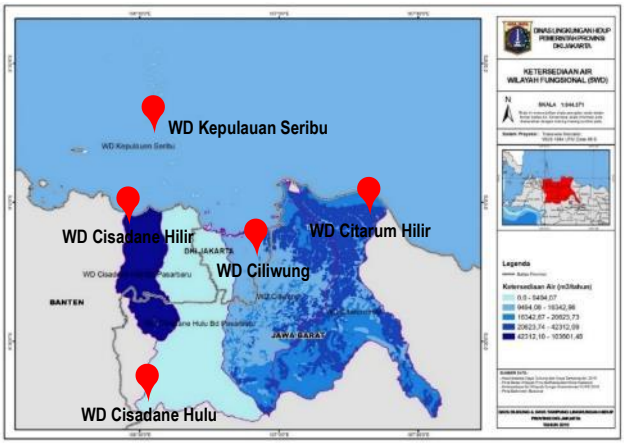

Gambar 4.1 Wilayah DAS Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (DLH, 2019)

Lima wilayah DAS tersebut meliputi WD Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru, WD Citarum Hilir, WD Ciliwung, WD Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru, dan WD Kepulauan Seribu. Data debit air dari KemenPU pada tahun 2016 menunjukkan wilayah DAS Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru memiliki ketersediaan air permukaan paling banyak (lihat Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Ketersediaan Air pada 5 Wilayah DAS

Wilayah DAS (WD)	Ketersediaan Air (m^3/tahun)
WD Cisadane Hilir Bendung Pasarbaru	2.065.825.816
WD Citarum Hilir	1.890.981.644
WD Ciliwung	1.650.778.439
WD Cisadane Hulu Bendung Pasarbaru	432.605.843
WD Kepulauan Seribu	2.678.700
Total Ketersediaan Air 5 WD	**6.042.870.443**

Sumber: KemenPU, 2016

Data di atas digunakan sebagai informasi dasar untuk membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air sehingga dapat diketahui dimana wilayah-wilayah yang diindikasikan telah melampaui daya dukung air. Pada tahun 2019, DLH telah melaksanakan Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup yang mencakup analisis mengenai jasa lingkungan hidup, daya dukung air, dan rekomendasi perbaikan lingkungan hidup.

Dalam laporan tersebut menyatakan bahwa **98%** wilayah DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung air (ditandai dengan warna **merah**) seperti terlihat pada peta berikut ini.

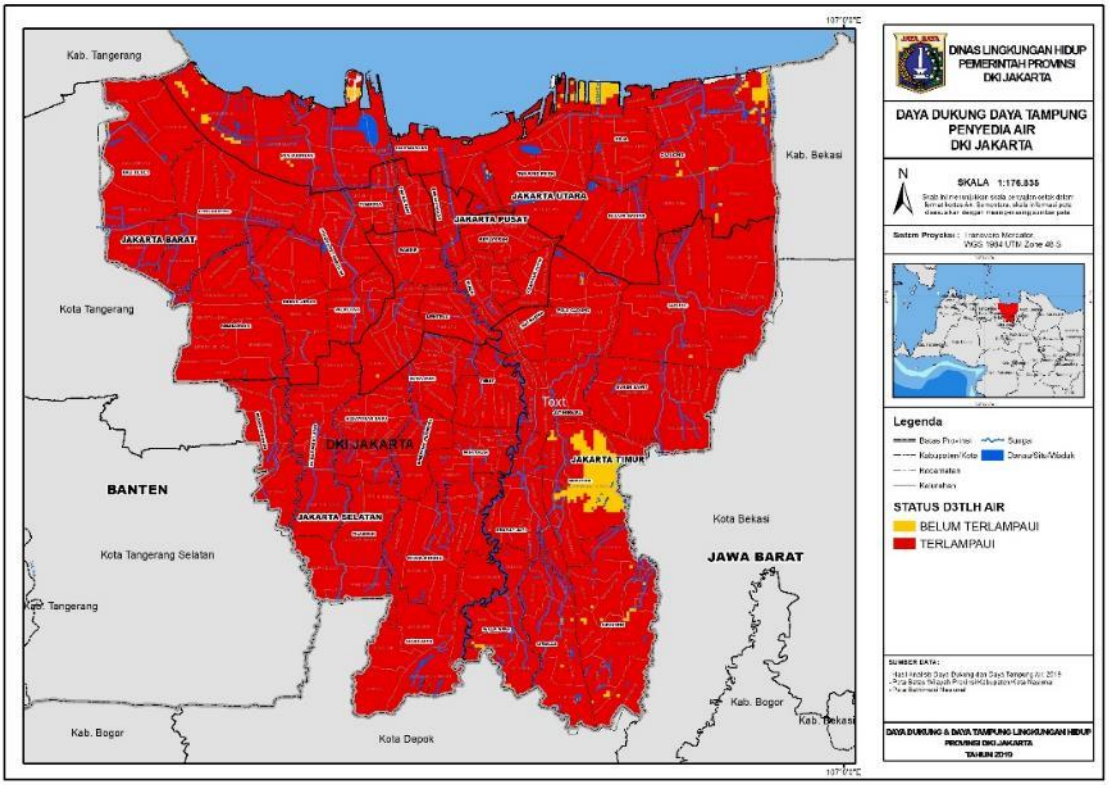

Gambar 4.2 Status Indikatif DDLH Penyedia Air Wilayah Daratan Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (DLH, 2019)

Status indikatif terlampaui menunjukkan bahwa kemampuan fungsi lingkungan DKI Jakarta dalam menyediakan air permukaan belum mampu memenuhi kebutuhan air baik untuk kegiatan domestik dan lahan

di provinsi tersebut. Jumlah ketersediaan air jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan air DKI Jakarta. Tidak mengherankan, apabila DKI Jakarta perlu melakukan distribusi air dari luar daerah untuk mendapatkan sumber-sumber air baku demi memenuhi kebutuhan air di dalam wilayah provinsi. Terlebih kondisi kualitas air sungai di Provinsi DKI Jakarta dalam status cemar sedang dan berat sehingga kurang layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Metodologi perhitungan daya dukung air memanfaatkan pendekatan jasa lingkungan hidup penyedia air dengan bantuan distribusi spasial sistem grid 5'x5' dalam model *close system*. Indikasi daya dukung air terlampaui ditentukan berdasarkan selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air dalam satu wilayah seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Rekap Hasil Analisis Daya Dukung Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Wilayah DAS – WD (wilayah fungsional)	Ketersediaan Air (m^3/tahun)
Cisadane Hilir Bd Psrbaru	2.065.825.816
Citarum Hilir	1.890.981.644
Ciliwung	1.650.778.439
Cisadane Hulu Bd Psrbaru	432.605.843
Kepulauan Seribu	2.678.700
Total	6.042.870.443

Wilayah Administrasi (Kota/Kabupaten)	Volume (m^3/tahun)					Luas D3T Air (Ha)		Ambang Batas** (jiwa)	Indikasi Status D3T Air
	Ketersediaan Air DKI Jakarta	Kebutuhan Air			Selisih	BT*	Terlampaui		
		Domestik	Lahan	Total					
JAKARTA BARAT	22.768.332	373.756.350	19.059.275	392.815.625	- 370.047.293	26	12.733	155.905	Terlampaui
JAKARTA TIMUR	118.343.391	425.893.680	34.105.062	459.998.742	- 341.655.351	817	18.126	810.575	Terlampaui
JAKARTA SELATAN	41.371.172	328.006.666	12.861.632	340.868.298	- 299.497.126	14	14.806	283.342	Terlampaui
JAKARTA UTARA	75.222.527	262.330.610	51.443.757	313.774.367	- 238.551.840	543	13.505	515.119	Terlampaui
JAKARTA PUSAT	22.866.493	135.039.342	4.466.695	139.506.037	- 116.639.544	2	4.775	156.641	Terlampaui
KEPULAUAN SERIBU	2.678.700	3.522.980	-	3.522.980	- 844.280	N/A	N/A	18.347	Terlampaui
TOTAL	283.250.615	1.528.549.628	121.936.421	1.650.486.049	- 1.367.235.433	1.402	63.995	1.939.929	

Keterangan:
*) BT: "Belum Terlampaui", merupakan kondisi dimana ketersediaan air lebih besar dibandingkan kebutuhannya. Sementara "Terlampaui" diartikan sebagai kondisi dimana ketersediaan air belum dapat memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan domestik dan lahan.
**) Ambang Batas: Jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung dengan ketersediaan air permukaan yang ada. Dihitung berdasarkan nilai ketersediaan air dibagi dengan angka Kebutuhan Air Domestik Perkotaan Metropolitan (73 m^3/kapita/tahun x faktor koreksi 2 = 146 m^3/kapita/tahun).
- N/A: data tidak tersedia sehingga tidak dapat dianalisis.

Sumber: (DLH, 2019)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa daya dukung seluruh kota dan kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta diindikasikan terlampaui. Selain keterikatan ekosistem, penentuan 5 (lima) wilayah DAS sebagai wilayah fungsional yang mempengaruhi ketersediaan air di DKI Jakarta didasarkan pada pertimbangan pengambilan sumber air baku DKI Jakarta yang sebagian besar berasal dari Waduk Jatiluhur, IPA Cikokol dan IPA Serpong.

Meskipun DKI Jakarta didukung dari lima sisi wilayah DAS, tidak serta merta menjadikan wilayah provinsi memiliki surplus ketersediaan air permukaan. Berdasarkan modeling spasial, dari total ketersediaan air permukaan 5 (lima) wilayah DAS sebanyak 6.042.870.443 m^3/tahun hanya sekitar 4,69% atau 283.250.615 m^3/tahun air yang terdistribusi ke wilayah DKI Jakarta. Sementara, kebutuhan air Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 1.650.486.049 m^3/tahun dengan proporsi peruntukan 92,61% digunakan untuk memenuhi kegiatan domestik dan 7,39% digunakan untuk memenuhi kegiatan ekonomi berbasis lahan. Selisih kesetimbangan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan nilai minus, yang mengartikan bahwa air di DKI Jakarta akan terus mengalami defisit kuantitas jika dimanfaatkan tanpa melakukan upaya *recharge* ataupun alternatif lain. Selain itu, jumlah penduduk yang sudah mencapai ±10,5 juta jiwa juga diperkirakan telah melebihi daya tampung populasi yang dapat didukung oleh ketersediaan air lokal yaitu hanya ±1,94 juta jiwa. Inilah yang mendasari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta diindikasikan telah melampaui daya dukung dan daya tampung air.

Isu penyediaan air ini kemudian mengemuka pada saat FGD bersama Tim Pembuat KLHS terutama ketika dikaitkan dengan kondisi pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 menuntut adanya penanganan yang komprehensif baik dari perubahan perilaku masyarakat, penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung, penanganan medis serta menjaga stabilitas perekonomian. Implikasi dari respon penanganan pandemi

diperkirakan dapat meningkatkan kebutuhan akan air untuk mendukung terwujudnya pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di lingkup keluarga, fasilitas umum, perkantoran dan kegiatan sosial.

Dalam kaitannya dengan rancangan Perubahan RPJMD, isu mengenai kuantitas dan kualitas air tetap menjadi fokus yang memerlukan perhatian penanganan lebih dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Selain itu, isu tentang ketersediaan air secara langsung memiliki keterkaitan dengan banyak kepentingan lain seperti perbaikan fungsi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, sanitasi yang layak (persampahan & limbah), ketersediaan ruang resapan dan ruang hijau. Secara tidak langsung, perbaikan dari sisi pengelolaan air juga diharapkan dapat memberikan pengaruh perbaikan terhadap sektor lain setidaknya pada upaya mitigasi bencana banjir, perubahan iklim, dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.2 Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan DKI Jakarta dilakukan melalui pendekatan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan di dalam wilayah provinsi. Banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan salah satunya dengan memanfaatkan nilai kalori seluruh bahan pangan yang dihasilkan di dalam wilayah DKI Jakarta. Metode lainnya dapat dihitung menggunakan pertimbangan kecukupan lahan pertanian basah yang dikonversikan sebagai potensi produksi beras. Sedangkan nilai kebutuhan pangan dihitung berdasarkan populasi penduduk yang tinggal di wilayah provinsi.

Daya Dukung Pangan berdasarkan Nilai Kalori. DKI Jakarta masih memiliki lahan pertanian basah meskipun luasnya sangat terbatas. Tercatat dalam BPS tahun 2019, luas panen tanaman pangan sebanyak 622,59 Ha tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara dengan hasil panen setara beras sebanyak 1.969,94 ton. Sementara dari hortikultura produk yang dihasilkan adalah bayam (29.628 kuintal), kangkung (43.808 kuintal), sawi (27.861 kuintal), jengkol (3 kuintal), melinjo (6.460 kuital) dan petai (107 kuintal). Buah-buahan yang dihasilkan di wilayah provinsi DKI Jakarta cukup variatif dengan total produksi sebanyak 1866 ton. Selain itu, produk hewani dari peternakan dan perikanan juga tercatat memberikan kontribusi penambahan nilai kalori yang cukup besar. Keseluruhan bahan pangan tersebut dikonversikan menjadi nilai kalori dengan faktor konversi sebagai berikut.

Tabel 4.3 Daftar Kalori Bahan Pangan

Bahan Pangan	Kalori (kkal/100 gram)	Bahan Pangan	Kalori (kkal/100 gram)
Beras	360	Markisa*	70
Bayam	36	Nangka	106
Kangkung	29	Pepaya	46
Sawi	22	Pisang	127
Jengkol	20	Rambutan	69
Melinjo	66	Salak	77
Petai*	36	Sawo	92
Alpukat	85	Sirsak	65
Anggur	50	Sukun	126
Belimbing	36	Sapi Potong	207
Duku	63	Kerbau	84
Durian	134	Kambing	154
Jambu Air	46	Domba	206
Jambu Biji	49	Itik	326
Jeruk Besar	45	Telur Itik	189
Jeruk Siam	45	Susu Sapi	61
Jeruk	45	Ikan Laut*	107

Bahan Pangan	Kalori (kkal/100 gram)	Bahan Pangan	Kalori (kkal/100 gram)
Mangga	44		
Manggis	63		

Sumber: Kementerian Kesehatan

Konversi bahan pangan di atas merupakan bahan pangan yang diproduksi secara lokal di wilayah DKI Jakarta. Kemudian, bahan pangan tersebut diklasifikasikan menjadi 8 kategori mencakup padi-padian, sayuran, buah-buahan, daging, unggas, telur, susu, dan ikan. Nilai ketersediaan pangan berdasarkan kalori bahan pangan relatif besar yaitu sekitar **376.066.256.048 kkal** (lihat Tabel 4.4). Namun demikian, konsumsi penduduk perkotaan sangat variatif terutama untuk bahan makanan olahan dan jenis pangan lainnya. Hal ini yang mendesak pemerintah provinsi untuk memastikan distribusi ketersediaan bahan pangan sesuai dengan perkembangan produk olahan dan usaha kuliner.

Tabel 4.4 Ketersediaan Pangan DKI Jakarta berdasarkan Nilai Kalori

Kategori Bahan Pangan	Ketersediaan Pangan (kkal)
Padi-padian	2.241.324.000
Sayuran	3.380.254.000
Buah-buahan	12.565.457.000
Daging	45.406.998.000
Unggas	130.256.560.000
Telur	71.273.790.000
Susu	3.203.048
Ikan	110.938.670.000
Total	**376.066.256.048**

Sumber: (Analisis, 2020) dan (BPS, 2020)

Sedangkan, perhitungan kebutuhan pangan berdasarkan kalori dihitung dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang tercantum dalam Permenkes No. 28 Tahun 2019. Peraturan ini memberikan standar minimum gizi yang seyogyanya dipenuhi oleh masyarakat Indonesia untuk hidup layak dan sehat. Salah satunya, standar minimum gizi dari sisi kalori yang diklasifikasikan berdasarkan umur penduduk seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Angka Kecukupan Energi

Umur Penduduk	AKE Laki (kkal)	AKE Perempuan (kkal)
0-9	1650	
10-14	2400	2050
15-19	2650	2100
20-24	2650	2250
25-29	2650	2250
30-34	2550	2150
35-39	2550	2150
40-44	2550	2150
45-49	2550	2150
50-54	2150	1800
55-59	2150	1800
60-64	2150	1800
65<	1800	1550

Sumber: Permenkes No. 28/2019

Mengacu pada Angka Kebutuhan Energi di atas, kebutuhan pangan DKI Jakarta pada tahun 2019 berdasarkan nilai kalori diperkirakan mencapai **22.744.203.650 kkal** (lihat Tabel 4.6). Dari grafik batang di bawah ini, terlihat bahwa selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan dari sisi kalori tidak menunjukkan defisit pangan atau ketersediaan kalori jauh lebih tinggi dibandingkan kebutuhannya. Artinya, dapat dikatakan daya dukung pangan DKI Jakarta dari sisi kecukupan nilai kalori secara indikatif belum terlampaui. Meskipun demikian, banyak faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan pangan DKI Jakarta salah satunya karena pesatnya perkembangan sektor ragam kuliner. Hal ini yang kemudian mendasari perlunya memaksimalkan dan mengefisiensi logistik pangan dari daerah lain untuk memastikan kecukupan pangan untuk berbagai sektor di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.6 Kebutuhan Pangan DKI Jakarta berdasarkan Nilai Kalori

Kategori	Kebutuhan Pangan (kkal)
Anak	3.019.066.050
Remaja	3.462.420.350
Dewasa	13.790.006.100
Lanjut Usia	2.472.711.150
Total	**22.744.203.650**

Sumber: (Analisis, 2020) dan (BPS, 2020)

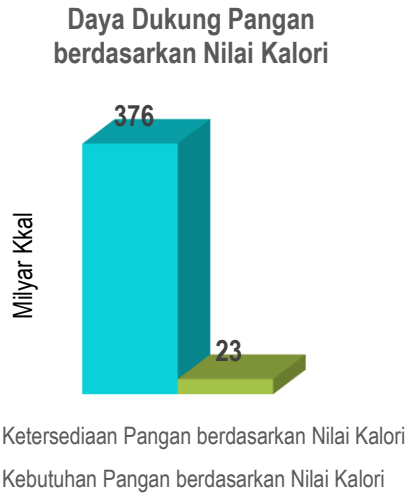

Gambar 4.3 Daya Dukung Pangan DKI Jakarta berdasarkan Kecukupan Nilai Kalori

4.2 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Dampak dan risiko lingkungan hidup dalam kajian ini dipandang dari perubahan kondisi lingkungan hidup yang mendasar, dan dapat diukur melalui media lingkungan seperti kualitas air dan masalah persampahan. Kebutuhan terhadap air merupakan hal mendasar yang mutlak diperlukan secara merata di seluruh wilayah provinsi. Tekanan penduduk dan masifnya pembangunan di DKI Jakarta menyebabkan kondisi lingkungan kian menurun. Meskipun, banyak upaya dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi lingkungan, hal ini masih belum dapat mengatasi besaran akumulasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi dari tahun ke tahun.

Kualitas Air. Isu mengenai kualitas air muncul dari stakeholder selama proses diskusi terbatas dan konsultasi publik karena sebagian besar kualitas air sungai di DKI Jakarta dalam status cemar sedang hingga berat. Sebagai wilayah hilir, banyak sekali faktor yang mempengaruhi buruknya kualitas air DKI Jakarta. Dengan kondisi kualitas yang sedemikian, sangat tidak efisien menjadikan air sungai DKI Jakarta sebagai sumber air baku olahan. Opsi lain yang dimiliki DKI Jakarta adalah distribusi air baku dari sumber-sumber hulu dan sumber air layak dari daerah sekitar. Isu kualitas air semakin kuat digaungkan mengingat kebutuhan terhadap air kian meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta kebutuhan untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di kalangan masyarakat secara umum. Bukan tanpa alasan, PHBS sangat diperlukan sebagai bentuk adaptasi dan respon penanganan terhadap kondisi pandemi COVID-19. Berikut ini capaian IKA Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 hingga 2019.

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian IKA	34,71	34	22,35	24,62	21,33	31,43	35,56

Sumber: (DLH, 2019), (KemenLHK, 2020)

Pengelolaan Persampahan. Aktifitas ekonomi, jumlah populasi, pola konsumsi dan perilaku masyarakat terkait pembuangan dan pengelolaan sampah sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume timbulan sampah di DKI Jakarta. Sementara, penanganan timbulan sampah tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan sampah oleh pemerintah dan masyarakat, ketersediaan lahan untuk pengelolaan sampah, serta partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak maksimal berakibat pada peningkatan pencemaran di sungai dan lokasi lainnya karena kurangnya kesadaran masyarakat dengan membuang sampah ke saluran drainase atau sungai. Untuk mengurangi potensi cemaran tersebut tentu harus memperhatikan kapasitas penanganan sampah yang sesuai dengan beban timbulannya.

Sampah Domestik. Beban timbulan sampah tiap kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta dapat dihitung berdasarkan jumlah populasi dan rata-rata timbulan sampah kota megapolitan. Angka timbulan sampah di Jakarta diperkirakan 3,4 liter tiap orang per hari dan kepadatan sampah adalah 0,20 kg/liter, yang berarti bahwa angka timbulan sampah adalah 0,68 kg tiap orang tiap hari (DLH, 2018).Namun, apabila dilihat dari besarnya jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPST Bantar Gebang seperti ditampilkan dalam histori sampah tertangani dari tahun 2018-2020 (lihat Gambar 4.4), maka diperkirakan angka timbulan sampahnya meningkat menjadi 0,72 kg/orang/hari.

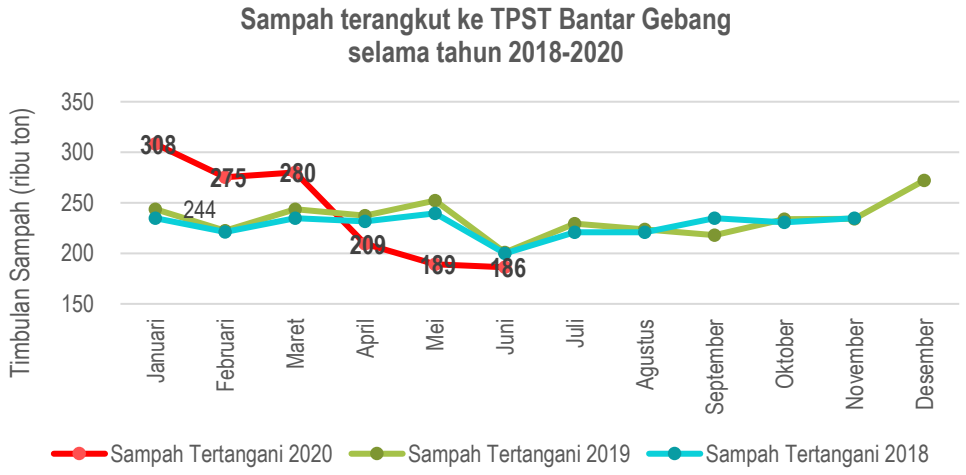

Gambar 4.4 Sampah Terangkut ke TPST Bantar Gebang Tahun 2018-2020
Sumber: DLH, 2020

Grafik di atas menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2018 dan 2019. Hal yang wajar terjadi karena kapasitas TPST Bantar Gebang hanya mampu menampung pembuangan sampah sebanyak 7.000 ton/hari. Jumlah timbulan sampah tahun 2019 yang terangkut ke TPST Bantar Gebang diperkirakan mencapai 2.811.257 ton/tahun atau 7.702 ton/hari.

Pada awal tahun 2020, timbulan sampah domestik meningkat sekitar 26% dari tren timbulan sampah bulan Januari. Hal ini juga dipengaruhi adanya kejadian banjir besar di awal tahun 2020 yang merendam 158 kelurahan sehingga menyebabkan peningkatan signifikan jumlah sampah yang terbawa banjir dari hulu hingga hilir. Data tahun 2020 masih merupakan angka sementara yang diperbaharui hingga bulan Juni. Perkiraan angka timbulan sampah tidak bisa menggunakan data tersebut. Selain itu, pada bulan Maret hingga Juni 2020 terjadi anomali tren timbulan sampah yang disebabkan adanya penerapan kebijakan PSBB sebagai tindakan responsif terhadap kejadian pandemi COVID-19. Oleh karena itu, beban timbulan sampah tiap wilayah dihitung dari angka timbulan sampah tahun 2019 yaitu 0,72 kg/orang/hari dengan data proyeksi jumlah penduduk tahun 2019.

Gambaran sebaran timbulan sampah diberikan agar memudahkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Dengan demikian, baik pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan persampahan di daerah tersebut. Sebaran timbulan sampah dianalisis secara spasial dengan memanfaatkan distribusi grid 5'x5' berbasis pada fungsi permukiman dan jalan. Hasil analisis tersebut ditampilkan melalui peta berikut.

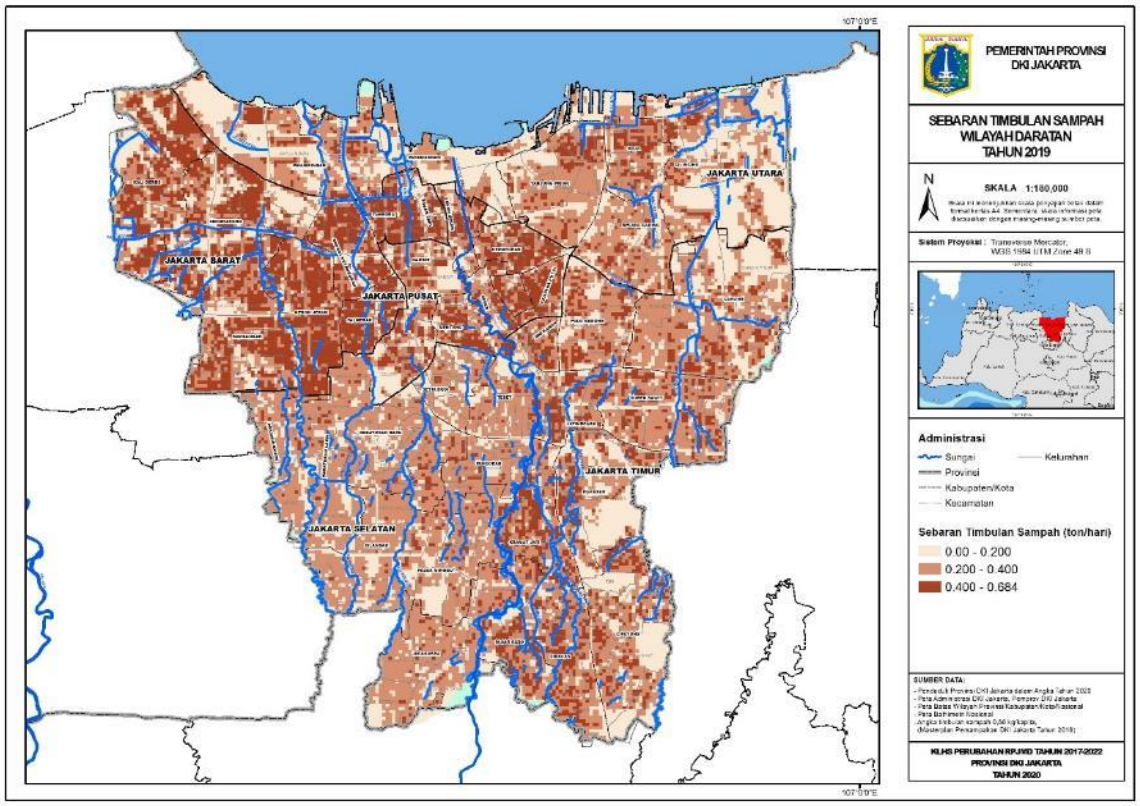

Gambar 4.5 Sebaran Timbulan Sampah Domestik DKI Jakarta Tahun 2019
Sumber: Analisis, 2020

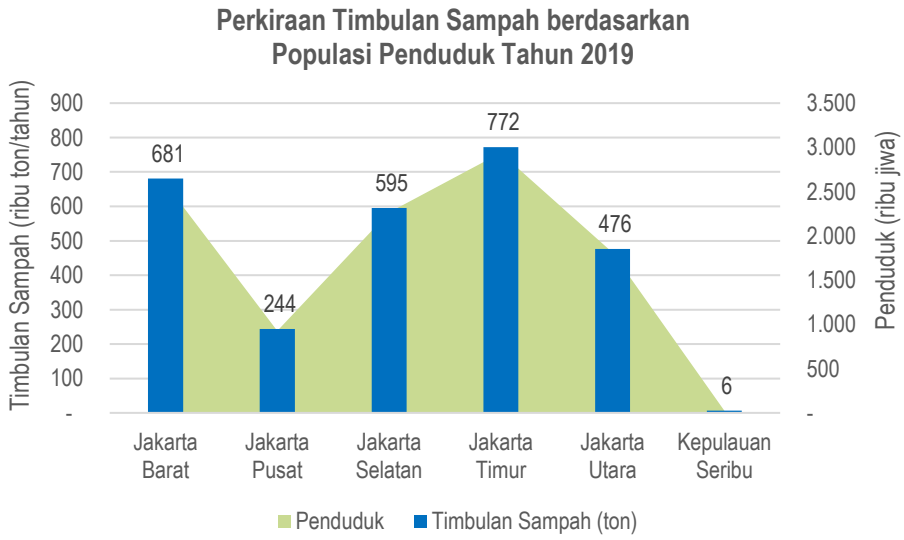

Gambar 4.6 Perkiraan Timbulan Sampah Domestik berdasarkan Populasi Penduduk Tahun 2019
Sumber: Analisis, 2020

Perbandingan informasi spasial dan grafik menunjukkan bahwa secara kuantitas wilayah Jakarta Timur merupakan penghasil sampah terbanyak dan tersebar luas sepanjang jalur sungai Ciliwung hulu hingga hilir. Namun, dilihat dari blok sebaran timbulan sampah, wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan sebaran merata timbulan sampah di atas 0,4 ton sampah/hari. Tentu hal ini akan berpengaruh pada pendekatan cara penanganan sampah terutama dalam hal penyediaan kapasitas fasilitas pengangkutan.

Sampah Infeksius. Isu mengenai sampah infeksius telah menjadi perhatian khusus mengingat sebaran kasus korban COVID -19 meningkat sangat signifikan dari bulan Maret hingga Oktober. Selain itu, sampah infeksius membutuhkan penanganan khusus untuk dimusnahkan/disterilkan dari lingkungan sehingga tidak akan memicu luasnya sebaran pandemi COVID-19. Tingginya pasien COVID-19 secara tidak langsung berimbas pada peningkatan jumlah perlengkapan medis sekali pakai seperti APD, masker, sarung tangan, dan lain-lain yang bersumber dari rumah sakit maupun rumah tangga. Perlengkapan tersebut pada akhirnya menjadi sampah infeksius atau sampah B3 medis. Selama bulan Maret hingga Juni 2020, diketahui terdapat 567,77 Kg limbah medis yang berasal dari sektor rumah tangga yang diangkut dari Dipo/TPS limbah B3. Sementara limbah medis dari RS Rujukan COVID-19 diperkirakan mencapai 5.555 Kg/hari. Profil timbulan sampah B3 medis selama pandemi COVID-19 diperlihatkan pada grafik berikut.

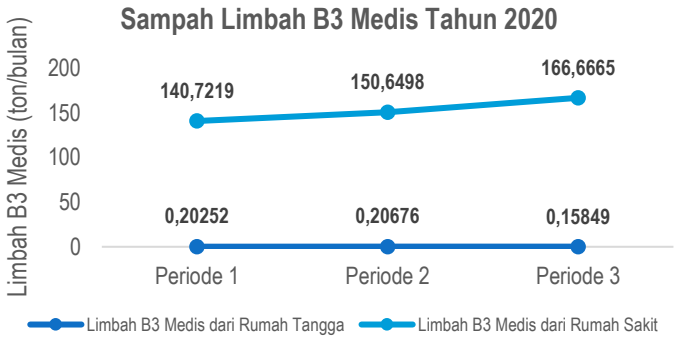

Gambar 4.7 Limbah B3 Medis Tahun 2020
Sumber: DLH, 2020

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan pengelolaan persampahan, terutama untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Hal ini dipicu oleh faktor keterbatasan sediaan lahan untuk *sanitary landfill* di dalam wilayah DKI Jakarta. Bahkan selama masa perubahan RPJMD tahun 2017-2022, Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi prioritas kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung penanganan sampah domestik yaitu meliputi:

1. Upaya pelaksanaan *landfill mining* TPST Bantar Gebang.
2. Pengadaan *Intermediate Treatment Facility* (ITF).
3. Upaya pengurangan sampah organik dari sumber hulu melalui metode biokonversi.
4. Upaya pemilahan sampah anorganik melalui bank sampah.
5. Upaya penerapan Program Kampung Iklim, salah satunya untuk mengarusutamakan perubahan pola perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan setingkat satuan wilayah Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Upaya penanganan sampah pesisir dan pantai, penanganan sampah sungai dan danau serta penanganan sampah di saluran mikro secara rutin.

4.3 Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan

Dalam laporan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 (DLH, 2019), telah dijelaskan bahwa wilayah DKI Jakarta selalu berkaitan dengan permasalahan:

1. Pengelolaan air seperti ketersediaan air bersih dan pengaturannya.
2. Kerentanan terhadap bencana banjir.
3. Menurunnya kualitas udara karena ruang hijau berkurang.

Pertimbangan tersebut yang melandasi lingkup identifikasi kinerja jasa lingkungan hidup hanya menitikberatkan pada 4 jasa lingkungan hidup, yaitu: Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air, Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Kualitas Udara, dan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir.

Berdasarkan pendekatan wilayah fungsional DAS, ekosistem DKI Jakarta dipengaruhi lima wilayah DAS yang mencakup lintas wilayah provinsi yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Sehingga tidak dapat dipungkiri perubahan rona lingkungan wilayah Bodetabekjur turut mempengaruhi baik buruknya fungsi lingkungan di DKI Jakarta. Apabila mencermati profil kinerja jasa lingkungan hidup (lihat Gambar 4.8) di wilayah fungsional dapat diketahui bahwa sebagian besar Bodetabekjur didominasi pada kelas kinerja yang sama yaitu kinerja rentang sangat rendah (warna merah) hingga sedang (warna kuning).

Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup DKI Jakarta

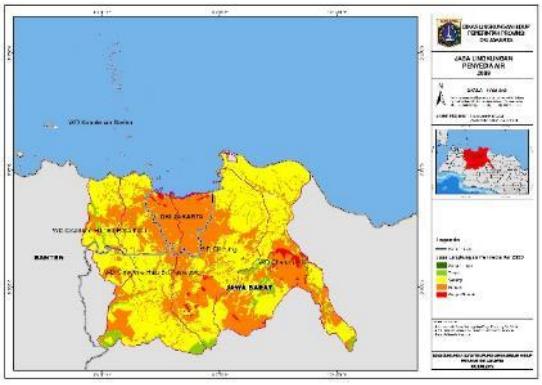

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2009

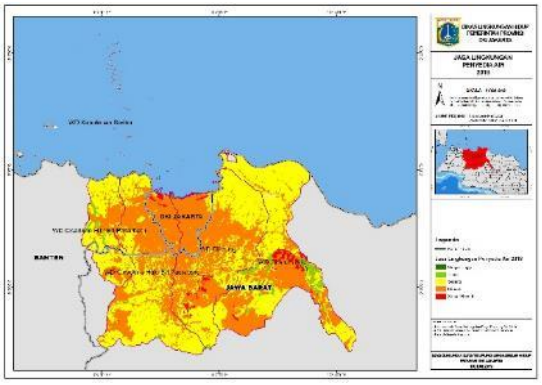

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Tahun 2018

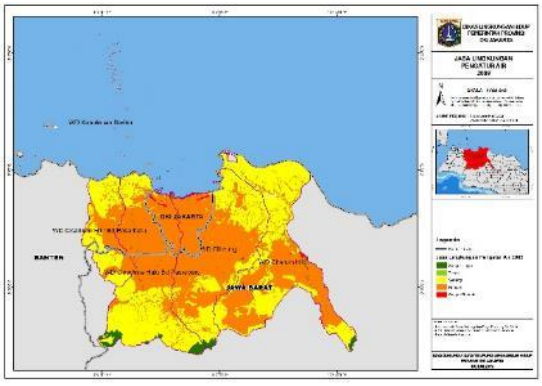

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Tahun 2009

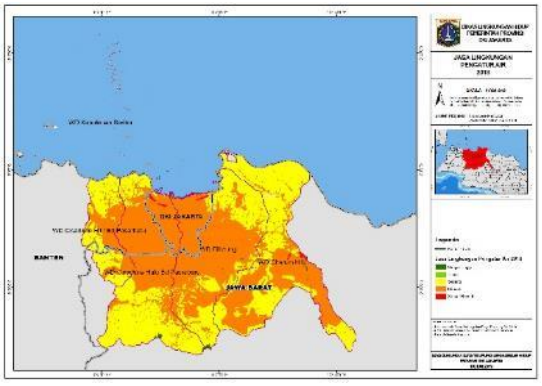

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan Air Tahun 2018

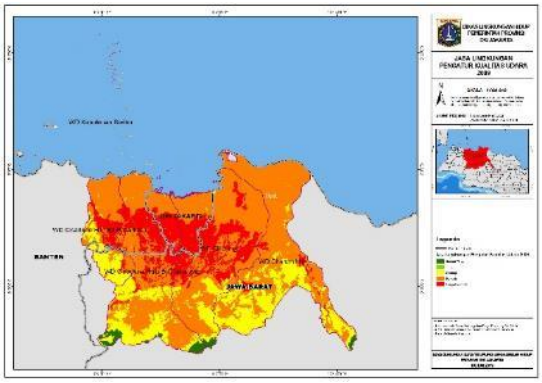

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2009

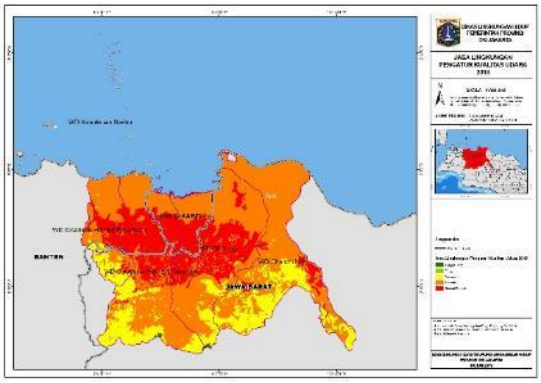

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara Tahun 2018

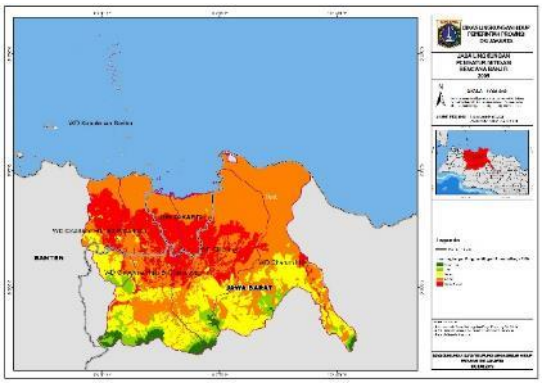

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Tahun 2009

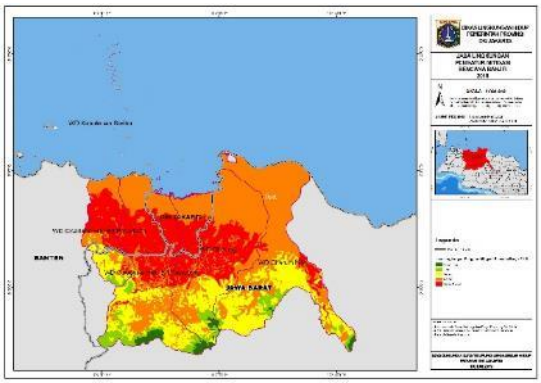

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Tahun 2018

Gambar 4.8 Profil Kinerja Jasa Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam Lingkup Wilayah Fungsional DAS
Sumber: (DLH, 2019)

Perbandingan visual peta kinerja jasa lingkungan hidup di atas, menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 fungsi lingkungan hidup di DKI Jakarta memang sudah rendah. Semakin menurunnya fungsi lingkungan hidup di DKI Jakarta karena pengaruh perkembangan perkotaan di kota-kota satelit yang semakin masif. Hal tersebut terlihat dari sebaran warna oranye dan merah yang semakin mendominasi wilayah-wilayah Bodetabekjur paling dekat dengan DKI Jakarta. Oleh karena itu, kebijakan untuk melakukan pemulihan kondisi lingkungan hendaknya melibatkan kota-kota satelit untuk mendapatkan gambaran utuh arah perbaikan yang dituju, sehingga wilayah-wilayah yang bersinggungan tersebut mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.

4.3.1 Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

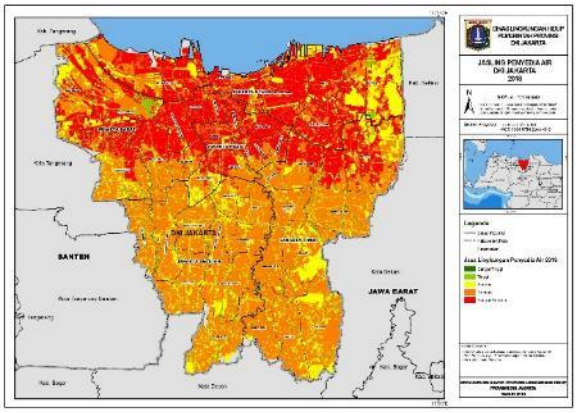

Gambar 4.9 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta Tahun 2018
Sumber: (DLH, 2019)

Luas wilayah dengan klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Klasifikasi Indeks JLH	Luas (Ha)	%
Sangat Tinggi	575	0,90%
Tinggi	1.231	1,93%
Sedang	13.501	21,15%
Rendah	31.062	48,65%
Sangat Rendah	17.474	27,37%
Total	63.843	100%

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air DKI Jakarta menunjukkan dominasi kelas kinerja rendah (warna orange), sangat rendah (warna merah), dan sedang (warna kuning). Sebaran kinerja rendah membentang dari selatan hingga ke tengah wilayah Jakarta. Sementara, dari tengah hingga utara wilayah Jakarta didominasi oleh kinerja sangat rendah. Hal ini mengindikasikan fungsi penyediaan air di wilayah Jakarta secara keseluruhan memang sudah rendah. Wilayah yang berpotensi krisis terhadap penyediaan air berada di area utara Jakarta. Tidak lain kondisi ini terjadi diakibatkan dari besarnya alokasi penggunaan lahan berupa permukiman/lahan terbangun. Meskipun memiliki akses air bersih, pada kenyataannya masyarakat di wilayah utara lebih memilih menggunakan air isi ulang karena kualitas air yang didistribusikan melalui perpipaan kurang memuaskan dengan debit yang terlalu kecil. Terlebih kualitas air tanahnya yang sudah tercemar berat di 9 kelurahan[3] dalam lima kecamatan mencakup Kecamatan Cilicing, Koja, Pademangan, Tanjung Priuk dan Penjaringan.

4.3.2 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

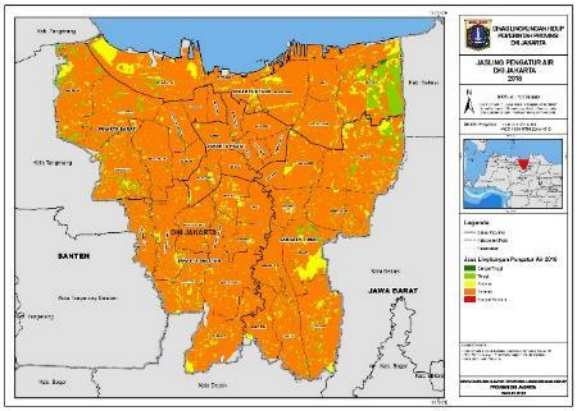

Gambar 4.10 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air DKI Jakarta Tahun 2018
Sumber: (DLH, 2019)

Luas wilayah dengan klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Klasifikasi Indeks JLH	Luas (Ha)	%
Sangat Tinggi	603	0,94%
Tinggi	2.327	3,64%
Sedang	5.900	9,24%
Rendah	55.013	86,17%
Sangat Rendah	0	0,00%
Total	63.843	100%

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air kelas rendah (warna orange) mendominasi 86,17% wilayah DKI Jakarta. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air merupakan representasi fungsi tata air seperti untuk infiltrasi dan pelepasan air secara berkala. Infiltrasi berkaitan dengan fungsi peresapan, sementara pelepasan air berkaitan dengan fungsi tata alir air dan *discharge*. Dalam peta penggunaan

[3] http://statistik.jakarta.go.id/kualitas-air-tanah-di-dki-jakarta-tahun-2018/

lahan/pemanfaatan lahan skala detil tahun 2018, diperkirakan DKI Jakarta telah memanfaatkan 78% wilayahnya untuk pengembangan perkotaan sebagai lahan terbangun. Artinya, fungsi sebagai area resapan berkurang namun fungsi sebagai tata air melalui fasilitas drainase masih cukup baik. Meskipun sebagian besar wilayah DKI Jakarta dimanfaatkan sebagai lahan terbangun, tidak serta merta membuat kinerja pengaturan airnya pada kelas sangat rendah. Sebagian wilayah di perbatasan timur Jakarta menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi karena wilayah tersebut masih berupa sawah/kebun campur. Sementara itu, area sawah/kebun campur tersebut berpotensi akan mengalami alih guna lahan mengingat pola ruang di wilayah yang sama telah dialokasikan sebagai perumahan/permukiman. Tentu hal tersebut akan memicu penurunan kelas kinerja pengaturan air yang berdampak pada fungsi sediaan air.

4.3.3 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara sangat erat kaitannya dengan ketersediaan ruang hijau. Ruang hijau ini dimaksudkan sebagai taman, hutan kota, hutan wisata, atau fungsi lain seperti kebun binatang atau taman makam. Keberadaan ruang-ruang tersebut menjamin teralokasinya sebagian wilayah untuk pertumbuhan tanaman, dalam rangka mendukung keberlangsungan siklus pemulihan kualitas udara secara alami. Pada kenyataannya, saat ini ruang penggunaan lain yang teralokasi untuk ruang hijau, danau, kebun, rawa, situ dan lainnya hanya 14,59% dari luas wilayah DKI Jakarta. Bahkan persentase luasan tersebut berpotensi menurun ke depannya karena rencana pola ruang DKI Jakarta hanya mengalokasikan 13,55% [4] dari luas wilayah DKI Jakarta untuk ruang penggunaan lain.

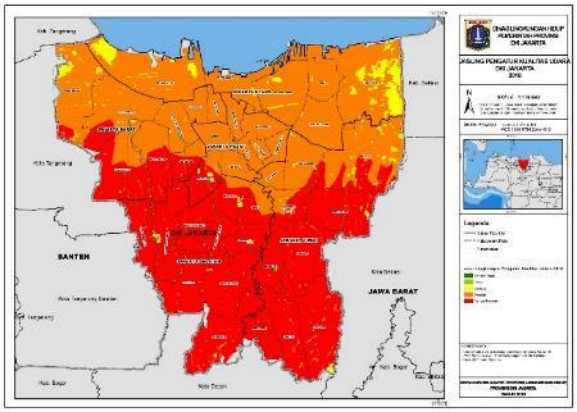

Gambar 4.11 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta Tahun 2018
Sumber: (DLH, 2019)

Luas wilayah dengan klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara dapat dilihat pada tabel berikut.

Klasifikasi Indeks JLH	Luas (Ha)	%
Sangat Tinggi	129	0,20%
Tinggi	418	0,65%
Sedang	2.399	3,76%
Rendah	30.380	47,59%
Sangat Rendah	30.517	47,80%
Total	63.843	100%

Sejalan dengan pernyataan di atas, peta di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara DKI Jakarta didominasi kelas sangat rendah (warna merah) dan rendah (warna orange). Sebaran kinerja sangat rendah dan rendah membentang hampir sama rata membagi wilayah selatan – tengah dan tengah – utara Jakarta. Pada dasarnya, tipologi penutup lahan dari selatan ke utara tidak berbeda yakni untuk perumahan atau lahan terbangun. Namun demikian, perbedaan kinerja antara selatan dan utara terlihat karena batasan bentang alam, yang mana di bagian selatan lebih banyak berupa dataran fluviovulkanik dan fluvial. Tipologi bentang alam ini hanya dapat mendukung tipe vegetasi terna yang fungsi pengatur kualitas udaranya jauh lebih rendah dibandingkan vegetasi hutan.

4.3.4 Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir

Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir erat kaitannya dengan fungsi pengaturan air, namun lebih condong pada peran wilayah sebagai resapan. Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir di DKI Jakarta juga didominasi kelas rendah (warna orange) dan sangat rendah (warna merah).

[4] RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030)

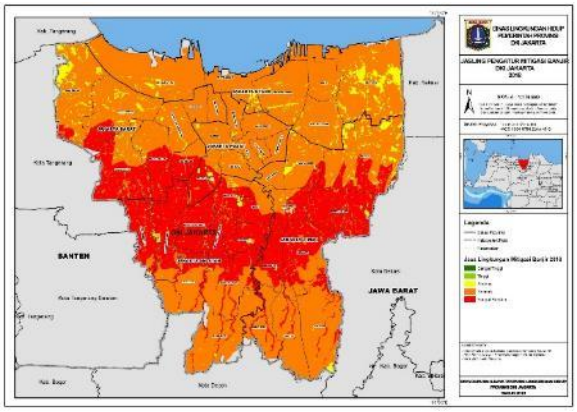

Gambar 4.12 Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta Tahun 2018
Sumber: (DLH, 2019)

Luas wilayah dengan klasifikasi Kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir dapat dilihat pada tabel berikut.

Klasifikasi Indeks JLH	Luas (Ha)	%
Sangat Tinggi	0	0,00%
Tinggi	0	0,00%
Sedang	3.688	5,78%
Rendah	41.332	64,74%
Sangat Rendah	18.823	29,48%
Total	63.843	100%

Dari peta di atas terlihat bahwa sebaran kinerja sangat rendah menghampar di tengah dan sepanjang aliran sungai. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tipologi bentang alam. Tipologi bentang alam berupa dataran fluvial landai, dataran fluvial sangat landai, dan dataran banjir merupakan dataran yang riskan terhadap luapan air sungai. Oleh karena itu, kinerja pengaturan mitigasi banjir pada wilayah ini dinilai sangat rendah. Berbeda halnya dengan wilayah selatan Jakarta, dataran fluviovulkanik menghampar di bagian selatan yang secara alami memiliki potensi resapan yang lebih baik dibandingkan tipologi dataran lain. Sebenarnya dataran fluviovulkanik ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai peresapan untuk mengurangi laju aliran air dari hulu ke hilir. Sayangnya, area selatan ini sudah teralihkan hampir merata untuk perumahan/lahan terbangun. Inilah yang menyebabkan nilai kinerja pengaturan mitigasi bencana banjir menjadi rendah.

4.4 Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pola ruang Jakarta dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2030, seperti ditampilkan pada Gambar 4.13, menunjukkan sumber daya lahan DKI Jakarta dioptimalkan untuk pengembangan perkotaan. Pada pola ruang Jakarta, ruang hunian (warna gradasi kuning), industri dan jasa komersial (warna gradasi ungu) sangat mendominasi tata perkotaan di seluruh wilayah kota administrasi. Sementara itu, wilayah yang dialokasikan sebagai ruang penggunaan lain (mencakup penggunaan untuk ruang hijau, danau, kebun, rawa, situ dan lainnya) hanya 13,55% (warna hijau) dari luas total wilayah daratan DKI Jakarta.

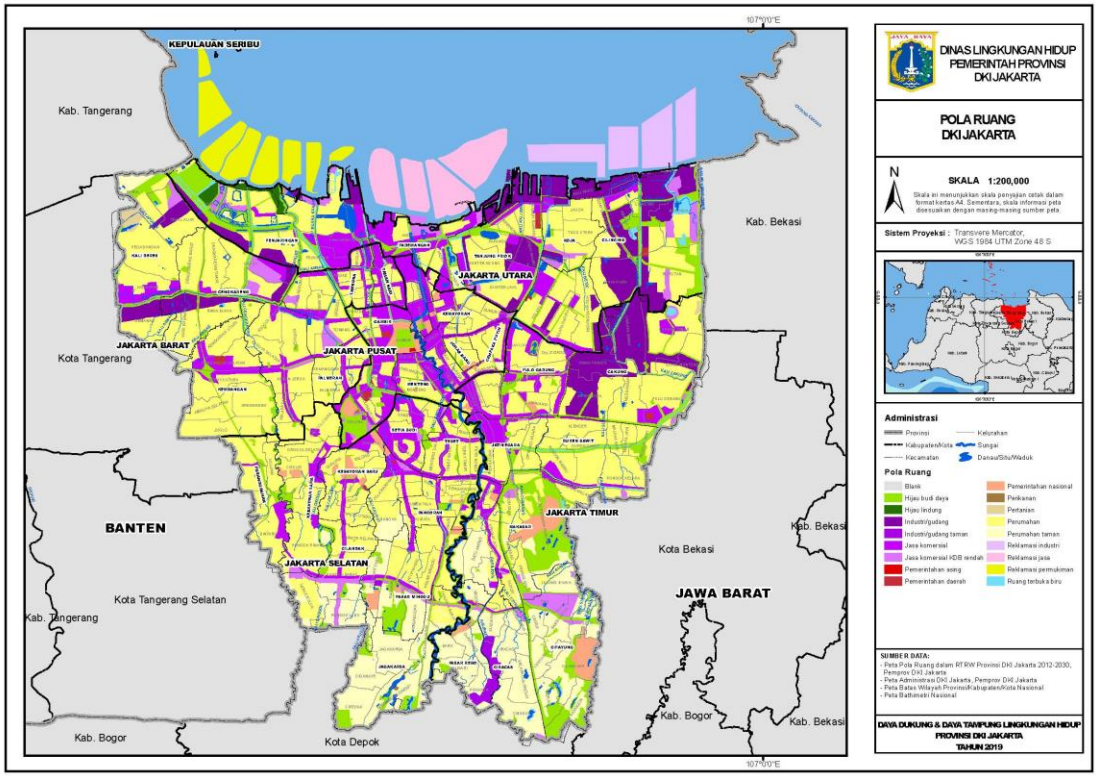

Gambar 4.13 Pola Ruang Kota di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2012-2030, Pemprov DKI Jakarta

Berawal dari pola ruang di atas, maka efisiensi pemanfaatan sumber daya alam DKI Jakarta dianalisis berdasarkan kesesuaian fungsi rencana dengan penggunaan lahannya. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan lahan dilakukan pada tahun 2019, terwakili dari empat wilayah kecamatan yaitu Kebayoran Baru, Setiabudi, Cilincing, dan Cakung (DLH, LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI DKI JAKARTA, 2019). Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana pola ruang RDTR.

Dilihat dari seluruh rencana pola ruang tingkat kesesuaian arahan rencana pola ruang, Kecamatan Setiabudi yang paling tinggi tingkat kesesuaiannya mencapai 83,76% antara arahan pola ruang dan implementasi penggunaan lahannya (lihat Gambar 4.14). Sekitar 16,2% ketidaksesuaian penggunaan lahan terjadi pada peruntukan zona taman kota/lingkungan; zona terbuka biru, zona jalur hijau dan zona pemerintahan daerah. Kesesuaian penggunaan ruang terbuka biru yaitu sebesar 27,4 % atau sekitar 60,33 Ha yang sesuai dari luas total 220,14 Ha yang direncanakan dalam RDTR dan PZ. Sebagian besar rencana untuk zona ini sudah/tetap menjadi kawasan terbangun yaitu hunian sebesar 21,3% dan industri sebesar 7,6%, serta berupa kawasan pertanian sebesar 30,65%. Sama halnya dengan Kecamatan Kebayoran Baru, tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pola ruang mencapai 83,45%. Artinya, wilayah-wilayah ini telah dikembangkan mengikuti arahan perencanaan yang ada. Sehingga efisiensi pemanfaatan lahan setidaknya pada dua kecamatan tersebut sudah mendekati optimal.

Sementara, ketidaksesuaian penggunaan lahan paling tinggi terjadi di Kecamatan Cilincing. Kesesuaian penggunaan lahan dengan perencanaan zonanya hanya mencapai 54,46% dan yang belum sesuai mencapai 45,54%. Kesesuaian ruang terbuka biru pada Kecamatan Cilincing yaitu sebesar 46,3 % atau sekitar 62,06 Ha yang sesuai dari seluas 133,91 dari rencana di RDTR dan PZ. Sebagian besar rencana untuk zona ini sudah menjadi kawasan terbangun yaitu hunian sebesar 27,63% dan industri sebesar 8,9%, serta berupa kawasan pergudangan sebesar 5,07%.

Rendahnya kesesuaian penggunaan lahan pada wilayah ini bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu (1) pembangunan yang belum sesuai arahan rencana zonasi atau (2) pembangunan yang belum seluruhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan kegiatan industri untuk lokasi yang sudah diarahkan khususnya untuk rencana zona RTH, dan mengarahkan pada rencana zona yang diperuntukan untuk zona industri dan pergudangan. Rendahnya tingkat kesesuaian penggunaan lahan sesuai fungsinya juga terjadi di Kecamatan Cakung, dimana kesesuaian penggunaan lahan hanya mencapai 74,75%.

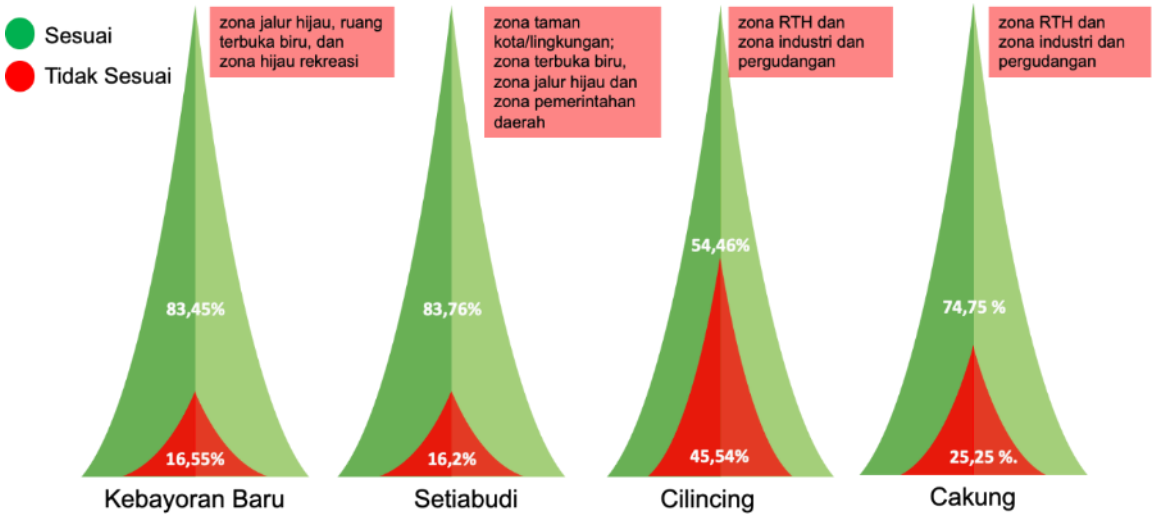

Gambar 4.14 Ketidaksesuaian pemanfataan sumber daya alam dengan arahan pembangunan
Sumber: (DLH, LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI DKI JAKARTA, 2019)

Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam dari empat kecamatan di atas telah menunjukkan bahwa lahan DKI Jakarta pada dasarnya dioptimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor sekunder dan tersier (lihat tabel berikut). Kontribusi sektoral PDRB Jakarta didominasi oleh sektor sekunder (sektor yang mengolah bahan baku seperti listrik, gas, air bersih, dan bangunan) dan tersier (sektor yang tidak memproduksi barang fisik seperti perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan jasa lainnya). Artinya, sebagian besar wilayah Jakarta tidak memprioritaskan sektor yang berfokus pada kegiatan pendayagunaan sumber-sumber alam secara langsung seperti pertanian dan pertambangan.

Tabel 4.7 Sektor Unggulan di DKI Jakarta

Daerah	Sektor Unggulan
Jakarta Pusat	✓ Bangunan ✓ Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan ✓ Jasa-jasa
Jakarta Timur	✓ Industri ✓ Bangunan ✓ Pengangkutan dan komunikasi ✓ Jasa-jasa
Jakarta Utara	✓ Industri ✓ Listrik, gas dan air bersih ✓ Bangunan ✓ Pengangkutan dan komunikasi
Jakarta Barat	✓ Bangunan ✓ Perdagangan, hotel dan restoran ✓ Pengangkutan dan komunikasi ✓ Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan ✓ Jasa-jasa
Jakarta Selatan	✓ Bangunan

Daerah	Sektor Unggulan
	✓ Perdagangan, hotel dan restoran ✓ Pengangkutan dan komunikasi ✓ Keuangan, persewaan dan jas perusahaan ✓ Jasa-jasa
Kepulauan Seribu	✓ Jasa-jasa ✓ Pariwisata

Sumber: (DLH, 2019)

Pada dasarnya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berupa lahan tidak hanya dilihat dari ketercapaian persentase 100% terhadap rencana pola ruang yang telah disusun. Rencana pola ruang sendiri perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari peruntukan/fungsi wilayah tersebut. Dari rencana pola ruang yang ada, keberadaan ruang terbuka hijau sangat terbatas dengan meminimalisir pertimbangan kebutuhan ruang publik yang layak, nyaman dan estetis seiring dengan proyeksi pertambahan jumlah penduduk.

Demi menjamin ketersediaan ruang publik atau tatanan kota yang layak, nyaman, dan estetis maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat menekan laju migrasi masuk ke DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya *deadlog* akibat dari gap yang terlalu besar antara pertambahan jumlah penduduk dan ketersediaan lahannya.

Selain itu, pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam cukup beragam sesuai dengan keragaman ekoregion. Namun secara umum, polanya tampak bahwa pada daerah hulu (dataran fluviovulkanik) perlu memperhatikan pembuatan resapan air, sebaliknya untuk daerah hilir (dataran pasut, beting-gisik dan swale, dataran fluvio-marin, dan dataran rawa) perlu memperhatikan dinamika elevasi permukaan air (banjir, rob) dan konservasi air tanah.

Evaluasi pemanfaatan lahan yang terwakili dari empat kecamatan tersebut menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesesuaian untuk rencana ruang terbuka hijau.
2. Rendahnya ketercapaian rencana ruang terbuka biru.
3. Perlu pembatasan kegiatan industri, khususnya di zonasi pemukiman, dan perlunya sarana dan prasarana industri berwawasan lingkungan.
4. Perlu pembatasan perumahan dengan mengembangkan rumah susun.
5. Perlu penataan pusat perdagangan yang terintegrasi dengan transportasi publik.
6. Perlu pemanfaatan sempadan jalan untuk pengembangan dan penataan jalur hijau.
7. Perlu rehabilitasi sungai dan drainase serta penerapan konsep *ecodrainage*, seperti pembuatan lubang biopori pada kawasan yang terbangun dan pemanenan air hujan.

4.5 Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati

Pada umumnya wilayah kota seperti DKI Jakarta dapat dianggap sebagai suatu ekosistem yang memiliki indeks keanekaragaman hayati yang rendah dan didominasi oleh jenis-jenis asing (*non-native species*). Keanekaragaman hayati di wilayah kota terdistribusi pada berbagai tipe ruang terbuka seperti hutan/taman kota dan areal budidaya serta pada tipe ekosistem alami yang tersisa di wilayah perkotaan. Ruang terbuka yang ditumbuhi berbagai jenis vegetasi merupakan bentuk mosaik kompleks dari tipe habitat satwa liar (DLH, 2019). Salah satu identifikasi potensi kehati di DKI Jakarta dilihat berdasarkan sebaran hutan kota yang diperlihatkan pada gambar berikut.

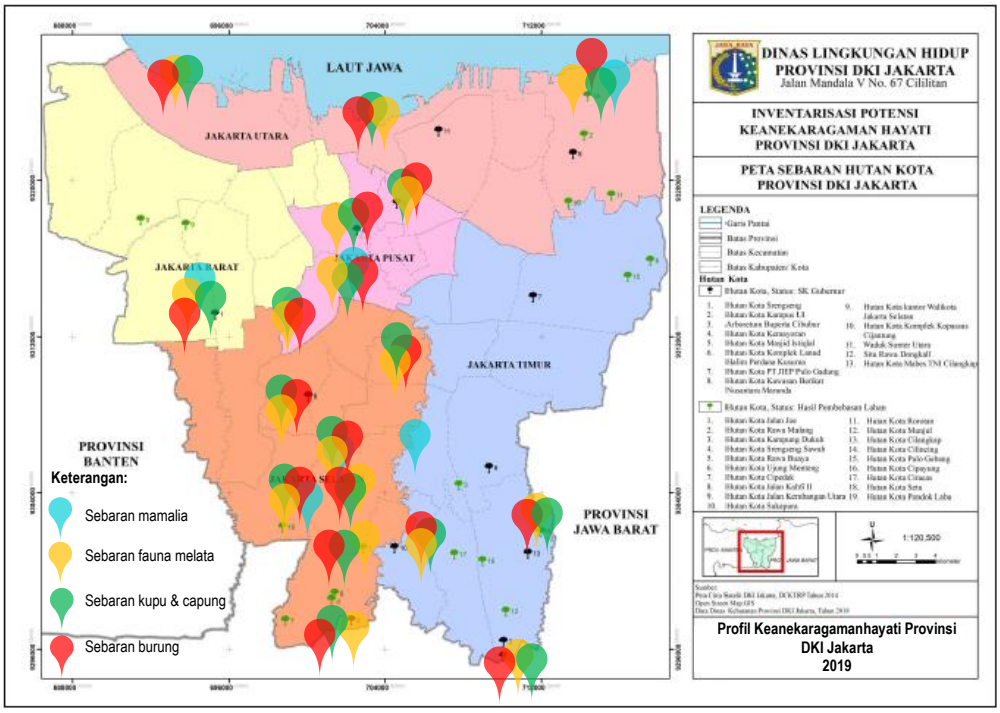

Gambar 4.15 Peta Sebaran Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (DLH, 2019)

Tidak banyak lahan hijau yang tersisa di wilayah DKI Jakarta sehingga identifikasi sebaran kehati hanya terpusat pada spot-spot yang sama. Keanekaragaman mamalia tersebar di Hutan Kota Srengseng, Taman Ragunan, Taman Menteng & Suropati, Buperta Ragunan, BKT Marunda, Ekowisata Tol Soedyamatmo, dan Ciliwung Condet. Keanekaragaman fauna melata, kupu, capung dan burung tersebar di Hutan Kota Srengseng, Taman Lapangan Banteng, Taman Monas, Taman Menteng & Suropati, Taman Kridaloka, Taman Honda, Taman Ayodya, Buperta Ragunan, Taman Ragunan, Taman Spatodhea, Taman Tanjung, Taman Sepat, Taman Dadap Merah, Taman Tabebuya, Hutan Kota Kampus UI, Hutan Kota Kopassus Cijantung, Hutan Kota Setu Babakan, dan Buperta Cibubur. Sementara, potensi keanekaragaman hayati laut tersebar di wilayah Kepulauan Seribu.

Spot lahan hijau yang ditetapkan sebagai wilayah konservasi insitu seperti cagar alam, taman wisata alam, hutan kota, taman kota sangat tepat menjadi suaka bagi fauna dan flora. Tingkat ketahanan biodiversitas pada spot-spot tersebut lebih dapat dipertahankan karena secara hukum telah mendapatkan perlindungan dari pemerintah provinsi dalam jangka panjang. Namun demikian, dipandang dari sediaan plasma nutfah, biodiversitas akan sulit berkembang sehingga dalam jangka panjang cenderung mengalami penurunan karena faktor-faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi ketahanan kehati diidentifikasi melalui bagan berikut ini.

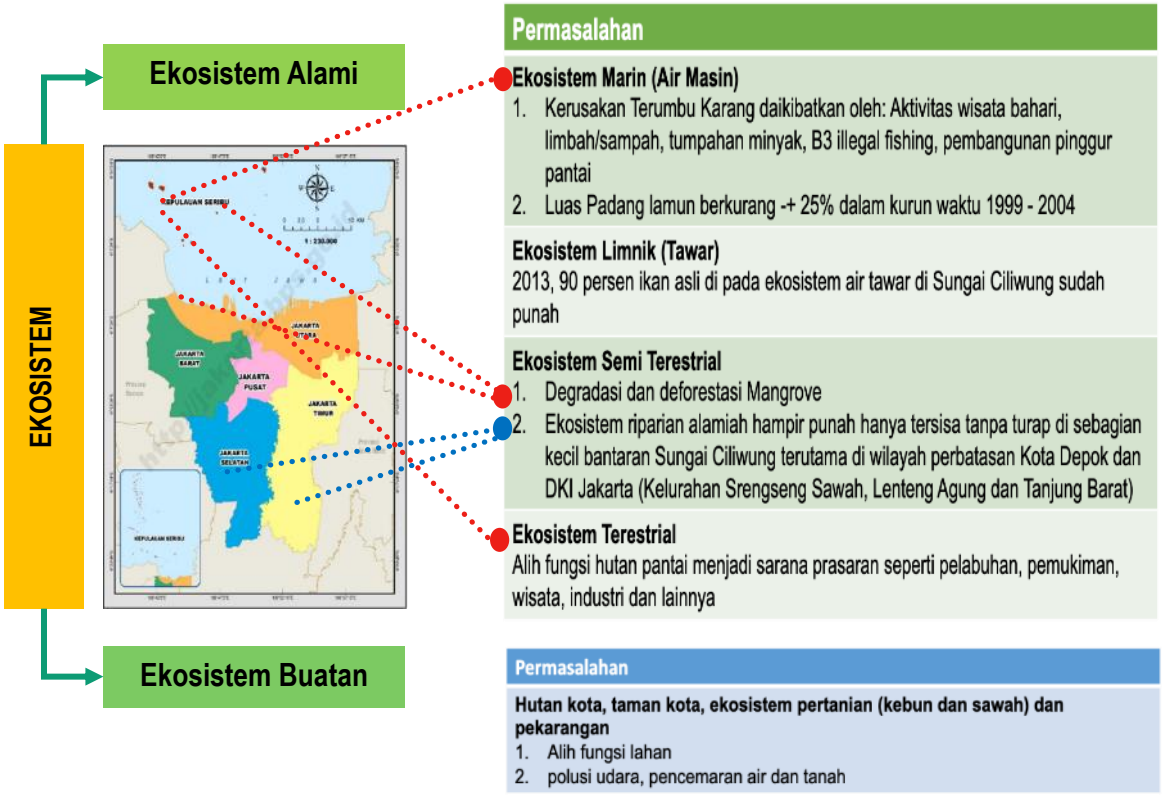

Gambar 4.16 Identifikasi Permasalahan Kehati di Provinsi DKI Jakarta
Sumber: (DLH, 2019)

4.6 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Gambaran mengenai kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dapat dikaitkan dengan kecenderungan profil emisi GRK di wilayah DKI Jakarta dan upaya penurunannya. DKI Jakarta melaporkan bahwa tren emisi GRK cenderung naik (DLH, 2019) dimana total emisi GRK yang sudah dikurangi serapan karbon pada tahun 2010 adalah 20.665 ribu ton CO_2e kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 29.392 ribu ton CO_2e (lihat grafik berikut ini).

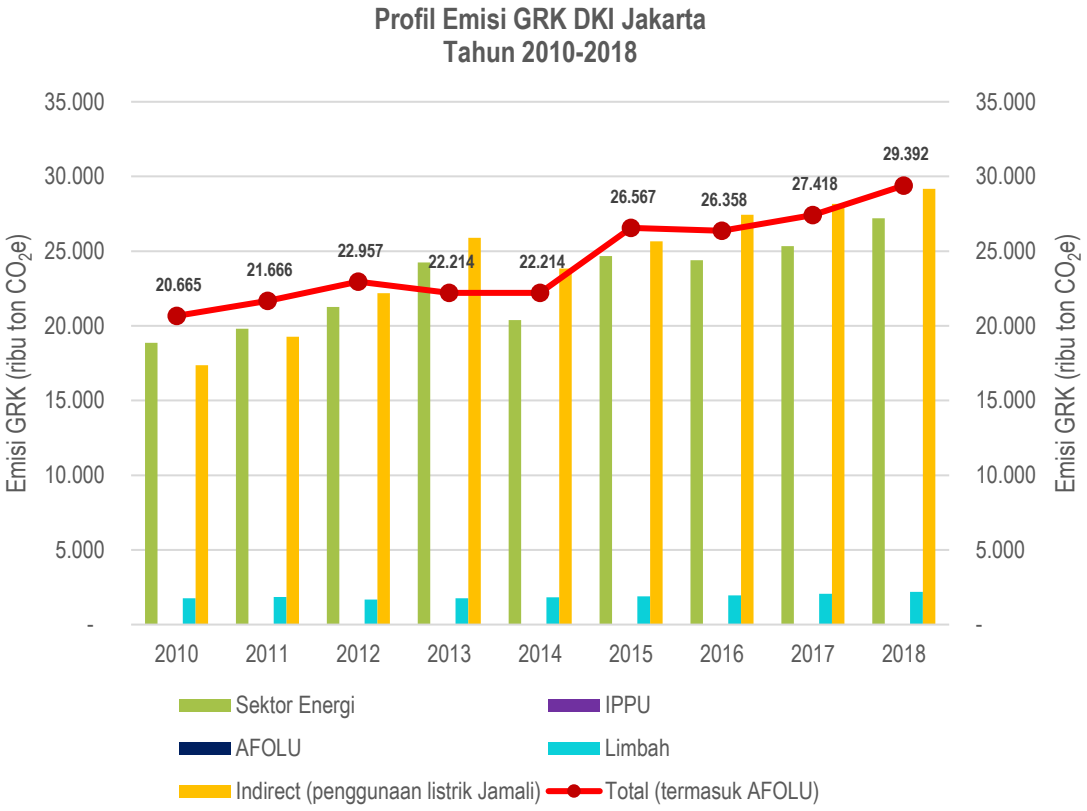

Status dan Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta (ribu ton CO2e)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 Sektor Energi	***18.864***	***19.796***	***21.262***	***24.239***	***20.379***	***24.669***	***24.387***	***25.344***	***27.195***
Industri Energi	7.985	7.878	6.807	7.514	7.347	7.731	7.221	6.668	7.927
Industri Manufaktur	2.316	2.311	2.240	2.745	2.040	2.156	2.698	3.537	4.364
Transportasi	7.498	8.477	11.041	12.807	9.813	13.263	12.968	13.527	13.271
Bangunan Komersial	105	110	118	123	128	160	168	165	172
Rumah Tangga	954	1.014	1.051	1.045	1.045	1.351	1.325	1.400	1.400
Lain-lain	6	6	6	6	7	10	7	46	62
2 IPPU	***NO***	***NO***	***NO***	***NO***	***NO***	***NO***	***NO***	***NO***	***NO***
3 AFOLU	***31***	***30***	***23***	***14***	***12***	***11***	***11***	***9***	***3***
4 Limbah	***1.770***	***1.840***	***1.672***	***1.762***	***1.823***	***1.887***	***1.960***	***2.065***	***2.194***
5 Indirect (penggunaan listrik Jamali)	***17.364***	***19.271***	***22.186***	***25.886***	***23.827***	***25.648***	***27.444***	***28.162***	***29.173***
Total (tanpa AFOLU dan indirect emission)	20.634	21.636	22.934	26.002	22.202	26.556	26.347	27.409	29.389
Total (termasuk AFOLU)	20.665	21.666	22.957	22.214	22.214	26.567	26.358	27.418	29.392
Total (termasuk AFOLU dan indirect emission)	38.029	40.937	45.144	46.041	46.041	52.215	53.802	55.580	57.554

Gambar 4.17 Status dan Profil Inventarisasi Emisi GRK DKI Jakarta
Sumber: (DLH, 2019)

Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan listrik jaringan merupakan kontributor utama besarnya emisi GRK di DKI Jakarta, hal ini diindikasikan dengan besarnya *indirect emission* (penggunaan listrik Jamali) sebesar 48,93% (dari tahun 2010 sampai dengan 2018) dari total emisi GRK di DKI Jakarta yaitu sebesar 28.162 ribu ton CO_2e pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan DKI Jakarta yang banyak merupakan bangunan dengan porsi konsumsi listrik lebih besar dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar lainnya (BBN, gas, LPG).

Emisi GRK *direct* (kecuali industri energi) merupakan contributor terbesar kedua dimana total emisi GRK direct sebesar 33,48% dari total pada tahun 2018 yaitu sebesar 19.267 ribu ton CO_2e. Emisi GRK direct banyak bersumber dari kegiatan sektor transportasi yang banyak menggunakan bahan bakar minyak serta konsumsi produk minyak, LPG, dan gas di sektor industri manufaktur, residensial dan bangunan komersial. Sumber emisi terbesar ketiga berasal dari sektor industri energi yang merupakan sistem pembangkit listrik yang terletak di wilayah DKI Jakarta. Kontribusi dari sektor ini sebesar 13,77% tahun 2018 yaitu sebesar 7.926 ribu ton CO_2e. Sementara dari sektor limbah dan AFOLU memiliki porsi yang tidak terlalu signifikan terhadap kontributor emisi GRK di DKI Jakarta. Untuk kedua sektor limbah dan AFOLU menyumbang emisi

GRK di DKI Jakarta pada tahun 2018 masing-masing sebesar 3,81% (2.194 ribu ton CO_2e) dan 0,01% (3,16 ribu ton CO_2e).

Diketahui terdapat gap yang besar antara emisi GRK pada base year 2010 dengan target penurunan emisi pada tahun 2030. Tingkat emisi GRK pada base year (2005) adalah 37 juta ton CO_2e sedangkan tingkat emisi GRK pada tahun 2010 adalah 40 juta ton CO_2e. Sementara itu, proyeksi BAU emisi GRK memprediksikan bahwa emisi GRK akan meningkatkan menjadi 114 juta ton CO_2e sebagaimana terlihat dari grafik berikut ini. Reduksi sebesar 35 juta ton CO_2e di tahun 2030 ditargetkan ingin dicapai dari aksi-aksi mitigasi.

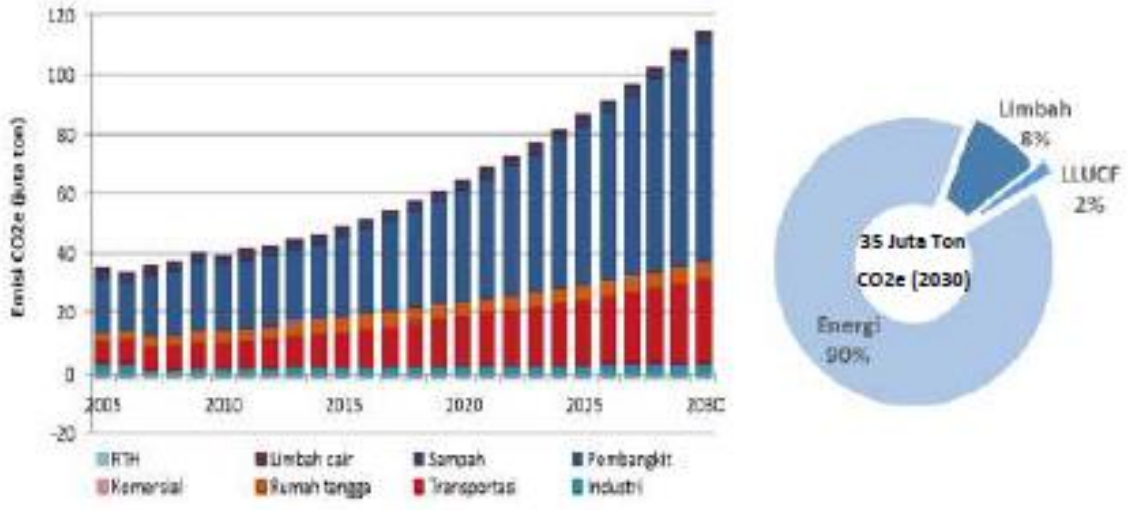

Gambar 4.18 Proyeksi Emisi GRK Baseline dan Target Reduksi Emisi GRK di Tahun 2030
Sumber: (DLH, 2019)

Berdasarkan, proyeksi tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya yang dilakukan untuk mereduksi emisi GRK cukup besar, hal tersebut belum tentu akan menjadikan kurva proyeksi emisi menjadi turun. Namun, aksi-aksi mitigasi yang disusun oleh pemerintah dan pemerintah provinsi berperan untuk menekan laju peningkatan emisi sehingga kurva emisi akan menjadi landai atau tetap.

Dalam profil emisi GRK menunjukkan emisi GRK dari tahun 2010 ke 2018 meningkat signifikan terutama dari sektor transportasi. Padahal Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat telah merancang dan mencanangkan aksi-aksi mitigasi melalui berbagai kebijakan dan program dalam rangka untuk mencapai penurunan emisi GRK, yang diantaranya mencakup:

SEKTOR ENERGI	1. Pembangkit Listrik Bersih (*Clean Power*) • Efisiensi energi pada pembangkit • Substitusi bahan bakar (IDO ke Gas Alam) • PLTSa • Pemanfaatan LFG Recovery untuk pembangkit listrik 2. Pemanfaatan *Renewable Energy* • PLTS di bangunan gedung 3. Efisiensi Energi PJU • PJU Lampu Hemat Energi 4. Efisiensi Sistem Transportasi • Komuter: MRT, LRT, KRL, KA • BUS: *Busway* dan *Bus Feeder* • Jalur Sepeda dan Pedestrian

	5. Efisiensi Managemen Sistem Transportasi • Perluasan kebijakan ganjil genap, jalur berbayar, dan ATCS dalam rangka pengendalian kualitas udara 6. Efisiensi Peralatan Transportasi 7. *Eco Driving* 8. Efisiensi Peralatan Industri 9. Efisiensi melalui Managemen Energi Industri 10. Efisiensi Energi Bangunan Komersial 11. Efisiensi Energi di Rumah Tangga 12. Substitusi Bahan Bakar Sektor Transportasi (kendaraan listrik, biofuel, dan BBG) 13. Substitusi Bahan Bakar Sektor Industri (batubara/bahan bakar ke Gas Alam) 14. Substitusi Sistem Energi di Rumah Tangga
SEKTOR LIMBAH	1. Limbah Padat Domestik: • LFG Recovery • Pengomposan • 3R • IPLT Duri Kosambi • IPLS Pulo Gebang • PLTSa/RDF 2. Limbah Cair Domestik (IPAL Setiabudi) 3. Limbah Industri (IPAL)

Evaluasi capaian dari beberapa kebijakan dan program di atas yang sudah terimplementasi diilustrasikan melalui grafik berikut ini.

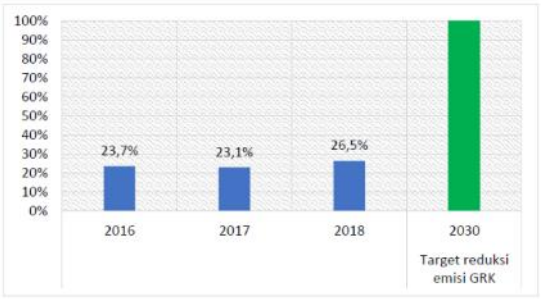

Gambar 4.19 Capaian Reduksi Emisi GRK dari Aksi-Aksi Mitigasi di Tahun 2016-2018 terhadap Target Reduksi Emisi GRK di Tahun 2030

Grafik di samping menggambarkan bahwa reduksi emisi GRK yang dicapai relatif kecil dibandingkan target reduksi yang hendak dicapai di tahun 2030. Capaian reduksi GRK dari sektor energi relatif rendah. Rendahnya capaian aksi mitigasi tersebut terutama disebabkan karena beberapa aksi mitigasi tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Faktor penyebab diantaranya terdapat kerusakan, kendala pengoperasian, *performance* turun atau implementasi beberapa aksi mitigasi terkendala dan tidak sesuai rencana, dan lain-lain (DLH, 2019)

Pada dasarnya, kebijakan dan program di atas dirancang sebagai respon adaptasi atas perubahan iklim, dengan *outcome* hal tersebut dapat mengurangi potensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim salah satunya terkait potensi banjir dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dari sisi pengaturan kualitas udara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan proyeksi potensi sebaran bahaya rawan banjir hingga tahun 2030 seperti terlihat dalam gambar berikut.

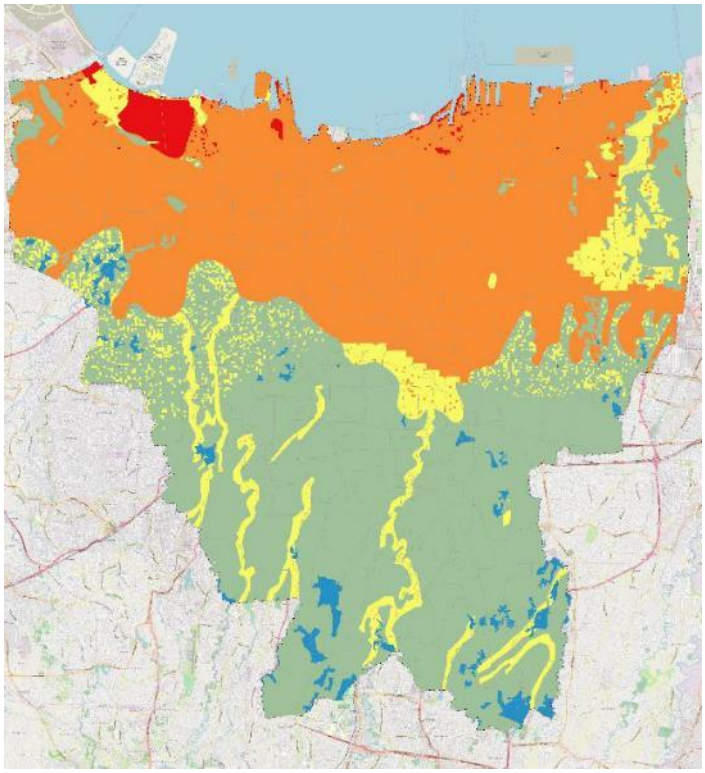

Kelas Bahaya	% Luas
Sangat Tinggi	1,69
Tinggi	41,12
Sedang	10,98
Rendah	44,07
Sangat Rendah	2,14

Gambar 4.20 Proyeksi Potensi Sebaran Bahaya Rawan Banjir DKI Jakarta Tahun 2030
Sumber: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi DKI Jakarta, 2019

Dari peta di atas terlihat bahwa pada tahun 2030 potensi bahaya rawan banjir di bagian utara hingga tengah Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat pada kelas bahaya tinggi hingga sangat tinggi. Dengan demikian, isu mengenai dampak perubahan iklim terhadap DKI Jakarta perlu mendapatkan perhatian yang menyeluruh.

.

BAB 5

BAB 5 ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA OPD DI PROVINSI DKI JAKARTA

5.1 Kondisi Umum Capaian Target TPB

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs periode 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya. Atas dasar demikian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 156 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017 – 2022. Dalam RAD tersebut, terdapat 253 dari 319 indikator TPB/SDGs di tingkat Nasional yang relevan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun karakteristik Ibukota. Beberapa dari indikator tersebut merupakan proksi terhadap indikator nasional.

Secara lebih rinci jumlah target dan indikator untuk 17 TPB di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Gambar 5.1 Komposisi Target dan Indikator untuk 17 TPB di DKI Jakarta

Dalam pelaksanaan RAD TPB, dilakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB setiap tahunnya. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui Penyusunan Laporan Pencapaian TPB. Laporan pencapaian TPb juga merupakan amanat pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dimana Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat

daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri.

Kondisi umum capaian target TPB dalam KLHS ini berdasarkan Hasil Pencapaian TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 sesuai dengan indikator-indikator daerah yang ada dalam RAD TPB. Inventarisasi data pencapaian TPB dilakukan pada tahun dasar (2017) dan tahun 2018 serta 2019. Kinerja pencapaian TPB diindikasikan dengan pencapaian atas target masing-masing indikator dalam setiap tujuan. Pencapaian tersebut dibagi ke dalam tiga kategori yakni mencapai target (berlabel HIJAU), akan mencapai target atau membaik bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (berlabel BIRU), serta memerlukan perhatian khusus karena disamping belum mencapai target juga tercatat lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Dari 253 indikator dalam RAD TPB, sebanyak **219** indikator teridentifikasi capaiannya, sementara 34 indikator lainnya tidak memiliki data. Secara umum, hasil capaian TPB dari 253 indikator adalah sebagai berikut.

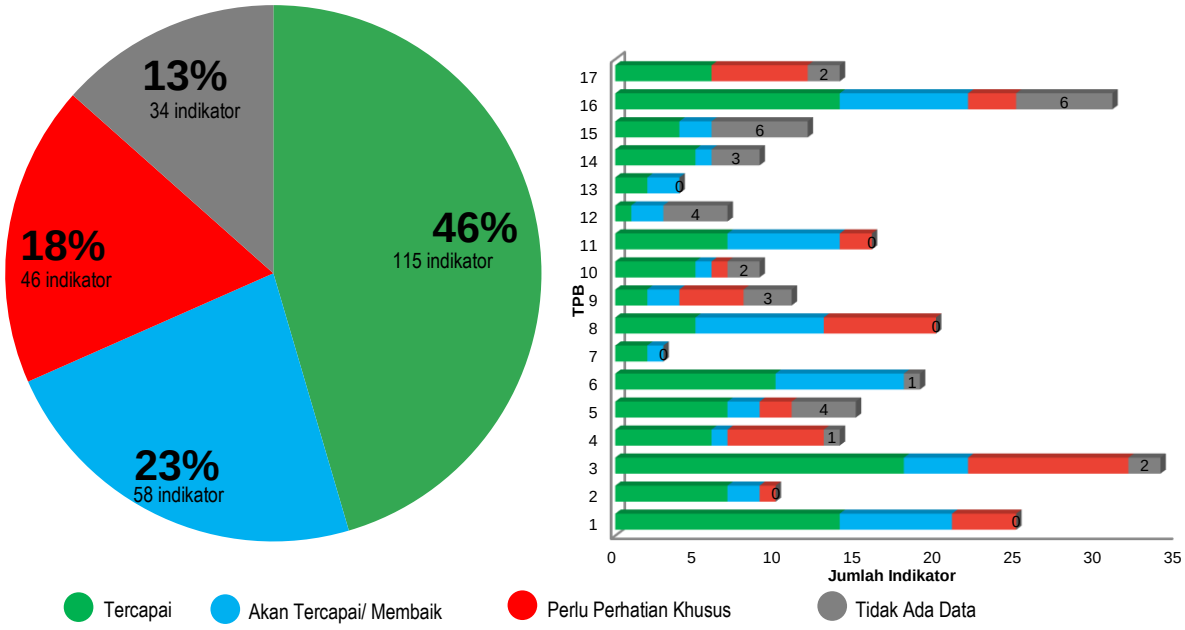

Gambar 5.2 Capaian Umum TPB DKI Jakarta

Hingga tahun 2019, sebanyak 115 indikator TPB atau 46% telah tercapai targetnya, sementara 46 indikator atau 18% perlu perhatian khusus. Indikator perlu perhatian khusus paling banyak terdapat pada TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu sebanyak 10 indikator.

Pemerintah RI mengklasifikasikan ketujuh belas TPB ke dalam 4 Pilar Pembangunan. Empat Pilar Pembangunan Tersebut meliputi Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Secara lebih rinci, pembahasan masing-masing pilar dijelaskan di bawah ini.

5.1.1 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Pembangunan Sosial

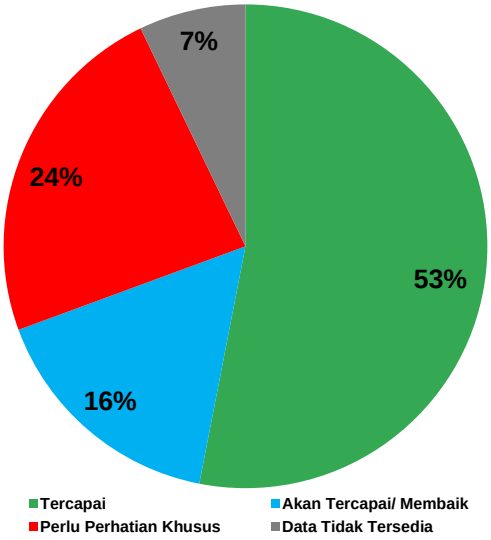

Gambar 5.3 Capaian TPB Pilar Pembangunan Sosial
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Pilar Pembangunan Sosial mencakup TPB 1: Tanpa Kemiskinan, TPB 2: Tanpa Kelaparan, TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4: Pendidikan Berkualitas dan TPB 5: Kesetaraan Gender. Secara total, Pilar Pembangunan Sosial terdiri **98 indikator dimana 7 indikator tidak tersedia datanya**. Indikator dengan data yang tidak tersedia meliputi:

Indikator yang tidak tersedia data (7)

3.7.2*	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika
5.3.1.(b)	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi

Secara umum, 53% atau 52 indikator pada Pilar Pembangunan Sosial sudah mencapai target. Sementara itu, sebanyak 24% atau 23 indikator perlu perhatian khusus. Indikator perlu perhatian khusus didominasi oleh TPB 3 sebanyak 10 indikator.

TUJUAN 1 Tanpa Kemiskinan

- Dari 25 indikator pada TPB 1, sebesar 14 indikator telah mencapai target.
- Tingkat kemiskinan 2019 sebesar 3,42% menurun dari tahun 2018 yaitu 3,55%. Indikator ini belum mencapai target 2019 sebesar 3,38%.
- Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif pada tahun 2019 sebesar 70,22% belum mencapai target yaitu 75%.
- Presentase cakupan pelayanan air bersih 2019 sebesar 63,16% hampir mencapai target 63,65%.
- Nlai Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah 6,16.
- 100% rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

APM SD/MI 93,44%
APM SMP/MTs 83,25%

Persentase rumah tangga kumuh perkotaan mencapai 14,36%.

TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan

- Dari 10 indikator yang ada dalam RAD untuk TPB 2, 7 diantaranya telah mencapai target, sementara 1 indikator pelu perhatian khusus, 2 indikator akan tercapai/membaik dan tidak ada indikator yang tidak ada data.
- Indikator yang belum mencapai target adalah Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif pada tahun 2019 sebesar 70,22% belum mencapai target yaitu 75%.
- Indikator nasional yang tidak diadaptasi oleh RAD yaitu Prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun/balita pada tahun 2019 di DKI Jakarta mencapai 11%.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada 2019 sebesar 88,3 dari target 82

TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

- TPB 3 merupakan tujuan memiliki jumlah indikator paling banyak yaitu 34 indikator, dimana 18 indikatornya telah tercapai dan 10 indikator perlu perhatian khusus.
- Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat 85%.
- Angka Kematian Ibu (AKI) 2019 cukup tinggi yaitu sebesar 57,48% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 55,1%.
- Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup pada 2019 sebesar 2,31.
- Proporsi keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat pada tahun yaitu 41,96%.
- 100% Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.
- Semua kelurahan di DKI Jakarta telah memenuhi Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2019.

Hanya 14,9% Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar

98,03% penduduk DKI Jakarta memiliki jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas

- Persentase Sekolah terakreditasi A hanya sekitar 62,19% pada tahun 2018, sementara data tahun 2019 tidak tersedia.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 104,55%, sementara untuk pendidikan PAUD (3-6 Tahun) adalah 20,35%.
- Rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta adalah 11,04 tahun.
- Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) usia 15-24 tahun 95,41%.
- 49,94% guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB bersertifikat pendidik.

APM SD/MI 99,66%, SMP/MTs 100,98, SMA/MA/SMK 100,19%

TUJUAN 5 | Kesetaraan Gender

- Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada 2019 sebesar 74,34%.
- Pada tahun 2019, median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun adalah 21 tahun.
- Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun) yaitu 20 kelahiran per seribu orang.
- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah 21,7%.
- Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 19,8%.

Sumber: (SDGs DKI Jakarta, 2020)

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak 14,6%

5.1.2 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi terdiri atas 5 TPB yaitu TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan dan TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dalam RAD TPB 2017-2022, terdapat total 57 indiktor dalam pilar ini. Dari keseluruhan indikator Pilar Ekonomi, terdapat 20 indikator telah tercapai sementara 18 indikator perlu perhatian khusus, 12 indikator akan tercapai/membaik dan 7 indikator tidak tersedia datanya. Hal ini menunjukan bahwa meskipun Sebagian besar indikator telah tercapai, namun indikator-indikator lain yang perlu ditingkatkan tidaklah sedikit.

Gambar 5.4 Capaian Target Indikator TPB Pilar Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Indikator yang tidak tersedia datanya meliputi:

Indikator yang tidak tersedia data (7)

9.1.2.(b)	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur
10.2.1*	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
17.11.1.(a)	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

TUJUAN 7 Energi Bersih dan Terjangkau

- Terdiri dari 3 indikator, dimana 2 telah tercapai dan 1 akan tercapai/membaik
- Rasio elektrifikasi 100%
- Konsumsi listrik per kapita 3256 KWh
- Bauran energi terbarukan 0,04%

Rasio elektrifikasi telah mencapai 100%

TUJUAN 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

- Terdapat 20 indikator, 5 telah tercapai, 8 indikator akan tercapai sementara 7 perlu perhatian
- Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin padatahun 2019 sebesar 30,12%
- Persentase tenaga kerja formal di tahun 2019 yaitu 68,45%
- Pada 2019, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian sebesar 0,13%
- Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan hanya sekitar 3,78%. Peserta PKT yang memperoleh akses permodalan sebanyak 575 UMKM dari total 15200 peserta yang mendapatkan perizinan. Sementara, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit hanya 8,87%
- Upah rata-rata per jam pekerja di DKI Jakarta pada tahun 2019 yaitu Rp 26.030
- Persentase setengah pengangguran 11,53%
- Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat 68%
- Pada 2019, terdapat sebanyak 2.455.427 wisatawan mancanegara dan 41.640.800 wisatawan nusantara
- Jumlah perusahaan yang menjalankan K3 sebanyak 3155 perusahaan

Laju PDRB 2019 5,89%, quarter II 2020 mencapai -1,1%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2019 sebesar 6,22%

TUJUAN 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

- Dengan total 11 indikator, ada 2 indikator tercapai, 2 indikator akan tercapai/membaik, 4 perlu perhatian dan 3 indikator tidak ada data.
- Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita 12,21%
- Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur -1,22 %
- Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur 12,3%
- Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit 0,78 % (IMKM yang mendapatkan modal 75 IMKM dari total 9564 peserta yang telah mendapatkan perizinan IMKM)
- Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca 3,55%
- Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB 0,000145%

Persentase Kondisi Jalan Mantap 96,16 %

Proporsi individu yang menggunakan Internet 65,89%

TUJUAN 10 Berkurangnya Kesenjangan

- TPB 10 memiliki 9 indikator dengan 5 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai/membaik, 1 indikator perlu perhatian dan 2 indikator tidak ada data.
- Indeks Demokrasi 84,73
- Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan 529 aduan
- Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah 9,15%
- Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 150,05%

Gini Ratio 0,391

TUJUAN 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

- Pada TPB 17 terdapat 14 indikator dengan 6 indikator telah tercapai, 6 indikator perlu perhatian dan 2 indikator tidak ada data.
- Total pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap Belanja Daerah 2019 95,78 % (unaudited)
- Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah 57,21%
- Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target 50,47 (sebanyak 161 indikator yang tercantum di RAD SDGs dan relevan dengan indikator nasional)
- Persentase perangkat daerah yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer 28,57% meliputi 2 SKPD yakni Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk formasi sebanyak 7 SKPD sesuai dengan Pergub No. 9 Tahun 2015

Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB 1,71 (unaudited)

Sumber: (SDGs DKI Jakarta, 2020)

5.1.3 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar Lingkungan terdiri atas 6 TPB yaitu TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14 Ekosistem Lautan dan TPB 15: Ekosisistem Daratan. Dalam RAD TPB 2017-2022, terdapat total 67 indikator dalam pilar lingkungan dengan detil capaian sebagaimana bagan disamping.

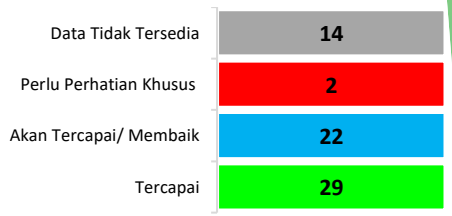

Gambar 5.5 Capaian TPB Pilar Lingkungan Hidup
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Indikator yang tidak tersedia data (14)

6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil

15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi

TUJUAN 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

- Waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku tersebar di 6 Waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma.
- Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan 89,59%.
- Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah 16,73%.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan 90,73%.
- Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 254 kelurahan.
- Kualitas air sungai sebagai sumber air baku ditunjukan dengan Indeks Kualitas Air Sungai sebesar 35,56 poin.
- Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah 80,17%.
- Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya terdapat 6 waduk yakni Jagakarsa, Kaja, Kampung Rambutan, Setu Babakan, Daan Mogot, dan Wijaya Kusuma.
- Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah 80,17%

Cakupan pelayanan air bersih 63,19%

Indeks Kualitas Air Sungai 2019 sebesar 35,56 poin

TUJUAN 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

- TPB 11 memiliki 16 indikator terdiri atas 7 indikator tercapai, 7 indikator akan tercapai/membaik dan 2 indikator perlu perhatian khusus.
- Terdapat 3 sistem angkutan rel yang dikembangkan di Jakarta yaitu KRL, MRT, dan LRT
- Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah 6,16
- Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan 24
- Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana kebakaran pada tahun 2019 yaitu Rp. 322.051.939.000
- Persentase sampah perkotaan yang tertangani 82,94

Public transportation modal share 21,7%

TUJUAN 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

- TPB 12 memiliki 7 indikator, dimana hanya 1 indikator yang telah tercapai, 2 indikator akan tercapai/membaik dan sisanya tidak ada data.
- Jumlah kolaborasi tematik quickwins program 2 (terdiri dari: Bangunan Ramah Lingkungan/Green Building dan Pengelolaan Limbah dan Sampah/Waste Management)
- Indikator dengan tidak ada data: Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU, Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister

Persentase penurunan volume sampah di kota 12,40% (2018)

Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 18,35%

TUJUAN 13 Penanganan Perubahan Iklim

- TPB 13 hanya mencakup 4 indikator, dimana 2 diantanya telah tercapai dan 2 lainnya akan tercapai/membaik
- Terdapat 2 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah terdiri dari: Pergub No. 143 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014 - 2019 dan Pergub No. 131 Tahun 2012 tentang RAD Penurunan Emisi GRK
- Terdapat dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia
- Terdapat dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah 6,16

TUJUAN 14 Ekosistem Lautan

- Dari 9 indikator pada TPB 14, 5 telah tercapai dan 1 akan tercapai/membaik sementara 3 indikator tidak tersedia datanya
- 2 (terdiri dari Kabupaten Kep. Seribu dan Kota Jakarta Utara) Jumlah lokasi peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
- Jumlah nelayan yang terlindungi 3258 orang (2018)
- Tidak ada data: Persentase kepatuhan pelaku usaha, Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil, Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Jumlah luas kawasan konservasi perairan 143,2 Ha

TUJUAN 15 Ekosistem Daratan

- TPB 15 memiliki 12 indikator dimana 4 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai/membaik dan 6 indikator tidak ada data
- Penambahan Rasio RTH Hutan 0,026% (2018)
- Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan +/- 80 Ha (Mangrove)
- Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya 360,36 Ha
- Luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 171,88 Ha (Luas lahan hutan kota yang sudah dihijaukan)
- Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 1 (Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta)

Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi Taman Margasatwa Ragunan 2.286 ekor

Penambahan jumlah flora yang dikonservasi total flora 64.814 tanaman

Sumber: (SDGs DKI Jakarta, 2020)

5.1.4 Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata Kelola kelembagaan hanya mencakup TPB 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dengan total 31 indikator. Jumlah capaian indikator dijelaskan melalui bagan berikut.

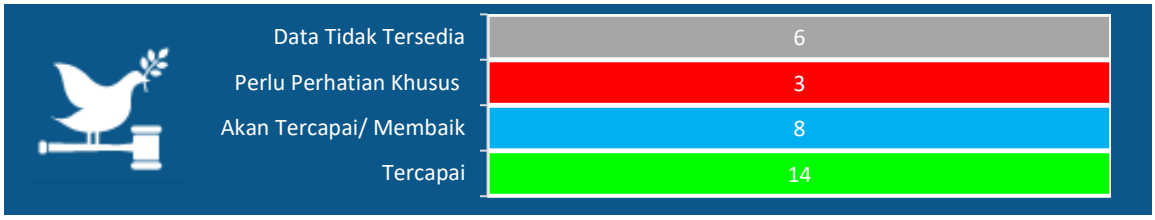

Gambar 5.6. Capaian umum TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola
Sumber: Hasil Analisis

Sebagian besar atau 45,16% dari keseluruhan indikator telah tercapai. Hal ini menandakan bahwa capaian untuk TPB 16 cukup baik ditambah dengan 8 indikator yang akan tercapai/membaik. Sementara terdapat 6 indikator yang tidak tersedia datanya sebagai berikut.

Indikator yang tidak tersedia data (6)

16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Indeks Demokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik
85,08	70,92	83,76
Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Opini Laporan Keuangan Daerah dalam 3 tahun terakhir mendapat predikat
21,7%	14,86%	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Gambar 5.7 Capaian Indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola
Sumber: (SDGs DKI Jakarta, 2020)

5.2 Analisis Gap Target Capaian TPB

Analisi Gap Target dan Capaian dilakukan untuk melihat seberapa jauh capaian TPB untuk mencapai target yang ditetapkan. Target yang dianalisis berdasarkan RAD TPB 2017-2022, meskipun belum semua indikator TPB ditetapkan targetnya. Skema analisis gap target capaian TPB ditunjukan oleh gambar di bawah ini.

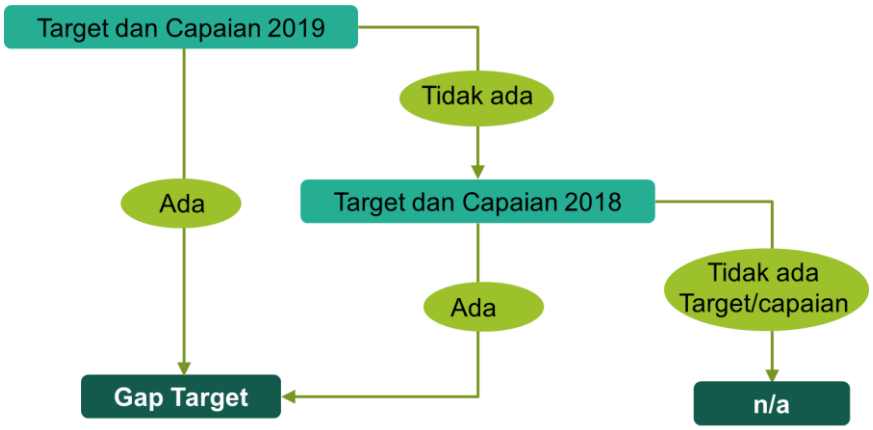

Gambar 5.8. Skema Analisis Gap Target

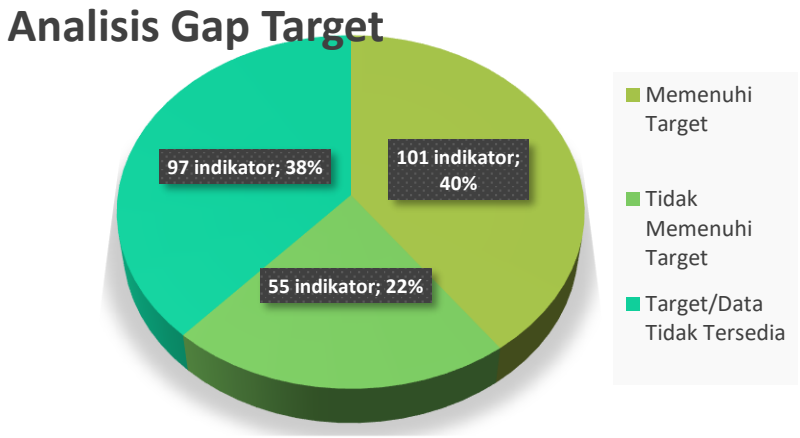

Berdasarkan hasil analisis pada grafik di samping ini menunjukan bahwa dari 253 indikator TPB, sebesar 40% atau 101 indikator telah memenuhi target, sebanyak 55 indikator (22%) tidak memenuhi target serta 38% atau 97 indikator target/data tidak ada.

Gambar 5.9. Hasil Analisis Gap/Target

Sumber: Hasil Analisis, 2020

5.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah

Dalam RAD TPB 2017 – 2022, telah diidentifikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci untuk masing-masing indikator dalam TPB. OPD ini disesuaikan dengan capaian indikator yang terkait. Oleh karenanya, penting untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran dan realisasinya dalam satu OPD. Meskipun, alokasi anggaran tersebut tidak sepenuhnya diperuntukan untuk indikator TPB.

Seyogyanya, penandaan anggaran untuk setiap indikator TPB dan atau TPB secara umum dilakukan agar alokasi penganggaran eksisting dapat tergambar. Namun demikian, penandaan secara rinci ini harus melihat sub kegiatan dari program-program RPJMD dan siapa OPD pelaksananya. Hal tersebut pada dasarnya telah diidentifikasi melalui laporan pencapaian TPB yang dilakukan setiap semester. Dalam laporan KLHS ini, pengggambaran alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing OPD untuk capaian indikator TPB 3dilakukan secara umum. Dengan maksud bahwa, potensi pengaggaran untuk perbaikan capaian TPB didapat dari OPD mana saja. Gambar di bawah ini menunjukan anggaran dan realisasi tahun 2019 untuk OPD kunci dan status capaian indikatornya. Dengan catatan bahwa grafik di bawah ini belum mencakup semua OPD di DKI Jakarta, dan hanya 30 OPD yang mejadi OPD kunci dalam pencapaian indikator TPB berdasarkan dokumen RAD TPB.

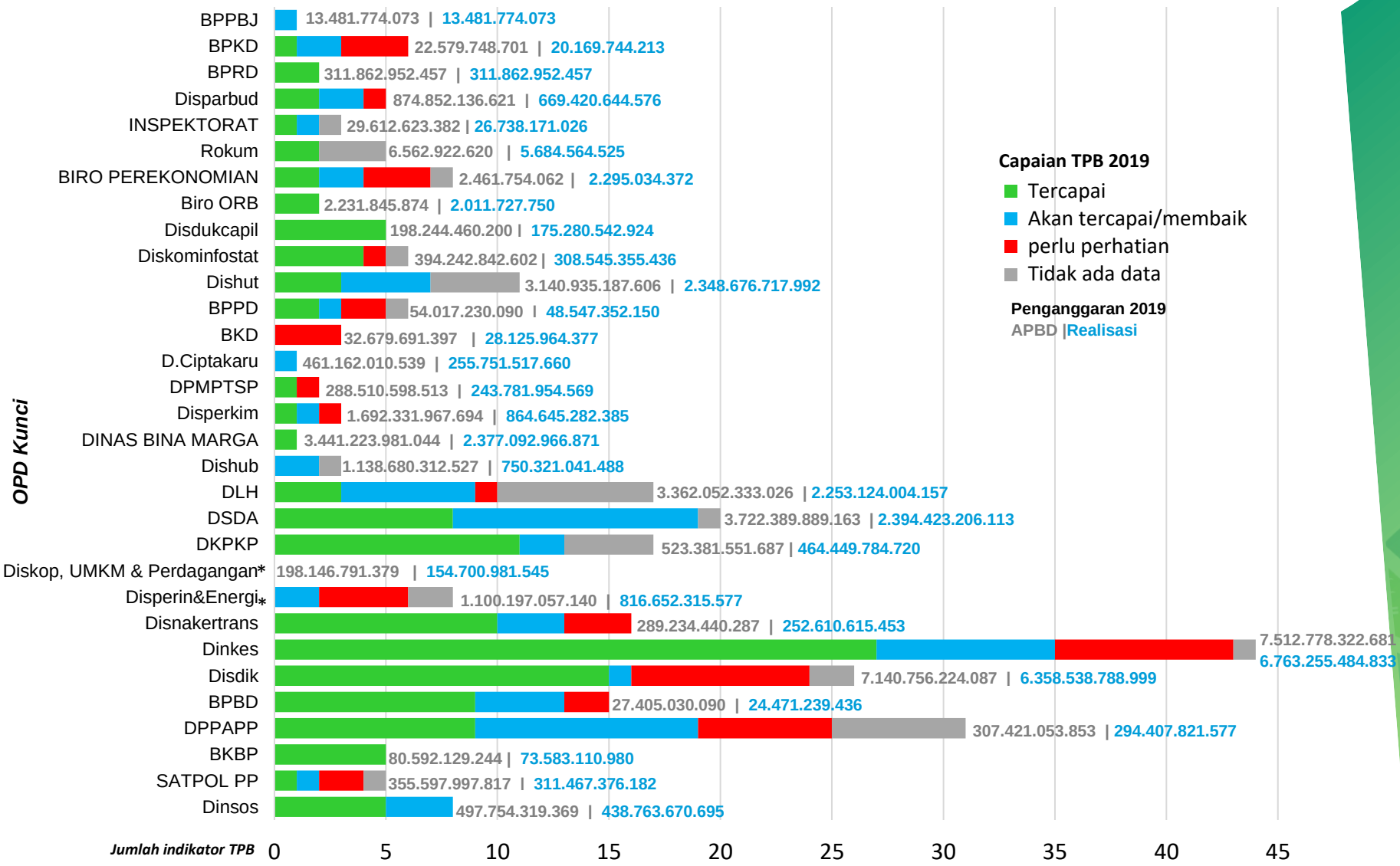

*Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Gambar 5.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran OPD terhadap Capaian TPB
Sumber:Hasil Analisis, 2020

Pada Gambar di atas, OPD yang memiliki indikator paling banyak diampu oleh Dinas Kesehatan dengan total 44 indikator mencakup 27 indikator sudah tercapai, 8 indikator akan tercapai/membaik, 8 indikator perlu perhatian khusus dan 1 indikator tidak ada data. Seiring dengan banyaknya jumlah indikator tersebut, alokasi anggaran APBD dan Realisasinya pada tahun 2019 pada Dinas Kesehatan merupakan yang terbesar dengan total anggaran APBD Rp. 7.512.778.322.681,-. Anggaran APBD Dinas Kesehatan perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk melihat seberapa besar kontribusinya dalam pencapaian TPB.

Secara umum, capaian paling baik ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP), Dinas Bina Marga, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, dan Bada Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) karena semua indikator yang menjadikan OPD tesebut sebagai OPD kunci telah tercapai keseluruhannya. Namun demikian, dapat terlihat bahwa OPD tersebut menjadi OPD kunci pada sebagian kecil jumlah indikator TPB., paling besar Disdukcapil dengan 5 indikator.

Indentifikasi lebih lanjut dilakukan untuk melihat kontribusi OPD pada Target TPB sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Kontribusi OPD pada Target TPB

Organisasi Perangkat Daerah	Target TPB
Dinas Sosial	1.2, 1.3, 1.5, 1.a, 10.1, 10.4
SATPOL PP	3.5, 16.1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.5, 10.3, 16.7
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.4, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 10.3, 11.7, 16.2, 16.7, 16.10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.5, 11.5, 11.b, 13.1
Dinas Pendidikan	1.4, 1.a,4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.a, 4.c 5.3
Dinas Kesehatan	1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.a, 3.b, 3.c, 6.2
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.3, 1.4, 7.1, 7.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 10.4
Dinas Perindustrian dan Energi	7.1, 8.3, 8.10, 9.2, 9.3 17.11
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan	
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	2.1, 2.2, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.b, 14.c, 15.5
Dinas Sumber Daya Air	1.4, 6.1-6.6
Dinas Lingkungan Hidup	9.4, 11.6, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 13.2, 15.7,15.9, 15.c
Dinas Perhubungan	9.1, 11.2
Dinas Bina Marga	9.1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.4, 11.1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.17
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	11.4
Badan Kepegawaian Daerah	17.19
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.5, 9.5
Dinas Kehutanan	11,7, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 15.8

Organisasi Perangkat Daerah	Target TPB
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.C, 16.10, 17.8
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.4, 16.9, 17.19
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	16.6
Biro Perekonomian	8.1, 8.2, 8.10, 10.1, 10.2, 17.4
Biro Hukum	10.3,16.10
Inspektorat	16
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.9
Badan Pajak dan Retribusi Daerah	17.1
Badan Pengelola Keuangan Daerah	16.6 17.1
Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa	16.6

Sumber: RAD TPB DKI Jakarta 2017-2022

Rincian 17 TPB beserta target dan indikatornya dijabarkan dalam

Tabel 8.8.

BAB 6

BAB 6 RUMUSAN ISU PRIORITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (PB) PROVINSI DKI JAKARTA

6.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas

Isu pembangunan berkelanjutan yang strategis diperoleh dengan metode analisis *cross cutting issues* antara **capain TPB** yang diindikasikan dari indikator yang perlu perhatian khusus dengan **kondisi lingkungan hidup** (yang direpresentasikan oleh kondisi 6 muatan antara lain daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja jasa lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati dan kerentanan & kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim) dan **perencanaan strategis** yang relevan (antara lain RPJMN, RPJPD, RTRW Provinsi DKI Jakarta), seperti diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Seluruh rangkain proses identifikasi ini dilakukan bertahap dengan melibatkan berbagai stakeholder. Tahapan demi tahapan dijelaskan pada sub bab di bawah.

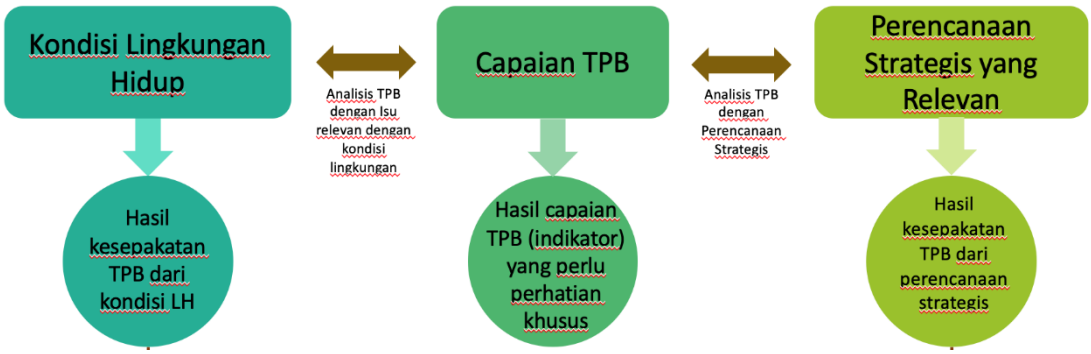

Gambar 6.1 Skema Identifikasi Isu Strategis Pembangungan Berkelanjutan

6.1.1 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

6.1.1.1 Identifikasi Awal Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan.

Proses identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan diawali dengan diskusi bersama *stakeholder* kunci pada tanggal 7 Agustus 2020 yang terwakili oleh:

1. Bappeda
2. DLH
3. Sekretariat SDGs
4. Perangkat Daerah terkait dengan pembahasan indikator capaian target TPB

Isu strategis pembangunan berkelanjutan yang diidentifikasi berdasarkan analisis gap capaian TPB masing-masing pilar yaitu **Pembangunan Sosial**, **Ekonomi**, **Lingkungan Hidup** dan **Hukum & Tata Kelola Kelembagaan**. Selama proses diskusi *gap analysis*, *stakeholder* turut aktif memberikan pertimbangan, salah satunya mengenai usulan agar capaian target dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator capaian TPB memiliki karakteristik berbeda satu sama lain, analisis kualitatif diharapkan dapat menemukenali indikator yang memiliki *multiplying effect*. Dan Tim KLHS telah melakukan analisis gap capaian TPB baik secara kualitatif dan kuantitatif seperti dideskripsikan pada sub bab 5.2 Analisis Gap Target Capaian TPB.

Gap capaian TPB dianalisis dari Laporan Evaluasi Capaian TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah disusun oleh Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta. Di bawah ini disajikan profil capaian TPB yang diilustrasikan dalam bentuk grafik.

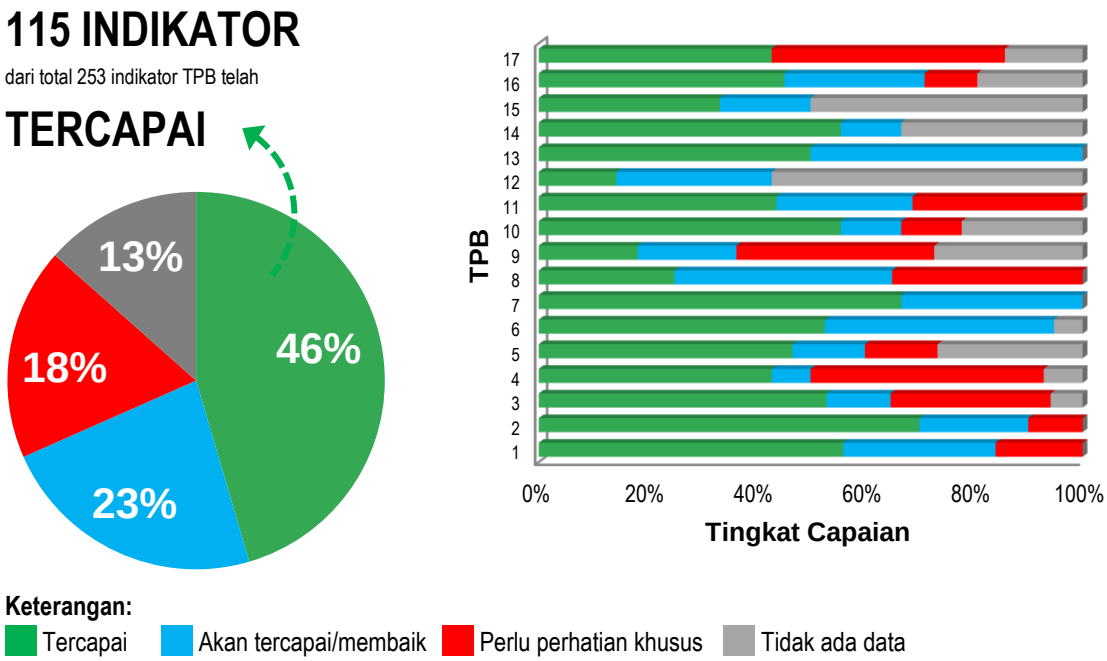

Gambar 6.2 Gambaran Capaian Target TPB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Dari 46 Indikator TPB yang masih perlu perhatian, terdapat:
*4 indikator **(TPB 1);** 1 indikator **(TPB 2);***
*10 indikator **(TPB 3)**; 6 Indikator **(TPB 4);***
*2 indikator **(TPB 5)**; 7 indikator **(TPB 8)**;*
*4 indikator **(TPB 9);** 1 indikator **(TPB 10);***
*2 indikator **(TPB 11)**; 3 indikator **(TPB16)**;*
*6 indikator **(TPB17).***

Berdasarkan grafik di atas, Provinsi DKI Jakarta telah memberikan kontribusi pencapaian target pada 115 indikator TPB (46% dari total 253 indikator TPB) sesuai kewenangan provinsi terhadap indikator nasional. Terdapat 46 indikator TPB (18% dari total 253 indikator TPB) yang perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingkatan pencapaiannya yang rendah atau kemajuan capaian targetnya masih lamban. Indikator TPB yang masih perlu perhatian ini menjadi daftar identifikasi awal isu strategis pembangunan berkelanjutan.

Ke-46 indikator TPB tersebut terbagi dalam 11 TPB seperti dijelaskan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Identifikasi Awal Isu Strategis berdasarkan Capaian Target Indikator TPB yang Perlu Perhatian

TPB	Indikator perlu perhatian & gap:	Target 2019	Capaian 2019
	1. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan dengan **gap capaian -9,72%**.	9,71%	N/A
	2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat dengan **gap capaian -3,49%**.	96,93%	93,44%
	3. Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs dengan **gap capaian -5,42%**.	88,67%	83,25%
	4. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana dengan **kecenderungan gap kerugian meningkat**.	N/A	322 juta rupiah

TPB	Indikator perlu perhatian & gap:	Target 2019	Capaian 2019
	1. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif dengan **gap capaian -4,78%**.	75%	70,22%
	1. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan **gap capaian yang belum dapat dianalisis karena belum ada penentuan target**.	N/A	57,48%
	2. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup dengan **gap capaian yang belum dapat dianalisis karena belum ada penentuan target**.	N/A	2,31%
	3. Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat dengan **gap capaian -9,76%**.	95%	85,24%
	4. Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat dengan **gap capaian -9,76%**.	95%	85,24%
	5. Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan **gap capaian -75,54%**.	100%	24,46%
	6. Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan **gap capaian -66,32%.**	100%	33,68%
	7. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir **belum ada target dan capaian**.	N/A	N/A
	8. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern dengan **gap capaian -2,55.**	35,45	32,9
	9. Total Fertility Rate dengan **gap capaian -0,3%.**	2,15%	2,45%
	10. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar dengan **gap capaian -35,41%**.	50%	14,59%
	1. Persentase Sekolah terakreditasi A (SD/MI) dengan **gap capaian -15,33%**. Gap capaian didapatkan dari perbandingan realisasi 62,19% dengan target tahun 2019.	77,52%	N/A
	2. Persentase Sekolah terakreditasi A (SMP/MTs) dengan **gap capaian -15,33%.** Gap capaian didapatkan dari perbandingan realisasi 62,19% dengan target tahun 2019.	77,52%	N/A
	3. Persentase Sekolah terakreditasi A (SMA/MA) dengan **gap capaian -15,33%.** Gap capaian didapatkan dari perbandingan realisasi 62,19% dengan target tahun 2019.	77,52%	N/A
	4. Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun) dengan **gap capaian -69,28%**.	89,63%	20,35%
	5. Persentase Sekolah terakreditasi A (akses sekolah terhadap beberapa fasilitas) dengan **gap capaian**	77,52%	N/A

TPB	Indikator perlu perhatian & gap:	Target 2019	Capaian 2019
	-15,33%. Gap capaian didapatkan dari perbandingan realisasi 62,19% dengan target tahun 2019.		
	6. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik dengan **gap capaian -48,92%**.	98,86%	49,94%
	1. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. **Capaian untuk indikator ini belum tercapai karena median usia kawin pertama adalah 21 tahun**.	N/A	21 tahun
	2. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. **Belum ada penentuan target mengenai indikator ini, sehingga gap capaian belum dapat dianalisis.**	N/A	19,8%
	1. Pertumbuhan PDRB (laju pertumbuhan PDB per kapita) dengan **gap capaian -0,71%**.	6,6%	5,89%
	2. Pertumbuhan PDRB (PDB per kapita) dengan **gap capaian -0,71%**.	6,6%	5,89%
	3. Pertumbuhan PDRB (laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja) dengan **gap capaian -0,71%**.	6,6%	5,89%
	4. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin dengan **gap capaian -7,41%**.	22,71%	30,12%
	5. Persentase tenaga kerja formal dengan **gap capaian -1,55%.**	70%	68,45%
	6. Persentase tenaga kerja formal (persentase usia muda yang sedang tidak sekolah) dengan **gap capaian -4,04%.**	13%	17,04%
	7. Jumlah Wisatawan Mancanegara dengan **gap capaian -484.573 orang**.	2.940.000	2.455.427
	1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita. **Gap capaian tidak dapat dianalisis karena target capaian belum ditentukan.**	N/A	12,21%
	2. Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur. **Gap capaian tidak dapat dianalisis karena target capaian belum ditentukan.**	N/A	-1,22%
	3. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur dengan **gap capaian -4,68%**.	16,98%	12,3%
	4. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. **Gap capaian belum dapat dianalisis karena target capaian belum ditentukan.**	N/A	0,78 juta rupiah
	1. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. **Gap capaian belum dapat dianalisis karena target capaian belum ditentukan.**	N/A	529%

TPB	Indikator perlu perhatian & gap:	Target 2019	Capaian 2019
	1. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. **Gap capaian belum dapat dianalisis karena target capaian belum ditentukan.**	NA	322 juta rupiah
	2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani dengan **gap analisis -0,12%**.	83,06%	82,94%
	1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir dengan **gap capaian -17 kasus**.	58 kasus	N/A
	2. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	N/A
	3. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dengan **gap capaian -26%**.	100%	74%
	1. a. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah dengan **gap capaian -116,85 milliar rupiah**.	704,76 miliar rupiah	587,91 milliar rupiah
	b. Jumlah Pendapatan Daerah dengan **gap capaian -17,69 triliun rupiah**.	79,99 triliun rupiah	62,3 triliun rupiah
	2. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan **gap capaian -85%**.	Alokasi 6 miliar	Alokasi 906 juta
	3. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target. **Gap capaian belum dapat dianalisis mengingat target indikatornya tidak ditentukan secara eksplisit.**	N/A	50,47%
	4. Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga. **Gap capaian belum dapat dianalisis mengingat target indikatornya tidak ditentukan secara eksplisit.**	N/A	17 pegawai
	5. Persentase Kementerian/Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer. **Gap capaian belum dapat dianalisis mengingat target indikatornya tidak ditentukan secara eksplisit.**	N/A	28,57%
	6. Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga, **belum ada kemajuan dalam pencapaian indikator ini.**	N/A	0%

Sumber: Sekretariat SDGs, 2019

6.1.1.2 Analisis Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan dan Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Isu strategis yang teridentifikasi pada Tabel 6.1 dianalisis kembali keterkaitannya terhadap Rencana Pembangunan dan Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Proses ini dilaksanakan melalui diskusi terbatas pada tanggal 12 Agustus 2020 yang diwakili oleh lintas Perangkat Daerah dan instansi sebagaimana termuat dalam Laporan Dokumentasi KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022 yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam laporan KLHS ini.

Di setiap tahapannya, KLHS selalu mengutamakan proses deliberatif dengan melibatkan lintas *stakeholder* dari berbagai sektor untuk memberikan pandangan yang komprehensif. Hal ini untuk mendapatkan konsensus dalam menentukan isu prioritas. Prioritasi isu strategis merupakan proses mengkaji akar masalah dari pembangunan di DKI Jakarta. Dimana, isu-isu strategis yang prioritas selanjutnya akan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi utamanya untuk arahan kebijakan dan program. Oleh karena itu, proses prioritasi isu strategis telah dikonsultasikan secara bertahap oleh Tim Pembuat KLHS untuk memastikan tidak ada isu strategis atau urusan sektoral yang terlupakan dalam pembahasan.

Pada saat analisis keterkaitan isu strategis, Tim Pembuat KLHS menyadari diperlukannya keselarasan arah pembangunan pada tingkat nasional hingga daerah dengan jenjang kerangka waktu yang berbeda (jangka panjang dan menengah) yang merupakan **Perencanaan Strategis** serta **Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup** telah mendasari pertimbangan dalam prioritasi isu strategis yang berasal dari 17 TPB. Pengaruh dan akibat pandemi COVID-19 pun menjadi pertimbangan yang signifikan dalam prioritasi TPB.

Tabel 6.2 Pertimbangan dalam Prioritasi 17 TPB

KONDISI 6 MUATAN LINGKUNGAN HIDUP mencakup hal sebagai berikut.	**PERENCANAAN STRATEGIS** yang dimaksudkan mencakup arah kebijakan sebagai berikut.
LH.1 Status Daya Dukung Air diindikasikan ***98% terlampaui*** (adanya potensi kekeringan). LH.2 Kinerja Jasling Lingkungan Hidup yang berfungsi sebagai penyedia air, pengatur air, pengatur kualitas udara dan pengatur mitigasi Banjir didominasi oleh kelas kinerja ***rendah***. LH.3 ***Penurunan keanekaragaman hayati*** pada ekosistem alami dan buatan. LH.4 ***Potensi bencana*** akibat perubahan iklim. LH.5 Dampak dan risiko lingkungan hidup dari ***pencemaran lingkungan*** (pencemaran sungai, timbulan sampah belum 100% tertangani dan pencemaran udara). LH.6 ***Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan*** pada RTH yang mempengaruhi efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. LH.7 Bencana non alam yang berdampak besar seperti ***pandemi COVID-19***. Pandemi COVID-19 secara nyata merupakan *emerging factor* yang sangat mempengaruhi arah pembangunan baik secara lokal, nasional bahkan global. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 dimasukkan sebagai pertimbangan bencana non alam yang harus diperhatikan.	**RPJMN**, dengan arahan kebijakan: RN.1 Struktur perekonomian yang kokoh RN.2 Keunggulan kompetitif RN.3 SDM berkualitas **RPJPD DKI Jakarta**, dengan arahan kebijakan: RP.1 Pemantapan stabilitas ekonomi RP.2 Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana RP.3 Pemantapan ketahanan sosial budaya RP.4 Pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam **RTRW DKI Jakarta**, dengan arahan kebijakan: RW.1 Sarana prasarana perkotaan perlu ditingkatkan RW.2 Kualitas perkotaan yang sejahtera dan berdaya saing **Ranwal RPJMD**, dengan arahan kebijakan: RM.1 Pembangunan ekonomi dan infrastruktur RM.2 Kota Lestari RM.3 Pembangunan sumber daya manusia RM.4 Integritas aparatur

Selain analisis keselarasan di atas, diskusi terfokus (FGD) pada tanggal 12 Agustus 2020 digunakan sebagai forum untuk menggali dan melakukan pengayaan isu sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Konsensus yang didapatkan dari FGD yaitu menyepakati bahwa terdapat TPB yang masih perlu menjadi prioritas perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 meskipun indikator targetnya sudah tercapai atau membaik.

Hasil kesepakatan FGD ini ditandai dengan warna sebagai indikasi banyaknya keterkaitan dengan kondisi lingkungan hidup dan perencanaan strategis seperti dituangkan pada tabel berikut, yaitu untuk TPB 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11,13,17.

Tabel 6.3 Keterkaitan TPB dengan Perencanaan Strategis dan Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Keterkaitan dengan Kondisi Lingkungan Hidup	Keterkaitan dengan Perencanaan Strategis	Total Keterkaitan
Pilar Sosial			
1 Tanpa Kemiskinan	5	10	15
2 Tanpa Kelaparan	6	12	18
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	5	12	17
4 Pendidikan yang Berkualitas	3	13	16
5 Kesetaraan Gender	1	11	12
Pilar Hukum Tata Kelola			
16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1	12	13
Pilar Ekonomi			
7 Energi Bersih dan Terjangkau	4	12	16
8 Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	7	11	18
9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	7	10	17
10 Berkurangnya Kesenjangan	4	12	16
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	7	13	20
Pilar Lingkungan			
6 Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	6	10	16
11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	5	10	15
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab	2	10	12
13 Penanganan Perubahan Iklim	6	7	13
14 Ekosistem Lautan	3	5	8
15 Ekosistem Daratan	6	5	11

Keterangan:
- Isu Prioritas berdasarkan jumlah total keterkaitan
- Jumlah keterkaitan TPB dengan 7 hal kondisi lingkungan hidup
- Jumlah keterkaitan TPB dengan 13 hal perencanaan strategis
- Total keterkaitan TPB dengan unsur lain

Sumber: FGD Perumusan Isu Prioritas 12 Agustus 2020

Berdasarkan tabel di atas, telah disepakati isu PB strategis yang terdapat pada **10 TPB prioritasi awal** (dijelaskan pada Tabel 6.4). Selanjutnya dijadikan sebagai pembahasan dan pendalaman dalam Konsultasi Publik 1 dengan melibatkan pemangku kepentingan lebih besar jumlahnya dan lebih luas cakupannya.

Tabel 6.4 TPB Prioritas berdasarkan kesepakatan FGD Perumusan Isu Prioritas tertanggal 12 Agustus 2020

TPB	Kata kunci pengayaan isu oleh pemangku kepentingan	Keterkaitan[5] dengan perencanaan strategis dan kondisi 6 muatan LH
	• Tingkat kemiskinan meningkat	Memiliki keterkaitan dengan:

Muatan LH		Perencanaan Strategis			
LH		RN	RP	RW	RM
1:	✔	✔	✔	✔	✔
2:	-	-	✔	✔	✔
3:	-	✔	-		✔
4:	✔		✔		-
5:	✔				
6:	✔				
7:	✔				

[5] Pertimbangan dalam prioritasi 17 TPB seperti dijelaskan pada Tabel 6.2

TPB	Kata kunci pengayaan isu oleh pemangku kepentingan	Keterkaitan[5] dengan perencanaan strategis dan kondisi 6 muatan LH
	• Stunting • Ketahanan pangan (menggerakkan partisipasi warga)	Memiliki keterkaitan dengan:
	• Penyakit menular yang berpotensi epidemi/pandemi • Akses fasilitas pelayanan kesehatan • Rendahnya implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat • Kesehatan mental secara umum serta berkaitan dengan pandemi COVID-19 • *Universal Health Coverage* (UHC) belum menyeluruh	Memiliki keterkaitan dengan:
	• APK PAUD • APM tingkat menengah • Kompetensi guru	Memiliki keterkaitan dengan:
	• Kebutuhan air bersih untuk mendukung pola PHBS menjadi meningkat • Kuantitas dan kualitas air belum dapat memenuhi kebutuhan air dalam lingkup provinsi • Akses sarpras penyediaan air, pengelolaan air bersih dan sanitasi	Memiliki keterkaitan dengan:
	• Pertumbuhan PDRB yang melambat • Pengembangan kualitas kerja tenaga kerja formal • Akses UMKM ke finansial • Pelayanan dasar di Pulau seribu dan wilayah kumuh belum dapat terpenuhi	Memiliki keterkaitan dengan:

Muatan LH | **Perencanaan Strategis**

LH	RN	RP	RW	RM
1: ✔	✔	✔	✔	✔
2: ✔	✔	✔	✔	✔
3: -	✔	✔		✔
4: ✔		✔		-
5: ✔				
6: ✔				
7: ✔				

Muatan LH | **Perencanaan Strategis**

LH	RN	RP	RW	RM
1: ✔	✔	✔	✔	✔
2: ✔	-	✔	✔	✔
3: -	✔	✔		✔
4: ✔		✔		✔
5: ✔				
6: -				
7: ✔				

Muatan LH | **Perencanaan Strategis**

LH	RN	RP	RW	RM
1: -	✔	✔	✔	✔
2: -	✔	✔	✔	✔
3: -	✔	✔		✔
4: -		✔		✔
5: -				
6: ✔				
7: ✔				

Muatan LH | **Perencanaan Strategis**

LH	RN	RP	RW	RM
1: ✔	✔	✔	✔	✔
2: ✔	-	✔	✔	✔
3: -	✔	-		✔
4: ✔		✔		-
5: ✔				
6: ✔				
7: ✔				

Muatan LH | **Perencanaan Strategis**

LH	RN	RP	RW	RM
1: ✔	✔	✔	✔	✔
2: ✔	-	✔	✔	-
3: ✔	✔	✔		✔
4: ✔		✔		-
5: ✔				

TPB	Kata kunci pengayaan isu oleh pemangku kepentingan	Keterkaitan[5] dengan perencanaan strategis dan kondisi 6 muatan LH				
	• Penggunaan air meningkat seiring perumbuhan ekonomi terutama sektor industri	6: ✔				
		7: ✔				
	• Kondisi infrastruktur • Industri manufaktur • Rasio emisi CO_2 terhadap sektor industri	Memiliki keterkaitan dengan:				
		Muatan LH	**Perencanaan Strategis**			
		LH	RN	RP	RW	RM
		1: ✔	✔	✔	✔	✔
		2: ✔	✔	✔	✔	-
		3: ✔	✔	-		✔
		4: ✔		✔		-
		5: ✔				
		6: ✔				
		7: ✔				
	• Perbaikan penataan kota untuk mengurangi potensi bencana akibat perubahan iklim • Perbaikan infrastruktur untuk mendukung penanganan bencanan non alam • Perlunya ketahanaan ekonomi terhadap kondisi krisis	Memiliki keterkaitan dengan:				
		Muatan LH	**Perencanaan Strategis**			
		LH	RN	RP	RW	RM
		1: ✔	✔	✔	✔	✔
		2: ✔	-	✔	✔	✔
		3: -	✔	-		✔
		4: ✔		✔		-
		5: ✔				
		6: ✔				
		7: -				
	• Penanganan perubahan iklim semestinya memiliki pengaruh terhadap perbaikan kapasitas daya dukung lingkungan hidup	Memiliki keterkaitan dengan:				
		Muatan LH	**Perencanaan Strategis**			
		LH	RN	RP	RW	RM
		1: ✔	-	-	✔	✔
		2: ✔	-	✔	-	✔
		3: ✔	✔	-		✔
		4: ✔		✔		-
		5: ✔				
		6: ✔				
		7: -				
	• APBD • Skema KPBDU • Kolaborasi *key-actor* dengan pemerintah	Memiliki keterkaitan dengan:				
		Muatan LH	**Perencanaan Strategis**			
		LH	RN	RP	RW	RM
		1: ✔	✔	✔	✔	✔
		2: ✔	✔	✔	✔	✔
		3: ✔	✔	✔		✔
		4: ✔		✔		✔
		5: ✔				
		6: ✔				
		7: ✔				

Sumber: Analisis, 2020

Daftar identifikasi isu berdasarkan TPB dengan indikator yang perlu perhatian (Tabel 6.1) memberikan hasil yang berbeda setelah dilakukan analisis keterkaitannya dengan kondisi lingkungan hidup dan rencana strategis pembangunan (Tabel 6.4). Beberapa isu TPB yang kemudian masuk sebagai pertimbangaan lain yaitu TPB 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak serta TPB 13. Penanganan Perubahan Iklim. Selain itu, terdapat isu-isu TPB yang tidak dimasukkan sebagai isu prioritas karena pada dasarnya isu-isu tersebut sangat berkaitan dengan pencapaian TPB-TPB lain.

Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi isu strategis dan penentuan isu prioritas tidak dapat ditempuh hanya berdasarkan model statistik (*scientific-based*). Diperlukan kearifan dari para pemangku kepentingan yang dapat melihat permasalahan dan kebutuhan DKI Jakarta secara utuh dari berbagai sudut pandang, antara lain:

- Relevansi dengan kondisi yang dialami DKI Jakarta terutama akibat terdampak pandemi COVID-19.
- Termasuk isu krusial yang harus segera ditangani dalam masa 2 tahun periode perubahan RPJMD.
- Merepresentasikan capaian TPB serta keterkaitan antar isu.

Hasil penentuan awal inilah yang kemudian dikonsultasikan kepada publik dengan cakupan pelibatan stakeholder yang lebih luas. Perlu dipahami bahwa mendapatkan sebuah konsensus penentuan isu strategis, relatif membutuhkan waktu dan perdebatan yang panjang. Namun, hal tersebut dilakukan untuk memberikan satu pemahaman dan pandangan yang sama terhadap arah pembangunan selama 2 tahun perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022.

6.1.2 Prioritasi Isu TPB

Uji Publik pembahasan prioritasi isu TPB dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara (Lampiran 4). Pada proses uji publik ini, pemangku kepentingan tetap diberikan informasi secara utuh meliputi latar belakang perubahan RPJMD & pelaksanaan KLHS, gambaran capaian keseluruhan TPB, gambaran kondisi lingkungan hidup, gambaran kondisi yang dialami DKI Jakarta selama pandemi, dan proses identifikasi awal isu hingga fokus 10 TPB yang akan diangkat dalam perubahan RPJMD 2017-2022.

Berdasarkan informasi tersebut, pemangku kepentingan dipersilakan memberikan masukan, klarifikasi data, dan menyepakati isu-isu TPB yang perlu menjadi prioritas pembangunan dalam 2 tahun penyelesaian RPJMD periode 2017-2022. Tim KLHS memberikan apresiasi yang luar biasa atas respon pemangku kepentingan yang sebagian besar berperan aktif selama diskusi. Melalui metode polling secara daring, pemangku kepentingan memilih isu TPB yang diprioritaskan berdasarkan masukan per individu (bukan per instansi) untuk semua peserta konsultasi public. Hasil polling tersebut kemudian disampaikan secara pleno pada saat kegiatan uji publik.

Ranking isu yang didapatkan dari polling dibahas kembali untuk mendapatkan konsensus dari pemangku kepentingan secara langsung sehingga disepakati terdapat 6 isu TPB yang diprioritaskan seperti pada visualisasi[6] berikut ini:

[6] Visualisasi berdasarkan urutan TPB dari nomer kecil ke besar, dan bukan merupakan ranking atas hasil polling peserta uji public. Hasil lengkap uji public dimuat pada laporan dokumentasi KLHS.

Gambar 6.3 Isu Prioritas TPB berdasarkan Uji Publik 1

Ke enam isu prioritas di atas bukan merupakan bentuk eliminasi terhadap TPB lainnya. Baik pemangku kepentingan dan tim KLHS meyakini terdapat keterkaitan diantara TPB sehingga pencapaian target pada satu TPB semestinya akan memberikan kontribusi perbaikan pada TPB lainnya. Hubungan keterkaitan antar TPB ini dibahas secara mendalam dalam Sub Bab 7.1 Keterkaitan antar TPB Prioritas. Secara keseluruhan alur penentuan isu PB prioritas digambarkan sebagai berikut:

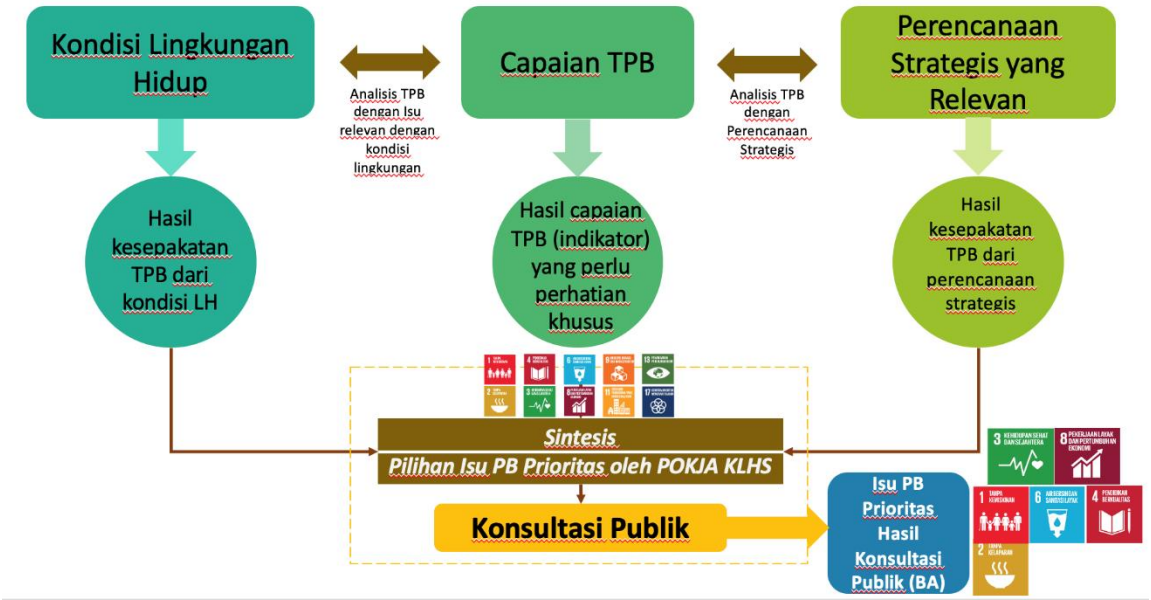

Gambar 6.4 Alur Penentuan Isu PB Prioritas

Latar belakang pemilihan isu prioritas pada 6 TPB di atas dinarasikan dalam profil isu prioritas sebagai berikut yang telah diurutkan berdasarkan ranking hasil polling dan berita acara konsultasi publik 1 (terdapat pada Lampiran 5)

6.1.2.1 TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera

TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera disepakati menjadi isu prioritas karena bencana non alam pandemi COVID-19 memberikan desakan kesiapan penanganan pada sektor kesehatan dengan respon cepat tanggap. *Stakeholder* menyoroti beberapa isu yang termasuk dalam urusan pencapaian TPB 3, yaitu:

*) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Gambar 6.5 Isu-isu yang disoroti dalam TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera

Pandemi COVID-19. Jakarta telah diindikasikan menjadi lokasi terjadinya penularan pertama kasus COVID-19. Dalam 6 bulan terakhir (hingga Oktober 2020), kasus baru meningkat tajam menjadi 104.847 penduduk DKI Jakarta yang terpapar virus Corona dengan rincian status sembuh sebanyak 92.312 jiwa (88%), status kasus aktif/dirawat sebanyak 10.296 jiwa (9,8%), dan status meninggal 2.239 jiwa (2,1%).

Penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta berkembang sangat massif. Sebagaimana terlihat pada peta kasus terkonfirmasi positif Gambar 6.6, DKI Jakarta dan Jawa Timur termasuk provinsi dengan kasus COVID-19 paling tinggi.

Gambar 6.6 Sebaran Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Indonesia
Sumber: Danial Rosli, 22 Oktober 2020

Mobilitas penduduk dan komuter yang bekerja di dalam dan keluar wilayah DKI Jakarta cukup tinggi sehingga turut mempengaruhi tingginya penyebaran kasus pandemi. Hal tersebut yang mendasari DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah episentrum kejadian pandemi COVID-19. Dari Gambar 6.7 dapat terlihat bahwa kasus positif COVID-19 paling banyak terjadi di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 18.452 jiwa. Namun jika dilihat per kelurahan, kasus positif aktif COVID-19 tersebar paling tinggi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Hal tersebut terjadi karena kepadatan penduduk di Jakarta Barat merupakan yang paling tinggi sehingga memicu penyebaran secara lokal.

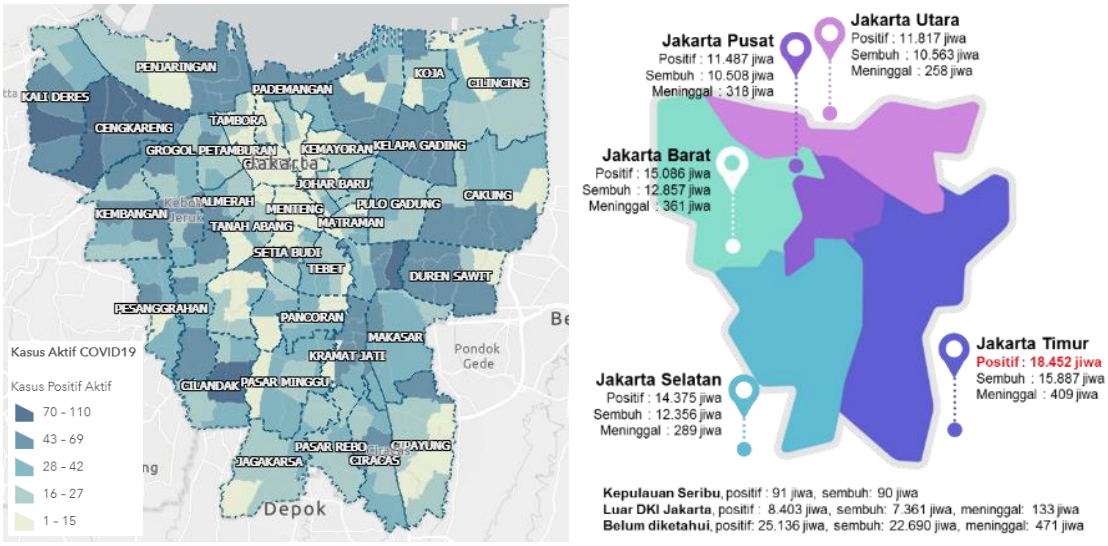

Gambar 6.7 Sebaran Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 DKI Jakarta
Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran, 30 Oktober 2020

Pemberlakuan kebijakan PSBB sebagai respon terhadap penanganan COVID-19 merupakan upaya terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengimbangi kontraksi ekonomi dan pemutusan rantai penyebaran. DKI Jakarta menerapkan PSBB sejak 10 April 2020, dan kebijakan ini dipandang cukup berhasil menekan laju kasus baru COVID-19 sehingga dapat dikatakan rantai penyebaran dapat dikendalikan. Sayangnya, kebijakan tersebut berimbas sangat signifikan pada perekonomian DKI Jakarta (lihat Gambar 6.8).

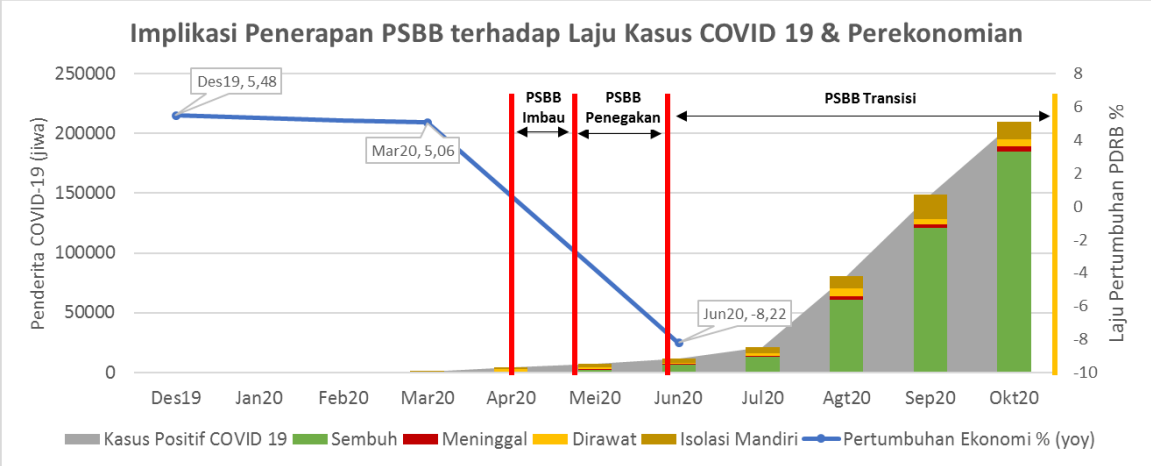

Gambar 6.8 Kaitan Penerapan Kebijakan PSBB terhadap Kasus Baru COVID-19 & Perekonomian DKI Jakarta
Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran dan (BI, 2020)

Dari grafik di atas dapat terlihat sejak diberlakukan PSBB pada bulan April hingga Juni 2020, kurva kasus baru COVID-19 relatif melandai. Namun demikian, pada bulan yang sama diberlakukan PSBB imbauan dan penegakan menyebabkan tekanan luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. DKI Jakarta mengakui terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga -8,22% (BI, 2020). Kondisi keterpurukan perekonomian yang belum pernah dialami oleh DKI Jakarta bahkan secara global sekalipun. Untuk pertama kalinya sejak 1990, indeks pembangunan manusia akan turun karena pandemi COVID-19. Pemerintahan berada dalam skenario yang sulit karena kegagalan dalam pengambilan tindakan dapat menelan korban jiwa, dan biaya ekonomi dari tindakan tersebut tampaknya sangat tinggi (Calva, 2020).

Menurut Sabine Alkire (2020), dampak pandemi COVID-19 sebenarnya paling dirasakan oleh masyarakat dengan morbiditas tinggi (memiliki penyakit bawaan), dan masyarakat miskin lebih riskan merasakan dampak tersebut karena faktor ketidakmampuan dalam menjalani perawatan. Pencegahan penyebaran COVID-19 pun sulit dilakukan bagi keluarga yang tinggal dalam pemukiman padat dan tidak layak. Di sisi lain, banyaknya penduduk yang bekerja secara informal serta tidak memiliki pekerjaan tetap akan sangat terdampak dari kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan sosial. Mereka berpotensi kehilangan mata pencaharian, tidak memiliki stok makanan bahkan tabungan untuk menjalani fase kebijakan tersebut (Alkire, 2020).

Besaran dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor, mendesak pemerintah memfokuskan sebagian besar kegiatan pemerintahan demi upaya pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19. Berdasarkan model *Gaussian Process Regression* (GPR) yang dilakukan oleh Permana dan Sahadewo (2020), hasil prediksi kasus COVID-19 menunjukkan masa puncak penyebaran berakhir di bulan Juli 2020 dan diharapkan berakhir pada bulan Juli 2021 (lihat Gambar 6.9). Sementara itu, kasus baru terkonfirmasi COVID-19 akan terus naik mengikuti jumlah penduduk yang diuji sampel. Kurva di bawah mengilustrasikan tren kasus COVID-19 secara nasional yang seyogyanya dapat direfleksikan terhadap kondisi DKI Jakarta. Kebijakan PSBB dipercayai dapat menekan laju kasus baru COVID-19 untuk mencapai kurva di bawah ini, meskipun masih banyak ditemukan pelanggaran kepatuhan beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru (konsep *New Normal*). Hal yang perlu diperhatikan yaitu kesalahan dalam pengambilan kebijakan dapat menyebabkan korban jiwa yang lebih banyak.

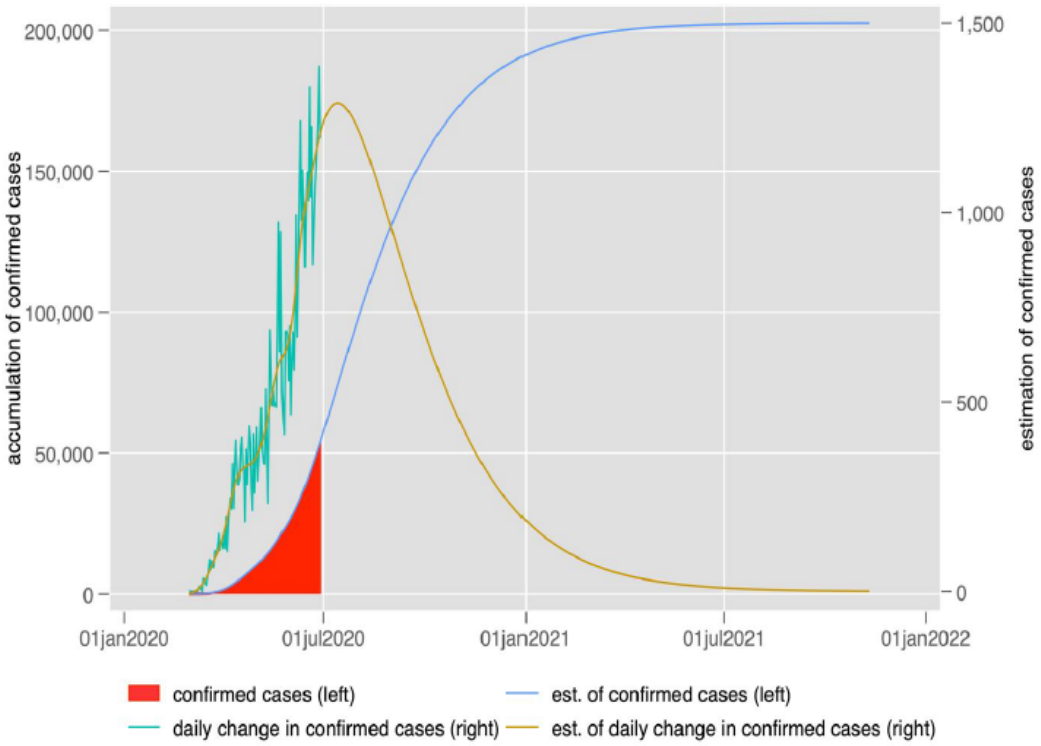

Gambar 6.9 Prediksi Kurva Pandemi COVID-19 di Indonesia
Sumber: (Permana, Y. H. & Sahadewo, Gumilang, 2020)

Fasilitas Layanan Kesehatan. Isu mengenai fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) mengemuka karena kondisi pandemi memaksa kesiapan baik fasilitas dan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) harus memenuhi standar minimum sehingga dapat mendukung

penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang sangat dinamis sehingga diperlukan pembelajaran kontinyu agar tiap rumpun SDMK memahami tata cara penanganan yang tepat. Keberagaman pemahaman rumpun SDMK terhadap pandemi COVID-19 berpotensi memicu kebingungan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Tidak sedikit tenaga kesehatan yang gugur selama menangani pasien COVID-19, salah satunya karena kelengkapan standar untuk penanganan pandemi tidak terpenuhi atau protokol penanganan yang belum memenuhi standar minimum. Ketimpangan yang terlihat nyata yaitu jumlah pasien COVID-19 meningkat dalam waktu singkat jauh melebihi kemampuan tenaga kesehatan yang tersedia. Selain itu, fasilitas kesehatan sebagai rujukan penanganan COVID-19 pun mulai melebihi kapasitasnya.

Kenyataan yang cukup mengkhawatirkan, sementara pemulihan kondisi masyarakat akibat pandemi merupakan upaya yang harus diprioritaskan dalam masa perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Oleh karena itu, stakeholder menilai isu ini perlu menjadi perhatian dalam pencapaian TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera untuk mempersiapkan Jakarta yang lebih berketahanan terhadap berbagai kondisi krisis ke depannya.

Selama kurun waktu 5 tahun, DKI Jakarta tercatat memiliki fasilitas layanan kesehatan sebagai berikut.

Tabel 6.5 Fasilitas Layanan Kesehatan di DKI Jakarta

Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan (unit)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah sakit (RSU)	159	163	165	170	170	170
RS Tempat Bersalin (RSIA)	21	21	21	20	20	20
Puskesmas Kecamatan	44	44	44	44	44	44
Puskesmas Kelurahan	301	296	296	297	290	290
Balai Pengobatan Umum	779	768	1.203	N/A	N/A	N/A
Balai Pengobatan Gigi	125	125	125	N/A	N/A	N/A
Klinik Spesialis	168	168	168	230	368	367
Laboratorium	175	175	175	N/A	N/A	204
Apotik	2.287	2.525	2.525	2.256	2.078	1.813
Posyandu	4.390	4.372	4.384	4.377	4.504	4.504
TOTAL	**8.449**	**8.657**	**9.106**	**7.394**	**7.474**	**7.412**

Sumber: Provinsi Dalam Angka Tahun 2016-2020 diselaraskan dengan data dari Dinas Kesehatan: data Yankesar, data seksi Jukris, data farmasi dan data posyandu 2020

Secara kuantitas fasyankes di DKI Jakarta mengalami penurunan signifikan karena terdapat beberapa klasifikasi data yang tidak diperbaharui seperti balai pengobatan umum, balai pengobatan gigi dan laboratorium. Sementara itu, jumlah fasilitas puskesmas kelurahan menurun sebanyak 11 puskesmas karena beberapa diantaranya sudah mengalami peningkatan menjadi fasilitas kesehatan dengan kelas lebih tinggi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan semester 1 tahun 2020, DKI Jakarta memiliki 44 fasyankes (54,32% dari total 81 fasyankes jajaran provinsi) dengan SDMK yang telah memenuhi standar. Fasyankes yang memenuhi standar tersebut terdiri dari 28 Puskesmas, 14 RSUD/RSKD, dan 2 UPT yang tersebar di 6 Kota/Kabupaten Administrasi (lihat Tabel 6.6).

Tabel 6.6 Fasilitas Layanan Kesehatan Jajaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No	Wilayah	Fasyankes Jajaran Provinsi				Fasyankes yang Memenuhi Standar				
		RSUD/ RSKD	Puskesmas	UPT	Total	Puskesmas	RSUD/ RSKD	UPT	Total	%
1	Jakarta Pusat	6	8	4	18	5	2	1	8	44,44
2	Jakarta Utara	6	6		12	3	1		4	33,33
3	Jakarta Barat	4	8		12	6	2		8	66,67
4	Jakarta Selatan	7	10		17	8	4		12	70,59
5	Jakarta Timur	8	10		18	5	5		10	55,56
6	Kepulauan Seribu	1	2	1	4	1	0	1	2	50,00
	Total	**32**	**44**	**5**	**81**	**28**	**14**	**2**	**44**	**54,32**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 60% fasilitas kesehatan seharusnya memenuhi standar minimum pelayanan. Sayangnya, hingga saat ini hanya terdapat 54,32% fasilitas layanan kesehatan yang sudah memenuhi standar, atau dapat dikatakan masih ada gap sebesar -5,68% dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, jika dilihat dari jumlah SDMK, DKI Jakarta memiliki 104.940 orang yang secara resmi bekerja di bidang kesehatan. Rumpun SDMK yang berkaitan langsung dengan penanganan pasien COVID-19 terdiri dari tenaga medis sebanyak 16.031 orang, psikologis klinis sebanyak 78 orang, keperawatan sebanyak 29.495 orang dan kefarmasian 4.723 orang. Secara statistik, jumlah pasien COVID-19 adalah 104.847 jiwa, dan angka tersebut jauh melebihi jumlah tenaga medis dan keperawatan yang tersedia saat ini (lihat Tabel 6.7). Namun demikian, belum ada informasi yang secara rinci menyebutkan jumlah SDMK yang sudah memenuhi standar minimum.

Tabel 6.7 Sumber Daya Manusia Kesehatan di DKI Jakarta

Rumpun SDMK	Jumlah SDMK				
	2016	2017	2018	2019	2020
01. Medis	8.571	11.433	15.156	17.561	16.031
02. Psikologi Klinis	43	52	58	72	78
03. Keperawatan	19.071	22.048	27.507	27.149	29.495
04. Kebidanan	3.945	4.609	6.217	5.953	5.974
05. Kefarmasian	5.997	9.786	7.497	4.581	4.723
06. Kesehatan Masyarakat	604	464	718	348	292
07. Kesehatan Lingkungan	308	321	464	503	524
08. Gizi	729	757	922	1.004	1.040
09. Keterapian Fisik	596	651	901	968	1.081
10. Keteknisian Medis	1.764	1.546	2.673	2.451	2.367
11. Teknik Biomedika	2.307	2.557	3.443	3.556	3.959
12. Kesehatan Tradisional	31	333	95	159	140
13. Asisten Tenaga Kesehatan	3.163	4.121	5.913	4.705	4.744
14. Tenaga Penunjang	19.878	23.520	30.231	32.156	34.492
Total	**67.007**	**82.198**	**101.795**	**101.166**	**104.940**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Cakupan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk DKI Jakarta. Pada kegiatan diskusi terbatas, stakeholder menyatakan isu mengenai *Universal Health Coverage* (UHC) perlu diangkat mengingat situasi pandemi yang belum berlalu. UHC atau dapat disebut sebagai "Jaminan Kesehatan Semesta" merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Terdapat dua elemen inti dalam UHC yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Lebih mudahnya, UHC dapat dilihat dari tingkat kepesertaan penduduk DKI Jakarta terhadap akse jaminan kesehatan. Dinas Kesehatan menyampaikan seharusnya 100% penduduk DKI Jakarta dapat tercakup dalam jaminan kesehatan. Namun, hingga saat ini hanya 96,55% dari total penduduk DKI Jakarta yang sudah terkonfirmasi memiliki akses jaminan kesehatan, yakni terdiri dari 54,66% tercakup dalam BPJS Kesehatan PBI dan 41,89% tercakup dalam BPJS Kesehatan Non PBI (lihat tabel Tabel 6.8). Pada dasarnya, gap ketercapaian target jaminan kesehatan ini tidaklah besar, dan bukan termasuk indikator pencapaian TPB yang perlu perhatian. Akan tetapi, isu ini dipandang tetap memerlukan perhatian sebagai salah satu upaya mempersiapkan penduduk yang tangguh terhadap kondisi krisis pandemi di masa mendatang.

Tabel 6.8 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2020

Jaminan Kesehatan	Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan (%)		
	2018	2019	2020*
BPJS Kesehatan PBI (APBD)	49,20	55,15	54,66
BPJS Kesehatan Non PBI	14,65	42,85	41,89
TOTAL	**63,85**	**98,00**	**96,55**
Jaminan Kesehatan Lainnya:			
Jamkesda	0,43	0,48	N/A
Asuransi Swasta	1,31	3,12	N/A
Perusahaan Kantor	3,98	4,47	N/A

Sumber: (BPS, 2020)**, tabel 4.2.10 diselaraskan dengan data Dinas Kesehatan, 2020**

Pada dasarnya, satu orang penduduk dapat mengikuti kepesertaan lebih dari bentuk jaminan kesehatan seperti jaminan kesehatan dari pihak asuransi swasta dan perusahaan kantor. Selain itu, program Jamkesda seharusnya sudah terintegrasi melalui mekanisme Jaminan Kesehatan dikelola oleh BPJS sehingga data kepesertaannya dapat terharmonisasi menjadi satu. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, tingkat cakupan jaminan kesehatan DKI Jakarta dapat dilihat dari jumlah kepesertaan penduduk dalam program BPJS Kesehatan. Dari tabel di atas terlihat terjadi peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari 63,85% pada tahun 2018 menjadi 98% pada tahun 2019. Meskipun tidak cukup besar akan tetapi terjadi penurunan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2020 menjadi 96,55%.

Masalah Kesehatan Mental. Isu mengenai kesehatan mental ini diidentifikasi berdasarkan kekhawatiran stakeholder terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan anak akibat diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Minimnya data yang menunjukkan korelasi secara spesifik antara kebijakan PSBB, PJJ dan kekerasan menjadi kendala tersendiri dalam melakukan analisis.

Namun demikian, kasus kekerasan anak dapat direfleksikan secara nasional dari meningkatnya laporan kejadian kekerasan melalui Simofa PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Kementerian PPPA setidaknya mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi COVID-19. Berdasarkan Simofa PPA, per 1 Januari sampai 31 Juli 2020 terdapat 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan (Kamil & Galih, 2020). Kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia dari sistem pelaporan yang ada terdiri

dari tindakan 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 perdagangan orang, dan 346 penelantaran (lihat Gambar 6.10).

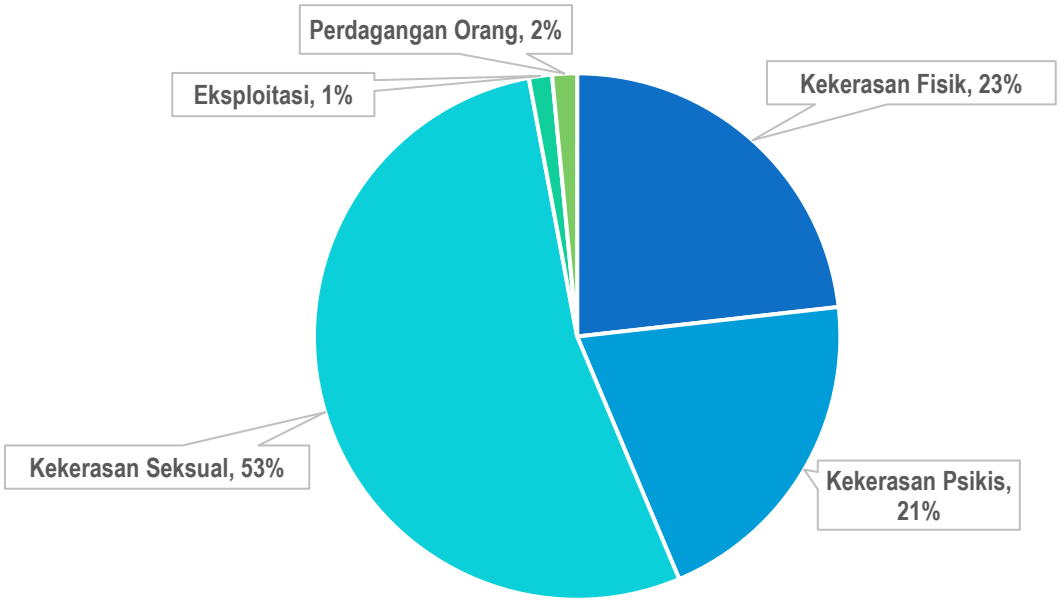

Gambar 6.10 Kasus Kekerasan Anak di Indonesia selama Pandemi COVID-19
Sumber: (Kamil & Galih, 2020)

Kekerasan pada anak sangat terkait dengan faktor kultural maupun faktor struktural di masyarakat. Dari faktor kultural, masih ada paradigma yang menyatakan bahwa anak merupakan milik orang tuanya sehingga bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan atau pandangan yang harus patuh pada orang tua menjadi alasan pembenaran atas semua tindakan kekerasan pada anak. Sementara, faktor struktural menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hubungan anak di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Kandedes, 2020). Faktor-faktor muncul biasanya akibat dari tekanan ekonomi dan hubungan keluarga yang sudah retak. Melihat realita tersebut, maka pembahasan isu kekerasan terhadap anak memiliki keterkaitan yang erat dengan TPB 3: Tanpa Kemiskinan dan TPB 8: Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Selain kekerasan terhadap anak, identifikasi isu kesehatan mental diperluas terhadap ranah kesehatan mental tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 dan kesehatan mental masyarakat secara umum akibat penerapan kebijakan PSBB. Secara psikologis, banyak tenaga medis yang merasa berat dan tertekan karena harus berada jauh dari keluarganya selama berbulan-bulan demi mengemban tugas menangani pasien COVID-19. Sementara itu, masyarakat umum yang terimbas kebijakan PSBB juga dikhawatirkan akan mengalami *cabin fever*. *Cabin fever* menggambarkan gangguan mental karena munculnya perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah atau tempat tertentu. Secara umum, informasi kesehatan mental terkait pandemi COVID-19 sangat sulit ditelusuri karena salah satunya belum ada sistem pencatatan dan pelaporan yang baku dari kasus-kasus yang ada di DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang tersedia, Dinas Kesehatan mencatat selama kurun waktu Januari hingga Juli 2020 terjadi fluktuasi kasus kunjungan ke layanan kesehatan akibat kesehatan mental. Kasus kunjungan tertinggi terjadi di bulan Maret dengan jumlah kunjungan sebanyak 21.786. Kemudian menurun secara drastis di bulan April menjadi 8.681 kasus dan secara berkala kasus kunjungan kesehatan mental meningkat hingga bulan Juli sebanyak 20.966. Namun demikian, laporan kasus kunjungan yang diilustrasikan dalam grafik di bawah ini belum dapat menunjukkan korelasi etiologi/penyebab terjadinya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan kebijakan PSBB.

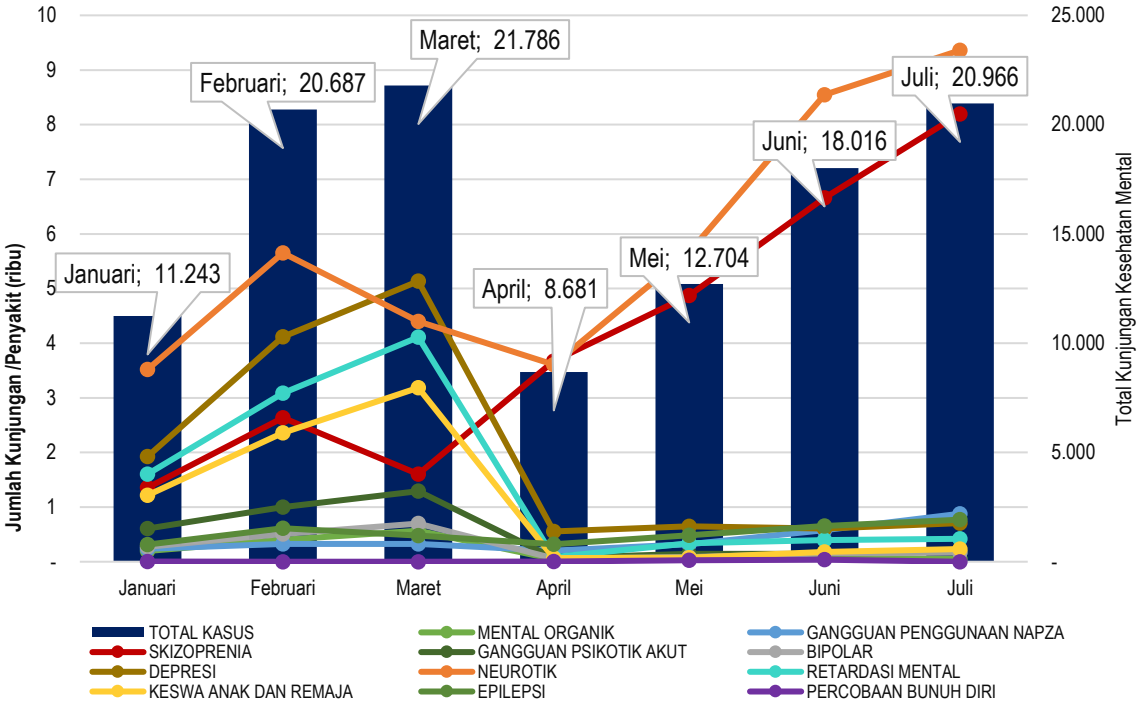

Gambar 6.11 Kasus Kunjungan ke Layanan Kesehatan karena Kesehatan Mental DKI Jakarta Tahun 2020
Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

6.1.2.2 TPB 8: Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penurunan Pertumbuhan Ekonomi. Gambaran pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2020 secara singkat telah disinggung dalam pembahasan TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera karena memiliki keterkaitan antar TPB. Seperti diilustrasikan pada Gambar 6.12, DKI Jakarta mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga -8,22% (BI, 2020). Kondisi keterpurukan perekonomian yang belum pernah dialami oleh DKI Jakarta selama beberapa dekade terakhir bahkan tingkat global sekalipun.

Gambar 6.12 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta per Quartal Tahun 2019-2020

Penurunan pertumbuhan ekonomi mutlak merupakan imbas dari pandemi COVID 19 dan penerapan kebijakan PSBB yang berlangsung sejak April 2020. Pelonggaran PSBB transisi yang dilakukan sejak Juni 2020 secara perlahan mulai memulihkan kondisi perekonomian meskipun sangat lambat. Laporan

Perkembangan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020 (BI, 2020), mencatat kinerja perekonomian DKI Jakarta pada quartal III 2020 diprakirakan secara triwulanan (qtq) tumbuh positif, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami kontraksi meskipun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari tumbuh positifnya indeks perekonomian untuk beberapa komponen.

Membaiknya Konsumsi RT secara triwulanan karena pemberlakuan PSBB transisi yang meningkatkan aktivitas ekonomi secara terbatas. Indeks Penghasilan Konsumen pada bulan Juli 2020 sebesar 54,9 meningkat dari bulan Juni 2020 sebesar 48,6. Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada bulan Juli 2020 sebesar 31,3, naik dari bulan Juni 2020 sebesar 26,3. Selain konsumsi RT, komponen Lapangan Usaha (LU) juga memberikan respon yang baik sejak pemberlakukan PSBB transisi. Perbaikan LU Perdagangan terlihat dari Indeks Konsumsi Barang-Barang Kebutuhan Tahan Lama pada bulan Juli 2020 yang meningkat menjadi 73,14, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya 70,81.

Banyaknya indeks komponen yang menunjukkan respon positif dipercayai sebagai langkah adaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Sayangnya, respon positif pada perekonomian tidak berbanding lurus dengan upaya pencegahan penyebaran pandemi. Pada saat yang sama, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat secara tajam sehingga berujung pada bertambahnya alokasi anggaran yang diarahkan untuk penanganan pasien COVID-19. Pemerintah memang dihadapkan pada pilihan yang sulit demi menjamin kesempatan keberlanjutan hidup masyarakatnya. Maka, yang dapat dilakukan adalah upaya adaptasi terhadap kondisi yang ada hingga terwujud program vaksinasi.

Tingkat Pengangguran. Berdasarkan Statistik Daerah (BPS, 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 mencapai 4,93% sementara pada tahun 2019 TPT mencapai 5,13%. Penduduk usia kerja pada Februari 2020 tercatat sebanyak 8.004,78 ribu jiwa dimana sebanyak 5.438,99 ribu jiwa masuk dalam angkatan kerja, sehingga tingkat partisipasi kerjanya sebesar 67,95 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan TPAK tahun sebelumnya sebesar 68,69 persen.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) di DKI Jakarta mencapai titik tertingginya sepanjang dekade terakhir. Pada Februari 2020, kesempatan kerja di kota metropolitan ini berhasil melewati angka 95 persen. Pertambahan penciptaan 2.747 lapangan kerja baru menjadi salah satu faktor pendorongnya, yang dalam periode sama tercatat sebanyak 5,17 juta orang. Peningkatan tingkat kesempatan kerja di DKI Jakarta pada tahun 2020 berimplikasi pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta dari sebesar 5,13 persen pada Februari 2019 menjadi 4,93 persen pada Februari 2020.

Angka TPT di atas belum dapat mencerminkan situasi *real-time* yang dialami DKI setelah pemberlakuan kebijakan PSBB karena penjelasan statistik pengangguran didasarkan pada periode Februari 2020. Oleh karena itu, data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Merujuk data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta per Mei 2020, terdapat 50.891 pekerja yang di-PHK oleh 6.785 perusahaan dengan alasan karena minimnya pendapatan perusahaan selama pandemi. Dan ada 32.882 perusahaan yang merumahkan karyawan sebanyak 272.333 orang (Manullang, James dkk., 2020). Masalah pengangguran memiliki keterkaitan dengan banyak sektor. Salah satunya berdampak besar pada lingkup terkecil komunitas, yakni keluarga. Keharmonisan keluarga bisa terganggu. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga berujung munculnya stres dan depresi.

Selain itu, menurut Manullang dkk. tenaga kerja pada sektor terdampak pandemi akan kehilangan pendapatan. Serta menurunkan tingkat konsumsi pada sektor lainnya. Jadi, menciptakan efek domino penurunan aktivitas pada sektor lain. Dampaknya, akan terjadi deindustrialisasi pada kelompok industri tertentu. Jika tidak ditangani dengan optimal, mengakibatkan krisis ekonomi. Serta, proses pemulihan

ekonomi jadi sulit dilakukan dan berlangsung lama. Beberapa upaya yang tengah dilakukan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengurangi dampak ini diantaranya meliputi kartu pra kerja, bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19, pemberian insentif kepada perusahaan secara fiskal, dan program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam.

6.1.2.3 TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Dalam diskusi tematik bersama stakeholder terkait, pembahasan TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak dilakukan dengan pendalaman dan klarifikasi kondisi eksisting yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Identifikasi isu-isu dalam TPB 6 ini berkaitan dengan empat hal sebagai berikut.

Gambar 6.13 Isu-isu yang disoroti dalam TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Gambaran kuantitas dan kualitas air di DKI Jakarta telah dibahas pada Sub Bab 4.1.1 Daya Dukung Air dan 4.2 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup termasuk didalamnya pembahasan mengenai timbulan sampah dan limbah infeksius.

Akses Sarana Prasarana Pendukung kegiatan PHBS. Salah satu sarana dan prasarana pendukung kegiatan PHBS dapat dilihat dari cakupan akses terhadap sumber air minum, air bersih, dan askes sanitasi. Akses sumber air minum yang dimanfaatkan oleh penduduk DKI Jakarta berasal dari jaringan perpipaan, pompa, air kemasan, sumur terlindungi, mata air terlindungi, air hujan dan lainnya dengan persentase sebagai berikut.

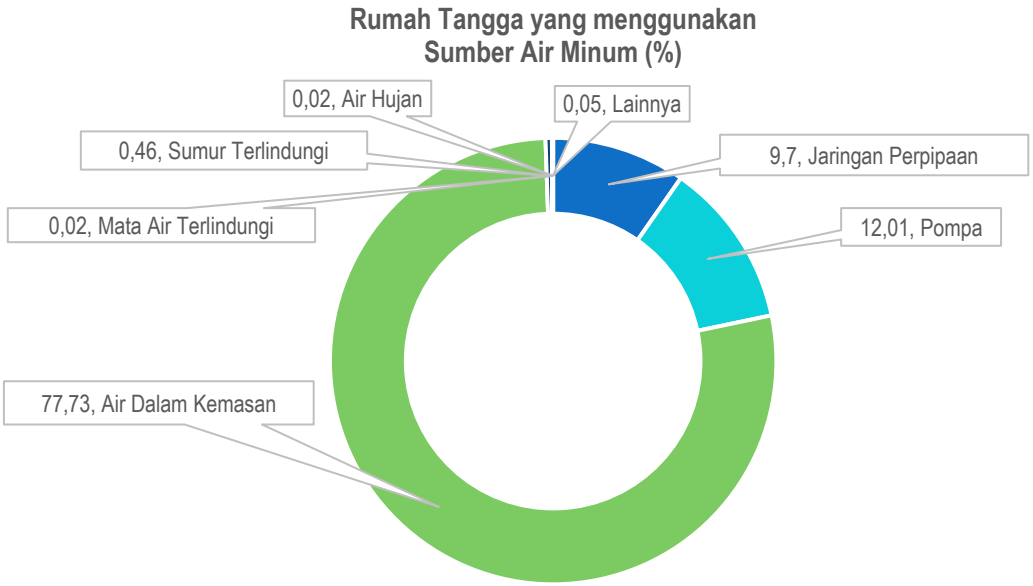

Gambar 6.14 Persentase Rumah Tangga DKI Jakarta yang Memanfaatkan Sumber Air Minum
Sumber: (BPS, 2020)**, tabel 4.3.2**

Kepulauan Seribu lebih banyak memanfaatkan air kemasan dan air hujan sebagai sumber air minum. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur memanfaatkan air kemasan dan pompa sebagai sumber utama air minum. Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara memanfaaatkan air kemasan dan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan data tahunan persentase rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap sumber air minum layak (air bersih) terjadi tren penurunan akses terhadap sumber air bersih seperti terlihat dari grafik berikut.

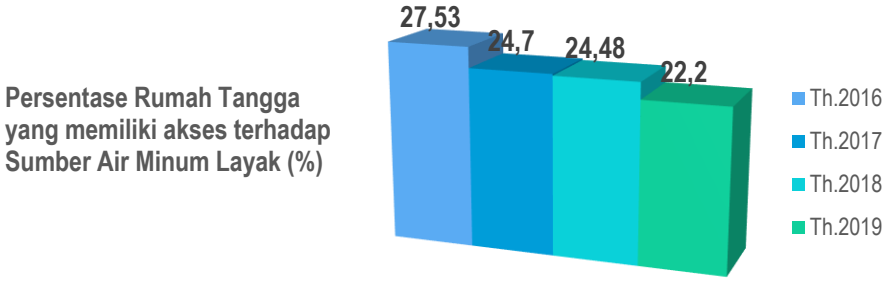

Gambar 6.15 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak (%)
Sumber: (BPS, 2020)

Belum dapat dipastikan latar belakang terjadinya penurunan persentase rumah tangga yang terakses pada sumber air minum layak. Beberapa kemungkinan yang dapat diidentifikasi yaitu meningkatnya penggunaan air tanah atau kualitas/kuantitas air yang didistribusikan melalui akses perpipaan belum memenuhi ekspektasi pengguna sehingga pengguna lebih memilih sumber lain seperti air kemasan.

Dari sisi sanitasi, 83,02% rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta sudah menggunakan fasilitas toilet pribadi. Pada dasarnya, sebagian besar penduduk DKI Jakarta sudah sadar terhadap kebutuhan toilet. Sayangnya, tidak semua pengelolaan buangan toilet tersebut memenuhi standar atau bahkan disalurkan langsung ke badan sungai sehingga masih ada potensi mencemari lingkungan hidup. Data statistik menunjukkan

persentase rumah tangga di DKI Jakarta yang telah memiliki akses sanitasi layak sudah mencapai 100% (BPS, 2020).

Penggunaan Air Tanah. Pada dasarnya, air tanah merupakan cadangan air yang peruntukkannya diprioritaskan dalam kondisi krisis air seperti kemarau panjang. Mempertimbangkan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara terus-menerus tanpa upaya *recharge*, tentu dapat memicu terjadinya penurunan muka tanah/amblesan. Data pemakaian air tanah selama bulan Oktober hingga Desember 2018 menunjukkan adanya ekstraksi air tanah sebesar 1.256.556 m^3 atau diasumsikan pemakaian per tahunnya adalah 5.026.224 m^3. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar tersebar di beberapa kecamatan yaitu Cilandak, Kebayoran Baru, Makasar, dan Tanah Abang (DLH, 2019).

Selain penggunaan air tanah secara berlebih, penurunan muka tanah (*land subsidence*) di DKI Jakarta juga dipengaruhi oleh faktor penurunan tanah secara alami (*natural subsidence*) dan beban bangunan. Dari sebuah hasil penelitian di tahun 2007 hingga 2011, tercatat daerah Pantai Mutiara mengalami penurunan hingga 40 cm. Di beberapa tempat lain, seperti Tanjung Priok dan daerah utara Jakarta lainnya tercatat penurunan tanah 1-15 cm per tahunnya. Penurunan tanah terbesar yang pernah tercatat adalah di kawasan Cengkareng dan Kalideres (Barat Laut Jakarta), dan kawasan Kemayoran-Sunter, di Timur Laut Jakarta (Hutagalung, 2016).

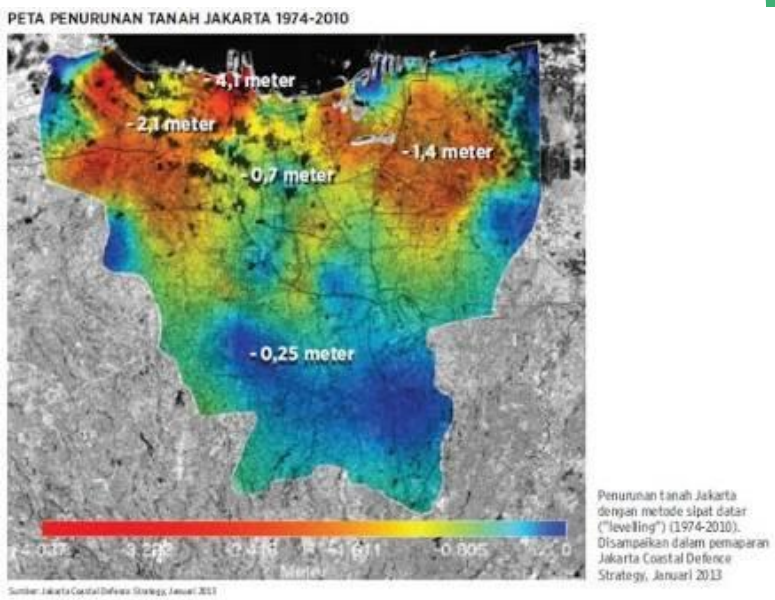

Gambar 6.16 Peta Penurunan Tanah Jakarta 1974-2010
Sumber: (Hutagalung, 2016)

Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi air tanah salah satunya untuk mengurangi potensi terjadinya bencana *land subsidence* dalam skala besar. Pada akhirnya, hal tersebut dapat berimbas pada investasi ekonomi terutama terkait dengan investasi lahan terbangun komersial. Risiko investasi akan semakin tinggi jika kondisi lingkungannya tidak dapat mendukung keberlanjutan investasi tersebut dalam jangka panjang.

Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah. Saat ini, cakupan wilayah (*coverage ratio*) *Sewerage Sytem* Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat existing di DKI Jakarta hanya meliputi 4% (Japan International Cooperation Agency, 2012) dari keseluruhan wilayah (DLH, 2019). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 mengatur tentang rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pembangunan ini dibagi dalam tiga periode yaitu, tahap 1 (2015-2022), dan tahap 2 (2022 – 2030), dengan pembagian zona pelayanan pengolahan *off – site* sebanyak 15 zona.

Sejak tahun 2013 Percepatan Pengembangan Pengolahan Sistem Air Limbah Terpusat di DKI Jakarta menjadi prioritas, dengan target pencapaian 75% cakupan wilayah pelayanan air limbah pada tahun 2022. Namun, hingga tahun 2019 Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat DKI Jakarta masih dalam tahap persiapan. Melihat target capaiannya yang begitu besar serta dicapai pada tahun 2022, menjadikan isu ini strategis untuk menjadi perhatian. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah tentu diharapkan dapat memperbaiki kondisi lingkungan dari cemaran terutama badan air/sumberdaya air. Lebih dari itu,

pengelolaan badan air/sumberdaya air yang dilakukan secara terpadu memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencapaian pada TPB 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14: Ekosistem Lautan dan TPB 15: Ekosistem Daratan. Oleh karena itu, perumusan rekomendasi kebijakan dan program hendaknya mempertimbangkan hubungan keterkaitan dengan TPB lain.

6.1.2.4 TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas

Perhatian pencapaian TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas ini difokuskan pada tiga isu berikut ini:

- Rendahnya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Rendahnya kualitas kompetensi guru sesuai standar
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Partisipasi PAUD. Pada tahun 2019, capaian indikator APK PAUD menunjukkan gap yang terlalu besar antara target dan capaian, yaitu mencapai -69,28% (SDGs DKI Jakarta, 2020). Dimana, capaian pada tahun 2019 adalah 20,35%, sementara target yang ditetapkan adalah 89,63%. Berdasarkan laporan Kemendikbud pada bulan Maret 2020, penduduk usia 3-6 tahun di DKI Jakarta mencapai 749.100 anak dengan capaian APK PAUD 20,55% pada periode 2019/2020 (Kemendikbud, 2020).

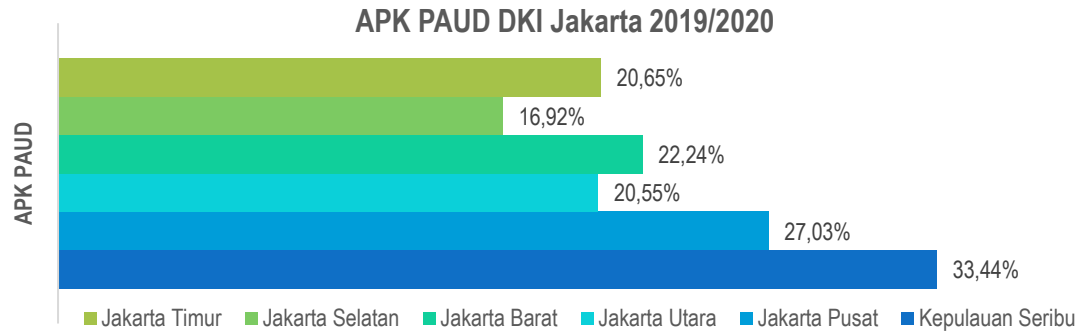

Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun	Jumlah Siswa PAUD	APK PAUD (Kemendikbud)
Kepulauan Seribu	2.835	948	33,44%
Jakarta Pusat	55.068	14.885	27,03%
Jakarta Utara	128.228	26.355	20,55%
Jakarta Barat	156.712	34.859	22,24%
Jakarta Selatan	186.997	31.641	16,92%
Jakarta Timur	219.260	45.285	20,65%
DKI Jakarta	**749.100**	**153.973**	**20,55%**

Gambar 6.17 APK PAUD DKI Jakarta Periode 2019/2020
Sumber: (Kemendikbud, 2020)

Angka pencapaian DKI Jakarta termasuk rendah dibandingkan pencapaian provinsi lain (terkecuali jika dibandingkan dengan pencapaian APK PAUD Provinsi Papua yaitu 16,49%). Upaya peningkatan partisipasi pendidikan dini dapat ditempuh melalui kebijakan pembangunan PAUD di dekat titik pusat kegiatan masyarakat, seperti di perkantoran dan pasar.

Kompetensi Guru. Berdasarkan Laporan Pencapaian TPB tahun 2019 menyebutkan bahwa persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SMLB yang bersertifikat pendidik hanya mencapai 49,94%. Sementara itu, target yang diharapkan adalah 98,86% guru melakukan sertifikasi sebagai pendidik (SDGs DKI Jakarta, 2020). Terdapat gap yang cukup besar untuk mencapai target yang diharapkan yaitu -48,92%. Sedangkan,

data nasional menyatakan rata-rata guru yang melakukan Uji Kompetensi Guru (UKG) sesuai tingkatan sekolah yang diampu adalah 62,58%. Angka tersebut didapatkan dari rata-rata guru yang melakukan UKG di tingkat SD, SMP, SMA, SMK, Pedagogik, dan Profesional sebagai berikut.

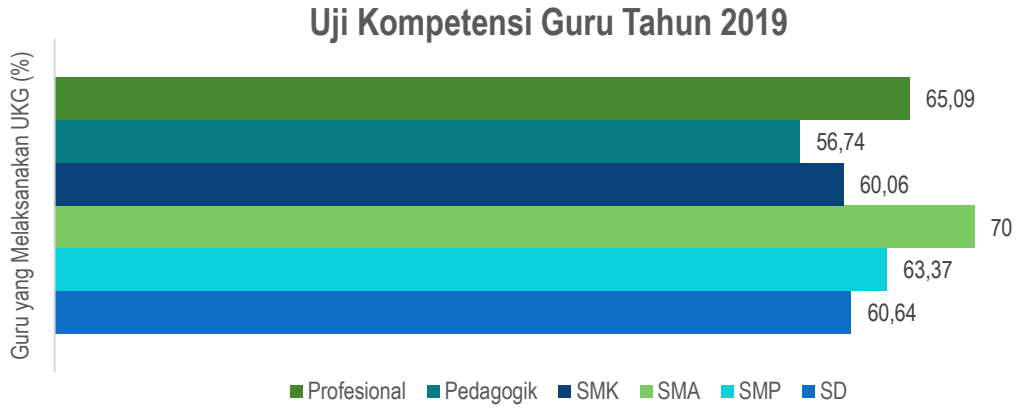

Gambar 6.18 Data Uji Kompetensi Guru Tahun 2019
Sumber: (Kemendikbud, 2019)

Sarana dan Prasarana Pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, salah satunya sekolah yang memenuhi standar akreditasi A menjadi hal yang perlu perhatian karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA). Secara umum, pada tahun 2018 capaian sekolah yang sudah terakreditasi A di DKI Jakarta mencapai 62,19%. Sementara, target yang diharapkan pada tahun 2019 adalah sekolah yang terakreditasi A harus meningkat hingga 77,52%. Berdasarkan kondisi tersebut, diperkirakan terdapat gap capaian sebesar -15,33% untuk mencapai target yang diharapkan sehingga membutuhkan upaya tambahan dalam proses pencapaiannya.

6.1.2.5 TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Berdasarkan laporan pencapaian TPB tahun 2019, diketahui hanya terdapat empat indikator capaian TPB 1 yang masih memerlukan perhatian, bahkan gap capaian tiap indikatornya tidak terlalu besar. Dalam artian, ketercapaian untuk TPB 1 Tanpa Kemiskinan pada dasarnya sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Hal tersebut didukung dengan histori tren persentase penduduk miskin dari tahun 2012-2019. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan jika dilihat dari sisi kenaikan pendapatan per kapita.

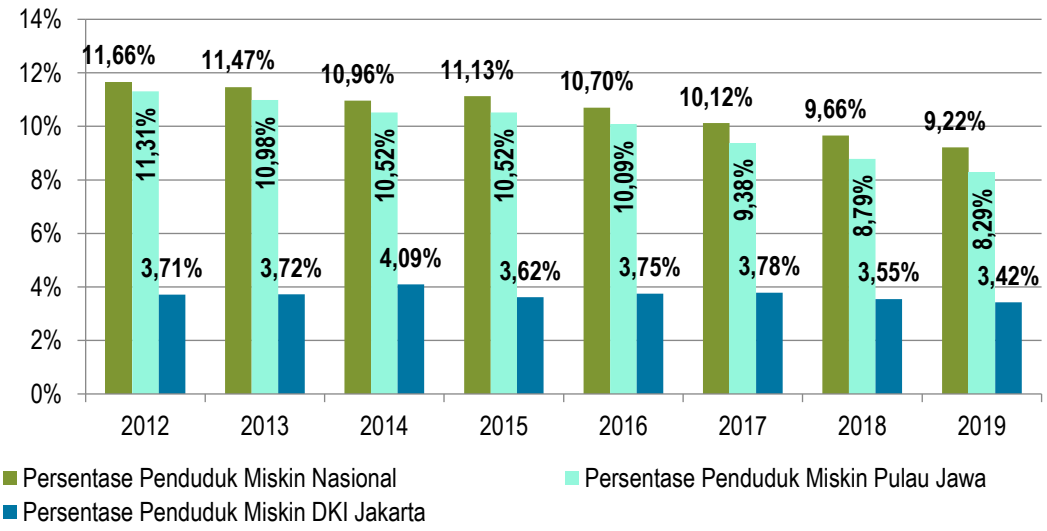

Gambar 6.19 Persentase Penduduk Miskin tingkat Provinsi, Pulau dan Nasional Tahun 2012-2019

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa sebenarnya jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta hampir mencapai sepertiga dari jumlah penduduk miskin nasional. Jumlah persentase yang cukup besar untuk ditangani secara mandiri tanpa intervensi pemerintah pusat. Pada akhirnya, peningkatan capaian target TPB 1 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan persentase penduduk miskin di tingkat provinsi sekaligus nasional.

Isu mengenai kemiskinan di DKI Jakarta kembali muncul selama diskusi dengan stakeholder. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pandemi COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial yang memberikan dampak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Banyak terjadi pengangguran seiring dengan anjloknya pertumbuhan ekonomi selama pandemi baik di tingkat nasional dan provinsi. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi turun drastis dari kisaran 5% menjadi 2,96%, sementara DKI Jakarta pada kuartal I mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,96% menjadi 5,06% (CNN Indonesia, 2020).

Diketahui hingga Maret 2020, penduduk miskin DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang menjadi 480,86 ribu orang. Penambahan penduduk miskin pada periode ini disebabkan karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang jasa dan kehilangan sumber pendapatan. Selama enam bulan terakhir, harga barang dan jasa naik 3,58% terutama harga bahan makanan, sebaliknya, pengeluaran rumah tangga pada kelompok 40% ke bawah menurun (Bappeda, 2020).

Hal tersebut diperparah dengan menurunnya pendapatan kepala keluarga akibat pemutusan kerja sebagai bagian dari efek domino penerapan kebijakan pembatasan sosial. Pada kuartal I tahun 2020, baik indeks keparahan kemiskinan dan gini ratio mengalami peningkatan sekitar dibawah 0,07% yang mencerminkan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin memburuk dan tingkat ketimpangan sosial semakin meningkat.

Kondisi tersebut diperkirakan semakin memburuk seiring diperpanjangnya penerapan kebijakan pembatasan sosial yang berlaku di Jakarta dan sekitarnya. Tidak mengherankan angka kemiskinan meningkat tajam bukan hanya di Provinsi DKI Jakarta tapi juga terjadi di kota-kota satelitnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Jabodetabek bekerja sebagai buruh atau pekerja tidak tetap. Sementara, banyak sektor yang mengalami tekanan hebat sehingga sulit melakukan ekspansi dan bertahan pada masa pandemi ini sehingga diharuskan melakukan efisiensi pekerja. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bersama bahwa pencapaian TPB 1 Tanpa Kemiskinan memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian pada TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Besaran dampak yang luas dan saling terkait inilah yang

menjadi dasar pemilihan TPB 1 menjadi salah satu isu yang perlu pemulihan segera setidaknya dalam dua tahun terakhir masa RPJMD 2017-2022.

Lebih lanjut kondisi masyarakat miskin di DKI Jakarta berkaitan erat dengan permasalahan pemukiman kumuh yang masih cukup tinggi ditengah metropolisnya kota Jakarta. Berdasarkan capaian pada indikator 1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan, pada tahun 2019 masih mencapai 14,4% dari target RAD sebesar 12,14%.

6.1.2.6 TPB 2: Tanpa Kelaparan

Isu mengenai ancaman kelaparan ini (TPB 2) sangat berkaitan dengan bertambahnya tingkat kemiskinan (TPB 1) dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8). Hubungan keterkaitan ketiga TPB saling berbanding terbalik antara TPB 8 dengan TPB 1 dan TPB 2 dapat dilihat dari hubungan sebab-akibat seperti diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar 6.20 Hubungan Keterkaitan TPB 8, TPB 1 dan TPB 2
Sumber: Ilustrasi, 2020

Dari ilustrasi di atas, dapat dicermati bahwa TPB 2 merupakan akibat langsung dari TPB 1 dan akibat tak langsung dari TPB 8. Kondisi perekonomian yang menurun berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan, yang kemudian secara beruntun menyebabkan semakin meningkatnya ancaman kelaparan. Maka, menjadi sangat strategis apabila usulan rekomendasi pada TPB 8 dapat dirumuskan sekaligus untuk menyasar TPB terkait lain salah satunya untuk menanggulangi isu kelaparan.

Hasil identifikasi awal isu strategis menunjukkan bahwa hanya ada satu indikator -dari total 10 indikator TPB2- yang memerlukan perhatian karena belum terpenuhinya target capaian, yaitu indikator persentase bayi yang mendapatkan ASI dengan gap -4,78%. Secara tidak langsung, hal ini telah mengindikasikan bahwa upaya pemerintah provinsi dalam mengurangi angka kelaparan dapat dikatakan berhasil. Seperti tercermin dari berkurangnya angka prevalensi ***stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun yang diukur oleh Riskesdas pada tahun 2018 yang menunjukkan angka 17,7% dan berdasarkan perhitungan Dinas Kesehatan di tahun 2019 telah mencapai 11%. Pencapaian tersebut tercatat mengalami perbaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang berada pada angka 27,5% (SDGs DKI Jakarta, 2020).

Mengingat historinya, masih terdapat ratusan kasus stunting di DKI Jakarta bahkan sejak tahun 2015 yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2016. Tren jumlah kasus *stunting* balita di DKI Jakarta ditampilkan dalam grafik sebagai berikut.

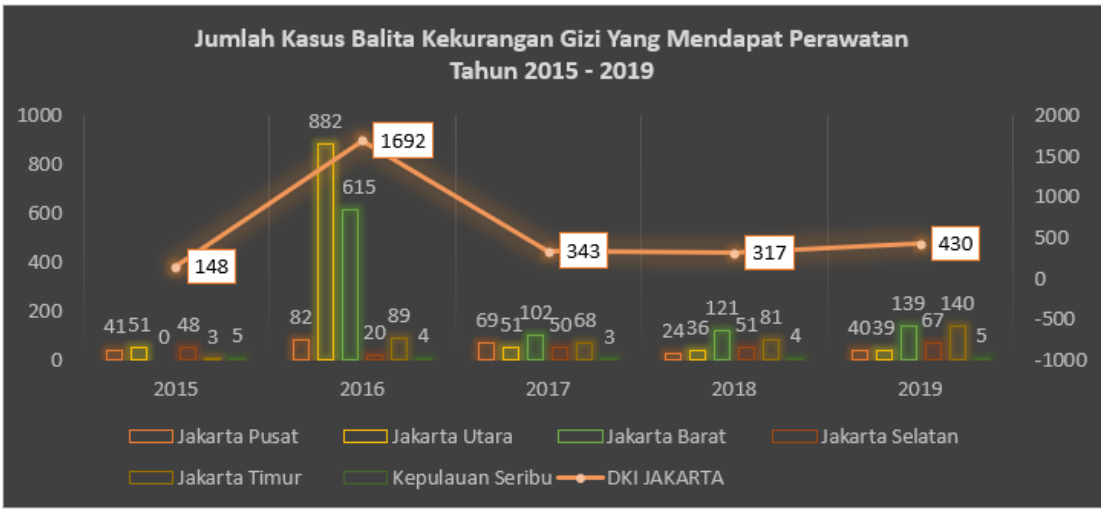

Gambar 6.21 Tren Kasus Balita Kekurangan Gizi yang Mendapat Perawatan Tahun 2015-2019
Sumber: (Nisa, 2020)

Khoirun Nisa (2020) dalam statistik Jakarta menyebutkan bahwa kasus balita kekurangan gizi tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan total 1.692 anak, dengan kasus paling banyak di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Sementara pada tahun 2019 terdapat 430 balita kekurangan gizi yang mendapat perawatan. Jumlah terbesar kasus balita kekurangan gizi yang mendapat perawatan di tahun 2019 yaitu pada wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Mencermati sebaran kasus balita kurang gizi (BB/U), balita pendek (TB/U) dan balita kurus (BB/TB) yang terjadi pada tahun 2018, memperlihatkan bahwa Kepulauan Seribu menjadi wilayah paling banyak ditemukan balita dengan kasus *stunting* (lihat Gambar 6.22). Dari hasil penimbangan balita yang dilaporkan Puskesmas dan Posyandu tiap wilayah tercatat bahwa kasus balita pendek yang paling mendominasi yaitu 12,8% dari total balita yang ditimbang di Kepulauan Seribu.

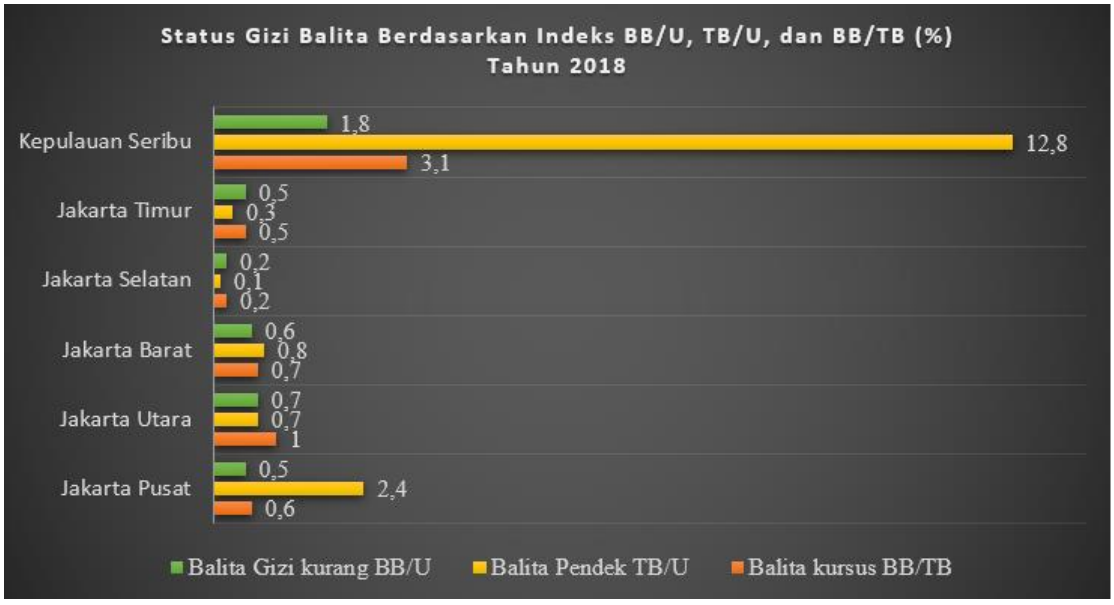

Gambar 6.22 Status Gizi Balita berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB
Sumber: (Nisa, 2020)

Selain kasus *stunting* pada balita, dalam forum diskusi para pemangku kepentingan pun menyoroti potensi Jakarta menjadi sangat rentan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa tingkat ketahanan pangan di DKI Jakarta relatif rendah sehingga perlu kebijakan yang dapat

mempertahankan produksi pangan secara lokal dan/atau *supply* dari wilayah lain. Isu mengenai ketahanan pangan DKI Jakarta erat kaitannya dengan gambaran kondisi lingkungan status daya dukung pangan.

Dalam sub bab 4.1.2 Daya Dukung Pangan telah diidentifikasi kemampuan DKI Jakarta untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal. Kemampuan kebutuhan pangan tersebut dipandang dari dua sisi yang berbeda yaitu kebutuhan terhadap pemenuhan kalori masyarakat dan pemanfaatan lahan tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian dalam rangka menyediakan pasokan beras. Analisis kuantitatif terhadap kedua sudut pandang ini memberikan hasil yang berbeda.

Jika dipandang dari ketersediaan dan kebutuhan kalori, daya dukung pangan untuk DKI Jakarta masih diindikasikan aman atau belum melampaui ketersediaan kalori yang ada di dalam wilayah provinsi. Namun demikian, analisis daya dukung pangan berdasarkan kalori belum dapat mencerminkan kebutuhan pangan penduduk DKI Jakarta secara utuh. Hal ini terkait standar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang tidak hanya dipenuhi dari unsur kalori saja. Hingga saat ini, belum ditemukan pendekatan yang dapat menghitung perbandingan ketersediaan dan kebutuhan pangan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kebutuhan standar gizi, transfer pangan dari wilayah lain, dan perhitungan ketersediaan pangan berdasarkan standar gizi.

Pada dasarnya, kebutuhan pangan tidak dapat hanya dilihat berdasarkan modeling matematis. Banyak faktor yang menyebabkan isu pangan menjadi strategis dan politis. Oleh karena itu, penting melakukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengayaan isu pemenuhan pangan di DKI Jakarta. Hal tersebut dapat menjadi penyeimbang dalam merumuskan arah kebijakan yang diharapkan dapat menjawab kekhawatiran para pemangku kepentingan.

Untuk memberikan pandangan yang seimbang, kemampuan wilayah untuk memenuhi pangan secara berkelanjutan juga dianalisis berdasarkan daya dukung lahan untuk pangan. Hasil analisis daya dukung lahan untuk pangan yang dinarasikan pada sub bab 4.1.2 mengindikasikan bahwa baik dari arah kebijakan pembangunan dan ketersediaan lahan pangan DKI Jakarta tidak mampu untuk mendukung kebutuhan pangan secara lokal, atau dapat dikatakan daya dukung lahan untuk pangan sudah terlampaui. DKI Jakarta memfokuskan pemanfaatan lahannya untuk pemenuhan kebutuhan tersier seperti jasa, perdagangan, dan lainnya.

6.2 Analisis Gap dan/atau Kesenjangan dari Kebijakan dan Strategi pada RPJMD 2017 - 2022 terhadap Pencapaian TPB

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dilakukan untuk memastikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

Seperti dijelaskan pada sub bagian latar belakang laporan KLHS ini, perubahan RPJMD Provinsi DKI dilakukan karena adanya:

1) Pandemi COVID-19 yang ditetapkan melalui **Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020,** serta Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj Nomor 177/Kmk.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
2) **Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan**, penyelenggaraan pembangunan tahunan diamanatkan untuk **direalokasikan** kepada **penanganan dan pemulihan dampak COVID-19**. Hal ini mempengaruhi rencana pencapaian target pembangunan menjadi

tertunda atau tidak terlaksana, sehingga target-target dalam RPJMD yang sebelumnya telah ditetapkan pada asumsi dan kondisi normal akan sulit tercapai dan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;

3) Perubahan kebijakan nasional berupa **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019** Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4) Amanat pengendalian dan evaluasi rencana dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta
5) Rekomendasi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017-2022 oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta pada rapat paripurna Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2020. Telah direkomendasikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap asumsi, rencana, sasaran pembangunan dan pencapaian target dari RPJMD 2017-2022 akibat terjadinya COVID-19.

Proses pelaksanaan perubahan PERDA Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI 2017-2022 dilakukan secara paralel dengan pembuatan KLHS untuk Perubahan RPJMD tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD Provinsi DKI 2017-2022 bulan Juni 2020, Matriks Risiko di bawah ini menggambarkan potensi ketercapaian indikator sasaran RPJMD 2017-2022. Walaupun analisisnya masih sementara, hasil yang didapatkan untuk indikator sasaran kategori sulit tercapai menunjukan kesamaan dengan hasil konsultasi publik 1 KLHS Perubahan RPJMD yang telah diuraikan pada sub bab 6.1.2 di atas.

MATRIKS RESIKO KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD 2017-2022*

PENGARUH EKSTERNAL	KETERGANTUNGAN TERHADAP ANGGARAN					
		SANGAT TINGGI	TINGGI	MODERAT	RENDAH	SANGAT RENDAH
	SANGAT NEGATIF	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Titik Genangan Banjir, Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (land subsidence), Jumlah Wisatawan		
	NEGATIF	Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan, Public Transportation Modal Share, Cakupan Pelayanan Air Bersih, Cakupan Pelayanan Air Limbah, Penambahan Rasio RTH	Indeks Potensi Kerawanan Sosial, Prevalensi Kekerasan Perempuan dan Anak, Indeks Ketahanan Pangan, Jumlah Titik Macet, Jumlah kawasan Pemukiman Kumuh	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Realisasi Nilai Investasi	Indeks Demokrasi
	NETRAL	Jumlah Backlog Hunian	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah, Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan, Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Total Fertility Rate	Indeks profesionalitas ASN, Indeks e-GOV, Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah, Jumlah Inovasi yang Layak Diikutsertakan dalam Lomba Berskala Nasional	Nilai / Predikat AKIP, Skor EKPPD, Opini Laporan Keuangan Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi
	POSITIF		Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif, Jumlah Cagar Budaya yang Dikonservasi	Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai dengan Rencana	Indeks Kepuasan Masyarakat	
	SANGAT POSITIF					

SULIT TERCAPAI
BUTUH PERHATIAN
POTENSI TERCAPAI
*analisis sementara

Gambar 6.23. Matriks Resiko Ketercapaian Indikator Sasaran RPJMD 2017-2022
Sumber : (Bappeda, 2020)

Indikator sasaran yang sulit tercapai (ditunjukan pada warna coklat) pada matriks di atas, telah termasuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) prioritas yang menjadi basis dalam pembahasan KLHS Perubahan RPJDM DKI lebih lanjut seperti diringkaskan pada tabulasi di bawah ini.

Tabel 6.9. Relevansi Indikator Sasaran RPJMD dengan TPB

Indikator Sasaran Katergori Sulit Dicapai	TPB Yang Relevan	
1. Tingkat Kemiskinan	**TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4,** TPB 5, **TPB 6**, TPB 10, TPB 11, TPB 13, TPB 16, TPB 17	11 TPB relevan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	**TPB 1, TPB 3, TPB 4,** TPB 5, **TPB 8,** TPB 9, TPB 10, TPB 11, TPB 12, TPB 14, TPB 16, TPB 17	12 TPB relevan
3. Jumlah Titik Genangan Banjir	**TPB 1, TPB 6,** TPB 11, TPB 13, TPB 15, TPB 16, TPB 17	7 TPB relevan
4. Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	**TPB 6,** TPB 11, TPB 12, TPB 16, TPB 17	5 TPB relevan
5. Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)	**TPB 6**, TPB 11, TPB 13, TPB 15, TPB 16, TPB 17	6 TPB relevan
6. Jumlah Wisatawan	**TPB 8**, TPB 9, TPB 11, TPB 16, TPB 17	5 TPB relevan
7. Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan	**TPB 8**, TPB 9, TPB 14, TPB 16, TPB 17	5 TPB relevan
8. Public Transportation Modal Share	TPB 9, TPB 11, TPB 12, TPB 16, TPB 17	5 TPB relevan
9. Cakupan Pelayanan Air Bersih	**TPB 1, TPB 3, TPB 6**, TPB 11, TPB 15, TPB 16, TPB 17	7 TPB relevan
10. Cakupan Pelayanan Air Limbah	**TPB 1, TPB 3, TPB 6**, TPB 11, TPB 15, TPB 16, TPB 17	7 TPB relevan
11. Penambahan Rasio RTH	**TPB 6,** TPB 11, TPB 12, TPB 15, TPB 16, TPB 17	6 TPB relevan
12. Indeks Potensi Kerawanan Sosial	**TPB 1, TPB 4**, TPB 5, TPB 10, TPB 11, TPB 16, TPB 17	7 TPB relevan
13. Prevalensi Kekerasan Perempuan dan Anak	**TPB 1, TPB 4,** TPB 5, TPB 10, TPB 11, TPB 16, TPB 17	7 TPB relevan
14. Indeks Ketahanan Pangan	**TPB 1, TPB 2, TPB 8**, TPB 11, TPB 13, TPB 14, TPB 16, TPB 17	8 TPB relevan
15. Jumlah Titik Macet	TPB 9, TPB 11, TPB 16, TPB 17	4 TPB relevan
16. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	**TPB 1, TPB 3, TPB 6,** TPB 10, TPB 11, TPB 16, TPB 17	7 TPB relevan
17. Jumlah Backlog Hunian	**TPB 1, TPB 3,** TPB 11, TPB 16, TPB 17	5 TPB relevan

Indikator Sasaran RPJMD Kategori Butuh Perhatian	TPB Yang Relevan	
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**TPB 6**, TPB 9, TPB 11, TPB 12, TPB 14, TPB 15, TPB 16, TPB 17	8 TPB relevan
2. Realisasi Nilai Investasi	**TPB 8**, TPB9, TPB 16, TPB 17	4 TPB relevan
3. Indeks Demokrasi	TPB 5, TPB 10, TPB 16, TPB 17	4 TPB relevan
4. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	**TPB 1**, TPB 11, TPB 16, TPB 17	4 TPB relevan
5. Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan	**TPB 7**. TPB 9, TPB 11, TPB 12, TPB 16, TPB 17	6 TPB relevan
6. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standar	TPB 16, TPB 17	2 TPB relevan
7. Indeks Pembangunan Manusia	**TPB1, TPB3, TPB 4**, TPB 5, TPB 9, TPB 11, TPB 16, TPB 17	8 TPB relevan
8. Indeks Pembangunan Gender	**TPB1, TPB3, TPB 4,** TPB 5, TPB 9, TPB 11, TPB 16, TPB 17	8 TPB relevan
9. Total Fertility Rate	**TPB 3**, TPB 16, TPB 17	3 TPB relevan
10. Indeks Profesionalitas ASN	TPB 16, TPB 17	2 TPB relevan
11. Indeks e-Gov	TPB 16, TPB 9, TPB 11, TPB 17	4 TPB relevan
12. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam	TPB 16, TPB 9, TPB 11, TPB 17	4 TPB relevan
13. Jumlah Inovasi yang Layak Diikutsertakan dalam Lomba Skala	**TPB 4, TPB 8**, TPB 9, TPB 11, TPB 12, TPB 16, TPB 17	7TPB relevan
14. Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif	**TPB 8**, TPB 11, TPB 16, TPB 17	4 TPB relevan
15. Jumlah Cagar Budaya yang dikonversi	**TPB 8**, TPB 11, TPB 16, TPB 17	4 TPB relevan
16. Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Rencana	TPB 10, TPB 11, TPB 15, TPB 16, TPB 17	5 TPB relevan

Rincian analisis indikator sasaran terhadap relevansi TPB dijelaskan pada Lampiran 6.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa TPB Prioritas yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan pada konsultasi publik KLHS Perubahan RPJMD untuk penentuan TPB Prioritas pada tanggal 4 Agustus 2020, telah menjadi bagian dominan pada beberapa indikator sasaran RPJMD pada kategori yang sulit dicapai. Hal ini menegaskan TPB yang perlu diprioritaskan pada Perubahan RPJMD telah sesuai dengan evaluasi paruh waktu RPJMD 2017-2022.

Berdasarkan TPB Prioritas, TPB 1 Tanpa Kemiskinan, terdapat 10 indikator sasaran yang sulit dicapai dan 3 indikator sasaran yang perlu perhatian. Untuk TPB 2 Tanpa Kelaparan yang mempunyai relevansi terhadap indikator sasaran RPJMD pada kategori sulit yaitu Tingkat Kemiskinan dan Indeks Ketahanan Pangan. TPB 3, KehidupanSehat Sejahtera, terdapat 6 indikator sasaran yang sulit dicapai dan 3 indikator sasaran yang perlu perhatian. TPB 4, Pendidikan Yang Berkualitas terdapat 4 indikator sasaran yang sulit dicapai dan 2 indikator sasaran yang perlu perhatian. TPB 6, Air Bersih dan Sanitasi Yang Layak terdapat 8 indikator sasaran yang sulit dicapai dan 1 indikator sasaran yang perlu perhatian . TPB 8, Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi terdapat 4 indikator sasaran yang sulit dicapai dan 4 indikator sasaran yang perlu perhatian. Secara ringkas dapat diliat pada tabulasi di bawah ini.

Tabel 6.10. Hasil Evaluasi Paruh Waktu terhadap TPB Prioritas

TPB Prioritas	Hasil Evaluasi Paruh Waktu Indikator Sasaran RPJMD	
	Sulit Dicapai	Perlu Perhatian
TPB 1, Tanpa Kemiskinan,	1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Jumlah Titik Genangan Banjir 9. Cakupan Pelayanan Air Bersih 10. Cakupan Pelayanan Air Limbah 12. Indeks Potensi Kerawanan Sosial 13. Prevalensi Kekerasan Perempuan dan Anak 14. Indeks Ketahanan Pangan 16. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 17. Jumlah Backlog Hunian	4. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah 7. Indeks Pembangunan Manusia 8. Indeks Pembangunan Gender
TPB 2, Tanpa Kelaparan	1. Tingkat Kemiskinan 14. Indeks Ketahanan Pangan	tidak ada
TPB 3, Kehidupan Sehat Sejahtera	1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 9. Cakupan Pelayanan Air Bersih 10. Cakupan Pelayanan Air Limbah 16. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 17. Jumlah Backlog Hunian	7. Indeks Pembangunan Manusia 8. Indeks Pembangunan Gender 9. Total Fertility Rate
TPB 4, Pendidikan Yang Berkualitas	1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 12. Indeks Potensi Kerawanan Sosial 13. Prevalensi Kekerasan Perempuan dan Anak	7. Indeks Pembangunan Manusia 8. Indeks Pembangunan Gender
TPB 6, Air Bersih dan Sanitasi Yang Layak	1. Tingkat Kemiskinan 3. Jumlah Titik Genangan Banjir 4. Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota 5. Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence) 9. Cakupan Pelayanan Air Bersih 10. Cakupan Pelayanan Air Limbah 11. Penambahan Rasio RTH 16. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

TPB Prioritas	Hasil Evaluasi Paruh Waktu Indikator Sasaran RPJMD	
	Sulit Dicapai	**Perlu Perhatian**
TPB 8, Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	2. Tingkat Pengangguran Terbuka 6. Jumlah Wisatawan 7. Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan 14. Indeks Ketahanan Pangan	2. Realisasi Nilai Investasi 13. Jumlah Inovasi yang Layak Diikutsertakan dalam Lomba Skala Nasional 14. Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif 15. Jumlah Cagar Budaya yang dikonversi

Untuk menjawab ketercapaian indikator sasaran tersebut, KLHS Perubahan RPJMD melakukan analisisnya sebagaimana digambarkan pada kerangka pikir di bawah ini.

Gambar 6.24. Kerangka Pikir KLHS Perubahan RPJMD

Visi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yang ingin mencapai "Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadlian dan kesejateraan bagi semua" dituangkan dalam kerangka kebijakan yang berupa misi, tujuan & sasaran serta strategi & arah kebijakan. Berdasarkan analisis TPB prioritas, daya dukung daya tampung lingkungan hidup serta perencanaan strategis lainnya dihasilkan *arahan kebijakan dan arahan program* yang dikonsultasipublikan pada para pemangku kepentingan. Lebih lanjut akan diuraikan alternatif skenario pada bab 7 dan arahan kebijakan pada bab 8.

BAB 7

BAB 7 SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS DI PROVINSI DKI JAKARTA

Proses perumusan skenario pencapaian TPB prioritas dilakukan melalui skema sebagaimana gambar di bawah ini. Skenario dianalisis berdasarkan *outcome* dari masing-masing TPB prioritas yang sudah mempertimbangkan keterkaitan dengan TPB lainnya sehingga menghasilkan arahan kebijakan yang sesuai.

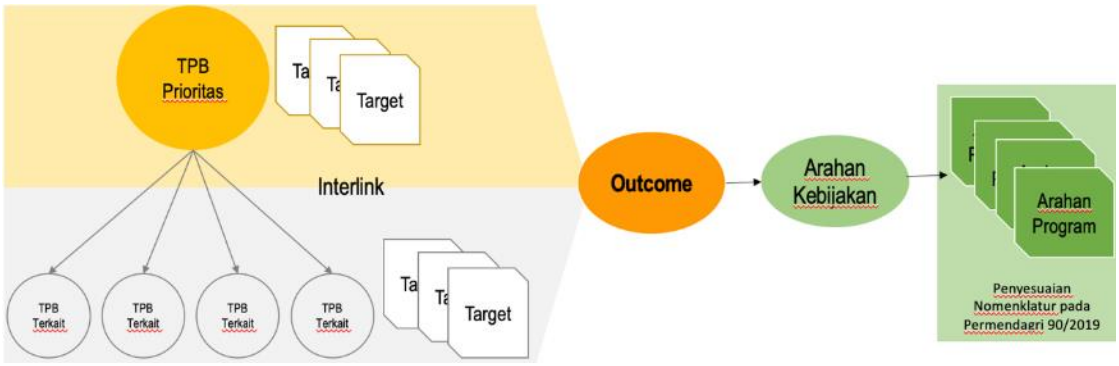

Gambar 7.1. Skema Proses Perumusan Alternatif Skenario
Sumber: Ilustrasi, 2020

Outcome dan kebijakan dirumuskan berdasarkan analisis proyeksi yang dilakukan untuk masing-masing capaian indikator TPB dan proyeksi apabila terdapat upaya tambahan untuk mencapai target. Arahan kebijakan menjadi koridor dalam merumuskan program-program terkait. Namun, arahan program akan secara lebih rinci dijabarkan dalam bab rekomendasi.

Skenario pencapaian membahas tentang bagaimana keterkaitan TPB Prioritas dengan TPB lainnya, skenario daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, skenario dengan upaya tambahan untuk masing-masing TPB Prioritas, dan skenario sumber pembiayaan.

7.1 Keterkaitan Antar TPB Prioritas dengan TPB lainnya

6 (enam) TPB prioritas tidaklah berdiri sendiri. Keterkaitan antara TPB secara holistik penting dipertimbangkan dalam merumuskan langkah kebijakan kedepan. Dalam konteks KLHS ini, 6 (enam) TPB prioritas yaitu TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 8: Pekerjaaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi, TPB 4: Pendidikan Berkualitas, TPB 1: Tanpa Kemiskinan dan TPB 2: Tanpa Kelaparan dapat dicapai dengan mewujudkan Kota dan Masyarakat Berkelanjutan (TPB 11). sehingga secara tidak langsung, TPB 11 melingkupi keenam TPB prioritas.

Pencapaian TPB didukung oleh kemitraan (TPB 17) yang diimplementasikan untuk keseluruhan TPB lainnya. Kunci utama dari pencapaian TPB didasari atas kelembagaan dan tata Kelola yang baik, hal ini tercermin dari TPB 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Sementara itu TPB lainnya merupakan hal yang saling terkait dengan TPB prioritas dan lingkup TPB 11, 16 dan 17.

Gambar 7.2. Lingkup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Ilustrasi, 2020

Dengan melihat secara detil dan holistik bagaimana ke – 17 TPB saling terkait satu sama lain terutama dengan TPB prioritas, maka alternatif skenario yang disusun dapat lebih strategis. Strategis yang dimaksud ialah fokus pada TPB prioritas namun berkontribusi pada TPB lain yang terkait. Gambar di bawah ini merupakan keterkaitan antar TPB prioritas (termasuk fokus targetnya) dengan target-target pada TPB lain.

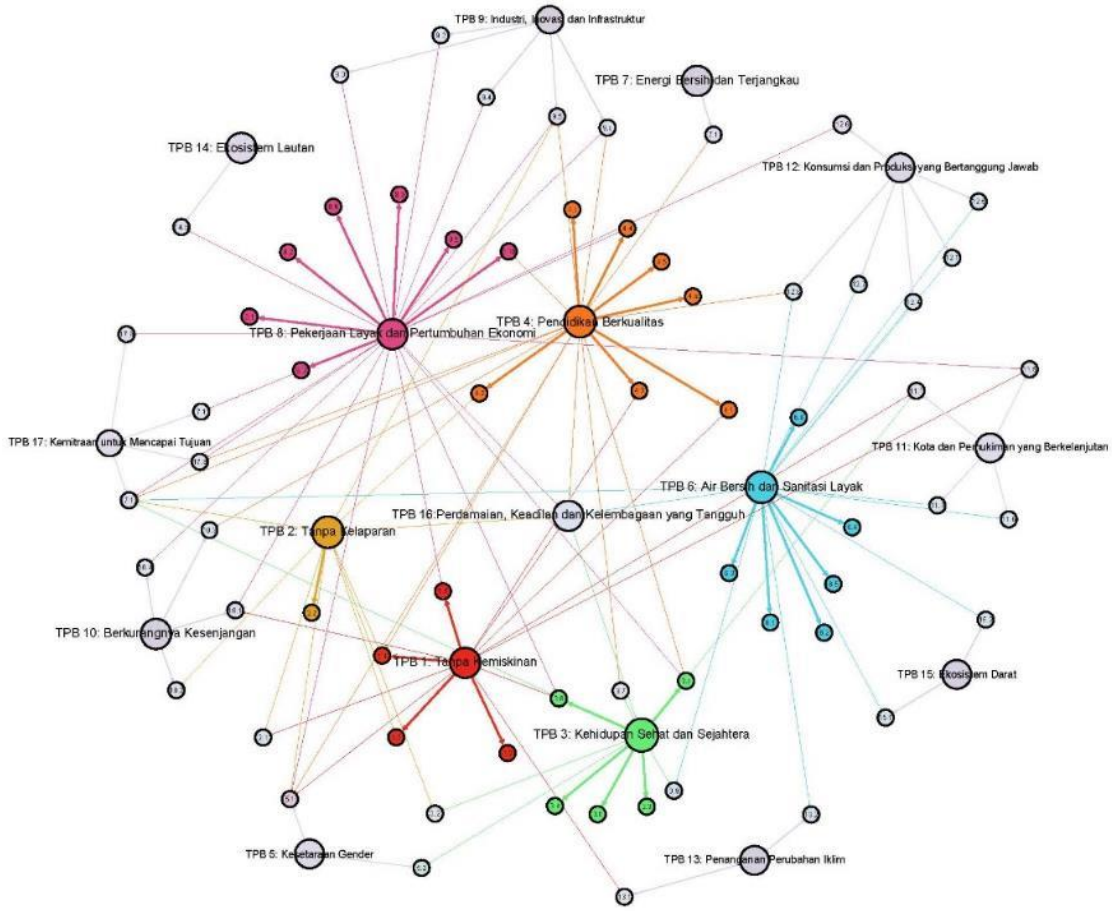

Gambar 7.3. Interlink TPB Prioritas dengan Target TPB lain
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Proses bagaimana interlink TPB dihasilkan diawali dengan mengidentifikasi target terkait pda TPB prioritas berdasarkan isu-isu utama/ masalah yang mencuat. Penjelasan di bawah ini menunjukan target-target prioritas dalam TPB prioritas beserta interlinknya.

Interlink TPB 3

Tabel 7.1. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 3

Gap/Masalah	Kode	Target yang terkait
Jakarta menjadi episentrum terjadinya pandemi COVID-19	3.3	Mengakhiri epidemi dst …, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
Fasilitas layanan kesehatan yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar masih rendah	3.b.	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular dst…
	3.c.	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan dst …
Cakupan jaminan kesehatan bagi penduduk DKI Jakarta belum menyeluruh	3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dst ...

Kesehatan Mental (keterkaitan dengan kekerasan terhadap anak pada saat PJJ)	3.4	Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, dst… , serta meningkatkan kesehatan mental & kesejahteraan.

Dengan melihat substansi dari gap masalah di atas, maka dalam rangka mencari solusi secara holistik, TPB 3 juga terkait dengan target dari TPB lain sebagaimana penjelasan di bawah ini.

3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.

3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Gambar 7.4. Interlink TPB 3 dengan Target TPB lainnya

Interlink TPB 8

Fokus target pada TPB 8 yang terkait dengan gap masalah yang utama adalah sebagai berikut

Tabel 7.2. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 8

Gap/Masalah	Kode	Target yang terkait
Menurunnya pertumbuhan PDRB 2020 akibat pandemi COVID-19.	8.1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita.
	8.2.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi.
Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka akibat pemutusan hubungan kerja sektor formal dan melemahnya sektor informal.	8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan.
	8.5.	Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki.
	8.6.	Secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Gap/Masalah	Kode	Target yang terkait
Penurunan jumlah individu yang mendapatkan pekerjaan layak akibat pandemi COVID-19.	8.3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan.
Penurunan wisatawan akibat penerapan kebijakan pembatasan sosial selama pandemi.	8.9.	Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja
Kurangnya akses layanan keuangan terutama untuk UMKM (hanya 8,87% dr total kredit) dalam rangka mendukung pengembangan usaha baru	8.3. 8.10.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.

Dengan melihat substansi dari gap masalah di atas, maka dalam rangka mencari solusi secara holistik, TPB 8 juga terkait dengan target dari TPB lain.

Gambar 7.5. Interlink TPB 8 dengan Target TPB lainnya

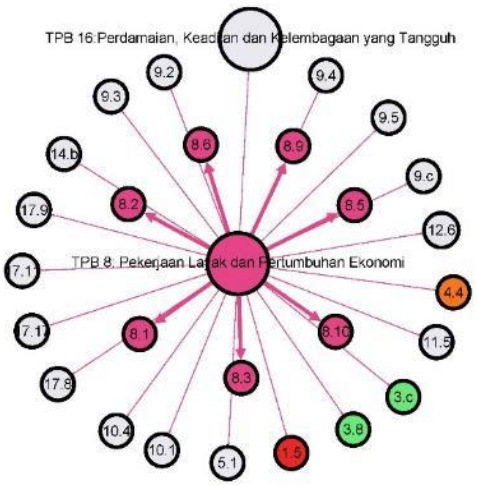

1.5 Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan ….

3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan

4.4 Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

10.1 Secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk

10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial,

11.5 Secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan

9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil

9.4 Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan

9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara

12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains
17.9 Mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,
17.11 Meningkatkan ekspor dari negara berkembang,
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif

Interlink TPB 6

Tabel 7.3. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 6

Gap masalah	Kode	Target yang terkait
Kualitas dan kuantitas air belum dapat memenuhi kebutuhan daerah. Kebutuhan air meningkat untuk mendukung PHBS dalam rangka upaya menekan penyebaran COVID-19. Namun demikian, diketahui bahwa daya dukung penyediaan air secara kuantitas tidak dapat dipenuhi secara mandiri dari dalam Provinsi DKI Jakarta saja. Secara kualitas, air di Provinsi DKI Jakarta mengalami perbaikan namun tidak serta merta meningkatkan kelas Indeks Kualitas Air.	6.1. 6.2. 6.3. 6.5. 6.6.	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dst… Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dst… Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yg tepat dst… Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, dst…
Meningkatnya kebutuhan akses sarpras air bersih saat pandemi. Meningkatnya kebutuhan akses sarpras air bersih terutama untuk aktivitas cuci tangan selama COVID	6.2. 6.3.	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dst… Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dst…
Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah belum menyeluruh.	6.2. 6.3.	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dst… Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dst…
Penegakan hukum untuk membatasi penggunaan air tanah. Masifnya penggunaan air tanah di DKI Jakarta dapat memicu penurunan tanah sehingga rentan amblesan	6.4.	Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan

Keterkaitan TPB 6 dengan TPB lain adalah sebagai berikut.

Gambar 7.6. Interlink TPB 6 dengan Target TPB lainnya

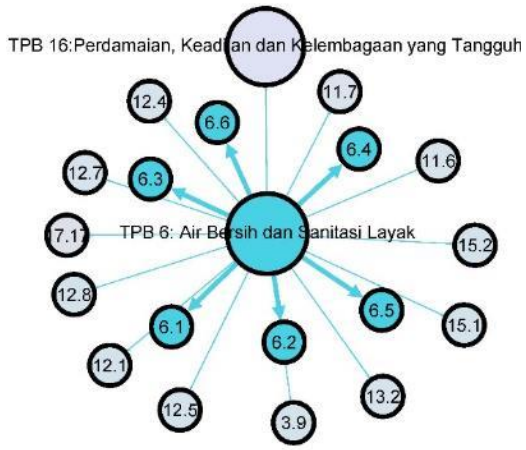

3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau

12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.

12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

12.7. Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

15.2.Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Interlink TPB 4

Fokus target dalam TPB 4 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.4. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 4

Gap masalah	Kode	Target yang terkait
Rendahnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	4.2	Menjamin bahwa semua anak memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini
Rendahnya kualitas kompetensi guru sesuai standar	4.c	Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas,
	4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak,

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.1	Menjamin bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas
	4.3	Menjamin akses yang sama terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi,
	4.4	meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan,
	4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan

Gambar dibawah ini menunjukan keterkaitan TPB 4 dengan TPB lainnya.

Gambar 7.7. Interlink TPB 4 dengan Target TPB lainnya

1.4 Menjamin bahwa masyarakat memiliki hak yang sama terhadap akses terhadap pelayanan dasar
3.7 Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan.
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan.
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
7.1 Menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil
12.8 Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar
17.8 Pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif

Interlink TPB 1

Fokus target pada TPB 1 adalah sebagai berikut

Tabel 7.5. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 1

Gap/Masalah	Kode	Target yang terkait
Bertambahnya Tingkat kemiskinan akibat pandemi COVID 19	1.2	mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi
Kekerasan dan Tindak Kejahatan	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin
Pemukiman kumuh	1.4	Menjamin semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, akses pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
	1.5	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Keterkaitan dengan TPB lainnya adalah sebagai berikut.

Gambar 7.8. Interlink TPB 1 dengan Target TPB lainnya

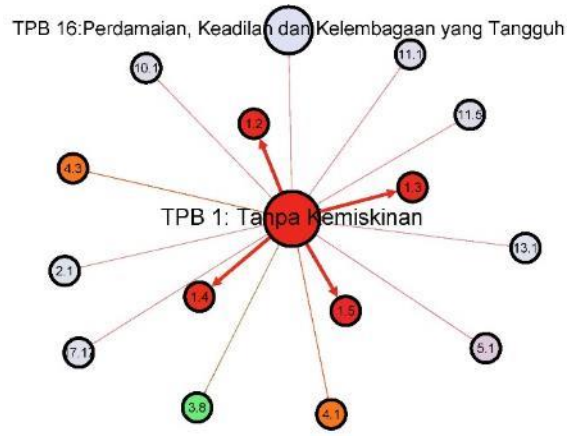

2.1 Menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan

3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal (perlindungan risiko keuangan, akses pelayanan kesehatan dasar & obat-obatan serta vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

4. 1 menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

4.3 menjamin akses yang sama terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapunmpuan.

6.1 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

10.1 mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional

11.1 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

11.5 mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam..

16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

Interlink TPB 2

Fokus target TPB 2 berdasarkan gap masalah yang muncul adalah sebagai berikut

Tabel 7.6. Gap Masalah dan Keterkaitannya dengan Target dalam TPB 2

Gap Masalah	#	Target yang terkait
Ketahanan Pangan Stunting Pemenuhan Gizi	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Sementara itu, TPB 2 terkait dengan TPB lain sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Gambar 7.9. Interlink TPB 2 dengan Target TPB lainnya

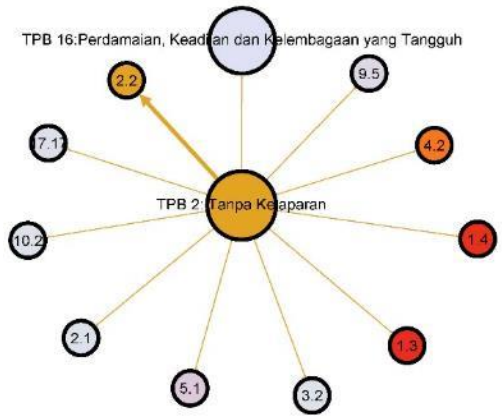

1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin
3.2 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah
4.2 menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional,
10.2 memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.

7.2 Skenario Daya Dukung

Pada dasarnya, daya dukung air yang diindikasikan terlampaui merupakan sebuah *warning* supaya pembangunan di wilayah tersebut perlu dievaluasi atau dilakukan pembatasan. Dalam rangka merespon hal tersebut, skenario perlu disusun dan disesuaikan dengan kemampuan daerah agar kondisi kuantitas air tidak semakin defisit. KLHS memberikan pertimbangan dalam jangka dua tahun perubahan RPJMD DKI Jakarta,

kuantitas ketersediaan air setidaknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan hingga 1%. Ilustrasi skenario tersebut digambarkan dengan grafik proyeksi berikut.

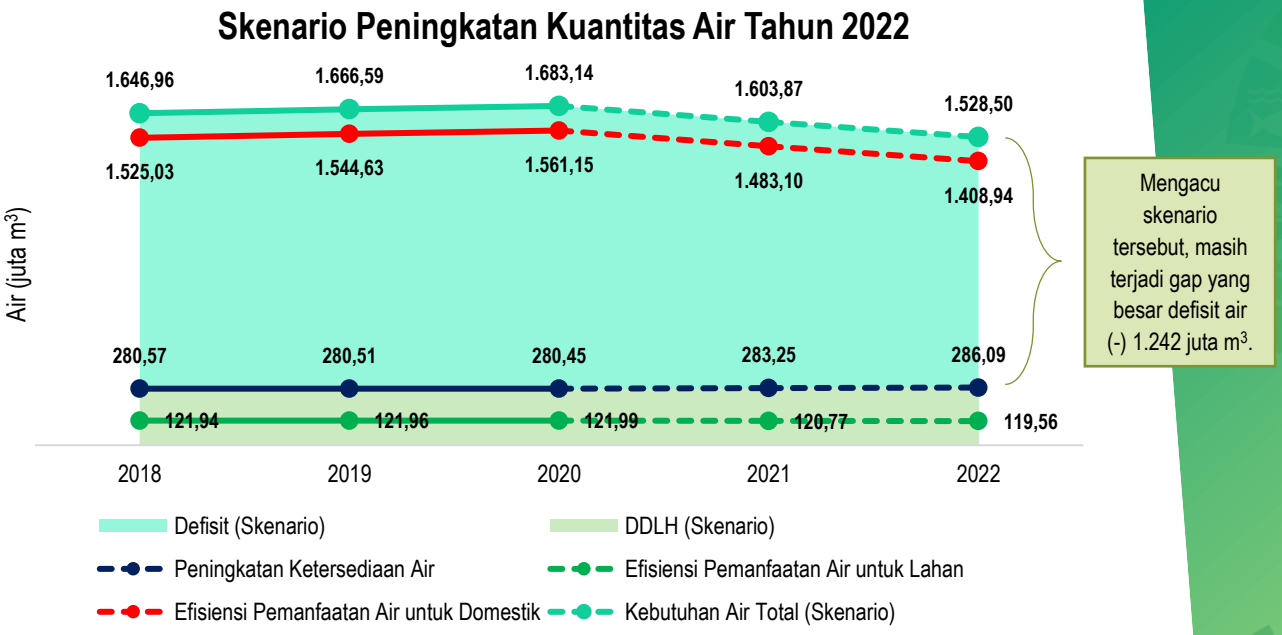

Gambar 7.10 Skenario Peningkatan Kuantitas Air DKI Jakarta Tahun 2022
Sumber: Analisis, 2020

Proyeksi kuantitas air pada grafik di atas, dirumuskan dengan skenario sebagai berikut:

1. ***Peningkatan Kuantitas Air sebanyak 1%***
   Berdasarkan hasil FGD tematik pada tanggal 26 Agustus 2020 bersama OPD terkait, tim KLHS telah mengidentifikasi rencana upaya yang akan dilakukan dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan layanan ketersediaan air. Skenario ini ditempuh dengan beberapa upaya sebagai berikut:
   - Capaian peningkatan ketersediaan air diperkirakan kurang dari 1%.
   - Defisit ketersediaan air dipenuhi dengan melakukan kerjasama antar daerah atau distribusi air baku dari luar wilayah DKI Jakarta.
   - Meningkatkan kapasitas ketersediaan air lokal dengan mengupayakan sumber air baku dari Sungai Mookervart dan Sungai Ciliwung.
   - Pembangunan infrastruktur ekologis seperti waduk-waduk sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan air dan mitigasi bencana banjir.
   - Mendorong terwujudnya konsep Zero Delta Q melalui pembangunan 1.000 sumur resapan pada tahun 2021 dalam rangka upaya memanen air hujan.
   - Pemenuhan kebutuhan air untuk wilayah Jakarta Utara diupayakan bersumber dari Waduk Jatiluhur dan IPA dari waduk-waduk sekitar.
2. ***Efisiensi Pemanfaatan Air untuk Lahan sebanyak 1%***
   Pada dasarnya, pemanfaatan air untuk lahan seperti pertanian, taman, pembersihan jalan, dan hidran umum juga membutuhkan jumlah cadangan air yang memadai. Efisiensi pemanfaatan air untuk lahan dapat dilakukan melalui upaya optimalisasi teknologi daur ulang air dan pemanfaatan sumber air alternatif seperti air hujan.
3. ***Efisiensi pemanfaatan air untuk kegiatan domestik sebanyak 5%***
   Kajian D3T air tahun 2019 menunjukkan bahwa kegiatan domestik paling besar mengkonsumsi air hingga ±93% dari total kebutuhan air DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk DKI

Jakarta sangan besar serta memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan air. Langkah efisiensi pemanfaatan air paling tepat menyasar pada perubahan pola perilaku penduduk dalam memanfaatkan air untuk kegiatan rumah tangga sehari-hari. Efisiensi pemanfaatan air untuk kegiatan domestik dapat dilakukan melalui upaya penerapan prinsip *Sustainable Consumption Production*.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi arahan yang diberikan pada laporan Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup, dimana perbaikan terhadap pengelolaan air dapat ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
3. Pengalokasian investasi infrastruktur ekologi
4. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu
5. Upaya mitigasi bencana untuk menjamin keselamatan masyarakat
6. Penguatan pembangunan non struktural untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat
7. Optimalisasi sektor perdagangan dan jasa berbasis kemasyarakatan

Dengan memahami sepenuhnya kondisi pandemi saat ini memaksa perhatian dalam porsi besar tertuju pada pemulihan perekonomian selama masa 2 tahun Perubahan RPJMD DKI Jakarta, maka rekomendasi arahan di atas tidak seluruhnya dapat diadopsi pada RPJMD ini. Rekomendasi arahan yang dapat diakomodir dalam perubahan RPJMD meliputi pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan pengalokasian investasi infrastruktur ekologi. Sementara, arahan yang belum dapat diakomodir dalam dua tahun masa perubahan RPJMD atau arahan bersifat jangka panjang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan lain seperti RPPLH (saat ini sedang dalam masa penyusunan) dan RTRW.

Daya Dukung Lahan untuk Pangan. Dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta, rencana pola ruang kawasan pertanian diarahkan untuk mempertahankan kondisi lahan pertanian yang masih ada. Penyediaan lahan pengembangan pertanian difokuskan untuk penelitian, pembibitan dan pengembangan RTH (ruang terbuka hijau). Artinya, sektor pertanian bukan sebagai motor penggerak perekonomian DKI Jakarta dan pemenuhan terhadap kebutuhan pangan dioptimalkan dengan kerjasama antar daerah. Pengembangan perkotaan DKI Jakarta menyebabkan luasan lahan pertanian basah (sawah) dan tegalan berkurang dari 11.000 Ha pada tahun 2000, 6.000 Ha pada tahun 2010, menjadi 1.233 Ha pada tahun 2018 seperti diilustrasikan pada grafik di bawah.

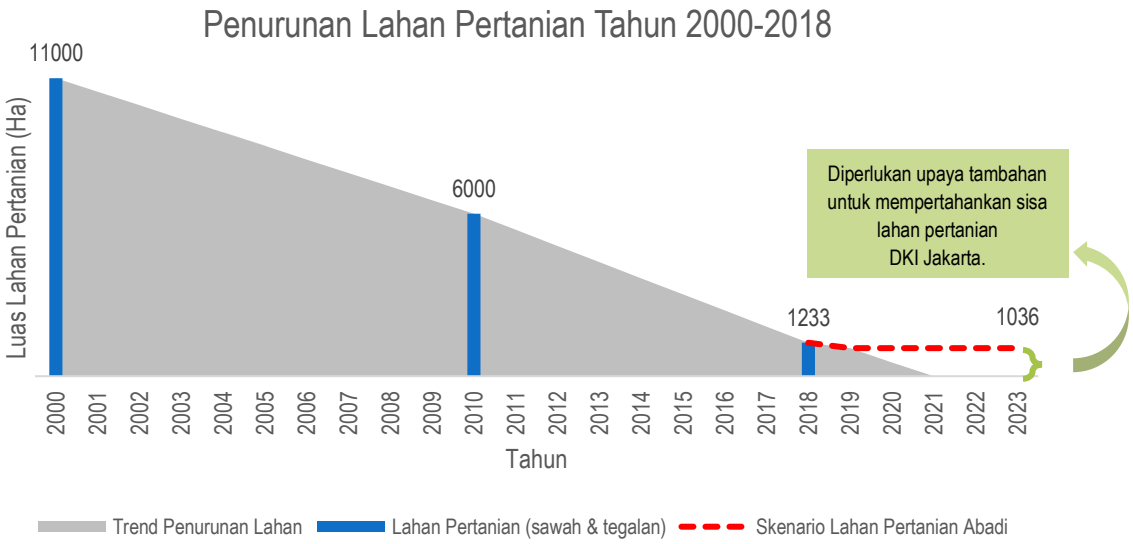

Gambar 7.11 Penurunan Lahan Pertanian DKI Jakarta Tahun 2000-2018
Sumber: RTRW DKI Jakarta 2030 dan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2018

Dari grafik di atas, dapat dilihat tiap tahunnya lahan pertanian DKI Jakarta mengalami kecenderungan penurunan sebesar ±500 Ha. Apabila peralihan guna lahan DKI Jakarta tetap dibiarkan terjadi secara *business as usual* (BAU) maka lahan pertanian akan habis teralihkan pada tahun 2021.

Hal tersebut tentu akan kontras dengan arahan RTRW agar lahan pertanian yang tersisa dapat dipertanahankan. Dengan demikian, akan diperlukan suatu upaya tambahan dalam rangka menjamin lahan-lahan tersebut tetap difungsikan sebagai lahan pertanian salah satunya melalui penetapan lahan pertanian abadi. Berdasarkan tren kecenderungannya, lahan pertanian diproyeksikan tetap turun luasannya menjadi 1.036 Ha pada tahun 2019.

Sementara pada tahun 2020, dapat dipahami bersama kondisi pandemi global COVID-19 telah mempengaruhi segala bentuk kegiatan perekonomian di muka bumi. Hal tersebut diperkirakan menyebabkan stagnasi peralihan guna lahan dalam beberapa saat dan fokus pada optimalisasi pemanfaatan fungsi-fungsi yang sudah ada. Dalam berbagai pemberitaan media menyebutkan sebagian besar wilayah baik negara maupun daerah terfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dalam wilayah itu sendiri akibat kondisi pandemi. Proses optimalisasi logistik dari daerah lain tentu akan mengalami hambatan untuk sementara waktu sementara DKI Jakarta sendiri tidak memiliki banyak lahan untuk pertanian.

Pertimbangan tersebut yang mendasari agar perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 perlu mengakomodir skenario lahan pertanian abadi sebagai langkah menuju Jakarta Berketahanan dari kondisi krisis. Berdasarkan skenario ini dapat diperkirakan besaran daya dukung lahan DKI Jakarta untuk pertanian melalui perhitungan sebagai berikut.

Tabel 7.7 Skenario Daya Dukung Lahan untuk Pangan Tahun 2022

Ketersediaan lahan pertanian berdasarkan proyeksi & skenario (Ha)	1.036
Produktivitas lahan (ton/ha/tahun)	5
Produksi padi 2022 (GKG)	5.590
Konversi GKG ke beras 59% (ton)	3.298
Jumlah penduduk DKI Jakarta 2022 (jiwa)	11.334.423
Angka konsumsi beras (ton/orang/tahun)	1
Jumlah beras dikonsumsi (ton)	11.334.423
Kebutuhan Lahan (Ha)	21.005
Defisit Beras (ton)	-11.331.125
Daya Dukung Lahan untuk Pangan	**Terlampaui**

Sumber: (Analisis, 2020), dan asumsi mengacu pada PermenLH 17/2009 serta (BPS, 2020)

Dari skenario di atas, meskipun lahan pertanian dipertahankan pada luasan 1.036 Ha tetap belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras di dalam wilayah DKI Jakarta. **Oleh karena itu, DKI Jakarta tetap perlu melakukan optimalisasi logistik dari luar daerah.**

Uraian kondisi di atas mengisyaratkan bahwa arah pembangunan DKI Jakarta dikembangkan sebagai daerah megapolitan untuk pemenuhan kebutuhan tersier seperti akomodasi, industri, wisata, kuliner, dan komersial. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan DKI Jakarta didominasi untuk lahan terbangun. Tekanan arah pembangunan tersebut secara tidak langsung akan mengurangi kemampuan wilayah DKI Jakarta untuk mewujudkan Ketahanan Pangan secara swadaya karena kurangnya lahan peruntukan pertanian.

Namun demikian, DKI Jakarta tetap dapat melakukan upaya untuk menjaga stabilitas pangan melalui beberapa cara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain

kerjasama antar wilayah, kegiatan pertanian perkotaan pada lahan kosong, lahan terlantar, dan bangunan gedung (Sekretariat Jakarta Berketahanan, 2019).

Upaya Pemprov. DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya dapat dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan daerah sebagai berikut:

- **Upaya Peningkatan Produksi Lokal melalui Kegiatan Pertanian Perkotaan (*Urban Farming*)**

Kode	Program
A.2.09.03	***Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*** Peningkatan produksi lokal dapat diakomodir dalam kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
A.3.27.02	***Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian*** Program ini dimaksudkan untuk melaksakan kegiatan pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman; pengawasan peredaran sarana pertanian; dan peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit.
A.3.27.03	***Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian*** Kegiatannya berupa pembangunan prasarana pertanian meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pelatihan. Dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pertanian perkotaan dapat dilakukan melalui pemberian insentif berupa alat atau pupuk bagi masyarakat yang melaksanakan pertanian perkotaan.
A.3.27.05	***Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian*** Kegiatan pada program ini terfokus pada pengendalian organisme pengganggu tumbuhan penyebab kegagalan panen. Akan lebih baik jika terdapat pengembangan sistem perlindungan terhadap petani apabila terjadi kegagalan akibat bencana alam.
A.3.27.07	***Program Penyuluhan Pertanian*** Program penyuluhan pertanian diprioritaskan pada teknologi yang cocok untuk praktik pertanian perkotaan. Salah satunya masyarakat dapat didorong untuk menanam sumber daya pangan sendiri melalui kegiatan vertikultur, hidroponik, dan aquaponik pada lahan terbatas seperti *rooftop,* pagar atau halaman rumah. Lebih dari itu, berdasarkan diskusi terbatas dengan stakeholder memberikan saran terhadap pemanfaatan lahan RTH dan lahan bantaran kali dapat diarahkan agar diintegrasikan dengan lahan pertanian perkotaan dan perikanan darat. Selain sebagai upaya peningkatan produksi pangan lokal, hal tersebut juga diharapkan sebagai media edukasi bagi masyarakat secara umum agar dapat mengaplikasikan model pertanian perkotaan di rumah sendiri. Arahan-arahan ini dapat diakomodir lebih lanjut melalui kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian yang mencakup diseminasi teknis, penyuluhan dan pemberdayaan petani.

Upaya peningkatan produksi pangan lokal tentu harus diikuti dengan ketersediaan lahan yang mencukupi. Sementara, proyeksi konversi lahan menunjukkan lahan pertanian hingga tahun 2020 hanya tersisa 1.036 Ha, jika kondisi tersebut dibiarkan berlangsung maka lahan pertanian akan berangsur-angsur menghilang. Simulasi modeling daya dukung lahan untuk pangan yang diuraikan pada paragraf sebelumnya telah mengindikasikan lahan pertanian DKI Jakarta tidak mampu menghasilkan surplus produksi beras sebagai bahan pangan pokok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya menahan laju konversi lahan pertanian dengan menetapkan lahan pertanian berkelanjutan di beberapa wilayah. Kebijakan tersebut tercantum dalam Rancangan Revisi RTRW DKI Jakarta Tahun 2030 dengan strategi melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan dilakukan berdasarkan arahan sebagai berikut:

- pemberian insentif untuk mempertahankan status dan kondisi lahan pertanian yang tersisa;
- penyediaan lahan untuk mengembangkan lahan pertanian bagi penelitian, pembibitan, dan pengembangan RTH; dan
- pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertanian.

Arahan pengembangan pertanian di tiap wilayah dirumuskan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di Jakarta Pusat, pengembangan budi daya tanaman hias, pertanian dan perikanan difungsikan sebagai kawasan terbuka hijau. Di Jakarta Utara, pemeliharaan dan intensifikasi budi daya kawasan peruntukan hortikultura dan tanaman pangan diarahkan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya. Di Jakarta Barat, pemeliharaan, intensifikasi dan pelestarian pertanian diarahkan pada Kawasan Pegadungan dan Kalideres. Pengembangan kawasan peruntukan hortikultura dan tanaman pangan untuk Jakarta Selatan diarahkan terutama di wilayah Pasar Minggu, Cilandak, dan Jagakarsa. Sementara Jakarta Timur, pengembangan kawasan budi daya pertanian dan tanaman hias diarahkan pada kawasan bagian selatan jalan lingkar luar (outer ring road) di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung dan Cakung.

- **Upaya Optimalisasi Logistik dari Luar Daerah (Kerjasama antar Wilayah)**

Kode	Program
A.2.09.03	***Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*** Kegiatan yang relevan untuk upaya ini mencakup pelaksanaan pemantauan stok, pasokan, harga pangan; sinkronisasi dan pengembangan jaringan distribusi pangan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk penerapan *Good Handling Practice* (GHP) hasil pertanian yang diharapkan dapat menjaga stabilitas ketersediaan *Buffer Stock* Logistik dan cakupan distribusi pangan untuk mengendalikan lonjakan harga bahan pangan. Sub-kegiatan lain yang mungkin diperlukan dalam menunjang program ini adalah

adanya analisis ketahanan pangan disertai pemetaan rantai pasok, jaringan distribusi pangan, dan kajian pola konsumsi masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

A.2.09.05 ***Program Pengawasan Keamanan Pangan***
Kerjasama antar wilayah dalam rangka menjaga stabilitas stok pangan perlu diiringi dengan pengawasan terhadap kualitas (keamanan) sumber bahan baku pangan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan sarpras uji mutu dan keamananan, rekomendasi keamanan pangan, dan sertifikasi keamanan pangan.

Lingkup aktivitas perekonomian di DKI Jakarta sangat bervariatif dari jenis kegiatan perkantoran, industri, wisata, komersial dan lainnya disertai dengan budaya masyarakatnya yang majemuk. Hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat DKI Jakarta sehingga kebutuhan bahan baku pangan menjadi sangat variatif dan tidak dapat dipenuhi secara swadaya.

Oleh karena itu, kajian terhadap pola konsumsi masyarakat DKI Jakarta menjadi hal yang cukup diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan pemetaan rantai pasok dan stok untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku pangan. Pemetaan rantai pasok terdekat paling tidak dapat dianalisis dari lingkup kota-kota satelit yang juga memiliki sektor-sektor unggulan. Sebagai contoh, sektor unggulan pertanian dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan Kabupaten Bogor (termasuk Puncak), Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Cianjur. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama dengan wilayah dengan hasil produksi pangan surplus di luar jejaring kota satelit.

Sumber:
diadaptasi dari FGD Tematik KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta (2020), Studi Peranan Kota Bodetabekjur (Ibrahim, Faisal & Eko, 2012)*, Strategi Ketahanan Kota Jakarta* (Sekretariat Jakarta Berketahanan, 2019) *dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pemerintah dan Non Pemerintah (Bappeda, 2020)*

7.3 Skenario Capaian TPB dan Upaya Tambahan

Skenario capaian TPB prioritas dilakukan dengan melihat capaian indikator-indikator yang relevan dan bagaimana target TPB dapat tercapai pada akhir masa perencanaan. Dalam sub bab ini juga membahas bagaimana capaian indikator Provinsi DKI Jakarta dan terhadap capaian nasional. Sehingga dapat dirumuskan arahan-arahan kebijakan yang relevan untuk mempercepat pencapaian target indikator tersebut. Skenario capaian TPB dirumuskan melalui *outcome* yang juga merupakan pertimbangan interlink masing-masing TPB prioritas. Sehingga arahan kebijakan tidak bersifat silo dan lebih strategis.

7.3.1 Skenario TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Melihat kondisi saat ini, sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab 6.1.2.3 mengenai isu prioritas TPB 3 yaitu bencana non alam pandemi COVID-19 dimana Jakarta menjadi episentrum kasus COVID-19 di Indonesia, maka hal ini penting menjadi fokus utama dalam KLHS ini. Mengingat bahwa efek domino dari pandemi COVID-19 yang merambat ke sektor sosial dan ekonomi yang secara masif mengguncang kehidupan masyarakat di segala sektor. Termasuk aspek psikologis masayarakat akibat PSBB yang kemudian memunculkan masalah kesehatan mental sebagaimana telah dijelaskan dalam isu prioritas.

Pemulihan sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam penanganan COVID-19 beserta dampak bawaannya. Mengingat bahwa kejadian pandemi COVID-19 ini belum terakomodir dalam dokumen RAD TPB sehingga indikator-indikator yang secara eksplisit menggambarkan kondisi pandemi beserta target capaian

belum tersedia. Namun demikian, kejadian pendemi COVID-19 ini tetap harus menjadi prioritas utama karena mempengaruhi capaian indikator lainnya seperti yang terkait dengan sektor ekonomi dan sosial. Oleh karenanya, terdapat 2 outcome yang secara langsung berhubungan dengan pandemi ini, yaitu bagaimana **Pandemi COVID-19 di Jakarta dapat tertangani** dan yang terkait dengan **pemulihan kesehatan mental akibat PSBB.** Secara kualitatif, outcome tertanganinya COVID-19 menjadi target utama dalam rencana pembangunan di DKI Jakarta 2 tahun ke depan.

Secara umum, kebijakan nasional juga mengalami pergeseran fokus. Hal ini disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang dilaksanakan pada akhir April 2020 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Musrembang tersebut mengusung tema RKP 2021 yaitu "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**" dalam rangka mitigasi COVID-19. Lebih lanjut, Menteri Bappenas/ Kepala PPN Suharso Monoarfa menjelaskan RKP 2021 memiliki empat fokus. Pertama, pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Kedua, reformasi sistem kesehatan nasional. Ketiga, reformasi sistem jaring pengaman sosial. Keempat, reformasi sistem ketahanan bencana. Hal ini menunjukan bahwa o*utcome* **Pandemi COVID-19 di Jakarta dapat tertangani** sejalan dengan fokus kebijakan nasional.

Dalam rangka mencapai *outcome* tersebut, maka dirumuskan beberapa arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder
2. Melakukan adaptasi perubahan PHBS
3. Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif
4. Pendampingan pemulihan kesehatan mental bagi warga terdampak pandemi

Salah satu fokus permasalahan pada TPB 3 lainnya yaitu cakupan jaminan kesehatan yang belum menyeluruh. Hal ini sesuai dengan Target 3.8, Indikator 3.8.2*. Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan. Dalam laporan TPB 2019, pada dasarnya persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan telah meningkat dibandingkan tahun 2018. Namun demikian, peningkatan ini tidaklah signifikan yaitu hanya 0,03%. Sementara itu, target yang ingin dicapai hingga tahun 2020 mencapai 100%. Melihat kondisi demikian, apabila peningkatan ditahun-tahun berikutnya masih rendah atau tidak signifikan, maka target pada 2020 kemungkinan besar tidak tercapai. Hasil pemodelan capaian secara Bussiness as Usual (BAU) menunjukan pada tahun 2020 akan terdapat gap capaian terhadap target sebesar 1,8%. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya tambahan dalam rangka peningkatan cakupan jaminan kesehatan di DKI Jakarta.

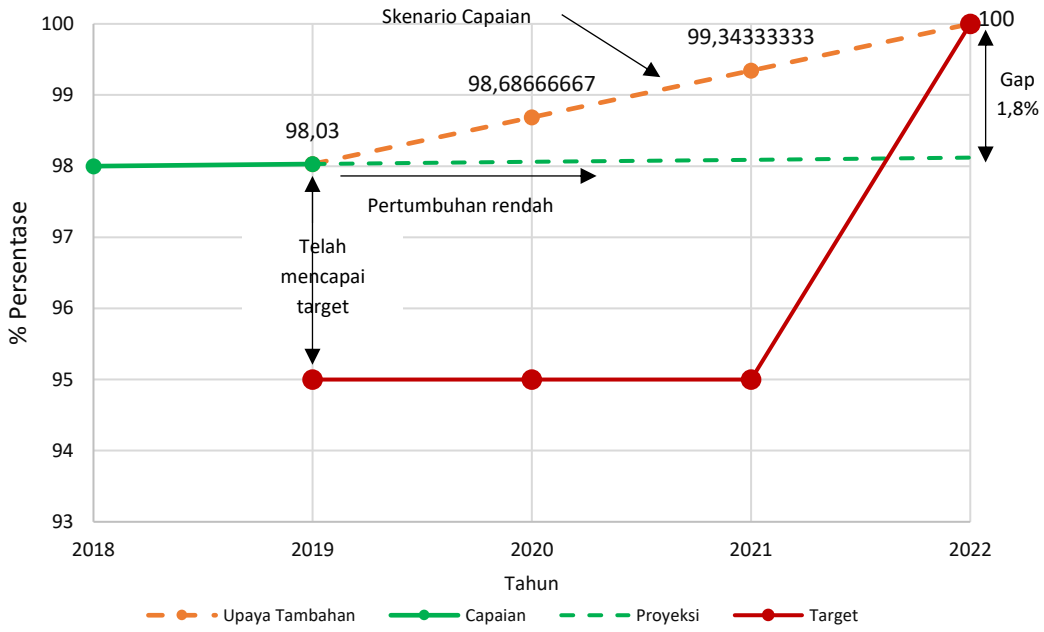

Gambar 7.12. Proyeksi dan Target Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dalam rangka meningkatkan cakupan jaminan kesehatan, **maka skenario diarahkan pada outcome berupa jaminan kesehatan yang menyeluruh**. Skenario ini didukung dengan rekomendasi arahan kebijakan untuk mendorong tercapainya 100% warga yg memiliki jaminan Kesehatan. Arahan-arah kebijakan dilengkapi dengan serangkaian usulan program dan kegiatan yang lebih rinci serta sumber daya pembiayaan sebagaimana yang dijelaskan pada subbab selanjutnya. Gambar di atas terutama grafik warna jingga (garis putus) menunjukan bagaimana skenario capaian dapat digapai dengan upaya tambahan dengan pertimbangan bahwa capaian tersebut proporsional secara liner setiap tahun hingga target akhir tahun 2022 pada RAD dapat tercapai. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuai target RAD.

Permasalahan lain yang penting di sektor kesehatan adalah sumber daya manusia pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar. Hal ini tergambar dalam indikator 3.c.1* Persentase Layanan Kesehatan yang memiliki SDM Sesuai Standar. Dalam capaian indikator tersebut pada 2018 dan 2019, terlihat bahwa target dalam RAD masih belum tercapai. Pada tahun 2019, capaian hanya sekitar 14,59% sementara targetnya yaitu 50%. tentunya capaian ini masih sangat jauh dari target, apalagi melihat kecenderungannya selama 2 tahun kebelakang justru menurun. Sehingga, pada tahun 2020 diproyeksikan secara BAU penurunan ini akan terus terjadi dan mencapai angka 11,32% sangat jauh dari target RAD yaitu 80%.

Melihat kondisi demikian, tentunya perlu dilakukan upaya-upaya tambahan dalam rangka meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan yang memenuhi standar. Untuk itu grafik dibawah ini menunjukan capaian, proyeksi capaian secara BAU, target dalam RAD dan skenario jika upaya tambahan dilakukan dalam pemenuhan SDM kesehatan yang sesuai standar.

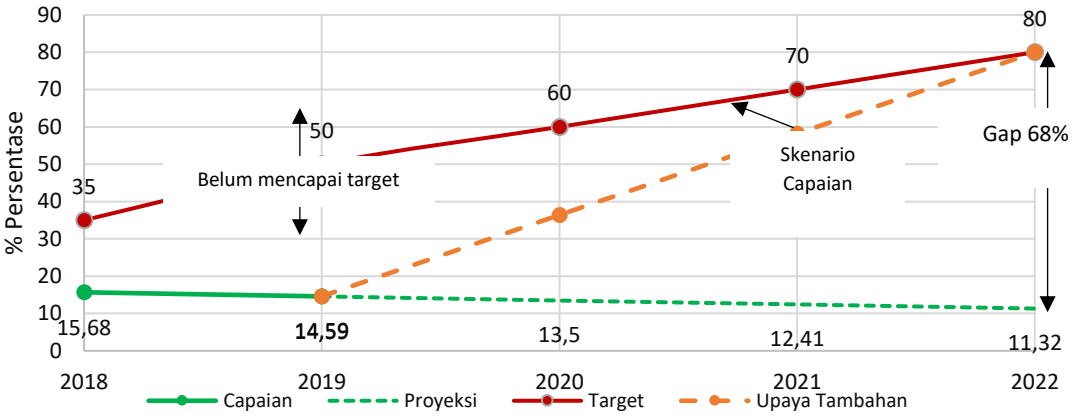

Gambar 7.13. Proyeksi dan Target Persentase Layanan Kesehatan yang memiliki SDM Sesuai Standar
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dirumuskan ***outcome* berupa pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar.** Maka disusun arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perbaikan infrastruktur kesehatan
2. Peningkatan kualitas SDMK yang berdaya saing global

Mengacu pada penjelasan sebelumnya tentang fokus RKP 2021 Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa *outcome* jaminan kesehatan yang menyeluruh dan pemenuhan fasilitas kesehatan sesuai standar sejalan dengan fokus kedua yaitu perbaikan sistem kesehatan nasional.

Secara ringkas, berikut ini disarikan outcome dan arahan kebijakan sebagai upaya tambahan dalam pencapaian target TPB 3. Arahan kebijakan telah melalui kesepakatan dalam proses konsultasi publik tanggal 29 September 2020.

Outcome	Arahan Kebijakan
3.i. Pandemi COVID-19 tertangani	3.1. Melakukan adaptasi perubahan PHBS
3.ii. Fasilitas Kesehatan sesuai standar	3.2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder
3.iii. Jaminan kesehatan yang menyeluruh	3.3. Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif
3.iv. Pulihnya kesehatan mental akibat PSBB	3.4. Meningkatkan perbaikan infrastruktur kesehatan
	3.5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDMK yang berdaya saing global
	3.6. Mendorong tercapainya 100% warga yg memiliki jaminan Kesehatan
	3.7. Pendampingan pemulihan kesehatan mental bagi warga terdampak pandemi

7.3.2 Skenario TPB 8 Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 8 Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi menjadi hal yang sangat berdampak karena kondisi pandemi COVID-19 tahun ini. Secara umum, sektor ekonomi secara global mengalami kontraksi yang signifikan, begitupula Indonesia terkhusus DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, secara umum pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada saat terjadi pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Jakarta justru berkontraksi besar jauh dibawah kontraksi ekonomi nasional. Hal ini dirasa wajar karena DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbangn

pertumbuhan PDB tersbesar Nasional yang tentunya terkena dampak signifikan akibat kondisi pandemi COVID-19.

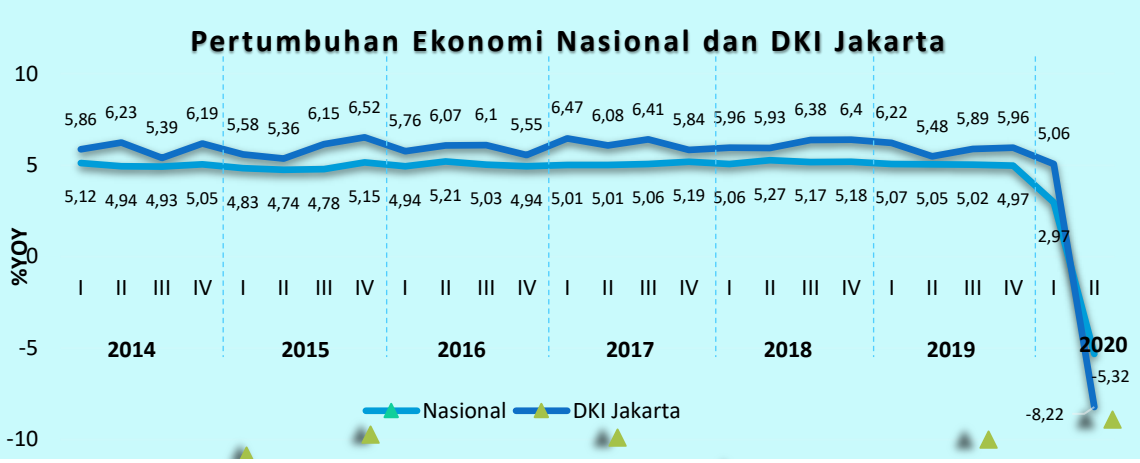

Gambar 7.14. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta
Sumber: BPS, 2020

Melihat hal tersebut di atas tentu penting untuk membuat skenario kebijakan yang berupaya memperbaiki kondisi ekonomi di DKI Jakarta. Target RAD TPB DKI Jakarta yang mengacu pada RPJMD 2017-2022 mengalami penyesuaian target pada RANWAL Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017 – 2022. Berikut ini proyeksi asumsi makroekonomi DKI Jakarta berdasarkan Rancangan RPJMD Perubahan 2017-2022.

Tabel 7.8. Proyeksi Makroekonomi Jakarta 2018-2022

No.	Uraian	Tahun						
		2018	2018*	2019	2019*	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,3	6,17	6,6	5,89	(-1,1) - (-0,7)	5,0 - 5,4	5,9 - 6,3
2.	Inflasi (yoy persen)	3,7	3,27	3,6	3,23	1,5 - 1,9	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0

Sumber: Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta, 2020

Melihat kondisi diatas, diperlukan upaya tambahan untuk mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Untuk menangani hal ini, dalam KLHS ini dirumuskan outcome berupa **Pertumbuhan PDB perkapita DKI Jakarta yang Meningkat,** yang didukung oleh arahan kebijakan yaitu menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan menghadapi kondisi krisis melalui perencanaan, pengelolaan, pengawasan keuangan daerah yang lebih strategis dan transparan serta padat karya. Arahan kebijakan ini tidak berdiri sendiri dalam mencapai *outcome* Pertumbuhan PDB perkapita DKI Jakarta yang Meningkat namun juga didukung oleh arahan kebijakan lain pada sektor ekonomi sebagaimana dijelaskan selanjutnya.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dilakukan analisis proyeksi BAU dan extraordinary condition yaitu pandemic COVID-19. Proyeksi ini menggunakan metode linier untuk BAU dan proyeksi dari INDEF untuk kondisi COVID-19. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, secara umum apabila tidak terjadi pandemic COVID-19, maka proyeksi capaian TPT akan menggapai target RAD yang mana berasal dari target-target dalam RPJMD 20217-2022. Hal ini ditunjukan dengan berhimpitnya garis hiaju putus-putus dan garis merah. Namun demikian, akibat pandemi COVID-19, TPT meningkat tajam menjadi 8,8% pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi INDEF. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan dalam penentuan target capaian ke depannya.

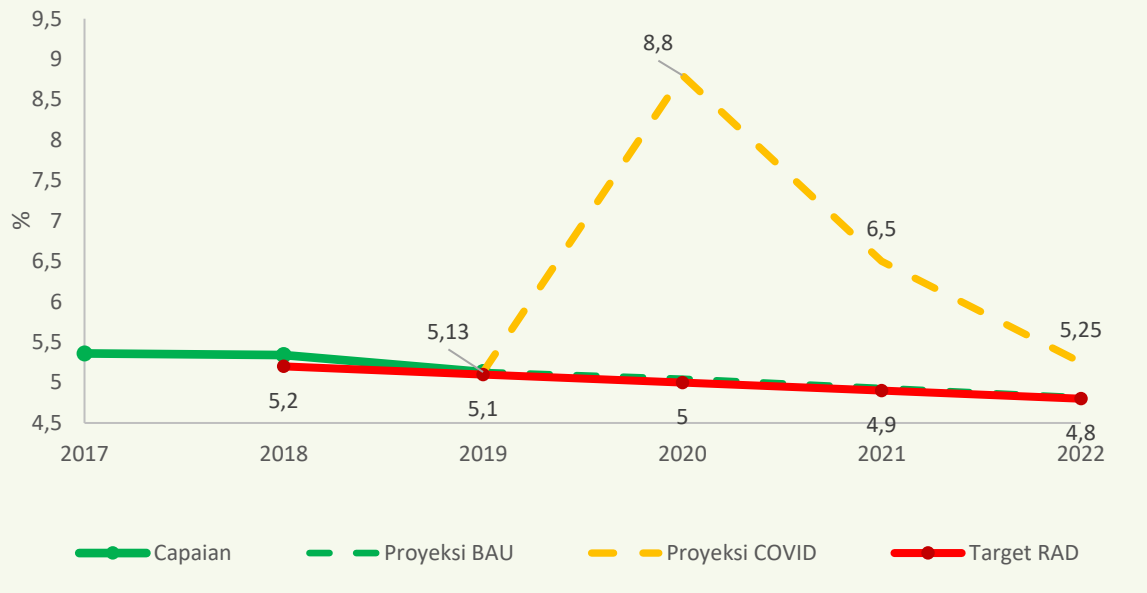

Gambar 7.15. Proyeksi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (Februari)
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sementara itu untuk melihat bagaimana capaian TPT di DKI Jakarta dan perbandingannya dengan capaian nasional, didapat data perbandingan dari laman Dashboard SDGs Bappenas (http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard). Dalam perbandingan pada gambar di bawah ini, terlihat bahwa TPT (Agustus) DKI Jakarta lebih tinggi dari capaian nasional. Tentunya hal ini bukanlah capaian yang memuaskan karena meskipun kontribusi PDRB DKI Jakarta termasuk yang terbesar namun tingkat pengangguran ternyata masih tinggi.

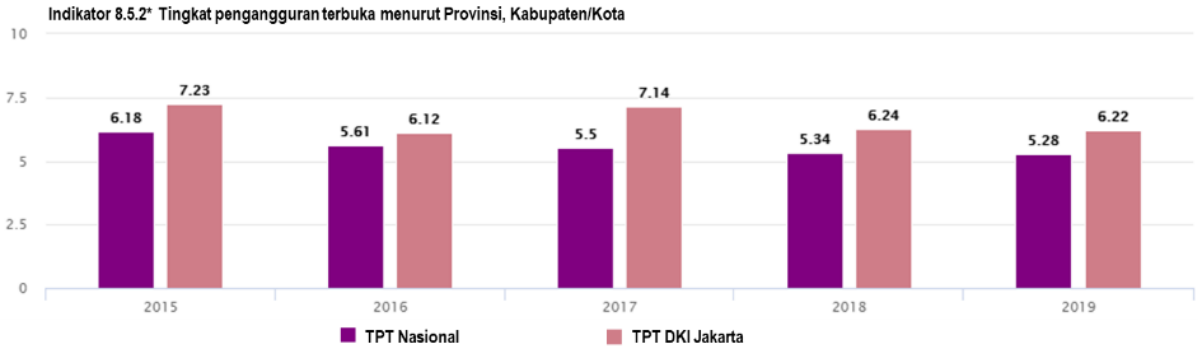

Gambar 7.16.Tingkat Pengangguran Terbuka (Agustus) Nasional dan DKI Jakarta
Sumber: SDGs Dashboard, http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard diakses Oktober 2020

Untuk mendukung penurunan TPT, KLHS ini merumuskan *outcome* berupa **mendukung penciptaan lapangan kerja** dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global
2) Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif
3) Kolaborasi pemerintah – swasta serta kemitraan lain secara berimbang dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin perlindungan tenaga kerja
4) Diversifikasi Mata Pencaharian Nelayan Tangkap di Kepulauan Seribu

Prioritas dalam TPB 8 juga menyoroti perihal menurunnya jumlah wisatawan akibat kebijakan PSBB dan kebijakan *lockdown* di berbagai negara. Dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2017-2022, ditargetkan pada akhir tahun 2022, total wisatawan domestik dan mancanegara mencapai 53 juta. Target ini seyogyanya dapat tercapai melihat tren kenaikan jumlah wisatawan dari tahun 2017 hingga 2022. Namun demikian, akibat pandemic COVID-19, jumlah wisatawan pada 2020 menurun drastis hingga 90%. Sehingga dilakukan penyesuaian target pada RANWAL Perubahan RPJMD 2017-2022 hanya menjadi 15.605.893 wisatawan domestic dan mancanegara pada tahun 2022. Penurunan target yang cukup signifikan ini turut memperhatikan pola kehidupan masyarakat era normal baru yang butuh penyesuaian terutama ketika harus berpergian.

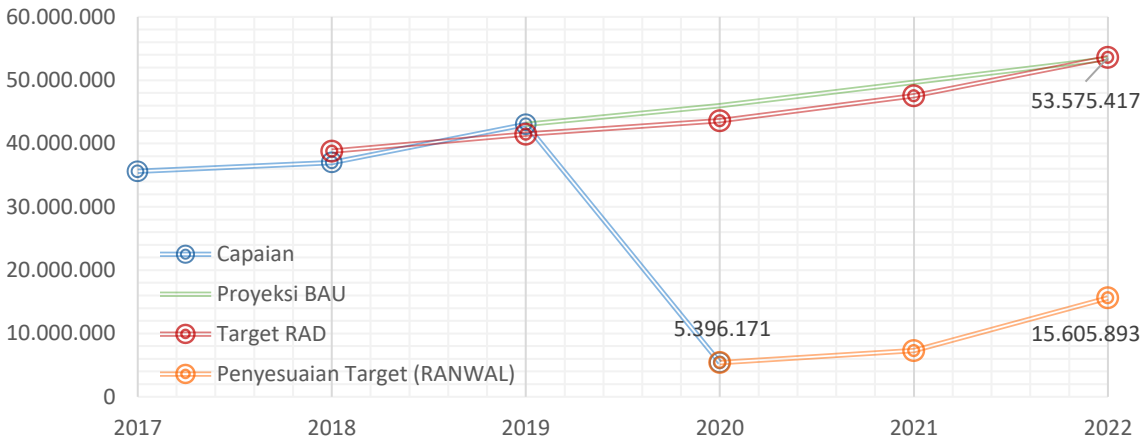

Gambar 7.17. Proyeksi dan Target Jumlah Wisatawan Asing dan Mancanegara
Sumber: SDGs Dashboard, http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard diakses Oktober 2020

Melihat kondisi demikian, dalam rangka pemulihan sektor pariwisata, maka KLHS ini merumuskan outcome yaitu **jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat**. *Outcome* ini sejalan dengan fokus RKP 2021 yang pertama yaitu pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. *Outcome* ini berupa arahan kebijakan yang fokus pada adaptasi era normal baru sebagai berikut:

1) Pengembangan pariwisata yang adaptif di era tatanan hidup baru berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui teknologi digital.
2) Pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan *green investment.*

Green investment (investasi hijau) merupakan investasi di sektor-sektor yang memproduksi produk ramah lingkungan maupun produksi barang dan jasa yang lebih ramah lingkungan.

Pariwisata selama ini masih terbatas pada pemanfaatan sumber daya yang terkait dengan kekayaan sight (pemandangan) keindahan alam. Pariwisata mempunyai banyak peluang untuk dikelola dan ditumbuhkan sebagai penerapan investasi hijau. Alam dan ekosistem merupakan sumber kekayaan yang akan menjadi daya tarik wisata, termasuk di dalamnya kekayaan biodiversitas yang unik dan spesifik lokasi alam. Pola pengelolaan kekayaan alam seperti eco-wisata, wisata keanekaragaman hayati, dan bahkan wisata ilmiah terkait dengan upaya mempelajari kekayaan keanekaragaman hayati secara (in-situ) merupakan potensi yang belum tergali dan terkelola dengan baik.

Analisis International Finance Corporation (IFC) menyebutkan Jakarta berpotensi meraih nilai investasi pada pembangunan yang berbasis ramah lingkungan sebesar USD 30 miliar hingga 2030. Potensi investasi ini meliputi beberapa poin yang terdiri dari transportasi publik, energi terbarukan, kendaraan elektrik, pengolahan sampah (waste) dan urban water. Masing-masing poin memiliki potensi investasi yang beragam. Seperti energi terbarukan dengan nilai potensi USD 3 miliar, kendaraan listrik USD 7 miliar, pengolahan sampah USD 725 juta, transportasi publik USD 660 juta, urban water USD 3 juta dan bangunan hijau (green building) USD 16 miliar.

Arahan kebijakan eco-wisata, wisata kehati, dan wisata ilmiah dapat diintegrasikan dalam program-program berikut:

Kode	Program
A.3.26.02	*Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata*
A.3.26.03	*Program Pemasaran Pariwisata*
A.3.26.04	*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*
A.3.26.05	*Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*
A.2.17.07	*Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)*
A.2.17.08	*Program Pengembangan Umkm*
A.2.18.02	*Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal*

Fokus permasalahan yang terakhir pada TPB 8 adalah akses layanan keuangan untuk UMKM. Berdasarkan laporan TPB 2019, pada indicator 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit hanya mencapai 8,87% pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa proporsi ini masih rendah dibandingkan sektor lain. Padahal, dalam kondisi pandemi seperti ini, UMKM terbukti mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, hal ini lah yang pernah terjadi pada krisis ekonomi 1998 silam. Lebih lanjut, dalam RAD TPB belum ditentukan target untuk indicator ini, sehingga target yang perlu dikedepankan sebagai *outcome* dalam KLHS ini adalah bahagimana mencipatakan **kemudahan akses layanan keuangan** untuk UMKM dan mendorong kemajuan kegiatan UMKM dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas, jaringan pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses jasa keuangan bagi UMKM dan koperasi
2. Mendorong kerjasama kemitraan dalam pendampingan UMKM dan koperasi
3. Mendorong pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam operasional pasar tradisional

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan PDB DKI Jakarta untuk perbaikan ekonomi turut didukung oleh outcome lainnya yaitu mendukung penciptaan lapangan kerja, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat, dan kemudahan akses layanan keuangan dengan arahan kebijakan sebagaimana diilustrasikan sebagai berikut.

8.i. Pertumbuhan PDB perkapita DKI Jakarta yang Meningkat

8.1. menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan menghadapi kondisi krisis melalui perencanaan, pengelolaan, pengawasan keuangan daerah yang lebih strategis dan transparan

8.ii.Mendukung penciptaan lapangan kerja

8.2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global
8.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif
8.4. Kolaborasi pemerintah – swasta serta kemitraan lain secara berimbang dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin perlindungan tenaga kerja
8.5. Diversifikasi Mata Pencaharian Nelayan Tangkap di Kepulauan Seribu

8.iii.Kemudahan akses layanan keuangan untuk UMKM

8.6. Peningkatan kualitas, jaringan pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses jasa keuangan bagi UMKM dan koperasi
8.7. Mendorong kerjasama kemitraan dalam pendampingan UMKM dan koperasi
8.8. Mendorong pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam operasional pasar tradisional

8. iv. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat

8.9. Pengembangan pariwisata yang adaptif di era tatanan hidup baru berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui teknologi digital.
8.10. Pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan green investment.

7.3.3 Skenario TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Fokus utama permasalahan pada TPB 6 yaitu kualitas dan kuantitas air belum dapat memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini tergambar dari analisis yang telah dilakukan oleh dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang menunjukan bahwa selain kuantitas air yang belum mencukupi kebutuhan warga DKI Jakarta, kualitas air pun masih sangat rendah. Profil kuantitas air DKI Jakarta maupun skenario yang perlu dilakukan telah dijelaskan pada sub bab 4.1.1 Kapasitas Daya Dukung Air dan sub bab 7.2 Skenario Daya Dukung. Gambaran mengenai kualitas air DKI Jakarta diilustrasikan melalui grafik capaian Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut.

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian IKA	41,05	34,71	34	30,51	22,31	21,33	31,43	35,56			
Proyeksi BAU								35,56	41,58	48,68	57,34
Skenario Perbaikan IKA (5%)								35,56	37,34	39,20	41,17
Acuan Target IKA Nasional								35,56	44,44	44,54	44,64

Gambar 7.18 Gambaran dan Skenario Peningkatan Indeks Kualitas Air DKI Jakarta
Sumber: (DLH, 2018), (DLH, 2019), (KemenLHK, 2020), **dan Analisis, 2020**

Dari grafik di atas terlihat bahwa Indeks Kualitas Air dari tahun 2012 ke tahun 2017, mengalami penurunan yang signifikan dari 41,05 menjadi 21,33. Di tahun berikutnya, IKA berangsur meningkat menjadi 31,43 pada tahun 2018 dan 35,56 pada tahun 2019. Secara umum, rentang nilai IKA berada pada angka 1-100, semakin tinggi nilai IKA menunjukkan semakin baik kualitas air. Data kualitas air pada tahun 2020 masih belum tersedia hingga saat kajian ini dilakukan, karena seluruh kegiatan terfokus pada penanganan pandemi COVID-19.

Namun demikian, kondisi kualitas air DKI Jakarta selama pandemi diyakini semakin meningkat sebagaimana halnya yang terjadi secara global. Berbagai media menyoroti terjadinya perbaikan kualitas lingkungan hidup banyak negara baik di darat maupun laut selama penerapan kebijakan *lockdown*. Hal ini dapat terjadi karena penerapan kebijakan "*lockdown*" dilaksanakan hampir serentak di berbagai belahan bumi yang membatasi kegiatan secara fisik. Meskipun tanpa pemberlakuan *lockdown*, sebagai wilayah episentrum pandemi di Indonesia, DKI Jakarta memilih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB berorientasi pada seleksi sektor-sektor yang diperbolehkan tetap beroperasi selama pandemi dan membatasi kegiatan sosial di luar tempat tinggal. Namun demikian, dengan digencarkannya protokol kesehatan terutama kebiasaaan cuci tangan maka permasalahan yang kemudian timbul adalah meningkatnya **kebutuhan akses sarpras air bersih saat pandemi**.

Seperti diilustrasikan pada di atas, KLHS memberikan gambaran tiga proyeksi target peningkatan IKA hingga tahun 2022 yang mencakup skenario *business as usual* (BaU), skenario perbaikan kualitas air, dan skenario target IKA nasional. **Skenario BaU** diproyeksikan dengan menggunakan regresi linier berdasarkan histori IKA tahun 2012 – 2019. Berdasarkan skenario ini target capaian peningkatan IKA pada tahun 2022 adalah 57,34. **Skenario Perbaikan Kualitas Air** diproyeksikan dengan pertimbangan peningkatan IKA hingga 5% sehingga di akhir RPJMD Tahun 2022 capaian peningkatan IKA menjadi 41,17. Sementara, apabila dibandingkan dengan **Skenario Acuan Nasional** dalam surat penyampaian target pencapaian (S.78/PPKL/SET/RENO/3/2020), maka Provinsi DKI Jakarta ditargetkan melakukan perbaikan kualitas air dengan capaian 44,64. Besaran upaya yang diperlukan sangat bergantung pada angka target pencapaian

Perbaikan kualitas air yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 memberikan kontribusi yang besar terhadap ketercapaian indikator ***Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak***. Hal ini yang mendasari ketercapaian TPB 6 menjadi tinggi serta tidak banyak yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Meskipun demikian, IKA DKI Jakarta tetap menunjukkan rentang nilai 21 – 41, dengan kata lain, kualitas air DKI Jakarta menunjukkan kriteria buruk dan marginal. Sebaran sungai dengan status indikasi cemarannya dapat dilihat pada peta sebaran hasil pemantauan Gambar 7.19. Diketahui 92% dari 90 titik pantau sungai telah terindikasi cemar berat (ditandai dengan titik **merah**), 4% sungai lainnya menunjukkan kondisi cemar sedang (ditandai dengan titik **oranye**) dan 3% lainnya terindikasi cemar ringan (ditandai dengan titik **kuning**). Faktor cemaran ini dipengaruhi oleh banyak hal, beberapa diantaranya yaitu sedimentasi akibat kegiatan temporer, penyempitan badan sungai, dan tekanan buangan dari permukiman kumuh sekita bantaran sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82/2001, mutu air sungai-sungai tersebut dikategorikan dalam Kelas 4 (empat) yang peruntukkannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan/atau peruntukan lain yang sama dengan kegunaan tersebut.

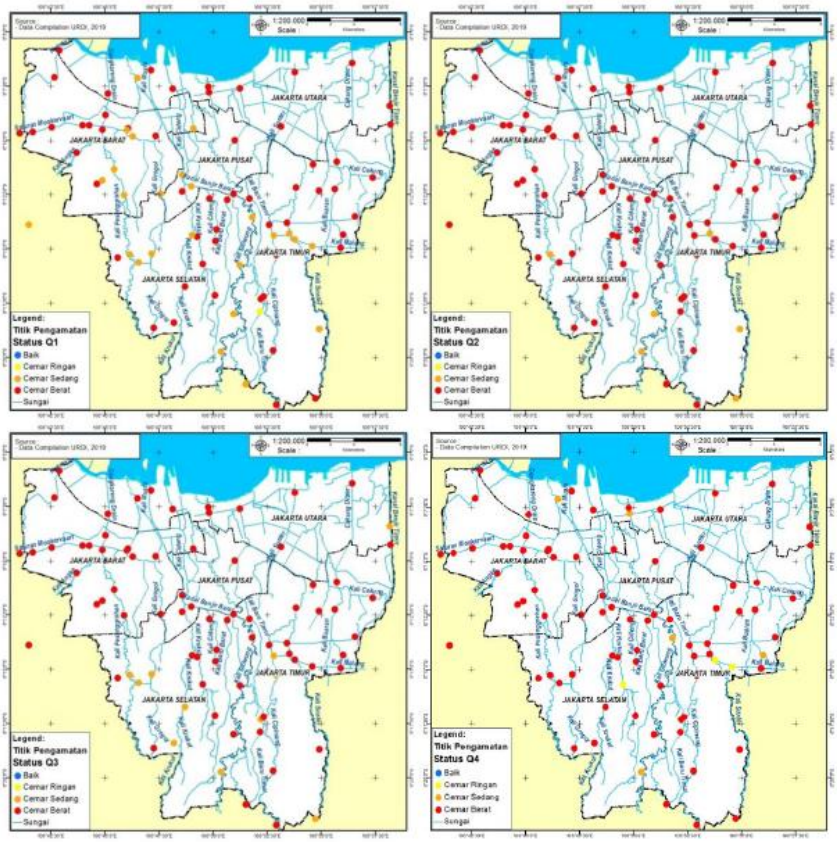

Gambar 7.19 Peta Sebaran Kondisi (Status Mutu Air) berdasarkan Hasil Pemantauan di 90 Titik Pantau Sungai
Sumber: (DLH, 2018)

Untuk mengatasi berbagai isu lingkungan diperlukan terobosan kebijakan dengan komitmen yang bersifat lintas waktu, lintas wilayah, dan lintas pengambil keputusan. Pada dasarnya, pemulihan kondisi lingkungan tidak dapat terlihat tepat saat yang bersamaan suatu kebijakan dan program mulai dicanangkan. Oleh karena itu, proyeksi skenario dimunculkan untuk memberikan kerangka waktu pencapaian target disertai rumusan strategi dalam mencapai target tersebut. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi tidak menetapkan target pencapaian indikator TPB 6 secara eksplisit. Kemampuan wilayah DKI Jakarta sebagai wilayah hilir serta sumberdaya pemerintah daerah menjadi faktor yang mendasari sulitnya menetapkan target pencapaian TPB tiap tahunnya.

Sementara itu, berdasarkan uraian pada subbab 6.1.2.3, permasalahan pemanfaatan air tanah yang begitu masih dan tidak terkendali menyebabkan kuantitas cadangan air tanah menipis dan juga mengakibatkan penurunan muka air tanah (*land subsidence*). Oleh karenanya hal menjadi satu bagian penting dalam menjaga kuantitas air di DKI Jakarta.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas badan air meskipun konsekuensi perubahan kondisi lingkungan baru dapat dilihat beberapa tahun berikutnya. Upaya-upaya yang diyakini memberikan kontribusi terjadinya perbaikan kualitas air di DKI Jakarta mencakup beberapa program berikut:

1. Normalisasi Sungai Ciliwung dari tahun 2013-2017 termasuk penataan pemukiman sekitar bantaran sungai.
2. Penambahan personil yang bertugas untuk melakukan pembersihan badan sungai.
3. Pengembangan *sewerage system* beserta instalasi pengolahannya.
4. Percontohan pengolahan air sungai *in-situ* melalui konsep *River Banks*.

Atas uraian permasalahan di atas, maka KLHS merumuskan *outcome* yaitu **menciptakan kualitas dan kuantitas air yang lebih baik** serta **penggunaan air tanah terkendali**, dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

1) Efisiensi pemanfaatan air (optimalisasi penggunaan *grey water* untuk kebutuhan air lahan dan penerapan 3R untuk konsumsi domestik)
2) Investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air
3) Pengelolaan sumber daya air secara terpadu
4) Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah
5) Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)

Upaya investasi ekologi yang dimaksud adalah investasi pembangunan/pengembangan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi-fungsi ekologis yang telah hilang atau berkurang kinerjanya dalam rangka meningkatkan kuantitas sumber air baku dan sumber air alternatif bagi DKI Jakarta. Pembangunan polder, kolam retensi, river banks (pengolahan air sungai in situ), lagoon yang terintegrasi dengan RTH dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air permukaan sekaligus memberikan

Arahan kebijakan di atas yaitu investasi infrastruktur ekologi, sangat terkait dengan TPB 15 yaitu Ekosistem Darat terutama dalam hal pencapaian target yang berkenaan dengan konservasi ekosistem.

Selain kondisi kuantitas dan kualitas air yang belum baik, Pemerintah DKI Jakarta juga dihadapkan oleh permasalahan sarana dan prasarana pendukung baik dalam hal penyediaan sarana air bersih kepada masyarakat maupun sarana pengelolaan limbah dan air limbah. Sebagaimana yang telah dijelaskan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak hanya 22,2% pada tahun 2019. Padahal, peningkatan kebutuhan air bersih beserta sarana dan prasarana penunjangnya kian tinggi karena pandemic COVID-19 untuk menggalakkan kegiatan PHBS. Oleh karenanya, salah satu outcome dalam KLHS ini merumuskan **akses sarpras air bersih yang merata & berkualitas.** Outcome ini diharapkan mampu menunjang penyediaan air bersih terutama dalam meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat dengan berbagai arahan kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan dan pemerataan akses sarpras air bersih dari air permukaan
2) Peningkatan fasilitas untuk mendukung PHBS
3) Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Disisi lain, sistem pengelolaan limbah dan air limbah belum terpadu di DKI Jakarta. Pengelolaan sampah kota sebagai contohnya, masih terpusat pada pembuangan akhir yang berlokasi di Bantar gebang. Sementara itu, pengelolaan air limbah mulai dikembangkan secara terpusat dan setempat. Hal ini dijelaskan

dalam Master Plan Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta tahun 2012 yang kemudian disahkan melalui Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud terdiri atas pengolahan Sistem Terpusat dan Sistem Setempat. Zona pengelolaan air limbah domestik dengan Pengolahan Sistem Terpusat terbagi dalam 15 (lima belas) zona yang meliputi 14 (empat belas) zona baru dan 1 (satu) zona eksisting yaitu zona 0 (nol) sebagaimana gambar di bawah ini.

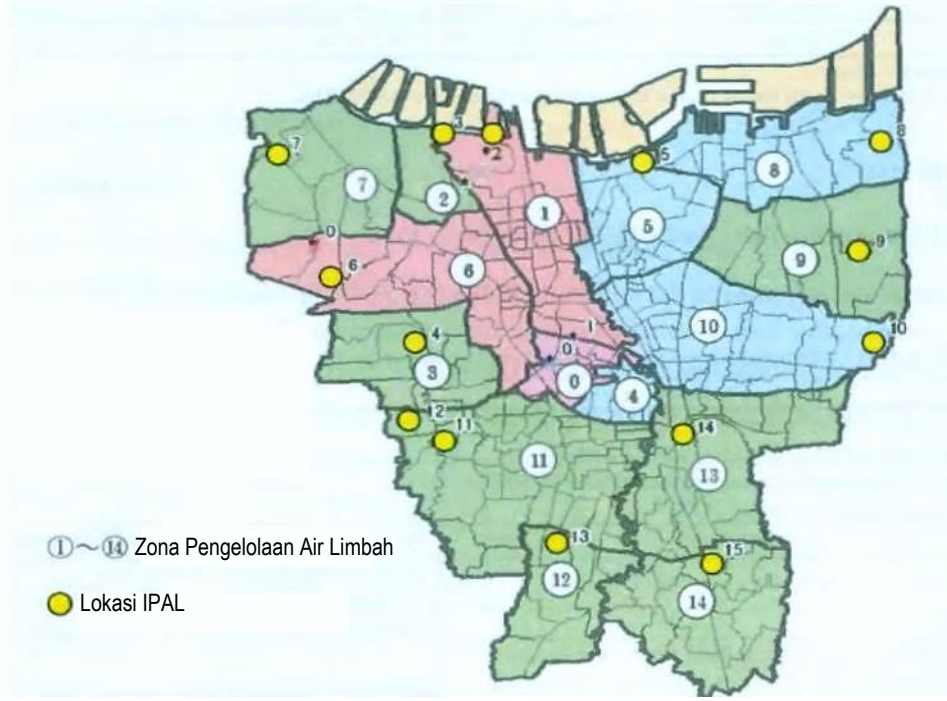

No. Zona	No. IPAL	Lokasi IPAL	Area (ha)	No. Zona	No. IPAL	Lokasi IPAL	Area (ha)
0	0	Kali Krukut	Rencana	8	8	Rencana Waduk Marunda	6
	1	Waduk Setiabudi	Eksisting	9	9	Rencana Situ Rawa Rorotan	2,9
1	2	Waduk Pluit	4	10	10	Pulo Gebang	8,7
2	3	Muara Angke	0,8	11	11	Taman Bendi	3
3	4	Hutan Kota Srengseng	4		12	Rencana Waduk Ulujami	5,9
4		Transfer ke IPAL Zona 10	1,6	12	13	Kebun Binatang Ragunan	3, 1
5	5	Hutan Kota Waduk Sunter Utara	4,6	13	14	Rencana Waduk Kampung Dukuh	5,7
6	6	Duri Kosambi	6	14	15	Rencana Waduk RW 05 Ceger	3,6
7	7	Kamal-Pegadungan	3,9				

Gambar 7.20. Rencana Zona Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan Pengolahan Sistem Terpusat
Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 41 Tahun 2016

Pengelolaan air limbah domestik melalui pengolahan Sistem Setempat memimiliki target rasio pelayanan sampai tahun 2022 sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Upaya Pengelolaan air limbah domestik melalui pengolahan Sistem Setempat dilakukan melalui:

a. memodifikasi tangki septik konvensional yang dapat mengolah sekaligus Black Water dan Grey Water dengan desain yang memudahkan untuk penyedotan lumpur;
b. pembangunan IPAL Komunal;
c. melaksanakan penyedotan lumpur tinja secara berkala di seluruh zona;
d. mengintegrasikan IPLT Duri Kosambi dan IPLT Pulo Gebang dengan IPAL yang baru dibangun; dan
e. mengintegrasikan pengolahan lumpur tinja dari fasilitas setempat dengan IPAL di seluruh zona.

Atas dasar permasalahan dan kesinergian kebijakan pengelolaan air limbah yang telah tersedia, maka KLHS ini merumuskan outcome berupa **cakupan pelayanan pengelolaan air limbah yg meningkat** dengan arahan kebijakan berupa Pegembangan dan Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Terpusat / JSS termasuk diantaranya penanganan sampah terpadu untuk mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air.

Secara ringkas, outcome dan arahan kebijakan sebagai *driver* percapaian target dalam TPB 6 diringkaskan sebagai berikut. Hasil ini telah melalui konsultasi public dan disepakati oleh pemangku kepentingan.

Outcome	Arahan Kebijakan
6.i. Penggunaan air tanah terkendali 6.ii. Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah yg meningkat 6.iii. Kualitas dan kuantitas air yang lebih baik 6.iv. Akses sarpras air bersih yang merata & berkualitas 6.v. Tercapainya penanganan sampah kota terpadu dan menyeluruh	6.1. Efisiensi pemanfaatan air (optimalisasi penggunaan *grey water* untuk kebutuhan air lahan dan penerapan 3R untuk konsumsi domestik) 6.2. Investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air 6.3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu 6.4. Peningkatan dan pemerataan akses sarpras air bersih dari air permukaan 6.5. Peningkatan fasilitas untuk mendukung PHBS 6.6. Penanganan sampah terpadu untuk mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air. 6.7. Pegembangan dan Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Terpusat / JSS 6.8. Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah 6.9. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 6.10. Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)

Pada dasarnya, arahan kebijakan di atas sebagian besar telah terakomodir dalam Program Prioritas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebagai berikut:

- **Revitalisasi sungai**
  Revitalisasi sungai merupakan prioritas kegiatan strategis daerah yang ditujukan sebagai upaya pengendalian banjir. Upaya revitalisasi sungai tercantum dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 melalui serangkaian program dan kegiatan berikut ini:

Kode	Program
A.1.03.02	***Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)*** Arahan kebijakan pengendalian banjir, investasi ekologi dan pengelolaan SDA secara terpadu dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta dapat terakomodir dalam kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah. **Upaya pengendalian banjir/rob/genangan** dilakukan dengan cara normalisasi/restorasi sungai, peningkatan *Flood Forecasting & Warning System*, pembangunan *breakwater* dan bangunan pengaman pantai, kanal banjir, stasiun pompa banjir yang disertai dengan operasional dan pemeliharaanya. **Upaya investasi ekologi** yang dimaksud adalah investasi pembangunan/pengembangan fasilitas yang dapat menggantikan fungsi-fungsi ekologis yang telah hilang atau berkurang kinerjanya seperti pembangunan embung, penampung air, waduk, sumur air tanah, sumur resapan, unit air baku, *ground water tank* (sumur pemanen air hujan) atau drainase vertikal (mengacu konsep Zero Delta Q) dalam rangka meningkatkan kuantitas sumber air baku dan sumber air alternatif bagi DKI Jakarta. Sementara pembangunan polder, kolam retensi, *river banks* (pengolahan air sungai in situ), lagoon yang terintegrasi dengan RTH dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air permukaan sekaligus memberikan ruang suaka bagi habitat burung dan fauna lainnya. **Upaya pengelolaan SDA secara terpadu** secara spesifik belum tercantum dalam program ini, namun hal ini dapat diawali dengan kegiatan perencanaan pengelolaan DAS Tarum, Ciliwung dan Cisadane dari hulu ke hilir. Perencanaan tersebut semestinya dapat mencakup pemetaan potensi kerjasama antar wilayah, pola pemanfaatan ruang bantaran sungai (integrasi pemanfaatan sebagai wisata air, *urban farming*, ekowisata, kawasan konservasi air, sekaligus media edukasi pengelolaan air), dan pola penataan ruang bantaran sungai. Selain itu, pengelolaan SDA secara terpadu juga dapat mengacu pada prinsip ***sustainable urban wetland-based*** yang mencakup pengelolaan mangrove dan pengelolaan sumber air permukaan dari waduk, embung, bak penampung air secara terintegrasi. Meskipun mungkin belum dapat terakomodir dalam masa Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022, namun kegiatan pengembangan area-area percontohan pengelolaan SDA secara terpadu dapat dilaksanakan pada tahapan berikutnya sebagai tindak lanjut dari proses perencanaan. **Proyek-proyek strategis yang direncanakan untuk mendukung upaya ini meliputi:** 1. Normalisasi dan Peningkatan Kapasitas Aliran Sungai di Wilayah Sungai Lintas Provinsi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Berupa DAS Ciliwung 2. Tanggul Pengaman Pantai Pesisir DKI Jakarta 3. Sudetan KBT-Ciliwung 4. Percepatan Penyelesaian Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi

A.3.25.02	***Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*** Kegiatan yang relevan meliputi rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- **Akses menyeluruh terhadap air bersih**

  Peningkatan cakupan akses layanan air bersih dilakukan untuk memberikan kemerataan akses air bersih yang layak terutama dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan cakupan akses layanan air bersih diharapkan dapat menekan laju penggunaan air tanah secara masif. Program dan kegiatan yang relevan untuk mendukung pemerataan akses air bersih ini telah terakomodir dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

Kode	Program
A.1.03.03	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*** Kegiatannya berupa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memperluas cakupan akses pelayanan air bersih. Proyek strategis yang direncanakan yaitu Pembangunan SPAM Jatiluhur (yang terintegrasi hulu-hilir oleh Pemerintah Pusat) dan Penyediaan SIPA untuk SPAM Buaran (IPA Buaran 3 dan Uprating IPA oleh Pemerintah Daerah).
A.1.03.04	***Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional*** Program ini dimaksudkan untuk mendukung pengendalian pencemaran terhadap badan air dan daratan. Kegiatannya mencakup penyediaan sarpras dan pembinaan teknis/pemberdayaan masyarakat. Proyek strategis yang direncanakan yaitu Pembangunan ITF, Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant.
A.2.11.11	***Program Pengelolaan Persampahan*** Untuk mendukung sistem persampahan yang terintegrasi, maka diperlukan penanganan sampah yang memadai terutama pada fasilitas TPA/TPST Regional. Kegiatan yang diakomodir dalam program ini meliputi pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPST Regional dan perencanaan teknis penanganan sampah regional beserta kebijakannya.
A.1.03.05	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah*** Program ini dimaksudkan untuk mendukung pengendalian pencemaran terhadap badan air. Kegiatannya mencakup pembangunan, operasi, pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah; pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat; perencanaan; rehabilitasi/peningkatan SPAL; dan supervisi SPAL. Proyek strategis yang direncanakan yaitu Pengembangan SPAL Terpusat/ *Jakarta Sewerage System* (JSS).
A.1.03.06	***Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase*** Kegiatannya mencakup penyediaan drainase perkotaan dan sarana pendukung beserta operasi dan pemmeliharaannya. Dalam beberapa kali kejadian banjir disebutkan bahwa sistem drainase DKI Jakarta yang belum dikaji ulang menjadi salah satu penyebab terjadinya anomali

aliran air yang tidak menuju ke wilayah hilir. Maka akan lebih baik apabila penyediaan drainase diawali dengan kajian yang dapat menganalisis topografi dan pengaruh *land subsidence* terhadap kinerja drainase yang telah ada.

A.2.11.03	***Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*** Program ini terfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan dua kegiatan: 1. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2. Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
A.2.11.08	***Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat*** Kegiatannya menyasar pada lembaga masyarakat yang mencakup pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

Selain program-program di atas, Pemprov. DKI Jakarta telah melakukan upaya lain dalam rangka melakukan efisiensi pemanfaatan air melalui penerapan kebijakan Bangunan Gedung Hijau. Kebijakan Bangunan Gedung Hijau diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 38/2012, dengan salah satu persyaratan harus melakukan efisiensi pemanfaatan air sekaligus mengurangi limpasan air yang disalurkan ke sistem drainase perkotaan dengan menyediakan dari sistem penampungan air hujan, sumur resapan, kolam resapan pada bangunan tersebut.

- **Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)**
  Peningkatan tarif NPAT dimaksudkan sebagai langkah pengendalian pemanfaatan air tanah secara berlebihan. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengurangi potensi bencana turunan seperti penurunan muka tanah (land subsidence) yang memicu amblesan, dan kekeringan akibat tidak ada upaya *recharge* sumber air cadangan. Program dan kegiatan yang relevan untuk mendukung upaya ini meliputi:

Kode	Program
A.3.29.02	***Program Pengelolaan Aspek Kegeologian*** Kegiatan yang relevan untuk upaya ini mencakup Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah; Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah. Arahan kebijakan *Zero Delta Q* melalui pengembangan sumur resapan merupakan salah satu upaya pengendalian banjir sekaligus upaya melakukan *recharge* air tanah.

- **Penyediaan taman dan ruang terbuka hijau**
  Keterkaitan Taman dan RTH dengan air bersih tidak dapat dihubungkan secara langsung. Namun, besaran alokasi ruang hijau dan jenis vegetasinya diperkirakan mampu mempengaruhi siklus air dan iklim pada wilayah tersebut dan sekitarnya.

Selain itu, ketersediaan taman dan RTH merupakan kebutuhan yang krusial untuk memberikan ruang publik yang layak, nyaman dan aman bagi masyarakat DKI Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan taman dan ruang terbuka hijau dimasukan dalam kegiatan strategis daerah. Upaya penyediaan taman dan RTH diakomodir dalam program berikut ini:

Kode	Program
A.2.11.04	***Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)*** Kegiatan yang terakomodir dalam program ini mencakup pengelolaan RTH dan Taman Kehati lainnya. Meskipun tidak termasuk dalam program ini, Pemprov. DKI Jakarta telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan ruang hijau. Upaya tersebut digaungkan melalui kebijakan Bangunan Gedung Hijau yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 38/2012. Persyaratan Gedung Hijau (bangunan baru) meliputi 5 aspek yaitu efisiensi energi, efisiensi air, kualitas udara dalam ruang, pengelolaan lahan dan limbah, pelaksanaan kegiatan konstruksi. Berkaitan dengan kehati dan ruang hijau, Gedung Hijau pada luasan tertentu harus menerapkan penanaman vegetasi alami dengan metode *green roof*, *interior scape*, dan *vertical greenery*. Penerapan gedung hijau ini diharapkan dapat berkontribusi pada perlambatan laju emisi GRK sekaligus sebagai media suaka bagi spesies umum.

Sumber:
diadaptasi dari FGD Tematik KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta (2020), Pergub DKI Jakarta No.38/2012, Pointer Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta (Bappeda, 2021) dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pemerintah dan Non Pemerintah (Bappeda, 2020.

7.3.4 Skenario TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas

TPB 4 Pendidikan Berkualitas memiliki beberapa konsen permasalahan. Yang pertama tentunya adalah berkaitan dengan kualitas sarana pendidikan. Hal ini ditunjukan dengan indikator 4.1.1 (a) yaitu persentase sekolah terakreditasi A. Pada tahun 2018, capaian indikator ini hanya mencapai 62,17%, sementara target capaian 2022 mencapai 100%. Hasil proyeksi capaian berdasarkan regresi linier dari pencapaian tahun sebelumnya didapatkan bahwa pada tahun 2022 hanya mencapai 91% atau terdapat gap 9% dari target seharusnya. Oleh karenanya dibutuhkan skenario untuk upaya tambahan sehingga pada tahun 2022 dapat mencapai 100%.

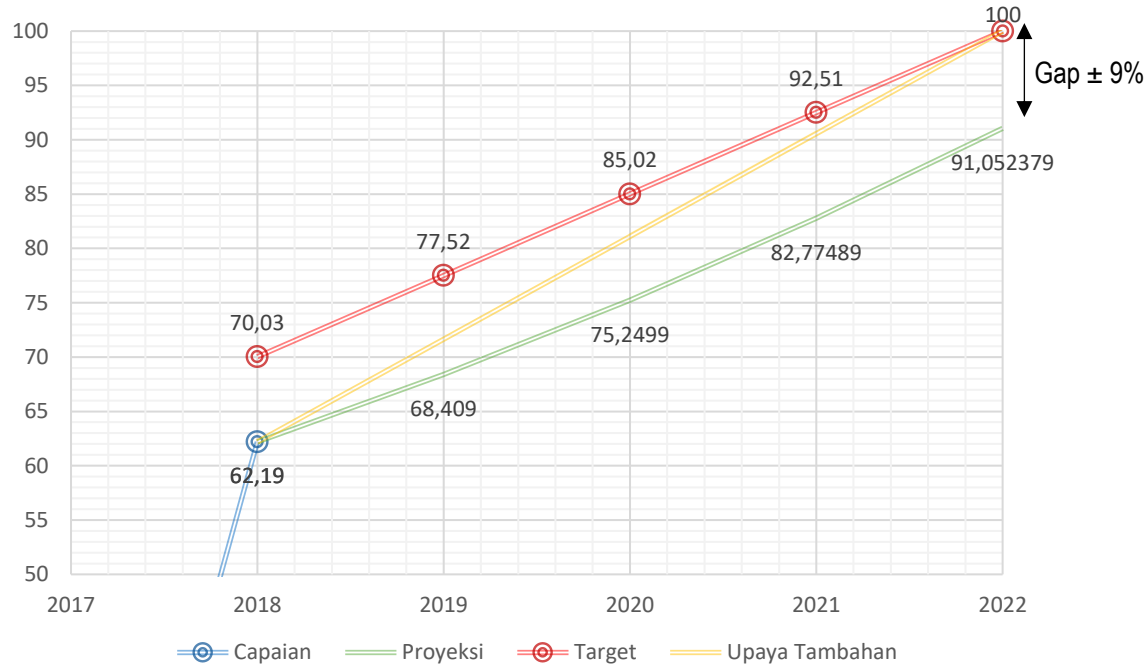

Gambar 7.21. Proyeksi dan Target Indikator Persentase Sekolah terakreditasi A
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Dalam rangka mencapai target tersebut, maka KLHS merumuskan *outcome* berupa **sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas.** Hal ini termasuk untuk peningkatan prasarana dan sarana gedung sesuai standar terutama terkait kondisi ruang belajar yang tidak berbanding lurus dengan banyaknya peserta didik serta keamanan bangunan gedung sekolah dari bahaya kebakaran. Sarana dan prasarana teknologi informasi juga dirasa penting untuk menunjang proses pembelajaran. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir pembelajaran daring sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dilakukan yang kemungkinan akan berlangsung hingga tahun 2021. artinya penyiapan sarana dan prasaranan teknologi informasi untuk pendidikan tidak hanya terbatas pada institusi sekolah namun juga ke masyarakat secara luas.

Outcome sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. didukung melalui serangkaian arahan kebijakan terkait yaitu:

1) Membangun sistem pendidikan yang melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka pajang
2) Meningkatkan kualitas sarana penunjang pendidikan sesuai standar dan keamanan gedung
3) Meningkatkan akses teknologi dan informasi
4) Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi
5) Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, matematikan dan sains serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi
6) Penerapan pendidikan aman bencana

Masalah pendidikan juga berkenaan dengan kualitas pengajar,hal ini dapat ditunjukan melalui indikator 4.c.1* yaitu Persentase guru bersertifikat pendidik. Pada tahun 2019, capaian ini hanya 49,94% dimana mengalamai tren penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 55,94%. dari penurunan presentase tersebut, maka proyeksi secara linier menunjukan akan terjadi penurunan hingga tahun 2022 hingga mencapai 32%. proyeksi sederhana ini menunjukan bahwa penurunan capaian indikator ini perlu perhatian sehingga pada akhir tahun 2022 dapat mencapai target 100%.

Oleh karenanya, dibuat skenario upaya tambahan sehingga pada tahun 2020 dapat mencapai target yang ditetapkan. Skenario upaya tambahan ini dirumuskan melalui proporsionalitas capaian tiap tahun hingga mencapai 100% dengan *outcome* yaitu kualitas kompetensi guru sesuai standar.

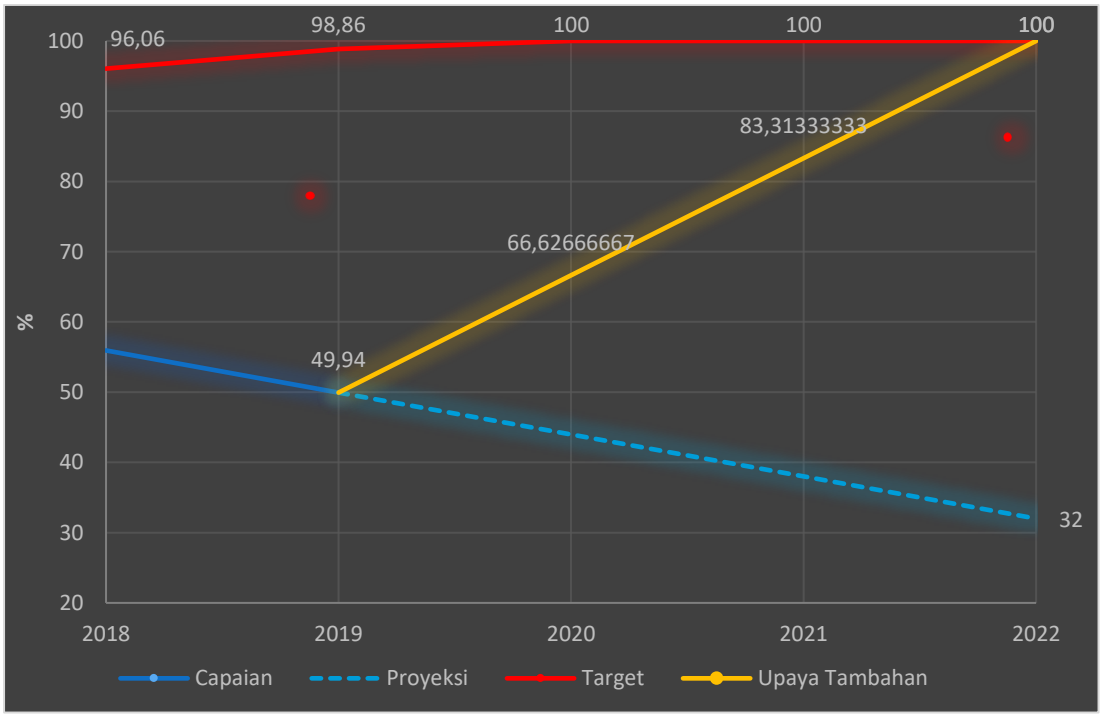

Gambar 7.22. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Upaya tambahan yang dilakukan dirumuskan melalui outcome **kualitas kompetensi guru sesuai standar** dengan arahan kebijakan berupa peningkatkan SDM Guru melalui akses pelatihan dan sertifikasi dengan memperhatikan kesejahteraannya. Hal ini termasuk dalam pemerataan kesejahteraan baik bagi guru yang berstatus ASN maupun tidak.

Permasalahn pendidikan lainnya yaitu partisipasi anak didik melalui pendidikan fomal dan informal. Hal ini juga terkait dengan peningkatan SDM baik untuk sektor lain misalkan ketenagakerjaan (ekonomi – TPB 8). Sehingga dengan outcome **kenaikan partisipasi pendidikan formal dan informal segala jenjang** diharapkan mampu meningkatkan SDM di DKI Jakarta. Arahan kebijakan yang disulkan yaitu meningkatkan akses terhadap pendidikan formal untuk seluruh jenjang pendidikan dan informal yang inklusif melalui kerjasama perguruan tinggi maupun kemitraan. Hal ini juga terkait erat fokus inklusif gender (TPB 5) maupun bagi kaum disabilitas.

Secara ringkas, outcome dan arahan kebijakan bagi TPB 4 sesuai dengan kesepakatan konsultasi public tanggal 29 September adalah sebagai berikut.

Outcome	Arahan Kebijakan
4.i. Kenaikan partisipasi pendidikan formal segala jenjang 4.ii. Kualitas kompetensi guru sesuai standar	4.1. Meningkatkan SDM Guru melalui akses pelatihan dan sertifikasi dengan memperhatikan kesejahteraannya. 4.2. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pendidikan sesuai standar dan keamanan Gedung 4.3. Meningkatkan akses teknologi dan informasi 4.4. Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi

Outcome	Arahan Kebijakan
4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan formal untuk seluruh jenjang pendidikan dan informal yang inklusif melalui kerjasama perguruan tinggi maupun kemitraan 4.6. Membangun sistem pendidikan melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka pajang 4.7. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, matematikan dan sains serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi 4.8. Penerapan pendidikan aman bencana

7.3.5 Skenario TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Permasalahan utama pada TPB 1 adalah meningkatnya angka kemiskinan terutama karena kejadian pandemi COVID-19. Melihat capaian angka kemiskinan dari tahun ke tahun yang semakin menurun, maka proyeksi capaian dalam kondisi BAU secara linier juga mengalami penurunan. Hal ini hampir mencapai target capaian RAD pada tahun 2020 yaitu 2,78%. Namun demikian, terjadinya pandemic COVID-19 mengakibatkan angka kemiskinan DKI Jakarta naik lebih dari 1%. Hal ini tergambar dari proyeksi INDEF untuk angka kemiskinan DKI Jakarta pada akhir tahun 2020 akan mencapai 4,45%. INDEF juga memprediksikan bahwa angka kemiskinan perlahan menurun dan pada akhir tahun 2022 mencapai 3,45%. Hal ini tentunya mengakibat simpangan pada target RAD TPB maupun RPJMD 2017-2022 semakin jauh. Oleh karenanya, perubahan RPJMD 2017-2022 perlu menyesuaikan kondisi ini.

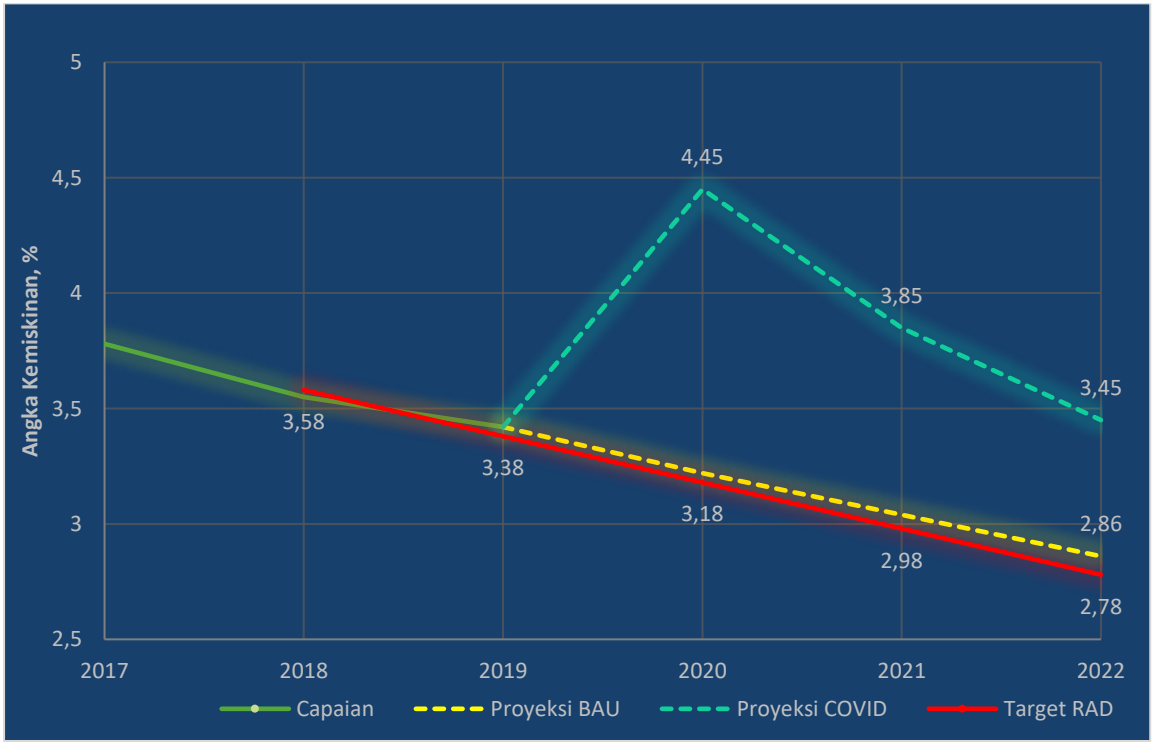

Gambar 7.23. Angka Kemiskinan DKI Jakarta
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Sementara itu, meskipun belum terdapat data terbaru untuk tingkat kemiskinan baik secara nasional dan provinsi dalam rangka melihat kontribusnya, dalam laman (http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard) didapat bahwa dalam 5 tahun terakhir, angka kemiskinan di DKI Jakarta jauh di bawah angka kemiskinan nasional,

bahkan kurang dari setengahnya. Hal ini menandakan bahwa secara umum warga DKI Jakarta memiliki taraf kehidupan yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

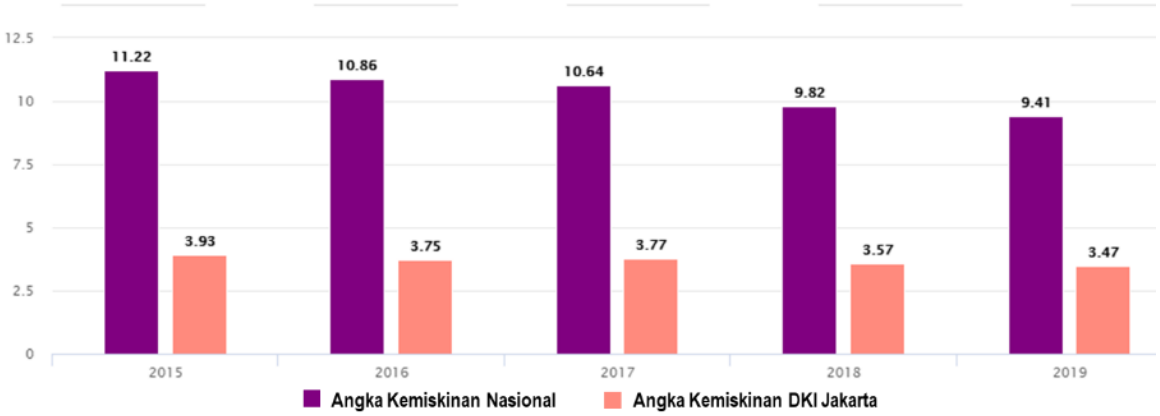

Gambar 7.24. Angka Kemiskinan Nasional dan DKI Jakarta
Sumber: SDGs Dashboard, http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard diakses Oktober 2020

Dalam hal pemulihan ekonomi termasuk diantaranya penurunan angka kemiskinan, maka dalam kondisi pandemi ini, penting untung menerapkan *outcome* **Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) tepat sasaran.** Outcome ini dimaksudkan untuk memulihakn perekonomian masyarakat sekaligus menjaga masyarakat rentan supaya tidak menjadi miskin. Rekomendasi arahan kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Memastikan lingkungan yang berketahanan terhadap bencana dan krisis iklim untuk meminimalkan dampak (ekonomi, sosial)
2) Perbaikan tata kelola sistem pendataan penduduk utamanya untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 (Akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat)
3) Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin

Sementara itu, permasalahan kemiskinan erat kaitannya dengan pelayanan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan. Profil mengenai sektor kesehatan dan pendidikan telah dibahas sebelumnya pada TPB 3 dan TPB. Namun, fokus pelayanan dasar pada TPB 1 lebih kepada masyarakat miskin. Oleh karenanya disusun outcome KLHS yaitu **akses, layanan Kesehatan & Pendidikan merata, meningkat berkualitas & terjangkau**, melalui arahan kebijakan sebagai berikut:

1) Meningkatkan akses cakupan Kesehatan universal yang berkualitas dan terjangkau
2) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan pada tingkat dasar & menengah tanpa diskriminasi, bebas biaya dan berkualitas

Melihat lebih lanjut kondisi masyarakat miskin di DKI Jakarta, permasalahan pemukiman kumuh masih cukup tinggi ditengah metropolisnya kota Jakarta. Berdasarkan capaian pada indikator 1.4.1 (f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan, pada tahun 2019 masih mencapai 14,4% dari target RAD sebesar 12,14%. Apabila dilihat lebih lanjut kecenderungancapaiannya, terlihat bahwa ada tre menurun namun tidak signifikan. Berdasarkan hasil proyeksi linier didapat bahwa proyeksi tahun 2022 hanya mencapai 11,08% padahal target RAD mencapai 4,97%. Sehingga skenario disusun dengan upaya tambahan dimana secara proporsional capaian setiap tahun dirumuskan hingga tercapai 4,97% pada akhir tahun 2022.

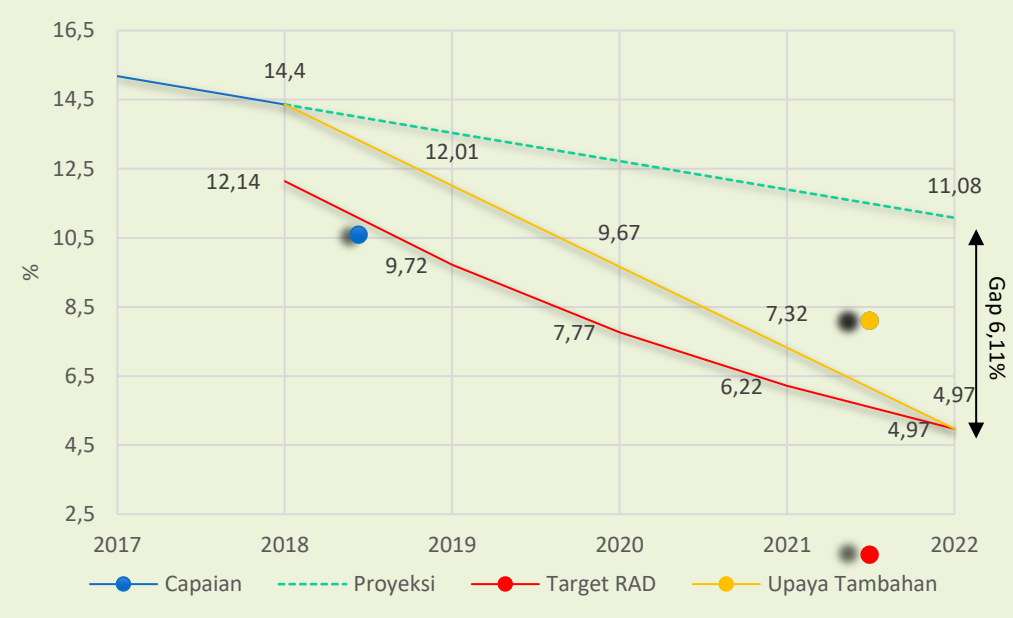

Gambar 7.25. Proyeksi dan Target Persentase Rumah Tangga Kumuh DKI Jakarta
Sumber: Hasil Analisis, 2020

Upaya tambahan dirumuskan melalui *outcome* Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak. Dimana arahan kebijakan yang diusulkan berupa mengembangkan hunian yang bersih, sehat, aman, nyaman dan terjangkau melalui kolaborasi antar pihak sesuai *good governance* (transparan, akuntabel, responsive, inklusif, representatif dan partisipatif) dalam rangka mengurangi *backlog* hunian. Hal ini juga salah satunya bertujuan untuk menciptakan dan mendukung PHBS.

Secara ringkas, outcome dan arahan kebijakan yang diusulkan untuk TPB 1 adalah sebagai berikut. Perlu digarisbawahi bahwa setiap arahan kebijakan tidak hanya berdiri sendiri namun juga turut berkontribusi pada outcome lainnya dalam TPB 1 serta interlink dengan TPB lain.

Outcome	Arahan Kebijakan
1.i Akses, layanan Kesehatan & Pendidikan merata, meningkat berkualitas & terjangkau 1.ii Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak 1.iii Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) tepat sasaran	1.1. Meningkatkan akses cakupan Kesehatan universal yang berkualitas dan terjangkau 1.2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan pada tingkat dasar & menengah tanpa diskriminasi, bebas biaya dan berkualitas 1.3. Mengembangkan hunian yang bersih, sehat, aman, nyaman dan terjangkau melalui kolaborasi antar pihak sesuai *good governance* (transparan, akuntabel, responsive, inklusif, representatif dan partisipatif) dalam rangka mengurangi *backlog* hunian 1.4. Memastikan lingkungan yang berketahanan terhadap bencana dan krisis iklim untuk meminimalkan dampak (ekonomi, sosial) 1.5. Perbaikan tata kelola sistem pendataan penduduk utamanya untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 1.6. *Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin*

7.3.6 Skenario TPB 2: Tanpa Kelaparan

Pada dasarnya, pemenuhan pangan masyarakata secara umum di DKI Jakarta telah mencukupi. Hal ini sedikit tergambar dari analisis daya dukung dan daya tampung pangan yang masih mencukupi meskipun perlu didukung dengan pasokan bahan pangan dari luar Jakarta. Namun demikian, fokus permasalahan TPB 2. Tanpa Kelaparan yaitu bagaimana pemerataaan kecukupan gizi masyarakat dapat terpenuhi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab 6.1.2.2, permasalahan mendasar adalah kecukupan gizi terutama pada anak usia dini. Lebih lanjut berdasarkan hasil data capaian TPB 2019, angka prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun/balita sebesar 11%. Meskipun dalam RAD TPB indikator stunting tidak dimasukkan sehingga belum ditentukan targetnya karena merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan, namun mengingat bahwa angka prevalensi stuting perlu ditekan dalam rangka menuju Jakarta bebas stunting maka harus ada upaya tambahan yang dilakukan. Selain itu, permasalahan stunting berikut pemenuhan pemerataan gizi masyarakat juga menjadi prioritas dalam pembahasan pada konsultasi publik TPB prioritas.

Melihat dari capaian nasional dan dibandingkan dengan DKI Jakarta, dari laman SDGs Dashboard Bappenas, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari tidak begitu jauh berbeda dari capaian nasional meskipun tren dari tahun ke tahun menurun. Artinya, masih banyak penduduk DKI Jakarta yang belum tercukupi gizinya.

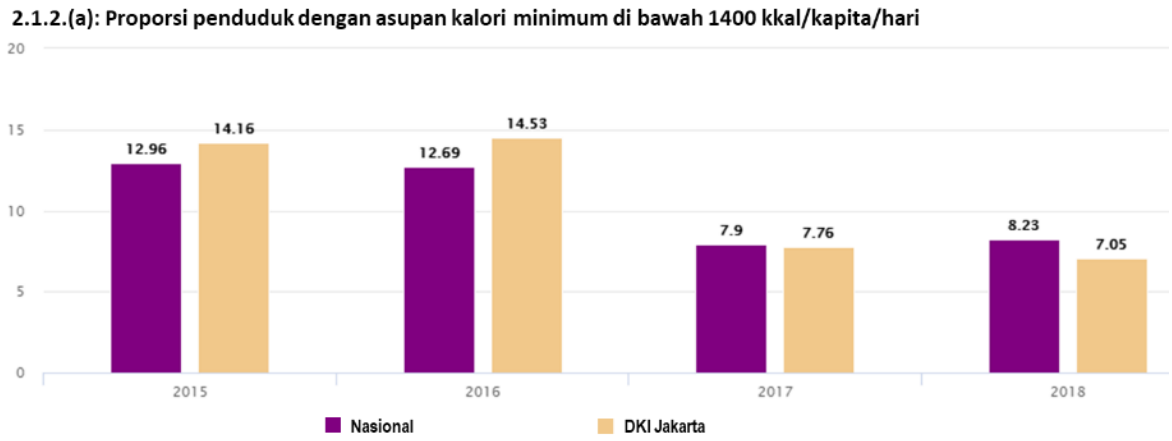

Gambar 7.26. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori dibawah Minimum Nasional dan DKI Jakarta.
Sumber: SDGs Dashboard, http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard diakses 2020

Oleh karena itu, KLHS ini merumuskan 2 (dua) *outcome* bagi TPB 2 dengan arahan kebijakan sebagai berikut:

Outcome	Arahan Kebijakan
2.i Status gizi yang meningkat & merata 2.ii Ketahanan pangan yang terjamin dan stabil	2.1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai *good governance* 2.2. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk, stunting, ASI eksklusif 2.3. Pemanfaatan Ruang untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. 2.4. Peningkatan layanan posyandu untuk menjaring anak stunting dan pemberian ragam makanan tambahan

7.4 Skenario Sumber Daya Pembiayaan

Skenario sumber daya pembiayaan dirumuskan berdasarkan potensi-potensi pembiayaan yang ada di DKI Jakarta. Potensi sumber daya pembiayaan diidentifikasi berdasarkan sumber pemerintan dan non-pemerintah. Sumber Pemerintah terdiri dari Pembiayaan untuk Organisasi Perangkat Daerah dan sumber pembiayaan lain seperti dana hibah dan bantuan sosial. Sementara sumber pendanaan non-pemerintah diidentifikasi dari mitra pembangunan. Selain itu, pada tahun 2020 ini Pemerintah DKI Jakarta membuat platform kolaborasi yaitu Jakarta Development Collaboration Network (JDCN) untuk menjadi wadah bagi lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta masyarakat dalam membangun Provinsi DKI Jakarta.

7.4.1 Potensi Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah secara umum berasal dari APBD. Terdapat sekitar 52 OPD dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dimana terbagi dalam 37 Bidang Urusan sebagai berikut.

Tabel 7.9 Bidang Urusan Pemerintahan dan Institusinya

1	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Disdukcapil	19	**Komunikasi dan Informatika:** Diskominfo
2	**Energi dan Sumber Daya Mineral:** DBM, DSDA, Disnakertransgi	20	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:** DPPKUMKM
3	**Kearsipan:** Dispusip	21	**Lingkungan Hidup:** DLH
4	**Kebudayaan:** Disbud	22	**Pangan:** DKPKP
5	**Kehutanan:** Distamhut	23	**Pariwisata:** Disparekraf
6	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:** BPBD, BPKP, SatpolPP	24	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:** BPLH, DBM, Discitata, DSDA
7	**Kepemudaan dan Olah Raga:** Dispora	25	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:** DPPAPP
8	**Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan:** BKD, BPSDM	26	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:** DPPAPP
9	**Kesatuan Bangsa dan Politik:** BKBP	27	**Penanaman Modal:** DPMPTSP
10	**Kesehatan:** Dinkes	28	**Pendidikan:** Disdik
11	**Penelitian dan Pengembangan:** BPPD	29	**Kelautan dan Perikanan:** DKPKP
12	**Keuangan:** BPD, BPAD, BPKD, Biro Kerjasama Daerah, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	30	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:** DPRKP
		31	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:** DPPAPP
13	**Kewilayahan:** Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara	32	**Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:** BPPBJ, BPBUMD, Rokum, Biro Kepala Daerah, Biro Kerjasama Daerah, Biro Kesos, Biro ORB, BPLH, Biro Pemerintahan, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Perekonomian dan Keuangan, Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD
14	**Persandian:** Diskominfo	33	**Sosial:** Dinsos
15	**Pertanian:** DKPKP	34	**Statistik:** Diskominfo
16	**Perdagangan:** DPPKUMKM	35	**Tenaga Kerja:** Disnakertransgi
17	**Perencanaan:** BPPD	36	**Perpustakaan:** Dispusip
18	**Perhubungan:** Dishub	37	**Perindustrian:** DPPKUMKM

Dari OPD yang ada di DKI Jakarta, RAD TPB telah mengidentifikasi OPD kunci untuk masing-masing indikator TPB, dimana terdapat total terdapat 30 OPD yang menjadi OPD kunci. Meskipun demikian, OPD

lainnya secara langsung maupun tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap pencapaian indikator TPB berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Untuk melihat bagaimana potensi pembiayaan dari OPD, berikut ini diidentifikasi anggaran tiap OPD yang terkait pada TPB Prioritas berikut indikator TPBnya. Perlu digarisbawahi bahwa anggaran pada masing-masing OPD ini merupakan anggaran total keselurahn tiap OPD untuk satu tahun perencanaan yaitu Anggaran APBD Revisi 2020, APBD 2021, dan Pagu Indikatif 2022. Total anggaran ini tidak mengindikasikan secara spesifik kegiatan atau program apa saja yang ada didalamnya, termasuk indikator capaiannya. Sementara indikator TPB yang tercantum dalam analisis ini merupakan indikator yang menjadikan tanggung jawab dari OPD terkait.

Berikut ini dijelaskan OPD-OPD yang menjadi OPD kunci dalam TPB prioritas beserta indikator—indikator yang menjadi kewenangannya.

7.4.1.1 TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera memiliki 4 (empat) OPD kunci yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BKBP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). dalam TPB 3, BKBP berperan dalam indikator prevalensi penyalahgunaan narkoba, dengan anggaran yang tidak begitu besar. Sementara itu, Dinkes menjadi OPD kunci untuk 25 indikator di TPB 3. Hal ini sesuai dengan kewenangaannya di bidang kesehatan. Dengan anggaran yang cukup besar, Dinkes menjadi salah satu OPD yang memegang peranan penting dalam penanganan pandemic COVID-19.

Disisi lain, terdapat DPAPP sebagai OPD kunci dalam TPB 3 yang fokus kepada masalah reproduksi perempuan, terutama remaja dan usia produktif. Lalu Satpol PP untuk penanganan distribusi minuman keras. Secara lebih jelas, di bawah disajikan penganggaran keseluruhan untuk satu OPD beserta indikator TPB yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 7.10 OPD Kunci pada TPB 3 beserta Alokasi Anggarannya

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD (Rupiah)	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	**2020**	34.655.463.349
			2021	94.570.409.714
			2022	140.298.638.486
			Akumulatif 3 tahun	269.524.511.549
Dinas Kesehatan				
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	**2020**	8.266.123.230.121
			2021	9.325.170.621.400
		2. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	**2022**	11.386.741.275.129
			Akumulatif 3 tahun	28.978.035.126.650
		3. Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar		
		4. Angka Kematian Ibu (AKI)		
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup		
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD (Rupiah)	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup		
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS		
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Jumlah Kota/Kabupaten yang Mencapai Target Case Detection Rate (CDR) di Layanan TB Sesuai Standar		
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)		
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)		
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD (Rupiah)	
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan		
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)		
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)		
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	NA		
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD (Rupiah)	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	1. Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan		
		2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk		
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan		
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	NA		
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat		
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar		
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar		
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk				
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan	**2020**	544.705.338.168
			2021	780.434.648.502
			2022	656.892.042.640

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD (Rupiah)	
	berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	menggunakan alat kontrasepsi metode modern	**Akumulatif 3 tahun**	1.982.032.029.310
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)		
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern		
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)		
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate		
Satuan Polisi Pamong Praja				
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	**2020**	294.996.753.502
			2021	1.203.177.715.536
			2022	1.322.695.684.708
			Akumulatif 3 tahun	2.820.870.153.746

7.4.1.2 TPB 8: Pekerjaaan dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 8 Pekerjaaan dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki 4 (empat) OPD Kunci yaitu Biro Perekonomian, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Secara umum, Biro Perekonomian berperan dalam korrdinasi pertumbuhan ekonomi secara makro, sementara dinass lainnya merupakan pelaksana kegiatan ekonomi.

Tabel 7.11 OPD Kunci pada TPB 8 beserta Alokasi Anggarannya

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Biro Perekonomian				
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pertumbuhan PDRB	**2020**	1.433.429.979
			2021	1.076.685.937
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Pertumbuhan PDRB	**2022**	1.460.893.214
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Pertumbuhan PDRB	**Akumulasi 3 tahun**	3.971.009.130
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa		
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)		
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	**2020**	373.022.092.066
			2021	404.922.097.129
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	**2022**	445.619.353.843
			Akumulasi 3 tahun	1.223.563.543.038
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah Wisatawan Nusantara		
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata		
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	**2020**	217.616.101.681
			2021	350.955.615.665
			2022	357.034.958.171
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	**Akumulasi 3 tahun**	925.606.675.517
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi				
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	**2020**	250.674.757.394
			2021	428.637.509.604
			2022	469.666.418.446
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal	**Akumulasi 3 tahun**	1.148.978.685.444
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian		
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran		
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)		
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3		

7.4.1.3 TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Secara umum, TPB 6 fokus pada kualitas dan kuantitas air serta penyediaan sarana dan prasarana air. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi perencanaan dalam pengelolaan DAS. Sementara Dinas Kesehatan berperan dalam kegiatan peningkatan kesehatan melalui STBM dan gaya hidup sehat. OPD yang paling dalam TPB 6 merupakan Dinas Sumber Daya Air. Dengan anggaran yang cukup besar, DSA dapat memaksimalkan pengelolaan dan penggunaan air untuk masyarakat. Sebenarnya, Dinas-dinas lain juga turut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian TPB 6. Sebagai contoh yaitu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang berperan dalam menyediaan infrastruktur ekologis untuk penyerapan air.

Tabel 7.12 OPD Kunci pada TPB 6 beserta Alokasi Anggarannya

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	**2020**	56.293.952.322
			2021	155.549.571.683
			2022	47.456.356.482
			Akumulasi 3 tahun	259.299.880.487
Dinas Kesehatan				
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	**2020**	8.266.123.230.121
			2021	9.325.170.621.400
			2022	11.386.741.275.129
			Akumulasi 3 tahun	28.978.035.126.650
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		
Dinas Sumber Daya Air				
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih	**2020**	3.816.731.132.929
			2021	2.119.416.904.572
			2022	5.468.868.356.740
			Akumulasi 3 tahun	11.405.016.394.241

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku		
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	1. Presentase cakupan pelayanan air bersih		
		2. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan		
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah		
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Cakupan pelayanan air limbah		
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah		
6.3.1.(a)	Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Cakupan pelayanan air limbah		
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah		
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku		
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah		
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri		
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk		
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya		
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%		

7.4.1.4 TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas

Dinas yang menjadi OPD Kunci dalam TPB 4 hanya Dinas Pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, untuk meningkatkan capaian pada TPB 4, perlu kontribusi dari institusi lain seperti Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk pendidikan informal dan Diskominfo untuk penyediaan sarana prasarana jaringan teknologi.

Tabel 7.13 OPD Kunci pada TPB 4 beserta Alokasi Anggarannya

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Dinas Pendidikan				
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	**2020** **2021** **2022** **Akumulasi 3 tahun**	7.250.038.175.155 12.800.724.795.484 13.480.373.316.048 33.531.136.286.687
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase Sekolah terakreditasi A		
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase Sekolah terakreditasi A		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase Sekolah terakreditasi A		
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat		
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat		
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se-derajat	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA		
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede-rajat		
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta		
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)		
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede-rajat	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA		
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede-rajat		
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sede-rajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sede-rajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Persentase Sekolah terakreditasi A		
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	1. Persentase guru yang kompeten		
		2. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik		

7.4.1.5 TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam TPB 1. Tanpa Kemiskinan, hal pertama yang menjadi fokus adalah ketahanan warga miskin terhadap bencana. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Meskipun demikian, BPBD juga dibantu oleh Dinas Sosial dalam hal penyaluran bantuan. Sementara itu, TPB 1 juga berkaitan erat dengan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan sehingga Dinkes dan Disdik turut terlibat. Terdapat pula OPD kunci lainnya seperti DSDA untuk penyiapan sarana dan prasarana sanitasi, DPAPP untuk pemberdayaan perempuan dan Dinakertrans.

Tabel 7.14 OPD Kunci pada TPB 1 beserta Alokasi Anggarannya

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	**2020**	42.182.942.892
			2021	109.271.362.259
			2022	54.198.458.189
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	**Akumulasi 3 tahun**	205.652.763.340
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi		
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana		
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		
Dinas Kesehatan				
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	**2020**	8.266.123.230.121
			2021	9.325.170.621.400
			2022	11.386.741.275.129
			Akumulasi 3 tahun	28.978.035.126.650
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar		
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan		
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah		
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk				
1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua		**2020**	544.705.338.168
			2021	780.434.648.502

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
	cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	**2022**	656.892.042.640
			Akumulasi 3 tahun	1.982.032.029.310
Dinas Pendidikan				
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	**2020**	7.250.038.175.155
			2021	12.800.724.795.484
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sedera-jat	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	**2022**	13.480.373.316.048
			Akumulasi 3 tahun	33.531.136.286.687
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA		
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah		
Dinas Sosial				
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	**2020**	415.261.373.725
			2021	641.388.417.795
			2022	680.285.398.670
			Akumulasi 3 tahun	1.736.935.190.190
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Pro-gram Keluarga Harapan		
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana		
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan		
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah		
Dinas Sumber Daya Air				
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Presentase cakupan pelayanan air bersih	**2020**	3.816.731.132.929
			2021	2.119.416.904.572
			2022	5.468.868.356.740
			Akumulasi 3 tahun	11.405.016.394.241
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah		
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi				
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerja-an (Pekerja Formal dan Informal)	**2020**	250.674.757.394
			2021	428.637.509.604
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	**2022**	469.666.418.446
			Akumulasi 3 tahun	1.148.978.685.444

7.4.1.6 TPB 2: Tanpa Kelaparan

TPB 2 Tanpa Kelaparan memiliki 2 (dua) OPD kunci yaitu Dinas Kesehatan untuk penanganan kekurangan gizi terutama pada anak, serta Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian untuk kecukupan dan ketahanan pangan.

Tabel 7.15 OPD Kunci pada TPB 2 beserta Alokasi Anggarannya

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
Dinas Kesehatan				
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan	**2020**	8.266.123.230.121
			2021	9.325.170.621.400
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**2022**	11.386.741.275.129
			Akumulasi 3 tahun	28.978.035.126.650
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan		

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Penganggaran Keseluruhan dalam 1 OPD	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif		
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian				
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	**2020**	382.755.668.053
			2021	507.397.994.795
		2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	**2022**	536.868.599.604
			Akumulasi 3 tahun	1.427.022.262.452
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari		
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	1. Angka Konsumsi Ikan		
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		

7.4.2 Potensi Sumber Pembiayaan lain Pemerintah Daerah

Potensi pembiayaan lain pemerintah daerah diidentifikasi dari penganggaran lain diluar penganggaran tiap OPD yaitu berupa Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan identifikasi dari 3 (tiga) tahun penganggaran yaitu 2018 hingga 2020, baik belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan sebagaimana gambar di bawah ini.

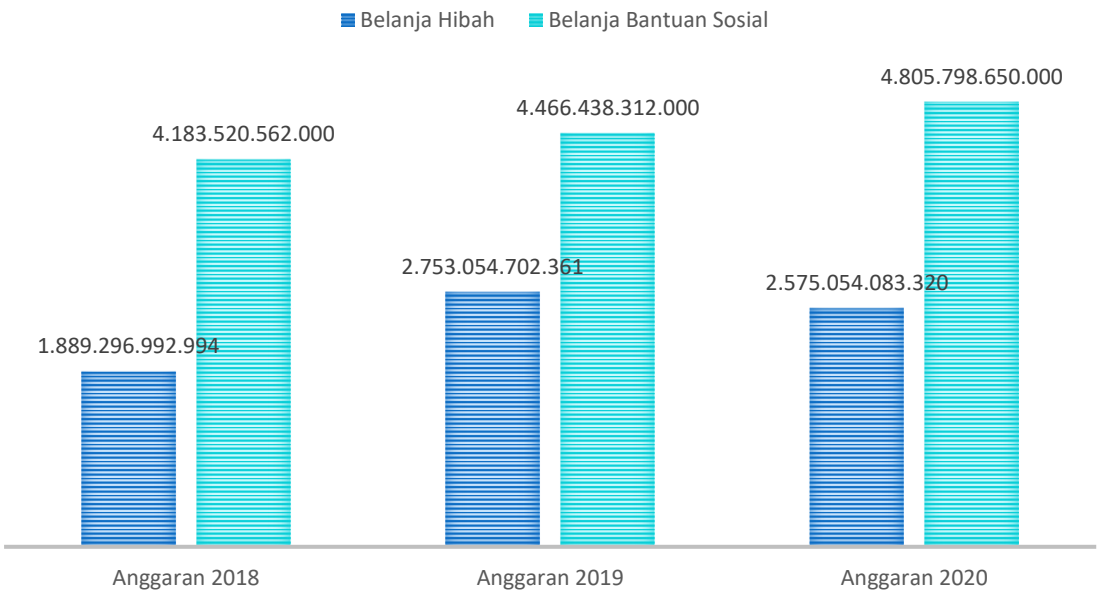

Gambar 7.27. Alokasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial 2018-2020
Sumber: Bappeda, 2020

Secara umum, setiap tahunnya dana hibah dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah berbagai jenjang pendidikan serta bantuan hibah ke Lembaga/organisasi masyarakat. Sementara, belanja bantuan sosial paling besar digunakan untuk membantu warga miskin melalui Kartu Jakarta Pintar. Secara tidak langsung, anggaran belanja ini telah membantu pencapaian TPB 4 dan TPB 1. Melihat potensi belanja dari dana hibah dan bantuan sosial, maka pencapaian TPB prioritas lainnya berpotensi dialokasikan melalui dana-dana ini.

7.4.3 Potensi Dukungan Mitra Pembangunan

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan secara nasional memiliki banyak organisasi dan Lembaga non-pemerintahan yang turut berkontribusi pada pembangungan Jakarta. Mitra-mitra pembangunan ini baik secara langsung maupun tidak langsung membantu pencapaian TPB, terutama 6 TPB Prioritas. Pada sub bab ini akan diidentifkasi mitra pembangunan yang kegiatan atau programnya berperan dalam pencapaian 6 TPB Prioritas. Dalam sub bab ini tidak secara detil menjelaskan nominal pembiayaan yang dikontribusikan, namun secara implisit mitra-mitra pembangunan ini berpotensi dapat mempercepat pencapaian TPB prioritas.

Gambar 7.28. Ilustrasi Singkat Kontribusi Mitra Pembangunan pada 6 (enam) TPB Prioritas
Sumber: Analisis dari (SDGs DKI Jakarta, 2020)

1. Untuk TPB 3, mitra pembangunan yang berkontribusi yaitu Platform Muria, Rumah Zakat, IBI bersama masyarakat, IPPI, Smoke Jakarta dan LKNU
2. TPB 8 yaitu: Platform Muria, Rumah Zakat, IBI bersama masyarakat, IPPI, Smoke Jakarta, dan LKNU
3. TPB 6 yaitu Yayasan Karina, Platform Muria, PAM Jaya, GIZ, Jakarta Berketahanan
4. TPB 4 yaitu Yayasan Karina, Platform Muria, Rumah Zakat, Yayasan Tunas Muda Care, YPAC, IGI dan PGRI
5. TPB 1 yaitu MAMPU, Yayasan Karina, Platform Muria, Rumah Zakat, GIZ, Jakarta Berketahanan, YPAC, IBI bersama masyarakat, ITMI, Yayasan Mitra Netra, YDMI & Mitra, Yayasan Peduli Anak Berkebutuhan Khusus, Tsu Chi
6. TPB 2 yaitu Yayasan Karina, Platform Muria, Rumah Zakat dan IBI bersama masyarakat

Identifikasi mitra pembangunan ini didapat dari laporan TPB DKI Jakarta 2019 dan diperkaya kembali untuk melihat potensi pembiayaan untuk berkontribusi pada pencapaian TPB secara umum, dan terutama TPB prioritas.

KOMITMEN BERSAMA PENANGGULANGAN BANJIR DAN LONGSOR KAWASAN **JABODETABEKPUNJUR**

NO.	STRATEGI	QUICK WINS
I	PENANGANAN HULU	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Regulasi dan Kelembagaan
2	Mencegah dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan
		Pengurangan Bahaya
3	Mengendalikan dan Melindungi	Pembangunan Infrastruktur**
		Pengendalian Penurunan Tanah
4	Meningkatkan Kesiap-siagaan	Penguatan Manajemen Krisis

NO.	STRATEGI	QUICK WINS
II	PENANGANAN TENGAH	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Regulasi dan Kelembagaan
2	Mencegah dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan
		Pengurangan Bahaya
3	Mengendalikan dan Melindungi	Pembangunan Infrastruktur**
		Pengendalian Penurunan Tanah*
4	Meningkatkan Kesiap-siagaan	Penguatan Manajemen Krisis
		Peringatan Dini Banjir

NO.	STRATEGI	QUICK WINS
III	PENANGANAN HILIR	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi	Regulasi dan Kelembagaan
2	Mencegah dan Mengurangi Risiko	Penataan Ruang dan Bangunan
		Pengurangan Bahaya
3	Mengendalikan dan Melindungi	Pembangunan Infrastruktur**
		Pengendalian Penurunan Tanah
4	Meningkatkan Kesiap-siagaan	Penguatan Manajemen Krisis
		Peringatan Dini Banjir

7.4.4 Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)

Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network) yang selanjutnya disebut JDCN adalah forum yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui paradigma dan sistem kolaborasi dan kokreasi bersama unsur di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (Jakarta Development Collaboration Network).

JDCN mempunyai tugas mengoordinasikan Kolaborasi dan Ko-kreasi dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta bersama unsur pemerintah dan/atau unsur non pemerintah. JDCN membantu Gubernur untuk memastikan bahwa usulan dari pihak luar sesuai dengan kebutuhan Kota Jakarta tidak hanya dalam konteks jangka pendek tapi kebutuhan Kota Jakarta lebih luas sehingga tidak hanya dengan kegiatan-kegiatan sosial saja, akan tetapi dapat juga berupa pembangunan fisik.

Kerangka kerja JDCN diilustrasikan melalui gambar di bawah ini.

Gambar 7.29. Kerangka Kerja JDCN
Sumber: Bappeda, 2020

Tugas dan Fungsi JDCN adalah sebagai berikut:

1. **Menciptakan koherensi tujuan pembangunan**
   Memastikan pembangunan kota sejalan dengan kebutuhan yang berkembang dimasyarakat.
2. **Mempercepat Pembangunan**
   Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dapat mempercepat proses pembangunan di Jakarta.
3. **Memfasilitasi mitra pembangunan**
   Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja yang ingin terlibat dalam membangun Jakarta.
4. **Menyusun rencana strategis, aksi dan kerja sama**
   JDCN hadir sebagai wadah bagi kolaborator dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota.
5. **Monitoring dan evaluasi implementasi kolaborasi melalui pengembangan sistem digital**
   Setiap ide dan projek kolaborasi yang diterima akan mudah dipantau tindak lanjut perkembangannya melalui sistem digital.

Dalam rangka menuju pencapaian TPB, maka JDCN menjadi salah satu *platform* yang tepat dalam mendukung capaian pembangunan berkelanjutan di DKI Jakarta. Bisnis Proses yang dilaksanakan adalah JDCN menerima usulan Proyek/Kegiatan dari pihak pengusul, kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur mengenai usulan Proyek/Kegiatan, selanjutnya Proyek/Kegiatan yang disetujui oleh Gubernur dilaksanakan/diselenggarakan oleh pengusul. Dengan adanya JDCN ini semua usulan dan kegiatan yang telah dilaksanakan akan terdata dan terkoordinasikan dengan baik melalui Sistem Informasi. Untuk mengimplementasikan sistem kerja JDCN telah dibentuk Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 336 Tahun 2020 Tentang Susunan Keanggotaan Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network).*

Saat ini, JDCN tengah membuka Kolaborasi Tanggap Corona yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB 8

BAB 8 REKOMENDASI KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA

8.1 Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022

Visi dan Misi dalam Perubahan RPJMD Provinsi DKI 2017-2022 telah mempunyai keterkaitan erat dengan kondisi dan dinamika terkini serta kesesuaiannya dengan perencanaan tingkat nasional (RPJMN). Ringkasan Tabel 8.1 di bawah ini menjelaskan keterkaitan Misi RPJMN, Agenda RPJMN, Misii RPJMD serta tinjuan KLHS untuk perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Matriks perbandingan isi (*simple content comparation*) yang sederhana digunakan untuk menemukenali tema yang mempunyai kontekstual, signifikansi serta relevansinya dengan proses serta dinamika keadaan terkini khususnya pada saat pembuatan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI 2017-2022.

Tabel 8.1. Matriks Perbandingan Kebijakan RPJMN, RPJMD dan Tinjauan KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022

MISI RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD PROVINSI DKI 2017-2022	TINJAUAN KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD 2017-2022
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.	Misi ke satu RPJMD DKI telah mencerminkan baik agenda RPJMN ataupun muatan pada Misi RPJMN, yaitu yang meningkatkan kualitas SDM dengan menjunjung nilai budaya dimulai dari keluarga. Fokus ini pun sesuai dengan TPB prioritas yang disepakati oleh publik dengan relevansi yang kuat pada TPB 3, TPB 4 Misi ke satu ini pun erat kaitannya dengan Misi ke 8-9 RPJMN 2020-2024, basis budaya yang mampu mencerminkan kepribadian bangsa sekaligus sebagai modal pembangunan dan menjadi salah satu pengungkit kesejahteraan dari sektor wisaya budaya. Erat kaitannya dengan TPB 8 yang menjadi salah satu TPB prioritas. Pada level “Tujuan dan Sasaran” misi ke satu ini perlu dipertajam untuk mengerucutkan TPB 8 khsusunya yang berkaitan dengan budaya (Wisata budaya)
3. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 4. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;	2. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 3. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.	Misi RPJMD DKI yang ke -2, sangat signifkan relevansinya baik dengan Misi RPJMN ataupun agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Hal ini pun sangat erat relevansinya dengan kesepakatan public untuk memberikan prioritas terhadap TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. TPB 8 mempunyai interlink yang cukup banyak (setidaknya ada 14 keterkaitan dengan TPB lainnya), seperti dijelaskan pada sub bab 7.1

MISI RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD PROVINSI DKI 2017-2022	TINJAUAN KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD 2017-2022
5. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 6. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terperaya;	5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.	Misi ke 3 RPJMD DKI merupakan wujud kontribusi dari pemerintah daerah untuk mencapai agenda pemerintah pusat yang termuat pula pada misi RPJMN 2020-2024. Dalam keterkaitan antar TPB pada bab 7, telah diuraikan bahwa pembangunan di DKI berlandaskan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (TPB 16) dengan integritas dan meritrokratis dalam memberikan pelayanan public secara efektif.
7. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.	Misi ke 4 RPJMD DKI sangat sesuai dengan Misi dan agenda RPJMN 2020-2024. Pada serangkaian FGD dan konsultasi public KLHS, komitmen untuk membangun DKI ke depan dengan mewujudkan Kota dan Masyarakat Berkelanjutan (TPB 11) ditinjau dari berbagai sector. TPB 11 ini akan melingkupi prioritas dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi dan pembangunan. Pada sub bab 7.1 telah diuraikan bagaimana TPB 11 menjadi bagian tidak terpisahkan untuk masing masing TPB prioritas yang dihasilkan pada saat konsultasi publik.TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) yang merupakan salah satu TPB prioritas juga mengindikasikan bahwa pembangunan DKI ke depan akan mempertimbangkan dengan baik status daya dukung lingkungan terutama status daya dukung air di Provinsi DKI Jakarta

MISI RPJMN 2020-2024	AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD PROVINSI DKI 2017-2022	TINJAUAN KLHS UNTUK PERUBAHAN RPJMD 2017-2022
8. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	7. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.	Misi ke 5 RPJMD DKI yang menitik beratkan pada terciptanya Jakarta sebagai ibu kota yang dinamis, kota inovatif, dengan segala keberagaman budaya, sosial dan berkeadilan diharapkan mampu mencerminkan kepribadian bangsa sekaligus menjadi kota wisata berdaya saing internasional yang menunjukkan simpul kemajuan Indonesia. Hal tersebut di atas menjadi Kontribusi DKI kepada misi dan agenda RPJMN 2020-2024. TPB 9, TPB 8, TPB 11 menjadi koridor dalam pelaksanaannya.

8.2 Arahan Kebijakan dan Arahan Program untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022

Arahan kebijakan dan program untuk perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, dihasilkan dari analisis sesuai dengan kerangka pikir yang telah dijelaskan pada bab 7, hasilnya diringkas pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.2. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 3

TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
3.i. Pandemi COVID-19 tertangani 3.ii. Fasilitas Kesehatan sesuai standar 3.iii. Jaminan kesehatan yang menyeluruh 3.iv. Pulihnya kesehatan mental akibat PSBB 	3.1. Melakukan adaptasi perubahan PHBS 3.2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder 3.3. Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif 3.4. Meningkatkan perbaikan infrastruktur kesehatan 3.5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDMK yang berdaya saing global 3.6. Mendorong tercapainya 100% warga yg memiliki jaminan Kesehatan 3.7. Pendampingan pemulihan kesehatan mental bagi warga terdampak pandemi	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Penanggulangan Bencana 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5) Program Pemberdayaan Sosial 6) Program Pengelolaan Arsip 7) Program Pengembangan Permukiman 8) Program Penataan Bangunan & Lingkungannya 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 10) Program Peningkatan Kapasitas SDMK 11) Program Rehabilitasi Sosial 12) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 13) Program Peningkatan Kesehatan Dasar untuk Balita, Ibu Hamil dan Lansia

Tabel 8.3. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 8

TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
8.i. Pertumbuhan PDB perkapita DKI Jakarta yang Meningkat 8.ii. Mendukung penciptaan lapangan kerja 8.iii. Kemudahan akses layanan keuangan untuk UMKM 8.iv. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat 	8.1. Menciptakan sistem perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan menghadapi kondisi krisis melalui perencanaan, pengelolaan, pengawasan keuangan daerah yang lebih strategis dan transparan 8.2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global 8.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif 8.4. Kolaborasi pemerintah – swasta serta kemitraan lain secara berimbang dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin perlindungan tenaga kerja 8.5. Diversifikasi Mata Pencaharian Nelayan Tangkap di Kepulauan Seribu 8.6. Peningkatan kualitas, jaringan pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses jasa keuangan bagi UMKM dan koperasi 8.7. Mendorong kerjasama kemitraan dalam pendampingan UMKM dan koperasi 8.8. Mendorong pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam operasional pasar tradisional 8.9. Pengembangan pariwisata yang adaptif di era tatanan hidup baru berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui teknologi digital. 8.10. Pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan green investment.	1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2) Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3) Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, & Budaya 5) Program Perekonomian dan Pembangunan 6) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 7) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 8) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 9) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 10) Program Pelayanan Penanaman Modal 11) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 12) Program Pemasaran Pariwisata 13) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 14) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 15) Program Penempatan Tenaga Kerja 16) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 17) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 18) Program Pengembangan UMKM 19) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 20) Program Promosi Penanaman Modal 21) Program Pemberdayaan UMKM 22) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 23) Program Penyelenggaraan Pengawasan 24) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 25) Program Hubungan Industrial 26) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 27) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan

TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
		28) Program Kemitraan dalam Pemanfaatan Ruang 29) Program Promosi Budaya 30) Program Pembangunan Ekonomi Kreatif

Tabel 8.4. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 4

TPB 4: Pendidikan Berkualitas		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
4.i. Kenaikan partisipasi pendidikan formal segala jenjang 4.ii. Kualitas kompetensi guru sesuai standar 4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas 	4.1. Meningkatkan SDM Guru melalui akses pelatihan dan sertifikasi dengan memperhatikan kesejahteraannya. 4.2. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pendidikan sesuai standar dan keamanan Gedung 4.3. Meningkatkan akses teknologi dan informasi 4.4. Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi 4.5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan formal untuk seluruh jenjang pendidikan dan informal yang inklusif melalui kerjasama perguruan tinggi maupun kemitraan 4.6. Membangun sistem pendidikan melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka pajang 4.7. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, matematikan dan sains serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi 4.8. Penerapan pendidikan aman bencana	1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3) Program Pengelolaan Pendidikan 4) Program Pengembangan Kurikulum 5) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 6) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 7) Pemerataan Jaringan Internet yang Terjangkau 8) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 9) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 10) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 11) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 12) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 13) Program Perencanaan Pemerintahan & Pembangunan Manusia 14) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 15) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 16) [Program Pembinaan Perpustakaan 17) Program Kepegawaian Daerah

Tabel 8.5. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 6

TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
6.i. Penggunaan air tanah terkendali 6.ii. Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah yg meningkat 6.iii. Kualitas dan kuantitas air yang lebih baik 6.iv. Akses sarpras air bersih yang merata & berkualitas 6.v. Tercapainya penanganan sampah kota terpadu dan menyeluruh 	6.1. Efisiensi pemanfaatan air (optimalisasi penggunaan *grey water* untuk kebutuhan air lahan dan penerapan 3R untuk konsumsi domestik) 6.2. Investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air 6.3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu 6.4. Peningkatan dan pemerataan akses sarpras air bersih dari air permukaan 6.5. Peningkatan fasilitas untuk mendukung PHBS 6.6. Penanganan sampah terpadu untuk mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air. 6.7. Pegembangan dan Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Terpusat / JSS 6.8. Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah 6.9. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 6.10. Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3) Program Pengelolaan Hutan 4) Program Pemberdayaan Sosial 5) Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase 6) Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7) Program Pengembangan Sistem & Pengelolaan Persampahan Regional 8) Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah 9) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 10) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 12) *Pengembangan penelitian, riset dan inovasi terhadap teknologi pengelolaan sumber daya air terbarukan, termasuk pengelolaan sumber daya air di kepulauan seribu* 13) *Peningkatan dengan pengembangan jejaring hijau dan biru, untuk melakukan filtrasi air secara alami, serta menahan air dan memasukkan secara*

Tabel 8.6. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 1

TPB 1 : Tanpa Kemiskinan		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
1.i Akses, layanan Kesehatan & Pendidikan merata, meningkat berkualitas & terjangkau 1.ii Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak 1.iii Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) tepat sasaran 	1.1. Meningkatkan akses cakupan Kesehatan universal yang berkualitas dan terjangkau 1.2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan pada tingkat dasar & menengah tanpa diskriminasi, bebas biaya dan berkualitas 1.3. Mengembangkan hunian yang bersih, sehat, aman, nyaman dan terjangkau melalui kolaborasi antar pihak sesuai *good governance* (transparan, akuntabel, responsive, inklusif, representatif dan partisipatif) dalam rangka mengurangi *backlog* hunian 1.4. Memastikan lingkungan yang berketahanan terhadap bencana dan krisis iklim untuk meminimalkan dampak (ekonomi, sosial) 1.5. Perbaikan tata kelola sistem pendataan penduduk utamanya untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 1.6. *Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin*	1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan 3) Program Rehabilitasi Sosial 4) Program Pengelolaan Pendidikan 5) Program Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 6) Program Perlindungan Perempuan 7) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 8) Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 9) Program Perlindungan Khusus Anak 10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif 11) Program Penanggulangan Bencana 12) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (update data DTKS)

Tabel 8.7. Rekomendasi Arahan Kebijakan dan Arahan Program TPB 2

TPB 2 : Tanpa Kelaparan		
Outcome	**Arahan Kebijakan**	**Arahan Program (Disesuaikan Permendagri 90/2019)**
2.i Status gizi yang meningkat & merata 2.ii Ketahanan pangan yang terjamin dan stabil 	2.1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai *good governance* 2.2. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk, stunting, ASI eksklusif 2.3. Pemanfaatan Ruang untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga. 2.4. Peningkatan layanan posyandu untuk menjaring anak stunting dan pemberian ragam makanan tambahan	1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan 5) Program Kemandirian Pangan Rumah Tangga (Urban Farming) (Belum ada Terminologi dalam Permendagri 90/2019) 6) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Partisipatif (belum ada nomenklatur dalam Permendagri 90/2019) 8) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 10) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 11) Program Pemberian Asupan Makanan Tambahan 12) Program Pemberian Rehabilitasi Social 13) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 14) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Dalam Lampiran Permendagri 7/2018 diamanatkan untuk menyusun usulan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan target capaian setiap indikator TPB hingga akhir tahun perencanaan 2022 (Form D1). Target capaian indikator pada 17 TPB telah dirumuskan dalam RAD TPB Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 hingga 2022 sebagai berikut.

Tabel 8.8. Target dan Indikator TPB (Form D1)

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	DINSOS
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95	100	DINKES
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerja-an	%	1. Formal : 116 dari pendu-duk yang bekerja (tahun 2017)	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	DISNAKERTRANS
				2. Informal : NA	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	%	4,8 (tahun 2017)	14,9	38,7	64,5	75	85,4	DINSOS
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Pro-gram Keluarga Harapan	Rumah Tangga	61,022	65,918	65,918	65,918	65,918	65,918	DINSOS
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan	%	47 (tahun 2017)	50	53	55	57	60	DINKES
1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59,1	DPPAPP

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
	(PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin									
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Presentase cakupan pelayanan air bersih	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	DSDA
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	1,00%	1. 15,93 (tahun 2017)	1. 0	1. 17,04	1. 20,49	1. 23	1. 26,44	DSDA
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	2,00%	2. 83,48 (tahun 2016)	2. 85,15	2. 86,85	2. 88,59	2. 90,36	2. 92,17	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	1. Jumlah kawasan pemukiman kumuh	1. RW	1. 223 (tahun 2017)	1. 164	1. 115	1. 67	1. 23	1. 23	DPRKP
		2. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	2,00%	2. 15,18 (tahun 2016)	2. 12,14	2. 9,72	2. 7,77	2. 6,22	2. 4,97	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	96,15 (tahun 2017)	96,54	96,93	97,32	97,71	98,1	DISDIK
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sedera-jat	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	84,79 (tahun 2017)	86,73	88,67	90,62	92,59	94,5	DISDIK
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71,87 (tahun 2017)	74,65	77,42	80,2	82,95	85,75	DISDIK
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89,7	DISDUKCAPIL
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	%	100 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	DPE
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	BPBD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi	34 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	BPBD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	11 (tahun 2017)	-	100	100	100	100	BPBD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks Risiko	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rupiah	294.611.450.000 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	BPBD
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Rupiah	11.423.224.514.768 (tahun 2017)	9.593.286.802.392	PM	PM	PM	PM	DINSOS
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	1. Miliar Rupiah, Fungsi Pendidik-an	1. 18.568,34 (tahun 2017	1. 21.766,85	1. 24.090 ,48	1. PM	1. PM	1. PM	DINSOS
			2. Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	2. 7.180,97 (tahun 2017)	2. 7.965,44	2. 7.742, 92	2. PM	2. PM	2. PM	
			3. Miliar Rupiah, Fungsi Perlin-dungan Sosial	3. 4.279,56 (tahun 2017)	3. 5.782,78	3. PM	3. PM	3. PM	3. PM	

Berdasarkan target capaian indikator TPB di atas, diidentifikasi program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung pencapaian TPB khususnya pada 6 TPB Prioritas berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pencapaian TPB juga turut didukung oleh Lembaga non-pemerintah. Tabel di bawah ini merupakan Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah (Form D2) dan Non-Pemerintah (Form D3) sesuai dengan format pada Lampiran Permendagri No. 7/2018 (Form D2 dan D3). Target tahunan dan alokasi indikatif anggaran hanya untuk sisa akhir perencanaan yaitu 2020, 2021 dan 2022. Tabel di bawah ini merupakan form D2 Program Kegiatan Pemerintah) untuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak. Sementara untuk 5 TPB Prioritas lainnya terdapat pada Lampiran 13

Tabel 8.9. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah (D2) untuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR								
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kawasan Krisis Air Bersih tepat waktu	Persen	100	100	100	100.449.954.698	APBD	DSDA
	Persentase penyelesaian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira tepat waktu	Persen	100	100	100	85.618.000.698	APBD	DSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) Yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100	18.906.321.354	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Pipa Transmisi Air Minum Wilayah DKI Jakarta - SPAM Jatiluhur I yang tersedia	Dok	-	1	-	1.500.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Kajian Pengendalian Air Bersih	Dokumen	-	1	1	750.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Verifikasi PSO	Dokumen	-	1	-	375.000.000	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
	Jumlah dokumen Rekomendasi Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Dokumen	1	97	1	1.250.000.000	APBD	DSDA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pembangunan Unit Air Baku	Persentase penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tepat waktu	Persen	100	100	100	16.989.542.459	APBD	DSDA
Indikator 6.1.1.(b) kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pembangunan Unit Air Baku	Persentase penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tepat waktu	Persen	100	100	100	16.989.542.459	APBD	DSDA
Indikator 6.1.1.(c) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR								
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Persentase penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kawasan Krisis Air Bersih tepat waktu	Persen	100	100	100	100.449.954.698	APBD	DSDA
	Persentase penyelesaian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Sebira tepat waktu	Persen	100	100	100	85.618.000.698	APBD	DSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) Yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100	18.906.321.354	APBD	DSDA
Target Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
Indikator 6.2.1.(a) proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan sanitasi yang baik setelah diberikan peningkatan pemahaman	orang	-	0	395	52.867.500	APBD	DPPAPP
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim PIS-PK Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	258.998.946	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis	kelompok	5	5	5	456.367.238	APBD	DPPAPP
Indikator 6.2.1.(b) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan sanitasi yang baik setelah diberikan peningkatan pemahaman	orang	0	0	395	52.867.500	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	0	0	1	2.736.097.294.002	APBD	DSDA
	Persentase penyelesaian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	0	100	100	100.046.200.000	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 1	Dokumen	0	1	1	983.337.372	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	0	1	1	718.674.744	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 8	Dokumen	1	1	1	796.774.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	1	1	1	768.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System yang tersedia	Dok	3	1	1	6.650.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air limbah	Dokumen	6	6	6	12.039.074.163	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Finalisasi Raperda Pengolahan Air Limbah di DKI Jakarta	Dokumen	1	1	1	3.112.157.366	APBD	DSDA
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik (SPALD) Yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100	51.948.636.996	APBD	DSDA
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Penilaian Teknis Kelayakan Desain SPALD dan Pengendalian Kinerja SPALD di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen		1	1	550.000.000	APBD	DSDA
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Titik Tangki Septik yang Terevitalisasi bagi Masyarakat Penerima Subsidi	Titik	0	2000	2000	40.000.000.000	APBD	DSDA
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Calon Penerima Subsidi Rehabilitasi Septiktank di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	1	1	1	1.500.000.000	APBD	DSDA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	Dinkes
	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim PIS-PK Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	258.998.946	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis	kelompok	5	5	5	456.367.238	APBD	DPPAPP
Indikator 6.2.1.(c) jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (stbm). **Indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).**								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	Dinkes
	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim PIS-PK Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	258.998.946	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	Dinkes
Indikator 6.2.1.(e) jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan sanitasi yang baik setelah diberikan peningkatan pemahaman	orang	0	0	395	52.867.500	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	0	0	1	2.736.097.294.002	APBD	DSDA
	Persentase penyelesaian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	0	100	100	100.046.200.000	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 1	Dokumen	0	1	1	983.337.372	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	0	1	1	718.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 8	Dokumen	1	1	1	796.774.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	1	1	1	768.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System yang tersedia	Dok	3	1	1	6.650.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air limbah	Dokumen	6	6	6	12.039.074.163	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Finalisasi Raperda Pengolahan Air Limbah di DKI Jakarta	Dokumen	1	1	1	3.112.157.366	APBD	DSDA
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik (SPALD) Yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	100	51.948.636.996	APBD	DSDA
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Penilaian Teknis Kelayakan Desain SPALD dan Pengendalian Kinerja SPALD di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen		1	1	550.000.000	APBD	DSDA
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Titik Tangki Septik yang Terevitalisasi bagi Masyarakat Penerima Subsidi	Titik	0	2000	2000	40.000.000.000	APBD	DSDA
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi Calon Penerima Subsidi Rehabilitasi Septiktank di Provinsi DKI Jakarta	Dokumen	1	1	1	1.500.000.000	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat								
Indikator 6.2.1.(f) proporsi rumah tangga (rt) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	0	0	1	2.736.097.294.002	APBD	DSDA
	Persentase penyelesaian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	0	100	100	100.046.200.000	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 1	Dokumen	0	1	1	983.337.372	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	0	1	1	718.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 8	Dokumen	1	1	1	796.774.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	1	1	1	768.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System yang tersedia	Dok	3	1	1	6.650.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air limbah	Dokumen	6	6	6	12.039.074.163	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Finalisasi Raperda Pengolahan Air Limbah di DKI Jakarta	Dokumen	1	1	1	3.112.157.366	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Target Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
Indikator 6.3.1.(a) Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). **Indikator 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.**								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	0	0	1	2.736.097.294.002	APBD	DSDA
	Persentase penyelesaian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persen	0	100	100	100.046.200.000	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 1	Dokumen	0	1	1	983.337.372	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Sosialisasi Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	0	1	1	718.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 8	Dokumen	1	1	1	796.774.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 6	Dokumen	1	1	1	768.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Persiapan Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5	Dokumen	1	1	1	818.674.744	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System yang tersedia	Dok	3	1	1	6.650.000.000	APBD	DSDA
	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan air limbah	Dokumen	6	6	6	12.039.074.163	APBD	DSDA
	Jumlah Dokumen Finalisasi Raperda Pengolahan Air Limbah di DKI Jakarta	Dokumen	1	1	1	3.112.157.366	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Indikator 6.3.2.(a) kualitas air danau.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pembangunan Unit Air Baku	Persentase penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tepat waktu	Persen	100	100	100	16.989.542.459	APBD	DSDA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan pencemaran air limbah	kegiatan usaha	1295	1400	1480	1.116.513.712	APBD	DLH
	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	%	45	50	55	1.429.475.194	APBD	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	2.823.678.453	APBD	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Tahun	1	1	1	12.079.241.091	APBD	DLH
	Kesiapan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air	Tahun	1	1	1	35.414.851.448	APBD	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	wilayah	6	6	6	13.363.222.456	APBD	DLH
Indikator 6.3.2.(b) kualitas air sungai sebagai sumber air baku.								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan pencemaran air limbah	kegiatan usaha	1295	1400	1480	1.116.513.712	APBD	DLH
	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	%	45	50	55	1.429.475.194	APBD	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	2.823.678.453	APBD	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Tahun	1	1	1	12.079.241.091	APBD	DLH
	Kesiapan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air	Tahun	1	1	1	35.414.851.448	APBD	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	wilayah	6	6	6	13.363.222.456	APBD	DLH
Target Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
Indikator 6.4.1.(a) pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.								
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Peta Muka air tanah dangkal di wilayah DKI Jakarta	Dokumen	0	1	1	800.000.000	APBD	DSDA
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah dokumen Audit Penggunaan Air Tanah	Dokumen	0	1	1	998132520	APBD	DSDA
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase penyelesaian kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persen	0	100	100	19.999.975.698	APBD	DSDA
Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah dokumen Rekomendasi Teknis Desain Konservasi Air Tanah dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah	Dokumen	0	97	97	300.000.000	APBD	DSDA
Indikator 6.4.1.(b) insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah dokumen Audit Penggunaan Air Tanah	Dokumen	0	1	1	998132520	APBD	DSDA
Target Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
Indikator 6.5.1.(a) jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (rpdast) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw).								
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Kehutanan yang tersusun	dokumen	0	0	1	200.000.000	APBD	Distamhut
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana sistem pengendali banjir yang tersedia	Dok	6	6	6	24.640.880.905	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Pengamanan Pantai dan dan kajian tanggul pengaman pantai dan kelengkapannya	Dokumen	0	6	6	8.329.943.704	APBD	DSDA
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah kelengkapan penunjang pekerjaan penyelidikan, pengujian dan pengukuran bidang sumber daya air	Unit	0	7	0	7.931.026.372	APBD	DSDA
Indikator 6.5.1.(c) jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.6.5.1.(a) jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (rpdast) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw).								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Jumlah peserta diklat manajemen proyek	orang	0	60	40	170.561.732	APBD	BPSDM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
			2020	2021	2022			
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
Target Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
Indikator 6.6.1.(a) jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pembangunan Unit Air Baku	Persentase penyelesaian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) tepat waktu	Persen	100	100	100	16.989.542.459	APBD	DSDA
Indikator 6.6.1.(b) jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase pembangunan waduk/situ/embung serta kelengkapannya tepat waktu	Persen	0	100	100	220.079.610.414	APBD	DSDA

Tabel di bawah ini merupakan form D3 (Program Kegiatan Non Pemerintah) untuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, sementara untuk 5 TPB Prioritas lainnya terdapat pada Lampiran 14.

Tabel 8.10. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non-Pemerintah (D3) untuk TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)	Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
		2020	2021	2022				
TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									
Pembangunan Pipa Distribusi dan Retikulasi di Wilayah Barat dan Utara	Cakupan Pelayanan	%				150.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta - Jakarta Utara, Jakarta Barat	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Penyediaan air bersih Rusunawa	Cakupan Pelayanan	%				15.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Panen Air Hujan									
Panen air hujan		Jumlah rumah tangga	36	50			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA
Indikator 6.1.1.(b) kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.									
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									
SPAM Pesanggrahan dan Ciliwung (950 lps)	Cakupan Pelayanan	%				650.000 (2020)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Optimalisasi DCR4 dan Cikokol untuk Area Cengkareng dan Pegadungan	Cakupan Pelayanan	%				105.000 (2020)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
SPAM Buaran 3 : 3000 lps	Cakupan Pelayanan	%				2.702.000 (2020)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Distribusi SPAM Jatiluhur 1 : 4000 lps	Cakupan Pelayanan	%				8.100.000 (2021)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Indikator 6.1.1.(c) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.									
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									
Pembangunan Pipa Distribusi dan Retikulasi di Wilayah Barat dan Utara	Cakupan Pelayanan	%				150.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta - Jakarta Utara, Jakarta Barat	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Penyediaan air bersih Rusunawa	Cakupan Pelayanan	%				15.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Target Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
Indikator 6.2.1.(c) jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (stbm).									
Studi Kelayakan IPAL Komunal	Jumlah dokumen studi kelayakan IPAL Komunal yang dihasilkan	dokumen	-	-	-	-	GIZ (I)	RPTRA Cambella, Kelurahan Kamal Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Jakarta Berketahanan bekerjasama dengan Dinas SDA dan Bappeda
PHBS berbasis Masyarakat									
PHBS berbasis masyarakat		Jumlah masyarakat yang menjadi kader PHBS	25	25			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA

8.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta

Telah diuraikan pada Bab 1 bahwa penyelenggaraan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 dilakukan secara beriringan dengan proses penyusunan rancangan awal, walaupun penyusunan rancangan awal perubahan KLHS RPJMD DKI Jakarta telah dimulai beberapa bulan lebih dahulu (dimulai pada bulan Juni 2020, sedangkan KLHS pada bulan Agustus 2020). Integrasi rekomendasi KLHS menjadi iteratif sejak dari awal prosesnya dan diringkaskan pada uraian matriks integrasi di bawah ini. Tabel di bawah ini menunjukan Tujuan, sasaran dan strategi yang memiliki keterkaitan dengan *outcome* dan arah kebijakan pada rekomendasi KLHS. Arahan kebijakan rekomendasi KLHS yang dapat diakomodir dalam Ranwal Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 telah diintegrasikan dalam kerangka kebijakan sebagaimana pada Gambar 6.24 yang secara eksplisit tergambar pada tingkat Strategi.

Proses integrasi dilakukan melalui serangkaian FGD yang dilakukan pada tanggal 17 November 2020, 20 November 2020 dan 24 November 2020. Teks berwarna **hijau** menandakan adanya perubahan dan atau penambahan strategi yang telah didiskusikan pada FGD tanggal 24 November 2020.

Tabel 8.11. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 1

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
Misi 1: Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan"					
Tujuan 1.1. Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif.				Tujuan 1.1 yaitu “mewujudkan kota aman dan tertib” telah mengakomodir TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera terutama pada sasaran 2 dan 3 yang berkaitan dengan kota yang ramah perempuan dan anak dan kota Tangguh bencana, fokus pada TPB 3 yaitu bencana non alam pandemic COVID-19.	
S1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial		Tidak ada strategi pada Sasaran 1 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
S2. Terwujudnya pembangunan kota yang ramah perempuan dan anak.	Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya	3.i. Pandemi COVID-19 tertangani	3.2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.2 pada rekomendasi KLHS
	Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan				
S3. Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kemampuan Masyarakat dan Aparatur, Implementasi Fasilitas Publik Aman dan Kelurahan Tangguh Bencana	3.i. Pandemi COVID-19 tertangani	3.2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.2 pada rekomendasi KLHS

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
	serta Pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan difasilitasi oleh Sistem Informasi Kebencanaan.				
	Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana				
	Pengembangan Pengendalian Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				
	Melakukan penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat				
	Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana.				Untuk mengakomodir arah kebijakan 3.2 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana* ***(alam maupun non alam).***

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
Tujuan 1.2. Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya.				Tujuan ini secara umum fokus pada pemenuhan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), tercermin pada sasaran 1. Tujuan dan Sasaran ini telah mengakomodir rekomendasi KLHS yaitu TPB 3. (kehidupan sehat dan sejahtera) dan TPB 4 (pendidikan berkualitas).	
S1. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan	4.i.. Kenaikan partisipasi pendidikan formal segala jenjang	4.5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan formal untuk seluruh jenjang pendidikan dan informal yang inklusif melalui kerjasama perguruan tinggi maupun kemitraan 4.6. Membangun sistem pendidikan melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka panjang		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.5, 4.6, dan 1.2 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan* ***segala jenjang secara merata, berkualitas dan terjangkau***
		1.i Akses, layanan Kesehatan & Pendidikan merata, meningkat berkualitas & terjangkau"	1.2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan pada tingkat dasar & menengah tanpa diskriminasi, bebas biaya dan berkualitas"		
	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.2. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pendidikan sesuai standar dan keamanan Gedung		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 4.2 dan .4.6 pada rekomendasi KLHS

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
			4.6. Membangun sistem pendidikan melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka pajang		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.6 rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa: ***Menyusun desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka panjang***
		4.ii. Kualitas kompetensi guru sesuai standar	4.1. Meningkatkan SDM Guru melalui akses pelatihan dan sertifikasi dengan memperhatikan kesejahteraannya		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.1 rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa: ***Meningkatkan kualitas tenaga pendidik***
	Meningkatkan kemampuan literasi, budaya gemar membaca dan pelestarian karya	4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.7. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, matematikan dan sains serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 4.7 dalam rekomendasi KLHS
		3.ii. Fasilitas Kesehatan sesuai	3.4. Meningkatkan perbaikan infrastruktur		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua	standar 3.iii. Jaminan kesehatan yang menyeluruh	kesehatan 3.6. Mendorong tercapainya 100% warga yg memiliki jaminan Kesehatan		mengakomodir arah kebijakan 3.4, 3.6, dan 1.1 rekomendasi KLHS
		1.ii Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak	1.1. Meningkatkan akses cakupan Kesehatan universal yang berkualitas dan terjangkau		
	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien	3.ii. Fasilitas Kesehatan sesuai standar	3.5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDMK yang berdaya saing global		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.5 dalam rekomendasi KLHS
		3.i. Pandemi COVID-19 tertangani	3.1. Melakukan adaptasi perubahan PHBS 3.3. Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif 6.9. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		Untuk mengakomodir outcome 3.i dalam rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa ***Mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat***

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
		2.i Status gizi yang meningkat & merata	2.2. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk, stunting, ASI eksklusif 2.4. Peningkatan layanan posyandu untuk menjaring anak stunting dan pemberian ragam makanan tambahan		Untuk mengakomodir arah kebijakan 2.2 dan 2.4 dalam rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa ***Meningkatkan layanan posyandu dan kesehatan gizi masyarakat***
S2. Terwujudnya keluarga sejahtera		Outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS yang berkaitan dengan terwujudnya keluarga sejahtera sangat relevan dengan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 2 (Tanpa Kelaparan).			Strategi pada sasaran 2 tidak mengalami perubahan karena sudah mengakomodir rekomendasi KLHS

Tabel 8.12. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 2

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang"					
Tujuan 2.1 Meningkatkan ketersediaan pasokan tenaga kerja yang berperan aktif dalam ekonomi.					

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
S1. Berkurangnya tingkat pengangguran	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru	8.ii. Mendukung penciptaan lapangan kerja	8.2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global	Tujuan 2.1 telah mengakomodir TPB 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), secara eksplisit tercermin pada kalimat "ketersediaan **pasokan tenaga kerja** yang berperan aktif dalam **ekonomi**". Fokus ketersediaan dan kualitas tenaga kerja pada tujuan ini sudah selaras dengan TPB 8. Sasaran 1 erat kaitannya dengan TPB 8 "berkurangnya **tingkat pengangguran**". Salah satu indikator penting dalam TPB 8 yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT). Integrasi yang lebih implementatif terdapat pada tingkat strategi.	Untuk mengakomodir arah kebijakan 8.2 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja* ***yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja baru***
	Memberikan pembinaan hubungan industrial		8.4. Kolaborasi pemerintah – swasta serta kemitraan lain secara berimbang dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin perlindungan tenaga kerja		Untuk mengakomodir arah kebijakan 8.4 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Memberikan pembinaan hubungan industrial* ***melalui kolaborasi pemerintah dan pemberi kerja***
Tujuan 2.2. Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif.					

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
S1. Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan	8.iii. Kemudahan akses layanan keuangan untuk UMKM	8.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif	Tujuan 2.2. dan sasaranya telah mengakomodir rekomendasi KLHS untuk arahan kebijakan TPB 8, utamanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Hal ini tercermin dalam “Meningkatkan **kewirausahaan** yang kreatif dan produktif”. Lebih lanjut dijabarkan melalui strategi yang mengedepankan peningkatan kegiatan kewirausahaan untuk UMKM.	Strategi ini telah mengakomodir arah kebijakan 8.3 rekomendasi KLHS, sehinga tidak ada perubahan/ tidak ada reformulasi strategi.
	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT				

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta		8.6. Peningkatan kualitas, jaringan pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses jasa keuangan bagi UMKM dan koperasi 8.7. Mendorong kerjasama kemitraan dalam pendampingan UMKM dan koperasi		Untuk mengakomodir arah kebijakan 8.6 dan 8.7 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, **jaringan pemasaran**, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM* Serta menambah strategi: ***Mendorong kerjasama kemitraan dan wawasan dalam pendampingan UMKM dan koperasi***
	Partisipasi pada pameran dagang, melakukan Misi Dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha/UKM		Secara spesifik tidak berkaitan langsung dengan arahan kebijakan pada rekomendasi KLHS di outcome 8.iii		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir outcome 8.iii dalam KLHS.
	Pengintensifan kuantitas dan kualitas				

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	Pengawasan Perdagangan				
	Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang				
	Peningkatan partisipasi pameran dagang, Pemasaran hasil produk koperasi dan UKM melalui Bazar dan Expo				
Tujuan 2.3 Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan				Tujuan 2.3 yaitu "Mewujudkan **ketahanan pangan** yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan" merupakan susbtansi pokok dari TPB 2. Tanpa Kelaparan. Sasaran pada tujuan ini fokus kepada pemenuhan kebutuhan pangan yang selaras dengan TPB 2. Integrasi KLHS pada tingkat strategi menjabarkan lebih lanjut	
S1. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	2.ii Ketahanan pangan yang terjamin dan stabil	2.1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai good governance		Untuk mengakomodir arah kebijakan 2.1 dan 2.3 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Ketahanan pangan yang berkelanjutan* ***melalui peningkatan ketahanan pangan, terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas dan kualitas dan keterjangkauan pangan***
			2.3. Pemanfaatan Ruang untuk Peningkatan		

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
			Ketahanan Pangan Keluarga	bagaimana ketahanan pangan dapat tercapai.	
Tujuan 2.4. Meregenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota				Tujuan 2.4 secara umum berkaitan dengan infrastruktur perkotaan sehingga rekomendasi arahan kebijakan KLHS yang berhubungan dengan infrastruktur ekologi telah tercermin pada sasaran-sasaran yang berkaitan dengan penyediaan akses sanitasi layak dan perihal penataan permukiman. Pada sasaran 2 - "Meningkatnya akses **sanitasi layak** dan berkelanjutan" sudah sangat mengakomodir fokus TPB 6. Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak. Untuk sasaran 5 "Tersedianya **hunian yang layak** dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat" sudah mengakomodir rekomendasi arahan kebijakan pada TPB 1.	
S1. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi		Tidak ada strategi pada Sasaran 1 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
S2. Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih	6.iii. Kualitas dan kuantitas air yang lebih baik	6.3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu		Untuk mengakomodir arah kebijakan 6.3 dan 6.4 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih melalui* ***Pengelolaan sumber daya air secara terpadu serta peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan akses air bersih***
		6.iv. Akses sarpras air bersih yang merata & berkualitas	6.4. Peningkatan dan pemerataan akses sarpras air bersih dari air permukaan		
	Meningkatkan dan mengelola sistem pengolahan air limbah	6.ii.Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah yg meningkat	6.7. Pegembangan dan Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Terpusat / JSS		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 6.7 dalam rekomendasi KLHS

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah	6.v.Tercapainya penanganan sampah kota terpadu dan menyeluruh	6.6. Penanganan sampah terpadu untuk mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air	Lebih rinci, integrasi KLHS tergambar dengan jelas pada strategi untuk Ranwal	Untuk mengakomodir arah kebijakan 6.6 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah* ***sekaligus mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air***
S3. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta		Tidak ada strategi pada Sasaran 3 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 3 tidak mengalami perubahan
S4. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota		Tidak ada strategi pada Sasaran 4 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 4 tidak mengalami perubahan
S5. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan	1.ii Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak	1.3. Mengembangkan hunian yang bersih, sehat, aman, nyaman dan terjangkau melalui kolaborasi antar pihak sesuai good governance (transparan, akuntabel, responsive, inklusif, representatif dan		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 1.3 dalam rekomendasi KLHS

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
			partisipatif) dalam rangka mengurangi backlog hunian		
Tujuan 2.5 Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta.				Tujuan 2.5 yaitu "Meningkatkan **investasi** di Provinsi DKI Jakarta", telah sangat mengakomodir rekomendasi kebijakan pada TPB 8 berkenaan dengan investasi. Strategi Penguatan investasi melalui *green investment* diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.	
S1. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan Pembangunan Jakarta Investment Center (JIC)	8.i Pertumbuhan PDB per kapita Jakarta yang meningkat	8.10 pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan green investment		Strategi menjadi: *Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal* ***untuk penguatan green investment*** *dan Pembangunan Jakarta Investment Center (JIC)*
Tujuan 2.6 Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.				Tujuan ini secara umum telah mengakomodir arahan kebijakan rekomendasi KLHS di TPB 8 yaitu penataan ruang untuk pengembangan ekonomi. Integrasi KLHS yang lebih implementatif yaitu pada tingkat strategi.	
S1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	8.i. Pertumbuhan PDB perkapita DKI Jakarta yang Meningkat	8.10. Pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan green investment		Berdasarkan rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Mendorong pemanfaatan ruang* ***sesuai rencana dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi dan investasi***

Tabel 8.13. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 3

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas"					
Tujuan 3.1 Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuanagan daerah yang akuntabel dan transparan.				Rekomendasi KLHS berdasarkan TPB prioritas tidak ada yang menyasar spesifik kepada tujuan/sasaran ini Tujuan dan sasaran ini erat kaitannya dengan TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan **Kelembagaan** yang Tangguh yang menjadi landasan dalam pelayanan publik seperti dielaborasikan pada sub bab keterkaitan antar TPB dalam laporan KLHS ini.	
S1. Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada sub bab 7.1, yang digambarkan bahwa TPB 16 yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini.			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
Tujuan 3.2 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasiskan data				Rekomendasi KLHS berdasarkan TPB prioritas tidak ada yang menyasar spesifik kepada tujuan/sasaran ini	
S1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis, transparan dan akuntabel serta model organisasi pemerintahan yang dinamis		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada sub bab 7.1, yang digambarkan bahwa TPB 16 yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini.			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
S2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan secara menyeluruh	Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Pengalokasian anggaran, Registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap, Redundant perangkat jaringan, Redundant bandwidth jaringan	1.iii Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) tepat sasaran	1.5. Perbaikan tata kelola sistem pendataan penduduk utamanya untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19	Tujuan dan sasaran ini erat kaitannya dengan TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan **Kelembagaan** yang Tangguh yang menjadi landasan dalam pelayanan publik seperti dielaborasikan pada sub bab keterkaitan antar TPB dalam laporan KLHS ini. Susbstansi sasaran 2 yang fokus dengan pemanfaatan teknologi, pada dasarnya telah mengakomodir TPB 1 yang berkaitan sistem kependudukan dan TPB 4 yang berkaitan dengan akses teknologi dan informasi	Untuk mengakomodir arah kebijakan 1.5 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: ***Pengembangan sistem pendataan penduduk dalam rangka peningkatan layanan yang tepat sasaran***
	Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, Optimalisasi layanan environment sosial dan dukungan TIK Optimalisasi penyediaan analisis big data untuk sektor prioritas		4.3. Meningkatkan akses teknologi dan informasi		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.3 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi**:** ***Meningkatkan akses teknologi dan informasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat***

Tabel 8.14. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 4

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial."					
Tujuan 4.1. Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial				Tujuan 4.1 Mewujudkan pembangunan yang memperkuat **daya dukung lingkungan** dan sosial" secara umum terkait dengan beberapa TPB yang fokus pada daya dukung lingkungan. Sasaran 2, berkaitan dengan RTH, telah mengakomodir TPB 2 dalam rangka pemanfaatan RTH sebagai *urban farming* yang telah diintegrasikan pada tingkat strategi. Sasaran 2 juga memiliki keterkaitan yang erat dengan TPB 6 (Air dan	
S1. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada Sub Bab 7.1 yang digambarkan bahwa TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini.			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
S2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH	2.ii Ketahanan pangan yang terjamin dan stabil	2.1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai good governance		Strategi ini menjadi: *Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH* ***diantaranya melalui pengembangan taman kota serta pengembangan urban farming untuk stabilitas ketahanan pangan***
S3. Melambatnya penurunan permukaan tanah	Peningkatan cadangan air tanah	6.i. Penggunaan air tanah terkendali	6.1. Efisiensi pemanfaatan air (optimalisasi penggunaan grey water untuk kebutuhan air lahan dan penerapan 3R		Untuk mengakomodir arah kebijakan 6.1, 6.2., 6.8 dan 6.10 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi**:**

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
			untuk konsumsi domestik)	Sanitasi Layak) yaitu dalam penyediaan infrastruktur ekologi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air. Sasaran 3 fokus pada penurunan permukaan tanah, yang telah mengakomodir rekomendasi KLHS terkait dengan penggunaan air tanah (TPB 6)	*Peningkatan cadangan air tanah* ***melalui efisiensi pemanfaatan, investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air,*** ***Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah dan Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah***
			6.2. Investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air		
			6.8. Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah		
			6.10. Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)		
S4. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan, mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan				Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 1.3 dalam rekomendasi KLHS

Tabel 8.15. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 5

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 5: Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan"					
Tujuan 5. 1. Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.				Tujuan ini secara umum turut mengakomodir TPB 4. (Pendidikan Berkualitas), tercermin dalam "Mengembangkan Jakarta sebagai **kota inovatif** dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia. Salah satu fokus TPB 4 yaitu teknologi dan inovasi, yang telah dicerminkan oleh sasaran 1 melalui pengembangan penelitian.	
S.1. Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran capaian kinerja pembangunan	4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.4. Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 4.4 dalam rekomendasi KLHS Dalam upaya mempercepat pencapaian outcome sekaligus mengakomodir arah kebijakan 4.4 maka ditambahkan strategi: ***Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi***
Tujuan 5.2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras				Rekomendasi KLHS berdasarkan TPB prioritas tidak ada yang menyasar spesifik kepada tujuan 5.2/ sasarannya.	
S1. Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada sub bab 7.1 yang digambarkan bahwa TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini. Telah disepakati pada FGD dengan pemangku kepentingan bahwa pembangunan di DKI itu dalam koridor Kota yang berkelanjutan dan inklusif			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Tujuan 5.3 Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia				Tujuan 5.3 yang mengedepankan kebudayaan telah mengakomodir TPB 8 terutama untuk pengembangan ekonomi melalui pariwisata budaya. Tujuan dan sasaran memimiliki strategi yang mengarah kepada pariwisata dan pengembangan SDM sehingga telah mengakomodir rekomendasi arahan kebijakan KLHSpada TPB 8.	
S1. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan E-Tourism	8.iv. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat	8.9. Pengembangan pariwisata yang adaptif di era tatanan hidup baru berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui teknologi digital		Untuk mengakomodir arahan kebijakan 8.9 maka strategi menjadi: *Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan* ***pariwisata berbasis teknologi digital yang adaptif di era tatanan hidup baru***
S2. Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan	Melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pelestarian SDM dan unsur kebudayaan serta peningkatan sarana prasarana dan melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.	8.ii. Mendukung penciptaan lapangan kerja	8.2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global		Untuk mengakomodir arahan kebijakan 8.2 strategi menjadi: ***Pengembangan SDM berdaya saing global dan pelestarian kebudayaan melalui peningkatan sarana prasarana dan upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.***
S3. Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses seluas-luasnya terhadap cagar budaya melalui	8.iv. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat	8.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang		Untuk mengakomodir arahan kebijakan 8.3 strategi menjadi: ***Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik serta nilai tambah pariwisata berbasis***

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri		mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif		***cagar budaya melalui ekonomi kreatif***

Proses penyusunan perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017 -2022 hingga Rancangan Akhir berjalan paralel dengan finalisasi laporan KLHS. Finalisasi KLHS yang mencakup penjaminan kualitas dan validasi dipersiapkan oleh POKJA KLHS pada waktu yang bersamaan dengan dinamika dan tahapan proses penyusunan rancangan akhir perubahan RPJMD. Memanfaatkan dinamika proses yang masih sama-sama berjalan, integrasi KLHS yang diidentifikasi tidak terbatas pada Rancangan Awal, bahkan **memastikan** substansi dan rekomendasi KLHS **terintegrasi pada Rancangan Akhir**. Laporan KLHS menjadi lebih komprehensif dengan memastikan hasil kajian dan rekomendasi benar-benar terintegrasi hingga tahap akhir penyusunan RPJMD.

Mengingat dinamika proses perubahan RPJMD DKI 2017-2022, terdapat beberapa penyesuaian muatan. Tabel 8.16 di bawah ini meringkaskan bagaimana dinamika perubahan hasil integrasi KLHS dalam RANWAL hingga Rancangan Akhir Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Kalimat bercetak **warna hijau** menunjukan posisi rekomendasi KLHS yang telah terintegrasi dalam strategi pada RANWAL maupun Ranhir. Sementara kalimat bergaris bawah menunjukan adanya perubahan baik dalam tujuan dan sasaran.

Tabel 8.16. Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1: Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan					
1.1 Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	S.1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial.	1) Optimalisasi PSKS 2) Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3) Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial 4) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial 5) Melaksanakan penegakan Perda dan atau Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 6) Meningkatkan kompetensi PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan Perda dan/atau Perkada secara yustisial	Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial	1) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2) Penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3) Peningkatan kualitas pemuda melalui upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda 4) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pendekatan persuasif serta peningkatan kompetensi PPNS
	S.2. Terwujudnya pembangunan kota yang ramah perempuan dan anak.	1) Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya		Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1) Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		2) Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan			2) Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan
	S.3. Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1) Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kemampuan Masyarakat dan Aparatur, Implementasi Fasilitas Publik Aman dan Kelurahan Tangguh Bencana serta Pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan difasilitasi oleh Sistem Informasi Kebencanaan. 2) Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana 3) Pengembangan Pengendalian Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 4) Melakukan penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat 5) Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana **(alam maupun non alam).**		Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1) Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi **bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder** 2) Perlindungan sosial adaptif mencakup pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif
1.2 Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya.	S.1. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	**1)** Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan **segala jenjang secara merata, berkualitas dan terjangkau** 2) Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berdaya	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan Peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1) Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan **segala jenjang** yang didukung dengan pemenuhan sarana prasana dan tata **kelola**

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		3) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik 4) **Menyusun desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka panjang** 5) Meningkatkan kemampuan literasi, budaya gemar membaca dan pelestarian karya 6) Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka 7) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua 8) Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien **9) Mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat** **10) Meningkatkan layanan posyandu dan kesehatan gizi masyarakat** 11) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			**layanan pendidikan yang berkualitas** **2) Peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik yang merata** 3) Peningkatan akses, mutu pelayanan kesehatan bagi semua, dan layanan kesehatan gizi serta mental masyarakat 4) Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan secara efektif dan efisien yang tangguh terhadap pandemi **5) Perwujudan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat** 6) Pembudayaan olahraga untuk semua (sports for all) untuk mewujudkan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga 7) Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran serta akselerasi penguatan ekonomi keluarga
	S.2. Terwujudnya keluarga sejahtera	Mengendalikan kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga		-	-

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang"					
2.1 Meningkatkan ketersediaan pasokan tenaga kerja yang berperan aktif dalam ekonomi.	S.1. Berkurangnya tingkat pengangguran	**1)** Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja **yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja baru** **2)** Memberikan pembinaan hubungan industrial **melalui kolaborasi pemerintah dan pemberi kerja** 3) Melakukan pembinaan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan norma ketenagakerjaan	Mempercepat Regenerasi Kota demi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Huni	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	1) Peningkatan kualitas tenaga kerja **yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja baru** 2) Pembinaan hubungan industrial melalui **kolaborasi pemerintah dan pemberi kerja** 3) Pembinaan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan norma ketenagakerjaan
2.2 Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif.	S.1. Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	1) Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan 2) Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT 3) Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, **jaringan pemasaran**, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM **4) Mendorong kerjasama kemitraan dan wawasan dalam pendampingan UMKM dan koperasi**		Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	1) Peningkatan pertumbuhan wirausaha yang berkualitas dan berkelanjutan 2) Peningkatan pemahaman dan kesadaran anggota dan masyarakat dalam mengembangkan Koperasi berbasis IT 3) Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, **jaringan pemasaran**, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		5) Partisipasi pada pameran dagang, melakukan Misi Dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha/UKM 6) Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan Perdagangan 7) Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang 8) Peningkatan partisipasi pameran dagang, Pemasaran hasil produk koperasi dan UKM melalui Bazar dan Expo			
2.3 Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	S.1. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan **melalui peningkatan ketahanan pangan, terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas dan kualitas dan keterjangkauan pangan**		Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan **melalui peningkatan ketahanan pangan, terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas dan kualitas dan keterjangkauan pangan**
2.4 Meregenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota	S.1. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi		Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir dan abrasi
	S.2. Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih melalui **Pengelolaan sumber daya air secara terpadu serta peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan akses air bersih** 2) Meningkatkan dan mengelola sistem pengolahan air limbah 3) Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan		Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1) Peningkatan infrastruktur air bersih melalui **pengelolaan sumber daya air terpadu serta peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan akses air bersih**

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		penanganan sampah **sekaligus mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air**			2) Peningkatan dan pengelolaan infrastruktur air limbah 3) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah sekaligus **mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air**
	S.3. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan 2) Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap 3) Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki prasarana Jaringan Utilitas 4) Pengembangan Sistem Angkutan Umum 5) Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi		Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1) Peningkatan konektivitas dan kelengkapan prasarana jalan dengan tetap mempertahankan kualitas jalan provinsi dalam kondisi mantap 2) Pengembangan sistem dan jaringan angkutan umum yang terintegrasi
	S.4. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	1) Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan 2) Penyediaan, Pengelolaan dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi		Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan
	S.5. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1) Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan 2) Peningkatan Jumlah Perumahan Rakyat yang lengkap sarana dan prasarana		Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
2.5 Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta.	S.1. Meningkatnya pertumbuhan investasi	1) Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal **untuk penguatan green investment** dan Pembangunan Jakarta Investment Center (JIC) 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan 3) Meningkatkan sinergi antar sesama BUMD/PT Patungan dan SKPD, memperkuat daya saing BUMD/PT Patungan, konsolidasi BUMD/PT Patungan untuk menguatkan struktur modal. SDM dan bisnis, menerapkan prinsip GCG, mendorong BUMD/PT Patungan Go Public, transformasi bisnis BUMD/PT Patungan Go Public, optimalisasi aset BUMD, meningkatkan pelayanan BUMD, memberikan PMD secara selektif untuk proyek penugasan tertentu		Meningkatnya pertumbuhan investasi	1) Penerapan kebijakan, penyelenggaraan promosi penanaman modal untuk **penguatan green investment** serta pembangunan dan optimalisasi Jakarta Investment Center (JIC) 2) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan 3) Peningkatan kinerja dan peran BUMD melalui pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan
2.6 Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.	S.1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang **sesuai rencana dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi dan investasi**		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Peningkatan kualitas dan **kesesuaian pemanfaatan ruang dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi dan investasi**

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 3: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas					
3.1 Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuanagan daerah yang akuntabel dan transparan.	S1. Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1) Peningkatan Kompetensi SDM 2) Pemetaan Kompetensi SDM Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3) Mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN 4) Mewujudkan jiwa korps Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta 5) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan SDM 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur	1) Peningkatan Kompetensi SDM dan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan SDM 2) Pengembangan sistem manajemen kinerja ASN dan jiwa korps Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta
3.2 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasiskan data	S1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis, transparan dan akuntabel serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan 2) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 3) Optimalisasi pelayanan pemakaman 4) Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun 5) Melaksanakan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi 6) Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah 7) Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten 8) Mengiplementasikan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	1) Peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi DKI Jakarta melalui perbaikan kualitas Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. 2) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan. **3) Pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan pendataan penduduk dalam rangka**

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik 9) Peningkatan Daya Tanggap dan Inovasi ata Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik Urusan Kesehatan 10) Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan 11) Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat 12) Peningkatan Capaian Kinerja Daerah 13) Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pemerintahan 14) Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi kedewanan 15) Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. 16) Meningkatkan dan mengelola kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. 17) Meningkatkan efektivitas kerjasama luar negeri yang berbasis gerakan 18) Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat 19) Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pemerintahan			**peningkatan layanan yang tepat sasaran** 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi 5) Peningkatan Pelayanan Pemakaman 6) Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun 7) Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 8) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 9) Pengelolaan aset daerah yang akuntabel 10) Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah 11) Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa 12) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 13) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta tepat perilaku melalui penataan kelembagaan, analisa

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		20) Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan penataan kota dan lingkungan hidup 21) Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan Perekonomian 22) Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi sektor keuangan 23) Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral,Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, Membangunan dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik 24) Pengelolaan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah yang efektif dan efisien 25) Peningkatan Capaian Kinerja Daerah 26) Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai 27) Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. 28) Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai 29) Peningkatan Efektifitas Kerjasama Dalam Negeri			jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan target reformasi birokrasi

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		30) Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah 31) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 32) Pengelolaan aset daerah yang akuntabel 33) Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah 34) Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa 35) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 36) Identifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian; 37) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persandian; 38) Sosialisasi Security Awareness; 39) Pelatihan di bidang persandian; 40) Pengelolaan sumberdaya persandian; 41) Operasional pengamanan persandian 42) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta tepat perilaku melalui penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan target Reformasi Birokrasi			

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		43) Peningkatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 44) Peningkatan Persentase Regulasi yang harmonis			
	S2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan secara menyeluruh	**1) Pengembangan sistem pendataan penduduk dalam rangka peningkatan layanan yang tepat sasaran** 2) Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, peningkatan coverage, pemeliharaan berkala 3) Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas data center dari seluruh SKPD/UKPD, menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ketersediaan dan penataan ruang data center serta DED (Detil Engginering Design), pembangunan perluasan data center, relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD 4) Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD, mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPI, Assesment TIK pada SKPD		Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan secara menyeluruh	**1) Peningkatan akses teknologi dan informasi administrasi pemerintahan serta pelayanan publik online yang terintegrasi** 2) Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi 3) Peningkatan mutu data statistic sektoral yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik 4) Pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terkait keterbukaan informasi melalui pengembangan website, pengumuman, pelayanan, dan penyediaan informasi publik

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		5) Assesment TIK pada SKPD, Penguatan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta khususnya Rekomendasi dan Controlling, Komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT Implementasi Project Project Tim, Implementasi RITIK 6) Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, Terpenuhinya Stanard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001 **7) Meningkatkan akses teknologi dan informasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat** 8) Digitalisasi sistem tindaklanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa 9) Trending topik/berita strategis, Mengidentifikasi media dan komunitas potensial, Meningkatkan awareness netizen, Menempatkan beragam informasi di LED dan website informasi SKPD/UKPD, Membuat kemasan informasi menjadi menarik dan mudah dipahami netizen, Penetapan standar kompetensi SDM, kerjasama dengan stakeholder, Melaksanakan Advokasi,			

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
		Pemeringkatan Badan Publik, Edukasi dan Sosialisasi 10) Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan			
Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial					
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	S.1. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1) Pengembangan dan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 2) Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3) Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dengan didukung penyediaan sarana prasarana yang memadai	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan
	S.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH **diantaranya melalui pengembangan taman kota serta pengembangan urban farming untuk stabilitas ketahanan pangan**		Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH **secara adaptif dan inovatif untuk kepentingan ekologis dan sosial kota**
	S.3. Melambatnya penurunan permukaan tanah	Peningkatan cadangan air tanah **melalui efisiensi pemanfaatan, investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air, Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah dan Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah**		Melambatnya penurunan permukaan tanah	Peningkatan cadangan air tanah melalui **efisiensi pemanfaatan, investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air, Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah dan Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah**

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
	S.4. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan, mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan		Terwujudnya Kawasan perkotaan yang layakhuni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Peningkatan kualitas dan kuantitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan
Misi 5: Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan					
5.1 Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.	S.1 Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	1) Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran capaian kinerja pembangunan 2) **Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi**	Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	**Pengembangan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi**
5.2 Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras	S1. Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	1) Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat 2) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial 3) Pemberian pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras	Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	1) Peningkatan kebebasan sipil melalui penguatan ideologi pancasila, pengembangan ketahanan ekososbud, dan penanganan konflik sosial 2) Peningkatan kapabilitas Lembaga demokrasi melalui kolaborasi seluruh stakeholder.
5.3 Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan	S.1. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan **pariwisata berbasis teknologi digital yang adaptif di era tatanan hidup baru**	Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan **pariwisata berbasis teknologi digital yang adaptif di era tatanan hidup baru**

RANWAL RPJMD (11 Desember 2020)			Rancangan Akhir RPJMD (15 Januari 2021)		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**
kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	S.2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan	***Pengembangan SDM berdaya saing global dan pelestarian kebudayaan melalui peningkatan sarana prasarana dan upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.***	perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Peningkatan pelestarian warisan budaya benda dan tak benda yang memperkuat karakteristik budaya Jakarta melalui: (1) Pelestarian kawasan, bangunan, situs, dan benda cagar budaya; dan (2) Pelestarian senibudaya.
	S.3. Terwujudnya pelestarian cagar budaya	***Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik serta nilai tambah pariwisata berbasis cagar budaya melalui ekonomi kreatif***			
				Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Peningkatan pemasyarakatan gemar membaca, penguatan perpustakaan (khusus dan sekolah), serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan (umum & digital) sesuai SNP (sarana prasarana koleksi & tenaga perpustakaan)

Pada Tabel 8.16 di atas, secara umum rekomendasi KLHS terintegrasi dalam Rancangan Akhir perubahan RPJMD. Meskipun ada beberapa perubahan nomenklatur dan jumlah strategi jika dibandingkan dengan RANWAL. Meskipun terdapat strategi yang berkurang atau dirumuskan ulang (*reformulate*) menjadi padanan kalimat yang baru namun rekomendasi KLHS masih teridentifikasi dengan jelas.

Arahan program yang dihasilkan dari proses KLHS setelah disesuaikan dengan Permendagri 90/2019 berjumlah 95 program diringkaskan pada sub bab 8.2 Arahan Kebijakan dan Arhaan Program Untuk PerubahaRPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, tertuang pada Tabel 8.2 -

Tabel 8.7.

Tabel di bawah ini menjelaskan arahan program rekomendasi KLHS yang telah disesuaikan nomenklaturnya dengan Kepmendagri 50/2020 dan telah dipertimbangkan menjadi program prioritas dalam Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2020. Arahan Program Prioritas dijabarkan untuk setiap Misi sementara lokasi indikatif untuk setiap sasaran dalam Misi tersebut. **Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi telah disesuaikan dengan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022**.

Tabel 8.17. Integrasi dan Arahan Program Prioritas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
Misi 1: Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan				
1.1 Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif	S.1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial.	1) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2) Penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 3) Peningkatan kualitas pemuda melalui upaya	Program Prioritas untuk **Misi 1** adalah: **TPB 3** 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Penanggulangan Bencana 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Program Pemberdayaan Sosial	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
		penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda 4) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pendekatan persuasif serta peningkatan kompetensi PPNS	6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 7. Program Rehabilitasi Sosial 8. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat **TPB 8** 9. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial **TPB 4** 10. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11. Program Pengelolaan Pendidikan **TPB 6** 12. Program Pemberdayaan Sosial **TPB 1** 13. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 14. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 15. Program Rehabilitasi Sosial 16. Program Pengelolaan Pendidikan 17. Program Perlindungan Perempuan 18. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 19. Program Penanggulangan Bencana **TPB 2:** 20. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 21. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	S.2. Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	1) Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya 2) Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan		
	S.3. Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1) Pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi **bencana alam maupun non alam melalui kolaborasi seluruh stakeholder** 2) Perlindungan sosial adaptif mencakup pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif		**Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW:** Lokasi kawasan evakuasi bencana utama diarahkan di Kawasan Monumen Nasional, Gelora Bung Karno Senayan, Ancol, Kawasan Islamic Centre, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Margasatwa Ragunan, Hutan Kota Srengseng, Taman Kampung Sawah/Taman Catleya, Halim Perdana Kusuma, Taman BMW, Kebon Pisang, TPU Tegal Alur, TPU Tanah Kusir, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pemakaman, dan kawasan rekreasi lainnya. Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital (Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
1.2 Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berdaya.	S.1. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1) Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan **segala jenjang** yang didukung dengan pemenuhan sarana prasana dan tata **kelola layanan pendidikan yang berkualitas** **2) Peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik yang merata** 3) Peningkatan akses, mutu pelayanan kesehatan bagi semua, dan layanan kesehatan gizi serta mental masyarakat 4) Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan secara efektif dan efisien yang tangguh terhadap pandemi **5) Perwujudan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat** 6) Pembudayaan olahraga untuk semua (sports for all) untuk mewujudkan kesehatan dan kebugaran serta peningkatan prestasi olahraga 7) Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran serta akselerasi	22. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 23. Program Rehabilitasi Sosial 24. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 25. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
		penguatan ekonomi keluarga		
Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang".				
2.1 Mempercepat Regenerasi Kota demi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Huni .	S.1. Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	1) Peningkatan kualitas tenaga kerja **yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja baru** 2) Pembinaan hubungan industrial melalui **kolaborasi pemerintah dan pemberi kerja** 3) Pembinaan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan norma ketenagakerjaan	**Program Prioritas untuk Misi 2 adalah** **TPB 3** 1. Program Kawasan Permukiman / Program Pengembangan Perumahan 2. Program Penataan Bangunan Gedung 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang **TPB 8:** 4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 7. Program Penempatan Tenaga Kerja 8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW:** Pengembangan kawasan strategis kepentingan ekonomi, untuk kegiatan perdagangan, jasa, dan campuran berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional meliputi: Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Segitiga Emas Setiabudi, Manggarai, Jatinegara, Bandar Baru Kemayoran, Dukuh Atas, Mangga Dua, Tanah Abang, Kawasan Ekonomi Strategis Marunda **Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD:** Untuk penciptaan lapangan kerja baru Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penempatan pekerja yang tersebar di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta dan tujuh Pusat Pelatihan Kerja
	S.2. Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	1) Peningkatan pertumbuhan wirausaha yang berkualitas dan berkelanjutan 2) Peningkatan pemahaman dan kesadaran anggota dan masyarakat dalam mengembangkan Koperasi berbasis IT		**Berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW:** a. industri perakitan di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok; b. Kawasan Ekonomi Strategis di Marunda sebagai bagian integral dari pengembangan pelabuhan Tanjung Priok; c. penataan dan relokasi kegiatan industri kecil dan menengah yang berada di kawasan permukiman ke kawasan industri di bagian barat dan timur Jakarta

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
		3) Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, **jaringan pemasaran**, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM	10. Program Pengembangan Umkm 11. Program Promosi Penanaman Modal 12. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 13. Program Hubungan Industrial 14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	d. Kawasan sektor informal sebagai upaya peningkatan ekonomi usaha kecil dan penyediaan ruang bagi sektor informal dilaksanakan berdasarkan arahan berupa pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah; dan penyediaan ruang bagi sektor informal merupakan bagian dari rencana pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran
	S.3. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan **melalui peningkatan ketahanan pangan, terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas dan kualitas dan keterjangkauan pangan**	**TPB 4** 15. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja **TPB 6** 16. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 17. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 19. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 20. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 21. Program Pengelolaan Persampahan 22. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW:** Pengembangan prasarana dan sarana perikanan berupa: a. pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman; b. pengembangan pelabuhan pendaratan ikan di Cilincing, Kalibaru, Kamal Muara, dan Muara Angke; c. pengembangan budi daya, balai benih ikan di Ciganjur, Kalideres, Ujung Menteng, Ciracas dan Pulau Tidung;. d. pengembangan Pusat Promosi perikanan di Cengkareng; dan e. pengembangan pusat pengolahan hasil perikanan.
	S.4. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi	**TPB 1** 23. Program Kawasan Permukiman	**Berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW:** 1) membangun waduk/situ di wilayah yang tepat di DAS Ciliwung dan DAS lain untuk menurunkan debit air di sungai 2) meningkatkan kapasitas aliran Kanal Banjir Barat dan Cengkareng Drain serta pembangunan Cengkareng Drain II untuk kawasan bagian barat 3) meningkatkan kapasitas Cakung Drain, Sungai Sunter dan pembangunan Kanal Banjir Timur untuk kawasan bagian tengah dan timur 4) menghubungkan Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur 5) membangun tanggul laut serta pelebaran dan pendalaman muara sungai di Teluk Jakarta 6) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat, yaitu Kawasan Sempadan pantai yang terlatak di sepanjang pantai utara Jakarta; Kawasan Sempadan Sungai dan Kanal yang terletak di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
			24. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum **TPB 2** 25. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat **26.** Program Pengawasan Keamanan Pangan	seluruh DAS di wilayah DKI Jakarta; serta Kawasan Sekitar Waduk/Danau/Situ di wilayah DKI Jakarta **Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD:** • pembangunan dan revitalisasi waduk/situ/embung sampai dengan tahun 2020 dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada lokasi sebagai berikut : Waduk Rambutan, Waduk Cimanggis, Waduk Lebak Bulus, Waduk Brigif, Situ Babakan, Situ Mangga Bolong, Waduk Pondok Rangon, Waduk Kaja, Waduk Sunter Selatan, Waduk Daan Mogot, Waduk Tomang, Waduk Tegal Alur, Waduk Melati, Waduk Setiabudi, Waduk Giri Kencana, Waduk Jagakarsa dan lain sebagainya pembangunan dan revitalisasi kali/sungai/saluran dilaksanakan sampai dengan tahun 2022 antara lain namun tidak terbatas pada lokasi sebagai berikut : Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kalibaru Barat, Kali Mookervart, Kalibaru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Cakung, Kali Kamal, Kanal Banjir Barat, dan lain sebagainya • pembangunan sumur resapan di Lahan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diwajibkan bagi perorangan dan badan usaha dalam hal penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK), Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). • Peningkatan dan Revitalisasi Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Cengkareng Drain, Cakung Drain dan lain sebaginya • 47 Rencana Polder di Provinsi DKI Jakarta dengan catchment area seluruh sistem polder ini adalah 20.990,86 Ha. (31 polder sudah terbangun) • tanggul laut dan tanggul muara sungai di sepanjang pesisir Pantai Utara Jakarta

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
	S.5. Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	1) Peningkatan infrastruktur air bersih melalui **pengelolaan sumber daya air terpadu serta peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan akses air bersih** 2) Peningkatan dan pengelolaan infrastruktur air limbah 3) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah sekaligus **mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air**		**Berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW::** 1) Mengembangkan jaringan distribusi air bersih di Wilayah Barat, Timur dan Utara Jakarta serta pelayanan air bersih di kawasan permukiman kumuh 2) Peningkatan kapasitas IPLT di Duri Kosambi dan Pulo Gebang, serta pembagunan IPLT baru di Kawasan Barat, Timur dan Selatan DKI Jakarta 3) Pengembangan SPALD sistem terpusat yang dimungkinkan secara selektif berada pada Kawasan Terbuka Hijau Budi daya dan Kawasan Terbuka Biru tanpa mengganggu fungsi utamanya, serta SPALD sistem setempat di Pulo Gebang (kawasan timur), Duri Kosambi (kawasan barat) dan kawasan selatan 4) Optimalisasi TPST Bantar Gebang dan pengembangan TPST dengan fasilitas ITF di Sunter **Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD:** • pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I, serta pengembangan jalur pipa transmisi mulai dari titik off-take (titik perbatasan Bekasi-Jakarta) hingga reservoir utama yang direncanakan di wilayah pelayanan DKI Jakarta. Penyaluran air curah ke setiap titik pengambilan atau offtakes dilakukan secara gravitasi dari Menara Air Sentra Timur yang terletak di Pondok Kopi. selain itu dilakukan inisiasi kerjasama pengembangan SPAM Karian, pengembangan IPA Buaran 3, Pengolahan Air (IPA) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO serta)rainwater harvesting untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu • Dari 15 zona sistem sanitasi terpusat (off-site Sanitation), direncanakan dalam 5 tahun kedepan akan dibangun setidaknya namun tidak terbatas pada 3 (tiga) Sistem Pemgolahan Air Limbah Terpusat (SPALT) Jakarta Sewerage System (JSS). Selain itu diupayakan pula pembangunan sistem sanitasi setempat (on-site sanitation) pada 50 lokasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
				• dimulai tahapan proses pembangunan 2 (dua) unit dari target 4 (empat) unit ITF yakni ITF Zona I (ITF Sunter), Zona II (Barat), Zona III (Timur), dan Zona IV (Selatan). Optimalisasi TPST Bantargebang
	S.6. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1) Peningkatan konektivitas dan kelengkapan prasarana jalan dengan tetap mempertahankan kualitas jalan provinsi dalam kondisi mantap 2) Pengembangan sistem dan jaringan angkutan umum yang terintegras		**Berdasarkan PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW::** 1) Pengembangan sistem dan jaringan transportasi perkerataapian berupa angkutan massal berbasiskan rel, meliputi : a. jaringan Mass Rapid Transit (MRT) lintas Lebak Bulus - Fatmawati-Dukuh Atas-Bundaran Hotel Indonesia - Kota/Kampung Bandan, lintas Timur – Barat, dan lintas penghubungnya; b. jaringan Light Rail Transit (LRT); c. jaringan Kereta Lingkar Dalam Kota; d. jaringan Kereta Komuter Jabodetabek; e. jaringan Kereta menuju Bandara lintas Manggarai-Bandara Soekarno Hatta; f. jaringan Kereta Api Barang pendukung Pelabuhan Tanjung Priok; g. penanganan perlintasan sebidang kereta api; h. penanganan kawasan permukiman illegal di jalur kereta api; dan i. pengembangan jalur kereta api eksisting menjadi multitrack. 2) Rencana pengembangan koridor utama busway: Blok M - Kota, Pulo Gadung - Harmoni, Kalideres - Harmoni, Pulo Gadung - Dukuh Atas, Kampung Melayu - Ancol, Ragunan - Dukuh Atas, Kampung Rambutan - Kampung Melayu, Lebak Bulus - Harmoni, Pinang Ranti - Pluit, Cililitan - Tanjung Priok, Pulo Gebang - Kampung Melayu, Pluit - Tanjung Priok, Blok M - Pondok Kelapa, Manggarai - Universitas Indonesia, Ciledug - Blok M 3) Lokasi stasiun dan lokasi potensi penyediaan fasilitas park and ride : Kota/Kampung Bandan, Rawa Buaya, Tanah Abang, Manggarai, Senen, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Cakung, Kalideres, Blok M, Lebak Bulus, Ragunan, Kampung Rambutan, Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kembangan 4) Rencana terminal: Rawa Buaya, Pulogebang, Lebak Bulus, Kampung Rambutan, Tanjung Priok, Pulo Gebang, Manggarai, Senen

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
				5) Perampungan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) : Pondok Pinang-Puri Kembangan, Puri Kembangan-Sedyatmo dan Rorotan-Tanjung Priok 6) Pembangunan Jalan Tol DKI Jakarta : Rawa Buaya-Kemayoran-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Kampung Melayu-Kemayoran, Kampung Melayu-Duri Pulo, Pasar Minggu-Casablanca, Ulujami-Tanah Abang 7) Pembatasan lalu lintas di Kawasan tengah Jakarta 8) Pengembangan baru Pelabuhan Marunda serta rehabilitasi dan pemantapan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa **Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD** Pembangunan MRT Jakarta direncanakan pada dua jalur, yaitu Koridor North – South dan Koridor East – West. Koridor North – South dibangun sepanjang ± 30 km, yaitu Fase 1 dari Lebak Bulus – Bundaran HI, Fase 2A Bundaran HI – Kota, dan Fase 2B Kota – Ancol Barat. MRT Koridor Timur – Barat direncanakan sepanjang 87 km yang akan melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, dengan rencana indikatif Cikarang – Balaraja dimana untuk Provinsi DKI Jakarta direncanakan dalam 2 (dua) fase pembangunan. Selain itu terdapat usulan rencana koridor Fatmawati - TMII, dengan rencana lokasi depo di Kampung Rambutan yang memungkinkan konektivitas dengan angkutan berbasis jalan serta rencana LRT Jabodebek LRT Jakarta Kelapa Gading –Velodrome yang sudah terbangun, serta rencana fase 2A koridor Kelapa Gading - Jakarta International Stadium (JIS) dan fase 2B koridor Velodrome – Klender –Cawang Rencana Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) Tahun 2021 di Koridor Simpang TB Simatupang – Bundaran HI, dan tahun 2022 di Koridor Kuningan, Koridor Harmoni – Cawang, Koridor Cawang – Simpang Perintis Kemerdekaan, Koridor Simpang Pramuka – Gunung Sahari, Koridor Kota – Bundaran HI prioritas fasilitas Park and Ride dalam 5(lima) tahun kedepan adalah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
				pada lokasi sepanjang trase MRT Fase-1 dan trase LRT yang akan mulai beroperasi dan ataupun Trans Jakarta (BRT). Park and Ride eksisting di Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres, Ke depan direncanakan pembangunan park and ride secara vertikal pada lokasi Lebak Bulus, TB. Simatupang dan Kawasan Kota Tua. sampai dengan tahun 2022 direncanakan akan dilakukan revitalisasi pada 6 (enam) lokasi terminal, yaitu Terminal Rawa Buaya, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Lebak Bulus, Terminal Kampung Melayu, Terminal Manggarai, dan Terminal Senen dikembangkan rencana induk kawasan TOD yang berlokasi di delapan stasiun, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Blok M, Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas dan Stasiun Bundaran HI; potensi TOD MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2A dan 2B (Bundaran HI – Kota - Ancol Barat); serta potensi TOD pada jalur LRT yaitu di Depo Pegangsaan, Koridor Pulo Mas dan Velodrome Rawamangun
	S.7. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	1) Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan		
	S.8. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1) Peningkatan dan pemeliharaan perumahan rakyat beserta sarana prasarananya		
	S.9. Meningkatnya pertumbuhan investasi	1) Penerapan kebijakan, penyelenggaraan promosi penanaman modal untuk **penguatan green investment** serta		**Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
		pembangunan dan optimalisasi Jakarta Investment Center (JIC) 2) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan 3) Peningkatan kinerja dan peran BUMD melalui pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan		Pembentukan Jakarta Investment Centre (JIC) melalui pengupayaan optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat investasi di DKI Jakarta
	S.10. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang **sesuai rencana dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi dan investasi**		
Misi 3: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas				
3.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	S1. Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	1) Peningkatan Kompetensi SDM dan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan SDM 2) Pengembangan sistem manajemen kinerja ASN dan jiwa korps Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta	**Program Prioritas pada Misi 3.** **TPB 8** 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	S2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta	1) Peningkatan akuntabilitas kinerja Provinsi DKI Jakarta melalui perbaikan kualitas Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,	4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia **TPB 4** 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
	model organisasi pemerintahan yang dinamis	Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. 2) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan penyajian profil kependudukan. **3) Pengembangan sistem pelayanan administrasi kependudukan pendataan penduduk dalam rangka peningkatan layanan yang tepat sasaran** 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi 5) Peningkatan Pelayanan Pemakaman 6) Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun 7) Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 8) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 9) Pengelolaan aset daerah yang akuntabel 10) Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah 11) Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa 12) Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 9. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 10. Program Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
		penyelenggaraan pemerintah daerah 13) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta tepat perilaku melalui penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan target reformasi birokrasi		
	S3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan secara menyeluruh	**1) Peningkatan akses teknologi dan informasi administrasi pemerintahan serta pelayanan publik online yang terintegrasi** 2) Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi 3) Peningkatan mutu data statistic sektoral yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik 4) Pemenuhan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) terkait keterbukaan informasi melalui pengembangan website, pengumuman, pelayanan, dan penyediaan informasi publik		**Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD** Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, memiliki Sistem Cepat Respon Masyarakat yang terdiri dari kanal pengaduan resmi Pemerintah Daerah yang terdiri atas: JAKI (Jakarta Kini); Twitter @dkijakarta; Facebook Pemprov DKI Jakarta; Surat Elektronik/ Email dki@jakarta.go.id; Media Sosial Pribadi Gubernur; SMS 0811272206; Balai Warga www.jakarta.go.id; Qlue; Pendopo Balaikota; Kantor Inspektorat; Kantor Walikota; Kantor Camat; Kantor Lurah; dan LAPOR 1708. Selain itu akan dibentuk Pusat Data Daerah dan pengintegrasian aplikasi Perangkat Daerah ke dalam portal Jakarta Satu Data
Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	S.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan	1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan	**Program Prioritas pada Misi 4** **TPB 6** 1) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	**Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW:** Kawasan Suaka Alam : Kawasan Cagar Alam Pulau Bokor, Kawasan Cagar Alam Kamal, Kawasan Suaka margasatwa Pulau Rambut, Kawasan Suaka Margasatwa Muara Angke, Kawasan Hutan Lindung Kapuk, Kawasan Hutan Lindung terletak di Zona Inti Taman nasional laut Kepulauan Seribu Kawasan Pelestarian Alam : Kawasan Taman Wisata Alam Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan : Kawasan Sepanjang Kanal Banjir Barat, Sepanjang Kanal Banjir Timur, dan Sepanjang Sungai Ciliwung
	S.2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas RTH **secara adaptif dan inovatif untuk kepentingan ekologis dan sosial kota**		**Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD** Target kondisi akhir penataan RTH di 2022 sebanyak: 81 RTH Taman, 21 RTH Hutan Kota, 49 RTH Makam, 58 RTH Jalur Hijau
	S.3. Melambatnya penurunan permukaan tanah	Peningkatan cadangan air tanah **melalui efisiensi pemanfaatan, investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air, Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah dan Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah**		**Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW** Pemulihan dan peningkatan Kawasan Resapan Air yang berada di wilayah DKI Jakarta bagian selatan dan 13 aliran sungai utama yang melalui DKI Jakarta
	S.4. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan, mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan		**Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD** Penataan 200 RW Kumuh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
Misi 5: Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan				
5.1 Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.	S.1 Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	1) **Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi**	**Program Prioritas pada Misi 5** **TPB 8** 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 5. Program Pengembangan Kebudayaan **TPB 4** 1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.2 Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras	S1. Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya	1) Peningkatan kebebasan sipil melalui penguatan ideologi pancasila, pengembangan ketahanan ekososbud, dan penanganan konflik sosial 2) Peningkatan kapabilitas Lembaga demokrasi melalui kolaborasi seluruh stakeholder		
5.3 Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta	S.1. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan **pariwisata berbasis teknologi digital yang adaptif di era tatanan hidup baru**		**Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW** fungsi Kawasan Pariwisata tidak digambarkan pada Rencana Pola Ruang DKI Jakarta karena bersifat fungsional dan dapat melekat pada peruntukan ruang untuk fungsi budidaya lainnya. **Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD** Taman Benyamin Sueb, Zona C pada Perkampungan Budaya Betawi (PBB), Thamrin 10, Monumen Nasional, Kawasan Kota Tua, Kepulauan Seribu, serta kawasan wisata urban di Cikini, Blok M, Cipete, dan Kemang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Program Prioritas	Lokasi Indikatif
mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia	S.2. Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Peningkatan pelestarian warisan budaya benda dan tak benda yang memperkuat karakteristik budaya Jakarta melalui: (1) Pelestarian kawasan, bangunan, situs, dan benda cagar budaya; dan (2) Pelestarian seni budaya.		**Berdasarkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW** Kawasan strategis kepentingan sosial budaya meliputi: Kawasan Kota Tua; Kawasan Menteng; Kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM); Kawasan Kebayoran Baru; dan Kawasan Situ Babakan. Kawasan Cagar Budaya : Kawasan Kota Tua, Menteng, Rumah Sipitung, Kebayoran Baru, Kawasan Condet, Situ Babakan, Srengseng Sawah, bangunan bersejarah lainnya **Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang KSD** Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM), Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Taman Budaya Benyamin Sueb, Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, Zona C pada Perkampungan Budaya Betawi (PBB)
	S.3. Meningkatnya **budaya literasi masyarakat**	Peningkatan pemasyarakatan gemar membaca, penguatan perpustakaan (khusus dan sekolah), serta peningkatan akses dan kualitas perpustakaan (umum dan digital) sesuai SNP (sarana prasarana, koleksi dan tenaga perpustakaan).		

8.4 Penelaahan KLHS dalam Dokumen Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022

Penelaahan KLHS dalam Dokumen Rancangan awal Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 dilakukan sebagai amanat dari Pasal 20 Permendagri No. 7/ 2018 yaitu

(1) Tim penyusun RPJMD melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD dalam rancangan awal dokumen RPJMD;
(2) Penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyesuaikan proses konsultasi RPJMD.
(3) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur memeriksa hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rancangan awal RPJMD, laporan KLHS RPJMD, dan hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan.

Penelaahan KLHS menunjukan secara langsung substansi dan integrasi atas rekomendasi KLHS yang termuat dalam Dokumen Ranwal Perubahan RPJMD. Sehingga rekomendasi KLHS tidak hanya terbatas pada usulan penyempurnaan Ranwal RPJMD namun benar-benar telah terintegrasikan dalam dokumen.

Sejalan dengan proses finalisasi KLHS, penyusunan Perubahan RPJMD memasuki Ranhir. Oleh karenanya untuk memastikas bahwa rekomendasi KLHS juga terakomodir dalam Ranhir, maka tabel penelaahan di bawah ini juga mengidentifikasi integrasi KLHS dalam Ranhir.

Tabel 8.18. Penelaahan Integrasi KLHS dalam Dokumen RPJMD (Ranwal hingga Ranhir)

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
Bab 1 - Pendahuluan Sub Bab 1.1 Paragraf 4-5 dapat dijadikan bahan input tambahan pada Ranwal Bab I hal I-4 untuk paragraf 2. Sub Bab 1.1 Paragraf 4-5 menjelaskan tentang perlunya perubahan RPJMD yang menjadikan sebab dilaksanakannya KLHS dan urgensi KLHS untuk RPJMD sesuai dengan UU 32/2009. Pada sub bab 1.1 Latar Belakang RPJMD, dapat ditambahkan aturan perubahan RPJMD, Permendagri 86/2017 Pasal 342, yang mendasari proses perubahan RPJMD karena perubahan yang mendasar antara lain dampak akibat COVID-19, perubahan agenda kebijakan nasional. Hal ini seperti diterangkan pada Pasal 342 ayat (3), yang menjelaskan perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, **krisis ekonomi**, konflik sosial budaya,gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau **perubahan kebijakan nasional**	⇒	**Bab I - Pendahuluan** Pada sub bab 1.1 Latar Belakang RPJMD, terdapat kalimat "Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 **sejalan dengan ketentuan Pasal 342** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang…… akan menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022**."**	⇒	**Bab I - Pendahuluan** Pada sub bab 1.1. Latar Belakang RPJMD, ada dalam paragraf: "Latar belakang Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang …….. **dimana Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional"**
Bab 2 Perkembangan Fungsi Wilayah DKI Jakarta Bab ini mendapatkan input dari Bab II Ranwal yaitu dari Sub Bab II.1 Sejarah Kota Jakarta	⇔	**Bab II - Gambaran Umum Kondisi Daerah** Sub Bab II.1 Sejarah Kota Jakarta menjadi input untuk KLHS pada Bab 2 Perkembangan Fungsi Wilayah DKI Jakarta.	⇔	**Bab II - Gambaran Umum Kondisi Daerah** Sub Bab II.1 Sejarah Kota Jakarta menjadi input untuk KLHS pada Bab 2 Perkembangan Fungsi Wilayah DKI Jakarta.
Bab 3 Kondisi Provinsi DKI Jakarta Sub Bab 3.1.1 Wilayah - 3.1.4 Klimatologi merupakan input dari Bab II Ranwal II.3.1 Sub Bab 3.1.5 Ekoregion dapat dijadikan tambahan gambaran umum kondisi daerah pada Ranwal sebelum Sub Bab II.3.1.7 Penggunaan Lahan. KLHS Sub Bab 3.1.6 Penutup Lahan dapat dijadikan tambahan untuk pengkinian gambaran penutup lahan pada Ranwal Sub Bab II.3.1.7	⇔	Sub Bab II.3.1 Karakteristik Wilayah menjadi input untuk KLHS pada Sub Bab 3.11 – 3.1.4	⇒	Sub Bab II.3.1 Karakteristik Wilayah menjadi input untuk KLHS pada Sub Bab 3.11 – 3.1.4 Penambahan sub bab **II.3.1.7 Ekoregion dan** updating penggunaan lahan/penutupan lahan (2018) pada **II.3.1.8 Penggunaan Lahan** sesuai inpit KLHS sub bab 3.16

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
Bab 5 Analisis Capaian TPB pada OPD di DKI Jakarta Kondisi Umum Capaian Target TPB pada sub bab 5.1 (kecuali Sub bab 5.1.1-5.1.4), 5.2 Analisis Gap Target Capaian TPB, 5.3 Capaian Indikator TPB pada Organisasi Perangkat Daerah dapat dimasukkan pada Ranwal Bab II.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	⇒	-	⇒	**Bab 2.** Terdapat penambahan sub bab **II.4.1 Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**
Bab 4 Gambaran Kondisi Lingkungan Hidup Provinsi DKI Sub Bab 4.1 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup hingga Sub Bab 4.6 Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim dapat menjadi bagian pada Ranwal untuk Sub Bab .II.4.2.2 Bagian **huruf E. Urusan Lingkungan Hidup**	⇒	Sub Bab .II.4.2.2 Bagian huruf E. Urusan Lingkungan membahas tentang pengelolaan sampah dan IKLH	⇒	Penambahan substansi 6 muatan KLHS ke dalam Sub Bab .II.4.2.2 Bagian huruf E. Urusan Lingkungan, yaitu: (1) Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup (2) Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup (3) Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan (4) Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (5) Potensi dan Ketahanan Keanekaragaman Hayati (6) Kerentanan dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
Bab 3. Sub Bab 3.3 Kondisi Fiskal dan Anggaran Pemerintah Daerah DKI Jakarta merupakan input dari RANWAL sub bab III.1.1.1 Pendapatan Daerah	⇐	**Bab III- Gambaran Keuangan Daerah** Sub Bab III.1.1.1 Pendapatan Daerah telah menjadi input pada KLHS Perubahan RPJMD sub bab 3.3.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	⇔	**Bab III- Gambaran Keuangan Daerah** Sub Bab III.1.1.1 Pendapatan Daerah telah menjadi input pada KLHS Perubahan RPJMD sub bab 3.3.1 Persentase PAD terhadap Pendapatan
Bab 7 Sub Bab 7.4.2 Potensi Sumber Pembiayaan lain Pemerintah Daerah merupakan input dari RANWAL Sub Bab III.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial	⇐	Sub Bab III.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 menjadi input pada input pada KLHS Perubahan RPJMD Sub Bab 7.4.2 Potensi Sumber Pembiayaan lain Pemerintah Daerah	⇔	Sub Bab III.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 menjadi input pada input pada KLHS Perubahan RPJMD Sub Bab 7.4.2 Potensi Sumber Pembiayaan lain Pemerintah Daerah
Bab 6. Gambaran capaian target indikator TPB Tahun 2019 yang ada pada bab 6 Laporan KLHS, Gambar 6.1, dapat ditambahkan pada Ranwal untuk sub bab IV.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DKI. dapat ditambahkan capaian TPB sub bab 5.1.1 – 5.1.4., prioritasi TPB DKI Jakarta berdasarkan sub bab 6.1.2 KLHS dan interlinknya dengan TPB lain berdasarkan sub bab 7.1 KLHS.	⇒	**Bab IV - Permasalahan dan Isu Strategis Daerah** Pembahasan TPB terdapat dalam Sub Bab IV.6.2 Sustainable Development Goals (SDGs), namun masih secara umum membahas 17 TPB tersebut.	⇒	**Bab IV - Permasalahan dan Isu Strategis Daerah** Pembahasan TPB terdapat dalam Sub Bab IV.6.2 Sustainable Development Goals (SDGs), profil TPB dikerucutkan pada 6 TPB prioritas hasil KLHS beserta interlinknya.

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
Sub bab 6.1.2 Prioritasi Isu TPB, didapat 6 TPB Prioritas yaitu: 1. TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera 2. TPB 8: Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi 3. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak 4. TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas 5. TPB 1: Tanpa Kemiskinan 6. TPB 2: Tanpa Kelaparan	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 dari 18 (dipenjabarannya hanya ada 17 isu) isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta, 11 isu telah mengakomodir 6 TPB Prioritas sbb: 1. Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan → TPB 4 2. Isu Peningkatan Kualitas PembangunanKesehatan → TPB 3 3. Isu Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas → TPB 4 dan TPB 3 (akses layanan yg inklusif) 4. Isu Penguatan Ketahanan Pangan → TPB 2 5. Isu Industri Kreatif Yang Berdaya Saing → TPB 8 6. Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja → TPB 8 7. Isu Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan → TPB 6 8. Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota → TPB 6 (Jumlah RTH dan pemanfaatan air tanah) 9. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota → TPB 1 dan TPB 3 10. Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup → TPB 6 11. Isu Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah → TPB 8	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 dari 17 isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta, 11 isu telah mengakomodir 6 TPB Prioritas sbb: 1. Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan → TPB 4 2. Isu Peningkatan Kualitas PembangunanKesehatan → TPB 3 3. Isu Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas → TPB 4 dan TPB 3 (akses layanan yg inklusif) 4. Isu Penguatan Ketahanan Pangan → TPB 2 5. Isu Industri Kreatif Yang Berdaya Saing → TPB 8 6. Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja → TPB 8 7. Isu Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan → TPB 6 8. Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota → TPB 6 (Jumlah RTH dan pemanfaatan air tanah) 9. Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota → TPB 1 dan TPB 3 10. Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup → TPB 6 11. Isu Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah → TPB 8
Sub Bab 6.1.2.4 TPB 4: Pendidikan Berkualitas, dapat dimasukkan dalam pembahasan isu strategis di RANWAL pada sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Pendidikan, isu nomer 1 dari 18 isu strategis. Sub bab 6.1.2.4 Lap KLHS akan mengayakan profil isu strategis Ranwal.	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Pendidikan (isu nomer 1 dari 17 isu strategis) dijabarkan secara umum.	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Pendidikan (isu nomer 1 dari 18 isu strategis) dijabarkan secara umum namun **diperjelaskan berdasarkan data-data APM pada Sub Bab II.4.2.1 Huruf A. Urusan Pendidikan**

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
Sub Bab 6.1.2.1 TPB 3: Kehidupan Sehat Sejahtera dapat dimasukkan dalam pembahasan isu strategis di RANWAL pada sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Kesehatan, isu nomer 2 dari 18 isu strategis. Sub bab 6.1.2.1 dari Lap KLHS akan mengayakan profil isu strategis Ranwal	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Kesehatan (isu nomer 2 dari 18 isu strategis) dijabarkan secara umum.	⇒	Data-data untuk urusan kesehatan dimasukkan ke Bab II.4.3 RPJMD bagian B. Urusan Kesehatan
Sub bab 6.1.2.6 TPB 2 Tanpa Kelaparan dapat dimasukkan dalam pembahasan isu strategis di RANWAL pada sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Ketahanan Pangan, isu nomer 6 dari 18 isu strategis. Sub bab 6.1.2.6 dari Lap KLHS akan mengayakan profil isu strategis Ranwal	⇒	Penjelasan secara umum ketersediaan pangan dijelaskan pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Isu Penguatan Ketahanan Pangan (isu nomer 6 dari 18 isu strategis)	⇒	Permasalahan pada TPB 2: Tanpa Kelaparan yaitu stunting dan gizi masyarakat telah terdapat pada IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Kesehatan.
Sub Bab 6.1.2.3 TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak dapat dimasukkan dalam pembahasan isu strategis di RANWAL pada sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidu (isu nomer 15 dari 18 isu strategis). Sub bab 6.1.2.3 dari Lap KLHS akan mengayakan profil dari isu strategis Ranwal.	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (isu nomer 15 dari 18 isu strategis), secara umum membahas tentang penurunan kualitas LH yang terlihat dari pencemaran air.	⇒	Terdapat penambahan narasi pada sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang sampah infeksius yang mengacu Bab 4.2 Laporan KLHS.
Bab 4 Sub bab 4.3.4 Jasa LH Pengatur Mitigasi Banjir Lap KLHS dapat ditambahkan pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Antisipasi Rob, Banjir dan Genangan (isu nomer 9 dari 18 isu strategis)	⇒	Pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Antasipasi Rob, Banjir dan Genangan (isu nomer 9 dari 18 isu strategis) secara umum menjelaskan tentang permasalahan sungai, drainase dan wilayah serapan air sebagai penyebab terjadi rob dan banjir.	⇒	Penambahan pembahasan berdasarkan laporan KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022 pada sub bab 4.3.4.1, kinerja Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Banjir Tahun 2018.

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
Sub Bab 6.1.2.2 TPB 8: Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi dapat ditambahkan pada Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (isu nomer 8 dari 18 isu strategis). Sub Bab 6.1.2.5 TPB 1: Tanpa Kemiskinan juga dapat ditambahkan pada isu nomer 8 ini setelah paragraph ke-2.	⇒	Ranwal sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (isu nomer 8 dari 18 isu strategis) menjelaskan secara umum tentang kemiskinan dan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian.	⇒	**Data angka gini dan kemiskinan telah ada di Bab II.4.2.4 dan II.4.2.5**, sementara pada sub bab IV.8 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 untuk Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja dijelaskan secara umum narasi peningkatan gini akibat pandemi..
Bab 8. Pada Subbab 8.1 Visi dan Misi Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022, terdapat Matriks Perbandingan Kebijakan RPJMN, RPJMD dan Tinjauan KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022 untuk melihat keterkaitan **Misi** pada perubahan RPJMD KLHS terhadap TPB Prioritas dan kesesuaian dengan kebijakan pada RPJMN dan RPJPD. **Tujuan dan Sasaran RPJMD telah dikaji keterkaitannya dengan rekomendasi arahan kebijakan KLHS yang terdapat pada sub bab 8.3 Integrasi pada tabel 8.8 -8.12 kolom tinjauan KLHS untuk Tujuan dan Sasaran RPJMD**	⇔	**Bab V -** Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	⇒	**Bab V -** Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bab 8. Sub Bab 8.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta (Ranwal), hasil integrasi strategi atas penyepakatan melalui berita acara sepenuhnya diakomodir di RANWAL RPJMD. Integrasi strategi: Tabel 8.8 -8.12	⇔	**Bab VI - Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah** SubBab VI.1 Strategi Pembangunan • Dari 29 strategi yang ada pada Misi 1, sebanyak total 16 yang telah terintegrasi dengan KLHS, dimana 9 strategi tidak berubah nomenklaturnya dan 7 strategi berubah/ditambahkan • Dari 33 strategi yang ada pada Misi 2, sebanyak total 17 yang telah terintegrasi dengan KLHS, dimana 8 strategi tidak berubah nomenklaturnya dan 9 strategi berubah/ditambahkan	⇒	**Bab VI - Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah** Strategi pada Ranhir RPJMD mengalami perubahan pada tujuan, sasaran maupun strategi itu sendiri melalui serangkaian diskusi pembahasan RPJMD. Oleh karenanya identifkasi integrasi KLHS dalam Ranhir RPJMD dilakukan sebagaimana Tabel 8.16 di atas, dengan ringkasan sebagai berikut: • Misi 1: 15 strategi, 4 strategi merupakan usulan perubahan./penambahan hasil rekomendasi KLHS • Misi 2: 19 strategi, 8 strategi merupakan usulan perubahan./penambahan hasil rekomendasi KLHS

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
		• Dari 52 strategi yang ada pada Misi 3, sebanyak total 2 yang telah terintegrasi dengan KLHS dan keduanya merupakan strategi berubah/ditambahkan • Dari 6 strategi yang ada pada Misi 4, sebanyak total 3 yang telah terintegrasi dengan KLHS, dimana 1 strategi tidak berubah nomenklaturnya dan 2 strategi berubah/ditambahkan • Dari 7 strategi yang ada pada Misi 5, sebanyak total 4 yang telah terintegrasi dengan KLHS, dimana strategi tersebut telah berubah/ditambahkan.		• Misi 3: 19 strategi, 2 strategi merupakan usulan perubahan./penambahan hasil rekomendasi KLHS • Misi 4: 4 strategi, 2 strategi merupakan usulan perubahan./penambahan hasil rekomendasi KLHS • Misi 5: 6 strategi, 2 strategi merupakan usulan perubahan./penambahan hasil rekomendasi KLHS
Bab 8. Sub Bab 8.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta (Ranwal), usulan program prioritas. Program Prioritas rekomendasi KLHS terdapat : Tabel 8.13	⇔	Sub Bab VI.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1) Dari 20 Program Prioritas pada Misi 1, sebanyak 10 Program merupakan Rekomendasi KLHS 2) Dari 20 Program Prioritas pada Misi 2, sebanyak 13 Program merupakan Rekomendasi KLHS 3) Dari 27 Program Prioritas pada Misi 3, sebanyak 7 Program merupakan Rekomendasi KLHS 4) Dari 5 Program Prioritas pada Misi 4, sebanyak 2 Program merupakan Rekomendasi KLHS 5) Dari 8 Program Prioritas pada Misi 5, sebanyak 3 Program merupakan Rekomendasi KLHS Terdapat beberapa arahan program KLHS yang belum terintegrasi ke dalam RANWAl, hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan nomenklatur program. Arahan program tersebut **yang belum terintegrasi** yaitu: **Misi 1:** • Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum • Program Pemberdayaan Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Peningkatan Kualitas Keluarga	⇒	Sub Bab VI.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 1) Dari 23 Program Prioritas pada Misi 1, sebanyak 12 Program merupakan Rekomendasi KLHS 2) Dari 30 Program Prioritas pada Misi 2, sebanyak 19 Program merupakan Rekomendasi KLHS 3) Dari 29 Program Prioritas pada Misi 3, sebanyak 7 Program merupakan Rekomendasi KLHS 4) Dari 6 Program Prioritas pada Misi 4, sebanyak 2 Program merupakan Rekomendasi KLHS 5) Dari 12 Program Prioritas pada Misi 5, sebanyak 4 Program merupakan Rekomendasi KLHS **Sebagian besar arahan program rekomendasi KLHS telah terintegrasi dalam program pembangunan RPJMD**, terdapat beberapa arahan program yang belum terintegrasi ke dalam Ranhir RPJMD. Arahan program tersebut **yang belum terintegrasi beserta catannya** adalah sebagai berikut: Misi 1: • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) → tidak lagi menjadi program prioritas namun telah terakomodir dalam program perangkat daerah (bab VII)

Substansi KLHS		Dokumen Ranwal RPJMD (11 Desember)		Dokumen Ranhir RPJMD (15 Januari 2021)
		Misi 2: • Program Hubungan Industrial • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengawasan Keamanan Pangan **Misi 3** • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah **Misi 5:** • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya • Program Pengembangan Kebudayaan		Misi 2: • Program Penataan Bangunan Gedung → tidak lagi menjadi program prioritas namun telah terakomodir dalam program perangkat daerah (bab VII) • Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal → sudah terakomodir dalam Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Bab 3 Sub Bab 3.3.2 Peran Para Pihak dapat dijadikan input untuk Ranwal pada Sub Bab VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan , setelah Gambar VII.1 Kerangka Pendanaan yang dapat diimplementasikan Kurun 2017-2022	⇒	-	⇒	Terdapat dalam sub bab II.4.1 Kondisi Umum Capaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada **Gambar II.26 Alokasi dan Realisasi Anggaran OPD terhadap Capaian TPB**
Tidak ada input dari KLHS		**Bab VIII** - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah **Bab IX** - Kegiatan Strategis Daerah Bab X - Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah		**Bab VIII** - Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah **Bab IX** - Kegiatan Strategis Daerah Bab X - Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

BAB 9

BAB 9 PENJAMINAN KUALITAS

Format Penjaminan Kualitas KLHS mengacu pada Lampiran VII Permen LHK No. 69/2017 sebagaimana tabel di bawah ini. Penjaminan Kualitas dilakukan melalui diskusi Tim Pembuat KLHS bersama dengan pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara bertahap pada tingkat Tim Pembuat KLHS hingga penyusun KRP. Tahapan ini sejalan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD sehingga integrasi rekomendasi KLHS berjalan sangat dinamis. Penjaminan kualitas akhir dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 dan disepakati melalui Berita Acara dan Hasil Penjaminan Kualitas dilampirkan pada Lampiran 9.

Tabel 9.1. Penjaminan Kualitas KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Penilaian: Desain Proses KLHS		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? **- Bila "Ya" lanjutkan ke c** **- Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c**	***Ya***	*KLHS ini dilakukan untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. KLHS ini dilakukan secara parallel dengan proses penyusunan RANWAL Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Penyusunan RANWAL diinisiasi 2 bulan lebih awal dari proses KLHS. Rekomendasi KLHS menjadi bagian dari penyusunan RANWAL Perubahan RPJMD yang diintegrasikan secara iteratif mengikuti dinamika proses pelaksanannya.*
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?	-	-
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?	-	-
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	***Ya***	*Penyusun KLHS adalah Tim Pembuat KLHS yang disahkan melalui SK Gubernur No. 1157 tahun 2020 sebagaimana terlampir pada lampiran 1, dimana Ketua Tim Pembuat KLHS adalah Sekretaris Daerah, sementara Wakil Ketua I yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Wakil Ketua II Kepala Bappeda. Tenaga Ahli yang terlibat selama proses penyusunan KLHS diidentifkasi berdasarkan kompetensi tenaga ahli pada lampiran 10*
Ringkasan Kesimpulan: ***Tim Pembuat KLHS telah berusaha seoptimal mungkin untuk mengikuti Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 20l6 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.***		

Penilaian: Laporan KLHS			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah Laporan KLHS telah memuat :		✓	*Belum lengkap*
		✓✓	*Lengkap*
		TS	*Terpenuhi sebagian*
		TR	*Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan)*
1.	Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	✓✓	*Terdapat dalam sub bab 1.1 dan 1.5 Dasar Hukum*
2.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	✓✓	*Terdapat dalam sub bab 1.4 tahapan penyelenggaraan KLHS*
3.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	✓✓	*Terdapat dalam bab 7*
4.	Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	✓✓	*Terdapat dalam bab 8*
5.	Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	✓✓	*Terdapat dalam sub bab 8.2*
6.	Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	✓✓	*Pemangku kepentingan baik dari masyarakat, akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan dan instansi pemerintah telah dilibatkan dalam konsultasi publik dan FGD tematik dengan pemangku kepentingan yang relevan.* *Semua dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (FGD dan konsultasi Publik) terdapat dalam Laporan Notulensi*
7.	Hasil penjaminan kualitas KLHS	✓✓	*Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat dalam lampiran 9*
8.	Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas.	✓✓	*Terdapat dalam Dokumen Ringkasan Eksekutif KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022*

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Nilai: • **Sudah** • **Belum** • **Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)**		
Apakah identifikasi dan perumusan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang merupakan akar masalah melibatkan pemangku kepentingan?	Sudah	*Dilakukan secara partisipatif oleh Tim Pembuat KLHS melalui serangkaian FGD Perumusan TPB Prioritas dan disepakati oleh pemangku kepentingan melalui Konsultasi Publik - I. Perumusan TPB prioritas yang menggambarkan isu-isu strategis di dalamnya telah secara elaboratif*

			menjadi bagian diskusi pada saat konsultasi publik yang diikuti dengan poling untuk penyepakatannya.
Apakah hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:			
1.	Karakteristik wilayah	Sudah	*Dalam diskusi FGD persiapan dan konsultasi publik, isu-isu PB merupakan input dari pemangku kepentingan lintas sektor dari berbagai wilayah dalam Provinsi DKI Jakarta, sehingga isu yang dipaparkan merujuk pada lokasi.*
2.	Tingkat pentingnya potensi dampak	Sudah	*Isu PB Prioritas (TPB Prioritas) salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil capaian indikatornya. Capaian indikator yang perlu perhatian (belum mencapai target), menjadi salah satu poin utama dalam perumusan TPB prioritas. Selain itu, status daya dukung serta keterkaitan dengan perencanaan strategis lainnya telah menjadi pertimbangan.*
3.	Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan	Sudah	*Isu PB Prioritas (TPB Prioritas) ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan isu KRP yang relevan. Interlink TPB prioritas dengan TPB lainnya juga dijabarkan dalam subbab 7.4.*
4.	Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program	Sudah	*Dalam perumusan isu PB prioritas dilakukan analisis keterkaitan dengan Isu pada KRP relevan yaitu RPJMN, RPJPD dan RTRW sebagaimana dijelaskan dalam sub bab 6.1*
5.	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau	Belum	*KLHS belum mempertimbangkan RPPLH. Dokumen RPPLH masih dalam proses finalisasi penyusunan dan belum ada Perda nya.*
6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.	Sudah	*Telah dilakukan pertimbangan dan mengacu perencanaan strategis lainnya termasuk RPJMN, RPJPD, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 beserta Dokumen KLHSnya serta RAD TPB Provinsi DKI Jakarta.*
Apakah rumusan isu prioritas sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.1.*
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.2*
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.3*
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	Sudah	*Potensi banjir dijelaskan melalui kinerja jasa lingkungan mitigasi banjir yang dijelaskan pada sub bab 4.3.4. serta potensi banjir akibat perubahan iklim yang dijelaskan pada sub bab 4.6*
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.	Sudah	*Kualitas sumber daya air dijelaskan dalam sub bab 6.1.2.3, sementara kuantitas air dan pangan dijelaskan melalui sub bab 4.1. mengenai daya dukung.*

6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.5*
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.6*
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	Sudah	*Sudah dijelaskan dalam profil TPB 1 pada subbab 6.1.2.5*
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Sudah	*Dijelaskan dalam profil TPB 3 pada sub bab 6.1.2.1*
10	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	*Ada catatan*	*Tidak ada masyarakat hukum adat di Provinsi DKI Jakarta*
Apakah lingkup geografis diidentifikasi dengan jelas?		Sudah	*Lingkup geografis KRP adalah wilayah Provinsi DKI Jakarta dan telah dijelaskan dalam sub bab 3.1*
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Sudah	*Wilayah diluar cakupan KRP salah satunya diidentifikasi dalam analisis kinerja jasa lingkungan pada sub bab 4.2. Hal ini dilakukan karena dibutuhkan analisis yang kuat dalam mencari keterkaitan jasa lingkungan dalam wilayah fungsionalnya. Wilayah yang dikaji melingkupi Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkait.*
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?		Sudah	*Telah menjadi bahan diskusi dan eksplorasi oleh pemangku kepentingan pada saat FGD dan konsultasi publik sesuai dengan TPB prioritas.*

Keterangan Tambahan:
Proses identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa tahap, diawali dengan diskusi bersama stakeholder kunci berdasarkan analisis gap capaian TPB masing-masing pilar yaitu Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Hukum & Tata Kelola Kelembagaan. Setelah itu dilakukan pengerucutan 10 TPB yang akan diusulkan dalam konsultasi publik untuk menjadi TPB prioritas dengan pertimbangan kondisi lingkungan hidup (6 muatan) dan perencanaan strategis lainnya. Dalam konsultasi publik, disepakati 6 TPB menjadi TPB Prioritas melalui diskusi penyepakatan dan polling. Penyepakatan hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara pada lampiran 4

Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	Peniilaian	Keterangan
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Sudah	*Kondisi terkini dijabarkan melalui capaian TPB pada sub bab 5.1*
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Sudah	*Sudah dijelaskan dalam sub bab 4.1*
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Sudah	*Dilakukan telaahan keterkaitan muatan KRP terhadap Isu PB (TPB Prioritas) dan dibahas secara mendalam pada sub bab 6.2*
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Sudah	
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Ada Catatan	*Analisis untuk KRP tidak secara eksplisit menggunakan metode spasial, namun dalam*

		FGD yang dilakukan mengindikasikan lokasi-lokasi KRPnya.
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh: isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi	-	-

Penilaian: Pengkajian			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
Hasil analisis memuat kajian:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.1*
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.2*
3.	Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.3*
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.4*
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.5*
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.6*
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?		Sudah	*Analisis 6 (enam) muatan KLHS merupakan hasil analisis dari dokumen kajian yang telah ada sebelumnya dari instansi resmi terkait. Dokumen yang menjadi referensi dalam kajian 6 (enam) muatan KLHS adalah:* *1. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH – dokumen ini telah melalui proses konsultasi dengan KLHK.* *2. Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH* *3. Laporan Akhir Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH* *4. Laporan Akhir Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH* *5. Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta 2018, DLH* *6. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta, 2020 - 2024*
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/ referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?		Sudah	
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?		Sudah	
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?		Sudah	*Dijelaskan pada sub bab 1.7 dan 1.8*
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?		Ada catatan	*Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/STJEN/ KUM.1/12/2017 Pasal 13 ayat (2) huruf a bahwa penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS*
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?			
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?			

		wajib mempertimbangkan jenis, tema, hirarki dan skala informasi KRP. *Sehingga dalam penyusunan KLHS ini mengacu pada Permendagri No. 7/2018 tentang KLHS RPJMD. Dalam Permendagri tersebut, KLHS RPJMD dilakukan secara ex-ante sehingga tidak memberikan fokus pada perkiraan dampak namun lebih kepada alternatif perbaikan dan rekomendasinya. Dalam Permendagri 7/2018, rekomendasi KLHS menjadi bagian dalam RANWAL Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang berfokus pada capaian TPB dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.*
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ada catatan	*Dilakukan skenario upaya tambahan dalam rangka pencapaian target, hal ini terdapat pada sub bab 7.6, namun bukan skenario perkiraan dampak.*
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Ada catatan	*Analisis secara spasial dilakukan untuk mengkaji kondisi lingkungan hidup yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (air), kinerja jasa lingkungan, dampak dan resiko lingkungan hidup (timbulan sampah, kualitas air), efisiensi pemanfaatan SDA dan potensi dan ketahanan kehati.*
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Sudah	*Dijelaskan skenario arahan daya dukung dan daya tampung LH pada sub bab 7.1*
Keterangan Tambahan: ***KLHS ini mengacu pada Permendagri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD. Dalam Permendagri tersebut, KLHS RPJMD dilakukan secara ex-ante sehingga tidak memberikan fokus pada perkiraan dampak namun lebih kepada alternatif.***		

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria		Penilaian	Keterangan
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini:			
1.	Perubahan tujuan atau target	*Sudah*	*Keterkaitan dengan arahan kebijakan rekomendasi KLHS dalam Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017 -2022 telah dijabarkan dalam sub bab 8.3 integrasi namun tidak secara eksplisit merubah Tujuan atau Target.*
2.	Perubahan strategi pencapaian target	*Sudah*	*Perubahan Strategi pada Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 dijabarkan pada tabel 8.8 - 8.12 pada sub bab 8.3 integrasi.*

3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	*Sudah*	*Lokasi indikatif kesesuaian sasaran dan program prioritas telah dijabarkan dalam tabel 8.13 pada sub bab 8.3.* *Lokasi indikatif KRP diidentifikasi berdasarkan Kegiatan Strategis Daerah (Pergub No. 1107/ 2019) dan RTRW (Perda No. 1/2012)*
4.	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	*Sudah*	*Era normal baru akibat pandemi COVID-19 menjadi dasar dalam perumusan alternatif dan rekomendasi dalam KLHS.*
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	*Sudah*	*Prioritas Perubahan RPJMD 2017 – 2022 adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.*
6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	*Sudah*	*Ada dalam bab skenario (bab 7) dan rekomendasi (bab 8) sebagai arahan kebijakan terutama dalam TPB 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak dimana* ***investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air*** *menjadi salah satu arahan kebijakan rekomendasi KLHS. Melihat keterkaitannya dengan TPB lain, arahan kebijakan ini turut mendukung TPB 15 Ekosistem Darat yang berfokus pada upaya konservasi untuk meningkatkan fungsi ekosistem.*
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup	*Ada Catatan*	*Dalam alternatif dan rekomendasi dirumuskan arahan kebijakan untuk fokus pada pencapaian TPB Prioritas. KLHS ini tidak berbasis dampak, sehingga tidak merumuskan mitigasi.*
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?		*Sudah*	*Secara umum, Tahapan penyelenggaraan KLHS dan Sistematika dokumen KLHS dijelaskan pada Bab 1. Penjelasan lebih rinci terdapat pada bab 7 dan bab 8.*
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasikan dengan jelas?		*Ada Catatan*	*KLHS menggunakan pendekatan sesuai Permendagri No. 7/2018 (ex-ante) sehingga dilakukan sebelum KRP disahkan.* *Dalam alternatif dan rekomendasi dirumuskan arahan kebijakan untuk fokus pada pencapaian TPB Prioritas. KLHS ini tidak berbasis dampak, sehingga mengarahkan pada upaya (alternatif)*
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin masih akan muncul?			

		menghindari *potensi timbulnya dampak dan resiko, dan tidak merumuskan mitigasi (pengurangan) dampak*
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasikan dengan jelas?	Sudah	*Terdapat penjelasan skenario daya dukung dan daya tampung LH pada sub bab 7.2*
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian dan penyusunan alternatif?	Sudah	*Rekomendasi berdasarkan dari isu prioritas (TPB prioritas) yang teridentifikasi. Alternatif capaian (skenario) dianalisis berdasarkan outcome dari masing-masing TPB prioritas yang sudah mempertimbangkan keterkaitan dengan TPB lainnya sehingga menghasilkan arahan kebijakan yang sesuai yang selanjutnya dirumuskan arahan program sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90/2019 yang diperbaharui dengan Kepmendagri 50/2020.* *Skema perumusan alternatif dan rekomendasi dijelaskan pada bab 7 dan bab 8.*
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Sudah	*Terdapat pada bab 10.*

Penilaian: Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	**Pemenuhan**	**Keterangan**
Apakah telah terpenuhi :	• *Sudah* • *Belum* • *Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)*	
1. Data pendukung proses dan hasil konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	*Sudah*	*Semua dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (FGD dan konsultasi Publik) terdapat dalam Laporan Notulensi*
2. Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	*Sudah*	*Terdapat dalam sub bab 8.4. Penelaahan*
3. Dokumen penjaminan kualitas	*Sudah*	*Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat dalam lampiran 9*
4. Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	*Sudah*	*Terdapat dalam lampiran 10*
5. SK Kelompok Kerja KLHS	*Sudah*	*Terdapat dalam lampiran 1*

Penilaian: Pengintegrasian Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	**Pemenuhan**	**Keterangan**
Apakah telah terpenuhi:		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP	*Sudah*	*Rangkuman terdapat dalam sub bab 8.4 Penelaahan*
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP	*Sudah*	*Hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam muatan KRP terdapat pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2017-2022 yang merupakan lampiran RANPERDA Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Rangkuman hasil integrasi pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2017-2022 terdapat dalam sub bab 8.4 Penelaahan*
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	*Sudah*	
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Tidak	
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	*Sudah*	*Tidak secara ekspilisit dijelaskan tentang pemanfaatan rekomendasi KLHS ini untuk KRP lainnya. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPJMD harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD ataupun rujukan bagi dokumen lainnya.*
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Tidak	
Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Tidak	

Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	**Peniilaian**	**Keterangan**
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	*Sudah*	*Konsultasi publik dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam penyepakatan Isu PB prioritas (TPB Prioritas) dan yang kedua adalah saat penyepakatan alternatif perbaikan dan rekomendasi KLHS.*
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	*Sudah*	*Pemangku kepentingan yang terlibat terdapat dalam Laporan Dokumentasi KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Sementara identifikasi para pihak dijelaskan dalam sub bab 3.3.2 laporan KLHS ini.*
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	*Sudah*	*Dalam konsultasi publik yang dilakukan melalui pertemuan virtual dilakukan banyak metode untuk menjaring masukan. Salah satunya dengan metode poling, kolom masukan daring, FGD tematik, FGD dalam kelompok kecil (breakout room) sehingga setiap pemangku kepentingan diberikan kesempatan yang luas baik pada saat forum diskusi ataupun media*

		online lainnya yang diberikan waktu cukup sekalipun ada batasan waktu penyampaiannya.
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	*Sudah*	*Semua dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (FGD dan konsultasi Publik) terdapat dalam Laporan Notulensi. Semua bahan presentasi pada saat FGD dan Konsultasi Publik dibagikan kepada para peserta setelah kegiatan berlangsung via email ataupun kolom chat (pertemuan zoom)* *Dokumen KLHS merupakan dokumen publik, untuk pemanfaatannya, yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Pembuat KLHS.*

BAB 10

BAB 10TINDAK LANJUT

Berdasarkan proses penyelenggaraan KLHS yang telah berjalan, berikut ini merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Untuk data-data pada indikator yang tidak tersedia, diupayakan dengan segera untuk kelengkapannya sampai dengan masa akhir perubahan RPJMD ini, sehingga dapat mendukung pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD periode berikutnya.
2. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang diacu pada penyelenggaraan KLHS ini menggunakan data ketersediaan air tingkat nasional tahun 2016, diperlukan pengkinian kajian dan analisisnya untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD yang akan datang.
3. Diperlukan percepatan dalam proses penyusunan dan pengesahan RPPLH menjadi PERDA untuk menjadi landasan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup lainnya.
4. Diperlukan penyesuaian indikator TPB yang sesuai dengan karakteristik DKI Jakarta, utamanya untuk 2 tahun ke depan yang sesuai dengan fokus perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta (misalnya penanganan COVID-19). Perubahan indikator ini sekaligus dapat digunakan sebagai pembaharuan atas Rencana Aksi Daerah dan monitoring capaian TPB. Rekapitulasi data capaian TPB untuk RPJMD periode berikutnya, diperlukan data series capaian TPB minimal 5 tahun.
5. Penentuan program dan kegiatan untuk OPD yang termuat dalam RENSTRA masing masing OPD dapat merujuk pada arahan program KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI 2017-2022, dengan tetap mempertimbangkan aspek keterkaitan antar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Diperlukan konsistensi penerapan asas tata kelola pemerintahan yang baik, harmonis dan bersinergi antara tingkat pusat dan lintas OPD terutama dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi
7. Diperlukan komitmen yang kuat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerapan rekomendasi KLHS melalui program pemantauan dan evaluasi oleh OPD terkait sesuai pasal 44 ayat 2 huruf (b) PermenLHK 69/2017. Provinsi DKI telah mempunyai Sekretariat SDGs DKI Jakarta, sangat disarankan Tim SDGs menjadi bagian tidak terpisahkan untuk monitoring dan sebagai anggota Tim Pembuat KLHS RPJMD yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Alkire, S. (2020). We need to use this tragic period well. *Dimension Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN)* (pp. 5-8). www.mppn.org.

Bappeda. (2020). *Evaluasi Paruh Waktu RPJMD 2017-2022.* Jakarta: Bappeda.

Bappeda. (2020, Maret). *Potret Kemiskinan DKI Jakarta*. Retrieved from bappeda.jakarta.go.id: https://bappeda.jakarta.go.id/front/read/375

BI. (2020). *Laporan Perekonomian DKI Jakarta.* Jakarta: Bank Indonesia.

BPLHD. (2013). *Laporan Akhir Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahap II (Penetapan Ekoregion) Provinsi DKI Jakarta.* Jakarta: Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

BPLHD. (2014). *Draft Naskah Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.* Jakarta: Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

BPS. (2019). *Statistik Komuter Jabodetabek Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2019.* Jakarta: BPS.

BPS. (2020). *Provinsi DKI Jakarta dalam Angka Tahun 2020.* Jakarta: BPS.

BPS. (2020). *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2020.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Calva, L. F. (2020). COVID-19 as a Challenge to Governance. *Dimension Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN)* (p. 9). www.mppn.org.

CNN Indonesia. (2020, Juli 16). *Menguak Sebab DKI Sumbang Kemiskinan Tertinggi RI Kala Corona*. Retrieved from cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200716062100-532-525242/menguak-sebab-dki-sumbang-kemiskinan-tertinggi-ri-kala-corona

DLH. (2018). *Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.* Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

DLH. (2019). *Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.* Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup.

DLH. (2019). *Laporan Akhir Inventarisasi Profil dan Penurunan Emisi GRK.* Jakarta: DLH.

DLH. (2019). *LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI DKI JAKARTA.* Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup.

DLH. (2019). *Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.* Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

DLH. (2019). *Profil Keanekaragamanhayati Provinsi DKI Jakarta.* Jakarta: DLH.

Garschagen, Matthias et.al. (2018). Is Jakarta's New Flood Risk Reduction Strategy Transformational? *Sustainability 2018, 10, 2934; doi:10.3390/su10082934; www.mdpi.com/journal/sustainability*.

Hutagalung, S. (2016, Mei 20). *Membaca Tanah Jakarta*. Retrieved from Sorge Magazine: https://www.sorgemagz.com/membaca-tanah-jakarta/

Ibrahim, Faisal & Eko. (2012). Peranan Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Bodetabekjur) dalam Menyokong Pembangunan Kota Jakarta.

Jakarta, B. P. (2020). Jakarta: BPS.

Kamil & Galih. (2020, Agustus 20). *Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir*. Retrieved from Kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all

Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* , 66-76.

Kemendikbud. (2019). *Neraca Pendidikan Daerah: Uji Kompetensi Guru*. Retrieved from npd.kemdikbud.go.id: https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=kualifikasi

Kemendikbud. (2020). *APK PAUD: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini Periode 2019/2020.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Budaya, Sekjen. Pusat Data dan Teknologi Informasi.

KemenLHK. (2020, Maret 19). Surat Penyampaian Target IKLHK Provinsi Tahun 2020-2024. Jakarta, Indonesia: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Manullang, James dkk. (2020, Juli 30). *Quo Vadis Persoalan Pengangguran Di Jakarta*. Retrieved from validnews.id: https://www.validnews.id/Quo-Vadis-Persoalan-Pengangguran-Di-Jakarta-MSS

Nisa, K. (2020, Februari 20). *Jumlah Balita Kekurangan Gizi*. Retrieved from http://statistik.jakarta.go.id/: http://statistik.jakarta.go.id/jumlah-balita-kekurangan-gizi/

Permana, Y. H. & Sahadewo, Gumilang. (2020, Juni 28). A Tale of Two Peaks: Predicting the Peak of Covid-19 Infections in Indonesia.

SDGs DKI Jakarta. (2020). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).* Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sekretariat Jakarta Berketahanan. (2019). *Ringkasan Eksekutif Strategi Ketahanan Kota Jakarta.* Jakarta: Sekretariat Jakarta Berketahanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1157 Tahun 2020 tentang Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD 2017-2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1157 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 perlu dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1157 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris :
1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota :
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Ketua	: a.	mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	b.	menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017-2022 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas; dan
	c.	mengoordinasikan seluruh rencana program kepada anggota dan pimpinan atau anggota.
	d.	memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selesai tepat waktu.
Wakil Ketua I	: a.	mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	b.	menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	c.	melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
	d.	mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
	e.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
Wakil Ketua II	: a.	membantu mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	b.	membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	c.	menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	d.	melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
	e.	mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
	f.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Sekretaris : a. menyusun dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;

b. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua;

c. mengoordinasikan Anggota dalam pelaksanaan tugas;

d. mewakili Ketua maupun Wakil Ketua apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;

e. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua; dan

f. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua.

Anggota : a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris;

b. menghadiri dan memberikan masukan dalam forum, rapat atau pertemuan lainnya terkait penyusunan dan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;

c. membantu Sekretaris menyusun dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;

d. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;

e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris; dan

f. membuat Rencana Program dan bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:	Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Dari	:	Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Nomor	:	1196/-1.711.1
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Hal	:	Permohonan Penandatanganan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Sehubungan dengan sedang disusunnya Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan rencana pembangunan telah memperhatikan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam melaksanakan proses penyusunan KLHS Perubahan RPJMD, perlu dibentuk Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Untuk itu, bersama Nota Dinas ini saya sampaikan Perbal Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Gubernur dimaksud.

Demikian saya sampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Nasruddin Djoko Surjono
NIP 197306201999031002

Tembusan:
1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022

Ketua	: a.	mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	b.	menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017-2022 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas; dan
	c.	mengoordinasikan seluruh rencana program kepada anggota dan pimpinan atau anggota.
	d.	memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis selesai tepat waktu.
Wakil Ketua I	: a.	mengoordinasikan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	b.	menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	c.	melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
	d.	mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
	e.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
Wakil Ketua II	: a.	membantu mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	b.	membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	c.	menyelenggarakan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan terkait dengan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022;
	d.	melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 yang diberikan oleh Ketua;
	e.	mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua; dan
	f.	bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Lampiran 2. Kerangka Acuan Kerja Pembuatan dan Penyusunan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017 - 2022

KERANGKA ACUAN KERJA KLHS PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA 2017-2022

LATAR BELAKANG

Saat ini, Jakarta telah menjadi salah satu episentrum penyebaran virus corona jenis baru dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Virus COVID-19 menjadi masalah di seluruh dunia karena dampak virus tidak dapat mereda dalam waktu singkat. Diperlukan adanya penerapan tatanan hidup normal baru untuk dapat beradaptasi dengan situasi yang demikian, paling tidak sampai vaksin virus ini ditemukan.

Jakarta dengan segala peran strategisnya secara nyata terimbas dari situasi tersebut dan turut mempengaruhi kestabilan perekonomian nasional. Guna meredam dampak ekonomi akibat COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi perubahan kebijakan jangka menengah dalam rangka pemulihan dan pemantapan pembangunan pasca pandemi (*future normal*) melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Perubahan RPJMD tersebut akan menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022.

Meskipun perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dirancang untuk pemulihan dan pemantapan pembangunan pasca pandemi, tidak serta merta membenarkan apabila arahan kebijakan yang diambil hanya condong pada satu pilar pembangunan yaitu ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan koridor-koridor yang dapat mendampingi pengambilan arahan kebijakan tersebut dengan memberikan pandangan dari berbagai aspek melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 32/2009 yang mewajibkan KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS diwajibkan dalam penyusunan atau evaluasi:

1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Adapun tata cara pelaksanaan KLHS telah diatur secara rinci dalam PP No. 46/2016, PermenLHK No. 69/2017 dan Permendagri No. 7/2018. Pelaksanaan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 diharapkan dapat memberikan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga perubahan rencana pembangunan tidak hanya terfokus pada pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat kondisi pandemi COVID-19.

TUJUAN

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif berdasarkan capain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) dan Kondisi Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kondisi dan ketersediaan data terkini.

Pelaksanaan KLHS ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi dalam bentuk arahan kebijakan dan program yang mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022.

HASIL YANG DIHARAPKAN

KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 siap untuk di validasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DOKUMEN YANG DIHASILKAN

1. Ringkasan Eksekutif KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
2. Laporan Akhir KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022
3. Laporan Dokumentasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

TIMELINE KEGIATAN

No	Tahapan	Metode	Pihak yang Terlibat	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	BAB 1 Pendahuluan														
1a	Kick-off meeting KLHS Revisi RPJMD DKI	Meeting	TA,Tim Pembuat KLHS.												
1b	Rapat koordinasi persiapan Tim Pembuat KLHS.	Meeting													
2	BAB 2 Perkembangan Fungsi Wilayah DKI Jakarta														
2a	Kajian Pustaka	Desk study /File Sharing	TA, Tim Pembuat KLHS.												
2b	Penulisan														
3	BAB 3 Kondisi Provinsi DKI Jakarta														
3a	Kajian Pustaka	Desk study /File Sharing	TA												
3b	Penulisan														
4	BAB 4 Analisis 6 (enam) Muatan														
4a	Analisis 6 muatan	Desk study /File Sharing	TA												
4b	Materi Paparan hasil 6 muatan														
4c	FGD 6 muatan	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
4d	Penulisan Bab 4		TA												
5	BAB 5 Analisis Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada OPD di Provinsi DKI Jakarta														
5a	Analisis Capaian TPB	Desk study /File Sharing	TA												
5b	Pemetaan capaian TPB pada OPD														
5c	Draft Materi Paparan hasil analisis capaian TPB u/ KLHS														
5d	Penulisan draft Bab 5		TA												
6	BAB 6 Rumusan Isu Prioritas di Provinsi DKI Jakarta														

No	Tahapan	Metode	Pihak yang Terlibat	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
6a	Analisis data : Gap Target, pemetaan dengan 6 muatan, pemetaan dengan isu strategis RPJMD	Desk study /File Sharing	TA												
6b	Analisis data: capaian indikator dengan keuangan daerah, pemetaan mitra pemerintah		TA												
6c	Draft Materi Paparan hasil analisis data (6a dan 6b)		TA												
6e	FGD Tim Pembuat KLHS Prioritasi isu TPB (Persiapan Konsultasi Publik)	Meeting	Tim Pembuat KLHS, TA												
6f	Konsultasi Publik Penyepakatan Isu	Konsultasi Publik, Polling Isu	Stakeholder terkait, TA, Tim Pembuat KLHS												
6g	Formulasi analisis data, FGD, dan KP (penulisan) untuk prioritasi isu	Desk study /File Sharing	TA												
6h	Analisis Gap dan/atau Kesenjangan dari Kebijakan dan Strategi pada RPJMD 2017 - 2022 terhadap Pencapaian TPB	Desk study /File Sharing	TA												
7	BAB 7 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Prioritas di Provinsi DKI Jakarta														
7a	Penyusunan Skenario oleh Tim Pembuat KLHS dan penyepakatan	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
7b	Penulisan pada draft laporan	Desk study /File Sharing	TA												
8	BAB 8 Rekomendasi KLHS untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta														
8a	Rumusan rekomendasi untuk penyempurnaan Visi, Misi, Kebijakan Rencana dan Program dan Arahan Program	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
8b	Meeting Perbaikan skenario dan rekomendasi (persiapan konsultasi publik 2)	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
8c	Materi Paparan skenario dan rekomendasi	Desk study /File Sharing	TA												
8c	Konsultasi Publik 2: Rekomendasi KLHS	Konsultasi Publik	Stakeholder terkait, TA, Tim Pembuat KLHS												

No	Tahapan	Metode	Pihak yang Terlibat	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
8c	Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam Perubahan RPJMD DKI Jakarta (Ranwal)	Meeting	Tim Pembuat KLHS dan Tim Penyusun RPJMD												
8d	Penulisan Bab 7 dan 8 pada laporan	Desk study /File Sharing	TA												
9	BAB 9 Penjaminan Kualitas														
9c	Pengisian Form Penjaminan Kualitas	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
9d	Penandatanganan Form Penjaminan Kualitas oleh Gubernur	Meeting	Tim Pembuat KLHS dan Tim Penyusun RPJMD, Gubernur												
10	BAB 10 Tindak Lanjut	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
11	Draft Akhir														
11a	Finalisasi Draft Laporan Akhir KLHS	Desk study /File Sharing	TA												
11b	Ringkasan Eksekutif	Desk study /File Sharing	TA												
11c	Penyusunan Laporan Dokumentasi Proses KLHS	Desk study /File Sharing	TA												
12	Validasi														
12a	Persiapan Validasi (*full day meeting*)	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												
12b	Pengajuan Validasi ke KLHK	Surat permohonan validasi	Tim Pembuat KLHS												
12c	Pelaksanaan Validasi	Meeting	Tim Pembuat KLHS, KLHK												
12d	Revisi Dokumen atas masukan Validasi	Desk study /File Sharing	TA												
12e	Finalisasi Dokumen	Meeting	TA, Tim Pembuat KLHS												

Lampiran 3. Hasil Konsultasi Rancangan Awai Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : 050/4618/Bangda
Sifat : "Segera"
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Konsultasi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022

Yth. Gubernur DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 829/-1.712.2 tanggal 10 November 2020 Hal Mengajukan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Untuk Dikonsultasikan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Konsultasi Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 melalui *video conference* yang diawali dengan pembukaan acara oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan dihadiri oleh perwakilan masing-masing Direktorat di Lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah serta pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Berdasarkan hasil diskusi dalam rapat konsultasi dan hasil pencermatan atas substansi Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 dimaksud, terlampir masukan/saran untuk penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.
3. Rancangan Awal Perubahan RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi, menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah Periode 2017-2022.
4. Gubernur DKI Jakarta agar segera melanjutkan tahapan penyelesaian Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan pelaksanaannya, kami mengucapkan terima kasih.

a.n Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 050/4618/Bangda
TANGGAL : 1 Desember 2020

HASIL KONSULTASI RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2017–2022

A. UMUM

1. Penyajian rancangan awal perubahan RPJMD agar disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional (Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMN Periode 2020-2024).
3. Sasaran dan arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 harus memperhatikan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2030.
4. Substansi Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 seyogianya disusun berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi yang disandingkan dengan kondisi lingkungan, dinamika regulasi, serta pertimbangan yang rasional.

B. DOKUMEN RANCANGAN AWAL

I. BAB I PENDAHULUAN

1. Sub Bab 1.1. Latar Belakang

   Pandemi Covid-19 memang merupakan penyebab dilakukannya Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022. Walaupun demikian, terdapat beberapa penyebab lain diantaranya terbitnya berbagai regulasi baru, hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan Tahun 2020, perubahan kondisi keuangan daerah, dan sebagainya. Sebaiknya hal-hal tersebut perlu juga dijelaskan sebagai alasan dilakukannya perubahan RPJMD.

2. Sub Bab 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

   a. Perlu dilakukan seleksi terhadap regulasi yang secara nyata kaitannya dengan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022;

   b. Urutan penulisan landasan hukum agar disesuaikan dengan tata urutan pembentukan produk hukum;

   c. Perlu penambahan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terkait langsung sebagai landasan penyusunan perubahan RPJMD seperti:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah, dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum dimaksud diharapkan dapat menggambarkan tingkat capaian/kondisi eksisting pembangunan Provinsi DKI Jakarta sesuai aspek-aspek dimaksud sampai dengan Tahun 2019.
2. Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, namun terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:
   a. Agar menampilkan data hasil capaian sampai dengan minimal 2 (dua) tahun terakhir (2018-2019) yang merupakan hasil evaluasi capaian sementara periode ini. Masih terdapat data yang disajikan merupakan data yang belum ter-*update,* sebagai contoh Tabel II. 97, data Angka Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta yang disajikan masih di bawah Tahun 2019, yaitu Tahun 2012-2014;
   b. Penyajian data yang berupa capaian pembangunan seperti matriks, tabel atau grafik, seyogyanya untuk dinarasikan kesimpulannya agar makna dari data tersebut dapat dipahami sebagai pijakan untuk perencanaan selanjutnya. Sebagai contoh Tabel II. 6, data Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta agar dinarasikan terhadap kesimpulan tabel dimaksud yaitu bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk DKI Jakarta adalah berkisaran antara 1,0% sampai dengan 1,1%; dan
   c. Masih terdapat teknik penyimpulan yang belum sesuai dengan kaidah atas makna indikator masing-masing. Contoh: Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2019.

      Pada penjelasannya setelah Tabel II. 20 tidak menyimpulkan atas data yang disajikan. Secara umum penjelasan yang ditampilkan merupakan pengulangan atas penjelasan terhadap data tabel tanpa adanya kesimpulan dari data tabel dimaksud;

d. Khusus terhadap aspek pelayanan umum, sebaiknya disimpulkan juga kecenderungan perkembangan yang akan terjadi berdasarkan *time series data*. Contoh:

No.	Indikator	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ketersediaan Pangan Utama								
1.	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	1.427.400.000	1.338.321.000	1.222.134.000	1.162.671.000	1.162.728.156	1.398.176.552	1.346.099.864
2.	Jumlah penduduk	9.862.088	9.969.948	10.075.310	10.177.924	10.374.425	10.467.629	10.557.810
3.	Ketersediaan pangan utama	144,74	139,25	121,30	114,23	113,13	128,91	128,6

Tabel Ketersediaan Pangan Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2019 diatas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di DKI Jakarta menunjukkan penurunan hampir di setiap tahunnya;

e. Agar dilakukan pencermatan kembali terhadap data yang ganjil. Contoh:

No.	Indikator	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Rumah Layak Huni (Rumah Tangga)	2.329.410	2.356.428	2.384.256	2.407.864	2.671.619	2.696.793	2.717.575	944.858
2.	Jumlah Rumah Tangga	2.576.518	2.604.752	2.632.338	2.659.205	2.685.314	2.710.617	2.735.080	2.758.709
3.	Rasio Rumah Layak Huni	90,41%	90,47%	90,58%	90,55%	99,49%	99,49%	99,36%	34,25%

Tabel Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2019 di atas menunjukkan data pada Tahun 2019 terkesan ganjil (34,25%).

f. Masih terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan yang belum tergambarkan pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 seperti bidang urusan Persandian dan Transmigrasi;

g. Perlu ditambahkan Subbab khusus terkait dengan pelayanan dasar (SPM) di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2019, yaitu yang meliputi penyelenggaraan sebagian urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara Indonesia (WNI).

3. Beberapa masukan terkait aspek pelayanan umum antara lain:

No	Urusan	Saran/Masukan
1.	Pendidikan	Terkait dengan persiapan pembukaan sekolah secara tatap muka yang direncanakan akan dimulai pada bulan Januari 2021, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara daring atau *online* selama masa pandemi *Covid-19*, diminta agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mempersiapkan dengan baik dan telah diakomodir dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.

2.	Sosial	Sehubungan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 agar memperhatikan Permendagri dimaksud, khususnya terkait penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD), Rencana Aksi Tahunan, dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD).
3.	Kelautan dan Perikanan	a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mencermati dan melakukan penyelarasan antara indikasi program pada dokumen RZWP-3-K Provinsi DKI Jakarta dengan program pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022. b. Masih terdapat beberapa indikator kinerja terkait urusan Kelautan dan Perikanan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 yang perlu disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, antara lain: 1) Produksi perikanan kelompok nelayan; 2) Proporsi tangkap ikan yang berada dalam batas biologis yang aman; 3) Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial; 4) Nilai Tukar Nelayan.
4.	Pangan	Terkait urusan pangan perlu ditambahkan program terkait penguatan pengawasan keamanan pangan seperti Program Penanganan Keamanan Pangan dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.
5.	Kesehatan	Terhadap dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022, agar tetap memperhatikan: integrasi dan penerapan SPM bidang kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi; peningkatan kesehatan ibu, anak,

		keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi (penurunan AKI, AKB, dan AK Neonatal); percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan prevalensi *stunting* dan *wasting*); pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (HIV, TB, Malaria, Hepatitis, darah tinggi, dll); penguatan Germas melalui penguatan promosi dan pembudayaan Germas dan pengembangan lingkungan sehat (penurunan prevalensi merokok usia 10–18 tahun, penerapan KTR, dan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat/KKS); penguatan sistem jaminan sosial melalui intergrasi Jamkesda ke JKN; dan penguatan sistem kesehatan (peningkatan faskes sesuai standar, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan pemenuhan SDM kesehatan yang berkualitas).
6.	Kepemudaan dan Olahraga	a. Terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) agar tetap menjadi fokus pemerintah DKI Jakarta pada Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022; b. Perihal akan diselenggarakannya FIFA U-20 Tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu lokasi terhadap pelaksanaan *event* tersebut, pemerintah DKI Jakarta diminta agar dapat mengakomodasi terkait persiapan *event* tersebut dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.
7.	Perpustakaan	Agar difokuskan pada peningkatan indeks gemar membaca/budaya literasi melalui: a. Peningkatan akses perpustakaan melalui integrasi perpustakaan *online* antar provinsi dengan kab/kota. b. Peningkatan koleksi bahan pustaka baik fisik maupun digital. c. Peningkatan kualitas pustakawan sebagai pendamping pemustaka.

III. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

1. Agar memperhatikan kaidah-kaidah dalam menentukan proyeksi anggaran, dengan mempertimbangkan kondisi terakhir yang mempengaruhi keuangan daerah, contoh kemungkinan perubahan struktur belanja daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
2. Terkait perencanaan belanja anggaran, agar tetap fokus pada belanja wajib pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan kondisi masa pandemi Covid-19, dan pencapaian visi misi Bapak Gubernur DKI Jakarta.

IV. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

1. Dalam melakukan perumusan masalah, harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek pembangunan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, serta geografi dan demografi. Pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022, belum mencakup perumusan masalah dengan pendekatan keempat aspek dimaksud, sehingga perlu dilengkapi.
2. Pada subbab permasalahan perlu ditambahkan kesimpulan hasil pengendalian dan evaluasi terkait pelaksanaan capaian kinerja sampai Tahun 2019. Jika ada target (IKU, IKK, dan *Outcome* perangkat daerah) yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk dicapai pada akhir periode RPJMD, maka perlu direkomendasikan untuk penyesuaian target atau perubahan indikator.

V. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perlu memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan dalam menentukan tujuan dan sasaran dengan mekanisme *cascading* dengan menggunakan *logical frame work.*

VI. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1. Agar disimpulkan rangkaian program-program prioritas pencapaian visi misi Bapak Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari program-program perangkat daerah dengan menggunakan pendekatan *cascading.*
2. Penentuan program-program perangkat daerah merupakan hasil *cascading* berdasarkan *outcome-outcome* perangkat daerah dimaksud.
3. Agar dilengkapi kembali terkait data tabel yang masih kosong seperti Program Sediaan Alat Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman pada tabel VI.2 Program Pembangunan Daerah, dan lainnya.

VII. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Bab ini harus memasukkan seluruh program baik program prioritas dan program perangkat daerah yang bersifat rutin dan disertai dengan kebutuhan pendanaan, indikator dan target pencapaian tahunan dan akhir periodesasi RPJMD.
2. Perlu dicantumkan capaian setiap program dari mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.
3. Dengan pertimbangan tertentu, dimungkinkan dilakukan penyesuaian target program sampai dengan Tahun 2022.
4. Perlu dilengkapi dan dipastikan kembali terkait keterisian data yang masih kosong, tahun pijakan data kondisi awal dan akhir yang digunakan pada Tabel 7.2 Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, agar dilengkapi data/penjelasan kondisi awal pada tabel dimaksud. Hal ini bertujuan untuk melihat program yang bertambah, berkurang dan dihapus.
5. Perlu diperhatikan dan diteliti kembali terkait pemilihan indikator program yang menjadi kewenangan provinsi.

6. Agar dipastikan semua program dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta masuk di dalam Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.

VIII. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perlu dicantumkan capaian IKD (indikator makro, dan IKK) dari mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.
2. Perlu dicantumkan capaian IKU dari mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.
3. Dengan pertimbangan tertentu, dimungkinkan dilakukan penyesuaian target IKU dan IKD sampai dengan Tahun 2022.
4. Perlu dicermati kembali terdapat perbedaan antara indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan yang ditampilkan pada Bab II (Tabel II.87) dengan Bab VIII (Tabel VIII.2), seyogyanya disamakan, agar dapat dikomparasi perkembangannya. Indikator kinerja daerah terkait urusan kelautan dan perikanan dalam hal ini terdiri dari: (i) jumlah produksi perikanan budidaya; (ii) jumlah produksi perikanan tangkap; (iii) jumlah produksi ikan hias; (iv) jumlah produksi benih ikan; (v) jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan; (vi) angka konsumsi ikan; (vii) jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; (viii) luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi.

C. LAIN-LAIN

1. Catatan pada huruf A dan B di atas, merupakan bagian yang harus diperhatikan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022.
2. Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 yang telah disempurnakan, supaya segera disampaikan kepada kepala perangkat daerah melalui Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

Lampiran 4. Berita Acara Konsultasi Publik Isu Pembangunan Berkelanjutan 14 Agustus 2020

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 -9 Telepon : 3822261 - 3822159, Fax : 3860521 - 3842871
Website bappeda.jakarta.go.id E-mail sekretariat.bappeda@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode pos : 10110

BERITA ACARA UJI PUBLIK ATAS ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRIORITAS KLHS PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2022

Nomor : 1167/-1.711.1

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (14-08-2020) telah dilaksanakan uji publik penentuan isu pembangunan berkelanjutan prioritas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 melalui pertemuan virtual dengan hasil sebagai berikut.

Perwakilan Stakeholder

1. **Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda:** Triono Hadi Priyanto, ST
2. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PDLKWS:** Krisna Kumar ST, M.Si
3. **Perwakilan Penyusun KRP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta:** Nasruddin Djoko Surjono
4. **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:** Ir. H. Andono Warih, MSc
5. **Perwakilan OPD Provinsi:** Nugroho (DCKTRP)
6. **Perwakilan OPD Kota/Kabupaten:** Junaedi (Kabupaten Kepulauan Seribu)
7. **Perwakilan LSM/NGO/Organisasi Internasional:** Suryani Amin (C40), Ririn (Vital Strategis)
8. **Perwakilan Swasta:** Hotlan Panjaitan (Kadin)
9. **Perwakilan Akademisi:** Komara Djaja, S.E.. M.Sc., Ph.D (Universitas Indonesia), Dr. Triarko Nurlambang, M. A. (SDGs Hub Universitas Indonesia)
10. **Perwakilan Asosiasi Profesi:** Ir. Daisy Radnawati, M.Si (IALI)

Hasil Kesepakatan

Kesepakatan yang dicapai berupa penentuan isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan
2. TPB 2: Tanpa Kelaparan
3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas
5. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
6. TPB 8: Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengayaan isu-isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan input stakeholder, meliputi:

- Membangun ownership antar stakeholder terutama untuk mencapai TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
- Pengurangan emisi GRK perlu diperhatikan dalam TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim.

1

- Meningkatkan jaminan kepastian keamanan dalam transportasi publik sehingga dapat mengurangi potensi sebaran pandemi COVID-19 dan emisi GRK
- Perlu mempertimbangkan potensi mengintegrasikan RTH untuk program-program ketahanan pangan (urban farming).
- Isu mengenai pengendalian debit sumber-sumber air di hulu sehingga dapat mengurangi risiko banjir.
- Perlunya infrastruktur pengendalian banjir.
- Penurunan muka air tanah dapat dipertimbangkan masuk dalam potensi kebencanaan.
- Isu mengenai ketahanan gedung-gedung pencakar langit terhadap risiko bencana gempa.
- Mendorong enterpreneurship baru.

Beberapa usulan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen strategis lainnya:

- Dalam jangka panjang perlu memperhitungkan D3T dari sisi polusi udara dari sumber bergerak salah satunya mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (minimum standard EURO 3) dan sumber tidak bergerak (memperhitungkan kapasitas industri olahan dan manufaktur untuk DKI Jakarta).
  → Usulan ini sangat strategis diintegrasikan dalam RPPLH yang cakupannya lebih luas dengan periode pelaksanaan 20 tahun.

Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan

Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan adanya FGD Tematik yang melibatkan stakeholder terkait pada isu pembangunan berkelanjutan prioritas tersebut di atas.

Demikian berita acara pelaksanaan konsultasi publik untuk Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas KLHS Perubahan RPJMD ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan sesuai dengan presensi terlampir. Notulen rapat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Jakarta, 14 Agustus 2020

Penyusun KRP, Bappeda Prov. DKI Jakarta	Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta	Perwakilan Kemendagri, Ditjen. Bina Bangda
(Nasruddin Djoko Surjono)	(Ir. H. Andono Warih, MSc)	(Triono Hadi Priyanto, ST)

Perwakilan KLHK, Direktorat PDLKWS	Perwakilan OPD Prov. DKI Jakarta, DCKTRP	Perwakilan OPD Kota/Kab., Kab. Kep.Seribu
(Krisna Kumar ST, M.Si)	(Nugroho)	(Junaedi)
Perwakilan LSM/NGO, C-40	**Perwakilan LSM/NGO, Vital Strategis**	**Perwakilan Swasta, KADIN**
(Suryani Amin)	(Ririn)	(Hotlan Panjaitan)
Perwakilan Akademisi, Universitas Indonesia	**Perwakilan Akademisi, SDGs Hub Univ. Indonesia**	**Perwakilan Asosiasi Profesi, IALI**
(Komara Djaja, S.E.. M.Sc., Ph.D)	(Dr. Triarko Nurlambang, M.A.)	(Ir. Daisy Radnawati, M.Si)

Lampiran 5. Hasil Polling Konsultasi Publik -1

	Skor:	4		3		2		1			
NO TPB	ISU BERKAITAN TPB	SANGAT SETUJU		CUKUP SETUJU		KURANG SETUJU		TIDAK SETUJU		HASIL	Keterangan
		Respndn	Nilai	Respndn	Nilai	Respndn	Nilai	Respndn	Nilai		
1	Tanpa Kemiskinan	73	292	40	120	4	8	2	2	422	
2	Tanpa Kelaparan	78	312	28	84	12	24	1	1	421	
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	93	372	25	75	1	2	0	0	449	
4	Pendidikan yang Berkualitas	85	340	30	90	2	4	2	2	436	
6	Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	84	336	32	96	2	4	1	1	437	
8	Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi	84	336	32	96	3	6	0	0	438	
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	36	144	65	195	14	28	4	4	371	
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	54	216	53	159	11	22	1	1	398	
13	Penanganan Perubahan Iklim	53	212	54	162	11	22	1	1	397	
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	56	224	50	150	12	24	1	1	399	

Lampiran 6. Relevansi TPB Dengan Indikator Sasaran RPJMD 2017-2022

Indikator Sasaran Katergori Sulit Dicapai	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Yang Relevan																	Jumlah Keterkaitan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	TPB
1. Tingkat Kemiskinan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	11
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	12
3. Jumlah Titik Genangan Banjir	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	7
4. Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	5
5. Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	6
6. Jumlah Wisatawan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	5
7. Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5
8. Public Transportation Modal Share	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	5
9. Cakupan Pelayanan Air Bersih	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	7
10. Cakupan Pelayanan Air Limbah	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	7
11. Penambahan Rasio RTH	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	6
12. Indeks Potensi Kerawanan Sosial	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	7
13. Prevalensi Kekerasan Perempuan dan Anak	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	7
14. Indeks Ketahanan Pangan	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	8
15. Jumlah Titik Macet	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4
16. Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	7
17. Jumlah Backlog Hunian	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	5

Indikator Sasararn Kategori Butuh Perhatian	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Yang Relevan																	Jumlah Keterkaitan TPB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	8
2. Realisasi Nilai Investasi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4
3. Indeks Demokrasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4
4. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	5
5. Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	6
6. Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
7. Indeks Pembangunan Manusia	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	8
8. Indeks Pembangunan Gender	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	8
9. Total Fertility Rate	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
10. Indeks Profesionalitas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
11. Indeks e-Gov	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4
12. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4
13. Jumlah Inovasi yang Layak Diikutsertakan dalam Lomba Skala Nasional	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	7
14. Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4
15. Jumlah Cagar Budaya yang dikonversi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4
16. Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai Rencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5

Lampiran 7. Berita Acara Konsultasi Publik 2. Perumusan Alternatif

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 -9 Telepon : 3822261 - 3822159, Fax : 3860521 - 3842871
Website bappeda.jakarta.go.id E-mail sekretariat.bappeda@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode pos : 10110

BERITA ACARA UJI PUBLIK II PENYAMPAIAN HASIL DAN PENYEPAKATAN REKOMENDASI KLHS PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2022

Nomor : 1373 / - 1.712-1

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh (29-09-2020) telah dilaksanakan uji publik II penyampaian hasil dan penyepakatan rekomentasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 melalui pertemuan virtual yaitu sebagai berikut.

PERWAKILAN STAKEHOLDER

1. **Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda:** Triono Hadi Priyanto, ST
2. **Perwakilan Penyusun KRP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta:** Nasruddin Djoko Surjono
3. **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:** Ir. H. Andono Warih, MSc
4. **Perwakilan OPD Provinsi:** Mariana (Biro Kesejahteraan Sosial); Maulvi Nazir (Satpol PP); Fitrah Nur Sjamsul Akbar (Inspektorat Bidang IV DKI Jakarta)
5. **Perwakilan LSM/NGO/Organisasi Internasional:** Suryani Amin (C-40 Climate Leadership Group), Dandi Prasetia (MPBI)
6. **Perwakilan Swasta:** Hotlan Panjaitan (Kadin)
7. **Perwakilan Asosiasi Profesi:** Erita Adya Laksita (IALI)

HASIL KESEPAKATAN

Kesepakatan yang dicapai berupa penyepakatan rekomendasi untuk masing-masing TPB prioritas sebagai berikut:

A. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
Rekomendasi Arahan Kebijakan meliputi:

1. Melakukan adaptasi perubahan **PHBS**
2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder
3. Pemantauan penanganan pandemi dan **peningkatan penyadartahuan masyarakat tentang PHBS** melalui sistem informasi interaktif, **kreatif, dan inovatif**
4. Meningkatkan perbaikan infrastruktur kesehatan
5. Peningkatan kualitas dan **kuantitas** SDMK yang berdaya saing global
6. Mendorong tercapainya 100% warga yg memiliki jaminan Kesehatan
7. Pendampingan pemulihan kesehatan mental bagi warga terdampak pandemi

B. TPB 8: Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi
Rekomendasi Arahan Kebijakan, meliputi:

1. Menciptakan sistem perekonomian yang tangguh **dan berkelanjutan** menghadapi kondisi **krisis** melalui perencanaan pengelolaan, pengawasan keuangan daerah yang lebih strategis, transparan dan **padat karya.**
2. Pengembangan pariwisata yang adaptif di era tatanan hidup baru berbasis masyarakat **dan berkelanjutan** melalui teknologi digital.

3. Peningkatan kualitas SDM yang **berdaya saing global**.
4. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja **yang inklusif**.
5. **Kolaborasi** pemerintah – swasta serta kemitraan lain secara berimbang dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin perlindungan tenaga kerja.
6. Peningkatan kualitas, jaringan pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses jasa keuangan bagi UMKM dan **Koperasi**.
7. Mendorong kerjasama kemitraan dalam pendampingan UMKM dan **Koperasi**.
8. **Mendorong pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam operasional pasar tradisional.**
9. Pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan *green investment*.
10. Diversifikasi Mata Pencaharian Nelayan Tangkap di Kepulauan Seribu.

C. TPB 4: Pendidikan yang Berkualitas
Rekomendasi Arahan Kebijakan, meliputi:

1. Meningkatkan SDM Guru melalui akses pelatihan dan sertifikasi dengan memperhatikan kesejahteraannya.
2. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pendidikan sesuai standar dan keamanan gedung.
3. Meningkatkan akses teknologi dan informasi.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi.
5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan formal **untuk seluruh jenjang pendidikan** dan informal **yang inklusif** melalui kerjasama perguruan tinggi maupun kemitraan.
6. Membangun sistem pendidikan yang melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka pajang.
7. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, **matematika, dan sains serta** peningkatan akses serta kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
8. **Penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana**

D. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak
Rekomendasi Arahan Kebijakan, meliputi:

1. Efisiensi pemanfaatan air.
2. Investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air.
3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu.
4. Peningkatan dan pemerataan akses sarpras air bersih dari air permukaan.
5. Peningkatan fasilitas untuk mendukung PHBS.
6. Penanganan sampah terpadu untuk mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air.
7. Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah **Komunal dan** Terpusat.
8. Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah.
9. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
10. Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).

E. TPB 1: Tanpa Kemiskinan
Rekomendasi Arahan Kebijakan, meliputi:

1. Meningkatkan akses cakupan Kesehatan universal yang berkualitas dan terjangkau.
2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan pada tingkat dasar & menengah tanpa diskriminasi, bebas biaya dan berkualitas.

3. Mengembangkan hunian yang bersih, sehat, aman, **nyaman** dan terjangkau melalui kolaborasi antar pihak sesuai good governance (transparan, akuntabel, responsive, inklusif, representatif dan partisipatif) **dalam rangka mengurangi backlog hunian**.
4. Memastikan lingkungan yang berketahanan terhadap bencana **dan krisis iklim** untuk meminimalkan dampak (ekonomi, sosial).
5. Perbaikan tata kelola sistem pendataan penduduk utamanya untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19 **(Akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung masyarakat)**.
6. **Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang miskin dan rentan miskin.**

F. TPB 2: Tanpa Kelaparan

Rekomendasi Arahan Kebijakan, meliputi:

1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai good governance.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk, stunting, dan **penguatan** ASI eksklusif.
3. Pemanfaatan ruang **publik dan privat** untuk Peningkatan Ketahanan Pangan.
4. **Optimalisasi sektor kelautan dan perikanan.**
5. Peningkatan **fungsi-fungsi layanan** posyandu untuk **ketahanan pangan**.

RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan rekomendasi yang sudah disepakati ke dalam Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2020.

Demikian berita acara pelaksanaan konsultasi publik untuk penyepakatan rekomendasi KLHS Perubahan RPJMD ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan sesuai dengan presensi terlampir.

Jakarta, 29 September 2020

Penyusun KRP, Bappeda Prov. DKI Jakarta	**Dinas Lingkungan Hidup Prov. DKI Jakarta**	**Perwakilan Kemendagri, Ditjen. Bina Bangda**
(Nasruddin Djoko Surjono)	(Ir. H. Andono Warih, MSc)	(Triono Hadi Priyanto, ST)
Perwakilan OPD Prov. DKI Jakarta, Biro Kesejahteraan Sosial	**Perwakilan OPD Prov. DKI Jakarta, Satpol PP**	**Perwakilan OPD Prov. DKI Jakarta, Inspektorat Bidang IV**
(Mariana)	(Maulvi Nazir)	(Fitrah Nur Sjamsul Akbar)

Perwakilan LSM/NGO, C-40	Perwakilan LSM/NGO, MPBI	Perwakilan Swasta, KADIN
(Suryani Amin)	(Dandi Prasetia)	(Hotlan Panjaitan)

Perwakilan Asosiasi Profesi, IALI

(Erita Adya Laksita)

Lampiran 8. Berita Acara Integrasi Rekomendasi KLHS

BERITA ACARA
FGD INTEGRASI HASIL KLHS PERUBAHAN RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017-2022
Nomor: 1778/-1.713.1

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh (24-11-2020) telah dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk kesepakatan integrasi Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 melalui pertemuan virtual. FGD ini merupakan akhir dari serangkaian FGD untuk tahapan integrasi Hasil KLHS Perubahan RPJMD DKI, yaitu dengan menyepakati beberapa hal seperti di bawah ini.

Perwakilan Instansi

1. **Penyusun KRP, Bappeda Provinsi DKI Jakarta:** Nasruddin Djoko Surjono
2. **Tim Pembuat KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:** Ir. H. Andono Warih, MSc

Hasil Kesepakatan

1. Matriks integrasi hanya merangkum bagian-bagian yang diintegrasikan sebagaimana ***terlampir*** dalam Berita Acara ini.
2. Rumusan strategi merupakan bagian paling dominan dalam matriks integrasi. Untuk memberikan gambaran proses integrasinya, perlu diuraikan kesesuaianya dengan rekomendasi KLHS, perbandingan dengan rancangan awal sebelum mengakomodir rekomendasi KLHS (*outcome*, arahan kebijakan).
3. Nomenklatur arahan program mengacu pada Kepmendagri 50/2020, yang merupakan pemutakhiran daftar dan nomenklatur program seperti dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Arahan program dilengkapi dengan lokasi indikatif sesuai PERDA No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta dan Kegiatan Strategis Daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Rencana Tindak Lanjut

Integrasi hasil KLHS yang telah disepakati akan ditindaklanjuti dengan diskusi Penjaminan Kualitas serta persiapan pengajuan permohonan validasi KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian berita acara pelaksanaan FGD integrasi hasil KLHS Perubahan RPJMD ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan tersebut di atas.

Jakarta, 24 November 2020

Penyusun KRP,

Nasruddin Djoko Surjono
NIP 197306201999031002
Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Tim Pembuat KLHS Provinsi DKI Jakarta
2017-2022 Perubahan RPJMD,

Ir. H. Andono Warih, MSc
NIP 196801091996031001
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

Penyempurnaan Penjelasan Integrasi KLHS pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

Tabel 8.8. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 1

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
Misi 1: Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan"					
Tujuan 1.1. Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif.				Tujuan 1.1 yaitu "mewujudkan kota aman dan tertib" telah mengakomodir TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera terutama pada sasaran 2 dan 3 yang berkaitan dengan kota yang ramah perempuan dan anak dan kota Tangguh bencana, fokus pada TPB 3 yaitu bencana non alam pandemic COVID-19.	
S1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial		Tidak ada strategi pada Sasaran 1 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
S2. Terwujudnya pembangunan kota yang ramah perempuan dan anak.	Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya	3.i. Pandemi Covid-19 tertangani	3.2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.2 pada rekomendasi KLHS
	Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan				
S3. Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana.	Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kemampuan Masyarakat dan Aparatur, Implementasi Fasilitas Publik Aman dan Kelurahan Tangguh Bencana serta Pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan	3.i. Pandemi Covid-19 tertangani	3.2. Meningkatkan resiliensi kota terhadap pandemi dengan melibatkan stakeholder		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.2 pada rekomendasi KLHS

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Outcome	Arahan Kebijakan	Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran	Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi
	difasilitasi oleh Sistem Informasi Kebencanaan.				
	Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana				
	Pengembangan Pengendalian Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				
	Melakukan penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat				
	Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana.				Untuk mengakomodir arah kebijakan 3.2 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana (alam maupun non alam).*

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arahan Kebijakan**	**Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi**
Tujuan 1.2. Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya.				Tujuan ini secara umum fokus pada pemenuhan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan), tercermin pada sasaran 1. Tujuan dan Sasaran ini telah mengakomodir rekomendasi KLHS yaitu TPB 3. (kehidupan sehat dan sejahtera) dan TPB 4 (pendidikan berkualitas).	
S1. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan	4.i.. Kenaikan partisipasi pendidikan formal segala jenjang	4.5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan formal untuk seluruh jenjang pendidikan dan informal yang inklusif melalui kerjasama perguruan tinggi maupun kemitraan 4.6. Membangun sistem pendidikan melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka panjang		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.5, 4.6, dan 1.2 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan* ***segala jenjang secara merata, berkualitas dan terjangkau***
		1.i Akses, layanan Kesehatan & Pendidikan merata, meningkat berkualitas & terjangkau"	1.2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan pada tingkat dasar & menengah tanpa diskriminasi, bebas biaya dan berkualitas"		
	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.2. Meningkatkan kualitas sarana penunjang pendidikan sesuai standar dan keamanan Gedung		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 4.2 dan .4.6 pada rekomendasi KLHS

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Outcome	Arahan Kebijakan	Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran	Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi
			4.6. Membangun sistem pendidikan melalui desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka pajang		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.6 rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa: ***Menyusun desain besar kebijakan sektor pendidikan yang terstruktur dan berjangka panjang***
		4.ii. Kualitas kompetensi guru sesuai standar	4.1. Meningkatkan SDM Guru melalui akses pelatihan dan sertifikasi dengan memperhatikan kesejahteraannya		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.1 rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa: ***Meningkatkan kualitas tenaga pendidik***
	Meningkatkan kemampuan literasi, budaya gemar membaca dan pelestarian karya	4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.7. Peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, matematikan dan sains serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 4.7 dalam rekomendasi KLHS
	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi	3.ii. Fasilitas Kesehatan sesuai standar	3.4. Meningkatkan perbaikan infrastruktur kesehatan		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.4,

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Outcome	Arahan Kebijakan	Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran	Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi
	semua	3.iii. Jaminan kesehatan yang menyeluruh	3.6. Mendorong tercapainya 100% warga yg memiliki jaminan Kesehatan		3.6, dan 1.1 rekomendasi KLHS
		1.ii Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak	1.1. Meningkatkan akses cakupan Kesehatan universal yang berkualitas dan terjangkau		
	Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien	3.ii. Fasilitas Kesehatan sesuai standar	3.5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDMK yang berdaya saing global		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 3.5 dalam rekomendasi KLHS
		3.i. Pandemi Covid-19 tertangani	3.1. Melakukan adaptasi perubahan PHBS 3.3. Pemantauan penanganan pandemi melalui sistem informasi interaktif 6.9. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		Untuk mengakomodir outcome 3.i dalam rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa ***Mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada masyarakat***

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Outcome	Arahan Kebijakan	Tinjauan KLHS Untuk Tujuan dan Sasaran	Hasil Integrasi KLHS Untuk Strategi
		2.i Status gizi yang meningkat & merata	2.2. Pelayanan kesehatan masyarakat dalam penanggulangan gizi buruk, stunting, ASI eksklusif 2.4. Peningkatan layanan posyandu untuk menjaring anak stunting dan pemberian ragam makanan tambahan		Untuk mengakomodir arah kebijakan 2.2 dan 2.4 dalam rekomendasi KLHS maka diperlukan tambahan strategi berupa ***Meningkatkan layanan posyandu dan kesehatan gizi masyarakat***
S2. Terwujudnya keluarga sejahtera		Outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS yang berkaitan dengan terwujudnya keluarga sejahtera sangat relevan dengan TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 2 (Tanpa Kelaparan).			Strategi pada sasaran 2 tidak mengalami perubahan karena sudah mengakomodir rekomendasi KLHS

Tabel 8.9. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 2

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang"					
Tujuan 2.1 Meningkatkan ketersediaan pasokan tenaga kerja yang berperan aktif dalam ekonomi.				Tujuan 2.1 telah mengakomodir TPB 8 (Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), secara eksplisit tercermin pada kalimat "ketersediaan **pasokan tenaga kerja** yang berperan aktif dalam **ekonomi**". Fokus ketersediaan dan kualitas tenaga kerja pada tujuan ini sudah selaras dengan TPB 8. Sasaran 1 erat kaitannya dengan TPB 8 "berkurangnya **tingkat pengangguran**". Salah satu indikator penting dalam TPB 8 yaitu tingkat pengangguran terbuka (TPT). Integrasi yang lebih implementatif terdapat pada tingkat strategi.	
S1. Berkurangnya tingkat pengangguran	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru	8.ii. Mendukung penciptaan lapangan kerja	8.2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global		Untuk mengakomodir arah kebijakan 8.2 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja yang berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja baru*
	Memberikan pembinaan hubungan industrial		8.4. Kolaborasi pemerintah – swasta serta kemitraan lain secara berimbang dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan menjamin perlindungan tenaga kerja		Untuk mengakomodir arah kebijakan 8.4 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Memberikan pembinaan hubungan industrial melalui kolaborasi pemerintah dan pemberi kerja*

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Tujuan 2.2. Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif.				Tujuan 2.2. dan sasaranya telah mengakomodir rekomendasi KLHS untuk arahan kebijakan TPB 8, utamanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Hal ini tercermin dalam "Meningkatkan **kewirausahaan** yang kreatif dan produktif". Lebih lanjut dijabarkan melalui strategi yang mengedepankan peningkatan kegiatan kewirausahaan untuk UMKM.	
S1. Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT	8.iii. Kemudahan akses layanan keuangan untuk UMKM	8.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif		Strategi ini telah mengakomodir arah kebijakan 8.3 rekomendasi KLHS, sehinga tidak ada perubahan/ tidak ada reformulasi strategi.

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan,s erta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta		8.6. Peningkatan kualitas, jaringan pemasaran, dukungan, pembiayaan usaha, dan akses jasa keuangan bagi UMKM dan koperasi 8.7. Mendorong kerjasama kemitraan dalam pendampingan UMKM dan koperasi		Untuk mengakomodir arah kebijakan 8.6 dan 8.7 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, **jaringan pemasaran**, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM* Serta menambah strategi: ***Mendorong kerjasama kemitraan dan wawasan dalam pendampingan UMKM dan koperasi***
	Partisipasi pada pameran dagang, melakukan Misi Dagang, meningkatkan wawasan para pelaku usaha/UKM		Secara spesifik tidak berkaitan langsung dengan arahan kebijakan pada rekomendasi KLHS di outcome 8.iii		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir outcome 8.iii dalam KLHS.
	Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan Perdagangan				

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang Peningkatan partisipasi pameran dagang, Pemasaran hasil produk koperasi dan UKM melalui Bazar dan Expo				
Tujuan 2.3 Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan				Tujuan 2.3 yaitu "Mewujudkan **ketahanan pangan** yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan" merupakan susbtansi pokok dari TPB 2. Tanpa Kelaparan. Sasaran pada tujuan ini fokus kepada pemenuhan kebutuhan pangan yang selaras dengan TPB 2. Integrasi KLHS pada tingkat strategi menjabarkan lebih lanjut bagaimana ketahanan pangan dapat tercapai.	
S1. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	2.ii Ketahanan pangan yang terjamin dan stabil	2.1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai good governance 2.3. Pemanfaatan Ruang untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Untuk mengakomodir arah kebijakan 2.1 dan 2.3 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Ketahanan pangan yang berkelanjutan **melalui peningkatan ketahanan pangan, terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas dan kualitas dan keterjangkauan pangan***
Tujuan 2.4. Meregenerasi kota dengan penyediaan infrastruktur berkelanjutan yang mampu menyelesaikan masalah kota				Tujuan 2.4 secara umum berkaitan dengan infrastruktur perkotaan	

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
S1. Meningkatnya fungsi dan pengendalian banjir dan abrasi	pengelolaan infrastruktur	Tidak ada strategi pada Sasaran 1 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS		sehingga rekomendasi arahan kebijakan KLHS yang berhubungan dengan infrastruktur ekologi telah tercermin pada sasaran-sasaran yang berkaitan dengan penyediaan akses sanitasi layak dan perihal penataan permukiman. Pada sasaran 2 - "Meningkatnya akses **sanitasi layak** dan berkelanjutan" sudah sangat mengakomodir fokus TPB 6. Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak. Untuk sasaran 5 "Tersedianya **hunian yang layak** dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat" sudah mengakomodir rekomendasi arahan kebijakan pada TPB 1. Lebih rinci, integrasi KLHS tergambar dengan jelas pada strategi untuk Ranwal	Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
S2. Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih	6.iii. Kualitas dan kuantitas air yang lebih baik	6.3. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu		Untuk mengakomodir arah kebijakan 6.3 dan 6.4 pada rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih melalui* ***Pengelolaan sumber daya air secara terpadu serta peningkatan kualitas dan kuantitas serta pemerataan akses air bersih***
		6.iv. Akses sarpras air bersih yang merata & berkualitas	6.4. Peningkatan dan pemerataan akses sarpras air bersih dari air permukaan		
	Meningkatkan dan mengelola sistem pengolahan air limbah	6.ii.Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah yg meningkat	6.7. Pegembangan dan Pengelolaan Air Limbah Komunal dan Terpusat / JSS		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 6.7 dalam rekomendasi KLHS
	Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah	6.v.Tercapainya penanganan sampah kota terpadu dan menyeluruh	6.6. Penanganan sampah terpadu untuk mengurangi potensi cemaran terhadap lingkungan dan badan air		Untuk mengakomodir arah kebijakan 6.6 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah* ***sekaligus mengurangi potensi cemaran***

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
					terhadap lingkungan dan badan air
S3. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta		Tidak ada strategi pada Sasaran 3 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 3 tidak mengalami perubahan
S4. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota		Tidak ada strategi pada Sasaran 4 yang relevan dengan outcome dan arahan kebijakan rekomendasi KLHS			Strategi pada sasaran 4 tidak mengalami perubahan
S5. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan	1.ii Hunian & lingkungan aman, bersih, sehat & berketahanan bencana tersedia, melalui kolaborasi antar pihak	1.3. Mengembangkan hunian yang bersih, sehat, aman, nyaman dan terjangkau melalui kolaborasi antar pihak sesuai good governance (transparan, akuntabel, responsive, inklusif, representatif dan partisipatif) dalam rangka mengurangi backlog hunian		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 1.3 dalam rekomendasi KLHS
Tujuan 2.5 Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta.				Tujuan 2.5 yaitu "Meningkatkan **investasi** di Provinsi DKI Jakarta", telah sangat mengakomodir rekomendasi kebijakan pada TPB 8 berkenaan dengan investasi.	
S1. Meningkatnya pertumbuhan investasi	Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan	8.i Pertumbuhan PDB per kapita Jakarta yang meningkat	8.10 pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah		Strategi menjadi: *Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi*

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
	Pembangunan Jakarta Investment Center (JIC)		melalui penguatan green investment	Strategi Penguatan investasi melalui *green investment* diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta.	*Penanaman Modal* ***untuk penguatan green investment*** *dan Pembangunan Jakarta Investment Center (JIC)*
Tujuan 2.6 Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.				Tujuan ini secara umum telah mengakomodir arahan kebijakan rekomendasi KLHS di TPB 8 yaitu penataan ruang untuk pengembangan ekonomi. Integrasi KLHS yang lebih implementatif yaitu pada tingkat strategi.	
S1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	8.i. Pertumbuhan PDB perkapita DKI Jakarta yang Meningkat	8.10. Pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah melalui penguatan green investment		Berdasarkan rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Mendorong pemanfaatan ruang* ***sesuai rencana dan konektivitas wilayah untuk penguatan ekonomi dan investasi***

Tabel Error! No text of specified style in document..**1. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 3**

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas"					
Tujuan 3.1 Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuanagan daerah yang akuntabel dan transparan.				Rekomendasi KLHS berdasarkan TPB prioritas tidak ada yang menyasar spesifik kepada tujuan/sasaran ini Tujuan dan sasaran ini erat kaitannya dengan TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan **Kelembagaan** yang Tangguh yang menjadi landasan dalam pelayanan publik seperti dielaborasikan pada sub bab keterkaitan antar TPB dalam laporan KLHS ini.	
S1. Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada sub bab 7.1, yang digambarkan bahwa TPB 16 yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini.			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
Tujuan 3.2 Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasiskan data				Rekomendasi KLHS berdasarkan TPB prioritas tidak ada yang menyasar spesifik kepada tujuan/sasaran ini Tujuan dan sasaran ini erat	
S1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis, transparan dan akuntabel serta model organisasi pemerintahan yang dinamis		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada sub bab 7.1, yang digambarkan bahwa TPB 16 yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini.			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
S2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam layanan pemerintahan secara menyeluruh	Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Pengalokasian anggaran, Registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap, Redundant perangkat jaringan, Redundant bandwidth jaringan	1.iii Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) tepat sasaran	1.5. Perbaikan tata kelola sistem pendataan penduduk utamanya untuk menjamin kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19	kaitannya dengan TPB 16. Perdamaian, Keadilan dan **Kelembagaan** yang Tangguh yang menjadi landasan dalam pelayanan publik seperti dielaborasikan pada sub bab keterkaitan antar TPB dalam laporan KLHS ini. Susbstansi sasaran 2 yang fokus dengan pemanfaatan teknologi, pada dasarnya telah mengakomodir TPB 1 yang berkaitan sistem kependudukan dan TPB 4 yang berkaitan dengan akses teknologi dan informasi	Untuk mengakomodir arah kebijakan 1.5 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: ***Pengembangan sistem pendataan penduduk dalam rangka peningkatan layanan yang tepat sasaran***
	Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, Optimalisasi layanan environment sosial dan dukungan TIK Optimalisasi penyediaan analisis big data untuk sektor prioritas		4.3. Meningkatkan akses teknologi dan informasi		Untuk mengakomodir arah kebijakan 4.3 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: ***Meningkatkan akses teknologi dan informasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat***

Tabel Error! No text of specified style in document..**2. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 4**

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial."					
Tujuan 4.1. Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial				Tujuan 4.1 Mewujudkan pembangunan yang memperkuat **daya dukung lingkungan** dan sosial" secara umum terkait dengan beberapa TPB yang fokus pada daya dukung lingkungan. Sasaran 2, berkaitan dengan RTH, telah mengakomodir TPB 2 dalam rangka pemanfaatan RTH sebagai *urban farming* yang telah diintegrasikan pada tingkat strategi. Sasaran 2 juga memiliki keterkaitan yang erat dengan TPB 6 (Air dan Sanitasi Layak) yaitu dalam penyediaan infrastruktur ekologi	
S1. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada Sub Bab 7.1 yang digambarkan bahwa TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini.			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
S2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH	2.ii Ketahanan pangan yang terjamin dan stabil	2.1. Terpenuhinya ketersediaan pangan baik kuantitas & kualitas, berdasarkan keberlanjutan, keterjangkauan, kebudayaan melalui kolaborasi yang sesuai good governance		Strategi ini menjadi: *Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH* ***diantaranya melalui pengembangan taman kota serta pengembangan urban farming untuk stabilitas ketahanan pangan***
S3. Melambatnya penurunan permukaan tanah	Peningkatan cadangan air tanah	6.i. Penggunaan air tanah terkendali	6.1. Efisiensi pemanfaatan air (optimalisasi penggunaan grey water untuk kebutuhan air lahan dan penerapan 3R untuk konsumsi domestik)		Untuk mengakomodir arah kebijakan 6.1, 6.2., 6.8 dan 6.10 rekomendasi KLHS maka strategi menjadi: *Peningkatan cadangan air tanah* ***melalui efisiensi***

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	Strategi	Outcome	Arah Kebijakan	Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran	Hasil Integrasi KLHS pada Strategi
			6.2. Investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air 6.8. Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah 6.10. Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)	untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air. Sasaran 3 fokus pada penurunan permukaan tanah, yang telah mengakomodir rekomendasi KLHS terkait dengan penggunaan air tanah (TPB 6)	*pemanfaatan, investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air,* *Penegakan hukum pembatasan penggunaan air tanah dan Peningkatan tarif Nilai Perolehan Air Tanah*
S4. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan, mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan				Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 1.3 dalam rekomendasi KLHS

Tabel Error! No text of specified style in document..**3. Matriks Integrasi Rekomendasi KLHS untuk Misi 5**

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
Misi 5: Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan"					
Tujuan 5. 1. Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia.				Tujuan ini secara umum turut mengakomodir TPB 4. (Pendidikan Berkualitas), tercermin dalam "Mengembangkan Jakarta sebagai **kota inovatif** dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia. Salah satu fokus TPB 4 yaitu teknologi dan inovasi, yang telah dicerminkan oleh sasaran 1 melalui pengembangan penelitian.	
S.1. Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran capaian kinerja pembangunan	4.iii. Sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	4.4. Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi		Strategi ini tidak mengalami perubahan karena telah mengakomodir arah kebijakan 4.4 dalam rekomendasi KLHS Dalam upaya mempercepat pencapaian outcome sekaligus mengakomodir arah kebijakan 4.4 maka ditambahkan strategi: ***Mengembangkan sarana dan prasarana riset untuk mendorong kapasitas teknologi dan inovasi***
Tujuan 5.2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras				Rekomendasi KLHS berdasarkan TPB prioritas tidak ada yang menyasar spesifik kepada tujuan/sasaran ini	
S1. Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya		KLHS mengelaborasi keterkaitan antar TPB pada sub bab 7.1 yang digambarkan bahwa TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) yang menjadi esensi dari Tujuan dan sasaran ini. Telah disepakati pada FGD dengan pemangku kepentingan bahwa pembangunan di DKI itu dalam koridor Kota yang berkelanjutan dan inklusif			Strategi pada sasaran 1 tidak mengalami perubahan
Tujuan 5.3 Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia				Tujuan 5.3 yang mengedepankan kebudayaan telah	

Draft Ranwal RPJMD		Rekomendasi KLHS		Integrasi KLHS pada Ranwal RPJMD	
Misi/Tujuan/Sasaran	**Strategi**	**Outcome**	**Arah Kebijakan**	**Tinjauan KLHS pada Tujuan dan Sasaran**	**Hasil Integrasi KLHS pada Strategi**
S1. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan E-Tourism	8.iv. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat	8.9. Pengembangan pariwisata yang adaptif di era tatanan hidup baru berbasis masyarakat dan berkelanjutan melalui teknologi digital	mengakomodir TPB 8 terutama untuk pengembangan ekonomi melalui pariwisata budaya. Tujuan dan sasaran memimiliki strategi yang mengarah kepada pariwisata dan pengembangan SDM sehingga telah mengakomodir rekomendasi arahan kebijakan KLHSpada TPB 8.	Untuk mengakomodir arahan kebijakan 8.9 maka strategi menjadi: *Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan* ***pariwisata berbasis teknologi digital yang adaptif di era tatanan hidup baru***
S2. Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan	Melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pelestarian SDM dan unsur kebudayaan serta peningkatan sarana prasarana dan melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.	8.ii. Mendukung penciptaan lapangan kerja	8.2. Peningkatan kualitas SDM berdaya saing global		Untuk mengakomodir arahan kebijakan 8.2 strategi menjadi: ***Pengembangan SDM berdaya saing global dan pelestarian kebudayaan melalui peningkatan sarana prasarana dan upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri.***
S3. Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses seluas-luasnya terhadap cagar budaya melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri	8.iv. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara meningkat	8.3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui inovasi usaha dengan memperkuat riset dan teknologi informasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif		Untuk mengakomodir arahan kebijakan 8.3 strategi menjadi: ***Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik serta nilai tambah pariwisata berbasis cagar budaya melalui ekonomi kreatif***

Lampiran 9. Berita Acara Penjaminan Kualitas

BERITA ACARA
KEGIATAN PENJAMINAN KUALITAS
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2017-2022
Nomor : 761-1.712.2

Pada hari ini Senin tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balaikota DKI Jakarta, telah dilakukan Penjaminan Kualitas secara mandiri yang dilakukan oleh Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1157 Tahun 2020 tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 bersama dengan penyusun Kebijakan, Rencana dan Program (KRP).

Dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perencanaan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melakukan penjaminan kualitas KLHS, Gubernur dibantu oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup yaitu Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Penjaminan kualitas secara mandiri ini telah disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan rincian penilaian sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara kegiatan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Jakarta, 18 Januari 2021

Ketua Tim Pembuat KLHS Sekretaris Daerah,	Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Gubernur,
Marullah Matali NIP. 196511271996031003	Anies Baswedan, Ph.D

LAMPIRAN. FORM PENJAMINAN KUALITAS

Nama KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DKI Jakarta 2017-2022
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program (KRP)	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022
OPD Penanggung Jawab	Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Tahun Pelaksanaan	2020

Tabel Penjaminan Kualitas KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Penilaian: Desain Proses KLHS		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? **- Bila "Ya" lanjutkan ke c** **- Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c**	***Ya***	*KLHS ini dilakukan untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. KLHS ini dilakukan secara parallel dengan proses penyusunan RANWAL Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Penyusunan RANWAL diinisiasi 2 bulan lebih awal dari proses KLHS. Rekomendasi KLHS menjadi bagian dari penyusunan RANWAL Perubahan RPJMD yang diintegrasikan secara iteratif mengikuti dinamika proses pelaksanannya.*
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?	-	-
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?	-	-
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	***Ya***	*Penyusun KLHS adalah Tim Pembuat KLHS yang disahkan melalui SK Gubernur No. 1157 tahun 2020 sebagaimana terlampir pada lampiran 1, dimana Ketua Tim Pembuat KLHS adalah Sekretaris Daerah, sementara Wakil Ketua I yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Wakil Ketua II Kepala Bappeda. Tenaga Ahli yang terlibat selama proses penyusunan KLHS diidentifkasi berdasarkan kompetensi tenaga ahli pada lampiran 10*
Ringkasan Kesimpulan: *Tim Pembuat KLHS telah berusaha seoptimal mungkin untuk mengikuti Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.*		

Penilaian: Laporan KLHS			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah Laporan KLHS telah memuat :		✓	*Belum lengkap*
		✓✓	*Lengkap*
		TS	*Terpenuhi sebagian*
		TR	*Tidak bisa dilakukan penilaian (dijelaskan dalam Keterangan)*
1.	Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	✓✓	*Terdapat dalam sub bab 1.1 dan 1.5 Dasar Hukum*
2.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	✓✓	*Terdapat dalam sub bab 1.4 tahapan penyelenggaraan KLHS*
3.	Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	✓✓	*Terdapat dalam bab 7*
4.	Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan	✓✓	*Terdapat dalam bab 8*
5.	Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	✓✓	*Terdapat dalam sub bab 8.2*
6.	Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	✓✓	*Pemangku kepentingan baik dari masyarakat, akademisi, LSM, swasta, mitra pembangunan dan instansi pemerintah telah dilibatkan dalam konsultasi publik dan FGD tematik dengan pemangku kepentingan yang relevan.* *Semua dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (FGD dan konsultasi Publik) terdapat dalam Laporan Notulensi*
7.	Hasil penjaminan kualitas KLHS	✓✓	*Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat dalam lampiran 9*
8.	Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas.	✓✓	*Terdapat dalam Dokumen Ringkasan Eksekutif KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022*

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Nilai: • Sudah • Belum • Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)		
Apakah identifikasi dan perumusan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis yang merupakan akar masalah melibatkan pemangku kepentingan?	Sudah	*Dilakukan secara partisipatif oleh Tim Pembuat KLHS melalui serangkaian FGD Perumusan TPB Prioritas dan disepakati oleh pemangku kepentingan melalui Konsultasi Publik - I. Perumusan TPB prioritas yang menggambarkan isu-isu strategis di dalamnya telah secara elaboratif menjadi bagian diskusi pada saat konsultasi publik yang diikuti dengan poling untuk penyepakatannya.*
Apakah hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan paling strategis dirumuskan berdasarkan		

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:			
1.	Karakteristik wilayah	Sudah	*Dalam diskusi FGD persiapan dan konsultasi publik, isu-isu PB merupakan input dari pemangku kepentingan lintas sektor dari berbagai wilayah dalam Provinsi DKI Jakarta, sehingga isu yang dipaparkan merujuk pada lokasi.*
2.	Tingkat pentingnya potensi dampak	Sudah	*Isu PB Prioritas (TPB Prioritas) salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil capaian indikatornya. Capaian indikator yang perlu perhatian (belum mencapai target), menjadi salah satu poin utama dalam perumusan TPB prioritas. Selain itu, status daya dukung serta keterkaitan dengan perencanaan strategis lainnya telah menjadi pertimbangan.*
3.	Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan	Sudah	*Isu PB Prioritas (TPB Prioritas) ditentukan berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan isu KRP yang relevan. Interlink TPB prioritas dengan TPB lainnya juga dijabarkan dalam subbab 7.4.*
4.	Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program	Sudah	*Dalam perumusan isu PB prioritas dilakukan analisis keterkaitan dengan Isu pada KRP relevan yaitu RPJMN, RPJPD dan RTRW sebagaimana dijelaskan dalam sub bab 6.1*
5.	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau	Belum	*KLHS belum mempertimbangkan RPPLH. Dokumen RPPLH masih dalam proses finalisasi penyusunan dan belum ada Perda nya.*
6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.	Sudah	*Telah dilakukan pertimbangan dan mengacu perencanaan strategis lainnya termasuk RPJMN, RPJPD, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 beserta Dokumen KLHSnya serta RAD TPB Provinsi DKI Jakarta.*
Apakah rumusan isu prioritas sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.1.*
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.2*
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.3*
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	Sudah	*Potensi banjir dijelaskan melalui kinerja jasa lingkungan mitigasi banjir yang dijelaskan pada sub bab 4.3.4. serta potensi banjir akibat perubahan iklim yang dijelaskan pada sub bab 4.6*
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.	Sudah	*Kualitas sumber daya air dijelaskan dalam sub bab 6.1.2.3, sementara kuantitas air dan pangan dijelaskan melalui sub bab 4.1. mengenai daya dukung.*
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.5*
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Sudah	*Sudah di analisis dan termuat dalam sub bab 4.6*

Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	Sudah	*Sudah dijelaskan dalam profil TPB 1 pada subbab 6.1.2.5*
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Sudah	*Dijelaskan dalam profil TPB 3 pada sub bab 6.1.2.1*
10	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	*Ada catatan*	*Tidak ada masyarakat hukum adat di Provinsi DKI Jakarta*
Apakah lingkup geografis diidentifikasi dengan jelas?		Sudah	*Lingkup geografis KRP adalah wilayah Provinsi DKI Jakarta dan telah dijelaskan dalam sub bab 3.1*
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Sudah	*Wilayah diluar cakupan KRP salah satunya diidentifikasi dalam analisis kinerja jasa lingkungan pada sub bab 4.2. Hal ini dilakukan karena dibutuhkan analisis yang kuat dalam mencari keterkaitan jasa lingkungan dalam wilayah fungsionalnya. Wilayah yang dikaji melingkupi Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terkait.*
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?		Sudah	*Telah menjadi bahan diskusi dan eksplorasi oleh pemangku kepentingan pada saat FGD dan konsultasi publik sesuai dengan TPB prioritas.*
Keterangan Tambahan: Proses identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui beberapa tahap, diawali dengan diskusi bersama stakeholder kunci berdasarkan analisis gap capaian TPB masing-masing pilar yaitu Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Hukum & Tata Kelola Kelembagaan. Setelah itu dilakukan pengerucutan 10 TPB yang akan diusulkan dalam konsultasi publik untuk menjadi TPB prioritas dengan pertimbangan kondisi lingkungan hidup (6 muatan) dan perencanaan strategis lainnya. Dalam konsultasi publik, disepakati 6 TPB menjadi TPB Prioritas melalui diskusi penyepakatan dan polling. Penyepakatan hasil Konsultasi Publik dituangkan dalam Berita Acara pada lampiran 4			

Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Sudah	*Kondisi terkini dijabarkan melalui capaian TPB pada sub bab 5.1*
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Sudah	*Sudah dijelaskan dalam sub bab 4.1*
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Sudah	*Dilakukan telaahan keterkaitan muatan KRP terhadap Isu PB (TPB Prioritas) dan dibahas secara mendalam pada sub bab 6.2*
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Sudah	
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Ada Catatan	*Analisis untuk KRP tidak secara eksplisit menggunakan metode spasial, namun dalam FGD yang dilakukan mengindikasikan lokasi-lokasi KRPnya.*
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh: isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi	-	-

Penilaian: Pengkajian			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Hasil analisis memuat kajian:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.1*
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.2*
3.	Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.3*
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.4*
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.5*
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	*Telah dianalisis dan dijelaskan pada sub bab 4.6*
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?		Sudah	*Analisis 6 (enam) muatan KLHS merupakan hasil analisis dari dokumen kajian yang telah ada sebelumnya dari instansi resmi terkait. Dokumen yang menjadi referensi dalam kajian 6 (enam) muatan KLHS adalah:* *1. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH – dokumen ini telah melalui proses konsultasi dengan KLHK.* *2. Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH* *3. Laporan Akhir Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH* *4. Laporan Akhir Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta 2019, DLH* *5. Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta 2018, DLH* *6. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta, 2020 - 2024*
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/ referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?		Sudah	
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?		Sudah	
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?		Sudah	*Dijelaskan pada sub bab 1.7 dan 1.8*
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?		Ada catatan	*Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/STJEN/ KUM.1/12/2017 Pasal 13 ayat (2) huruf a bahwa penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS wajib mempertimbangkan jenis, tema, hirarki dan skala informasi KRP. Sehingga dalam penyusunan KLHS ini mengacu pada Permendagri No. 7/2018 tentang KLHS RPJMD. Dalam Permendagri tersebut, KLHS RPJMD dilakukan secara ex-ante sehingga tidak memberikan fokus pada perkiraan dampak namun lebih kepada alternatif perbaikan*
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?			
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?			

Penilaian: Pengkajian		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
		dan rekomendasinya. Dalam Permendagri 7/2018, rekomendasi KLHS menjadi bagian dalam RANWAL Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang berfokus pada capaian TPB dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ada catatan	*Dilakukan skenario upaya tambahan dalam rangka pencapaian target, hal ini terdapat pada sub bab 7.6, namun bukan skenario perkiraan dampak.*
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Ada catatan	*Analisis secara spasial dilakukan untuk mengkaji kondisi lingkungan hidup yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (air), kinerja jasa lingkungan, dampak dan resiko lingkungan hidup (timbulan sampah, kualitas air), efisiensi pemanfaatan SDA dan potensi dan ketahanan kehati.*
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Sudah	*Dijelaskan skenario arahan daya dukung dan daya tampung LH pada sub bab 7.1*
Keterangan Tambahan: *KLHS ini mengacu pada Permendagri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD. Dalam Permendagri tersebut, KLHS RPJMD dilakukan secara ex-ante sehingga tidak memberikan fokus pada perkiraan dampak namun lebih kepada alternatif.*		

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai di bawah ini:			
1.	Perubahan tujuan atau target	*Sudah*	*Keterkaitan dengan arahan kebijakan rekomendasi KLHS dalam Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017 -2022 telah dijabarkan dalam sub bab 8.3 integrasi namun tidak secara eksplisit merubah Tujuan atau Target.*
2.	Perubahan strategi pencapaian target	*Sudah*	*Perubahan Strategi pada Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 dijabarkan pada tabel 8.8 - 8.12 pada sub bab 8.3 integrasi.*
3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	*Sudah*	*Lokasi indikatif kesesuaian sasaran dan program prioritas telah dijabarkan dalam tabel 8.13 pada sub bab 8.3.* *Lokasi indikatif KRP diidentifikasi berdasarkan Kegiatan Strategis Daerah*

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi			
Kriteria		**Penilaian**	**Keterangan**
			(Pergub No. 1107/ 2019) dan RTRW (Perda No. 1/2012)
4.	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	*Sudah*	*Era normal baru akibat pandemi COVID-19 menjadi dasar dalam perumusan alternatif dan rekomendasi dalam KLHS.*
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	*Sudah*	*Prioritas Perubahan RPJMD 2017 – 2022 adalah penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.*
6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	*Sudah*	*Ada dalam bab skenario (bab 7) dan rekomendasi (bab 8) sebagai arahan kebijakan terutama dalam TPB 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak dimana* ***investasi infrastruktur ekologi pendukung pemulihan kualitas dan kuantitas air*** *menjadi salah satu arahan kebijakan rekomendasi KLHS. Melihat keterkaitannya dengan TPB lain, arahan kebijakan ini turut mendukung TPB 15 Ekosistem Darat yang berfokus pada upaya konservasi untuk meningkatkan fungsi ekosistem.*
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup	*Ada Catatan*	*Dalam alternatif dan rekomendasi dirumuskan arahan kebijakan untuk fokus pada pencapaian TPB Prioritas. KLHS ini tidak berbasis dampak, sehingga tidak merumuskan mitigasi.*
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?		*Sudah*	*Secara umum, Tahapan penyelenggaraan KLHS dan Sistematika dokumen KLHS dijelaskan pada Bab 1. Penjelasan lebih rinci terdapat pada bab 7 dan bab 8.*
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasikan dengan jelas?		*Ada Catatan*	*KLHS menggunakan pendekatan sesuai Permendagri No. 7/2018 (ex-ante) sehingga dilakukan sebelum KRP disahkan.* *Dalam alternatif dan rekomendasi dirumuskan arahan kebijakan untuk fokus pada pencapaian TPB Prioritas. KLHS ini tidak berbasis dampak, sehingga mengarahkan pada upaya (alternatif)* ***menghindari*** *potensi timbulnya dampak dan resiko, dan tidak merumuskan mitigasi (pengurangan) dampak*
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin masih akan muncul?			

Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasikan dengan jelas?	Sudah	*Terdapat penjelasan skenario daya dukung dan daya tampung LH pada sub bab 7.2*
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian dan penyusunan alternatif?	Sudah	*Rekomendasi berdasarkan dari isu prioritas (TPB prioritas) yang teridentifikasi. Alternatif capaian (skenario) dianalisis berdasarkan outcome dari masing-masing TPB prioritas yang sudah mempertimbangkan keterkaitan dengan TPB lainnya sehingga menghasilkan arahan kebijakan yang sesuai yang selanjutnya dirumuskan arahan program sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90/2019 yang diperbaharui dengan Kepmendagri 50/2020.* *Skema perumusan alternatif dan rekomendasi dijelaskan pada bab 7 dan bab 8.*
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Sudah	*Terdapat pada bab 10.*

Penilaian: Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS		
Kriteria	**Pemenuhan**	**Keterangan**
Apakah telah terpenuhi :	• *Sudah* • *Belum* • *Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)*	
1. Data pendukung proses dan hasil konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	*Sudah*	*Semua dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (FGD dan konsultasi Publik) terdapat dalam Laporan Notulensi*
2. Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	*Sudah*	*Terdapat dalam sub bab 8.4 Penelaahan*
3. Dokumen penjaminan kualitas	*Sudah*	*Berita Acara Penjaminan Kualitas terdapat dalam lampiran 9*
4. Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	*Sudah*	*Terdapat dalam lampiran 10*
5. SK Kelompok Kerja KLHS	*Sudah*	*Terdapat dalam lampiran 1*

Penilaian: Pengintegrasian Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan		
Kriteria	**Pemenuhan**	**Keterangan**
Apakah telah terpenuhi:		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dimasukkan materi teknis KRP	*Sudah*	*Rangkuman terdapat dalam sub bab 8.4 Penelaahan*
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP	*Sudah*	*Hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam muatan KRP terdapat pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2017-2022 yang merupakan lampiran RANPERDA Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022.* *Rangkuman hasil integrasi pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2017-2022 terdapat dalam sub bab 8.4 Penelaahan*
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	*Sudah*	
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Tidak	
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	*Sudah*	*Tidak secara ekspilisit dijelaskan tentang pemanfaatan rekomendasi KLHS ini untuk KRP lainnya. Namun, sebagai dokumen perencanaan daerah, RPJMD harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD ataupun rujukan bagi dokumen lainnya.*
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Tidak	
Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	Tidak	

Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	*Sudah*	*Konsultasi publik dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dalam penyepakatan Isu PB prioritas (TPB Prioritas) dan yang kedua adalah saat penyepakatan alternatif perbaikan dan rekomendasi KLHS.*
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	*Sudah*	*Pemangku kepentingan yang terlibat terdapat dalam Laporan Dokumentasi KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022. Sementara identifikasi para pihak dijelaskan dalam sub bab 3.3.2 laporan KLHS ini.*
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	*Sudah*	*Dalam konsultasi publik yang dilakukan melalui pertemuan virtual dilakukan banyak metode untuk menjaring masukan. Salah satunya dengan metode poling, kolom masukan daring, FGD tematik, FGD dalam kelompok kecil (breakout room) sehingga setiap pemangku kepentingan diberikan kesempatan yang luas baik pada saat forum diskusi ataupun media online lainnya yang diberikan waktu cukup*

Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Kriteria	**Penilaian**	**Keterangan**
		sekalipun ada batasan waktu penyampaiannya.
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	*Sudah*	*Semua dokumentasi pelibatan pemangku kepentingan (FGD dan konsultasi Publik) terdapat dalam Laporan Notulensi. Semua bahan presentasi pada saat FGD dan Konsultasi Publik dibagikan kepada para peserta setelah kegiatan berlangsung via email ataupun kolom chat (pertemuan zoom)* *Dokumen KLHS merupakan dokumen publik, untuk pemanfaatannya, yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Pembuat KLHS.*

Lampiran 10. Kompetensi Tenaga Ahli

Nama	Kualifikasi
Sri Handayani, *Tenaga Ahli KLHS*	Pendidikan Formal: • MBA, Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 2014. • ST, Universitas Trisakti, Jakarta, 1998. • Diploma, Analis Kimia, Akademi Kimia Analis, Bogor, 1994. Pelatihan Profesioal: • TOT tentang Environmental Navigator Management, 2005, Germany • TOT Environmental Performance Indicator, 2005, Bangkok • TOT Environmental Management Accounting, 2006 Bangkok • Training on Results Chain Management, 2006, Germany • Training on Organizational Development 1-5 Modules – 2007-2008 • TOT Leadership Beyond Boundaries, Centre for Creative Leadership, 2012, Cambodia • Berpartisipasi dalam berbagai pelatihan/seminar di bidang lingkungan hidup (termasuk KLHS) dan manajemen di Indonesa maupun di luar negeri. Pengalaman Kerja: 24 tahun • Pakar KLHS dari tahun 2010 – sekarang, - Berperan dalam tim dan ketua tim peningkatan kapasitas dalam KLHS, mengembangkan dan menyelenggarkan modul-modul pelatihan KLHS kepada aparat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, - Berperanserta penerapan KLHS untuk RPJMD dan RTRW (2015- sekarang); - Berperanserta dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait KLHS – 2016 - Salah satu pelatih TOT KLHS-KLHK ESP3, Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Ambon, 2016-2017 - Salah satu pelatih ST- SEA di IAIA – 17 Montreal Canada, 2017 - Salah satu pelatih KLHS untuk Pemerintah Provinsi Papua oleh WWF, Maret 2018. - Narasumber berbagai kegiatan terkait dengan KLHS diantaranya yaitu konsultasi publik di tingkat kabupaten/kota (Cimahi, Kudus, Sukabumi), provinsi (Jawa Barat, Papua) dan tingkat nasional oleh KLHK (peer review KLHS di Indonesia periode 2017-2018 bekerja sama dengan GGG1, konsultasi validasi provinsi) - Tenaga Ahli KLHS dalam penyusunanKLHS RTRW untuk Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Mimika dibawah naungan USAID-Lestari bekerja sama dengan WWF-Indonesia, 2017-sekarang • Lebih dari 23 tahun sebagai pakar dalam pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, daya dukung dan daya tampung LH, efisiensi energi, produksi bersih, pengembangan kapasitas, pembangunan masyarakat, pelatihan, design event, dan bantuan teknis untuk UKM.

Nama	Kualifikasi
Fahmi Nur Amalia, Tenaga Ahli KLHS	Pendidikan Formal: • Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada 2016 Pelatihan Profesioal: • Computer Training: MATLAB, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2013 • Sustainable Standard, UNDP, Jakarta 2017 Pengalaman Kerja: 4 tahun • Menjadi Anggota Tim Tenaga Ahli Penyusunan KLHS berbagai sektor dan wilayah di Indonesia - Anggota Tim Penyunting laporan KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah, KLHK 2020 - Anggota Tim Penyunting laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), KLHK. 2019 - Pendukung Tenaga Ahli KLHS Bantuan Teknis untuk KLHS RTRW di 3 Kabupaten di Provinsi Papua (Mimika, Mappi, dan Boven Digoel), WWF-USAID LESTARI, 2018-2020 - Notulen, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS Cepat) untuk Terobosan Kebijakan Pengamanan atas Dampak dan Resiko yang ditimbulkan PT. Freeport Indonesia, didanai oleh Pemerintah melalui KLHK, 2018 - Tim Penyusun Materi Pelatihan, Pelatihan KLHS untuk Pokja KLHS di Provinsi Papua, WWF Indonesia, 2018 - Anggota Tim Penyusunan KLHS RPJMD dan RTRW di berbagai wilayah di Dharmasraya, Batang dan berpartisipasi dalam penyusunan PermenLHK 69/2019 sebagai notulen dan asst. Tenaga Ahli • Berkontribusi dalam penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Lombok Utara serta penyusunan Dokumen dan Pedoman Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung untuk daerah.
Hijri Agista Rakhmadani Tenaga Ahli KLHS	Pendidikan Formal: • 2007 – 2011, S1 Teknik Lingkungan, Universitas Diponegoro, Semarang Pelatihan Profesioal: • 2013, Workshop Waste to Energy, Development of Renewable Energy and Agrowaste to Energy. • 2013, EIBD (EU – Indonesia Business Dialogue). Jakarta • 2013, Workshop Green Solution for Manufacturing Industry. Sustainable Business Dialogue – GIZ PAKLIM. Jakarta • 2013, Executive Briefing dalam Sistem Manajemen Energi ISO 50001 dan Sistem Optimasi pada Industri. UNIDO. Jakarta. • 2013, Pelatihan Fasilitasi, Komunikasi dan Manajemen Proyek. PT. Dazya Ina Mandiri dan DPF. Bogor. Basic Energy Mapping Training. GIZ PAKLIM – Jababeka. Bekasi Workshop CEO – ISO 50001 oleh TUV Rheinland • 2012, Workshop Kerangka Logika DPF. PT Dazya Ina Mandiri dan DPF. Jakarta. Workshop Standarisasi Konsep Buku Panduan. BNPB dan AusAID. Jakarta. Adobe Design • 2010, autoCAD 2D

Nama	Kualifikasi
	Pengalaman Kerja: 9 tahun • Menjadi Anggota Tim Tenaga Ahli Penyusunan KLHS berbagai sektor dan wilayah di Indonesia - Tenaga Ahli KLHS Junior, KLHS Rencana Induk Pengelolaan Perkebunan Kabupaten Sintang. WWF Indonesia, 2019 - Exhibitor, Pameran Nasional KLHS Indonesia 2017, ESP3-DANIDA - Anggota Tim Tenaga Ahli, Fasilitasi Pelaksanaan KLHS untuk RTRW Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, WWF Indonesia dan MCAI USAID, 2018 - Anggota Tim Tenaga Ahli, Pedoman Umum KLHS, ESP3 DANIDA, Jakarta, 2017 - Anggota Tim Tenaga Ahli, Pendampingan Teknis KLHS RTRW Kabupaten Temanggung, Sukoharjo dan Magelang, Provinsi Jawa Tengah, ESP3 DANIDA, 2015-2018 - Anggota Tim Tenaga Ahli dan Administrasi Lapangan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Daerah, Proyek Percontohan, ESP 2 – DANIDA, 2012 • Menjadi Tim tenaga ahli dalam dalam penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah di berbagai wilayah serta penyusunan Dokumen dan Pedoman Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung untuk daerah, dan berpengalaman dalam proyek sanitasi, pembangunan rendah karbon dan fasilitasi UMKM.

Lampiran 11. Berita Acara Pra Validasi (1 Maret 2021)

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 6 Wing C
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270

BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN DALAM RANGKA PRA VALIDASI
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PERUBAHAN RPJMD
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 – 2022
Senin, 1 Maret 2021

Nomor : BA. 4/PDLKWS/PKLHWS/3/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 1 Maret Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.E.S. (Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor);
2. Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T, M.SE, MBA (Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta);
3. Drs. Syaripudin, M.Si (Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta)

telah melaksanakan rapat pembahasan secara daring (*zoom meeting*) dalam rangka Pra Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 dengan hasil sebagai berikut:

1. Laporan KLHS Perubahan RPJMD DKI Jakarta Tahun 2017 - 2022 secara umum telah sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2016, Permen LHK No.P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan Permendagri No. 7 tahun 2018 dengan penyempurnaan sebagaimana masukan narasumber secara lisan dan tulisan;
2. Penyempurnaan Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada butir 1, agar dilengkapi dengan :
   a) Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan *Urban Resilience* dalam Era New Normal;
   b) Penegasan batas ekologis pada TPB-6, infrastruktur ekologi perlu dielaborasi lebih detil (situ, waduk, danau) dan Pengelolaan DAS terpadu dan Pemanenan air hujan pada bangunan hijau;
   c) Penjelasan mengenai *Green Investment* ;
   d) Penjelasan ketahanan pangan lebih spesifik untuk Provinsi DKI Jakarta;
   e) Keterkaitan antara 6 muatan dan indikator SDG dan target tahunan sampai akhir RPJMD;
   f) Melengkapi tabel sesuai lampiran Permendagri No. 7 tahun 2018 (tabel D1, D2 dan D3).
3. Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 dapat diberikan setelah dilakukan penyempurnaan sebagaimana butir 2 tersebut di atas.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan lampiran daftar hadir daring yang tidak terpisahkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2021

Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Dr. Nasruddin Djoko Surjono, S.IP, S.T, M.SE, MBA
NIP. 197306261999031002

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Syaripudin, M.Si
NIP. 197301011992031004

Mengetahui
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor,

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, M.E.S
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran 12. Target dan Indikator TPB (Form D1)

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	DINSOS
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95	100	DINKES
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerja-an	%	1. Formal : 116 dari pendu-duk yang bekerja (tahun 2017)	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	DISNAKERTRANS
				2. Informal : NA	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya	%	4,8 (tahun 2017)	14,9	38,7	64,5	75	85,4	DINSOS
1.3.1.(d)	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Pro-gram Keluarga Harapan	Rumah Tangga	61,022	65,918	65,918	65,918	65,918	65,918	DINSOS
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada anak usia 12-23 bulan	%	47 (tahun 2017)	50	53	55	57	60	DINKES
1.4.1.(c)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59,1	DPPAPP

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Presentase cakupan pelayanan air bersih	%	60 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	DSDA
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	1,00%	1. 15,93 (tahun 2017)	1. 0	1. 17,04	1. 20,49	1. 23	1. 26,44	DSDA
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	2,00%	2. 83,48 (tahun 2016)	2. 85,15	2. 86,85	2. 88,59	2. 90,36	2. 92,17	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	1. Jumlah kawasan pemukiman kumuh	1. RW	1. 223 (tahun 2017)	1. 164	1. 115	1. 67	1. 23	1. 23	DPRKP
		2. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	2,00%	2. 15,18 (tahun 2016)	2. 12,14	2. 9,72	2. 7,77	2. 6,22	2. 4,97	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat	Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	96,15 (tahun 2017)	96,54	96,93	97,32	97,71	98,1	DISDIK
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sedera-jat	Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	84,79 (tahun 2017)	86,73	88,67	90,62	92,59	94,5	DISDIK
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA	%	71,87 (tahun 2017)	74,65	77,42	80,2	82,95	85,75	DISDIK
1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89,7	DISDUKCAPIL
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	%	100 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	DPE
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	BPBD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Lokasi	34 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	BPBD
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	%	11 (tahun 2017)	-	100	100	100	100	BPBD

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks Risiko	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Rupiah	294.611.450.000 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	BPBD
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Rupiah	11.423.224.514.768 (tahun 2017)	9.593.286.802.392	PM	PM	PM	PM	DINSOS
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	1. Miliar Rupiah, Fungsi Pendidik-an	1. 18.568,34 (tahun 2017	1. 21.766,85	1. 24.090 ,48	1. PM	1. PM	1. PM	DINSOS
			2. Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	2. 7.180,97 (tahun 2017)	2. 7.965,44	2. 7.742, 92	2. PM	2. PM	2. PM	
			3. Miliar Rupiah, Fungsi Perlin-dungan Sosial	3. 4.279,56 (tahun 2017)	3. 5.782,78	3. PM	3. PM	3. PM	3. PM	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Skor	1. 80,5	1. 0	1. 82	1. 83	1. 84	1. 85	DKPKP
		2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	2,00%	2. NA	2. NA	2. NA	2. NA	2. NA	2. NA	
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan	%	80 (tahun 2017)	85	90	95	96	100	DINKES

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	%	35,43 (tahun 2015)	34,33	33,03	31,79	30,59	29,44	DKPKP
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKPKP
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,18 (tahun 2017)	91	93	96	99	100	DINKES
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,18 (tahun 2017)	91	93	96	99	100	DINKES
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Persentase anak balita (bawah lima tahun) kurus yang mendapatkan makanan tambahan	%	80 (tahun 2017)	85	90	95	96	100	DINKES
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	96 (tahun 2017)	97	100	100	100	100	DINKES
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif	%	49,25 (tahun 2015) 66 (tahun 2017)	70	75	80	85	90	DINKES
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	1. Angka Konsumsi Ikan	1. kg/kapi-ta/tahun	1. 35,5 (tahun 2017)	1. 0	1. 37	1. 38,5	1. 40	1. 41,5	DKPKP
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	2. skor	2. 80,5 (tahun 2017)	2. 0	2. 82	2. 83	2. 84	2. 85	
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1,00%	1. 96 (tahun 2017)	1. 97	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	DINKES
		2. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	2,00%	2. 97 (tahun 2017)	2. 100	2. 100	2. 100	2. 100	2. 100	
		3. Persentase ibu nifas yang mendapatkan pelayanan nifas sesuai standar	3,00%	3. 94 (tahun 2017)	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100	
		4. Angka Kematian Ibu (AKI)	4. kematian per	4. 44 (tahun 2017, sumber: Profil	4. NA	4. NA	4. NA	4. NA	4. NA	

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
			100.000 kelahiran hidup	Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)						
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
3.1.2.(a)	Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	97 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.										
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1.000 kelahiran hidup	2 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	DINKES
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	kematian per 1.000 kelahiran hidup	3 (tahun 2017, sumber: Profil Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017)	NA	NA	NA	NA	NA	DINKES
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100 (2017)	100	100	100	100	100	DINKES
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Penatalaksanaan Penyakit HIV-AIDS	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Jumlah Kota/Kabupaten yang Mencapai Target Case Detection Rate (CDR) di Layanan TB Sesuai Standar	Kota/kabu-paten	2 (tahun 2017)	3	4	5	6	6	DINKES
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)	Poin	0 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	DINKES

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)	Poin	0 (tahun 2017)	0	0	0	0	0	DINKES
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	%	40 (tahun 2017)	50	55	60	65	70	DINKES
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	%	91,16 (tahun 2017)	93	95	95	95	95	DINKES
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	%	91,16 (tahun 2017)	93	95	95	95	95	DINKES
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	%	50	55	60	65	70	75	DINKES
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	0 (tahun 2017)	30	40	50	60	70	DINKES
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	0 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	0 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DINKES
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	DINKES
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BAKESBANG POL

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Liter per kapita	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SATPOL PP
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	56,9 (tahun 2017)	57,34	57,78	58,22	58,66	59,1	DPPAPP
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	34,86 (tahun 2015)	35,15	35,45	35,75	36,05	36,36	DPPAPP
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Per 1000	25 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	DPPAPP
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate	Nilai	2,20 (tahun 2017)	2,18	2,15	2,13	2,12	2,11	DPPAPP
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	15 (tahun 2017)	30	40	50	60	70	DINKES
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	1. Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	%	1. 73 (tahun 2017)	1. 0	1. 95	1. 95	1. 95	1. 100	DINKES
		2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk		2. 38,26 (tahun 2015)	2. 56,82	2. 84,37	2. 100	2. 100	2. 100	
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan	%	73 (tahun 2017)	0	95	95	95	100	DINKES

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 3.9. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.										
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DINKES
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	32 (tahun 2017)	35	38	41	44	47	DINKES
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	95 (tahun 2017)	95	96	96	97	98	DINKES
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar	%	32 (tahun 2017)	35	50	60	70	80	DINKES
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISDIK
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase Sekolah terakreditasi A	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	DISDIK
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Persentase Sekolah terakreditasi A	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	DISDIK
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase Sekolah terakreditasi A	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	DISDIK
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat	%	96,91 (tahun 2015) 103.37 (tahun 2017)	104,2	105,1	105,9	106,76	107,61	DISDIK
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	%	93,88 (tahun 2017)	94,21	94,53	94,86	95,18	95,51	DISDIK
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se-derajat	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA	1,00%	1. 91,36 (tahun 2017)	1. 92,58	1. 93,8	1. 95,02	1. 96,24	1. 97,5	DISDIK

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede-rajat	2,00%	2. 79,51 (tahun 2017)	2. 80,67	2. 81,84	2. 83	2. 84,16	2. 85,33	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta	Tahun	10,88 (tahun 2017)	11,1	11,32	11,55	11,77	12	DISDIK
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun)	%	83,07 (tahun 2017)	86,35	89,63	92,91	96,19	99,5	DISDIK
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede-rajat	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA	1,00%	1. 91,36 (tahun 2017)	1. 92,58	1. 93,8	1. 95,02	1. 96,24	1. 97,5	DISDIK
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede-rajat	2,00%	2. 79,51 (tahun 2017)	2. 80,67	2. 81,84	2. 83	2. 84,16	2. 85,33	
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	%	80,01 (usia 15 – 25); 53,3 (usia 15 – 59) (tahun 2015)	87,87 (usia 15 – 25); 64,55 (usia 15 – 59)	96,5 (usia 15 – 25); 78,25 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	100 (usia 15 – 25); 100 (usia 15 – 59)	DISDIK
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sede-rajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sede-rajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	%	51,33 (SD); 42,55 (SMP); 26,93 (SMA); 12,8 (PT) (tahun 2015)	52,36 (SD);	53,41 (SD);	54,47 (SD);	55,56 (SD);	56,68 (SD);	DISDIK
					44,84 (SMP);	47,26 (SMP);	49,81 (SMP);	52,50 (SMP);	55,33 (SMP);	
					27,98 (SMA);	29,07 (SMA);	30,20 (SMA);	31,38 (SMA);	32,61 (SMA);	
					13,60 (PT)	14,46 (PT)	15,37 (PT)	16,35 (PT)	17,38 (PT)	
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran,	Persentase Sekolah terakreditasi A	%	0 (tahun 2017)	70,03	77,52	85,02	92,51	100	DISDIK

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
	(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)									
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	1. Persentase guru yang kompeten	1,00%	1. 72,16 (tahun 2017)	1. 77,72	1. 83,28	1. 88,84	1. 94,4	1. 94,4	DISDIK
		2. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	2,00%	2. 93,33 (tahun 2015)	2. 96,06	2. 98,86	2. 100	2. 100	2. 100	
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	1,00%	1. 0 (tahun 2017)	1. 12	1. 24	1. 36	1. 48	1. 60	DPPAPP
		2. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	2. Kebi-jakan	2. 2	2. PM	2. PM	2. PM	2. PM	2. PM	
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
5.2.1.(a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	36,3 (tahun 2017)	35,52	34,74	33,96	33,18	32,4	DPPAPP
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	63,4 (tahun 2017)	74,34	82,66	91	99,33	99,5	DPPAPP

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	%	0,11 (tahun 2015)	0	0	0	0	0	DPPAPP
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Tahun	23 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Per 1.000	25 (tahun 2017)	24	23	22	21	20	DPPAPP
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA	1,00%	1. 91,36 (tahun 2017)	1. 92,58	1. 93,8	1. 95,02	1. 96,24	1. 97,5	DISDIK
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	2,00%	2. 79,51 (tahun 2017)	2. 80,67	2. 81,84	2. 83	2. 84,16	2. 85,33	
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	19,81	19,81	Me-ningk-at	Me-ningk-at	Me-ningk-at	Me-ningk-at	DPPAPP
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	%	12,5 (tahun 2016)	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.										
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Unmet need (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	%	18 (tahun 2017)	14,7	14,5	14,4	14,2	14	DPPAPP
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	%	20,1 (tahun 2012)	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk	Do-kumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
	mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi								
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan pelayanan air bersih	%	60,99 (tahun 2017)	60,99	63,65	66,09	73,69	79,61	DSDA
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	0	2,78	DSDA
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	1. Presentase cakupan pelayanan air bersih	1,00%	1. 60 (tahun 2017)	1. 60,99	1. 63,65	1. 66,09	1. 73,69	1. 79,61	DSDA
		2. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	2,00%	2. 92,44 (tahun 2016)	2. 94,17	2. 94,95	2. 95,73	2. 96,52	2. 97,32	
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	DINKES
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	1. Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	1,00%	1. 16 (tahun 2017)	1. 0	1. 17,04	1. 20,49	1. 23	1. 26,44	DSDA
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	2,00%	2. 83,48 (tahun 2016)	2. 85,15	2. 86,85	2. 88,59	2. 90,36	2. 92,17	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	DINKES
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	117 (tahun 2017)	137	167	202	237	267	DINKES
6.2.1.(e)	Jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Cakupan pelayanan air limbah	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26,44	DSDA
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	%	16 (tahun 2017)	0	17,04	20,49	23	26,44	DSDA

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
6.3.1.(a)	Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Cakupan pelayanan air limbah	%	14,33 (tahun 2017)	15,93	17,04	20,49	23	26,44	DSDA
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah	%	16 (tahun 2017)	0	17,04	20,49	23	26,44	DSDA
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku	%	0 (tahun 2017)	0	0,93	1,85	0	2,78	DSDA
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Sungai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DSDA
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah	%	50 (tahun 2017)	80	85	90	95	100	DPE
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DSDA
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	RPDAST	1	1	1	1	1	1	BAPPEDA
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Wilayah sungai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DSDA
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DSDA
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%	Danau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DSDA
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	%	99,98 (tahun 2016)	100	100	100	100	100	DPE
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	kWh	2.997 (tahun 2015)	3,347	3,468	3,594	3,767	3,948	DPE
Target 7.2. Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energy global.										
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi baru terbarukan	%	- (tahun 2017)	-	0,03	0,07	0,09	0,11	DPE
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita	Pertumbuhan PDRB	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	BIRO EKONOMI
8.1.1.(a)	PDB per kapita	Pertumbuhan PDRB	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	BIRO EKONOMI
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Pertumbuhan PDRB	%	6,29 (tahun 2017)	6,3	6,6	6,7	6,9	7	BIRO EKONOMI
Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	%	26,9 (tahun 2015)	24,74	22,71	20,85	19,14	17,57	DISNAKER-TRANS
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal	%	71,55 (tahun 2017)	69,82	70	70	70	70	DISNAKER-TRANS
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	%	0,13 (tahun 2017)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	DISNAKER-TRANS
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKUKMP
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Rupiah	23.596 (tahun 2017)	25,248	30,609	40,874	54,579	72,881	DISNAKER-TRANS
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,14 (tahun 2017)	5,20	5,10	5,00	4,90	4,80	DISNAKER-TRANS
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	%	18,8 (tahun 2015)	18,1	17,42	16,77	16,14	15,53	DISNAKER-TRANS
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	%	13,49 (tahun 2017)	13	13	13	13	13	DISNAKER-TRANS
Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Jumlah perusahaan yang menjalankan K3	Perusahaan	1.180 (tahun 2017)	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	DISNAKER-TRANS
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISPARBUD
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.600.000 (tahun 2017)	2.800.000	2.940.000	3.087.000	3.241.350	3.403.417	DISPARBUD
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	33.000.000 (tahun 2017)	36.000.000	38.520.000	40.496.000	44.298.000	50.172.000	DISPARBUD
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata	Triliun rupiah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISPARBUD
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat	%	49,07 (tahun 2017)	58	75	85	95	100	DISPARBUD
Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO EKONOMI
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO EKONOMI
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKUKMP
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Kondisi Jalan Mantap	%	96 (tahun 2017)	0	96,5	97	97,5	98	DINAS BINA MARGA
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima	Termi-nal Pe-num-pang	- (tahun 2017)	-	-	-	1	3	DISHUB
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPE
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPE
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	%	14,37 (tahun 2015)	15,62	16,98	18,46	20,08	21,83	DISNAKERTRANS
Target 9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPE
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit	Rp (juta)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPE

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negaranegara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	%	0,00013 (2017)	PM	PM	PM	PM	PM	BAPPEDA
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Proporsi individu yang menggunakan Internet	%	42,7 (tahun 2015)	47,65	53,23	59,47	66,43	74,21	DISKOMINFOTIK
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1*	Koefisien Gini	Gini Ratio	Nilai	0,409 (tahun 2017)	0,407	0,405	0,403	0,401	0,399	BIRO EKONOMI
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	%	3,78 (tahun 2017)	3,58	3,38	3,18	2,98	2,78	DINSOS
Target 10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1*	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas	Proporsi populasi dengan median pendapatan di bawah 50 persen, terpilah oleh kelompok usia, jenis kelamin dan para penyandang difabilitas	%	13,82 (tahun 2015)	12,42	11,16	10,03	9,02	8,11	BIRO EKONOMI
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	BAKESBANGPOL
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Berkas penga-duan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO HUKUM

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Kebi-jakan / doku-men	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO HUKUM
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	%	6,94 (tahun 2017)	7,7	NA	NA	NA	NA	DINSOS
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	%	1. Formal : 116 dari penduduk yang bekerja	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	DISNAKERTRANS
				2. Informal : NA	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10	
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	71,7 (tahun 2015)	72,24	72,81	73,38	73,96	74,54	DPRKP
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.										
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	%	18 (tahun 2017)	20	22	25	28	30	DISHUB
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar	Kota Besar	0 (tahun 2017)	0	3	3	3	3	DISHUB
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Institusi	45	45	45	45	45	45	BAPPEDA
Target 11.4. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Kota Pusaka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DCKTRP
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	BPBD
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Kota tangguh	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Sistem Peringatan Dini	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	rupiah	294.611.450.000 (tahun 2015)	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	1. Persentase penurunan volume sampah di kota	1,00%	1. 11 (tahun 2017)	1. 14	1. 17	1. 20	1. 23	1. 26	DLH
		2. Persentase sampah perkotaan yang tertangani	2,00%	2. 83 (tahun 2015)	2. 83,03	2. 83,06	2. 83,09	2. 83,12	2. 83,15	
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan	Kota Hijau	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.										
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Kawas-an Perko-taan Metro-politan/Kot a Sedang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
11.7.2.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	%	30,37 (tahun 2015)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	DPPAPP
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.										
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	%	100 (tahun 2017)	100	100	100	100	100	BPBD
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	Doku-men	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	BPBD

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
Target 12.1. Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Jumlah kolaborasi tematik quickwins program	Kolaborasi tematik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Peserta Proper	75 (tahun 2015)	77	79	81	83	85	DLH
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	%	- (tahun 2017)	10	-	-	-	-	DLH
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Persentase penurunan volume sampah di kota	%	11 (tahun 2017)	14	17	20	23	26	DLH
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	perusahaan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 12.7. Mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.										
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Produk ramah lingkungan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Fasilitas Publik	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Dokumen	2 (tahun 2015)	2	2	3	3	4	BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah	Nilai	4,97 (tahun 2017)	5,28	6,08	6,77	7,32	7,91	BPBD
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.										
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia	Dokumen BUR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.										
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Dokumen (PP)	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	DKPKP
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	WPP	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	DKPKP
Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.										
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	ikan pelagis kecil E = 0,38, ikan demersal E = 0,83, kepiting E= 0.70, Cumi cumi E=2.02 (tahun 2017)	1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	0,5≤ E ≤ 1	DKPKP
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.										
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	1. Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	1. Ha	1. 140,9 (tahun 2017)	1. -	1. 141,9	1. 142,4	1. 142,9	1. 143,4	DKPKP
		2. Jumlah luas kawasan konservasi perairan	2. Ha	2. 140,9 (tahun 2017)	2. 141,6	2. 142,3	2. 143	2. 143,7	2. 144,4	
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.										
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKPKP
Target 14.b. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.										
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	Regulasi/ke-bijakan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKPKP
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Jumlah kota/kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKPKP
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindung.	Jumlah nelayan yang terlindungi	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DKPKP
Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".										

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	Dokumen Ratifikasi	1	1	1	1	1	1	DKPKP
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	1. Penambahan Rasio RTH Hutan	1,00%	1. 0,024 (tahun 2017)	1. 0,0085	1. 0,0115	1. 0,0115	1. 0,0115	1. 0,0115	DISHUT
		2. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	2,00%	2. 33,62 (tahun 2015)	2. NA	2. NA	2. NA	2. NA	2. NA	
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Hektar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Ha	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	KPA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	KPHK; KPHL; KPHP	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
Target 15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.										
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Ha	3,943	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
Target 15.5. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.										
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	Fauna	2.132 (tahun 2017)	2,142	2,152	2,162	2,172	2,182	DKPKP
Target 15.7. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.										
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	1. Fauna	1. 2.132 (tahun 2017)	1. 2.142	1. 2.152	1. 2.162	1. 2.172	1. 2.182	DISHUT

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
	dikembangbiakan pada lembaga konservasi	2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	2. Flora	2. 52.733 (tahun 2017)	2. 52.753	2. 52.773	2. 52.793	2. 52.813	2. 52.833	
Target 15.8. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasive prioritas.										
15.8.1.(a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati	Doku-men Karan-tina Hewan; Doku-men Karan-tina Tum-buhan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISHUT
Target 15.9. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.										
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaraga-man hayati	Doku-men	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 15.c. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.										
15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	72 (tahun 2014, sumber Statistik Kriminal BPS)	65	58	51	44	36	SATPOL PP
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kema-tian per 100.00 pendu-duk	NA	NA	NA	NA	NA	NA	SATPOL PP
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	%	1,38 (tahun 2016)	1,28	1,18	1,08	0,98	0,88	SATPOL PP
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	50,57	50,57	51,0	51,50	52,0	51,50	SATPOL PP
Target 16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
16.2.1.(b)		Prevalensi kekerasan terhadap	%	36,30 (tahun 2017)	35,52	34,74	33,96	33,18	32,40	DPPAPP

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	perempuan dan anak								
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
Target 16.3. Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	%	30,37 (tahun 2015)	37,16	45,47	55,65	68,09	80	DPPAPP
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO HUKUM
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	INSPEKTORAT
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPKD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predi-kat	WTP (tahun 2017)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	INSPEK-TORAT
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lemba-ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai / Predikat AKIP	Predi-kat	B (tahun 2017)	A	A	A	AA	AA	INSPEK-TORAT
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BPPBJ
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lemba-ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	63,75 (tahun 2017)	68	73	78	85	91	BIRO ORB

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lemba-ga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik	Nilai	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	BIRO ORB
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	%	19,81	19,81	Tidak ada target tahunan. Perhi-tungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhi-tungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahunan. Perhi-tungan per 5 tahun (Pemilu)	Tidak ada target tahun-an. Perhi-tungan per 5 tahun (Pemi-lu)	DPPAPP
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	%	Meningkat	Me-ningk-at	Menin g-kat	Menin g-kat	Menin g-kat	Me-ningk-at	DPPAPP
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	BAKES-BANGPOL
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	BAKES-BANGPOL
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Demokrasi	Nilai	70,85 (tahun 2017)	73,35	73,85	74,35	74,85	75,35	BAKES-BANGPOL
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89,7	DISDUK-CAPIL
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89,7	DISDUK-CAPIL
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	49,5 (tahun 2017)	59,3	67,1	75,7	82,9	89,7	DISDUK-CAPIL
Target 16.10. Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Berkas Penga-duan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO HUKUM
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DPPAPP
16.10.2*	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Jumlah Negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Negara	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISKOM-INFOTIK
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	1	1	1	1	1	1	DISKOM-INFOTIK
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi	%	100	-	100	100	100	100	DISKOM-INFOTIK
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	PPID	NA	NA	NA	NA	NA	NA	DISKOMINFOTIK
Target 16.b. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Kebi-jakan/doku-men	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO HUKUM
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	1. Triliun Rupiah	1. 35,359 (tahun 2017)	1. 38,125	1. 39,975	1. 43,35	1. 47,2	1. 51,25	BPKD
		2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	2. Miliar Rupiah	2. 680,152 (tahun 2017)	2. 689,9	2. 704,765	2. 715,453	2. 733,77	2. 749,829	
		2.1 Jumlah Pendapatan Daerah	2.1. Triliun Rupiah	2.1. 64,13465 (realisasi)	2.1. 67,67498	2.1. 79,99802	2.1. 87,45335	2.1. 97,06645	2.1. 101,46627	

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
		2.2 Jumlah Belanja Daerah	2.2. Triliun Rupiah	2.2. 51,04303 (realisasi)	2.2. 78,48105	2.2. 82,30161	2.2. 90,80537	2.2. 98,40334	2.2. 108,86379	
		3. Total pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap Belanja Daerah	3. Presen-tase	3. 125,64	3. 86,24	3. 97,20	3. 96,31	3. 98,64	3. 93,20	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB	Persen-tase	1,47	1,55	1,69	1,73	1,78	1,85	BPRD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Proporsi APBD yang didanai oleh pajak Daerah	Persen-tase	49,7	47,10	51,38	52,72	52,79	53,52	BPRD
Target 17.4. Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.										
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	Proporsi pembayaran utang dan bunga (Debt Service) terhadap ekspor barang dan jasa	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BIRO EKO-NOMI
Target 17.8. Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet	Proporsi individu yang menggunakan Internet	%	42,7 (tahun 2015)	47,65	53,23	59,47	66,43	74,21	DISKOMIN-FOTIK
Target 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	USD	4.043.918.198 (tahun 2017)	4.084.357.380	4.125.200.954	4.166.452.963	4.208.117.493	4.250.198.668	DKU-KMP
Target 17.17. Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Doku-men berisi daftar proyek KPBU	NA	NA	4	4	4	4	DPM-PTSP
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	Alokasi	NA	NA	6.178.773.560	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	DPM-PTSP
Target 17.18. Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BAP-PEDA
Target 17.19. Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										

Kode Indikator	Target/Indikator Nasional	Indikator Daerah	Satuan	Pencapaian pada Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2022	
17.19.1.(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada Kementerian/ Lembaga	Pegawai	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BKD
17.19.1.(b)	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer	Persentase Kementerian/ Lembaga yang sudah memiliki Pejabat Fungsional Statistisi dan/atau Pranata Komputer	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BKD
17.19.1.(c)	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga	Persentase terpenuhinya kebutuhan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Kementerian/ Lembaga	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	BKD
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Data Regis-trasi	1 (tahun 2015)	1	1	1	1	1	DIS-DUK-CAPIL
17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	%	NA	1. Peren-canaan (22,73) 2. M&E (4,5)	48	48	48	48	BAP-PEDA

Lampiran 13. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah (Form D2)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN								
Target Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pendamping	Orang	218	186	186	49.132.570.724	APBD	DPKUKM
Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	29112	40000	40000	30.338.105.223	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Warung	Jumlah Warung yang mendapatkan sarana dan prasarana	Warung	0	0	440	1.942.598.667	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana UKM bagi Warga Rusun	Jumlah UKM Warga Rusun	UKM	0	0	50	610.998.016	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL	Jumlah sarana dagang PKL yang tersedia	unit	0	0	600	1.980.000.000	APBD	DPKUKM
Kegiatan Bazar UKM	Jumlah UKM yang mengikuti bazar	UKM	200	5920	5920	15.349.810.322	APBD	DPKUKM
Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UKM binaan yang terampil berwirausaha	UKM	332	360	100	2.013.922.370	APBD	DPKUKM
Bimtek Design Kemasan Produk UKM	Jumlah UKM yang terampil mendesign kemasan produk	UKM	0	0	50	79.005.557	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL	Jumlah sarana dagang PKL yang tersedia	unit	0	0	600	1.980.000.000	APBD	DPKUKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Penghuni Rusunawa	Jumlah Kegiatan Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Penghuni Rusunawa	Kegiatan	0	0	1	171.409.354	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Mengemudi SIM A	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih mengemudi untuk mendapatkan SIM A	orang	0	3000	3000	21.240.219.880	APBD	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
Pelatihan Satuan Pengamanan	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih untuk satuan pengaman	orang	0	300	300	2.959.726.880	APBD	DISNAKERTRANSGI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
Diklat Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	0	100	67.200.000	APBD	DPKUKM
Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	480	100	1.832.732.812	APBD	DPKUKM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Pembinaan Remaja di Lokasi Rawan Konflik	Jumlah remaja yang dibina pada lokasi rawan konflik sosial	Orang	340	360	380	2.994.481.784	APBD	DINAS SOSIAL
Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbaharui	KPM	180000	240000	323514	5.736.691.700	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Pusat)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	23	0	7.238.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Timur)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	10	0	12.221.942.680	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Selatan)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	14	0	2.533.615.306	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Barat)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	13	0	4.508.000.000	APBD	DINAS PERKIM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Utara)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	4	0	2.096.325.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Kep. Seribu)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	Rw Kumuh	0	6	0	829.365.174	APBD	DINAS PERKIM
Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	0	1	13.310.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	1	1	665.500.000	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis	Jenis	20	47	55	14.612.155.807	APBD	DKPKP
Pembinaan budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan rumput laut	Jumlah kelompok yang memahami tentang standard produksi ikan konsumsi.	kelompok	0	720	700	1.629.942.713	APBD	DKPKP
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan Sarana Penangkapan Ikan bantuan kepada nelayan	Jenis	0	5	0	2.077.779.000	APBD	DKPKP
Pembinaan kelompok usaha nelayan bersama	Jumlah kelompok binaan usaha nelayan bersama	Kelompok	0	25	15	1.561.079.150	APBD	DKPKP
Bimbingan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan mutu hasil perikanan	Jumlah bimbingan teknis mengenai perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan mutu hasil perikanan.	Kelompok	0	3	3	221.412.749	APBD	DKPKP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah Dasar	%	92	93	94	23.400.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	85	90	10.800.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	914.884.575	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	82.520.010	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	89.085.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	0	0	39.200.000	APBD	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	0	0	2	651.638.770	APBD	DPPAPP
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	0	30	30	182.749.000	APBD	DKPKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terbangun	unit	0	422	5813	3.090.000.000.000	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik	Jumlah penerima alat bantu penunjang fisik	Orang	590	590	590	3.596.154.995	APBD	DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang menerima Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi	WBS	218	218	218	1.420.290.519	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Kebutuhan Sandang bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Kebutuhan Sandang	WBS	218	218	218	1.063.897.441	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	2.226.669.146.781	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	1.455.464.640.277	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	198.063.932.400	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	860.830.740.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Target Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
Indikator 1.3.1.(a) proporsi peserta jaminan kesehatan melalui sjsn bidang kesehatan.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	-	-	-	-	APBD	-

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	-	-	-	-	APBD	-
Indikator 1.3.1.(b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan								
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteran Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang paham dalam bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteran Pekerja	Orang	570	800	800	1.599.286.000	APBD	DISNAKERTRANSGI
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah orang yang paham tentang Norma Ketenagakerjaan	orang	0	450	450	219.230.000	APBD	DISNAKERTRANSGI
Peningkatan Pelaksanaan Norma K3	Jumlah orang yang paham tentang Norma K3	Orang	0	100	100	155.419.000	APBD	DISNAKERTRANSGI
Indikator 1.3.1.(c) persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Asesmen Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah	Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di SD, SMP dan SMA yang menerima hasil asesmen psikologi dari terselenggaranya pemeriksaan psikologi	Siswa	580	590	600	2.353.281.988	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Bantu, Alat Peraga dan Peralatan Kantor Bagi Sekolah Inklusi dan SLB Negeri	Jumlah alat bantu, alat peraga dan peralatan penunjang kantor bagi Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus	unit	120	120	120	41.506.126.426	APBD	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik	Jumlah penerima alat bantu penunjang fisik	Orang	590	590	590	3.596.154.995	APBD	DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian,	Jumlah WBS yang menerima Bimbingan Sosial, Fisik, Mental,	WBS	218	218	218	1.420.290.519	APBD	DINAS SOSIAL

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Keterampilan dan Rekreasi Warga Binaan Sosial (WBS)	Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi							
Penyediaan Kebutuhan Sandang bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Kebutuhan Sandang	WBS	218	218	218	1.063.897.441	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL
Indikator 1.3.1.(d) jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan.								
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbaharui	KPM	180000	240000	323514	5.736.691.700	APBD	DINAS SOSIAL
Target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
Indikator 1.4.1.(a) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kegawatdaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Waktu Maksimal 30 Menit	%	100	100	100	20.218.741.411	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	70	80	163.039.686	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	0	0	39.200.000	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	89.085.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	483.559.701	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Sesuai Standar	%	97	97	97,5	37.229.070.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	0	0	3.004.362.354.139	APBD	DINAS KESEHATAN
Indikator 1.4.1.(b) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	82.520.010	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	85	90	10.800.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	281.131.095	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	24.600.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	914.884.575	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Mengkampanyekan dan	%	40	0	0	475.019.244	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Melaksanakan Minimal 3 Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)							
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit Campak	Persentase Kasus Suspek Campak yang Dilakukan Pengambilan Spesimen	%	85	90	90	27.015.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Lebih Dari Sama Dengan 2 per 100.000 Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun	Rate	2	2	2	40.920.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	0	0	136.604.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	0	0	3.004.362.354.139	APBD	DINAS KESEHATAN
Indikator 1.4.1.(c) angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (cpr) semua cara pada pasangan usia subur (pus) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin								
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
Pelaksanaan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan	Jumlah media yang digunakan untuk promosi dan KIE	media	0	0	4	224.860.320	APBD	DPPAPP
Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana	Jumlah lembaga swasta yang berperan dalam pelayanan KB	lembaga	20	20	20	82.914.516	APBD	DPPAPP
Peningkatan Konseling Kesehatan Reproduksi Keluarga	Jumlah provider fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembekalan konseling kespro	lembaga	130	150	170	105.458.672	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB Era JKN	Jumlah faskes yang terlibat dalam penyiapan peralihan pelayanan KB Era JKN	lembaga	432	476	520	47.468.877	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Kegiatan Momentum Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	1	96.652.250	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah lembaga faskes yang mendapat pembekalan konseling KB pasca Persalinan dan pasca keguguran	lembaga faskes	194	244	294	169.811.261	APBD	DPPAPP
Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB pada kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan	kegiatan	0	0	1	283.354.823	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	0	0	2	651.638.770	APBD	DPPAPP
Pembinaan dan Pengendalian Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kampung KB	120	130	140	91.300.000	APBD	DPPAPP
Indikator 1.4.1.(d) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.								
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Pusat)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	23	0	7.238.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Timur)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	10	0	12.221.942.680	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Selatan)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	14	0	2.533.615.306	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Barat)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	13	0	4.508.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Utara)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	4	0	2.096.325.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Kep. Seribu)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	Rw Kumuh	0	6	0	829.365.174	APBD	DINAS PERKIM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan (Sudin Selatan)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	2	8	16	132.963.408.951	APBD	DINAS PERKIM
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan (Sudin Timur)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	2	8	10	1.569.025.194.554	APBD	DINAS PERKIM
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan (Sudin Utara)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	2	18	4	187.493.035.168	APBD	DINAS PERKIM
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan (Sudin Barat)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	2	20	13	177.273.600.000	APBD	DINAS PERKIM
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan (Sudin Pusat)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	RW Kumuh	2	10	23	147.728.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan (Sudin Kep. Seribu)	Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata	Rw Kumuh	1	0	6	9.200.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	0	1	13.310.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	1	1	665.500.000	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Tahun	1	1	1	12.079.241.091	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan Pencemaran Air	Terlaksananya pengawasan pencemaran air limbah	kegiatan usaha	1295	1400	1480	1.116.513.712	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyiapan Prasarana dan Sarana Pengendalian Pencemaran Air	Kesiapan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air	Tahun	1	1	1	35.414.851.448	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	%	45	50	55	1.429.475.194	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terbangun	unit	0	422	5813	3.090.000.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Luas Tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	m2	0	9431	28000	1.272.641.750.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang memiliki Dokumen Perencanaan, Outline Specs dan RAB	lokasi	0	1	1	3.200.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Dokumen Lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang tersedia Dokumen Lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas Rumah Susun	Lokasi	0	4	3	4.706.187.563	APBD	DINAS PERKIM
Kajian/Studi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kajian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kajian	0	6	2	2.373.131.250	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang tersedia Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun	Lokasi	0	0	1	411.530.730	APBD	DINAS PERKIM
Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun	Jumlah lokasi rumah susun yang lengkap sarana prasarana	Lokasi	0	1	2	82.128.873.875	APBD	DINAS PERKIM
Pemeliharaan berkala rumah susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat	unit	0	900	3000	537.975.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Indikator 1.4.1.(e) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Pelaksanaan Orientasi Pokja I - IV dan Sekretariat	Jumlah TP PKK dan Kader PKK Pokja I-IV dan Sekretariat yang mendapatkan pendampingan/Pembinaan	orang	3224	100	960	89.600.000	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Temu Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan temu kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	orang	765	765	765	0	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Prestasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	Jumlah Posyantek yang berprestasi dalam pengembangan alat TTG	lembaga	0	0	9	304.935.500	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Sinkronisasi TKPK	Jumlah Lembaga yang ikut berpartisipasi	lembaga	0	0	140	296.835.788	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Sinkronisasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah laporan kegiatan terkait sinkronisasi 10 Program Pokok PKK	laporan	7	0	7	65.649.750	APBD	DPPAPP
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Pusat)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	23	0	7.238.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Timur)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	10	0	12.221.942.680	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Selatan)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	14	0	2.533.615.306	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Barat)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	13	0	4.508.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Utara)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	RW Kumuh	0	4	0	2.096.325.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Sudin Kep. Seribu)	Jumlah kawasan permukiman yang dilakukan Community Action Plan	Rw Kumuh	0	6	0	829.365.174	APBD	DINAS PERKIM
Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	0	1	13.310.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	1	1	665.500.000	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	0	0	3.004.362.354.139	APBD	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terbangun	unit	0	422	5813	3.090.000.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Luas Tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	m2	0	9431	28000	1.272.641.750.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang memiliki Dokumen Perencanaan, Outline Specs dan RAB	lokasi	0	1	1	3.200.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyusunan Dokumen Lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang tersedia Dokumen Lingkungan dan manajemen rekayasa lalu lintas Rumah Susun	Lokasi	0	4	3	4.706.187.563	APBD	DINAS PERKIM
Kajian/Studi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kajian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kajian	0	6	2	2.373.131.250	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang tersedia Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun	Lokasi	0	0	1	411.530.730	APBD	DINAS PERKIM
Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun	Jumlah lokasi rumah susun yang lengkap sarana prasarana	Lokasi	0	1	2	82.128.873.875	APBD	DINAS PERKIM
Pemeliharaan berkala rumah susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat	unit	0	900	3000	537.975.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Indikator 1.4.1.(f) persentase rumah tangga kumuh perkotaan.								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pendampingan Relokasi Warga yang terkena program penataan Kota ke Rusunawa	Jumlah Kegiatan Pendampingan Relokasi Warga yang terkena program penataan Kota ke Rusunawa	Kegiatan	0	0	1	356.727.965	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	0	1	13.310.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	1	1	665.500.000	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Tahun	1	1	1	12.079.241.091	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan Pencemaran Air	Terlaksananya pengawasan pencemaran air limbah	kegiatan usaha	1295	1400	1480	1.116.513.712	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyiapan Prasarana dan Sarana Pengendalian Pencemaran Air	Kesiapan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air	Tahun	1	1	1	35.414.851.448	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	%	45	50	55	1.429.475.194	APBD	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terbangun	unit	0	422	5813	3.090.000.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Luas Tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	m2	0	9431	28000	1.272.641.750.000	APBD	DINAS PERKIM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Perencanaan Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang memiliki Dokumen Perencanaan, Outline Specs dan RAB	lokasi	0	1	1	3.200.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Kajian/Studi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kajian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kajian	0	6	2	2.373.131.250	APBD	DINAS PERKIM
Indikator 1.4.1.(g) angka partisipasi murni (apm) sd/mi/sederajat								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	2.226.669.146.781	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	siswa	5000	5500	6000	1.138.618.575	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	siswa	683072	703565	724672	1.689.048.070.658	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Indikator 1.4.1.(i) angka partisipasi murni (apm) sma/ma/sederajat								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	1.455.464.640.277	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	198.063.932.400	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	860.830.740.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Indikator 1.4.1.(j) persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
Pengasuhan kepada Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah	Jumlah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	keluarga	0	0	0	0	APBD	DPPAPP
Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak	Jumlah Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi gugus tugas KLA	lembaga	25	35	42	634.849.452	APBD	DPPAPP
Indikator 1.4.1.(k) persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari pln dan bukan pln								
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN								
Pembangunan Peningkatan Kapasitas Kelistrikan Kepulauan Seribu	Jumlah penambahan Kapasitas kelistrikan kepulauan seribu	MW	0	0	5	261.500.000.000	APBD	DISNAKERTRANSGI
Pemeliharaan Pembangkit Listrik Kep Seribu	jumlah Pembangkit listrik (contoh: genset, dll) di Kep Seribu yang terpelihara	Set	1	3	3	4.819.442.093	APBD	DISNAKERTRANSGI
Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Jumlah PLTS Eksisting yang Terpelihara	Set	0	0	1	269.261.300	APBD	DISNAKERTRANSGI
Pembangunan PLTS Komunal	jumlah daya PLTS Komunal terbangun	kWp	0	20	0	11.805.871.866	APBD	DISNAKERTRANSGI
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terbangun	unit	0	422	5813	3.090.000.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang memiliki Dokumen Perencanaan, Outline Specs dan RAB	lokasi	0	1	1	3.200.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Luas Tanah yang dibebaskan untuk Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	m2	0	9431	28000	1.272.641.750.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun	Jumlah Lokasi Rumah Susun yang tersedia Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Rumah Susun	Lokasi	0	0	1	411.530.730	APBD	DINAS PERKIM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Susun	Jumlah lokasi rumah susun yang lengkap sarana prasarana	Lokasi	0	1	2	82.128.873.875	APBD	DINAS PERKIM
Target Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
Indikator 1.5.1* jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
Penyediaan Mesin Pompa BBM kantor Sudin Jakarta Timur dan Perbaikan Instalasi SPBI Sudin Jakarta Selatan	Tersedianya Mesin Pompa BBM kantor Sudin Jakarta Timur dan Perbaikan Instalasi SPBI Sudin Jakarta Selatan	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Mobil Pompa 4.000 Liter	Jumlah mobil pompa 4000L yang baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Mobil Tangga Hidroulik 104 m	Tersedianya 5 unit tangga hidrolik 104 meter baru	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Mobil Heavy Foam	Tersedianya unbit heavy foam baru	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Mobil Komando	Tersedianya mobil komando baru	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pengadaan Fire Ade 1% (cairan A,B,D dan K)	Tersedianya fire ade 1% untuk pemadaman kebakaran	jerigen	0	0	0	0	APBD	DPKP
Perawatan Fire Rescue Boat	Terlaksananya Perawatan Fire Rescue Boat	tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Hidran Mandiri	Tersedianya Hidran mandiri di lokasi baru	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Fire Speed Boat	Tersedianya Fire Speed Boat Baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perlengkapan Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Perlengkapan Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan baru	Jenis	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Perkakas Kerja	Tersedianya perkakas kerja	tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perlengkapan Unit	Tersedianya Perlengkapan unit	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Gladi Gabungan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Bangunan Tinggi/ Industri/ Rumah Sakit/ Mall/ Obyek Vital	Terlaksananya Gladi Gabungan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Bangunan Tinggi/ Industri/ Rumah Sakit/ Mall/ Obyek Vital	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan dan pemasangan mesin dan tangki BBM 2 Jenis (Solar dan Pertamax) Kantor Dinas Gulkarmat	Tersedia dan terpasangnya mesin dan tanki BBM 2 jenis (solar dan Pertamax) Kantor Dinas Gulkarmat	lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Sewa Internet untuk Command Center	Tersedianya Jaringan Internet untuk Command Center	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Perawatan/Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena Tower	Terlaksananya Perawatan/Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena Tower	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Penyelenggaraan Asian Games 2018	Terlaksananya Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Penyelenggaraan Asian Games 2018	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Kantong Jenazah	Tersedianya kantong jenazah	buah	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Command Center	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Perawatan Perangkat Command Center	Terlaksananya Perawatan Perangkat Command Center	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Perawatan/Perbaikan Hidran Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Perawatan/Perbaikan Hidran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	titik	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	buah	0	0	0	0	APBD	DPKP
Rehab Sedang Kantor Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Utara	Terlaksananya Rehab Sedang Kantor Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Utara	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Peralatan Kerja Bengkel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kerja Bengkel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Perbaikan Hidran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Terlaksananya Perbaikan Hidran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemeliharaan Pos Pemadam Jatinegara Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Terpeliharanya Pos Pemadam Jatinegara Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemeliharaan Hidran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Terpeliharanya Hidran Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Evaluasi Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penanggulangan Kebakaran	dokumen	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Mobil Pompa 2.500 Liter	Tersedianya 8 unit mobil pompa 2500L baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Mobil Pompa 10.000 Liter	Tersedianya mobil pompa 10.000 liter baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Mobil Tangga 55 Meter	Tersedianya mobil tangga 55 meter yang baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Penanggulangan Kebakaran pada MRT	Tersedianya unit penanggulangan kebakaran pada MRT	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Quick Response	Tersedianya unit quick response yang baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Poskotis	Terlaksananya Penyediaan Unit Poskotis	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Dermaga Apung	Terbangunnya Dermaga Apung	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kepulauan Seribu	Terbangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kepulauan Seribu	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Pompa Portable Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Utara	Tersedianya Penyediaan Pompa Portable Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Relokasi Hidran Kota Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Relokasi Hidran Kota Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Relokasi Hidran Kota Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Relokasi Hidran Kota Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	Tersedianya Peta Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara	dokumen	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Peta Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat	dokumen	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	Tersedianya Peta Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan	dokumen	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	Tersedianya Peta Daerah Rawan Kebakaran tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	dokumen	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Alat Komunikasi Radio	Tersedianya Alat Komunikasi Radio baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Storing	Tersedianya unit storing	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Kantor Sektor Pesanggrahan	Terbangunnya Kantor Sektor Pesanggrahan	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Rehab Total Kantor Pos Pademangan Barat	Terlaksananya Rehab Total Kantor Pos Pademangan Barat	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok	Terbangunnya Kantor Sektor Tanjung Priok	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Kantor Sektor Kebayoran	Terbangunnya Kantor Sektor Kebayoran	lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Kantor Sektor Tebet	Terbangunnya Kantor Sektor Tebet	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Ragunan	Tersedianya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Ragunan	lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Rehab Total Pos Podomoro	Terbangunnya Pos Penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan Podomoro	lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Cipulir	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Cipulir	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Rindam Jaya	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Rindam Jaya	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Grogol Utara	Terbangunnya pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Grogol Utara	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Mampang Prapatan	Terbangunnya pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Mampang Prapatan	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pejaten	Terbangunnya pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pejaten	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Rehab Berat Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pekayon	Terlaksananya Rehab Berat Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pekayon	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Cipete	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Cipete	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Srengseng Sawah	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Srengseng Sawah	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tanah Kusir	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Tanah Kusir	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gandaria Utara	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gandaria Utara	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemeliharaan dan Perbaikan Hidran Mandiri	Terpeliharanya Hidran Mandiri	titik	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Motor Pompa Apung	Tersedianya Motor pompa apung baru	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Jasa Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran	Tersedianya Jasa Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran	orang	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pluit	Terbangunnya Pos Pluit	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Kantor Sektor Penjaringan	Terbangunnya Kantor Sektor Penjaringan	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Motor Pompa Apung Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara	Tersedianya Motor Pompa Apung Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Motor Pompa Apung Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat	Tersedianya Motor Pompa Apung baru Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Motor Pompa Apung Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur	Tersedianya Motor Pompa Apung Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Kantor Sektor Kramatjati	Terbangunnya Kantor Sektor Kramatjati	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Cilandak Barat	Terbangunnya Pos Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Cilandak Barat	gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Pompa Portable Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya penyediaan pompa portable sudin gulkarmat Jakarta Barat	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	Penyediaan Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Kedoya Utara	Terbangunnya Pos Pemadam Kedoya Utara	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Kelapa Dua	Terbangunnya Pos Pemadam Kelapa Dua	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Intercon	Pembangunan Pos Pemadam Intercon	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan Pos Pemadam Srengseng	Terbangunnya Pos Pemadam Srengseng	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Taman Kota	Terbangunnya Pos Pemadam Taman Kota	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Meruya Utara	Terbangunnya Pos Pemadam Meruya Utara	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Kav.DKI	Terbangunnya Pos Pemadam Kav DKI	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Meruya Selatan	Terbangunnya Pos Pemadam Meruya Selatan	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Rengas	Terbangunnya Pos Pemadam Rengas	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Cengkareng Timur	Terbangunnya os Pemadam Cengkareng Timur	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Citra 1	Terbangunnya Pos Pemadam Citra 1	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pembangunan Pos Pemadam Citra 2	Terbangunnya Pos Pemadam Citra 2	Gedung	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemeliharaan Hidran Kota Suku DPKP Kota Administrasi Jakarta Barat	Terpeliharanya Hidran Kota Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Lokasi	0	0	0	0	APBD	DPKP
Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya Antisipasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Ambulance dan kelengkapannya	Tersedianya ambulance dan kelengkapannya	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Antisipasi Penjagaan Hari Raya Keagamaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Terlaksananya Antisipasi Penjagaan Hari Raya Keagamaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Gladi Operasi Penyelamatan pada Air	Terlaksananya Gladi Operasi Penyelamatan pada Air	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Gladi Operasi Penyelamatan pada Kecelakaan Lalu lintas	Terlaksananya Gladi Operasi Penyelamatan pada Kecelakaan Lalu lintas	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Perawatan Perkakas Kerja	Terlaksananya Perawatan Perkakas Kerja	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Antisipasi Penjagaan Hari Raya Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Antisipasi Penjagaan Hari Raya Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Antisipasi Penjagaan Hari Raya di Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Terlaksananya Antisipasi Penjagaan Hari Raya di Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perlengkapan Penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Barat	Tersedianya Perlengkapan Penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Barat	Jenis	0	0	0	0	APBD	DPKP
Antisipasi Penjagaan Hari Raya di Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Antisipasi Penjagaan Hari Raya di Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perkakas Kerja Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Tersedianya Perkakas Kerja Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perlengkapan Petugas Operasional Penyelamatan	Tersedianya Perlengkapan Petugas Operasional Penyelamatan baru	jenis	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Heavy Duty Rescue	Tersedianya unit rescue heavy duty	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Unit Rapid Rescue	Tersedianya unit rapid rescue	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Hazmat Rescue	Tersedianya unit hazmat rescue	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Light Rescue	tersedianya unit light rescue	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Breathing Apparatus	Tersedianya unit breathing apparatus	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Fire Rescue Boat	Terlaksananya Penyediaan Fire Rescue Boat	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Pelampung Penyelamatan	Tersedianya Pelampung Penyelamatan	buah	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Breathing Apparatus 2 liter (APD personil)	Terlaksananya Penyediaan Breathing Apparatus 2 liter (APD personil)	unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perahu Karet	Terlaksananya Penyediaan Perahu Karet	Unit	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Motor Tempel	Terlaksananya Penyediaan Motor tempel	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyusunan Pedoman Operasi Penyelamatan pada Bangunan, Bahan-Bahan Berbahaya dan Hewan	Terlaksananya Penyusunan Pedoman Operasi Penyelamatan pada Bangunan, Bahan-Bahan Berbahaya dan Hewan	jenis	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Unit Pengangkut Perahu Karet dan Pendukungnya	Terlaksananya Penyediaan Unit Pengangkut Perahu Karet dan Pendukungnya	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Compressore Breathing Apparatus Portable Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Tersedianya Compressore Breathing Apparatus Portable Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyusunan Pedoman Operasi Penyelamatan pada Penanganan Hewan	Terlaksananya Penyusunan Pedoman Operasi Penyelamatan pada Penanganan Hewan	jenis	0	0	0	0	APBD	DPKP
Peningkatan Kapasitas Operasi Penyelamatan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Operasi Penyelamatan	orang	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Compressore Breathing Apparatus Portable Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta timur	Tersedianya Compressore Breathing Apparatus Portable Suku Dinas Penanggulangan dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta timur	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Peningkatan Kapasitas Pertolongan Pertama Gawat Darurat (Batuan Hidup Dasar, Korban Pendarahan dan Patah Tulang)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pertolongan Pertama Gawat Darurat (Batuan Hidup Dasar, Korban Pendarahan dan Patah Tulang)	orang	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Perlengkapan Scuba Diver Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Tersedianya Perlengkapan Scuba Diver Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Perawatan Fire Speed Boat	Terawatnya fire rescue boat	Tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan peralatan Penyelamatan	Terlaksananya Penyediaan peralatan Penyelamatan	jenis	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	kagiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Penyelamat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Pelampung Penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	Tersedianya Pelampung Penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur	buah	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Pelampung Penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Tersedianya Pelampung Penyelamatan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	buah	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Peralatan Pengujian	terlaksananya Penyediaan Peralatan Pengujian	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pemeliharaan Perawatan Alat Uji	Terpeliharanya alat uji UPT Laboratorium	tahun	0	0	0	0	APBD	DPKP
Pengelolaan Penerapan Manajemen Mutu ISO 17025 Laboratorium Kebakaran	Terlaksananya Pengelolaan Penerapan Manajemen Mutu ISO 17025 Laboratorium Kebakaran	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Perlengkapan Petugas Pemeriksaan Kebakaran	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Petugas Pemeriksaan Kebakaran	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Penyediaan Alat Uji Tahan Api dan Bangunan	Terlaksananya Penyediaan Alat Uji Tahan Api dan Bangunan	kegiatan	0	0	0	0	APBD	DPKP
Indikator 1.5.1.(a) jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Pengembangan aplikasi JakSave Multi disaster	Terselenggarannya Pengembangan aplikasi JakSave Multi disaster	Jenis	0	0	0	0	APBD	BPBD
FGD Standar Bangunan Aman Bencana	Terselenggaranya FGD Standar Bangunan Aman Bencana	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Peningkatan kapasitas manajemen dasar PB Bagi Aparatur	Terlaksananya Peningkatan kapasitas manajemen dasar PB Bagi Aparatur	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir	Terlaksananya Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir	Tahun	0	0	0	0	APBD	BPBD
Piket Siaga Bencana	Terselenggaranya Piket Siaga Bencana	Hari	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112)	Terselenggaranya Pengembangan DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112	EWS	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pemanfaatan DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112	Terlaksanannya Pemanfaatan DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112	bulan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan di fasilitas publik	Terlaksananya Penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan di fasilitas publik	Lokasi	0	0	0	0	APBD	BPBD
Evaluasi ISO 9001:2015 Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD	Terlaksananya Evaluasi ISO 9001:2015 Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Desiminasi Informasi Kebencanaan	Tersampaikannya data informasi kebencanaan melalui call center 112	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Perawatan Peralatan Early Warning System (EWS)	Terpeliharanya Peralatan Early Warning System (EWS)	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat dan aparatur	Terselenggarannya Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat dan aparatur	Orang	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya dalampenyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan relawan serta masyarakat yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Orang	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyusunan Strategi Pelaksanaan Fasilitas Publik Aman Bencana	Tersedianya Strategi pelaksanaan fasilitas umum aman bencana	Lokasi	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pembuatan peta kawasan rawan bencana	Terselenggaranya Pembuatan peta kawasan rawan bencana	Kelurahan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pembinaan dan Pendampingan serta simulasi Sekolah Madrasah Aman Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan serta simulasi Sekolah Madrasah Aman Bencana	Sekolah	0	0	0	0	APBD	BPBD
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pengelolaan, Pemeliharaan, Perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tanggul, Tanggul Pemecah Gelombang, Saluran, dan Infrastruktur SDA di Kepulauan Seribu	Panjang sarana dan prasarana tanggul, pemecah gelombang, dan saluran yang dikelola	m	0	0	0	0	APBD	DINAS SUMBER DAYA AIR
Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Polder	Jumlah Dokumen Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Polder yang tersedia	Dok	0	0	0	0	APBD	DINAS SUMBER DAYA AIR
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Pembentukan Kampung Siaga Bencana	Jumlah KSB yang dibentuk	KSB	2	3	3	800.000.000	APBD	DINAS SOSIAL

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembentukan Forum Keserasian Sosial di Lokasi Rawan Konflik Sosial	Jumlah forum keserasian sosial yang terbentuk di lokasi rawan konflik sosial	forum	0	0	0	0	APBD	DINAS SOSIAL
Indikator 1.5.1.(b) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pasca Bencana	Telaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pasca Bencana	%	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyediaan sarana prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tersedianya sarana prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jenis	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penanganan psikososial pengungsi dan masyarakat terdampak	Terlaksanannya penanganan psikososial pengungsi dan masyarakat terdampak	Kejadian	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyediaan sarana pendukung psikososial	Tersedianya sarana pendukung psikososial	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Kajian penilaian kerusakan banjir dan kebakaran	Terselenggarannya kajian penilaian kerusakan banjir dan kebakaran	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang dan bahan pangan untuk korban bencana	Orang Hari	125000	125000	125000	18.000.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Hunian Sementara (HUNTARA) Bagi Korban Bencana	Jumlah tenda pengungsi yang dapat disediakan	Set	25	25	15	1.365.650.000	APBD	DINAS SOSIAL
Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal	Jumlah Orang Terlantar yang dipulangkan ke daerah asal	Orang	8000	8000	8000	5.514.095.397	APBD	DINAS SOSIAL
Pengadaan Peralatan Dapur Umum	Jumlah set peralatan dapur umum yang siap diselenggarakan	Set	96	96	96	1.150.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
Pelayanan Siaga Bencana oleh Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kota	Jumlah petugas piket bencana tingkat kota	orang	66	66	66	10.798.764.342	APBD	DINAS SOSIAL
Pelayanan Siaga Bencana oleh Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Petugas Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Provinsi	Orang	24	24	24	4.231.369.573	APBD	DINAS SOSIAL

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Petty Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang ntuk korban bencana	Orang	3000	3000	3000	5.398.017.130	APBD	DINAS SOSIAL
Indikator 1.5.1.(c) pendampingan psikososial korban bencana sosial								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pasca Bencana	Telaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pasca Bencana	%	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penanganan psikososial pengungsi dan masyarakat terdampak	Terlaksanannya penanganan psikososial pengungsi dan masyarakat terdampak	Kejadian	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyediaan sarana pendukung psikososial	Tersedianya sarana pendukung psikososial	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Indikator 1.5.1.(e) indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir	Terlaksananya Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir	Tahun	0	0	0	0	APBD	BPBD
Peningkatan pengendalian aparatur dalam pendampingan masyarakat pasca bencana	Terlaksananya Peningkatan pengendalian aparatur dalam pendampingan masyarakat pasca bencana	Kecamatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Desiminasi Informasi Kebencanaan	Tersampaikannya data informasi kebencanaan melalui call center 112	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112)	Terselenggaranya Pengembangan DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112	EWS	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pemanfaatan DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112	Terlaksanannya Pemanfaatan DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112	bulan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan di fasilitas publik	Terlaksananya Penyediaan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan di fasilitas publik	Lokasi	0	0	0	0	APBD	BPBD

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Evaluasi ISO 9001:2015 Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD	Terlaksananya Evaluasi ISO 9001:2015 Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Perawatan Peralatan Early Warning System (EWS)	Terpeliharanya Peralatan Early Warning System (EWS)	Kegiatan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat dan aparatur	Terselenggarannya Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi masyarakat dan aparatur	Orang	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya dalampenyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan relawan serta masyarakat yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Orang	0	0	0	0	APBD	BPBD
Penyusunan Strategi Pelaksanaan Fasilitas Publik Aman Bencana	Tersedianya Strategi pelaksanaan fasilitas umum aman bencana	Lokasi	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pembuatan peta kawasan rawan bencana	Terselenggaranya Pembuatan peta kawasan rawan bencana	Kelurahan	0	0	0	0	APBD	BPBD
Pembinaan dan Pendampingan serta simulasi Sekolah Madrasah Aman Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan serta simulasi Sekolah Madrasah Aman Bencana	Sekolah	0	0	0	0	APBD	BPBD
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Polder	Jumlah Dokumen Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Polder yang tersedia	Dok	0	0	0	0	APBD	DINAS SUMBER DAYA AIR
Indikator 1.5.2.(a) jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Penyediaan sarana prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Tersedianya sarana prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jenis	0	0	0	0	APBD	BPBD
Indikator 1.5.3* dokumen strategi pengurangan risiko bencana (prb) tingkat nasional dan daerah.								
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
Penyusunan Strategi Jakarta Sebagai Kota Tangguh Bencana	Tersusunnya Strategi Jakarta Sebagai Kota Tangguh Bencana	Kegiatan	-	-	-	-	APBD	-

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyusunan Standarisasi Rumah Sakit dan Pasar Aman Bencana	Tersusunnya Standarisasi Rumah Sakit dan Pasar Aman Bencana	Kegiatan	-	-	-	-	APBD	-
Penyusunan Pergub tentang Sistem Komando Penagangan Darurat Bencana	Terselenggaranya Penyusunan Pergub tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pergub	-	-	-	-	APBD	-
Penyusunan Pergub tentang Standar kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	Terselenggaranya Penyusunan Pergub tentang Standar kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	Pergub	-	-	-	-	APBD	-
Target Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
Indikator 1.a.1* proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pendamping	Orang	218	186	186	49.132.570.724	APBD	DPKUKM
Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	29112	40000	40000	30.338.105.223	APBD	DPKUKM
Kegiatan Bazar UKM	Jumlah UKM yang mengikuti bazar	UKM	200	5920	5920	15.349.810.322	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Warung	Jumlah Warung yang mendapatkan sarana dan prasarana	Warung	0	0	440	1.942.598.667	APBD	DPKUKM
Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UKM binaan yang terampil berwirausaha	UKM	332	360	100	2.013.922.370	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana UKM bagi Warga Rusun	Jumlah UKM Warga Rusun	UKM	0	0	50	610.998.016	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL	Jumlah sarana dagang PKL yang tersedia	unit	0	0	600	1.980.000.000	APBD	DPKUKM
Bimtek Design Kemasan Produk UKM	Jumlah UKM yang terampil mendesign kemasan produk	UKM	0	0	50	79.005.557	APBD	DPKUKM
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Mengemudi SIM A	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih mengemudi untuk mendapatkan SIM A	orang	0	3000	3000	21.240.219.880	APBD	DISNAKERTRANSGI
Pelatihan Satuan Pengamanan	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih untuk satuan pengaman	orang	0	300	300	2.959.726.880	APBD	DISNAKERTRANSGI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
Diklat Manajemen Usaha Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	0	100	67.200.000	APBD	DPKUKM
Pelatihan Manajemen Keuangan Koperasi	Jumlah peserta diklat	Orang	0	480	100	1.832.732.812	APBD	DPKUKM
Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL	Jumlah sarana dagang PKL yang tersedia	unit	0	0	600	1.980.000.000	APBD	DPKUKM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
Pembinaan Remaja di Lokasi Rawan Konflik	Jumlah remaja yang dibina pada lokasi rawan konflik sosial	Orang	340	360	380	2.994.481.784	APBD	DINAS SOSIAL
Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbaharui	KPM	180000	240000	323514	5.736.691.700	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	0	1	13.310.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	Kegiatan Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi DKI Jakarta	kegiatan	0	1	1	665.500.000	APBD	DINAS PERKIM
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis	Jenis	20	47	55	14.612.155.807	APBD	DKPKP
Pembinaan budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan rumput laut	Jumlah kelompok yang memahami tentang standard produksi ikan konsumsi.	kelompok	0	720	700	1.629.942.713	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan Sarana Penangkapan Ikan bantuan kepada nelayan	Jenis	0	5	0	2.077.779.000	APBD	DKPKP
Pembinaan kelompok usaha nelayan bersama	Jumlah kelompok binaan usaha nelayan bersama	Kelompok	0	25	15	1.561.079.150	APBD	DKPKP
Bimbingan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan mutu hasil perikanan	Jumlah bimbingan teknis mengenai perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan mutu hasil perikanan.	Kelompok	0	3	3	221.412.749	APBD	DKPKP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah Dasar	%	92	93	94	23.400.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	85	90	10.800.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	914.884.575	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	82.520.010	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	89.085.000	APBD	DINAS KESEHATAN
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	0	0	39.200.000	APBD	DINAS KESEHATAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	0	0	2	651.638.770	APBD	DPPAPP
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	0	30	30	182.749.000	APBD	DKPKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
Pembangunan Rumah Susun	Jumlah unit perumahan rakyat yang terbangun	unit	0	422	5813	3.090.000.000.000	APBD	DINAS PERKIM
Penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik	Jumlah penerima alat bantu penunjang fisik	Orang	590	590	590	3.596.154.995	APBD	DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang menerima Bimbingan Sosial, Fisik, Mental, Spiritual, Psikososial, Kesenian, Keterampilan dan Rekreasi	WBS	218	218	218	1.420.290.519	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Kebutuhan Sandang bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Kebutuhan Sandang	WBS	218	218	218	1.063.897.441	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	2.226.669.146.781	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	1.455.464.640.277	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	198.063.932.400	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	860.830.740.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Indikator 1.a.2* pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	paket	1404	1373	1406	35.554.855.418	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (BOP-TKN)	anak	10740	17340	23040	36.806.400.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan PAUD di RPTRA	Jumlah RPTRA yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini	lokasi	130	140	150	6.351.687.587	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Ketrampilan Vokasional	Jumlah masyarakat yang memperoleh Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Ketrampilan Vokasional	orang	325	350	400	1.259.786.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana untuk digunakan membiayai kegiatan operasional pendidikan sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	Peserta didik	800	1120	1440	8.991.360.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Asesmen Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah	Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di SD, SMP dan SMA yang menerima hasil asesmen psikologi dari terselenggaranya pemeriksaan psikologi	Siswa	580	590	600	2.353.281.988	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Bantu, Alat Peraga dan Peralatan Kantor Bagi Sekolah Inklusi dan SLB Negeri	Jumlah alat bantu, alat peraga dan peralatan penunjang kantor bagi Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus	unit	120	120	120	41.506.126.426	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	Jumlah Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	aplikasi	2	2	2	875.567.874	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan, Sinkronisasi, dan Pendampingan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis SKKNI	Jumlah sekolah memiliki dokumen kurikulum implementatif	Sekolah	579	579	579	1.660.014.720	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Aplikasi Ujian Berbasis Komputer dan aplikasi lain penunjang kegiatan SMK	Jumlah sekolah menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer	Sekolah	200	225	250	481.399.442	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SD/MI	Jumlah aplikasi penunjang kegiatan SD/MI	aplikasi	2	2	2	1.561.460.936	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penguatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi unsur sekolah (komite, guru, kepala sekolah, gugus,) dan untuk meningkatkan mutu sekolah	Kegiatan	15	15	15	4.201.600.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penguatan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah pengawas sekolah yang mengikuti kegiatan penguatan dan pendampingan implementasi kurikulum kepada pengawas sekolah	Pengawas Sekolah	250	100	100	1.333.703.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penguatan dan Pengembangan Model Pendidikan Karakter Bagi Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan kepada komunitas sekolah untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik	Sekolah	60	60	70	3.081.438.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik dan Sekolah Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah kontingen peserta lomba baik kategori peserta didik maupun sekolah yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta pada lomba tingkat nasional	Kontingen	11	11	11	41.270.910.943	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta didik kelas 6 di SD/MI dan SDLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta	Siswa	152000	152000	152000	16.043.698.977	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	dan Kanwil Kemenag DKI Jakarta yang mengikuti Ujian Sekolah							
Pengiriman Siswa Pemenang Lomba Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).	Jumlah peserta didik yang dikirim untuk menjadi peserta lomba ke tingkat nasional mewakili Provinsi DKI Jakarta	Siswa	71	71	71	84.386.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SD/MI	Jumlah aplikasi penunjang kegiatan SD/MI	aplikasi	2	2	2	1.561.460.936	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMP	Tersedianya Kisi-kisi, Standar Kompetensi lulusan (SKL) dan Soal Try Out Ujian Sekolah	dokumen	30	30	30	7.516.603.466	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Manajemen Sekolah Jenjang SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi manajemen	sekolah	200	200	200	4.134.159.229	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	Jumlah unit Pendukung Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMP	unit	800	800	800	40.131.102.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Karakter bagi SIswa dan Guru Jenjang SMP	orang	1000	1000	1000	8.711.092.500	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP	Terwujudnya peran MGMP dalam peningkatan kompetensi, inovasi dan krativitas guru SMP	MGMP	13	13	13	3.970.401.270	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Kurikulum SMP	Tersedianya Kurikulum Jenjang SMP	dokumen	13	13	13	6.322.770.540	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	Jumlah Aplikasi Penunjang Kegiatan SMP/MTs	aplikasi	2	2	2	875.567.874	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Manajemen Sekolah Jenjang SMA	Jumlah sekolah yang mengikuti peningkatan manajemen sekolah	sekolah	100	100	100	4.134.159.229	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA	Terlaksananya Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Jenjang SMA	unit	600	600	600	27.730.766.250	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMA	Terlaksananya Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMA	siswa	1000	1000	1000	8.711.092.500	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Kegiatan SMA/MA	Jumlah aplikasi penunjang Kegiatan SMA/MA	aplikasi	2	2	2	875.567.874	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan, Sinkronisasi, dan Pendampingan Kurikulum dan Model Pembelajaran Kurikulum 2013 berbasis SKKNI	Jumlah sekolah memiliki dokumen kurikulum implementatif	Sekolah	579	579	579	1.660.014.720	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah siswa SMK yang tersertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	siswa	68000	68000	68000	63.637.912.954	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetisi/Lomba Jenjang SMK	Jumlah siswa mengikuti seleksi, pembinaan dan pengiriman dalam lomba-lomba berjenjang	Siswa	2000	2000	2000	14.924.965.570	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Mutu Pendidikan Vokasi Berbasis Dunia Usaha dan Dunia Industri.	Jumlah Sekolah bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis industri dan memasarkan tamatan SMK	Sekolah	500	510	525	493.174.644	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Aplikasi Ujian Berbasis Komputer dan aplikasi lain penunjang kegiatan SMK	Jumlah sekolah menggunakan aplikasi ujian berbasis komputer	Sekolah	200	225	250	481.399.442	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Sekolah Berasrama (Boarding School) SMK	Jumlah Sekolah Menegah Kejuruan berasrama (Boarding School)	Sekolah	2	2	2	7.594.280.466	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kisi-kisi, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Pengembangan Naskah Soal Ujian Sekolah Jenjang SMP	Jumlah Kisi-kisi, Standar Kompetensi lulusan (SKL) dan Soal Try Out Ujian Sekolah yang diterbitkan	dokumen	30	30	30	7.516.603.466	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN	Jumlah sekolah menyusun Kisi-kisi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, serta menyelenggarakan Tryout Ujian	Sekolah	579	579	579	168.345.676	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional							
Penyelenggaraan Try Out Ujian Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah peserta didik kelas 6 di SD dan SDLB yang mengikuti Try Out	Siswa	147000	147500	147899	4.587.578.384	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN	Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA	poin	75,61	80,29	85	9.987.686.084	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehab total memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	0	1	3	134.879.131.359	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	0	64	60	207.885.545.221	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Manajemen Konstruksi yang baik dalam Rehab total gedung sekolah	LOKASI	0	4	39	8.490.530.070	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Manajemen Konstruksi Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Manajemen Konstruksi yang baik dalam Rehab Berat Gedung Sekolah	LOKASI	76	64	60	6.854.320.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Tenaga Ahli Hukum Kontrak Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Tersedianya Jumlah ketersediaan tenaga ahli hukum kontrak rehabilitasi total gedung sekolah	LOKASI	0	4	39	137.700.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Tenaga Ahli Hukum Kontrak Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah tenaga ahli hukum kontrak rehab berat gedung sekolah.	Paket	0	1	1	80.400.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaaan Perlengkapan Satuan Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	unit	0	1608	2055	3.632.224.223	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah lokasi Perencanaan Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	LOKASI	0	64	60	4.348.027.200	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Unit Sekolah dan Ruang Kelas Baru	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)	lokasi	0	0	1	35.364.673.504	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan	Jumlah alat praktik SMK	Program Keahlian	3	3	3	241.032.403.857	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Unit	0	9644	11055	30.694.926.165	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Rehab Berat Gedung Satuan Pendidikan PAUD Negeri	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	0	0	6	161.166.624.097	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	2.226.669.146.781	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	1.455.464.640.277	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	198.063.932.400	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	860.830.740.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	siswa	0	0	0	0	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	siswa	5000	5500	6000	1.138.618.575	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	Jumlah SIswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	siswa	10000	11000	12000	1.634.903.656	APBD	DINAS PENDIDIKAN

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	siswa	683072	703565	724672	1.689.048.070.658	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs.	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs	siswa	281779	309957	340952	940.149.163.801	APBD	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS	Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS yang menerima upah sesuai upah minimum Provinsi	orang	14178	14236	14651	3.479.439.906.796	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS	jumlah tenaga kependidikan non PNS yang menerima upah sesuai upah minimum provinsi	orang	1265	1220	1720	252.097.708.949	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Penunjang Guru dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Aplikasi Penunjang Guru dan Tenaga Kependidikan	aplikasi	1	1	1	2.563.806.012	APBD	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Rehabilitasi gedung di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi yang dilaksanakan pada kegiatan Rehabilitasi Gedung di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Lokasi	0	1	1	684.544.400	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kompetensi Penatausahaan	Jumlah Kompetensi Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sesuai Bidang serta Tupoksi Pegawai.	Orang	5617	5961	6331	9.180.619.200	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pelayanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 36 dan 37 (Kepulauan Seribu)	Jumlah Pelayanan Pendidikan kepada masyarakat Kepulauan Seribu.	Tahun	1	1	1	1.469.210.250	APBD	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah lokasi Pemeliharaan Gedung Kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Lokasi	14	14	12	16.464.537.800	APBD	DINAS PENDIDIKAN
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Target Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
Indikator 2.1.1* prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment)								
Indikator 2.1.2.(a) proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari								
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	Jumlah Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	kajian	0	0	4	297.000.000	APBD	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
Evaluasi proyek penugasan kepada BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan evaluasi proyek penugasan	BUMD	6	0	0	0	APBD	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
Penyusunan KPI BUMD	Jumlah BUMD yang memiliki KPI	BUMD	13	0	0	0	APBD	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Bimbingan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan mutu hasil perikanan	Jumlah bimbingan teknis mengenai perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan mutu hasil perikanan.	Kelompok	0	3	3	221.412.749	APBD	DKPKP
Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah orang yang paham tentang pentingnya mengkonsumsi ikan	orang	0	25	5000	6.538.868.555	APBD	DKPKP
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan	Luas Unit Pengolahan Ikan yang dibangun	m2	0	0	18500	4.000.000.000	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembinaan budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan rumput laut	Jumlah kelompok yang memahami tentang standard produksi ikan konsumsi.	kelompok	0	720	700	1.629.942.713	APBD	DKPKP
Pembinaan kelompok usaha nelayan bersama	Jumlah kelompok binaan usaha nelayan bersama	Kelompok	0	25	15	1.561.079.150	APBD	DKPKP
Pembuatan Lumbung Ikan melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan.	Jumlah Lumbung Ikan melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan yang dibuat	Unit	0	0	90	1.258.984.375	APBD	DKPKP
Penataan Tempat Pelelangan Ikan di sentra-sentra perikanan	Jumlah alat yang ditata pada tempat pelelangan ikan di sentra-sentra perikanan	Unit	0	1	5	2.014.219.480	APBD	DKPKP
Pengadaan induk ikan dan telur	Jumlah kelompok budidaya ikan yang menerima	Kelompok	0	100	150	624.395.244	APBD	DKPKP
Pengadaan pakan dan obat ikan	Jumlah pakan dan obat ikan budidaya	Jenis	21	25	30	2.103.600.485	APBD	DKPKP
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis	Jenis	20	47	55	14.612.155.807	APBD	DKPKP
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan Sarana Penangkapan Ikan bantuan kepada nelayan	Jenis	0	5	0	2.077.779.000	APBD	DKPKP
Pengawasan dan penerapan mutu pra SKP bagi unit pengolahan ikan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan mutu pra SKP	UPI	0	35	40	690.039.499	APBD	DKPKP
Pengendalian mutu hasil produk perikanan	Jumlah sample yang diuji dalam rangka pengendalian mutu hasil produk perikanan	sample	0	0	2350	4.100.000.000	APBD	DKPKP
Rehab Sarana Prasarana Pembenihan ikan	Jumlah sarana prasarana pembenihan yang direhab	Lokasi	0	0	6	7.806.714.799	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Rehab Tempat Pelelangan Ikan	Luas tempat Pelelangan Ikan yang direhab	m2	0	0	8000	12.000.000.000	APBD	DKPKP
Pelaksanaan Sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP) bagi pengolah ikan.	Jumlah sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP)	Kelompok	0	50	55	365.614.839	APBD	DKPKP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Bimbingan Teknis Peternak Sapi Perah di DKI Jakarta	jumlah peternak sapi perah yang terlatih	orang	0	50	50	329.556.194	APBD	DKPKP
Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah wilayah yang melaksanakan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	wilayah	0	0	3	71.301.670	APBD	DKPKP
pelatihan diversifikasi olahan pangan ternak	Jumlah orang yang dilatih tentang diversifikasi olahan pangan ternak	orang	0	1200	1200	1.138.249.725	APBD	DKPKP
Penerapan GAP (Good Agricultural Practice) bagi Kelompok Tani Hortikultura	Jumlah petani hortikultura	orang	0	0	100	225.000.000	APBD	DKPKP
Penerapan Good Handling Practice (GHP) Hasil Pertanian	Jumlah orang yang menguasai pengemasan dan pelabelan hasil pertanian	orang	0	0	250	159.720.000	APBD	DKPKP
Pengadaan Pohon Penghijauan Produktif, Tanaman Langka, Biofarmaka dan Tanaman Hias	Jumlah pohon produktif, tanaman langka, biofarmaka, dan tanaman hias	pohon	13000	12000	11000	708.354.662	APBD	DKPKP
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kasus pelanggaran	kasus	0	0	2	100.000.000	APBD	DKPKP
Pengembangan Biopestisida dan Klinik Tanaman	Jumlah produksi biopestisida tricoderma, beauveria dan tricokompos	kg	0	6000	18500	330.951.380	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengembangan Perbenihan Buah Tropika	Jumlah tanaman buah tropika	pohon	0	0	2000	189.022.405	APBD	DKPKP
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	0	0	200	122.918.516	APBD	DKPKP
Pengembangan Tanaman Hortikultura di DKI Jakarta	Luas lahan untuk budidaya tanaman hortikultura	Ha	0	30	30	11.886.867.349	APBD	DKPKP
Perbanyakan Benih Padi	Jumlah Benih Padi yang tersedia	ton	47,2	47,2	48	292.099.502	APBD	DKPKP
Perbanyakan Bibit Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman	pohon	25000	24000	23000	817.220.907	APBD	DKPKP
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Komoditas Pertanian di Daerah Produsen	Jumlah kasus	kali	3	4	5	325.974.416	APBD	DKPKP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Pemantauan Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan di DKI Jakarta	%	100	100	100	3.696.055.871	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	0	30	30	182.749.000	APBD	DKPKP
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	1.299.718.796	APBD	DKPKP
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan Peralatan Dapur Umum	Jumlah set peralatan dapur umum yang siap diselenggarakan	Set	96	96	96	1.150.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang dan bahan pangan untuk korban bencana	Orang Hari	125000	125000	125000	18.000.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL
Indikator 2.1.1.(a) prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita								
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	Jumlah Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	kajian	0	0	4	297.000.000	APBD	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
Evaluasi proyek penugasan kepada BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan evaluasi proyek penugasan	BUMD	6	0	0	0	APBD	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
Penyusunan KPI BUMD	Jumlah BUMD yang memiliki KPI	BUMD	13	0	0	0	APBD	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
pelatihan diversifikasi olahan pangan ternak	Jumlah orang yang dilatih tentang diversifikasi olahan pangan ternak	orang	0	1200	1200	1.138.249.725	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	0	30	30	182.749.000	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Pengadaan Peralatan Dapur Umum	Jumlah set peralatan dapur umum yang siap diselenggarakan	Set	96	96	96	1.150.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang dan bahan pangan untuk korban bencana	Orang Hari	125000	125000	125000	18.000.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL
Indikator 2.1.2* prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan								
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	Jumlah Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	kajian	0	0	4	297.000.000	APBD	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN
Evaluasi proyek penugasan kepada BUMD	Jumlah BUMD yang dilakukan evaluasi proyek penugasan	BUMD	6	0	0	0	APBD	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
Penyusunan KPI BUMD	Jumlah BUMD yang memiliki KPI	BUMD	13	0	0	0	APBD	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis	Jenis	20	47	55	14.612.155.807	APBD	DKPKP
Pembinaan budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan rumput laut	Jumlah kelompok yang memahami tentang standard produksi ikan konsumsi.	kelompok	0	720	700	1.629.942.713	APBD	DKPKP
Pengadaan pakan dan obat ikan	Jumlah pakan dan obat ikan budidaya	Jenis	21	25	30	2.103.600.485	APBD	DKPKP
Rehab Sarana Prasarana Pembenihan ikan	Jumlah sarana prasarana pembenihan yang direhab	Lokasi	0	0	6	7.806.714.799	APBD	DKPKP
Pembuatan Lumbung Ikan melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan.	Jumlah Lumbung Ikan melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan yang dibuat	Unit	0	0	90	1.258.984.375	APBD	DKPKP
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan Sarana Penangkapan Ikan bantuan kepada nelayan	Jenis	0	5	0	2.077.779.000	APBD	DKPKP
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan	Luas Unit Pengolahan Ikan yang dibangun	m2	0	0	18500	4.000.000.000	APBD	DKPKP
Rehab Tempat Pelelangan Ikan	Luas tempat Pelelangan Ikan yang direhab	m2	0	0	8000	12.000.000.000	APBD	DKPKP
Penataan Tempat Pelelangan Ikan di sentra-sentra perikanan	Jumlah alat yang ditata pada tempat pelelangan ikan di sentra-sentra perikanan	Unit	0	1	5	2.014.219.480	APBD	DKPKP
Pembinaan kelompok usaha nelayan bersama	Jumlah kelompok binaan usaha nelayan bersama	Kelompok	0	25	15	1.561.079.150	APBD	DKPKP
Pengadaan induk ikan dan telur	Jumlah kelompok budidaya ikan yang menerima	Kelompok	0	100	150	624.395.244	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengawasan dan penerapan mutu pra SKP bagi unit pengolahan ikan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan mutu pra SKP	UPI	0	35	40	690.039.499	APBD	DKPKP
Pelaksanaan Sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP) bagi pengolah ikan.	Jumlah sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP)	Kelompok	0	50	55	365.614.839	APBD	DKPKP
Bimbingan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan mutu hasil perikanan	Jumlah bimbingan teknis mengenai perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan mutu hasil perikanan.	Kelompok	0	3	3	221.412.749	APBD	DKPKP
Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah orang yang paham tentang pentingnya mengkonsumsi ikan	orang	0	25	5000	6.538.868.555	APBD	DKPKP
Pengendalian mutu hasil produk perikanan	Jumlah sample yang diuji dalam rangka pengendalian mutu hasil produk perikanan	sample	0	0	2350	4.100.000.000	APBD	DKPKP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Bimbingan Teknis Peternak Sapi Perah di DKI Jakarta	jumlah peternak sapi perah yang terlatih	orang	0	50	50	329.556.194	APBD	DKPKP
Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah wilayah yang melaksanakan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	wilayah	0	0	3	71.301.670	APBD	DKPKP
pelatihan diversifikasi olahan pangan ternak	Jumlah orang yang dilatih tentang diversifikasi olahan pangan ternak	orang	0	1200	1200	1.138.249.725	APBD	DKPKP
Penerapan GAP (Good Agricultural Practice) bagi Kelompok Tani Hortikultura	Jumlah petani hortikultura	orang	0	0	100	225.000.000	APBD	DKPKP
Penerapan Good Handling Practice (GHP) Hasil Pertanian	Jumlah orang yang menguasai pengemasan dan pelabelan hasil pertanian	orang	0	0	250	159.720.000	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan Pohon Penghijauan Produktif, Tanaman Langka, Biofarmaka dan Tanaman Hias	Jumlah pohon produktif, tanaman langka, biofarmaka, dan tanaman hias	pohon	13000	12000	11000	708.354.662	APBD	DKPKP
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kasus pelanggaran	kasus	0	0	2	100.000.000	APBD	DKPKP
Pengembangan Biopestisida dan Klinik Tanaman	Jumlah produksi biopestisida tricoderma, beauveria dan tricokompos	kg	0	6000	18500	330.951.380	APBD	DKPKP
Pengembangan Perbenihan Buah Tropika	Jumlah tanaman buah tropika	pohon	0	0	2000	189.022.405	APBD	DKPKP
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	0	0	200	122.918.516	APBD	DKPKP
Pengembangan Tanaman Hortikultura di DKI Jakarta	Luas lahan untuk budidaya tanaman hortikultura	Ha	0	30	30	11.886.867.349	APBD	DKPKP
Perbanyakan Benih Padi	Jumlah Benih Padi yang tersedia	ton	47,2	47,2	48	292.099.502	APBD	DKPKP
Perbanyakan Bibit Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman	pohon	25000	24000	23000	817.220.907	APBD	DKPKP
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Komoditas Pertanian di Daerah Produsen	Jumlah kasus	kali	3	4	5	325.974.416	APBD	DKPKP
Pemantauan Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan di DKI Jakarta	%	100	100	100	3.696.055.871	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	0	30	30	182.749.000	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	1.299.718.796	APBD	DKPKP
Target Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
Indikator 2.2.1* prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Sinkronisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah Laporan Pokjanal Posyandu	laporan	29	0	14	64.173.900	APBD	DPPAPP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	82.520.010	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	85	90	10.800.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah Dasar	%	92	93	94	23.400.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	263.362.500	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	90	0	0	218.786.878	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	70	80	163.039.686	APBD	DINKES

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	281.131.095	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	24.600.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Penyakit Kecacingan	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	%	75	85	95	31.620.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	0	0	136.604.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINKES
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	1.299.718.796	APBD	DKPKP
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Pengadaan Peralatan Dapur Umum	Jumlah set peralatan dapur umum yang siap diselenggarakan	Set	96	96	96	1.150.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang dan bahan pangan untuk korban bencana	Orang Hari	125000	125000	125000	18.000.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Indikator 2.2.1.(a) prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Sinkronisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah Laporan Pokjanal Posyandu	laporan	29	0	14	64.173.900	APBD	DPPAPP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	82.520.010	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	85	90	10.800.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	70	80	163.039.686	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	281.131.095	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	24.600.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Penyakit Kecacingan	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	%	75	85	95	31.620.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	0	0	136.604.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINKES
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	1.299.718.796	APBD	DKPKP
PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
Pengadaan Peralatan Dapur Umum	Jumlah set peralatan dapur umum yang siap diselenggarakan	Set	96	96	96	1.150.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana	Jumlah penyediaan kebutuhan sandang dan bahan pangan untuk korban bencana	Orang Hari	125000	125000	125000	18.000.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								
Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS)	Jumlah WBS yang disediakan Makanan dan Minuman	WBS	218	218	218	6.148.256.312	APBD	DINAS SOSIAL
Indikator 2.2.2* prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	82.520.010	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	85	90	10.800.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah Dasar	%	92	93	94	23.400.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	263.362.500	APBD	DINKES

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	90	0	0	218.786.878	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	70	80	163.039.686	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	281.131.095	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	24.600.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	483.559.701	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	914.884.575	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	%	24	24	40	19.867.500	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Penyakit Kecacingan	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Peningkatan Layanan Penyakit Kecacingan	%	75	85	95	31.620.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	267	267	470.685.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	0	0	136.604.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINKES
Indikator 2.2.2.(a) prevalensi anemia pada ibu hamil								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	70	80	163.039.686	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	483.559.701	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	%	24	24	40	19.867.500	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	0	0	136.604.000	APBD	DINKES
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	0	0	3.004.362.354.139	APBD	DINKES
Indikator 2.2.2.(b) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan asi eksklusif								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Sinkronisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah Laporan Pokjanal Posyandu	laporan	29	0	14	64.173.900	APBD	DPPAPP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	70	80	163.039.686	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	281.131.095	APBD	DINKES

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	24.600.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	914.884.575	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	0	0	136.604.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINKES
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	0	0	3.004.362.354.139	APBD	DINAS KESEHATAN
Indikator 2.2.2.(c) kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (pph) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Sinkronisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah Laporan Pokjanal Posyandu	laporan	29	0	14	64.173.900	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Bimbingan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan mutu hasil perikanan	Jumlah bimbingan teknis mengenai perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan mutu hasil perikanan.	Kelompok	0	3	3	221.412.749	APBD	DKPKP
Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Jumlah orang yang paham tentang pentingnya mengkonsumsi ikan	orang	0	25	5000	6.538.868.555	APBD	DKPKP
Pembangunan Unit Pengolahan Ikan	Luas Unit Pengolahan Ikan yang dibangun	m2	0	0	18500	4.000.000.000	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis	Jenis	20	47	55	14.612.155.807	APBD	DKPKP
Pembinaan budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan rumput laut	Jumlah kelompok yang memahami tentang standard produksi ikan konsumsi.	kelompok	0	720	700	1.629.942.713	APBD	DKPKP
Pengadaan pakan dan obat ikan	Jumlah pakan dan obat ikan budidaya	Jenis	21	25	30	2.103.600.485	APBD	DKPKP
Rehab Sarana Prasarana Pembenihan ikan	Jumlah sarana prasarana pembenihan yang direhab	Lokasi	0	0	6	7.806.714.799	APBD	DKPKP
Pembuatan Lumbung Ikan melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan.	Jumlah Lumbung Ikan melalui Rumpon Dasar dan Rumpon Permukaan yang dibuat	Unit	0	0	90	1.258.984.375	APBD	DKPKP
Rehab Tempat Pelelangan Ikan	Luas tempat Pelelangan Ikan yang direhab	m2	0	0	8000	12.000.000.000	APBD	DKPKP
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan Sarana Penangkapan Ikan bantuan kepada nelayan	Jenis	0	5	0	2.077.779.000	APBD	DKPKP
Penataan Tempat Pelelangan Ikan di sentra-sentra perikanan	Jumlah alat yang ditata pada tempat pelelangan ikan di sentra-sentra perikanan	Unit	0	1	5	2.014.219.480	APBD	DKPKP
Pembinaan kelompok usaha nelayan bersama	Jumlah kelompok binaan usaha nelayan bersama	Kelompok	0	25	15	1.561.079.150	APBD	DKPKP
Pengadaan induk ikan dan telur	Jumlah kelompok budidaya ikan yang menerima	Kelompok	0	100	150	624.395.244	APBD	DKPKP
Pengawasan dan penerapan mutu pra SKP bagi unit pengolahan ikan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan mutu pra SKP	UPI	0	35	40	690.039.499	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelaksanaan Sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP) bagi pengolah ikan.	Jumlah sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP)	Kelompok	0	50	55	365.614.839	APBD	DKPKP
Pengendalian mutu hasil produk perikanan	Jumlah sample yang diuji dalam rangka pengendalian mutu hasil produk perikanan	sample	0	0	2350	4.100.000.000	APBD	DKPKP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Perbanyakan Benih Padi	Jumlah Benih Padi yang tersedia	ton	47,2	47,2	48	292.099.502	APBD	DKPKP
Pengembangan Biopestisida dan Klinik Tanaman	Jumlah produksi biopestisida tricoderma, beauveria dan tricokompos	kg	0	6000	18500	330.951.380	APBD	DKPKP
Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah wilayah yang melaksanakan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	wilayah	0	0	3	71.301.670	APBD	DKPKP
Pengembangan Perbenihan Buah Tropika	Jumlah tanaman buah tropika	pohon	0	0	2000	189.022.405	APBD	DKPKP
Perbanyakan Bibit Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman	pohon	25000	24000	23000	817.220.907	APBD	DKPKP
Pengadaan Pohon Penghijauan Produktif, Tanaman Langka, Biofarmaka dan Tanaman Hias	Jumlah pohon produktif, tanaman langka, biofarmaka, dan tanaman hias	pohon	13000	12000	11000	708.354.662	APBD	DKPKP
Penerapan GAP (Good Agricultural Practice) bagi Kelompok Tani Hortikultura	Jumlah petani hortikultura	orang	0	0	100	225.000.000	APBD	DKPKP
Pengembangan Tanaman Hortikultura di DKI Jakarta	Luas lahan untuk budidaya tanaman hortikultura	Ha	0	30	30	11.886.867.349	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penerapan Good Handling Practice (GHP) Hasil Pertanian	Jumlah orang yang menguasai pengemasan dan pelabelan hasil pertanian	orang	0	0	250	159.720.000	APBD	DKPKP
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kasus pelanggaran	kasus	0	0	2	100.000.000	APBD	DKPKP
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Komoditas Pertanian di Daerah Produsen	Jumlah kasus	kali	3	4	5	325.974.416	APBD	DKPKP
Bimbingan Teknis Peternak Sapi Perah di DKI Jakarta	jumlah peternak sapi perah yang terlatih	orang	0	50	50	329.556.194	APBD	DKPKP
pelatihan diversifikasi olahan pangan ternak	Jumlah orang yang dilatih tentang diversifikasi olahan pangan ternak	orang	0	1200	1200	1.138.249.725	APBD	DKPKP
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	0	0	200	122.918.516	APBD	DKPKP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	42	44	171.187.452	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	263.362.500	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	90	0	0	218.786.878	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	281.131.095	APBD	DINKES

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	24.600.000	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	483.559.701	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas	Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	1.333.987.162	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	70	80	1.357.453.791	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	914.884.575	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	%	24	24	40	19.867.500	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	3.039.556.497	APBD	DINKES
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	60	60	62	125.235.000	APBD	DINKES
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	0	0	3.004.362.354.139	APBD	DINKES
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pemantauan Ketersediaan Pangan	Persentase ketersediaan pangan di DKI Jakarta	%	100	100	100	3.696.055.871	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Johar Baru	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	0	30	30	182.749.000	APBD	DKPKP
Pemberdayaan Masyarakat Rawan Pangan	Jumlah masyarakat rawan pangan yang diberdayakan	orang	0	0	180	900.000.000	APBD	DKPKP
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	1.299.718.796	APBD	DKPKP
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
Indikator 3.1.1* angka kematian ibu (aki).								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Klaim Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terverifikasi	%	100	100	100	742.501.600.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	0	0	0	100.066.000.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	0	0	0	1.582.282.608.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran	Penduduk	5848139	5906621	5965687	6.489.708.902.644	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Audit Maternal	Persentase Kasus Kematian Maternal yang Dilakukan Audit	%	90	95	100	14.470.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Deteksi Dini Penyakit Hepatitis B	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	%	60	65	70	103.675.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kegawatdaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Waktu Maksimal 30 Menit	%	100	100	100	16.910.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	90	100	100	9.156.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	60	70	147.376.908.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	80	100	5.400.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	46.920.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	25.080.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Sesuai Standar	%	100	100	100	49.132.370.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	476.674.893.922	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	68.920.707.180	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	%	35	40	45	18.468.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Kematian	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Autopsi Verbal (AV)	%	20	25	30	3.970.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	47	50	60.000.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	Puskesmas	52	79	107	1.040.527.217.342	APBD	Dinkes
Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD	Jumlah RSUD/RSKD yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	RSUD/RSKD	4	9	12	5.852.943.291.565	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	65,78	66,84	67,91	9.040.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	50	65	75	23.922.505.200	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan	%	70	80	90	309.260.321.040	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	Persentase Sarana Penyalur Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Standar	%	50	65	75	4.385.925.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	60	70	80	1.210.006.254.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Obat Dan Bahan Kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	96	97	98	1.219.846.545.500	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Perbekalan Kesehatan Pakai Habis di Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Pakai Habis Sesuai Standar	%	60	70	80	1.685.839.016.000	APBD	Dinkes
Pengembangan Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD Kelas D yang Ditingkatkan Menjadi RSUD Kelas C	RSUD	7	9	10	1.080.000.000	APBD	Dinkes
Penyediaan Ambulans	Jumlah Ambulans yang Dibeli	Unit	20	20	20	71.105.000.000	APBD	Dinkes
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persentase SKPD/UKPD yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	55	75	100	95.887.431.330	APBD	Dinkes
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang kesehatan	kesesuaian antara peraturan bidang kesehatan dengan pelaksanaan	dokumen	6	6	6	803.645.000	APBD	Biro Kesos
Penyusunan dan Pembahasan kebijakan Bidang Kesehatan	kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan di bidang kesehatan	dokumen	6	6	6	471.130.000	APBD	Biro Kesos
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di daratan Provinsi DKI Jakarta.	Jumlah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	kali	20	20	20	398.515.818	APBD	DKPKP
Sertifikasi Good Manufacturing Practises (GMP) dan Sanitation Standar Operation Procedures (SSOP) bagi pengolah ikan	Jumlah Sertifikasi Good Manufacturing Practises (GMP) dan Sanitation Standar Operation Procedures (SSOP) bagi pengolah ikan	orang	0	0	0	45.686.443	APBD	DKPKP
Pelaksanaan Sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP) bagi pengolah ikan.	Jumlah sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP)	Kelompok	50	55	55	233.272.439	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengawasan dan penerapan mutu pra SKP bagi unit pengolahan ikan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan mutu pra SKP	UPI	32	35	40	1.124.959.776	APBD	DKPKP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	0	0	0	81.377.626	APBD	DKPKP
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	150	170	200	428.598.671	APBD	DKPKP
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
Pembekalan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin	Jumlah pasangan calon pengantin yang mendapatkan pembekalan kesehatan reproduksi	pasangan	0	0	0	50.500.000	APBD	DPPAPP
Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Jalur Formal dan Informal	Jumlah remaja yang paham tentang kesehatan reproduksi	Orang	3000	3000	3000	1.090.703.064	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan	Jumlah media yang digunakan untuk promosi dan KIE	media	4	4	4	190.000.000	APBD	DPPAPP
Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat yang terbina	Kelompok	20	20	20	121.501.380	APBD	DPPAPP
Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembekalan pelayanan KB MKJP	tenaga kesehatan	400	425	450	354.597.245	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Konseling Kesehatan Reproduksi Keluarga	Jumlah provider fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembekalan konseling kespro	lembaga	130	150	170	394.932.032	APBD	DPPAPP
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi Program Pengendalian Penduduk dan KB Melalui Media Informasi	Jenis media yang digunakan sebagai sarana promosi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	jenis media	4	5	5	2.645.456.677	APBD	DPPAPP
Penyusunan Rancangan Kajian Akademis Ketahanan Keluarga	Jumlah dokumen kajian akademis ketahanan keluarga	dokumen	0	0	0	173.700.000	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Kegiatan Momentum Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	161.274.750	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan KB	bulan	12	12	12	4.207.901.888	APBD	DPPAPP
Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah lembaga faskes yang mendapat pembekalan konseling KB pasca Persalinan dan pasca keguguran	lembaga faskes	194	244	294	611.570.673	APBD	DPPAPP
Pelayanan KB Momentum	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan pada saat kegiatan momentum	kegiatan	4	4	4	1.175.689.562	APBD	DPPAPP
Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB pada kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan	kegiatan	1	1	1	899.092.979	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	2	2	2	6.000.430.071	APBD	DPPAPP
Penguatan Mitra Kerja di Kampung KB	Jumlah mitra kerja Kampung KB	mitra kerja	27	30	32	260.000.000	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembinaan dan Pengendalian Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kampung KB	120	130	140	275.000.000	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	53.287.370.304	APBD	DKPKP
Indikator 3.1.2* proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Klaim Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terverifikasi	%	100	100	100	742.501.600.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	0	0	0	100.066.000.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	0	0	0	1.582.282.608.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran	Penduduk	5848139	5906621	5965687	6.489.708.902.644	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kegawatdaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Waktu Maksimal 30 Menit	%	100	100	100	16.910.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	60	70	147.376.908.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	80	100	5.400.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	46.920.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	25.080.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Sesuai Standar	%	100	100	100	49.132.370.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan	%	70	80	90	309.260.321.040	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	Persentase Sarana Penyalur Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Standar	%	50	65	75	4.385.925.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Penyediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	60	70	80	1.210.006.254.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Obat Dan Bahan Kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	96	97	98	1.219.846.545.500	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Perbekalan Kesehatan Pakai Habis di Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Pakai Habis Sesuai Standar	%	60	70	80	1.685.839.016.000	APBD	Dinkes
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang kesehatan	kesesuaian antara peraturan bidang kesehatan dengan pelaksanaan	dokumen	6	6	6	803.645.000	APBD	Biro Kesos
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kesesuaian antara peraturan bidang pemberdayaan dengan pelaksanaan	dokumen	4	4	4	613.215.000	APBD	Biro Kesos
Penyusunan dan Pembahasan kebijakan Bidang Kesehatan	kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan di bidang kesehatan	dokumen	6	6	6	471.130.000	APBD	Biro Kesos
Penyusunan dan Pembahasan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	dokumen	4	4	4	444.700.000	APBD	Biro Kesos

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Indikator 3.1.2.(a) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kegawatdaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Waktu Maksimal 30 Menit	%	100	100	100	16.910.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	60	70	147.376.908.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	80	100	5.400.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	46.920.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	25.080.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Sesuai Standar	%	100	100	100	49.132.370.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Target Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
Indikator 3.2.1* angka kematian balita (akba) per 1000 kelahiran hidup. **Indikator 3.2.2* angka kematian neonatal (akn) per 1000 kelahiran hidup.**								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Klaim Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terverifikasi	%	100	100	100	742.501.600.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	0	0	0	100.066.000.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	0	0	0	1.582.282.608.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran	Penduduk	5848139	5906621	5965687	6.489.708.902.644	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Audit Maternal	Persentase Kasus Kematian Maternal yang Dilakukan Audit	%	90	95	100	14.470.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Audit Perinatal	Persentase Kasus Kematian Perinatal yang Dilakukan Audit	%	45	50	60	14.470.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Deteksi Dini Penyakit Hepatitis B	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	%	60	65	70	103.675.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	5.355.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	57	60	5.305.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kegawatdaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Waktu Maksimal 30 Menit	%	100	100	100	16.910.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	90	100	100	9.156.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	60	70	147.376.908.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	80	100	5.400.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	96	99	100	52.128.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	99	100	100	37.841.200.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	46.920.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	25.080.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Sesuai Standar	%	100	100	100	49.132.370.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	476.674.893.922	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	68.920.707.180	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	75.946.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	%	35	40	45	18.468.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Penyakit Pneumonia pada Balita	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pemeriksaan dan Tatalaksana Pneumonia pada Balita (Bawah Lima Tahun) Melalui Pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	%	50	60	70	29.440.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Mengkampanyekan dan Melaksanakan Minimal 3 Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	40	50	60	187.154.700.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Kematian	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Autopsi Verbal (AV)	%	20	25	30	3.970.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit Campak	Persentase Kasus Suspek Campak yang Dilakukan Pengambilan Spesimen	%	85	87,5	90	5.394.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Lebih Dari Sama Dengan 2 per 100.000 Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun	Rate	2	2	2	4.289.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	47	50	60.000.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	80	85	90	2.664.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	Puskesmas	52	79	107	1.040.527.217.342	APBD	Dinkes
Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD	Jumlah RSUD/RSKD yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	RSUD/RSKD	4	9	12	5.852.943.291.565	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	65,78	66,84	67,91	9.040.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	50	65	75	23.922.505.200	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan	%	70	80	90	309.260.321.040	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	Persentase Sarana Penyalur Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Standar	%	50	65	75	4.385.925.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Penyediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	60	70	80	1.210.006.254.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Obat Dan Bahan Kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	96	97	98	1.219.846.545.500	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Perbekalan Kesehatan Pakai Habis di Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Pakai Habis Sesuai Standar	%	60	70	80	1.685.839.016.000	APBD	Dinkes
Pengembangan Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD Kelas D yang Ditingkatkan Menjadi RSUD Kelas C	RSUD	7	9	10	1.080.000.000	APBD	Dinkes
Penyediaan Ambulans	Jumlah Ambulans yang Dibeli	Unit	20	20	20	71.105.000.000	APBD	Dinkes
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persentase SKPD/UKPD yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	55	75	100	95.887.431.330	APBD	Dinkes
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di daratan Provinsi DKI Jakarta.	Jumlah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan	kali	20	20	20	398.515.818	APBD	DKPKP
Sertifikasi Good Manufacturing Practises (GMP) dan Sanitation Standar Operation Procedures (SSOP) bagi pengolah ikan	Jumlah Sertifikasi Good Manufacturing Practises (GMP) dan Sanitation Standar Operation Procedures (SSOP) bagi pengolah ikan	orang	0	0	0	45.686.443	APBD	DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelaksanaan Sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP) bagi pengolah ikan.	Jumlah sertifikasi good manufacturing practises (GMP) dan sanitasion standard operation procedures (SSOP)	Kelompok	50	55	55	233.272.439	APBD	DKPKP
Pengawasan dan penerapan mutu pra SKP bagi unit pengolahan ikan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan mutu pra SKP	UPI	32	35	40	1.124.959.776	APBD	DKPKP
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	0	0	0	81.377.626	APBD	DKPKP
Pengembangan Sertifikasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).	Jumlah sertifikat yang dikeluarkan	sertifikat	150	170	200	428.598.671	APBD	DKPKP
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								
Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang kesehatan	kesesuaian antara peraturan bidang kesehatan dengan pelaksanaan	dokumen	6	6	6	803.645.000	APBD	Biro Kesos
Penyusunan dan Pembahasan kebijakan Bidang Kesehatan	kesesuaian antara kebijakan dengan peraturan di bidang kesehatan	dokumen	6	6	6	471.130.000	APBD	Biro Kesos
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
Pembekalan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin	Jumlah pasangan calon pengantin yang mendapatkan pembekalan kesehatan reproduksi	pasangan	0	0	0	50.500.000	APBD	DPPAPP
Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Jalur Formal dan Informal	Jumlah remaja yang paham tentang kesehatan reproduksi	Orang	3000	3000	3000	1.090.703.064	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelaksanaan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan	Jumlah media yang digunakan untuk promosi dan KIE	media	4	4	4	190.000.000	APBD	DPPAPP
Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat yang terbina	Kelompok	20	20	20	121.501.380	APBD	DPPAPP
Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembekalan pelayanan KB MKJP	tenaga kesehatan	400	425	450	354.597.245	APBD	DPPAPP
Peningkatan Konseling Kesehatan Reproduksi Keluarga	Jumlah provider fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembekalan konseling kespro	lembaga	130	150	170	394.932.032	APBD	DPPAPP
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi Program Pengendalian Penduduk dan KB Melalui Media Informasi	Jenis media yang digunakan sebagai sarana promosi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	jenis media	4	5	5	2.645.456.677	APBD	DPPAPP
Penyusunan Rancangan Kajian Akademis Ketahanan Keluarga	Jumlah dokumen kajian akademis ketahanan keluarga	dokumen	0	0	0	173.700.000	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Kegiatan Momentum Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	161.274.750	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan KB	bulan	12	12	12	4.207.901.888	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah lembaga faskes yang mendapat pembekalan konseling KB pasca Persalinan dan pasca keguguran	lembaga faskes	194	244	294	611.570.673	APBD	DPPAPP
Pelayanan KB Momentum	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan pada saat kegiatan momentum	kegiatan	4	4	4	1.175.689.562	APBD	DPPAPP
Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB pada kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan	kegiatan	1	1	1	899.092.979	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	2	2	2	6.000.430.071	APBD	DPPAPP
Penguatan Mitra Kerja di Kampung KB	Jumlah mitra kerja Kampung KB	mitra kerja	27	30	32	260.000.000	APBD	DPPAPP
Pembinaan dan Pengendalian Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kampung KB	120	130	140	275.000.000	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	Persentase Keamanan Pangan di wilayah DKI Jakarta	%	95	96	96	53.287.370.304	APBD	DKPKP
Indikator 3.2.2.(a) angka kematian bayi (akb) per 1000 kelahiran hidup.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Klaim Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terverifikasi	%	100	100	100	742.501.600.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	0	0	0	100.066.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	0	0	0	1.582.282.608.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran	Penduduk	5848139	5906621	5965687	6.489.708.902.644	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Audit Maternal	Persentase Kasus Kematian Maternal yang Dilakukan Audit	%	90	95	100	14.470.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Audit Perinatal	Persentase Kasus Kematian Perinatal yang Dilakukan Audit	%	45	50	60	14.470.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Deteksi Dini Penyakit Hepatitis B	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	%	60	65	70	103.675.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	5.355.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	57	60	5.305.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kegawadaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase Penanganan Kegawatdaruratan Pra-Rumah Sakit Melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Waktu Maksimal 30 Menit	%	100	100	100	16.910.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	90	100	100	9.156.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin (Catin)	Persentase Calon Pengantin (Catin) yang Melakukan Skrining Kesehatan	%	50	60	70	147.376.908.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam	%	60	80	100	5.400.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	96	99	100	52.128.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	99	100	100	37.841.200.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	%	100	100	100	46.920.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	25.080.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Nifas	Persentase Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Nifas Sesuai Standar	%	100	100	100	49.132.370.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Diabetes Mellitus	Persentase Penduduk Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	476.674.893.922	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	68.920.707.180	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pengendalian Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus	Persentase Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Kurus yang Mendapatkan Makanan Tambahan	%	95	96	100	75.946.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Remaja Putri	Persentase Remaja Putri yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD)	%	35	40	45	18.468.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyakit Pneumonia pada Balita	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pemeriksaan dan Tatalaksana Pneumonia pada Balita (Bawah Lima Tahun) Melalui Pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)	%	50	60	70	29.440.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Mengkampanyekan dan Melaksanakan Minimal 3 Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	40	50	60	187.154.700.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Kematian	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Autopsi Verbal (AV)	%	20	25	30	3.970.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit Campak	Persentase Kasus Suspek Campak yang Dilakukan Pengambilan Spesimen	%	85	87,5	90	5.394.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Lebih Dari Sama Dengan 2 per 100.000 Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun	Rate	2	2	2	4.289.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	43	47	50	60.000.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Peningkatan Cakupan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	80	85	90	2.664.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	Puskesmas	52	79	107	1.040.527.217.342	APBD	Dinkes
Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Gedung RSUD/RSKD	Jumlah RSUD/RSKD yang Dibangun/Dikembangkan/Direhabilitasi	RSUD/RSKD	4	9	12	5.852.943.291.565	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	65,78	66,84	67,91	9.040.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	50	65	75	23.922.505.200	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melakukan Pemeliharaan Alat Kesehatan	%	70	80	90	309.260.321.040	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	Persentase Sarana Penyalur Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Standar	%	50	65	75	4.385.925.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Alat Kesehatan Sesuai Standar	%	60	70	80	1.210.006.254.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Obat Dan Bahan Kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	96	97	98	1.219.846.545.500	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Perbekalan Kesehatan Pakai Habis di Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Pakai Habis Sesuai Standar	%	60	70	80	1.685.839.016.000	APBD	Dinkes
Pengembangan Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD Kelas D yang Ditingkatkan Menjadi RSUD Kelas C	RSUD	7	9	10	1.080.000.000	APBD	Dinkes
Penyediaan Ambulans	Jumlah Ambulans yang Dibeli	Unit	20	20	20	71.105.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persentase SKPD/UKPD yang Menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	55	75	100	95.887.431.330	APBD	Dinkes
Indikator 3.2.2.(b) persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	5.355.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	96	99	100	52.128.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	99	100	100	37.841.200.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit Campak	Persentase Kasus Suspek Campak yang Dilakukan Pengambilan Spesimen	%	85	87,5	90	5.394.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Lebih Dari Sama Dengan 2 per 100.000 Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun	Rate	2	2	2	4.289.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Target Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
Indikator 3.3.1.(a) prevalensi hiv pada populasi dewasa.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)	Poin	0	0	0	9.515.640.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.3.2.(a) insiden tuberkulosis (itb) per 100.000 penduduk.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Imunisasi Dasar	Persentase Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	5.355.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia 12-23 Bulan	%	55	57	60	5.305.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah	Persentase Cakupan Imunisasi Lanjutan pada Anak Usia Sekolah Dasar	%	92	93	94	5.305.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Balita	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	96	99	100	52.128.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyakit Tuberkulosis (TB)	Jumlah Kota/Kabupaten yang Mencapai Target Case Detection Rate (CDR) di Layanan TB Sesuai Standar	Kota/Kabupaten	5	6	6	267.410.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyakit Tuberkulosis (TB) Resisten Obat	Jumlah RSUD/RSKD yang Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan/Subrujukan Tuberkulosis Resisten Obat Sesuai Standar	%	14	18	22	198.478.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Mengkampanyekan dan Melaksanakan Minimal 3 Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	40	50	60	187.154.700.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.3.3* kejadian malaria per 1000 orang. Indikator 3.3.3.(a) jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Pemeliharaan Eliminasi Malaria	Annual Parasite Incidence (API) Kasus Malaria Indigenous Sama Dengan 0 (Nol)	Poin	0	0	0	9.515.640.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.3.4.(a) persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis b.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Deteksi Dini Penyakit Hepatitis B	Cakupan Deteksi Dini Hepatitis B bagi Ibu Hamil	%	60	65	70	103.675.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	%	100	100	100	25.080.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.3.5* jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta)								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyakit Kusta	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	%	95	95	95	30.367.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Lebih Dari Sama Dengan 2 per 100.000 Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun	Rate	2	2	2	4.289.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.3.5.(a) jumlah provinsi dengan eliminasi kusta.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam							
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyakit Kusta	Proporsi Penemuan Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat	%	95	95	95	30.367.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.3.5.(b) jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap i).								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Upaya Eradikasi Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) lainnya	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate Lebih Dari Sama Dengan 2 per 100.000 Penduduk Usia Kurang Dari 15 Tahun	Rate	2	2	2	4.289.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)							
Target Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
Indikator 3.4.1.(a) persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Mengkampanyekan dan Melaksanakan Minimal 3 Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	40	50	60	187.154.700.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.4.1.(b) prevalensi tekanan darah tinggi.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Hipertensi	Persentase Penduduk Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	68.920.707.180	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas	Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	214.249.950.300	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.4.1.(c) prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas	Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	214.249.950.300	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.4.2* angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Kematian	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Autopsi Verbal (AV)	%	20	25	30	3.970.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.4.2.(a) jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	94.529.291.900	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Target Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
Indikator 3.5.1.(e) prevalensi penyalahgunaan narkoba.								
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								
Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika	Terlaksananya Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika	Kegiatan	0	0	0	-	APBD	Bakesbangpol
Pencegahan,penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Pusat	Terlaksananya Pencegahan,penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Pusat	Kegiatan	0	0	0	-	APBD	Bakesbangpol
Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Utara	Terlaksananya Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Utara	Kegiatan	0	0	0	-	APBD	Bakesbangpol

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Timur	Terlaksananya Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Timur	Kegiatan	0	0	0	-	APBD	Bakesbangpol
Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Barat	Terlaksananya kegiatan dialog Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Barat	Kegiatan	1	1	1	1.061.283.186	APBD	Bakesbangpol
Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Selatan	Terlaksananya kegiatan dialog Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Selatan	Kegiatan	1	1	1	1.061.283.186	APBD	Bakesbangpol
Dialog Interaktif Pencegahan,penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Pusat	Terlaksananya Pencegahan,penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Pusat	Kegiatan	1	1	1	877.913.380	APBD	Bakesbangpol
Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Utara	Terlaksananya Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Utara	Kegiatan	1	1	1	1.269.170.045	APBD	Bakesbangpol
Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Timur	Terlaksananya Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba di Jakarta Timur	Kegiatan	1	1	1	1.269.170.045	APBD	Bakesbangpol
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengembangan wawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melayani korban NAPZA yang mengikuti kegiatan	Lembaga	14	14	14	56.992.000	APBD	Dinsos
Indikator 3.5.2* konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	Pelaksanaan Evaluasi dan Pengembangan Tata Laksana Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)	%	0	0	0	467.805.000	APBD	Dinkes
Target Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
Indikator 3.7.1* proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi **Indikator 3.7.1.(a) angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (cpr) semua cara pada pasangan usia subur (pus) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.** **Indikator 3.7.1.(b) angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) cara modern** **Indikator 3.7.2* angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/asfr).**								
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
Pembekalan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin	Jumlah pasangan calon pengantin yang mendapatkan pembekalan kesehatan reproduksi	pasangan	0	0	0	50.500.000	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Jalur Formal dan Informal	Jumlah remaja yang paham tentang kesehatan reproduksi	Orang	3000	3000	3000	1.090.703.064	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan	Jumlah media yang digunakan untuk promosi dan KIE	media	4	4	4	190.000.000	APBD	DPPAPP
Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat yang terbina	Kelompok	20	20	20	121.501.380	APBD	DPPAPP
Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana	Jumlah lembaga swasta yang berperan dalam pelayanan KB	lembaga	20	20	20	284.999.187	APBD	DPPAPP
Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembekalan pelayanan KB MKJP	tenaga kesehatan	400	425	450	354.597.245	APBD	DPPAPP
Peningkatan Konseling Kesehatan Reproduksi Keluarga	Jumlah provider fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembekalan konseling kespro	lembaga	130	150	170	394.932.032	APBD	DPPAPP
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi Program Pengendalian Penduduk dan KB Melalui Media Informasi	Jenis media yang digunakan sebagai sarana promosi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	jenis media	4	5	5	2.645.456.677	APBD	DPPAPP
Penyusunan Rancangan Kajian Akademis Ketahanan Keluarga	Jumlah dokumen kajian akademis ketahanan keluarga	dokumen	0	0	0	173.700.000	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelaksanaan Kegiatan Momentum Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	161.274.750	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan KB	bulan	12	12	12	4.207.901.888	APBD	DPPAPP
Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah lembaga faskes yang mendapat pembekalan konseling KB pasca Persalinan dan pasca keguguran	lembaga faskes	194	244	294	611.570.673	APBD	DPPAPP
Pelayanan KB Momentum	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan pada saat kegiatan momentum	kegiatan	4	4	4	1.175.689.562	APBD	DPPAPP
Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB pada kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan	kegiatan	1	1	1	899.092.979	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	2	2	2	6.000.430.071	APBD	DPPAPP
Peningkatan Jejaring Penanganan Isu Kependudukan	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi	lembaga	5	5	5	500.792.696	APBD	DPPAPP
Penguatan Mitra Kerja di Kampung KB	Jumlah mitra kerja Kampung KB	mitra kerja	27	30	32	260.000.000	APBD	DPPAPP
Pembinaan dan Pengendalian Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kampung KB	120	130	140	275.000.000	APBD	DPPAPP
Indikator 3.7.2.(a) total fertility rate (tfr).								
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
Pembekalan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin	Jumlah pasangan calon pengantin yang mendapatkan pembekalan kesehatan reproduksi	pasangan	0	0	0	50.500.000	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Jalur Formal dan Informal	Jumlah remaja yang paham tentang kesehatan reproduksi	Orang	3000	3000	3000	1.090.703.064	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan	Jumlah media yang digunakan untuk promosi dan KIE	media	4	4	4	190.000.000	APBD	DPPAPP
Pembinaan Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja Jalur Pendidikan dan Masyarakat yang terbina	Kelompok	20	20	20	121.501.380	APBD	DPPAPP
Peningkatan Peran Lembaga Swasta dalam Program Keluarga Berencana	Jumlah lembaga swasta yang berperan dalam pelayanan KB	lembaga	20	20	20	284.999.187	APBD	DPPAPP
Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembekalan pelayanan KB MKJP	tenaga kesehatan	400	425	450	354.597.245	APBD	DPPAPP
Peningkatan Konseling Kesehatan Reproduksi Keluarga	Jumlah provider fasilitas kesehatan yang mendapatkan pembekalan konseling kespro	lembaga	130	150	170	394.932.032	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB Era JKN	Jumlah faskes yang terlibat dalam penyiapan peralihan pelayanan KB Era JKN	lembaga	432	476	520	181.060.771	APBD	DPPAPP
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Promosi Program Pengendalian Penduduk dan KB Melalui Media Informasi	Jenis media yang digunakan sebagai sarana promosi Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	jenis media	4	5	5	2.645.456.677	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyusunan Rancangan Kajian Akademis Ketahanan Keluarga	Jumlah dokumen kajian akademis ketahanan keluarga	dokumen	0	0	0	173.700.000	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Kegiatan Momentum Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Keluarga	Jumlah kegiatan ketahanan keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2	2	2	161.274.750	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB	Terlaksananya pelayanan KB	bulan	12	12	12	4.207.901.888	APBD	DPPAPP
Pembekalan Konseling KB Paska Persalinan dan Paska Keguguran kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Jumlah lembaga faskes yang mendapat pembekalan konseling KB pasca Persalinan dan pasca keguguran	lembaga faskes	194	244	294	611.570.673	APBD	DPPAPP
Pelayanan KB Momentum	Jumlah pelayanan KB yang dilaksanakan pada saat kegiatan momentum	kegiatan	4	4	4	1.175.689.562	APBD	DPPAPP
Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB pada kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan	kegiatan	1	1	1	899.092.979	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB dalam kegiatan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)	kegiatan	2	2	2	6.000.430.071	APBD	DPPAPP
Penyediaan dan Pemanfaatan Data Keluarga dan Pemetaan Penduduk	Jumlah keluarga yang terdata	keluarga	2610000	2880000	3120000	988.390.629	APBD	DPPAPP
Pengendalian, analisis dan Validasi Data Pelayanan KB dan Pendataan Keluarga	Pelaksanaan validasi data hasil pendataan keluarga	kegiatan	1	1	1	279.231.449	APBD	DPPAPP
Pelaksanaan Analisis dan Advokasi Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah kajian analisis dampak kependudukan	dokumen	1	1	1	418.500.158	APBD	DPPAPP
Peningkatan Jejaring Penanganan Isu Kependudukan	Jumlah kerjasama dengan perguruan tinggi	lembaga	5	5	5	500.792.696	APBD	DPPAPP
Penguatan Mitra Kerja di Kampung KB	Jumlah mitra kerja Kampung KB	mitra kerja	27	30	32	260.000.000	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembinaan dan Pengendalian Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mendapatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi	Kampung KB	120	130	140	275.000.000	APBD	DPPAPP
Target Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
Indikator 3.8.1.(a) unmet need pelayanan kesehatan.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran	Penduduk	5848139	5906621	5965687	6.489.708.902.644	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Klaim Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terverifikasi	%	100	100	100	742.501.600.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	0	0	0	1.582.282.608.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	0	0	0	100.066.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Indikator 3.8.2* jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. **Indikator 3.8.2.(a) cakupan jaminan kesehatan nasional (jkn).**								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase Klaim Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terverifikasi	%	100	100	100	742.501.600.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Tahun	0	0	0	100.066.000.000	APBD	Dinkes
Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah	Terbayarnya Premi peserta PBI Daerah	Penduduk	0	0	0	1.582.282.608.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah	Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran	Penduduk	5848139	5906621	5965687	6.489.708.902.644	APBD	Dinkes
Target Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.								
Indikator 3.9.3.(a) proporsi kematian akibat keracunan								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Investigasi Penyakit Berpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Rumor Kejadian Luar Biasa (KLB) dan/atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Investigasi Dalam Waktu Kurang Dari atau Sama Dengan 24 Jam	%	100	100	100	6.805.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penanganan Masalah Kesehatan Dalam Kondisi Bencana/Berpotensi Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	100	100	2.260.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Kematian	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Autopsi Verbal (AV)	%	20	25	30	3.970.000.000	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Target Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
Indikator 3.a.1* persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas	Persentase Warga Negara Indonesia Usia 60 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	214.249.950.300	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Penyakit Tidak Menular secara Terpadu (PANDU PTM)	%	50	60	70	277.404.637.528	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Promosi Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD Urusan Kesehatan yang Mengkampanyekan dan Melaksanakan Minimal 3 Indikator Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	40	50	60	187.154.700.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Skrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Penduduk Usia 15-59 Tahun	Persentase Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Diskrining Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100	100	100	880.148.119.238	APBD	Dinkes
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)							
Target Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
Indikator 3.b.1.(a) persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Penyediaan Obat Dan Bahan Kefarmasian	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memiliki Ketersediaan Obat Sesuai Standar	%	96	97	98	1.219.846.545.500	APBD	Dinkes
Target Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
Indikator 3.c.1* kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.								
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
Penatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Sesuai Standar	%	60	70	80	8.691.000.000	APBD	Dinkes
Pemberdayaaan Sumber Daya Manusia (SDM) Urusan Kesehatan	Persentase SKPD/UKPD yang Memiliki Kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM)	%	85	90	90	11.376.917.493.995	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan Layanan Umum Daerah	Persentase SKPD/UKPD BLUD Urusan Kesehatan yang mencapai target Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah (SPM BLUD)	%	100	100	100	12.064.890.932.678	APBD	Dinkes
TUJUAN 4 MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA								
Target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
Indikator 4.1.1* proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir sd/kelas 6, (c) tingkat akhir smp/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.								
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								
Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Kota/Kab	Jumlah orang yang dilayani oleh perpustakaan keliling	orang	611221	730985	874487	29.959.954.995	APBD	Dispusip
Gerakan Pembudayaan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan Tingkat Kota/Kab	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	18	18	18	36.937.974.266	APBD	Dispusip
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Keliling	Terlaksananya Pengadaan Sarana Perpustakaan Keliling	unit	17	17	18	30.276.703.029	APBD	Dispusip
Pengadaan Sarana dan Prasarana Edukasi Perpustakaan	Jumlah alat peraga yang diadakan	Set	90	90	90	4.542.481.119	APBD	Dispusip
Peningkatan Sarana Perpustakaan Digital	Meningkatnya Sarana Perpustakaan Digital	Jenis	4	4	4	14.389.909.704	APBD	Dispusip
Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Provinsi	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	Orang	61122	73098	87448	1.904.825.108	APBD	Dispusip
Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Daerah	Jumlah koleksi perpustakaan konvensional yang disediakan	eksemplar	50000	50000	50000	46.302.368.959	APBD	Dispusip

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, serta Perpustakaan Masyarakat	Jumlah koleksi konvensional yang disediakan	eksemplar	150000	150000	150000	59.179.674.920	APBD	Dispusip
Pengadaan Koleksi Perpustakaan Digital (e-book)	Jumlah koleksi perpustakaan digital (e-book) yang disediakan	copies	5000	5000	5000	2.896.739.095	APBD	Dispusip
Pembinaan Perpustakaan Umum, Sekolah dan Khusus Menuju Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina	Perpustakaan	20	20	20	3.366.350.895	APBD	Dispusip
Pemeliharaan Perangkat Layanan Perpustakaan	Jumlah perangkat layanan perpustakaan yang dipelihara	lokasi	8	8	8	8.126.864.812	APBD	Dispusip
Gerakan Pembudayaan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	kegiatan	3	3	3	10.399.749.251	APBD	Dispusip
Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum	Terselenggaranya Layanan Perpustakaan Umum	lokasi	0	0	0	5.874.231.219	APBD	Dispusip
Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA	Terlaksananya pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan serta Perpustakaan Masyarakat.	eksp.	0	0	0	4.710.211.642	APBD	Dispusip
Pembinaan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan	Jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang dibina	orang	1700	1700	1700	4.724.558.004	APBD	Dispusip
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
Peningkatan kompetensi Pendidik SD	Jumlah Pendidik SD yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	12276	12276	12276	56.186.102.406	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Peningkatan kompetensi Pendidik SMP	Jumlah Pendidik SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	6012	6012	6012	29.023.434.922	APBD	Disdik
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS	Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS yang menerima upah sesuai upah minimum Provinsi	orang	14178	14236	14651	4.806.423.079.985	APBD	Disdik
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN	Jumlah sekolah menyusun Kisi-kisi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, serta menyelenggarakan Tryout Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional	Sekolah	579	579	579	219.203.476	APBD	Disdik
Bedah Kisi-kisi dan Tryout UN & USBN	Rata-rata nilai ujian nasional/ujian sekolah/madrasah berbasis daerah jenjang SMA/MA	poin	75,61	80,29	85	12.730.802.284	APBD	Disdik
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Secara Online	Sekolah yang terakreditasi A	Sekolah	461	697	502	6.069.279.000	APBD	Disdik
Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP	Terwujudnya peran MGMP dalam peningkatan kompetensi, inovasi dan krativitas guru SMP	MGMP	13	13	13	5.060.871.270	APBD	Disdik
Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik dan Sekolah Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah kontingen peserta lomba baik kategori peserta didik maupun sekolah yang akan mewakili Provinsi DKI Jakarta pada lomba tingkat nasional	Kontingen	11	11	11	54.564.307.248	APBD	Disdik
Pembinaan Berkelanjutan Kepada Siswa Melalui Kompetisi/Lomba Jenjang SMP	Jumlah kontingen SMP tingkat provinsi untuk mewakili di tingkat nasional	kontingen	6	6	6	31.776.596.978	APBD	Disdik
Pengembangan Kurikulum SMP	Tersedianya Kurikulum Jenjang SMP	dokumen	13	13	13	8.059.318.340	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penguatan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Jumlah pengawas sekolah yang mengikuti kegiatan penguatan dan pendampingan implementasi kurikulum kepada pengawas sekolah	Pengawas Sekolah	250	100	100	1.846.134.000	APBD	Disdik
Penguatan dan Pengembangan Model Pendidikan Karakter Bagi Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan kepada komunitas sekolah untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik	Sekolah	60	60	70	3.932.620.000	APBD	Disdik
Peningkatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa dan Guru Jenjang SMP	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Karakter bagi SIswa dan Guru Jenjang SMP	orang	1000	1000	1000	11.103.592.500	APBD	Disdik
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(a) persentase sd/mi berakreditasi minimal b.								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Secara Online	Sekolah yang terakreditasi A	Sekolah	461	697	502	6.069.279.000	APBD	Disdik
Penguatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK)	Jumlah kegiatan pembinaan yang ditujukan bagi unsur sekolah (komite, guru, kepala sekolah, gugus,) dan untuk meningkatkan mutu sekolah	Kegiatan	15	15	15	8.274.800.000	APBD	Disdik
Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehab total memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	48	44	34	6.350.519.853.699	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	76	64	60	714.070.120.818	APBD	Disdik
Pengadaaan Perlengkapan Satuan Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	unit	573458	88857	74983	1.201.749.562.147	APBD	Disdik
Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan	Jumlah alat praktik SMK	Program Keahlian	3	3	3	241.032.403.857	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(b) persentase smp/mts berakreditasi minimal b.								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Secara Online	Sekolah yang terakreditasi A	Sekolah	461	697	502	6.069.279.000	APBD	Disdik
Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehab total memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	48	44	34	6.350.519.853.699	APBD	Disdik
Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	76	64	60	714.070.120.818	APBD	Disdik
Pengadaaan Perlengkapan Satuan Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	unit	573458	88857	74983	1.201.749.562.147	APBD	Disdik
Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan	Jumlah alat praktik SMK	Program Keahlian	3	3	3	241.032.403.857	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(c) persentase sma/ma berakreditasi minimal b.								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Secara Online	Sekolah yang terakreditasi A	Sekolah	461	697	502	6.069.279.000	APBD	Disdik
Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang di rehab total memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	48	44	34	6.350.519.853.699	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Rehab Berat Gedung Sekolah di DKI Jakarta	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	76	64	60	714.070.120.818	APBD	Disdik
Pengadaaan Perlengkapan Satuan Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	unit	573458	88857	74983	1.201.749.562.147	APBD	Disdik
Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan	Jumlah alat praktik SMK	Program Keahlian	3	3	3	241.032.403.857	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(d) angka partisipasi kasar (apk) sd/mi/sederajat.								
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
Pengasuhan kepada Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah	Jumlah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	keluarga	1119	1161	1209	719.791.416	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	3.471.031.546.522	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	siswa	5000	5500	6000	1.451.339.963	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	31500	35000	38000	7.197.043.695	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(e) angka partisipasi kasar (apk) smp/mts/sederajat.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
Pengasuhan kepada Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah	Jumlah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	keluarga	1119	1161	1209	719.791.416	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik
Penyedian Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	siswa	305259	309838	314485	1.933.770.776.679	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	31500	35000	38000	7.197.043.695	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(f) angka partisipasi kasar (apk) sma/smk/ma/sederajat.								
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
Pengasuhan kepada Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah	Jumlah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	keluarga	1119	1161	1209	719.791.416	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik (Belanja Tidak Langsung)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	2.390.278.706.050	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	siswa	28255	29991	31835	683.089.253.315	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	298.478.489.093	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	1.176.149.699.238	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	31500	35000	38000	7.197.043.695	APBD	Disdik
Indikator 4.1.1.(g) rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik (Belanja Tidak Langsung)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	3.471.031.546.522	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	2.390.278.706.050	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	siswa	28255	29991	31835	683.089.253.315	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	298.478.489.093	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	1.176.149.699.238	APBD	Disdik
Penyedian Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	siswa	305259	309838	314485	1.933.770.776.679	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	siswa	5000	5500	6000	1.451.339.963	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	31500	35000	38000	7.197.043.695	APBD	Disdik
Target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
Indikator 4.2.2.(a) angka partisipasi kasar (apk) pendidikan anak usia dini (paud).								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang	lembaga	330	330	500	4.851.970.000	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
	terakreditasi sebanyak 1872 lembaga							
Pelaksanaan Pembinaan Berkelanjutan Kepada Peserta Didik, Pendidik, dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas Melalui Kompetisi Berjenjang	Jumlah Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIkmas yang berpartisipasi dalam Kompetensi Berjenjang	peserta	1350	1450	1550	14.187.780.061	APBD	Disdik
Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	Jumlah Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD	paket	1404	1373	1406	54.693.466.976	APBD	Disdik
Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi teknis	orang	5330	6240	7196	29.519.277.139	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (BOP-TKN)	anak	10740	17340	23040	41.319.360.000	APBD	Disdik
Penyelenggaraan PAUD di RPTRA	Jumlah RPTRA yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini	lokasi	130	140	150	9.715.113.587	APBD	Disdik
Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Perlengkapan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Unit	13388	11265	11055	79.131.469.262	APBD	Disdik
Rehab Berat Gedung Satuan Pendidikan PAUD Negeri	Jumlah Gedung Sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	LOKASI	74	50	50	562.700.000.000	APBD	Disdik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP
Target Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
Indikator 4.3.1.(a) angka partisipasi kasar (apk) sma/smk/ma/sederajat.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
Pengasuhan kepada Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah	Jumlah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	keluarga	1119	1161	1209	719.791.416	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik (Belanja Tidak Langsung)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	2.390.278.706.050	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	siswa	28255	29991	31835	683.089.253.315	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	298.478.489.093	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	1.176.149.699.238	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	31500	35000	38000	7.197.043.695	APBD	Disdik
Target Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Indikator 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Komputer Akuntansi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Komputer Akuntansi	orang	80	80	80	947.570.200	APBD	Disnakertrans
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Operator Komputer	orang	160	160	160	1.226.361.405	APBD	Disnakertrans
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Komputer	orang	90	90	90	1.549.702.497	APBD	Disnakertrans
Target Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
Indikator 4.5.1* rasio angka partisipasi murni (apm) perempuan/laki-laki di (1) sd/mi/sederajat; (2) smp/mts/sederajat; (3) sma/smk/ma/sederajat; dan (4) rasio apk perempuan/laki-laki di pt.								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Penerima Kartu Jakarta Pintar yang Lolos Seleksi Perguruan Tinggi Negeri	Jumlah mahasiswa penerima bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Penerima Kartu Jakarta Pintar yang Lolos Seleksi Perguruan Tinggi Negeri	mahasiswa	11000	15000	20000	1.076.364.000.000	APBD	Disdik
Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	Jumlah peserta didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar	siswa	928567	928567	928567	20.713.488.663.000	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Program Paket A, Paket B dan Paket C	siswa	0	0	0	17.723.590.000	APBD	Disdik
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI	siswa	0	0	0	515.089.392.000	APBD	Disdik
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/MA/SMK	siswa	0	0	0	195.563.736.000	APBD	Disdik
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs.	Jumlah siswa penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP/MTs	siswa	0	0	0	234.738.000.000	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	3.471.031.546.522	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	2.390.278.706.050	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	siswa	28255	29991	31835	683.089.253.315	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	298.478.489.093	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	1.176.149.699.238	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyedian Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	siswa	305259	309838	314485	1.933.770.776.679	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	Jumlah SIswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B/Wustha	siswa	0	0	0	408.205.452	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C	siswa	0	0	0	685.442.115	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	siswa	5000	5500	6000	1.451.339.963	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	31500	35000	38000	7.197.043.695	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A, B dan C	orang	0	0	0	1.409.775.263	APBD	Disdik
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/MBD) Program Paket A/Ula	siswa	0	0	0	284.292.171	APBD	Disdik
Target Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
Indikator 4.a.1* proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (wash).								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	peserta didik	0	0	0	944.626.395	APBD	Disdik
Pengadaan Alat Bantu, Alat Peraga dan Peralatan Kantor Bagi Sekolah Inklusi dan SLB Negeri	Jumlah alat bantu, alat peraga dan peralatan penunjang kantor bagi Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus	unit	120	120	120	52.556.910.796	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	Peserta didik	0	0	0	2.318.067.087	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMALB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	peserta didik	0	0	0	1.574.397.651	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana dalam rangka menuntaskan wajib belajar 12 tahun peserta didik berkebutuhan khusus yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	Peserta didik	1920	2688	3456	35.836.992.000	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri	Jumlah sekolah yang menerima alokasi dana untuk digunakan membiayai kegiatan operasional pendidikan sehingga membebaskan peserta didik dari pungutan	peserta didik	0	0	0	16.056.125	APBD	Disdik
Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan	Jumlah alat praktik SMK	Program Keahlian	3	3	3	241.032.403.857	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN)	siswa	827102	839509	852102	3.471.031.546.522	APBD	Disdik
Penyedian Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (BOP-SMPT)	siswa	305259	309838	314485	1.933.770.776.679	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMA)	siswa	123499	125351	127231	2.390.278.706.050	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	Jumlah penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen	siswa	28255	29991	31835	683.089.253.315	APBD	Disdik

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni	siswa	8830	10537	13644	298.478.489.093	APBD	Disdik
Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	Jumlah siswa penerima Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi	siswa	33553	40528	45479	1.176.149.699.238	APBD	Disdik
Target Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
Indikator 4.c.1* persentase guru tk, sd, smp, sma, smk, dan smlb yang bersertifikat pendidik								
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
Pelatihan Pengelola PAUD	Jumlah pengelola PAUD yang mengikuti pelatihan sebanyak 2120 orang	orang	180	210	240	1.007.100.000	APBD	Disdik
Pemetaan Tenaga Pendidik melalui Uji Kompetensi Pendidik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Mengikuti Uji Kompetensi	orang	0	0	0	42.679.700.000	APBD	Disdik
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS	Jumlah Tenaga Pendidik Non PNS yang menerima upah sesuai upah minimum Provinsi	orang	14178	14236	14651	4.806.423.079.985	APBD	Disdik
Peningkatan kompetensi Pendidik SD	Jumlah Pendidik SD yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	12276	12276	12276	56.186.102.406	APBD	Disdik
Peningkatan kompetensi Pendidik SMA	Jumlah Pendidik SMA yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	3502	3502	3502	17.807.235.027	APBD	Disdik
Peningkatan kompetensi Pendidik SMK	Jumlah Pendidik SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	4048	4048	4048	19.895.154.253	APBD	Disdik
Peningkatan kompetensi Pendidik SMP	Jumlah Pendidik SMP yang mengikuti peningkatan kompetensi	orang	6012	6012	6012	29.023.434.922	APBD	Disdik
TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Target Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
Indikator 6.1.1.(a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR								
Pembangunan SPAM Waduk Karian	Jumlah paket Pembangunan SPAM Waduk Karian	paket	0	1	1	2.916.000.000.000	APBD	DSDA
Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Pipa Transmisi Air Minum Wilayah DKI Jakarta - SPAM Jatiluhur I	Jumlah dokumen Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Pipa Transmisi Air Minum Wilayah DKI Jakarta - SPAM Jatiluhur I yang tersedia	Dok	0	1	0	40.000.000.000	APBD	DSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Pengelolaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Jumlah sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola	unit	24	24	24	67.626.467.225	APBD	DSDA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Peningkatan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku	Jumlah lokasi badan air permukaan yang memenuhi kualitas sebagai sumber air baku	Lokasi	1	0	1	80.000.560.120	APBD	DSDA
Indikator 6.1.1.(b) kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Peningkatan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku	Jumlah lokasi badan air permukaan yang memenuhi kualitas sebagai sumber air baku	Lokasi	1	0	1	80.000.560.120	APBD	DSDA
Indikator 6.1.1.(c) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan SPAM Waduk Karian	Jumlah paket Pembangunan SPAM Waduk Karian	paket	0	1	1	2.916.000.000.000	APBD	DSDA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
Pengelolaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Jumlah sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dikelola	unit	24	24	24	67.626.467.225	APBD	DSDA
Target Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
Indikator 6.2.1.(a) proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Penyehatan Lingkungan	Jumlah masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan sanitasi yang baik	KK	395	396	396	451.360.455	APBD	DPPAPP
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	237	267	19.057.000.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Indikator 6.2.1.(b) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Penyehatan Lingkungan	Jumlah masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan sanitasi yang baik	KK	395	396	396	451.360.455	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah dokumen Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Dok	1	0	0	150.000.000.000	APBD	DSDA
Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System	Jumlah Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System yang tersedia	Dok	3	0	0	9.500.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan sistem pengelolaan air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah lokasi untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah Domestik (SPALD)	Lokasi	16	16	15	133.630.063.389	APBD	DSDA
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	2	3	3	7.149.193.104.529	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah Domestik (SPALD) di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah Domestik (SPALD)	lokasi	33	44	55	53.448.750.251	APBD	DSDA
Pengolahan Air Wudhu untuk dimanfaatkan kembali	Jumlah lokasi pengolahan air wudhu	Lokasi	5	5	5	4.500.000.000	APBD	DSDA
Revitalisasi pengolahan Air Limbah domestik di Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi Revitalisasi pengolahan Air Limbah domestik di Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	lokasi	10	10	10	8.750.000.000	APBD	DSDA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	237	267	19.057.000.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
Pembekalan kepada BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS Bagi Pengelola dan Pelaksana Program	Jumlah Kader (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PPKS) yang mendapatkan Pembekalan	kelompok	5	5	5	1.118.923.727	APBD	DPPAPP
Indikator 6.2.1.(c) jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (stbm). **Indikator 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).**								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penatalaksanaan Keluarga Sehat	Proporsi Keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Berkategori Sehat	%	41	44	47	684.000.000	APBD	Dinkes
Penatalaksanaan Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	Persentase Permasalahan Kesehatan yang Diintervensi oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH)	%	50	60	70	684.000.000	APBD	Dinkes
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penatalaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kelurahan	202	237	267	19.057.000.000	APBD	Dinkes
Indikator 6.2.1.(e) jumlah kota/kabupaten yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.								
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Penyehatan Lingkungan	Jumlah masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan sanitasi yang baik	KK	395	396	396	451.360.455	APBD	DPPAPP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah dokumen Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Dok	1	0	0	150.000.000.000	APBD	DSDA
Penilaian Teknis Kelayakan Desain Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Pengendalian Kinerja SPALD di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	unit	100	100	100	1.255.000.000	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System	Jumlah Dokumen Lingkungan Kegiatan Jakarta Sewerage System yang tersedia	Dok	3	0	0	9.500.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan sistem pengelolaan air limbah Domestik (SPALD)	Jumlah lokasi untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah Domestik (SPALD)	Lokasi	16	16	15	133.630.063.389	APBD	DSDA
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	2	3	3	7.149.193.104.529	APBD	DSDA
Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah Domestik (SPALD) di Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah Domestik (SPALD)	lokasi	33	44	55	53.448.750.251	APBD	DSDA
Revitalisasi pengolahan Air Limbah domestik di Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi Revitalisasi pengolahan Air Limbah domestik di Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	lokasi	10	10	10	8.750.000.000	APBD	DSDA
Indikator 6.2.1.(f) proporsi rumah tangga (rt) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah dokumen Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Dok	1	0	0	150.000.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	2	3	3	7.149.193.104.529	APBD	DSDA
Target Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
Indikator 6.3.1.(a) Jumlah kota/kabupaten yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). **Indikator 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.**								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1	Lokasi	0	0	1	733.700.000.000	APBD	DSDA
Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah dokumen Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Dok	1	0	0	150.000.000.000	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Jumlah lokasi Pembangunan Perpipaan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 6	Lokasi	0	0	1	210.372.000.000	APBD	DSDA
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS)	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) yang terbangun	Unit	2	3	3	7.149.193.104.529	APBD	DSDA
Indikator 6.3.2.(a) kualitas air danau.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Peningkatan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku	"Jumlah lokasi badan air permukaan yang memenuhi kualitas sebagai sumber air baku "	Lokasi	1	0	1	80.000.560.120	APBD	DSDA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
Pengawasan Pencemaran Air	Terlaksananya pengawasan pencemaran air limbah	kegiatan usaha	1295	1400	1480	1.441.087.030	APBD	DLH
Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Tahun	1	1	1	32.670.267.802	APBD	DLH
Pengawasan pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	%	45	50	55	1.845.027.194	APBD	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	3.644.528.814	APBD	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Tahun	1	1	1	16.041.639.763	APBD	DLH
Pengendalian Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan	Terkendalinya pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan	Tahun	1	1	1	33.553.878.260	APBD	DLH
Penyiapan Prasarana dan Sarana Pengendalian Pencemaran Air	Kesiapan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air	Tahun	1	1	1	42.635.781.002	APBD	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	wilayah	6	6	6	17.513.415.812	APBD	DLH
Indikator 6.3.2.(b) kualitas air sungai sebagai sumber air baku.								
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								
Pengawasan Pencemaran Air	Terlaksananya pengawasan pencemaran air limbah	kegiatan usaha	1295	1400	1480	1.441.087.030	APBD	DLH
Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	Tahun	1	1	1	32.670.267.802	APBD	DLH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								
Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran/ Perusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan	%	100	100	100	3.644.528.814	APBD	DLH
Pengawasan pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan hidup	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi dokumen lingkungan	%	45	50	55	1.845.027.194	APBD	DLH
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								
Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran air	Tahun	1	1	1	16.041.639.763	APBD	DLH

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengendalian Pencemaran Air dan Kerusakan Lingkungan	Terkendalinya pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan	Tahun	1	1	1	33.553.878.260	APBD	DLH
Penyiapan Prasarana dan Sarana Pengendalian Pencemaran Air	Kesiapan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran air	Tahun	1	1	1	42.635.781.002	APBD	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								
Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	wilayah	6	6	6	17.513.415.812	APBD	DLH
Target Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
Indikator 6.4.1.(a) pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.								
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								
Pemantauan penurunan tanah menggunakan sistem pengukuran GPS Geodetik	Jumlah Lokasi Pemantauan Penurunan Tanah	Lokasi Pemantauan	175	200	225	3.288.831.152	APBD	DSDA
Pembuatan Peta konservasi air tanah detail	Jumlah Peta konservasi air tanah detail	peta	1	0	0	1.404.810.000	APBD	DSDA
Pembangunan Sumur Pantau	Jumlah sumur pantau terbangun	Unit	21	21	22	40.010.614.644	APBD	DSDA
Pembangunan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah dengan Sistem Ekstensometer	Jumlah Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah dengan Sistem Ekstensometer	Unit	1	1	0	16.411.868.369	APBD	DSDA
Pengadaan Material dan Peralatan Penunjang Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah material dan peralatan penunjang pemantauan pemanfaatan air tanah	Unit	550	675	675	24.618.146.025	APBD	DSDA
Pemeliharaan Sumur Pantau	Jumlah Sumur Pantau Terpelihara	Unit	16	37	58	571.783.080	APBD	DSDA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelaksanaan audit penggunaan air tanah	Jumlah dokumen audit penggunaan air tanah	Dokumen	1400	0	1579	2.334.563.031	APBD	DSDA
Pengembangan sistem data informasi geologi dan air tanah	Jumlah sistem data informasi geologi dan air tanah	Sistem	1	0	1	1.519.466.141	APBD	DSDA
Pemeliharaan Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah dengan Sistem Ekstensometer	Jumlah Stasiun Pemantauan Penurunan Tanah dengan Sistem Ekstensometer yang dipelihara	Unit	4	5	5	1.228.392.936	APBD	DSDA
Indikator 6.4.1.(b) insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.								
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN								
Pelaksanaan audit penggunaan air tanah	Jumlah dokumen audit penggunaan air tanah	Dokumen	1400	0	1579	2.334.563.031	APBD	DSDA
Target Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
Indikator 6.5.1.(a) jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (rpdast) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw).								
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								
Penyusunan Kebijakan di Bidang Kehutanan	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Kehutanan yang tersusun	dokumen	1	1	1	800.000.000	APBD	Distamhut
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Polder	Jumlah Dokumen Evaluasi Sistem Drainase Kawasan Polder yang tersedia	Dok	4	5	5	18.000.000.000	APBD	DSDA
Perencanaan Sarana dan Prasarana Sistem Pengendali Banjir	Jumlah dokumen perencanaan sarana dan prasarana sistem pengendali banjir yang tersedia	Dok	12	12	12	22.151.170.921	APBD	DSDA
6.5.1.(c) jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.6.5.1.(a) jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (rpdast) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (rtrw).								
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
Diklat Manajemen Proyek	Jumlah peserta diklat manajemen proyek	orang	120	120	120	697.348.796	APBD	BPSDM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pembangunan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi	Bulan	12	12	12	9.979.203.550	APBD	DSDA
Pengelolaan Helpdesk Command Center Pengaduan Masyarakat, Monitoring Banjir, dan Pengelolaan Data dan Informasi	Waktu pelaksanaan Pengelolaan Helpdesk Command Center Pengaduan Masyarakat, Monitoring Banjir, dan Pengelolaan Data dan Informasi	Bulan	12	12	12	12.609.524.414	APBD	DSDA
Pengelolaan Layanan Dedicated Link, GPS Tracker, dan GPRS	Waktu pelaksanaan pengelolaan layanan dedicated link, GPS, tracker dan GPRS	Bulan	12	12	12	12.674.419.361	APBD	DSDA
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Waktu pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi	Bulan	12	12	12	12.051.386.665	APBD	DSDA
Target Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
Indikator 6.6.1.(a) jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Peningkatan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku	Jumlah lokasi badan air permukaan yang memenuhi kualitas sebagai sumber air baku	Lokasi	1	0	1	80.000.560.120	APBD	DSDA
Indikator 6.6.1.(b) jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.								
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
Pemeliharaan waduk/situ/embung dan kelengkapannya.	Volume pemeliharaan waduk/ situ/embung dan kelengkapannya	m3	610829	612518	794232	71.876.900.306	APBD	DSDA
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Indikator 8.1.1* laju pertumbuhan pdb per kapita								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pendamping	Orang	176	176	176	85.399.806.560	APBD	DPPKUKM
Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	40000	40000	40000	88.675.065.704	APBD	DPPKUKM
Kegiatan Bazar UKM	Jumlah UKM yang mengikuti bazar	UKM	1400	1400	1400	104.160.929.056	APBD	DPPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Warung	Jumlah Warung yang mendapatkan sarana dan prasarana	Warung	440	440	440	7.404.780.859	APBD	DPPKUKM
Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UKM binaan yang terampil berwirausaha	UKM	100	100	100	3.178.678.263	APBD	DPPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana UKM bagi Warga Rusun	Jumlah UKM Warga Rusun	UKM	50	50	50	2.274.897.158	APBD	DPPKUKM
Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL	Jumlah sarana dagang PKL yang tersedia	unit	600	600	600	7.920.000.000	APBD	DPPKUKM
Diklat Perpajakan bagi UKM	Jumlah UKM binaan yang terampil perpajakan	UKM	100	100	100	282.408.000	APBD	DPPKUKM
Bimtek Design Kemasan Produk UKM	Jumlah UKM yang terampil mendesign kemasan produk	UKM	50	50	50	301.152.703	APBD	DPPKUKM
Bimtek Sablon dan Design Grafis Bagi UKM	Jumlah UKM yang terampil sablon dan design grafis	UKM	50	50	50	345.574.096	APBD	DPPKUKM
Bimtek Marketing Waralaba Berbasis IT	Jumlah UKM yang terampil marketing waralaba berbasis IT	UKM	50	50	50	225.738.548	APBD	DPPKUKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
Pameran Promosi Dalam Kota	Jumlah Pemasaran UKM Dalam Kota	kali	12	12	12	946.812.000	APBD	DPPKUKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Jumlah Pasar yang diawasi	Pasar	0	0	0	57.554.200	APBD	DPPKUKM
Pengawasan Kemetrologian Alat UTTP (UKur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah Pasar yang diawasi	Pasar	20	22	24	85.100.016	APBD	DPPKUKM
Pengawasan Produk SNI Wajib	Jumlah Pasar yang diawasi	Pasar	0	0	0	144.192.180	APBD	DPPKUKM
Indikator 8.1.1.(a) pdb per kapita								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pendamping	Orang	176	176	176	85.399.806.560	APBD	DPPKUKM
Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	40000	40000	40000	88.675.065.704	APBD	DPPKUKM
Kegiatan Bazar UKM	Jumlah UKM yang mengikuti bazar	UKM	1400	1400	1400	104.160.929.056	APBD	DPPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana Warung	Jumlah Warung yang mendapatkan sarana dan prasarana	Warung	440	440	440	7.404.780.859	APBD	DPPKUKM
Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UKM binaan yang terampil berwirausaha	UKM	100	100	100	3.178.678.263	APBD	DPPKUKM
Pengadaan Sarana dan Prasarana UKM bagi Warga Rusun	Jumlah UKM Warga Rusun	UKM	50	50	50	2.274.897.158	APBD	DPPKUKM
Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL	Jumlah sarana dagang PKL yang tersedia	unit	600	600	600	7.920.000.000	APBD	DPPKUKM
Diklat Perpajakan bagi UKM	Jumlah UKM binaan yang terampil perpajakan	UKM	100	100	100	282.408.000	APBD	DPPKUKM
Bimtek Design Kemasan Produk UKM	Jumlah UKM yang terampil mendesign kemasan produk	UKM	50	50	50	301.152.703	APBD	DPPKUKM
Bimtek Sablon dan Design Grafis Bagi UKM	Jumlah UKM yang terampil sablon dan design grafis	UKM	50	50	50	345.574.096	APBD	DPPKUKM

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Bimtek Marketing Waralaba Berbasis IT	Jumlah UKM yang terampil marketing waralaba berbasis IT	UKM	50	50	50	225.738.548	APBD	DPPKUKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
Partisipasi gelar produk IKM	Jumlah Gelar Produk IKM diikuti	Gelar Produk	1	1	1	3.493.337.328	APBD	DPPKUKM
Pendampingan bantuan pemenuhan regulasi, promosi, Informasi pasar, dan Pemasaran bagi Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi dalami pemenuhan regulasi, bantuan promosi, Informasi pasar, dan Pemasaran bagi Industri	IKM	200	200	200	19.099.800.000	APBD	DPPKUKM
Pendampingan dan Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah pemenang GKM IKM tingkat Provinsi	IKM	1	1	1	2.808.008.254	APBD	DPPKUKM
Pendampingan industri kreatif	jumlah industri kreatif	Industri	200	200	200	5.785.095.275	APBD	DPPKUKM
Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan	Jumlah IKM dengan kemasan yang menarik dan baik	IKM	1000	1000	1000	10.511.344.500	APBD	DPPKUKM
Pendampingan Pendaftaran Fasilitasi Sertifikasi Merek	Jumlah IKM yang terdaftar Merk nya	IKM	1000	1000	1000	7.103.600.000	APBD	DPPKUKM
Pendampingan Pendaftaran Sertfikasi Halal	Jumlah IKM yang bersertifikat Halal	IKM	1000	1000	1000	17.180.220.000	APBD	DPPKUKM
Penumbuhan wirausaha industri baru	Jumlah Wira Usaha Baru Industri	Wirausaha	5560	5560	5560	161.567.033.600	APBD	DPPKUKM
Penyediaan sarana Produksi/promosi IKM	Jumlah Sarana Produksi/Promosi IKM	Unit	1	0	0	25.500.000.000	APBD	DPPKUKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
Pameran Promosi Dalam Kota	Jumlah Pemasaran UKM Dalam Kota	kali	12	12	12	946.812.000	APBD	DPPKUKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Jumlah Pasar yang diawasi	Pasar	0	0	0	57.554.200	APBD	DPPKUKM
Pengawasan Kemetrologian Alat UTTP (UKur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jumlah Pasar yang diawasi	Pasar	20	22	24	85.100.016	APBD	DPPKUKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								
Pengawasan dan pengendalian industri	Jumlah industri yang diawasi	Industri	30	30	30	1.200.000.000	APBD	DPPKUKM
Pengawasan dan pengendalian Industri makanan dan minuman	Persentase Produk Industri makanan dan minuman yang diawasi	%	42,52	56,26	70	11.793.810.400	APBD	DPPKUKM
Target Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
Indikator 8.2.1* laju pertumbuhan pdb per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan pdb riil per orang bekerja per tahun								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Bimbingan dan Konsultasi Produktivitas	Jumlah pelaksanaan bimbingan dan konsultasi produktivitas	kali	12	12	12	1.926.159.000	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las 3G-4G/F1/F2	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las 3G-4G/F1/F2	Orang	200	200	200	23.160.169.875	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las Listrik	orang	70	70	70	1.222.757.595	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Listrik	orang	40	40	40	382.609.920	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Operator Komputer	orang	160	160	160	1.226.361.405	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Boga	orang	120	120	120	1.655.380.080	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Busana	orang	160	160	160	1.760.506.043	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Rias	orang	120	120	120	1.369.059.480	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Komputer	orang	90	90	90	1.549.702.497	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Pendingin	orang	160	160	160	2.229.362.202	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Sepeda Motor	orang	200	200	200	4.052.803.422	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Administrasi Kantor	Orang	80	80	80	1.206.196.220	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Bahasa Inggris	orang	360	360	360	4.614.260.059	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang bahasa jepang	orang	220	220	220	2.767.177.898	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Desain Grafis	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Desain Grafis	Orang	280	280	280	3.455.761.410	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Elektronika/ Industri	Orang	180	180	180	2.499.153.563	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Komputer Akuntansi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Komputer Akuntansi	orang	80	80	80	947.570.200	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Bawah Air	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Las Bawah Air	Orang	8	8	8	3.255.920.500	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang las listrik	orang	200	200	200	4.836.054.245	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW	Orang	32	32	32	6.738.775.094	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Orang	32	32	32	9.473.442.397	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW	Orang	16	16	16	4.765.455.850	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Orang	32	32	32	7.864.758.704	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GMAW	orang	32	32	32	5.653.374.134	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW	orang	32	32	32	6.128.393.444	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	orang	32	32	32	7.710.477.297	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW	orang	32	32	32	5.954.346.920	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW/GMAW	orang	0	0	0	2.280.931.574	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Welding Inspector	orang	10	10	10	940.686.810	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Industri	orang	60	60	60	1.238.129.062	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Penerangan	orang	140	140	140	2.025.983.416	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang operator komputer	orang	400	400	400	3.807.321.250	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Kendaraan Ringan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif kendaraan ringan	orang	380	380	380	6.961.195.401	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif sepeda motor	orang	460	460	460	6.121.680.361	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Boga	orang	400	400	400	6.148.612.406	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Busana	orang	480	480	480	7.090.102.112	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Graha	orang	380	380	380	5.235.901.989	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Rias	orang	220	220	220	3.099.185.946	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnologi Mekanik (CNC)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang tehnologi mekanik (CNC)	orang	60	60	60	1.441.212.216	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tekmek/ Mesin Bubut	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tekmek/ Mesin Bubut	orang	200	200	200	4.050.842.602	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Komputer	orang	380	380	380	5.654.864.192	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Lemari Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Lemari Pendingin	Orang	60	60	60	930.644.308	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin (Tata Udara)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin (Tata Udara)	Orang	40	40	40	947.245.042	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin/AC	orang	400	400	400	6.615.624.805	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Ketrampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Gambar Konstruksi (CAD)	Orang	120	120	120	1.346.662.520	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan peningkatan Produktivitas	Jumlah orang yang terampil dalam bidang peningkatan produktivitas	Orang	1015	1015	1015	10.135.442.700	APBD	Disnakertransgi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Pelatihan Mengemudi SIM A	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih mengemudi untuk mendapatkan SIM A	orang	1900	1900	1900	25.155.481.750	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Satuan Pengamanan	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih untuk satuan pengaman	orang	530	530	530	14.128.315.191	APBD	Disnakertransgi
Target Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
Indikator 8.3.1* proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin **Indikator 8.3.1.(a) persentase tenaga kerja formal**								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las 3G-4G/F1/F2	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las 3G-4G/F1/F2	Orang	200	200	200	23.160.169.875	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las Listrik	orang	70	70	70	1.222.757.595	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Listrik	orang	40	40	40	382.609.920	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Operator Komputer	orang	160	160	160	1.226.361.405	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Boga	orang	120	120	120	1.655.380.080	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Busana	orang	160	160	160	1.760.506.043	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Rias	orang	120	120	120	1.369.059.480	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Komputer	orang	90	90	90	1.549.702.497	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Pendingin	orang	160	160	160	2.229.362.202	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Sepeda Motor	orang	200	200	200	4.052.803.422	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Administrasi Kantor	Orang	80	80	80	1.206.196.220	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Bahasa Inggris	orang	360	360	360	4.614.260.059	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang bahasa jepang	orang	220	220	220	2.767.177.898	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Desain Grafis	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Desain Grafis	Orang	280	280	280	3.455.761.410	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Elektronika/ Industri	Orang	180	180	180	2.499.153.563	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Komputer Akuntansi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Komputer Akuntansi	orang	80	80	80	947.570.200	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Bawah Air	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Las Bawah Air	Orang	8	8	8	3.255.920.500	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang las listrik	orang	200	200	200	4.836.054.245	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW	Orang	32	32	32	6.738.775.094	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Orang	32	32	32	9.473.442.397	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW	Orang	16	16	16	4.765.455.850	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Orang	32	32	32	7.864.758.704	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GMAW	orang	32	32	32	5.653.374.134	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW	orang	32	32	32	6.128.393.444	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	orang	32	32	32	7.710.477.297	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW	orang	32	32	32	5.954.346.920	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW/GMAW	orang	0	0	0	2.280.931.574	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Welding Inspector	orang	10	10	10	940.686.810	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Industri	orang	60	60	60	1.238.129.062	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Penerangan	orang	140	140	140	2.025.983.416	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang operator komputer	orang	400	400	400	3.807.321.250	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Kendaraan Ringan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif kendaraan ringan	orang	380	380	380	6.961.195.401	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif sepeda motor	orang	460	460	460	6.121.680.361	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Boga	orang	400	400	400	6.148.612.406	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Busana	orang	480	480	480	7.090.102.112	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Graha	orang	380	380	380	5.235.901.989	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Rias	orang	220	220	220	3.099.185.946	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnologi Mekanik (CNC)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang tehnologi mekanik (CNC)	orang	60	60	60	1.441.212.216	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tekmek/ Mesin Bubut	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tekmek/ Mesin Bubut	orang	200	200	200	4.050.842.602	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Komputer	orang	380	380	380	5.654.864.192	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Lemari Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Lemari Pendingin	Orang	60	60	60	930.644.308	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin (Tata Udara)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin (Tata Udara)	Orang	40	40	40	947.245.042	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin/AC	orang	400	400	400	6.615.624.805	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Ketrampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Gambar Konstruksi (CAD)	Orang	120	120	120	1.346.662.520	APBD	Disnakertransgi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Pelatihan Mengemudi SIM A	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih mengemudi untuk mendapatkan SIM A	orang	1900	1900	1900	25.155.481.750	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Satuan Pengamanan	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih untuk satuan pengaman	orang	530	530	530	14.128.315.191	APBD	Disnakertransgi
Indikator 8.3.1.(b) persentase tenaga kerja informal sektor pertanian								
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
Pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya ikan yang tersedia sebanyak 43 jenis	Jenis	45	50	55	37.456.811.373	APBD	DKPKP
Pembinaan budidaya ikan konsumsi, ikan hias dan rumput laut	Jumlah kelompok yang memahami tentang standard produksi ikan konsumsi.	kelompok	55	55	70	4.234.458.960	APBD	DKPKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah pengadaan Sarana Penangkapan Ikan bantuan kepada nelayan	Jenis	8	8	9	13.999.017.100	APBD	DKPKP
Pembinaan kelompok usaha nelayan bersama	Jumlah kelompok binaan usaha nelayan bersama	Kelompok	50	50	50	234.693.923	APBD	DKPKP
Bimbingan teknis perikanan tangkap, perikanan budidaya dan mutu hasil perikanan	Jumlah bimbingan teknis mengenai perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan mutu hasil perikanan.	Kelompok	25	0	25	1.949.520.852	APBD	DKPKP
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pengadaan Sarana Pasca Panen Produk Segar dan Sarana Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah kelompok yang menerima bantuan sarana pengolahan hasil pertanian	kelompok	20	20	20	1.972.425.000	APBD	DKPKP
Indikator 8.3.1.(c) persentase akses umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	40000	40000	40000	88.675.065.704	APBD	DPPKUKM
Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pendamping	Orang	176	176	176	85.399.806.560	APBD	DPPKUKM
Target Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
Indikator 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja								
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteran Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang paham dalam bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteran Pekerja	Orang	1230	1230	1230	1.417.604.200	APBD	Disnakertransgi
Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengupahan Prov. DKI Jakarta	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengupahan Prov. DKI Jakarta	kali	12	12	12	871.808.200	APBD	Disnakertransgi
Peningkatan Peran dan Fungsi LKS Tripartit	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi/pembinaan mengenai peningkatan Peran dan Fungsi LKS Tripartit	kali	12	12	12	2.478.670.600	APBD	Disnakertransgi
Indikator 8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. **Indikator 8.5.2.(a) persentase setengah pengangguran**								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las 3G-4G/F1/F2	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las 3G-4G/F1/F2	Orang	200	200	200	23.160.169.875	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las Listrik	orang	70	70	70	1.222.757.595	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Listrik	orang	40	40	40	382.609.920	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Operator Komputer	orang	160	160	160	1.226.361.405	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Boga	orang	120	120	120	1.655.380.080	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Busana	orang	160	160	160	1.760.506.043	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Rias	orang	120	120	120	1.369.059.480	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Komputer	orang	90	90	90	1.549.702.497	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Pendingin	orang	160	160	160	2.229.362.202	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Sepeda Motor	orang	200	200	200	4.052.803.422	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Administrasi Kantor	Orang	80	80	80	1.206.196.220	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Bahasa Inggris	orang	360	360	360	4.614.260.059	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang bahasa jepang	orang	220	220	220	2.767.177.898	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Desain Grafis	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Desain Grafis	Orang	280	280	280	3.455.761.410	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Elektronika/ Industri	Orang	180	180	180	2.499.153.563	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Komputer Akuntansi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Komputer Akuntansi	orang	80	80	80	947.570.200	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Bawah Air	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Las Bawah Air	Orang	8	8	8	3.255.920.500	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang las listrik	orang	200	200	200	4.836.054.245	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW	Orang	32	32	32	6.738.775.094	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Orang	32	32	32	9.473.442.397	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW	Orang	16	16	16	4.765.455.850	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Orang	32	32	32	7.864.758.704	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GMAW	orang	32	32	32	5.653.374.134	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW	orang	32	32	32	6.128.393.444	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	orang	32	32	32	7.710.477.297	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW	orang	32	32	32	5.954.346.920	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW/GMAW	orang	0	0	0	2.280.931.574	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Welding Inspector	orang	10	10	10	940.686.810	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Industri	orang	60	60	60	1.238.129.062	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Penerangan	orang	140	140	140	2.025.983.416	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang operator komputer	orang	400	400	400	3.807.321.250	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Kendaraan Ringan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif kendaraan ringan	orang	380	380	380	6.961.195.401	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif sepeda motor	orang	460	460	460	6.121.680.361	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Boga	orang	400	400	400	6.148.612.406	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Busana	orang	480	480	480	7.090.102.112	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Graha	orang	380	380	380	5.235.901.989	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Rias	orang	220	220	220	3.099.185.946	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnologi Mekanik (CNC)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang tehnologi mekanik (CNC)	orang	60	60	60	1.441.212.216	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tekmek/ Mesin Bubut	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tekmek/ Mesin Bubut	orang	200	200	200	4.050.842.602	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Komputer	orang	380	380	380	5.654.864.192	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Lemari Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Lemari Pendingin	Orang	60	60	60	930.644.308	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin (Tata Udara)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin (Tata Udara)	Orang	40	40	40	947.245.042	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin/AC	orang	400	400	400	6.615.624.805	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Ketrampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Gambar Konstruksi (CAD)	Orang	120	120	120	1.346.662.520	APBD	Disnakertransgi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Pelatihan Mengemudi SIM A	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih mengemudi untuk mendapatkan SIM A	orang	1900	1900	1900	25.155.481.750	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Satuan Pengamanan	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih untuk satuan pengaman	orang	530	530	530	14.128.315.191	APBD	Disnakertransgi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah petugas pelayanan penempatan tenaga kerja yang berkualitas	orang	50	50	50	40.293.660	APBD	Disnakertransgi
Target Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
Indikator 8.6.1* persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (neet)								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las 3G-4G/F1/F2	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las 3G-4G/F1/F2	Orang	200	200	200	23.160.169.875	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Las Listrik	orang	70	70	70	1.222.757.595	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Listrik	orang	40	40	40	382.609.920	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Operator Komputer	orang	160	160	160	1.226.361.405	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Boga	orang	120	120	120	1.655.380.080	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Busana	orang	160	160	160	1.760.506.043	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Tata Rias	orang	120	120	120	1.369.059.480	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Komputer	orang	90	90	90	1.549.702.497	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Pendingin	orang	160	160	160	2.229.362.202	APBD	Disnakertransgi
Mobile Training Unit (MTU) Kejuruan Teknik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dengan menggunakan Mobile Training Unit (MTU) dalam bidang Teknik Sepeda Motor	orang	200	200	200	4.052.803.422	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Administrasi Kantor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Administrasi Kantor	Orang	80	80	80	1.206.196.220	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Inggris	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Bahasa Inggris	orang	360	360	360	4.614.260.059	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Bahasa Jepang	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang bahasa jepang	orang	220	220	220	2.767.177.898	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Desain Grafis	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Desain Grafis	Orang	280	280	280	3.455.761.410	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Elektronika/ Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Elektronika/ Industri	Orang	180	180	180	2.499.153.563	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Komputer Akuntansi	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Komputer Akuntansi	orang	80	80	80	947.570.200	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Bawah Air	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Las Bawah Air	Orang	8	8	8	3.255.920.500	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Listrik	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang las listrik	orang	200	200	200	4.836.054.245	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW	Orang	32	32	32	6.738.775.094	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G GTAW/SMAW	Orang	32	32	32	9.473.442.397	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW	Orang	16	16	16	4.765.455.850	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW	Orang	32	32	32	7.864.758.704	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GMAW	orang	32	32	32	5.653.374.134	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW	orang	32	32	32	6.128.393.444	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G GTAW/SMAW	orang	32	32	32	7.710.477.297	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las plat 3G-4G SMAW	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las plat 3G-4G SMAW	orang	32	32	32	5.954.346.920	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Welding Inspector	Jumlah tenaga kerja yang terampil dalam bidang Las Welding Inspector	orang	10	10	10	940.686.810	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Industri	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Industri	orang	60	60	60	1.238.129.062	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Listrik Penerangan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Listrik Penerangan	orang	140	140	140	2.025.983.416	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Operator Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang operator komputer	orang	400	400	400	3.807.321.250	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Kendaraan Ringan	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif kendaraan ringan	orang	380	380	380	6.961.195.401	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Otomotif Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang otomotif sepeda motor	orang	460	460	460	6.121.680.361	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Boga	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Boga	orang	400	400	400	6.148.612.406	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Busana	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Busana	orang	480	480	480	7.090.102.112	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Graha	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Graha	orang	380	380	380	5.235.901.989	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tata Rias	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tata Rias	orang	220	220	220	3.099.185.946	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tehnologi Mekanik (CNC)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang tehnologi mekanik (CNC)	orang	60	60	60	1.441.212.216	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Tekmek/ Mesin Bubut	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Tekmek/ Mesin Bubut	orang	200	200	200	4.050.842.602	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Komputer	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Komputer	orang	380	380	380	5.654.864.192	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Lemari Pendingin	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Lemari Pendingin	Orang	60	60	60	930.644.308	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin (Tata Udara)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin (Tata Udara)	Orang	40	40	40	947.245.042	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknik Pendingin/AC	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Teknik Pendingin/AC	orang	400	400	400	6.615.624.805	APBD	Disnakertransgi

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Pelatihan Ketrampilan Kerja Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih dalam bidang Gambar Konstruksi (CAD)	Orang	120	120	120	1.346.662.520	APBD	Disnakertransgi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
Pelatihan Mengemudi SIM A	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih mengemudi untuk mendapatkan SIM A	orang	1900	1900	1900	25.155.481.750	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan Satuan Pengamanan	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih untuk satuan pengaman	orang	530	530	530	14.128.315.191	APBD	Disnakertransgi
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								
Pengasuhan kepada Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah	Jumlah pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	keluarga	1119	1161	1209	719.791.416	APBD	DPPAPP
Target Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
Indikator 8.8.1.(a) jumlah perusahaan yang menerapkan norma k3								
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								
Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah orang yang paham tentang Norma Ketenagakerjaan	orang	1200	1200	1200	903.310.650	APBD	Disnakertransgi
Peningkatan Pelaksanaan Norma K3	Jumlah orang yang paham tentang Norma K3	Orang	360	360	360	341.610.500	APBD	Disnakertransgi
Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Higene Industri Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Jumlah orang yang terampil dalam bidang Higene Industri Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	orang	710	710	710	2.355.098.434	APBD	Disnakertransgi
Pelayanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	kali	4	4	4	3.309.629.865	APBD	Disnakertransgi
Target Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Indikator 8.9.1* proporsi kontribusi pariwisata terhadap pdb **Indikator 8.9.1.(a) jumlah wisatawan mancanegara** **Indikator 8.9.1.(b) jumlah kunjungan wisatawan nusantara** **Indikator 8.9.1.(c) jumlah devisa sektor pariwisata**								
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA								
Festival Seni Budaya di Ruang Publik	Jumlah Wisatawan yang mengikuti acara Festival	Orang	250000	250000	250000	38.154.764.995	APBD	Disparekraf
Pengadaan Bahan Promosi dan Informasi Pariwisata	Jumlah Sarana / Bahan / Promosi yang disediakan / dikelola	Jenis	9	9	9	58.251.905.175	APBD	Disparekraf
Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Untuk Wisatawan Mancanegara	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Promosi dan publikasi Pariwisata	Kali	10	10	10	44.322.857.955	APBD	Disparekraf
Keikutsertaan kegiatan pariwisata dan kebudayaan	Jumlah Kegiatan Partisipasi dan Apresiasi Seni Budaya yang diikuti / diselenggarakan	Orang	3000	3000	3000	13.505.331.680	APBD	Disparekraf
Pemilihan Abang dan None di Jakarta	Jumlah abang none yang terpilih	pasang	18	18	18	15.899.114.455	APBD	Disparekraf
Pemberdayaan Abang dan None Jakarta	waktu pelaksanaan pemberdayaan abang dan none Jakarta	bulan	12	12	12	14.790.192.285	APBD	Disparekraf
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
Pergelaran Seni Budaya di Ruang Publik	Jumlah penyelenggaraan pergelaran seni budaya yang diselenggarakan	Kali	14	14	14	37.597.509.305	APBD	Disparekraf
Pengembangan Destinasi Wisata Baru di Jakarta	Jumlah taman budaya yang dibangun	gedung	1	0	0	30.250.000.000	APBD	Disparekraf
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL								
Pameran Seni Budaya	Jumlah pameran seni budaya yang diselenggarakan	kali	6	6	6	31.961.259.720	APBD	Disparekraf
Pengelolaan dan Pengembangan Seni Budaya	Jumlah Peserta yang ikut dalam kegiatan	Orang	5000	5000	5000	2.154.375.000	APBD	Disparekraf
Indikator 8.9.2* jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja								

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
Pembinaan Industri Pariwisata	Jumlah industri pariwisata yang dibina dan diawasi.	Industri	2000	2100	2200	6.288.478.130	APBD	Disparekraf
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								
Peningkatan Manajemen dan Wawasan Kepariwisataan	Persentase yang sudah mengikuti Kegiatan Peningkatan Manajemen Kepariwisataan	%	20	20	20	6.053.493.500	APBD	Disparekraf
Pelatihan Tenaga Kerja Industri Pariwisata	Jumlah tenaga kerja industri pariwisata yang dilatih	orang	559	614	676	26.757.961.110	APBD	Disparekraf
Target Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
Indikator 8.10.1* jumlah kantor bank dan atm per 100.000 jumlah orang dewasa								
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah	bulan	12	12	12	29.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Indikator 8.10.1.(a) rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum)								
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan dan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan dan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	173.250.000	APBD	Biro Perekonomian
Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Pemantauan Harga Pangan Strategis di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	75.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran pada SKPD Bidang Perekonomian	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran pada SKPD Bidang Perekonomian	bulan	12	12	12	55.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah	bulan	12	12	12	29.500.000	APBD	Biro Perekonomian

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	43.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	29.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	173.250.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	29.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Transmigrasi di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	29.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perdagangan di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	93.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perindustrian di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	24.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Energi di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Energi di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	24.500.000	APBD	Biro Perekonomian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta	bulan	12	12	12	47.500.000	APBD	Biro Perekonomian
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
Koordinasi Peningkatan Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Waktu Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah	bulan	12	12	12	169.500.000	APBD	Biro Perekonomian

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3) 2020	2021	2022	Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (4)	Sumber Pendanaan (5)	Instansi Pelaksana (6)
Penyusunan Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	Jumlah Kajian Aktivitas Bidang Ekonomi	kajian	6	6	6	507.600.000	APBD	Biro Perekonomian
Indikator 8.10.1.(b) proporsi kredit umkm terhadap total kredit								
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
Pembinaan Kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	40000	40000	40000	88.675.065.704	APBD	DPPKUKM
Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan	Jumlah pendamping	Orang	176	176	176	85.399.806.560	APBD	DPPKUKM

Lampiran 14. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non Pemerintah (Form D3)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
Indikator 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
Pertanian Perkotaan									
Pertanian Perkotaan		rumah tangga	1000	1000	1000		1. Tahun 2018-2019 bersumber dari Ford Foundation (I) 2. Tahun 2020-2022 belum tersedia (III)	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP
Pendampingan individu untuk usaha pertanian		Jumlah rumah tangga	694	995			Yayasan KARINA	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP
Pendampingan individu untuk usaha pertanian		Jumlah petani perempuan	50	100			Yayasan KARINA	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP
Bank Sampah dan Usaha Bersama Simpan Pinjam									
Bank Sampah		Jumlah rumah tangga nasabah bank sampah	694	995			Yayasan KARINA	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP
Usaha Bersama Simpan Pinjam		Jumlah rumah tangga anggota UBSP	694	995			Yayasan KARINA	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP
Bank Sampah		Jumlah nasabah Bank Sampah perempuan	694	995			Yayasan KARINA	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Usaha Bersama Simpan Pinjam		Jumlah anggota UBSP perempuan	694	995			Yayasan KARINA	Kelurahan Marunda	Platform MURIA dan DKPKP
Pendampingan Wirausaha									
Pendampingan Bisnis	Jumlah Rumah Tangga yang mengalami peningkatan pendapatan	Rumah Tangga	229	244	259	11.794,397 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	11 Desa Berdaya Di Wilayah DKI Jakarta	Rumah Zakat
Pelatihan keterampilan	Jumlah orang yang mendapatkan Pelatihan	Orang	229	244	259		Donasi Program Nasional	11 Desa Berdaya Di Wilayah DKI Jakarta	Rumah Zakat
Pemberian Modal dan Sarana Usaha	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan modal atau sarana usaha	Rumah Tangga	229	244	259		Donasi Program Nasional	11 Desa Berdaya Di Wilayah DKI Jakarta	Rumah Zakat
Target Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
Indikator 1.3.1.(b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan									
Jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan bagi pekerja rumahan									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pekerja rumahan dapat mengakses Jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)	- mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan daerah tentang pengakuan secara hukum bahwa pekerja rumahan adalah pekerja - Program akses Jaminan sosial bagi pekerja rumahan	Orang	200				MAMPU bekerjasama dengan Pemerintah Daerah		MAMPU bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
Indikator 1.3.1.(c) persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.									
Program Asessment bagi peserta didik di sekolah - sekolah inkulsi / reguler di 6 wilayah Propinsi DKI Jakarta	Mengidentifikasi, mendeteksi peserta didik yang membutuhkan pelayanan khusus agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.	Peserta didik di sekolah - sekolah inklusi / reguler yang diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus	0,5	0,75	100%	250	Belum tersedia	- Marunda, Jakarta Utara - Kramat Jati & Kampung Rambutan, Jakarta Timur - Cipayung Ciracas, Jakarta Timur	YPAC Jakarta
PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN MENTAL									
Traning Of Traninner Al-Quran Braille	Para Tuna Netra Muslim yang tinggal di Wilayah DKI Jakarta	Orang	30	35	40	288	Belum tersedia	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Dai dan Khatib	Seluruh Anggota ITMI Jakarta yang berpotensi menjadi Khatib dan Dai	Orang	15	20	25	140	Lembaga Zakat Nasional dan Daerah, Anggaran Pemerintah (KEMENAG) (III)	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
Bimbingan Belajar Bahasa Arab dan Inggris	60% dari anggota ITMI DKI Jakarta	%	20	20	20	160	Belum tersedia	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
PENYULUHAN DAN KAMPANYE KEPEDULIAN									
Safari Masjid	Seluruh Masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta	masjid	12	12	12	28	Zakat, INFAQ dan Shadaqoh Perorangan (III)	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
Promosi Dai dan Khatib Tuna Netra	50% dari Dai Tuna Netra dapat mengisi kegiatan di Masjid, Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam lainnya	%	10	15	15	12	Zakat, INFAQ dan Shadaqoh Perorangan (III)	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
KESEJAHTERAAN SOSIAL									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Penggalangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf	0.1% Penduduk Jakarta menitipkan ZISWAF nya ke ITMI Jakarta	%	30	35	40	16	Hasil penghimpunan Zakat, INFAQ dan Shodaqoh (III)	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
Beasiswa bagi Tuna Netra dan Anak dari Keluarga Tuna Netra	70% Anggota ITMI DKI Jakarta	%	30 orang @Rp.750.000	35 orang @Rp.1.000.000	40 orang @Rp.1.200 .000	118	Lembaga Zakat Nasional, Unit Pengumpul Zakat Perusahaan, CSR (III)	di Sekitar Wilayah DKI Jakarta	Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) DKI Jakarta
Pelatihan Kewirausahaan Komunitas Disabilitas	0,7		1	1	1	300	Belum tersedia	Jakarta Creative Hub dan Hotel	Portadin DKI Jakarta
Workshop Parent Support Development	0,8		2	2	2	600	Belum tersedia	Hotel	Portadin DKI Jakarta
Lomba Kreativitas Seni Anak Disabilitas se-DKI Jakarta	0,9		-	1	-	1.400	Belum tersedia	TMII	Portadin DKI Jakarta
REHABILITASI									
Pelatihan Orientasi dan Mobilitas bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang dilatih orientasi dan mobilitas	Orang/Individu	10	10	10	90	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Baca-Tulis Braille bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang dilatih Baca-Tulis Braille	Orang/Individu	10	10	10	75	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
PENDIDIKAN									
Tutorial Mata Pelajaran dengan Strategi Pembelajaran Khusus bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti tutorial	Orang/Individu	30	30	30	216	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Kursus Membaca Al-Qur'an Metode IQRO' bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti Kursus Membaca Al-Qur'an Metode IQRO'	Orang/Individu	20	20	20	180	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Kursus Bahasa Inggris bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti Kursus Bahasa Inggris	Orang/Individu	30	30	30	216	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Kursus Komputer Bicara bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti Kursus Komputer Bicara	Orang/Individu	50	50	50	360	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Kursus Dasar Pemrograman Komputer bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti Kursus Dasar Pemrograman Komputer	Orang/Individu	10	10	10	180	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Kursus Musik bagi Tunanetra (Keyboard dan Gitar)	Jumlah tunanetra yang mengikuti Kursus Musik (Keyboard dan Gitar)	Orang/Individu	30	30	30	270	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Kursus Memasak bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti Kursus Memasak	Orang/Individu	30	30	30	45	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Diskusi Dua Bulanan bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mengikuti Diskusi Dua Bulanan	Orang/Individu	40	40	40	15	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Produksi Buku Braille	Jumlah buku Braille yang diproduksi	Volume (Judul Buku)	1.500 volume (100 judul)	1.500 volume (100 judul)	1.500 volume (100 judul)	1.250	2018 CT Foundation: I, 2019--2022: III	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Produksi Buku Audio Digital	Jumlah buku audio digital yang diproduksi	Compact Disk (CD)	6.600 copy CD (150 judul buku)	6.600 copy CD (150 judul buku)	6.600 copy CD (150 judul buku)	750	2018 ONNET (Overbrook Nippon Network on Educational Technology): I, 2019--2022: III	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Produksi Buku Elektronik (Versi E-Pub)	Jumlah buku elektronik (versi e-pub) yang diproduksi	Judul Buku	250	250	250	250	2018 Bank Mandiri: I, 2019--2022: III	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Layanan Perpustakaan bagi Tunanetra	Jumlah tunanetra yang mendapatkan layanan perpustakaan	Orang/Individu	250	250	250	120	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
LAYANAN BAGI TUNANETRA GANDA									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Layanan Asesmen Psikologis	Jumlah tunanetra ganda yang mendapatkan layanan asesmen psikologis	Orang/Individu	25	25	25	112,5	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Layanan Fisioterapi	Jumlah tunanetra ganda yang mengikuti layanan fisioterapi	Orang/Individu	15	15	15	360	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Layanan Terapi Kognisi	Jumlah tunanetra ganda yang mengikuti layanan terapi kognisi	Orang/Individu	5	5	5	240	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Layanan Terapi Wicara	Jumlah tunanetra ganda yang mengikuti layanan terapi wicara	Orang/Individu	10	10	10	480	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Peningkatan Peran Orang Tua	Jumlah orang tua dari tunanetra ganda yang mengikuti kegiatan peningkatan peran orang tua	Orang/Individu	25	25	25	100	Swadaya masyarakat (2018: I, 2019--2022: III)	Lebak Bulus, Jakarta Selatan	Yayasan Mitra Netra
Disabilitas Mandiri									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Program Peningkatan Kapasitas Hard Skill dan Soft Skill bagi orang dengan disabilitas yang berorientasi kerja	600 orang dengan disabilitas tersebar di 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif di Propinsi DKI Jakarta dapat mengikuti program peningkatan hardskill dan softskill yang berorientasi kerja	orang	600	600	600	1,6	Belum tersedia	5 Kota dan 1 Kabupaten di Propinsi DKI Jakarta	YDMI dan Mitra
Program Start Up Wirausaha bagi orang dengan disabilitas	300 orang dengan disabilitas di Provinsi DKI Jakarta yang terseleksi dapat mengikuti program start up wirausaha bagi orang dengan disabilitas	orang	300	300	300	1,2	Belum tersedia	5 Kota dan 1 Kabupaten di Propinsi DKI Jakarta	YDMI dan Mitra
Pendampingan dan Fasilitasi									
Membentuk Inkubator Wirausaha bagi Orang dengan Disabilitas	Tersedianya inkubator wirausaha yang mendampingi dan memfasilitasi wirausaha bagi orang dengan disabilitas untuk dapat mandiri	unit	6	6	6	6	Belum tersedia	5 Kota dan 1 Kabupaten di Propinsi DKI Jakarta	YDMI dan Mitra

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Adanya lembaga penjamin kredit bagi orang dengan disabilitas yang berwirausaha	Tersedianya lembaga penjamin pinjaman bagi orang dengan disabilitas yang berwirausaha untuk meningkatkan volume usahanya	unit	6	6	6	12	Belum tersedia	5 Kota dan 1 Kabupaten di Propinsi DKI Jakarta	YDMI dan Mitra
Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus									
Pelatihan Kompetensi Pendidik Pendidikan Inklusi	Jumlah guru di DKI Jakarta yang memiliki kompetensi dalam menangani pembelajaran anak didik berkebutuhan khusus	%	35	40	50	2.700	hibah perusahaan (diusulkan)	Jakarta Pusat	Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus
Layanan Intervensi terapi Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan terapi dan belajar	%	15	15	15	1.500	sumbangan individu (tersedia)	Jakarta Pusat	Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus
Gerakan Kepedulian terhadap Hak Anak Berkebutuhan Khusus									
Seminar dan workshop bagi orangtua	Jumlah orangtua yang mengerti kondisi anak yang memiliki kondisi disabilitas	%	50	50	50	100	hibah perusahaan (diusulkan)	Jakarta Pusat	Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus
Gerakan bermain keluarga dan komunitas	Anak-anak berkebutuhan khusus mendapat kesempatan bermain dengan keluarga dan masyarakat luas	%	100	100	100	500	hibah perusahaan (diusulkan)	Jakarta Pusat	Yayasan Indonesia Peduli Anak Berkebutuhan Khusus

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
Indikator 1.4.1.(a) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
Klinik Pratama RBG									
Layanan Bersalin	Jumlah ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	257	261	265	9.636,6 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Indikator 1.4.1.(b) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Klinik Pratama RBG									
Layanan Imunisasi	Jumlah anak yang menerima imunisasi di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	1188	1231	1273	9.636,6 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Indikator 1.4.1.(c) angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (cpr) semua cara pada pasangan usia subur (pus) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
Klinik Pratama RBG									
Layanan KB	Jumlah orang yang menggunakan KB di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	1668	1725	1782	9.636,6 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Indikator 1.4.1.(d) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.									
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pembangunan Pipa Distribusi dan Retikulasi di Wilayah Barat dan Utara	Cakupan Pelayanan	%				150.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta - Jakarta Utara, Jakarta Barat	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Penyediaan air bersih Rusunawa	Cakupan Pelayanan	%				15.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Panen Air Hujan									
Panen air hujan		Jumlah rumah tangga	36	50			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA
Indikator 1.4.1.(e) persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.									
Studi Kelayakan IPAL Komunal	Jumlah dokumen studi kelayakan IPAL Komunal yang dihasilkan	dokumen	-	-	-	-	GIZ (I)	RPTRA Cambella, Kelurahan Kamal Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Jakarta Berketahanan bekerjasama dengan Dinas SDA dan Bappeda
Indikator 1.4.1.(g) angka partisipasi murni (apm) sd/mi/sederajat									
Beasiswa									
Beasiswa Anak Juara	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	1508	1569	1629	22.587,744 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	49 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Beasiswa Sekolah Juara	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD Juara Rumah Zakat	Orang	121	142	164	13.206 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	4 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Ekosistem Beasiswa Tunasmuda									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Assessment tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	70	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Kemping tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	217,89	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Beasiswa tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	720	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Mentoring Tahsin tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	150	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Kupas Tuntas UN		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Try Out		anak	30	30	30	4,5	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bimbingan Belajar Dhuafa		anak	30	30	30	84	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Seminar Kewirausahaan		anak	30	30	30	30	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Teknisi AC		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Barber Shop		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Salon		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Photography		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Marketing		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Ekosistem Sekolah Digital Inovasi Tunasmuda									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Kelas Intensif Programming		orang	30	30	30	300	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Kelas Intensif Desain Grafis		orang	30	30	30	257	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Kelas Intensif Al-Quran (Tahfizh)		orang	30	30	30	206,6	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Field Trip Qur'ani		orang	60	60	60	6	sponsorship, donasi, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Pendidikan Non-Formal dan Kepemudaan									
Paket Edukasi Pelajar Indonesia (Peduli)		anak	1000	1000	1000	300	donatur, infaq, sedekah, zakat	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bimbel Cendekia Madani		yatim	300	300	300	350	investor, sponsorship, instansi, zakat, infaq	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Graphology; A Training for Great Teachers and Super Parents		orang	900	900	900	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Tunasmuda Run 5K; Run for Charity		peserta	3000	3000	3000	160,5	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Obrolan Asyik dan Santai Generasi Masa Kini (OASIS)		pelajar SMP-SMA	1200	1200	1200	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Cibubur	Yayasan Tunasmuda Care
School of Parents; Make A Bright Future from Home		orangtua	1200	1200	1200	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Expo; Young Performance for Charity		pelajar	1000	1000	1000	145	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Student Leadership Training		pelajar	300	300	300	135	sponsorship, donasi, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Journalistic Course		pelajar	300	300	300	151	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Try Out		pelajar	1000	1000	1000	155,5	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Seminar Belajar Luar Negeri		pelajar	300	300	300	146	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Training for Trainers		pendamping pendidikan	300	300	300	151	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Trauma Healing		anak	1000	1000	1000	446	donasi, zakat, infaq sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Tunasmuda Tanggap Bencana		pelajar	300	300	300	125	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Goes to School		pelajar	3000	3000	3000	130	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bingkisan Berkah Tunasmuda		guru	600	600	600	186	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Indikator 1.4.1.(h) angka partisipasi murni (apm) smp/mts/sederajat									
Ekosistem Beasiswa Tunasmuda									
Assessment tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	70	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Kemping tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	217,89	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Beasiswa tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	720	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Mentoring Tahsin tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	150	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Kupas Tuntas UN		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Try Out		anak	30	30	30	4,5	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bimbingan Belajar Dhuafa		anak	30	30	30	84	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Seminar Kewirausahaan		anak	30	30	30	30	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Teknisi AC		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Barber Shop		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Salon		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Photography		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Marketing		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Ekosistem Sekolah Digital Inovasi Tunasmuda									
Kelas Intensif Programming		orang	30	30	30	300	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Kelas Intensif Desain Grafis		orang	30	30	30	257	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Kelas Intensif Al-Quran (Tahfizh)		orang	30	30	30	206,6	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Field Trip Qur'ani		orang	60	60	60	6	sponsorship, donasi, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Pendidikan Non-Formal dan Kepemudaan									
Paket Edukasi Pelajar Indonesia (Peduli)		anak	1000	1000	1000	300	donatur, infaq, sedekah, zakat	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bimbel Cendekia Madani		yatim	300	300	300	350	investor, sponsorship, instansi, zakat, infaq	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Graphology; A Training for Great Teachers and Super Parents		orang	900	900	900	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Run 5K; Run for Charity		peserta	3000	3000	3000	160,5	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Obrolan Asyik dan Santai Generasi Masa Kini (OASIS)		pelajar SMP-SMA	1200	1200	1200	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Cibubur	Yayasan Tunasmuda Care
School of Parents; Make A Bright Future from Home		orangtua	1200	1200	1200	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Expo; Young Performance for Charity		pelajar	1000	1000	1000	145	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Student Leadership Training		pelajar	300	300	300	135	sponsorship, donasi, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Journalistic Course		pelajar	300	300	300	151	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Try Out		pelajar	1000	1000	1000	155,5	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Seminar Belajar Luar Negeri		pelajar	300	300	300	146	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Training for Trainers		pendamping pendidikan	300	300	300	151	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Trauma Healing		anak	1000	1000	1000	446	donasi, zakat, infaq sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Tanggap Bencana		pelajar	300	300	300	125	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Goes to School		pelajar	3000	3000	3000	130	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bingkisan Berkah Tunasmuda		guru	600	600	600	186	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Indikator 1.4.1.(i) angka partisipasi murni (apm) sma/ma/sederajat									
Ekosistem Beasiswa Tunasmuda									
Assessment tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	70	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Kemping tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	217,89	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Beasiswa tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	720	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Mentoring Tahsin tunasmuda Prestasi		anak	200	200	200	150	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Kupas Tuntas UN		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Try Out		anak	30	30	30	4,5	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bimbingan Belajar Dhuafa		anak	30	30	30	84	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Seminar Kewirausahaan		anak	30	30	30	30	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Teknisi AC		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Barber Shop		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Salon		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Photography		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Pelatihan Marketing		anak	30	30	30	9	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Ekosistem Sekolah Digital Inovasi Tunasmuda									
Kelas Intensif Programming		orang	30	30	30	300	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Kelas Intensif Desain Grafis		orang	30	30	30	257	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Kelas Intensif Al-Quran (Tahfizh)		orang	30	30	30	206,6	investasi, donasi, sponsorship, zakat, wakaf, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Field Trip Qur'ani		orang	60	60	60	6	sponsorship, donasi, infak, sedekah	Jakarta Timur	
Pendidikan Non-Formal dan Kepemudaan									
Paket Edukasi Pelajar Indonesia (Peduli)		anak	1000	1000	1000	300	donatur, infaq, sedekah, zakat	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Bimbel Cendekia Madani		yatim	300	300	300	350	investor, sponsorship, instansi, zakat, infaq	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Graphology; A Training for Great Teachers and Super Parents		orang	900	900	900	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Run 5K; Run for Charity		peserta	3000	3000	3000	160,5	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Obrolan Asyik dan Santai Generasi Masa Kini (OASIS)		pelajar SMP-SMA	1200	1200	1200	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Cibubur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
School of Parents; Make A Bright Future from Home		orangtua	1200	1200	1200	101,25	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Expo; Young Performance for Charity		pelajar	1000	1000	1000	145	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Student Leadership Training		pelajar	300	300	300	135	sponsorship, donasi, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Journalistic Course		pelajar	300	300	300	151	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Try Out		pelajar	1000	1000	1000	155,5	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Seminar Belajar Luar Negeri		pelajar	300	300	300	146	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Training for Trainers		pendamping pendidikan	300	300	300	151	sponsorship, donasi, HTM	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Trauma Healing		anak	1000	1000	1000	446	donasi, zakat, infaq sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Tanggap Bencana		pelajar	300	300	300	125	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Tunasmuda Goes to School		pelajar	3000	3000	3000	130	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Bingkisan Berkah Tunasmuda		guru	600	600	600	186	sponsorship, donasi, zakat, infaq, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Target Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana									
Indikator 1.5.1* jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang									
Pengabdian Masyarakat									
pelayanan kesehatan dilokasi bencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan dilokasi bencana	pos kesehatan	40	60	80	110	swadaya	5 kota	PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Indikator 1.5.1.(a) jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah									
Pengelolaan Resiko Bencana									
Sosialisasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di Instansi Pemerintah, Sekolah, dan Organisasi masyarakat.	Terselenggaranya sosialisasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di Sekolah.	Orang	300	300	300	Tahun 2018 = 228 Tahun 2019 = 152	- Tahun 2018-2019 = APBN - Tahun 2020-2022 = Belum tersedia	- Tahun 2018-2019 (Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta meliputi Jabodetabek dan Sukabumi)	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) untuk Instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang terkait.	Terselenggaranya pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) untuk Instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang terkait.	Angkatan	2	2	2	Tahun 2018 = 600 Tahun 2019 = 439,695	- Tahun 2018-2019 = APBN - Tahun 2020-2022 = Belum tersedia	- Tahun 2018-2019 (Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta meliputi Jabodetabek dan Sukabumi)	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA
Latihan gabungan Pencarian dan Pertolongan dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang terkait serta memiliki kompetensi dalam bidang SAR.	Terselenggaranya Latihan gabungan Pencarian dan Pertolongan dengan Instansi dan Organisasi yang terkait serta memiliki kompetensi dalam bidang SAR.	Dokumen	1	1	1	Tahun 2018 = 250 Tahun 2019 = 150	- Tahun 2018-2019 = APBN - Tahun 2020-2022 = Belum tersedia	- Tahun 2018-2019 (Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta meliputi Jabodetabek dan Sukabumi)	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat	Terlaksananya Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat.	Dokumen	-	-	-	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Reviu Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat.	Terlaksananya Reviu Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat.	Dokumen	1	1	1	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pendataan dan Pemetaan sebaran Potensi SAR dan daerah rawan Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, serta Bencana alam.	Tersedianya data dan pemetaan sebaran Potensi SAR dan daerah rawan Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, serta Bencana alam.	Dokumen	-	-	-	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Pembentukan unit siaga potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR).	Terlaksananya pembentukan unit siaga potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR).	Unit	2	1	1	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Sosialisasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di Instansi Pemerintah, Sekolah, dan Organisasi masyarakat.	Terselenggaranya sosialisasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di Sekolah.	Orang	200	200	200	Tahun 2018 = 228 Tahun 2019 = 152	- Tahun 2018-2019 = APBN - Tahun 2020-2022 = Belum tersedia	- Tahun 2018-2019 (Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta meliputi Jabodetabek dan Sukabumi)	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA
Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) untuk Instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang terkait.	Terselenggaranya pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR) untuk Instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang terkait.	Angkatan	2	2	2	Tahun 2018 = 600 Tahun 2019 = 439,695	- Tahun 2018-2019 = APBN - Tahun 2020-2022 = Belum tersedia	- Tahun 2018-2019 (Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta meliputi Jabodetabek dan Sukabumi)	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA
Latihan gabungan Pencarian dan Pertolongan dengan Instansi Pemerintah dan Organisasi masyarakat yang terkait serta memiliki kompetensi dalam bidang SAR.	Terselenggaranya Latihan gabungan Pencarian dan Pertolongan dengan Instansi dan Organisasi yang terkait serta memiliki kompetensi dalam bidang SAR.	Dokumen	1	1	1	Tahun 2018 = 250 Tahun 2019 = 150	- Tahun 2018-2019 = APBN - Tahun 2020-2022 = Belum tersedia	- Tahun 2018-2019 (Wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta meliputi Jabodetabe	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
								k dan Sukabumi)	
Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat	Terlaksananya Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat.	Dokumen	-	-	-	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Reviu Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat.	Terlaksananya Reviu Rencana Kontijensi Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, dan Bencana alam pada tahap tanggap darurat.	Dokumen	1	1	1	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Pendataan dan Pemetaan sebaran Potensi SAR dan daerah rawan Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, serta Bencana alam.	Tersedianya data dan pemetaan sebaran Potensi SAR dan daerah rawan Kecelakaan, Kondisi Membahayakan Manusia, serta Bencana alam.	Dokumen	-	-	-	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pembentukan unit siaga potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR).	Terlaksananya pembentukan unit siaga potensi Pencarian dan Pertolongan (SAR).	Unit	2	1	1	-	Belum tersedia	DKI Jakarta dan Kabupaten Kep. Seribu	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAKARTA BESERTA PEMDA DKI JAKARTA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
Indikator 1.5.1.(b) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial									
Pengabdian Masyarakat									
pelayanan kesehatan dilokasi bencana	Terlaksananya pelayanan kesehatan dilokasi bencana	pos kesehatan	40	60	80	110	swadaya	5 kota	PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
Indikator 2.1.1* prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) **Indikator 2.1.2.(a) proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari**									
Pertanian Perkotaan									
Pertanian Perkotaan untuk Rumah Tangga		Jumlah rumah tangga	694	995			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA, DKPKP
Pertanian Perkotaan untuk Rumah Tangga		Jumlah rumah tangga	694	995			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA
Budidaya Hortikultur dan Pendampingan Usaha Pertanian									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pendampingan kelompok tani untuk budidaya hortikultur		Jumlah kelompok tani	21	26			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA, DKPKP
Indikator 2.1.1.(a) prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Siaga Posyandu									
Penyuluhan dan Pendampingan	Jumlah Orang tua balita yang mengikuti penyuluhan	Orang	240	243	245	6.484 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Pelatihan Kader	Jumlah kader yang mengikuti pelatihan	Orang	17	17	18		Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan	Orang	240	243	245		Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Target Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
Indikator 2.2.1* prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita									
Pendampingan Posyandu									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Siaga Posyandu									
Penyuluhan dan Pendampingan	Jumlah Orang tua balita yang mengikuti penyuluhan	Orang	240	243	245	6.484 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Pelatihan Kader	Jumlah kader yang mengikuti pelatihan	Orang	17	17	18		Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan	Orang	240	243	245		Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Indikator 2.2.2* prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
Target Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
Indikator 3.1.1* angka kematian ibu (aki).									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Peningkatan Kualitas Pelayanan Praktik Mandiri Bidan (1321)	Penjaminan Mutu Kualitas Pelayanan Praktik Mandiri Bidan (442)	%	45, 25 %	58, 50 %	75, 60 %	80	I. Anggota Bidan Delima II. Masih diusulkan	Cabang Masing-masing 5 Wilayah	IBI Provinsi DKI Jakarta
Target Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.									
Indikator 3.2.1* angka kematian balita (akba) per 1000 kelahiran hidup. **Indikator 3.2.2* angka kematian neonatal (akn) per 1000 kelahiran hidup.**									
Pendampingan Posyandu									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Siaga Posyandu									
Penyuluhan dan Pendampingan	Jumlah Orang tua balita yang mengikuti penyuluhan	Orang	239,8231	242,5442	245,2653	6.484 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Pelatihan Kader	Jumlah kader yang mengikuti pelatihan	Orang	16,51701	17,19728	17,87755		Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan	Orang	239,8231	242,5442	245,2653		Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Indikator 3.2.2* angka kematian neonatal (akn) per 1000 kelahiran hidup.									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Indikator 3.2.2.(a) angka kematian bayi (akb) per 1000 kelahiran hidup.									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Peningkatan Kualitas Pelayanan Praktik Mandiri Bidan (1321)	Penjaminan Mutu Kualitas Pelayanan Praktik Mandiri Bidan (442)	25,6 %	45, 25 %	58, 50 %	75, 60 %	80	I. Anggota Bidan Delima II. Masih diusulkan	Cabang Masing-masing 5 Wilayah	IBI Provinsi DKI Jakarta
Indikator 3.2.2.(b) persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.									
Pendampingan Posyandu									
Pendampingan Posyandu	Untuk peningkatan pencakupan pelayanan di posyandu	1 bulan 1 kali setiap posyandu	586 posyandu	586 posyandu	586 posyandu	5.274	Swadaya, Bantuan yang tidak mengikat	5 Wilayah Kota Administrasi	Masyarakat, Pendampingan / Dibina oleh Bidan Praktik Mandiri (IBI)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelayanan Posyandu	terlaksananya kegiatan posyandu	Posyandu	30	40	50	71	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Target Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
Indikator 3.3.1.(a) prevalensi hiv pada populasi dewasa.									
Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA)									
Pendampingan ibu hamil yang baru tau status HIV dan odha perempuan yang hamil	Terwujudnya generasi bebas HIV, terlahirnya semua anak negatif HIV, dari ibu yang positif HIV.	Bayi	100	125	50	123,6189	Global Fund	DKI Jakarta	IPPI
Target Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
Indikator 3.4.1.(a) persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.									
Smoke Free Jakarta (Kawasan Dilarang Merokok)									
Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap Kawasan Dilarang Merokok	Persentase tempat yang patuh terhadap Kawasan Dilarang Merokok	%	III	III	III	50	Hibah Luar Negeri dan Dana Pajak Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Biro Kesejahtraan Sosial)
Partnership for Healthy Cities (Pelarangan Iklan Rokok pada Media Luar Ruang (Outdoor) dan Media Dalam Ruang (Indoor)									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap pelarangan iklan rokok pada media luar ruang	Persetase tempat yang patuh menegakkan pelarangan iklan rokok pada media luar ruang	%	III	III	III	50	Hibah Luar Negeri dan Dana Pajak Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Biro Kesejahtraan Sosial)
Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap pelarangan iklan rokok pada media dalam ruang	Persetase tempat yang patuh menegakkan pelarangan iklan rokok pada media dalam ruang	%	III	III	III	50	Hibah Luar Negeri dan Dana Pajak Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Biro Kesejahtraan Sosial)
Aliansi PTM (Penyakit Tidak Menular)									
Memperkuat komitmen pembuat kebijakan/organisasi profesi untuk mendukung pencegahan penyakit tidak menular ditingkat nasional dan sub-nasional	Jumlah pembuat kebjakan/organisasi profesi yang mendukung pencegahan penyakit tidak menular ditingkat nasional dan sub-nasional	Jumlah	III	III	III	25	Hibah Luar Negeri	Indonesia	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Organisasi Profesi di Indonesia
Meningkatkan dukungan masyarakat dalam pencegahan penyakit tidak menular	Tersedia Website dan leaflet tentang pencegahan penyakit tidak menular	Ketersediaan	III	III	III	25	Hibah Luar Negeri	Indonesia	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Organisasi Profesi di Indonesia

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Target Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
Indikator 3.7.1.(a) angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (cpr) semua cara pada pasangan usia subur (pus) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.									
Klinik Pratama RBG									
Layanan KB	Jumlah orang yang menggunakan KB di fasilitas kesehatan Rumah Zakat	Orang	1668	1725	1782	9.636,6 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	2 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Target Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
Indikator 3.8.1.(a) unmet need pelayanan kesehatan.									
Pendampingan RPTRA									
Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	RPTRA	20	30	40	52,5	swadaya	5 kota	PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Pendidikan Kesehatan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan	RPTRA	20	30	40	52,5	swadaya	5 kota	PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Pendampingan Posbindu Lansia									
Pelayanan Posbindu Lansia	terlaksananya kegiatan posbindu lansia	Posbindu	10	20	30	35,5	swadaya	5 kota	DPP PPNI, PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Pengabdian Masyarakat									
Pendidikan Kesehatan bagi masyarakat	meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan	lokasi	40	60	80	110	swadaya	5 kota	PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Satu RW satu Perawat									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
pelayanan kesehatan di RW untuk promotif, preventif dan pelayanan keperawatan paliatif	Terlaksananya pelayanan kesehatan setiap RW di Jakarta untuk promotif, preventif dan pelayanan keperawatan paliatif di rumah	RW	350	400	600	3.806	Pengusulan CSR / pendanaan lain	5 kota (sasaran RW yang ada pertawat tinggal)	PPNI DKI, PPNI KOTA, PPNI KOMISARIAT
Target Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
Indikator 3.a.1* persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.									
Smoke Free Jakarta (Kawasan Dilarang Merokok)									
Melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap Kawasan Dilarang Merokok	Persentase tempat yang patuh terhadap Kawasan Dilarang Merokok	%	III	III	III	50	Hibah Luar Negeri dan Dana Pajak Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Biro Kesejahtraan Sosial)
Partnership for Healthy Cities (Pelarangan Iklan Rokok pada Media Luar Ruang (Outdoor) dan Media Dalam Ruang (Indoor)									
Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap pelarangan iklan rokok pada media luar ruang	Persetase tempat yang patuh menegakkan pelarangan iklan rokok pada media luar ruang	%	III	III	III	50	Hibah Luar Negeri dan Dana Pajak Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Biro Kesejahtraan Sosial)

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap pelarangan iklan rokok pada media dalam ruang	Persetase tempat yang patuh menegakkan pelarangan iklan rokok pada media dalam ruang	%	III	III	III	50	Hibah Luar Negeri dan Dana Pajak Rokok Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Biro Kesejahtraan Sosial)
Aliansi PTM (Penyakit Tidak Menular)									
Memperkuat komitmen pembuat kebijakan/organisasi profesi untuk mendukung pencegahan penyakit tidak menular ditingkat nasional dan sub-nasional	Jumlah pembuat kebjakan/organisasi profesi yang mendukung pencegahan penyakit tidak menular ditingkat nasional dan sub-nasional	Jumlah	III	III	III	25	Hibah Luar Negeri	Indonesia	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Organisasi Profesi di Indonesia
Meningkatkan dukungan masyarakat dalam pencegahan penyakit tidak menular	Tersedia Website dan leaflet tentang pencegahan penyakit tidak menular	Ketersediaan	III	III	III	25	Hibah Luar Negeri	Indonesia	Smoke Jakarta bekerjasama dengan Organisasi Profesi di Indonesia
TUJUAN 4 MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
Target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
Indikator 4.1.1* proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir sd/kelas 6, (c) tingkat akhir smp/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.									
Ekosistem Literasi Tunasmuda									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Gerobak Keliling Literasi (GLITER)		gerobak	10	10	10	487	investasi, donasi, zakat, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Komunitas Literasi Masjid		masjid	20	20	20	363	investasi, donasi, zakat, infak, sedekah	Jakarta Timur	Yayasan Tunasmuda Care
Kedai Pustaka Tunasmuda Belajar (Kautsar)		kedai	1	1	1	500	investasi, donasi, zakat, wakaf, infak, sedekah	Cibubur	Yayasan Tunasmuda Care
Indikator 4.1.1.(d) angka partisipasi kasar (apk) sd/mi/sederajat.									
Beasiswa									
Beasiswa Anak Juara	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang mendapatkan beasiswa	Orang	1508	1569	1629	22.587,744 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	49 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Beasiswa Sekolah Juara	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD Juara Rumah Zakat	Orang	121	142	164	13.206 (secara Nasional)	Donasi Program Nasional	4 Desa Berdaya Rumah Zakat	Rumah Zakat
Target Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
Indikator 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).									
Pemetaan digital menggunakan Ushahidi, OSM dan Drupal									
Pemetaan digital menggunakan Ushahidi, OSM dan Drupal		Jumlah orang dewasa muda	15	0			Yayasan KARINA	Marunda dan Jatiasih	Platform MURIA
Citizen Journalism		Jumlah orang dewasa muda	5	25			Yayasan KARINA	Marunda dan Jatiasih	Platform MURIA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Target Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
Indikator 4.a.1* proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (wash).									
Program Asessment bagi peserta didik di sekolah - sekolah inkulsi / reguler di 6 wilayah Propinsi DKI Jakarta	Mengidentifikasi, mendeteksi peserta didik yang membutuhkan pelayanan khusus agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.	Peserta didik di sekolah - sekolah inklusi / reguler yang diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus	0,5	0,75	100%	250	Belum tersedia	- Marunda, Jakarta Utara - Kramat Jati & Kampung Rambutan, Jakarta Timur - Cipayung Ciracas, Jakarta Timur	YPAC Jakarta
Target Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
Indikator 4.c.1* persentase guru tk, sd, smp, sma, smk, dan smlb yang bersertifikat pendidik									
Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Masyarakat Peduli Kependudukan (MAS PK) di Wilayah Khusus/Pinggiran untuk	Meningkatkan Kualitas SDM Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	orang	100	100	100	900	III	DKI Jakarta	IGI DKI JAKARTA
Program mendukung kegiatan literasi	Meningkatnya presentasi kemampuan literasi	%	100	100	100	900	III	DKI Jakarta	IGI DKI JAKARTA
Progam mendukung Literasi Pendidikan	Meningkatnya pemahaman tentang literasi pendidikan	Pertemuan	100	100	100	900	III	DKI Jakarta	IGI DKI JAKARTA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Tenaga Pendidik	Terselenggaranya kegiatan pelatihan dengan konsep seminar	kegiatan	5	5	5	900	1. Tahun 2018 bersumber dari swadaya (I) 2. Tahun 2019 bersumber dari sponsor (I) 3. Tahun 2020-2022 belum tersedia (III)	5 wilayah kota administrasi dan 1 Kabupaten Kepulauan Seribu	IGI DKI JAKARTA
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta									
Pemberian Tambahan Penghasilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta	Sebanyak 50.000 Pendidikan dan Tendik Sekolah Swasta Meningkat Kesejahteraannya	Orang	50 ribu	50 ribu	50 ribu	- 4.200 (Tahun 2019-2022) - 367,29 (Tahun 2018)	1. Dana Hibah Pemprov DKI (I) untuk Tahun 2018 2. Dana Hibah Pemprov DKI (II) untuk tahun 2019 3. Tahun 2020-2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Peningkatan Kompetensi Guru									
Pelatihan Proses Pembelajaran, Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK, e-learning pembelajaran abad 21	Sebanyak 3.200 orang guru mengikuti pelatihan inovasi pembelajaran berbasis TIK	orang	800	800	800	3.634.576	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Pelatihan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Pendidikan	Sebanyak 3.200 orang kepala sekolah mengikuti pelatihan pengelolaan pendidikan	orang	800	800	800	3.634.576	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Pelatihan Kepemimpinan Organisasi bagi Pengurus PGRI Kota/Cabang/Ranting	Sebanyak 2.400 orang pengurus PGRI kota, cabang dan ranting mengikuti pelatihan kepemimpinan organisasi	orang	600	600	600	2.725.932	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Workshop menulis Best Practice untuk guru TK	Sebanyak 2.000 guru TK mengikuti workshop menulis Best Practice	orang	500	500	500	600.000	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta bersama IGTKI
Pelatihan Menulis secara Online	Sebanyak 5.000 orang guru mengikuti pelatihan menulis secara online	orang	1250	1250	1250	600.000	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Peningkatan Wawasan Kependidikan, Soliditas dan Solidaritas Guru									
Sosialisasi Kode Etik Guru Indonesia dan Mekanisme Penanganan Perkara dan Pengamanan terhadap Profesi Guru	Sebanyak 2.400 orang guru mengikuti sosialisasi kode etik guru Indonesia dan mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru	orang	600	600	600	2.725.932	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Peningkatan Soliditas dan Solidaritas guru melalui kegiatan olahraga dan kesenian	Sebanyak 3.080 orang guru mengikuti kegiatan soliditas dan solidaritas guru melalui kegiatan olahraga dan kesenian	orang	770	770	770	1.966.360	1. Dana Hibah Pemprov DKI Jakarta (II) untuk Tahun 2019 2. Tahun 2020 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Penyelenggaraan Seminar Asosiasi Profesi Keahlian Sejenis dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0	Sebanyak 5.000 orang guru mengikuti seminar asosiasi profesi keahlian sejenis dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0	orang	1250	1250	1250	600.000	Tahun 2019 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Penyelenggaraan Seminar TIK dalam rangka menyambut mata pelajaran informatika	Sebanyak 1.500 guru TIK dapat mengikuti seminar dalam rangka menyambut mata pelajaran informatika	orang	750			450.000	Tahun 2019 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Penyelenggaraan Teacher Writing Camp (TWC) dalam rangka mengajak Guru menulis dan menerbitkan buku sendiri	Penyelenggaraan Teacher Writing Camp (TWC) sebanyak 800 orang dalam rangka mengajak guru menulis dan menerbitkan sendiri untuk guru SD, SMP, SMA, SMK	orang	200	200	200	800.000	Tahun 2019 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Penyelenggaraan Seminar Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	Sebanyak 2.000 orang guru mengikuti seminar Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK	orang	500	500	500	800.000	Tahun 2019 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta
Peningkatan Peran Perempuan PGRI dalam Peningkatan Mutu Pendidikan									
Seminar Peningkatan Kualitas Perempuan PGRI dalam menghadapi Pendidikan 4.0	Sebanyak 2.000 orang guru perempuan PGRI jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK	orang	500	500	500	800.000	Tahun 2019 s.d. 2022 Belum Tersedia	DKI Jakarta	PGRI Provinsi DKI Jakarta

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
Target Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.									
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									
Pembangunan Pipa Distribusi dan Retikulasi di Wilayah Barat dan Utara	Cakupan Pelayanan	%				150.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta - Jakarta Utara, Jakarta Barat	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Penyediaan air bersih Rusunawa	Cakupan Pelayanan	%				15.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Panen Air Hujan									
Panen air hujan		Jumlah rumah tangga	36	50			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA
Indikator 6.1.1.(b) kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.									
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									
SPAM Pesanggrahan dan Ciliwung (950 lps)	Cakupan Pelayanan	%				650.000 (2020)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Optimalisasi DCR4 dan Cikokol untuk Area Cengkareng dan Pegadungan	Cakupan Pelayanan	%				105.000 (2020)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
SPAM Buaran 3 : 3000 lps	Cakupan Pelayanan	%				2.702.000 (2020)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Distribusi SPAM Jatiluhur 1 : 4000 lps	Cakupan Pelayanan	%				8.100.000 (2021)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Indikator 6.1.1.(c) proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Cakupan Pelayanan Menjadi 79,61%									
Pembangunan Pipa Distribusi dan Retikulasi di Wilayah Barat dan Utara	Cakupan Pelayanan	%				150.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta - Jakarta Utara, Jakarta Barat	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Penyediaan air bersih Rusunawa	Cakupan Pelayanan	%				15.000 (2019)	Belum tersedia	DKI Jakarta	Pemprov DKI Jakarta - PAM Jaya
Target Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
Indikator 6.2.1.(c) jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (stbm).									
Studi Kelayakan IPAL Komunal	Jumlah dokumen studi kelayakan IPAL Komunal yang dihasilkan	dokumen	-	-	-	-	GIZ (I)	RPTRA Cambella, Kelurahan Kamal Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Jakarta Berketahanan bekerjasama dengan Dinas SDA dan Bappeda
PHBS berbasis Masyarakat									
PHBS berbasis masyarakat		Jumlah masyarakat yang menjadi kader PHBS	25	25			Yayasan KARINA	Marunda	Platform MURIA
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
Target Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.									
Indikator 8.2.1* laju pertumbuhan pdb per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan pdb riil per orang bekerja per tahun									
Pelatihan dan Pendampingan Calon Tenaga Kerja Muda									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Simulasi Proses Ketenagakerjaan untuk anak SMK	Siswa SMK telah mendapat gambaran lebih nyata mengenai dunia kerja sebelum lulus sekolah. Kemudian, diwajibkannya tersebut dalam kurikulum SMK.	SMK	63	63	63	600	Hibah (III), Swadaya (III)	SMK Jakarta	Komunitas RAKSASA
Pendampingan calon tenaga kerja lulusan SMK dalam proses melamar kerja.	Lulusan berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan rencana masa depannya.	Lulusan SMK	100	200	300	200	Hibah (III), Swadaya (III)	Jakarta	Komunitas RAKSASA
WIRAKAYA INKUBATOR									
WIRAKAYA INKUBATOR - BASIC (PELATIHAN DASAR: MEMULAI USAHA)	PERSENTASE WARGA DKI YANG BERHASIL DILATIH DENGAN TARGET 6,000 WARGA DKI	%	1200	1200	1200	6.000	Belum tersedia	Kantor Pemerintahan DKI	ARMOR INDONESIA (ASOSIASI MENTOR, TRAINER, COACH WIRAUSAHA) PT. INTEGRITAS TRAINING IDEA

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
WIRAKAYA INKUBATOR - SILVER (PELATIHAN LANJUTAN: MENINGKATKAN OMSET)	PERSENTASE WARGA DKI YANG BERHASIL DILATIH DENGAN TARGET 600 WARGA DKI	%	120	120	120	600	Belum tersedia	Kantor Pemerintahan DKI	ARMOR INDONESIA (ASOSIASI MENTOR, TRAINER, COACH WIRAUSAHA) PT. INTEGRITAS TRAINING IDEA
Target Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
Indikator 8.3.1* proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin									
Penyadaran kritis tentang hak - hak pekerja rumahan sebagai pekerja									
Peningkatan kapasitas pekerja rumahan	Pelatihan tentang hak - hak pekerja	Orang	200				- 2018-MAMPU'-pemerintah'-Pemerintah		-MAMPU - pemerintah daerah
Pekerja rumahan dapat mengakses program-program ekonomi usaha									
Peningkatan kapasitas pekerja rumahan dalam program ekonomi produktif	Pelatihan Ekonomi Produktif	Orang	200				- 2018-MAMPU'-pemerintah'-Pemerintah		-MAMPU - pemerintah daerah
Peningkatan kapasitas pekerja rumahan dalam program ekonomi produktif	Pelatihan strategi pemasaran produk UMKM	Orang	200				- Pemerintah daerah - CSR/Pelaku usaha		-MAMPU - pemerintah daerah

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Peningkatan kapasitas pekerja rumahan dalam program ekonomi produktif	Pelatihan usaha produktif	Orang	200				- Pemerintah daerah - CSR/Pelaku usaha		-MAMPU - pemerintah daerah
Indikator 8.3.1.(b) persentase tenaga kerja informal sektor pertanian									
Usaha Pertanian dan Usaha Bersama Simpan Pinjam									
Pertanian Perkotaan		Jumlah pengusaha pertanian perkotaan	51	101			Yayasan KARINA	Marunda dan Jatiasih	Platform MURIA
Usaha Bersama Simpan Pinjam		Jumlah usaha dari pinjaman UBSP	30	50			Yayasan KARINA	Marunda dan Jatiasih	Platform MURIA
Indikator 8.3.1.(c) persentase akses umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan									
Pekerja rumahan dapat mengakses program-program ekonomi usaha									
Pekerja rumahan dapat mengakses program permodalan untuk kelompok usaha bersama	Dapat mengakses program permodalan KUBE	Orang	200				- Pemerintah daerah - CSR/Pelaku usaha		-MAMPU - pemerintah daerah
Pekerja rumahan dapat mengakses program permodalan untuk kelompok usaha bersama	Menjadi kelompok Binaan Pemerintah daerah	Orang	200				- Pemerintah daerah - CSR/Pelaku usaha		-MAMPU - pemerintah daerah
Target Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									

Program/ Kegiatan/ Indikator Kegiatan (1)		Satuan (2)	Target Tahunan (3)			Indikatif Alokasi Anggaran 3 tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan (5)	Lokasi (6)	Instansi Pelaksana (7)
			2020	2021	2022				
Indikator 8.6.1* persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (neet)									
WIRED FOR WORK atau Proyek Kesiapan Kerja Kaum Muda									
Kemitraan dengan perusahaan	Kerja sama dibentuk dengan perusahaan untuk terlibat dalam pengembangan modul, mentoring / pembinaan, menyediakan penempatan kerja untuk pemuda, terutama anak perempuan dan wanita muda	perusahaan	5			2500	Accenture	Jakarta	Yayasan Plan International Indonesia
Pengembangan dan Pemberdayaan Ketrampilan Pemuda	Modul pelatihan digital diuji, dikembangkan dan ditingkatkan dan digunakan oleh institusi pendidikan teknik vokasi	organisasi	5						Yayasan Plan International Indonesia
Memperkuat aliansi dan jaringan untuk lapangan kerja kaum muda	Aliansi sektor swasta dan publik terlibat untuk mempengaruhi kebijakan kerja yang gender transformatif	institusi	8						Yayasan Plan International Indonesia
Kualitas Program dan Inovasi untuk meningkatkan dampak	Platform online untuk alumni berjalan	orang	1000						Yayasan Plan International Indonesia

Lampiran 15. Catatan Perbaikan Laporan KLHS Perubahan RPJMD DKI hasil Pra Validasi

Perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan pada Berita Acara Pra Validasi yang telah ditandatangani oleh 3 pihak yaitu **Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK**, **Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta**, **Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta** khususnya yang tertuang pada point 2, huruf a-e.

No	Berita Acara - Pra Validasi KLHK (1 Maret 2021)	Deskripsi	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1.	2.a Konsep Pertumbuhan Ekonomi dan Urban Resilience dalam Era New Normal	Sebelumnya tentang Era New Normal dan latar belakang perubahan RPJMD telah dibahas Sub bab 1.1. Latar Belakang (hal 1.1).	Perbaikannya telah ditambahkan penegasan dalam bentuk box dan keterangan verbal yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bappeda pada saat proses validasi 1 Maret 2021 Perbaikan terdapat pada Hal 1.2
2	2.b **Penegasan batas ekologis,	Sebelumnya, Wilayah Fungsional berdasarkan pendekatan DAS sudah terdapat pada Lap KLHS saat pra validasi pada Sub bab 4.3 Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan (hal. 4.10) Berdasarkan pendekatan wilayah fungsional DAS, ekosistem DKI Jakarta dipengaruhi lima wilayah DAS yang mencakup lintas wilayah provinsi yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat	Perbaikan yang dilakukan yaitu informasi tentang wilayah fungsional telah direstruktur masuk dalam Sub bab 3.1.1 . Wilayah Administrasi dan Wilayah Fungsional (hal. 3.2)
	2.b **Pada TPB-6, infrastruktur ekologi perlu dielaborasi lebih detil (situ, waduk, danau) dan Pengelolaan DAS terpadu dan Pemanenan air hujan pada bangunan hijau	Sebelumnya sudah ada keterangan tentang program yang relevan dengan infrastruktur ekologi seperti terdapat pada sub bab 7.3.3.	Telah dilakukan perbaikan tambahan dan penegasan pada box untuk kegiatan terkait dan relevan Sub bab 7.3.3 Skenario TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (hal 7.25)
3	2.c Penjelasan mengenai Green Investment	Sebelumnya hanya dijelaskan bahwa green investment dilakukan untuk pengembangan ekonomi dan wisata sesuai tata ruang dan konektivitas wilayah. Telah dilakukan perbaikan dan tambahan informasi tentang geen investment termasuk beberapa kegiatan yang telah dialokasikan pada renstra RPJMD	Dijelaskan dalam box hijau pada halaman 7.23
4	2.d	Sebelumnya telah dijelaskan Sub bab 7.2 Skenario Daya Dukung (hal. 7.14)	Dijelaskan dalam box hijau pada halaman 7.13 -7.16,

No	Berita Acara - Pra Validasi KLHK (1 Maret 2021)	Deskripsi	Perbaikan yang Telah Dilakukan
	Penjelasan ketahanan pangan yang lebih spesifik untuk Provinsi DKI Jakarta	Telah dilakukan penegasan dan tambahan upaya pencapaian ketahan pangan melalui berbagai program dan kegiatan daerah yang terdapat daam Renstra RPJMD.	
5	2.e **Keterkaitan antara 6 muatan dengan indikator SDGs	Sebelumnya sudah diuraikan secara deskriptif pada laporan KLHS pada Sub bab 6.1.1 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Hal 6-5) • Tabel 6.2. Hal yang Menjadi Pertimbangan dalam Prioritasi 17 TPB • Tabel 6.3 Keterkaitan TPB dengan Perencanaan Strategis dan Kondisi 6 Muatan Lingkungan Hidup • Tabel 6.4 10 Isu Prioritas berdasarkan kesepakatan FGD Perumusan Isu Prioritas 12 Agustus 2020	Untuk memperjelas telah diberikan tambahan skema alur dan keterangan tambahan yang diperlukan yang menerangkan lebih jelas keterkaitannya. Skema dan alur penentuan isu strategis terdapat pada • Gambar 6.1 Skema Identifikasi Isu Strategis Pembangungan Berkelanjutan – terdapat pada hal 6.1 • Gambar 6.4 Alur Penentuan Isu PB Prioritas – terdapat pada hal 6.11
	2.e **Target tahunan sampai akhir RPJMD	Sebelumnya terdapat pada lampiran berupa target dan capaian TPB untuk tahun 2018 dan 2019.	Tergambar pada Tabel D1 (sub bab 8.2 Arahan Kebijakan dan Arahan Program untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022, Hal 8.11 serta Lampiran 12.)
6	2.f Melengkapi tabel sesuai lampiran Permendagri No. 7 tahun 2018		
	Tabel D1	Sebelumnya terdapat pada lampiran berupa target dan capaian TPB untuk tahun 2018 dan 2019.	Sudah disesuaikan dengan form D1 lampiran Permendagri dan diimasukan pada tubuh laporan (sub bab 8.2 Arahan Kebijakan dan Arahan Program untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022, Hal 8.11) serta Lampiran 12.
	Tabel D2	Belum ada dan telah dilengkapi	Sudah disesuaikan dengan form D2 lampiran Permendagri dan diimasukan pada tubuh laporan (sub bab 8.2 Arahan Kebijakan dan Arahan Program untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022, Hal 8.14) serta Lampiran 13.
	Tabel D3	Belum ada dan telah dilengkapi	Sudah disesuaikan dengan form D2 lampiran Permendagri dan diimasukan pada tubuh laporan (sub bab 8.2 Arahan Kebijakan dan Arahan Program untuk Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022, Hal 8.25) serta Lampiran 14.
7	Lain lain (disampaikan secara verbal) ✓ Kata Pengantar yang ditandatangani oleh Gubernur	Belum ada dan telah dilengkapi	• Kata Pengantar Telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. • Informasi di awal halaman bahwa KLHS RPJMD ini telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Gubernur dengan dibuktikan berita acara yang

No	Berita Acara - Pra Validasi KLHK (1 Maret 2021)	Deskripsi	Perbaikan yang Telah Dilakukan
			ditempatkan pada hal ke 2 setelah cover.
	✓ Indikator TPB dengan data tidak tersedia	Sebelumnya hanya dijelaskan jumlah indikator TPB yang tidak tersedia data (34 indikator)	Telah dijelaskan lebih lanjut indikator mana saja yang tidak tersedia datanya, ditunjukan melalui box hijau pada sub bab 5.1.1 hingga 5.1.4 Hal 5.3, 5.5, 5.7 – 5.8, 5.10
	✓ Resume jumlah indikator yang perlu perhatian (46 indikator)	Sebeumnya dijabarkan indikator mana saja yang perlu perhatian dalam sub bab 6.1.1.1 Identifikasi Awal Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan.	Perbaikan dilakukan dengan menambahkan resume jumlah indikator pada setiap TPB yang perlu perhatian. Terdapat pada box hijau hal. 6.2
	✓ Catatatan pada Peta	• Peta Pola Ruang pada hal 4.15 tidak terlihat jelas legendanya dan telah diperbaiki • Peta Peta Sebaran Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta pada Hal 4.18 mencantumkan nama perusahaan konsultan pada bagian bawah peta, hal tersebut telah diperbaiki (dihapus)	Peta telah diperbaiki dapat dilihat pada: • Gambar 4.13 Pola Ruang Kota di Provinsi DKI Jakarta pada halaman 4.15 • Gambar 4.15 Peta Sebaran Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta pada halaman 4.18
	✓ Tambahan poin untuk Rekomendasi tindak untuk melakukan upaya pengadaan data atas indikator TPB yang tidak tersedia data (sebanyak 34 indikator)	Belum ada dan telah dilengkapi	Pada Bab 10. Tindak Lanjut (hal 10.1)
	✓ Lampiran	Beberapa keterangan tambahan diperkuat dengan referensi dalam lampiran tambahan.	Penambahan lampiran: • Lampiran 3. Hasil Konsultasi Rancangan Awai Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Periode 2017-2022 • Lampiran 11. Berita Acara Pra Validasi (1 Maret 2021) • Lampiran 12. Target dan Indikator TPB (Form D1) • Lampiran 13. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemerintah (Form D2) • Lampiran 14. Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan Yang Dilaksanakan Non Pemerintah (Form D3)

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA